RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
JALAN PEMUDA NOMOR 249 GEDUNG PEMDA II KLATEN
TELP. 0272-321780

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat tersusun.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas pendidikan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (*quantitative objektives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya dokumen Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023, sehingga dapat dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan pendidikan kedepan.

Klaten, Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Drs. YUNANTA, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 196510011993031005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika	10
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29 32
2.4. Review terhadap RKPD	52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB VI : PENUTUP	
4.1. Catatan Penting	56
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	56
4.3. Rencana Tindak Lanjut	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipasif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Kerja OPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mempedomani Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sementara itu penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja OPD yang merupakan perencanaan tahunan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD dan Forum OPD.

Penyusunan Rencana Kerja OPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Proses perencanaan untuk tahun 2021 ini sangat dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia yaitu adanya pandemi covid-19. Hal ini berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang sudah disusun, sehingga perlu dilakukan perencanaan kembali yang lebih memperhatikan kondisi pandemic covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang mengarah pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Rencana Kerja OPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan Bottom-up, perencanaan Top-Down

Persiapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Orientasi mengenai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Agenda kerja tim
3. Penyiapan data dan informasi
4. Pengolahan data dan informasi

Penyusunan renja perangkat daerah dimulai dengan tahap perumusan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan antara lain:

a) analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
b) evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan tahun berkenaan
c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
54. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
55. Keputusan Bupati Klaten Nomor 821.2.3/0013/29 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Koordinator dan Subkoordinator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun

2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Menjabarkan visi, misi, tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
3. Mengakomodir hasil musrenbang.
4. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2023.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 5 : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021.

Pada Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sudah ditetapkan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pendidikan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2021 dapat dikatakan mencapai target sesuai yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
   1) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD.

B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   a. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   b. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
   c. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   d. Pengadaan Perlengkapan Siswa
   e. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
   f. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
   g. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
   h. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
   i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
   j. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
   k. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
   l. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
9) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a. Pembangunan Laboratorium
   b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   c. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
   d. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
   e. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
   f. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   g. Pengadaan Perlengkapan Siswa
   h. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
   i. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
   j. Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
   k. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   l. Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa SMP
   m. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   n. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
   o. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
10) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
   a. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
   b. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
   c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
   d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
   e. Pengelolaan Dana BOP PAUD
11) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
   a. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan
   b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan

c. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
e. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Di tahun 2021, realisasi program/kegiatan/subkegiatan tidak ada kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

a. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas tidak tercapai 100% karena kendala administrasi terkait bantuan keuangan provinsi untuk sub kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
   - Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan
   - Tersedianya anggaran yang cukup sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
   - Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil.

E. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah

Tidak tercapainya target capaian program renstra perangkat daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada tahun n+1 karena kalau hal ini tidak dilakukan maka target pada Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab di atas
   - Evaluasi pelaksanaan renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai dengan ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan.
   - Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja apabila diketemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra perangkat daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten secara lengkap disajikan pada Lampiran Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Klaten

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1.01	Bidang Urusan Pendidikan									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	20	2	4	4	100	4	1	5
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	10	2	2	2	100	2	0	-
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	10	2	2	2	100	2	0	-

1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	5	1	1	1	100	1	0	-
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	15	1	1	1	100	3	1	7
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100		100	100	100	100	25	25
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	7500	5401	5401	5401	100	5401	5401	72
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	20	4	2	2	100	4	2	10
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100	100	100	100	100	100	20	20
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terekon dan tersusun	20	4	2	2	100	4	1	5
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100	100	100	100	100	100	40	40
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	29000	5700	3150	3150	100	5800	2900	10
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	27	27
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	105	11	11	11	100	21	6	6
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	370	74	74	74	100	74	6	2
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	330	38	38	38	100	42	4	1
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1567	242	300	242	80,667	257	83	5
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1380	250	300	250	83,3	276	50	4
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan	2	0	0	0	#DIV/0!	2	1	50
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	15	15

1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	16	0	0	0	#DIV/0!	0		-
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1	0	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	20	2	2	2	100	4	0	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	100	33	33
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	12	12	12	100	12	6	50
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	80	16	8	8	100	16		-
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	72	63	63	63	100	72	39	54
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	23	23
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	202	250	140	140	100	252	57	28
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	31	8	0	0	#DIV/0!	9	0	-
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	30	5	2	2	100	6	0	-
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI/Paket A	90	88,54	88,54	83,91	94,77	88,7	83,91	93
		APM SMP/MTs/Paket B	72,35	71,14	71,15	72,11	101,35	71,35	72,11	100
		APK PAUD	90	80,6	93,19	79,4	85,20	80,9	79,4	88
		Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,95	99,59	99,75	99,6	99,85	99,65	99,6	100
		Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	90	87,97	88,97	89,79	100,92	88,1	89,79	100

		Persentase SD berakreditasi minimal B	98,9	97,81	98,37	97,84	99,46	97,9	97,84	99
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	88	86,13	95	88,7	93,37	86,5	88,7	101
		Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	37,85	36,7	36,7	36,8	100,27	36,75	33,53	89
		APK SD/MI/Paket A	98	88,54	98,25	91,65	93,28	96,45	91,65	94
		APK SMP/MTs /Paket B	98,9	100,48	95,73	98,62	103,02	98	98,62	100
		APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	2,5	1,3			#DIV/0!	1,5	1,54	62
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	82	67	74	74	100	70	71,36	87
		Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	65	62,3	64	63,5	99,22	63	80,18	123
		Persentase SD terakreditasi	100	99,7	99	99	100	99,7	97,84	98
		Persentase guru SD bersertifikat pendidik	45	39,09	42,5	42	98,82	41	31,96	71
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru dibangun	13	0	0	0	#DIV/0!	3	1	8
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS terbangun	62	1	20	20	100	13	2	3
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun	5	0	7	7	100	1	1	20
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah dibangun	6	7	4	4	100	1	1	17
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas direhab	114	39	9	6	66,67	20	4	4
	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan direhab	38	0	0	0	#DIV/0!	6	0	-
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	100	0	0	0	#DIV/0!	20	3	3
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa sekolah dasar menerima perlengkapan dasar peserta didik	6980	1330	1400	1400	100	1380	345	5
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	56945	56662	56662	56662	100	56945	22778	40

1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	85	64	86	85	98,84	13	3	4
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment	74338	19000	19000	19000	100,00	16330	4082	5
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan	1050	120	200	200	100	150	23	2
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa	40	40	26	26	100	40	5	13
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SD	5	5	5	5	100	5	2	40
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD terakreditasi	738	738	738	738	100	738	185	25
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD penerima BOS	660	660	0	0	#DIV/0!	660	0	-
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SD	738	738	738	738	100	738	185	25
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik	81	76	76	76	100	77	88,01	109
		Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	62	59	59	59	100	60	84,11	136
		Persentase SMP terakreditasi	99	95,73	96	95,73	99,72	96	88,7	90
		Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	55,8	54,58	54,65	54,58	99,87	55	47,80	86
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir dibangun	21	0	0	0	#DIV/0!	5	0	-
1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah dibangun	21	0	0	0	#DIV/0!	5	0	-
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana SMP dibangun	36	10	20	20	100	8	1	3
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung SMP direhab	25	0	0	0	#DIV/0!	5	0	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas direhab	39	11	5	5	100	7	10	26
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru direhab	43	0	0	0	#DIV/0!	7	2	5
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS direhab	43	0	0	0	#DIV/0!	7	2	5

1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SMP direhab	16	7	0	0	#DIV/0!	4	1	6
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium SMP direhab	16	5	4	4	100	4	1	6
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula SMP direhab	15	0	0	0	#DIV/0!	3	0	-
1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir direhab	75	0	0	0	#DIV/0!	15	0	-
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah direhab	41	0	0	0	#DIV/0!	9	0	-
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana dan utilitas SMP direhab	25	13	6	6	100	5	13	52
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan mebel sekolah	49	0	0	0	#DIV/0!	8	2	4
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	50	0	0	0	#DIV/0!	10	0	-
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa SMP menerima perlengkapan dasar peserta didik	7,04	1116	1400	1400	100	1,408	281	3.991
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27,098	26567	26567	26567	100	27,098	12194	45.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	47	4	7	7	100	7	0	-
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa mengikuti ujian/assesment	77644	14859	14859	14859	100	15592	7796	10
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru mengikuti workshop/ pelatihan	579	115	115	115	100	115	17	3
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah jenis lomba siswa	20	20	10	10	100	20	5	25
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah jenis pengembangan karir PTK pada jenjang SMP	5	5	5	5	100	5	3	60
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	116	116	116	116	100	116	23	20
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP penerima BOS	65	0	0	0	#DIV/0!	65	0	-
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelola Dana BOS jenjang SMP	116	116	116	116	100	116	29	25
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik	50	45,7	45,7	45,7	100	46	86,38	173

		Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	2,15	0,08	0,08	0,08	100	0,08	7,4	344
		Persentase PAUD terakreditasi	48,94	40,12	40,12	40,12	100	40,12	33,53	69
		Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	56,8	33,72	33,72	33,72	100	35,72	57,05521472	100
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana dan prasarana PAUD dibangun	5	0	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas/ruang guru direhab	5	0	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	5	0	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah pengadaan mebel PAUD	5	0	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah jenis lomba ajang, kreativitas pembelajaran PAUD	3	312	312	312	100	339	62	2.067
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah pendidik PAUD mengikuti workshop/pelatihan	1500	0	115	115	100	300	60	4
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah jenis pengembangan karir PTK jenjang PAUD	5	5	5	5	100	5	2	40
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	960	150	299	299	100	160	32	3
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD penerima BOP	1150	1134	1086	1036	95,40	1134	227	20
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pengelola Dana BOP PAUD	5734	1134	1036	1036	100	1134	227	4
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik	54	44,44	44,44	44,44	100	46	28,57142857	53
		Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan	71,5	75,51	75,54	75,51	99,96	76	95,69	134
		Persentase PKBM terakreditasi	21	12	12	12	100	12	28,57142857	136
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana direhab/dibangun	5	1	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1	1	0	0	#DIV/0!	1	0	-
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa	4	1	1	1	100	0		-

1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik mengikuti pendidikan nonformal/ kesetaraan	4575	600	620	620	100	914	150	3
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah tutor mengikuti workshop/ pelatihan	1100	0	600	600	100	200	50	5
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga pendidikan nonformal/ kesetaraan mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen	18	18	18	18	100	18	4	22
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM penerima BOP Kesetaraan	10	10	16	16	100	10	2,6	26
1.01.02.2.04.20	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab	2	1	1	1	100	1		-
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	100	98	98	98	100	98,5	100	100
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum mulok	3000	600	600	600	100	600	120	4
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	100	97	97	97	100	98	100	100
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan Kompetensi Dasar muatan lokal	350	70	60	60	100	70	63	18
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru mengikuti penyusunan silabus muatan lokal	500	100	100	100	100	100	55	11
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid SD/MI	1 : 15	1 : 14	01:14	1 : 14	100	1 : 15	1 : 13	97
		Rasio guru/murid SMP/MTs	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	100	1 : 15	1 : 15	100
		Rasio guru/murid PAUD	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9	100	1 : 10	1 : 12	103

1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	95	85	85	85	100	86	86,62233522	91
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	10000	10810	10810	10810	100	10,76	2690	27
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar	5000	4910	4910	4910	100	5000	1000	20
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturan-nya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	98,3	95	95	95	100	97	100	102
1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidik mengikuti pembinaan dalam penggunaan bahasa dan apresiasi sastra	2500	500	500	500	100	500	450	18
1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lomba minat dan budaya baca bahasa Jawa	5	5	5	5	100	5	1	20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Secara rinci, capaian IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 *)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	100	100	100	100	100	100	64,64	100	100	
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	66,12	100	100	
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100	100	100	100	23,14	100	100	

Catatan : 1. Sesuai dengan amanat undang-undang, capaian SPM setiap tahunnya harus 100% dari target yang akan dilayani

2. *) Angka sementara

Bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan berbagai masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, adapun komponen SPM Bidang Pendidikan yaitu (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; (3) Penerima Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini
   Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
b. Pendidikan Dasar
   Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan
   Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021:

Tabel 2.3
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	54.355	44.501	100%	21.446.800
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	173.130	162.419	100%	140.291.521
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	921	859	100%	2.012.455

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Berdasarkan tabel di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini dan yang akan terlayani sebanyak 44.501 orang yang merupakan siswa yang bersekolah di pendidikan anak usia dini.

Target capaian jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan yang akan terlayani sebanyak 162.419 orang yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021:

Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	44.501	21.466.800	44.501	17.644.999,386	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	162.419	140.291.521	162.419	134.021.472,214	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	859	2.012.455	859	1.732.592,36	100%

Sumber : Data Dinas Pendidikan Klaten Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di deskripsikan bahwa jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang terlayani adalah sebanyak 44.501 anak. Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel di atas (54.355), yaitu sebesar 81,87% (Angka Partisipasi Kasar).

Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang terlayani adalah sebanyak 162.419 (SD sebanyak 110.905 anak dan SMP sebanyak 51.454 anak). Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan

tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel (173.130), yaitu sebesar 93,81% (Angka Partisipasi Kasar).

Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang terlayani adalah sebanyak 859 anak (Paket A : 22 anak, Paket B : 156 anak dan Paket C : 681 anak). Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan kesetaraan adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel (921), yaitu sebesar 93,27%. (Angka Partisipasi Kasar).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pendidikan memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Peningkatan sumber daya manusia. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan. Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten antara lain:

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Layanan yang laksanakan oleh Dinas Pendidikan yaitu tersedianya peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Tingkat kinerja layanan sebagai berikut:

1) Penyediaan sarana prasarana sekolah
2) Pemenuhan kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan
3) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan terutama dalam penerapan kurikulum merdeka belajar
4) Penyediaan guru pada sekolah inklusi

Hal kritis terkait pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1) Penyediaan sarana prasarana sekolah pada jenjang SD :
   a) rehabilitasi ruang kelas;
   b) sarana sanitasi,
   c) ruang UKS,
   d) ruang perpustakaan
   e) TIK untuk media pembelajaran

2) Peyediaan sarana prasarana sekolah pada jenjang SMP
   a) rehabilitasi ruang kelas;
   b) ruang UKS;
   c) ruang laboratorium;

d) ruang perpustakaan;
e) TIK untuk media pembelajaran

3) Pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan khususnya pada jenjang SD dimana jumlah guru PNS semakin berkurang karena pensiun yang tak sebanding dengan rekrutmen guru pada beberapa tahun terakhir. Selain itu terdapat kekosongan kepala sekolah di SD Negeri maupun di SMP Negeri

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dengan perangkat kelembagaan pada masing-masing sekolah berupaya dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal, dengan cakupan bidang garap yang cukup luas tersebut tentu menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang antara lain:

1) Belum terpenuhinya jumlah guru sebagaimana jumlah guru yang diharapkan;
2) Sarana dan prasarana yang belum sesuai standar;
3) Implementasi kurikulum merdeka belajar belum optimal sebagaimana yang diharapkan, dimana guru dan siswa dituntut melek IT karena dalam penerapan kurilulum Merdeka Belajar proses belajar mengajar basisnya menggunakan platfom teknologi.

Selain permasalahan yang ada terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD antara lain:

1) masih adanya ego sektoral antar organisasi perangkat daerah dalam berbagi data, khususnya data penduduk yang belum mengikuti wajib belajar 12 tahun (anak tidak sekolah);
2) dengan dihapusnya UPTD Pendidikan komunikasi ke bawah yang mencakup 410 Desa/kelurahan memunculkan kendala pada kecepatan dalam penyelesaian persoalan;
3) dalam rangka memenuhi kekurangan kepala sekolah khususnya jenjang SD, minat guru untuk menjadi kepala sekolah sangat rendah.

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, terhadap capaian program nasional

Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan PD, mempunyai dampak sebagai berikut:

1) Terhadap visi dan misi Kepada Daerah, Dinas Pendidikan melaksanakan misi kelima yaitu “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender”
2) Terhadap capaian program nasional Wajib belajar 12 tahun yang canangkan pemerintah sudah berkontribusi yang signifikan untuk APK SD pada tahun 2021 91,65 % sedangkan untuk APK SMP mencapai 98,62 % hal ini menunjukkan tingkat partisipasi anak dalam bersekolah sudah cukup tinggi. Selain itu anak usia pra sekolah mendapatkan akses dan fasilitasi pendidikan untuk Kabupaten Klaten memastikan bahwa semua Desa sebanyak 401

desa sudah ada lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan APK pada tahun 2018 sebesar 79,40%

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
Tantangan yang dihadapi

Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :

1) Masih terdapat anak putus sekolah
2) Belum semua guru memiliki sertifikat pendidik
3) Beberapa sekolah yang hasil akreditasinya dibawah B.
4) Sekolah belum ada yang memiliki pustakawan sehingga pengelolaanya belum dapat optimal.
5) Tidak semua sekolah SMP memiliki tenaga administrasi sekolah, dan untuk SD dipastikan smua tidak ada tenaga administrasi.
6) Masih rendahnya kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan IT bagi tenaga pendidik.
7) Rendahnya minat belajar pada warga belajar pada program kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C

Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kebutuhan pendidikan yang berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat cukup tinggi
2) Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan dalam mengembangkan model keunggulan sekolah
3) Adanya sekolah adiwiyata untuk prestasi tingkat provinsi maupun nasional
4) Mulai Berkembangnya sekolah inklusi di Klaten

2.3.5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2) Peningkatan akses dan kualitas pada pendidikan kesetaraan sebagai daya ungkit untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten, hal ini selaras dengan program prioritas nasional maupun provinsi.
3) Pembinaan dan pendampingan pada sekolah yang memiliki hasil akreditasi dibawah B
4) Pembinaan pendidik yang mengarah pada kompetensi pendidik sehingga memiliki sertifikat pendidik
5) Pembinaan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan IT dalam pembelajaran.
6) Pengembangan sekolah berbasis keunggulan dan kearifan lokal
7) Pengembangan sekolah inklusi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan.

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan. Reviu ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Dalam review ini terdapat perbedaan antara pagu indikatif rancangan awal dengan pagu indikatif pada renja 2023 yang meliputi pagu indikatifnya Dinas Pendidikan, TK Negeri Pembina, SD Negeri, SMP Negeri dan SKB Cawas.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 pagu indikatif sebesar Rp. 991.446.085,- sedangkan pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 985.614.096.612,- yang terdiri dari :

1. Pagu indikatif Dinas Pendidikan sebesar Rp. 846.161.046.592,-
2. Pagu indikatif TK Negeri Pembina sebesar Rp. 38.949.000,-
3. Pagu indikatif SD Negeri sebesar Rp. 72.720.000.214,-
4. Pagu indikatif SMP Negeri sebesar Rp. 66.390.600.806,-
5. Pagu indikatif SKB Cawas sebesar Rp. 303.500.000,-

Secara lengkap seperti dalam matriks di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**796.286.699.980**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**794.929.716.592**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	**100%**	**305.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	**100%**	**305.000.000**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	35.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	40.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	40.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	30.000.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	45.000.000

1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	155.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	155.000.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	**792.366.699.980**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	**791.009.716.592**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000 orang	792.301.699.980	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6000 orang	790.944.716.592
2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 dokumen	65.000.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100%	**630.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi	100%	**630.000.000**
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	630.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	630.000.000
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100%	**65.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	100%	**65.000.000**
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5800 dokumen	65.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5800 dokumen	65.000.000
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	**1.340.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	**1.340.000.000**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	20.000.000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	540.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 paket	540.000.000

5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	20.000.000
5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 laporan	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 laporan	60.000.000
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	250.000.000
5.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	450.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	450.000.000
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	**220.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	**220.000.000**
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	220.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	220.000.000
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	**890.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	**890.000.000**
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250.000.000
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 laporan	640.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 laporan	640.000.000
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	**470.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	**470.000.000**

8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	225 unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	225 unit	250.000.000
8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	20.000.000
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APK PAUD Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persentase SD berakreditasi minimal B Persentase SMP berakreditasi minimal B	88,95% 71,60% 89,15% 99,75% 88,70% 98% 86,90%	**46.856.900.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APK PAUD Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV Persentase SD berakreditasi minimal B Persentase SMP berakreditasi minimal B	88,95% 71,60% 89,15% 99,75% 88,70% 98% 86,90%	**43.856.895.000**
			Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs /Paket B APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	36,95% 96,90% 98,45% 1,85%				Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs /Paket B APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	36,95% 96,90% 98,45% 1,85%	
9	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	73%	**10.673.131.000**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik	73%	**9.093.126.000**

			Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase SD terakreditasi Persentase guru SD bersertifikat pendidik	63,60% 99,80% 42%				Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase SD terakreditasi Persentase guru SD bersertifikat pendidik	63,60% 99,80% 42%	
9.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	300.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	200.000.000
9.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	320.000.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	216.995.000
9.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 paket	170.000.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-
9.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	265.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	200.000.000
9.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 ruang	1.698.131.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 ruang	1.448.131.000
9.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	450.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	338.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 unit	300.000.000
9.7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 paket	400.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 paket	300.000.000
9.8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400 paket	1.000.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400 paket	900.000.000
9.9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56945 siswa	40.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	56945 siswa	40.000.000
9.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 paket	3.200.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 paket	3.000.000.000
9.11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	738 satuan pendidikan	250.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	738 satuan pendidikan	200.000.000

			Proses Belajar dan Ujian					Proses Belajar dan Ujian		
9.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	738 satuan pendidikan	300.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	738 satuan pendidikan	200.000.000
9.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 siswa	500.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1200 siswa	400.000.000
9.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 orang	450.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 orang	200.000.000
9.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	738 sekolah	450.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	738 sekolah	350.000.000
9.16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 orang	880.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	738 orang	800.000.000
10	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase SMP terakreditasi Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	78% 60,50% 97% 55,30%	**13.489.769.000**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase SMP terakreditasi Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	78% 60,50% 97% 55,30%	**12.594.769.000**

10.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	600.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	300.000.000
10.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 ruang	2.570.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 ruang	2.700.000.000
10.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	1.250.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	1.250.000.000
10.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kabupaten Klaten	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	1.459.769.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kabupaten Klaten	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	1.259.769.000
10.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	39 unit	1.560.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	39 unit	1.560.000.000
10.6	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 paket	500.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 paket	400.000.000
10.7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		500.000.000					
10.8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1408 paket	1.000.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1408 paket	850.000.000
10.9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27098 siswa	150.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	27098 siswa	150.000.000
10.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 paket	1.750.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 paket	1.750.000.000
10.11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15534 siswa	200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	15534 siswa	200.000.000
10.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 satuaan pendidikaan	250.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	116 satuaan pendidikaan	250.000.000
10.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	300 siswa	450.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	300 siswa	450.000.000

			Akademik					Akademik		
10.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 orang	350.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 orang	350.000.000
10.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 sekolah	650.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 sekolah	875.000.000
10.16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116 orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	116 orang	250.000.000
11	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase PAUD terakreditasi Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	46.70% 1,30% 42,32% 55,40%	**20.882.400.000**	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase PAUD terakreditasi Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik	46.70% 1,30% 42,32% 55,40%	**20.982.400.000**
11.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	100.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	100.000.000
11.2	Pengadaan Mebel PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	50.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	50.000.000

11.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	200.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	200.000.000
11.4	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 peserta didik	150.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 peserta didik	150.000.000
11.5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300 satuan pendidikan	90.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	300 satuan pendidikan	90.000.000
11.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 orang	80.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 orang	80.000.000
11.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 lembaga	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 lembaga	200.000.000
11.8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1150 lembaga	19.862.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1150 lembaga	19.862.400.000
11.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1150 orang	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Klaten	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1150 orang	150.000.000
12	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase PKBM terakreditasi	48% 76,50% 16%	**1.811.600.000**	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan Persentase PKBM terakreditasi	48% 76,50% 16%	**1.711.600.000**
12.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	100.000.000

12.2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	50.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa NonFormal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	50.000.000
12.3	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 orang	50.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 orang	50.000.000
12.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 orang	50.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 orang	50.000.000
12.5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 satuan pendidikan	100.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 satuan pendidikan	100.000.000
12.6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 satuan pendidikan	1.361.600.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 satuan pendidikan	1.361.600.000
12.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kabupaten Klaten	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		100.000.000					
III	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**		Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100% 100% 100%	**639.527.000**	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	100% 100% 100%	**639.527.000**
13	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Kabupaten Klaten	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	99%	**494.527.000**	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	99%	**494.527.000**
13.1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	600 orang	494.527.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kabupaten Klaten	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	600 orang	494.527.000

14	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Kabupaten Klaten	Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	98,50%	**145.000.000**	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**		Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal	98,50%	**145.000.000**
14.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kabupaten Klaten	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2 dokumen	70.000.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kabupaten Klaten	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	2 dokumen	70.000.000
14.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kabupaten Klaten	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	100 dokumen	75.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kabupaten Klaten	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	100 dokumen	75.000.000
IV	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio guru/murid PAUD	1 : 15 1 : 15 1 : 10	**8.109.908.000**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio guru/murid PAUD	1 : 15 1 : 15 1 : 10	**6.109.908.000**
15	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	88%	**8.109.908.000**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Kabupaten Klaten	Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam	88%	**6.109.908.000**
15.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	8.009.908.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Non Formal/Kesetaraan	4 Dokumen	6.009.908.000
15.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5000 orang	100.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5000 orang	100.000.000

V	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**		Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100%	**100.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**		Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	100%	**100.000.000**
16	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	97,25%	**100.000.000**	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa	97,25%	**100.000.000**
16.1	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Klaten	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 bahasa	50.000.000	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Klaten	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 bahasa	50.000.000
16.2	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	70 peserta didik	50.000.000	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Klaten	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	70 peserta didik	50.000.000
					851.993.034.980					**846.161.046.592**

TK NEGERI PEMBINA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**38.949.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**38.949.000**
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**13.949.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**13.949.000**

1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TK Negeri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	TK Negeri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TK Negeri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TK Negeri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000
5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TK Negeri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.949.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	TK Negeri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.949.000
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**25.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**25.000.000**
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TK Negeri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TK Negeri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.000.000
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TK Negeri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	17.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	TK Negeri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	17.000.000
					38.949.000					**38.949.000**

SD NEGERI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**72.720.000.214**					**72.720.000.214**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				**72.720.000.214**					**72.720.000.214**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	SD Negeri	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734 satuan pendidikan	72.720.000.214	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	SD Negeri	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	734 satuan pendidikan	72.720.000.214
					72.720.000.214					**72.720.000.214**

SMP NEGERI

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**66.390.600.806**					**66.390.600.806**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				**66.390.600.806**					**66.390.600.806**
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	115 satuan pendidikan	66.390.600.806	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	115 satuan pendidikan	66.390.600.806
					66.390.600.806					**66.390.600.806**

SKB CAWAS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**Target Capaian**	**TOTAL**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**221.631.530**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**221.631.530**
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**25.815.930**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**25.815.930**
1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKB Cawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 unit	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKB Cawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 unit	8.000.000
1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKB Cawas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SKB Cawas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	10.000.000
1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKB Cawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	2.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKB Cawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	2.000.000
1.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKB Cawas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.395.930	Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKB Cawas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.395.930
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	420.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	420.000
2	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**11.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**11.500.000**

2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	11.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	11.500.000
3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**103.685.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**103.685.600**
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.500.000
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.185.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKB Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.185.600
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**80.630.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**80.630.000**
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKB Cawas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKB Cawas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3.950.000
4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	74.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	74.190.000
4.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	2.490.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SKB Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	6 Unit	2.490.000

			yang Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**81.868.470**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**81.868.470**
5	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**15.000.000**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**15.000.000**
5.1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	SKB Cawas	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	24 peserta didik	15.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	SKB Cawas	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	24 peserta didik	15.000.000
6	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**66.868.470**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**66.868.470**
6.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	SKB Cawas	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	248 peserta didik	66.868.470	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	SKB Cawas	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	248 peserta didik	66.868.470
					303.500.000					**303.500.000**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang langsung disampaikan SKPD maupun yang diperoleh dari hasil musyawarah ditingkat desa/kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang usulannya dari masyarakat diharapkan menyentuh pada 3 (tiga) isu pokok program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten yang ada di RPJMD. Hasil usulan program dan kegiatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ditiap-tiap kecamatan direkap oleh Bappeda. Langkah selanjutnya usulan program kegiatan hasil musrenbangcam diaplikasikan dengan rencana kerja masing-masing SKPD. Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) semua SKPD Kabupaten Klaten dilaksanakan di Bapeda yang dijadikan suatu usulan bahan Rencana Kerja (Renja) per SKPD.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	**Program Pengelolaan Pendidikan**				
1.1	**Pengelolaan Sekolah Dasar**				
1.1.1	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SD I KEBON, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	81 meter persegi	
1.1.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SDIT Persada Bayat, Pandanrejo RT 2/RW 2, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Unit	
1.1.3	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SDIT Cahaya Hati, Troketon, Pedan, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 RKB	
1.1.4	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SDIT Ibnu Sina Cawas, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 RKB	
1.1.5	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SDIT Hidayah Klaten, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 RKB	
1.1.6	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	SMPIT Hidayah Klaten, Kab. Klaten	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 RKB	
1.1.7	Pengadaan laptop dan multimedia (LCD/Proyektor/Layar Manual/Wireless) SD	Desa Mayungan RT.02/RW.02, Trunuh, Klaten Selatan, Kab. Klaten	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Buah	
1.1.8	Pembangunan Toilet/MCK SD	SDN Bendan, Manisrenggo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Unit	
1.2	**Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama**				
1.2.1	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Taskombang 014/005, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	

1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	SMP Alam Haki Desa Kalikotes	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 titik	
1.2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	SMPIT Insan Cendikia Trucuk, Kab. Klaten	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 RKB	
1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	SMAIT Hidayah Klaten, Kab. Klaten	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 RKB	
1.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	Ponpes Hidayah Klaten, Kab. Klaten	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 RKB	
1.2.6	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Cokrokembang Desa Daleman Kecamatan Tulung, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.7	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Sangiran Rt. 01 Rw. 03 Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.8	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Tegal Menggah Rw. 02 Desa Katekan, Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.9	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Tambongan Rw. 03 Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.10	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Mulwo Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.11	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Dukuh Karang Desa Rt. 21 Rw. 11 Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	
1.2.12	Pembangunan Sanitasi SMP (drainase/resapan air limbah/kamar mandi/biopori/talud)	Desa Kragilan Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	00 Meter	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Tahun 2023 dimaksudkan untuk menyiapkan landasan menuju Tranformasi Ekonomi Indonesia. Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Sehingga, Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbaagunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskal Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Program kerja dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Klaten	Program Dalam Renja 2023
Meningkatkan Sumber Daya Malusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pengelolaan Kurikulum 3. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengelolaan Bahasan dan Sastra

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023, Tema Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;
2) Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
3) Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;
4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
5) Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana;
6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Tujuan

   Tujuan Rencana Kerja tahun 2023 adalah :

   a. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, dengan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan anak usia dini;
   b. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, dengan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas;
   c. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, dengan tersedianya layanan pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan kesetaraan;
   d. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama
   e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Sasaran

   Sasaran Rencana Kerja pada tahun 2023 adalah :

   a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, dengan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan anak usia dini;
   b. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, dengan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas;
   c. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, dengan tersedianya layanan pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan kesetaraan;
   d. Meningkatnya jumlah kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tujuan dan sasaran Renja 2023 Dinas Pendidikan diarahkan pada pencapaian sasaran target RPJMD 2021-2026 serta Rencana Strategis 2021-2026 Dinas

Pendidikan. Dalam kedua dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sasaran target yang akan dicapai di tahun 2023. Adapun target tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pendidikan tahun adalah :

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Meningkatkan akses dan kualitas Layanan Pendidikan		Angka Harapan Lama Sekolah	13,62 tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	8,72 tahun
	Meningkatnya Akses dan kualitas Layanan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
		Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%

Sesuai amanat undang-undang target capaian SPM sebesar 100% setiap tahunnya.

Selain 3 (tiga) sasaran kinerja tersebut di atas, dalam Renstra Dinas Pendidikan 2021-2026 ada beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam rangka mendukung pencapaian kedua sasaran tersebut. Indikator Kinerja tersebut menjadi indikator program yang ada di Dinas Pendidikan. Berikut indikator kinerja utama Dinas Pendidikan yang terbagi dalam beberapa program.

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD/MI/Paket A	%	**88,95**
	APM SMP/MTs/Paket B	%	**71,6**
	APK PAUD	%	**89,15**
	Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	**99,75**
	Persentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D.IV	%	**88,70**
	Persentase SD berakreditasi minimal B	%	**98,00**
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	**86,9**
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	**36,95**
	APK SD/MI/Paket A	%	**96,9**
	APK SMP/MTs /Paket B	%	**98,45**
	APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	**1,85**
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	%	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	%	100
	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid SD/MI	%	1 : 15
	Rasio guru/murid SMP/MTs	%	1 : 15
	Rasio guru/murid PAUD	%	1 : 10
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dirumuskan dalam program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja beserta pendanaannya. Rumusan program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana capaian target ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten maka dirumuskan lima (5) Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sasta

Dari hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, setelah mempertimbangkan arah prioritas program dan hasil analisis terhadap Rencana Kerja serta hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional serta potensi kemampuan anggaran, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2023 sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2023. Dalam BAB IV ini, berisi Rumusan program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaannya yang dituangkan dalam Lampiran 4.1. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan, TK Negeri Pembina, SD Negeri, SMP Negeri dan SKB Cawas Klaten.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan dinas pendidikan untuk periode satu tahun. Renja ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Klaten yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

5.1. Catatan penting :

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak utamanya stakeholders pendidikan sehingga, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar serta sekolah baik TK, SD, SMP Negeri terikat akan dokumen perencanaan ini.

Dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya stakeholders pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan tahun kedua periode Renstra Tahun 2021-2026. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pendidikan tahun 2023 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2023;
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan, sebelum ditetapkannya Renja ini berpedoman pada Renja periode tahun sebelumnya.
3. Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, maka akan dilakukan review Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023 sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan. Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2023 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pendidikan sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan.

Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023.

Akhirnya komitmen, dan semangat untuk semakin lebih baik berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2023.

Klaten, Juli 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Drs. YUNANTA, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 196510011993031005

LAMPIRAN

TABEL 4.1

MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

URUSAN : PENDIDIKAN

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**985.614.096.612**				**909.983.425.000**
				DINAS PENDIDIKAN				**846.161.046.592**				**804.580.577.000**
01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**794.929.716.592**				**756.082.918.000**
01	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**		**100%**	**305.000.000**				**300.000.000**
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	4 Dokumen	35.000.000	DAU		4 dokumen	20.000.000
01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Pendidikan	2 dokumen	40.000.000	DAU		2 dokumen	40.000.000
01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	30.000.000	DAU		2 dokumen	30.000.000
01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	4 Laporan	45.000.000	DAU		1 dokumen	50.000.000
01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	3 Laporan	155.000.000	DAU		3 dokumen	160.000.000
01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat**		**100%**	**791.009.716.592**				**751.606.398.000**
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan	6000 Orang/bln	790.944.716.592	DAU		7500 orang	751.536.398.000
01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Pendidikan	4 Dokumen	65.000.000	DAU		4 dokumen	70.000.000
01	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**		**100%**	**630.000.000**				**1.120.000.000**
01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Pendidikan	4 Laporan	630.000.000	DAU		4 dokumen	1.120.000.000
01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**		**100%**	**65.000.000**				**75.000.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Pendidikan	5800 Dokume	65.000.000	DAU		5800 dokumen	75.000.000
01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**		**100%**	**1.340.000.000**				**1.225.000.000**
01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Pendidikan	11 Paket	20.000.000			21 paket	20.000.000
01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pendidikan	5 Paket	540.000.000			74 paket	560.000.000
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Pendidikan	4 Paket	20.000.000			72 paket	25.000.000
01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Pendidikan	12 Laporan	60.000.000			315 laporan	70.000.000
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan	300 Laporan	250.000.000			276 laporan	300.000.000
01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	450.000.000			2 dokumen	250.000.000
01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**		**100%**	**220.000.000**				**255.000.000**
01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Pendidikan	2 Unit	220.000.000	DAU		4 unit	255.000.000
01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**		**100%**	**890.000.000**				**950.000.000**
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	250.000.000	DAU		12 Laporan	250.000.000
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	640.000.000	DAU		72 Laporan	700.000.000
01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**		**100%**	**470.000.000**				**551.520.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Pendidikan	225 Unit	250.000.000	DAU		212 unit	255.000.000
01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	6 Unit	20.000.000	DAU		5 unit	264.000.000
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Pendidikan	1 Unit	200.000.000	DAU		6 unit	32.520.000
01	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**		**89,15 %**	**44.381.895.000**				**38.931.866.000**
					APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun		**1.85 %**					
					APK SD/MI/Paket A		**96.9 %**					
					APK SMP/MTs /Paket B		**98.45 %**					
					APM SD/MI/Paket A		**88.95 %**					
					APM SMP/MTs/Paket B		**71,6 %**					
					Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV		**88.7 %**					
					Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		**99.75 %**					
					Persentase SD berakreditasi minimal B		**98 %**					
					Persentase SMP berakreditasi minimal B		**86,9 %**					
					Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B		**36,95 %**					
01	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik**		**73%**	**9.093.126.000**				**9.603.131.000**
					Persentase siswa SD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan		**63,60%**					
					Persentase SD terakreditasi		**99,80%**					
					Persentase guru SD bersertifikat pendidik		**42%**					
01	02	2.00	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SDN di Klaten	2 Ruang	200.000.000	DAU		2 ruang	300.000.000
01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SDN di Klaten	3 Ruang	216.995.000	DAU		13 ruang	320.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	2.02	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SDN di Klaten	1 Unit	200.000.000	DAU		2 unit	265.000.000
01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	SDN di Klaten	15 Ruang	1.448.131.000	DAU, DAK		24 ruang	1.698.131.000
01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SDN di Klaten	6 Ruang	338.000.000	DAU, DAK		8 ruang	450.000.000
01	02	2.02	12	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	SDN di Klaten	4 Unit	300.000.000	DAU		4 unit	300.000.000
01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	SDN di Klaten	20 Paket	300.000.000	DAU		20 paket	400.000.000
01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	SDN di Klaten	1400 Unit	900.000.000	DAU		1400 unit	1.000.000.000
01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	56945 Peserta Didik	40.000.000	DAU		56945 peserta didik	40.000.000
01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	SDN di Klaten	15 Paket	3.000.000.000	DAK, DID		19 paket	2.000.000.000
01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	738 Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU		738 Satuan Pendidikan	250.000.000
01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dinas Pendidikan	738 Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU		738 Satuan Pendidikan	300.000.000
01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	1200 Peserta Didik	400.000.000	DAU		1200 Peserta Didik	500.000.000
01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	300 Orang	200.000.000	DAU		300 Orang	450.000.000
01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Dinas Pendidikan	738 Satuan Pendidikan	350.000.000	DAU		738 Satuan Pendidikan	450.000.000
01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	738 Orang	800.000.000	DAU		738 Satuan Pendidikan	880.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik** **Persentase siswa SMP menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan** **Persentase SMP terakreditasi** **Persentase guru SMP bersertifikat pendidik**		**78%** **60,50%** **97%** **55,30%**	**12.594.769.000**				**9.500.000.000**
01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SMPN di Klaten	3 Unit	300.000.000	DAU		7 unit	700.000.000
01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN di Klaten	35 Ruang	2.700.000.000	DAU, DAK		8 ruang	1.500.000.000
01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN di Klaten	5 Ruang	1.250.000.000	DAK		9 ruang	650.000.000
01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN di Klaten	6 Ruang	1.259.769.000	DAK		3 ruang	250.000.000
01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SMPN di Klaten	39 Unit	1.560.000.000	DAU		5 unit	300.000.000
01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	SMPN di Klaten	5 Paket	400.000.000	DAU		11 paket	1.100.000.000
01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	SMPN di Klaten	1408 Paket	850.000.000	DAU		1,408 paket	900.000.000
01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	27098 Peserta Didik	150.000.000	DAU		27,098 peserta didik	150.000.000
01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	SMPN di Klaten	8 Paket	1.750.000.000	DID		10 paket	1.000.000.000
01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	15534 Peserta Didik	200.000.000	DAU		15488 peserta didik	200.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dinas Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	250.000.000	DAU		116 Satuan Pendidikan	350.000.000
01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	300 Peserta Didik	450.000.000	DAU		300 Peserta Didik	700.000.000
01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	300 Orang	350.000.000	DAU		300 Orang	550.000.000
01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dinas Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	875.000.000	DAU		116 Satuan Pendidikan	850.000.000
01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	116 Orang	250.000.000	DAU		116 Orang	300.000.000
01	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik** **Persentase siswa PAUD menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan** **Persentase PAUD terakreditasi** **Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik**		**46.70%** **1,30%** **42,32%** **55,40%**	**20.982.400.000**				**18.078.230.000**
01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TK Negeri	1 Unit	100.000.000	DAU		1 unit	150.000.000
01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	TK Negeri	1 Unit	100.000.000	DAU		1 unit	-
01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	TK Negeri	1 paket	50.000.000	DAU		1 paket	100.000.000
01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	TK Negeri	2 Paket	200.000.000	DAK		1 paket	190.000.000
01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	300 Peserta Didik	150.000.000	DAU		339 peserta didik	150.000.000
01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dinas Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	90.000.000	DAU		300 Satuan Pendidikan	150.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dinas Pendidikan	50 Orang	80.000.000	DAU		50 Orang	300.000.000
01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	200.000.000	DAU		200 Satuan Pendidikan	300.000.000
01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Lembaga PAUD	1150 Satuan Pendidikan	19.862.400.000	DAK Non Fisik		1150 Satuan	16.538.230.000
01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	1150 orang	150.000.000	DAU		1150 orang	200.000.000
01	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase sarana dan prasarana PKBM dalam kondisi baik** **Persentase siswa PKBM menerima yang menerima pembebasan biaya pendidikaan** **Persentase PKBM terakreditasi**		**48%** **76,50%** **16%**	**1.711.600.000**				**1.750.505.000**
01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	SKB Cawas	1 unit	100.000.000	DAU		1 unit	140.455.000
01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Lembaga PNF	1 paket	50.000.000	DAU		1 paket	150.000.000
01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	600 Peserta Didik	50.000.000	DAU		915 peserta didik	50.000.000
01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dinas Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	50.000.000	DAU		200 Satuan Pendidikan	75.000.000
01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	18 Satuan Pendidikan	100.000.000	DAU		18 Satuan Pendidikan	100.000.000
01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	PKBM	9 Satuan Pendidikan	1.361.600.000	DAK Non Fisik		10 satuan pendidikan	1.235.050.000
01	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD** **Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP** **Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD**		**100%** **100%** **100%**	**639.527.000**				**686.727.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal**		**99%**	**494.527.000**				**541.727.000**
01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Dinas Pendidikan	100 Orang	494.527.000	DAU		600 orang	541.727.000
01	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase lembaga PAUD dan PNF menerapkan kurikulum muatan lokal**		**98,50%**	**145.000.000**				**145.000.000**
01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	70.000.000	DAU		2 Dokumen	70.000.000
01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dinas Pendidikan	100 Dokumen	75.000.000	DAU		100 Dokumen	75.000.000
01	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio guru/murid SD/MI** **Rasio guru/murid SMP/MTs** **Rasio guru/murid PAUD**		**1 : 15** **1 : 15** **1 : 10**	**6.109.908.000**				**8.765.435.000**
01	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase guru pada satuan pendidikan dasar dengan beban mengajar sama dengan atau lebih dari 24 jam**		**88%**	**6.109.908.000**				**8.765.435.000**
01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	4 dokumen	6.009.908.000	DAU		4 dokumen	8.665.435.000
01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	3 laporan	100.000.000	DAU		3 laporan	100.000.000
01	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan**		**100%**	**100.000.000**				**113.631.000**
01	**06**	**2.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang menerapkan pendidikan bahasa dan sastra Jawa**		**97,25%**	**100.000.000**				**113.631.000**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Dinas Pendidikan	1 Bahasa	50.000.000	DAU		1 Bahasa	58.631.000
01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	70 Peserta Didik	50.000.000	DAU		70 Peserta Didik	55.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				TK NEGERI				**38.949.000**				**41.341.000**
01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**38.949.000**				**41.341.000**
01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**		**100%**	**13.949.000**				**16.341.000**
01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	2.000.000	DAU		1 Paket	3.631.000
01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	7.000.000	DAU		1 Paket	7.000.000
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	4.949.000	DAU		1 Paket	5.710.000
01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**			**25.000.000**	DAU			**25.000.000**
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	8.000.000	DAU		12 Laporan	8.000.000
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	17.000.000	DAU		12 Laporan	17.000.000
				SD NEGERI				**72.720.000.214**				**62.344.677.000**
01	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SD/MI/Paket A** **APM SD/MI/Paket A** **Persentase SD berakreditasi minimal B**		**96.9 %** **88.95 %** **98 %**	**72.720.000.214**				**62.344.677.000**
01	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				**72.720.000.214**				**62.344.677.000**
01	02	2.01	29	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	SD Kab Klaten	734 satuan pendidikan	72.720.000.214	DAK Non Fisik		734 satuan pendidikan	62.344.677.000
				SMP NEGERI				**66.390.600.806**				**42.505.830.000**
01	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK SMP/MTs /Paket B** **APM SMP/MTs/Paket B** **Persentase SMP berakreditasi minimal B**		**98.45 %** **71,6 %** **86,9 %**	**66.390.600.806**				**42.505.830.000**
01	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**				**66.390.600.806**				**42.505.830.000**
01	02	2.02	42	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	SD Kab Klaten	115 satuan pendidikan	66.390.600.806	DAK Non Fisik		115 satuan pendidikan	42.505.830.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				SKB CAWAS				**303.500.000**				**511.000.000**
01	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**221.631.530**				**309.342.640**
01	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**25.815.930**				**43.500.000**
01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKB CAWAS	15 paket	8.000.000	DAU		15 paket	10.000.000
01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SKB CAWAS	6 paket	10.000.000	DAU		6 paket	12.000.000
01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	SKB CAWAS	30 paket	2.000.000	DAU		30 paket	6.000.000
01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	SKB CAWAS	5 laporan	5.395.930	DAU		5 laporan	12.500.000
01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKB CAWAS	2 Laporan	420.000	DAU		2 Laporan	3.000.000
01	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**11.500.000**				**40.000.000**
01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	SKB CAWAS	1 unit	11.500.000	DAU			40.000.000
01	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**103.685.600**				**121.502.640**
01	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SKB CAWAS	12 Laporan	24.500.000	DAU		12 Laporan	24.000.000
01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SKB CAWAS	4 Laporan	15.000.000	DAU		4 Laporan	15.000.000
01	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SKB CAWAS	12 Laporan	64.185.600	DAU		12 Laporan	82.502.640
01	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**80.630.000**				**104.340.000**
01	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SKB CAWAS	1 unit	3.950.000	DAU		1 unit	11.850.000
01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SKB CAWAS	1 unit	74.190.000	DAU		1 unit	90.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SKB CAWAS	6 unit	2.490.000	DAU		6 unit	2.490.000
01	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD** **APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun** **APK SD/MI/Paket A** **APK SMP/MTs /Paket B** **APM SD/MI/Paket A** **APM SMP/MTs/Paket B** **Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)**		**89,15 %** **1.85 %** **96.9 %** **98.45 %** **88.95 %** **71,6 %** **99.75 %**	**81.868.470**				**201.657.360**
01	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**15.000.000**				**22.980.000**
01	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	SKB CAWAS	24 peserta didik	15.000.000	DAU		24 peserta didik	22.980.000
01	**02**	**2,04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**				**66.868.470**				**178.677.360**
01	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	SKB CAWAS	248 Peserta didik	66.868.470	DAU		248 Peserta didik	178.677.360

Klaten, Juli 2022
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Klaten

Drs. YUNANTA, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 196510011993031005

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN

Jalan Pemuda Nomor : 313 Tlp (0272) 321053 Klaten 57412

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten termasuk bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam satu tahun ke depan.

Selanjutnya, untuk kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja di tahun berikutnya, diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023, kami sampaikan terimakasih.

Klaten, Juli 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS KESEHATAN

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 39

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 77

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 78

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 78

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 79

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 80

BAB V PENUTUP 81

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipasif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Kerja OPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Rencana Kerja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mempedomani Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Sementara itu penyusunan Rencana Kerja OPD berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Kualitas dokumen Rencana Kerja OPD yang merupakan perencanaan tahunan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD dan Forum OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Proses perencanaan untuk tahun 2021 ini sangat dipengaruhi oleh situasi yang sedang terjadi di seluruh dunia yaitu adanya pandemik covid-19. Hal ini berdampak pada beberapa program dan kegiatan yang sudah disusun, sehingga perlu dilakukan perencanaan kembali yang lebih memperhatikan kondisi pandemic covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang mengarah pada penanganan dan pemulihan pasca pandemic.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Rencana Kerja OPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut : teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan Bottom-up, perencanaan Top-Down.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja OPD perlu mengembangkan hubungan antara peraturan dan perundangan yang terkait sehingga Rencana Kerja OPD sebagai dokumen rencana tahunan mudah diterjemahkan kedalam KUA APBD, RKA OPD dan APBD.

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Kerja OPD khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu :

1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
26) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

30) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
31) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
32) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);
36) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
37) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 288);
41) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
44) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
45) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
47) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
48) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

49) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
50) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
51) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
52) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
53) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
54) Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 8);
55) Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021. Nomor 32) ;
56) Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 42);
57) Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 56);
58) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksud untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Menjabarkan visi, misi, tugas, pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten .
3. Mengakomodir hasil musrenbang.
4. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2023.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

   Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

   Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

   Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

   Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

   a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

3. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

   Pada bab ini berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

4. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

   Pada bab ini berisikan perumusan program dan kegiatan yang disertai target kinerja dan pendanaannya.

5. BAB V : PENUTUP

   Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengemban Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud Komitmen Dinas Kesehatan dalam mengemban fungsi di atas, maka setiap awal tahun Dinas Kesehatan membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja. Dengan penetapan kinerja tersebut diharapkan tolok ukur pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksanakan akan dapat dinilai secara akuntabel.

Pada Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sudah ditetapkan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021 dapat dikatakan mencapai target sesuai yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Pembangunan Puskesmas

- Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanaan Kesehatan
- Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
   - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
   - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
   - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
   - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
   - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
   - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
      - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
      - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
    - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
        - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    f. Peningkatan Pelayanan BLUD
        - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
        - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
        - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
        - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
        - Pengadaan Obat, Vaksin
        - Pengadaan Bahan Habis Pakai
    b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
        - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
        - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
        - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
      - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   a. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
      - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk MakananMinuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Pengadaan Mebel
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
      - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
      - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
      - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
      - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
      - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
      - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
      - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   - Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
      - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
   b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
   - Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 di tahun 2021.
   - Adanya *refocusing* anggaran kegiatan
   - Adanya peraturan/kebijakan yang membatasi pencapaian target di kegiatan didanai dari DAK Non Fisik
   - Ketidaktepatan penentuan target kinerja.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
   - Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan
   - Tersedianya anggaran yang cukup sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
   - Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan :
   - Adanya beberapa kegiatan yang di luar perencanaan tetapi harus dilaksanakan
   - Ketidaktepatan dalam penentuan target kinerja.

E. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah

Tidak tercapainya target capaian program renstra perangkat daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada tahun n+1 karena kalau hal ini tidak dilakukan maka target pada Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab di atas

- Evaluasi pelaksanaan renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai dengan ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan.
- Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja apabila diketemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dan capaian Renstra perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten secara lengkap disajikan pada Lampiran Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Klaten

OPD: Dinas Kesehatan

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Presentase urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditunjang**			100 %					
1.02.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu								
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gajinya			101 orang	101 orang	100 %			
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah			100 kali	47 kali	47 %			
1.02.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu			100 %					
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN terbina administrasi kepegawaian			101 orang	101 orang	100 orang			
1.02.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu			100					
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan			10 jenis	10 jenis	100 %			
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK tersedia			15 jenis	15 jenis	100 %			
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan			3 jenis	3 jenis	100 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia			600 paket	2168 paket	2168 %			
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah			100 kali	27 kali	27 %			
1.02.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			100 %					
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur terbeli			73 unit	178 unit	244 %			
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli			26 unit	56 unit	215 %			
1.02.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu								
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terlkirim			5000	9308	186 %			
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayar			4 jenis	4 jenis	100 %			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL Administrasi Keuangan terbayarkan			71 orang	71 orang	100 %			
		Jumlah THL kebersihan kantor			37 orang	37 orang	100 %			
1.02.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara***			***100***					
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah THL pengemudi kantor			8 orang	8 orang	100 %			
		Jumlah kegiatan operasional			50 kali	50 kali	100 %			
		Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara			47 unit	8 unit	17 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja			3 unit	3 unit	100 %			
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara			3 unit	3 unit	100 %			
		Jumlah gedung PSC 119 yang terbangun			1 unit	0 unit	0 %			
		Jumlah lingkungan kantor tertata			4 paket	4 paket	100 %			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah THL pengamanan kantor			47 orang	47 orang	100 %			
1.02.01.2.10	***Peningkatan Pelayanan BLUD***	***Persentase layanan BLUD sesuai SOP***			**100 %**					
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah kegiatan pembinaan BLUD Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSD Bagas Waras			34 kegiatan	34 kegiatan	100 %			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prosentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat terpenuhi**			**100%**					
1.02.02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara***								
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas terbangun			3 unit	1 unit	33 %			
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung puskesmas pembantu yang direhab			7 unit	7 unit	100 %			
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan			5 unit	5 unit	100 %			
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prasarana yang diadakan			4 unit	2 unit	50 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Paket Alatkesehatan terbeli			20 paket	4 paket	20 %			
		Posbindu Kit terbeli			73 paket	71 paket	97 %			
		Jumlah alat kesehatan lab Kesda terbeli			1 unit	1 unit	100 %			
		Penyediaan peralatan PONED			20 unit	20 unit	100 %			
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis peralatan kesehatan yang dikalibrasi			9 jenis	8 jenis	89 %			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah puskesmas yang sudah tercapai pengelolaan obat yang terintegrasi dan efektif			34 puskesmas	34 puskesmas	100 %			
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengelolaan manajemen obat			34 puskesmas	34 puskesmas	100 %			
		Jumlah pengadaan obat			1 paket	1 paket	100 %			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah puskesmas yang sudah tercapai pengelolaan bahan medis habis pakai yang terintegrasi dan efektif			34 puskesmas	34 puskesmas	100 %			
		Jumlah bahan medis habis pakai pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang diadakan			23075 paket	23075 paket	100 %			
		Jumlah bahan medis habis pakai yang diadakan			1 paket	1 paket	100 %			
		Jumlah Jenis peralatan kesehatan yang dikalibrasi			9 jenis	0 jenis	0 jenis			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***									
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pada ibu hamil untuk penurunan AKI dan AKB			30 kegiatan	30 kegiatan	100 %			
		Jumlah buku KIA tercetak			400 buku	0 buku	0 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan ibu hamil			5 kegiatan	5 kegiatan	100 %			
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kegiatan pada ibu bersalin untuk penurunan AKI dan AKB			58 kegiatan	58 kegiatan	100 %			
		Jumlah bumil miskin non PBI			400 pasien	329 pasien	82,25 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan ibu bersalin			5 kegiatan	6 kegiatan	120 kegiatan			
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kegiatan pada balita untuk penurunan AKI AKB			42 kegiatan	16 kegiatan	38 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan balita			5 kegiatan	2 kegiatan	40 %			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan pada usia produktif untuk penurunan AKI dan AKB			15 kegiatan	15 kegiatan	100 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			40 kegiatan	4 kegiatan	10 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan pada usia produktif			5 kegiatan	2 kegiatan	40 %			
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan pada usia lanjut			4 kegiatan	4 kegiatan	100 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan pada usia lanjut			5 kegiatan	2 kegiatan	40 %			
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah kegiatan pengelolan pelayanan kesehatan penderita hipertensi			40 kegiatan	1 kegiatan	2,5 kegiatan			
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			40 kegiatan	0 kegiatan	0 %			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			40 kegiatan	4 kegiatan	10 %			
		Jumlah tenaga kesehatan terlatih tatalaksana penyakit akibat gangguan jiwa			20 tenaga kesehatan	0 tenaga kesehatan	0 %			
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa			24 kegiatan	1 kegiatan	4,2 %			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit tuberkulosis			60 kegiatan	33 kegiatan	55 kegiatan			
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit HIV			60 kegiatan	11 kegiatan	18 %			
		Jumlah tenaga kesehatan terlatih konselor HIV			30 tenaga kesehatan	0 tenaga kesehatan	0 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah organisasi yang diberikan bantuan hibah			1 organisasi	1 organisasi	100 %			
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah mobil operasional cluster kesehatan			1 unit	0 unit	0 %			
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada kondisi KLB			24 kegiatan	0 kegiatan	0 %			
		Jumlah kegiatan penanggulangan KLB bencana			100 kegiatan	116 kegiatan	116 %			
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana			40 kegiatan	27 kegiatan	68 %			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan gizi keluarga dan perorangan			73 kegiatan	40 kegiatan	55 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan dan perbaikan gizi pada masyarakat, kelompok, profesi dan institusi			70 kegiatan	2 kegiatan	2,9 %			
		Jumlah kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting			9 kegiatan	19 kegiatan	211 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan gizi masyarakat			8 kegiatan	25 kegiatan	313 %			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah paket kegiatan PPPK di Kabupaten Klaten			60 paket	0 paket	0 %			
		Jumlah Puskesmas dan Dinas terlaksana kegiatan kesehatan kerja dan olahraga			35 lokasi	35 lokasi	100 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah kegiatan peningkatan kesehatan kerja dan olahraga			12 kegiatan	12 kegiatan	100 %			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kecamatan STBM			15 kecamatan	7 kecamatan	47 %			
		Jumlah Puskesmas dan Desa terbina kesehatan lingkungan			100 lokasi	100 lokasi	100 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan			12 kegiatan	12 kegiatan	100 %			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan			100 kali	60 kali	60 %			
		Jumlah UKBM yang terbina meliputi SBH, Posyandu, Poskestren, Posbindu			51 UKBM	5 UKBM	10 %			
		Jumlah kegiatan promosi kesehatan			24 kegiatan	28 kegiatan	117 %			
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure			10 puskesmas	18 puskesmas	180 %			
		Jumlah pembinaan kesehatan tradisional akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya			8 kegiatan	16 kegiatan	200 %			
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan surveilans, imunisasi dan haji			120 kegiatan	60 kegiatan	50 %			
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah fasyankes (balai pengobatan dan labkes) mendapatkan bimbingan teknis			40 fasyankes	84 fasyankes	210 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah puskesmas menyusun dokumen perencanaan dan penilaian kinerja			34 puskesmas	34 puskesmas	100 %			
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang terbina			12 rumah sakit	12 rumah sakit	100 %			
		Jumlah organisasi yang diberikan bantuan hibah			1 organisasi	1 organisasi	100 %			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular			40 kegiatan	62 kegiatan	155 %			
		Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular			24 kegiatan	25 kegiatan	104 %			
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin non PBI pusat			76.750 orang	138.268 orang	180 %			
		Jumlah peserta jaminan pelayanan kesehatan bagi PGOT, penghuni lapas/rutan, penghuni panti sosial, KLB/wabah, krisis kesehatan, KIPI dan gizi buruk			100 orang	136 orang	136 %			
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional			150 kali	101 kali	67 %			
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah pasien terlayani			3375 pasien	3701 pasien	110 %			
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terdampingi menuju akreditasi			11 puskesmas	34 puskesmas	309 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah puskesmas yang dilakukan survey akreditasi/penilaian akreditasi			16 puskesmas	0 puskesmas	0 %			
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah			60 kegiatan	16 kegiatan	27 %			
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani			400 kasus	119 kasus	30 %			
1.02.02.2.03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	***Persentase Sistem Informasi Kesehatan***								
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Tercetak			120 buku	81 buku	68 %			
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Dinas mengelola informasi kesehatan			35 unit	35 unit	100 %			
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			2 unit	10 unit	500 %			
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**								
1.02.03.2.02	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK***								
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar								
		Jumlah dokumen profil SDMK dan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK			2 dokumen	2 dokumen	100 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.03.2.03	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***									
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kategori nakes terseleksi			9 kategori	0 kategori	0 %			
		Jumlah nakes meningkat kapasitasnya			40 orang	40 orang	100 %			
		Jumlah pengelola kefarmasian dan pengawas pangan yang ditingkatkan kompetensinya			110 orang	0 orang	0 %			
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Prosentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman**			**90 %**					
1.02.04.2.01	***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***									
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah fasilitas terawasi			60 fasilitas	52 fasilitas	86,7 %			
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah izin bidang kesehatan			2000 buah	2023 buah	101 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.04.2.03	***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***									
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan dan tindak lanjut pengawasan sertifikat			120 peserta	120 peserta	100 %			
					50 sarana	50 sarana	100 %			
					2	2	100			
1.02.04.2.04	***Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)***									
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM terawasi			50 Lokasi	20 Lokasi	40%	40 Lokasi	60 Lokasi	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.04.2.05	***Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan***									
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah sekolah terawasi			68 sekolah	0 sekolah	0 %			
1.02.04.2.06	***Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga***									
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah industri rumah tangga terawasi			115 lokasi	100 lokasi	87 %			
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Prosentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**			**100 %**					
1.02.05.2.01	***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***									
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat			50 kali	53 kali	106 %			
1.02.05.2.02	***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***									
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Persentase rumah tangga			95 %	96 %	101 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	sehat								
1.02.05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***									
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah petugas promkes dan tenaga kesehatan lainnya meningkat ketrampilan			245 orang	0 orang	0%			

OPD: **RSD Bagas Waras**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang Ditunjang**			**100 %**	**90 %**	**90 %**			
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan**			**7 buah**	**7 buah**	**100 %**			
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan			7 buah	7 buah	100 %			
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangannya**			**91 orang**	**91 orang**	**100 %**			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayar gaji dan tunjangannya			91 orang	91 orang	100%			
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah tenaga pengamanan kantor tersedia**			**35 %**	**35 %**	**100 %**			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor tersedia			35 orang	35 orang	100 %			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah tenaga pengamanan kantor tersedia**			**32 orang**	**32 orang**	**100%**			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga pengamanan kantor tersedia			32 orang	32 orang	100 %			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase pelayanan kesehatan**			**100 %**	**100%**	**100 %**			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bed Occupancy Rate (BOR)			70 %	52,53 %	75 %			
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			**100 %**	**100 %**	**100 %**			
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**			**100 %**	**100 %**	**100 %**			
1.02.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan tersedia			20 jenis	20 jenis	100 %			
1.02.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah Obat, vaksin tersedia								
1.0202.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai RS tersedia			14 jenis	14 jenis	100 %			
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**			**100**	**100**	**100**			
1.0202.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kegiatan penangan Covid-19			3 kegiatan	3 kegiatan	100 %			
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**			**90 %**	**100 %**	**100%**			

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	MANUSIA KESEHATAN	**Manusia Kesehatan**								
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan**			**100 %**	**100 %**	**100 %**			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga kesehatan non PNS terbayar insentif Covid-19			123 orang	**123** orang	**100 %**			

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan target penetapan indikator kinerja kesehatan selama kurun waktu lima tahun. Selain Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja OPD, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu Peraturan menteri kesehatan No 741 tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. SPM berdasarkan Permenkes ini diterapkan sampai dengan Tahun 2016 bersamaan dengan terbitnya Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang digunakan mulai Tahun 2017 berlaku sampai Tahun 2019 yang diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana urusan wajib bidang kesehatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di Kabupaten Klaten. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Angka Kematian Bayi per 1000 KH		√	10,01	10,00	9,98	9,96	10,54	10,95	9,98	9,96	
	Angka kematian Balita Per 1000 KH		√	1,59	1,57	1,54	1,51	1,56	2.3	1,54	1,51	
	Kasus kematian Ibu		√	12	14	13	12	45	5	13	12	
	Prevalensi gizi buruk (BB/U)		√	0,7%				0,51%				
	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat		√		0,26	0,262	0,265		0,26	0,26	0,27	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
	Prosentase urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditunjang			100 %				100 %	50%			
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	100 %	100%	50%	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
	Prosentase Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat terpenuhi			100				77				
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	√		100 %	100 %	100 %	100 %	95,24 %	41,68%	100%	100%	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	√		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	38,21%	100%	100%	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	√		100 %	100 %	100 %	100 %	98,21 %	35,49 %	100%	100%	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	90,66 %	43,72 %	100%	100%	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	58,28 %	0 %	100%	100%	
	Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	79,05 %	39 %	100%	100%	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	93,41 %	28,17 %	100%	100%	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	*58,08 %	18 %	100%	100%	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	*83,80 %	38 %	100%	100%	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	*91,19 %	40,23 %	100%	100%	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	*24,42 %	15,73 %	100%	100%	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	√		100 %	100 %	100 %	100 %	*87,75 %	96,2 %	100%	100%	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita				11,3 %	11 %	10,7 %		9,42	11%	10,7 %	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Cakupan STBM				70 %	90 %	100 %		59,1 %	90%	100%	
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			100 %	100 %	100 %	100 %		20 %	100%	100%	
	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam			100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100%	100%	
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani				12 %	15 %	20 %		0,039 %	15%	20%	
	Penderita diare yang ditangani				6 %	7 %	8 %		9,84 %	7%	8%	
	Angka Kejadian HIV				0,19 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,035	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk				35 /100.000 penduduk	40 /100.000 penduduk	45 /100.000 penduduk		108,5 per 100.000 penduduk	40 /100.000 penduduk	45 /100.000 penduduk	
	Angka kejadian Malaria			< 1 /100.000	< 1 /100.000	< 1 /100.000	< 1 /100.000		0	< 1 /100.000	< 1 /100.000	
	Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)			10 %	10 %	10 %	10 %		100%	10%	10%	
	Angka Kejadian DBD			20 /100.000	20 /100.000	20 /100.000	20 /100.000		17,69 %	20 /100.000	20 /100.000	
	Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)			95 %	95 %	95 %	95 %		95,14 %	95%	95%	
	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya			100 %	100 %	100 %	100 %		97 %	100%	100%	
	Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	√		100 %	100 %	100 %	100 %	66,67 %	0 %	100%	100%	
	Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin			100 %	100 %	100 %	100 %		30%	100%	100%	
	Persentase pelayanan lab klinis dan lab air			100 %	100 %	100 %	100 %		32,74 %	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (TW 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Persentase Sistem Informasi Kesehatan				60 %	70 %	80 %		35 %	70%	80%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan											
	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan			90				99				
	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar				100%	100%	100%		90%	92%	95%	
	Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar				90%	92%	95%					
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman											
	Prosentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			90				92				
	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan				50%	50%	50%		38%	50%	50%	
	Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan				50%	50%	50%		45%	50%	50%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan											
	Cakupan Desa Siaga Aktif				62 %	62 %	64%		18,60	62 %	64%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja kesehatan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) tahun 2021. Dari Indikator Kinerja Kunci dapat diketahui bahwa Angka Kematian Balita dan Prevalensi Gizi Buruk di tahun 2021 mengalami penurunan sehingga target indicator tercapai. Untuk capaian kinerja yang tidak tercapai

adalah Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, hal itu karena dipengaruhi oleh pandemic covid-19.

Selain capaian kinerja kesehatan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) tahun 2021 di atas, terdapat juga capaian kinerja kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Pada capaian kinerja kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) di atas, terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih rendah, yaitu Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang masih di bawah 60%. Selain itu Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar masih dibawah 50 %. Tingkat capaian indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang masih rendah disebabkan oleh belum semua masyarakat yang beresiko DM/hipertensi sadar dan bersedia melakukan pemeriksaan, belum semua penderita DM/hipertensi bersedia melakukan pengobatan rutin, masih banyak masyarakat yang berobat di klinik atau dokter praktek swasta dan datanya tidak terlaporkan ke puskesmas/ RS dan sasaran masih menggunakan data proyeksi yang sudah ditentukan dari kementerian dan bukan sasaran riil. Sedangkan rendahnya pelayanan Kesehatan terhadap anak usia Pendidikan dasar disebabkan oleh kegiatan pembelajaran yang belum dilakukan secara tatap muka karena pandemic covid-19. Sedangkan penyebab tingkat capaian indikator pelayanan kesehatan orang dengan TB masih rendah yaitu dikarenakan terduga sudah diberi pot dahak tapi tidak dikembalikan, belum dilakukan skrening kepada masyarakat umum secara berkala, pengetahuan masyarakat tentang tanda gejala TBC masih kurang sehingga tidak periksa ke pelayanan kesehatan jika mengalami gejala, pelacakan kontak belum optimal, belum optimalnya jejaring TBC di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan jumlah sasaran terduga TBC berdasarkan perkiraan temuan kasus, sementara jumlah kasus yang ditemukan lebih rendah dari target temuan.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi program, permasalahan program kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang perlu mendapat perhatian untuk dapat ditindaklanjuti dalam rencana program dan kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan/ Kebijakan	Program	Kegiatan	Keterangan
1	Masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan balita terutama karena adanya covid-19	Koordinasi, Konvergensi lintas program, lintas sektor, advokasi dengan pemangku kebijakan, Konsultasi Tingkat Propinsi	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dengan adanya Covid-19 di tahun 2020, pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu bersalin menjadi kurang maksimal karena adanya physical distancing. Persalinan di rumah sakit juga terkendala karena covid. Hal ini membuat angka kematian ibu , bayi dan balita menjadi tinggi.
2	Masih tingginya stunting dan gizi buruk	Koordinasi, Konvergensi lintas program, lintas sektor, advokasi dengan pemangku kebijakan, Konsultasi Tingkat Propinsi	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Karena adanya covid-19 tingkat perekonomian masyarakat juga semakin menurun sehingga mengakibatkan tutunnya pemenuhan gizi untuk bayi dan balita. Selain itu kegiatan pemberian PMT dan posyandu juga menjadi terhambat yg berimbas pada efektifitas kegiatan pencegahan dan penanganan

					stunting
3	Belum semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan	Koordinasi, Konvergensi lintas program, lintas sektor, advokasi dengan pemangku kebijakan, Konsultasi Tingkat Propinsi	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan
4	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan	Evaluasi pelayanan puskesmas dan rumah sakit, melengkapi sarpras RS terutama RSUD	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	belum maksimalnya kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
5	Belum maksimalnya pencapaian SPM kesehatan	Koordinasi, Konvergensi lintas program, lintas sektor, advokasi dengan pemangku kebijakan	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
6	Kurangnya SDM kesehatan baik kuantitas maupun kualitas	Evaluasi SDM Kesehatan disemua lini fasilitas pelayanan kesehatan	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Berkurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi SDM Kesehatan karena terkendala adanya covid-19

Disamping permasalahan, hambatan dan rencana tindak lanjut sebagai isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di atas, ada beberapa dampaknya terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta ada beberapa tantangan dan peluang dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah.

1) Dampaknya Terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Berdampak Pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

a) Kinerja Dinas Kesehatan tidak akan tercapai maksimal karena adanya kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai 100% sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi misi (kepala daerah).
b) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan operasional dan pengembangan pelayanan kesehatan.

2) Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

- Kerjasama dan dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.
- Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit.
- Ketersedian Sumber Daya Kesehatan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana kesehatan serta distribusi penempatan yang belum optimal.
- Belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja.
- Belum optimalnya pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan.
- Penanganan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

b. Peluang

- Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
- Adanya dukungan dari Pemerintah melalui program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu Jamkesmas, Jamkesprop dan Jamkesda.
- Adanya dukungan data dan informasi baik dari Dinas Kesehatan maupun dari instansi terkait.
- Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan Tekonologi Informasi Kesehatan
- Adanya bantuan dari luar negeri untuk peningkatan pembangunan kesehatan melalui lembaga donor.
- Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang kesehatan yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat.

3). Beberapa target kinerja Dinas Kesehatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD belum tercapai sesuai yang direncanakan. Namun bukan berarti hal ini merupakan ketidakberhasilan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan terus berupaya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dan terus mendapat perhatian diantaranya adalah masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita serta masih tingginya kasus stunting dan gizi buruk pada balita. Permasalahan lain yang sedang dihadapi di tahun ini yaitu adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut mengharuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten memformulasikan program dan kegiatan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang dapat meminimalisir dampak permasalahan yang muncul. Beberapa hal yang dilaksanakan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas program baik instansi vertikal maupun horisontal yaitu instansi-instasni di Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kesehatan RI serta lembaga-lembaga lain yang terkait.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun 2023. Berdasarkan hasil telaah terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang perlu untuk ditambahkan antara lain yaitu:

a. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya **(Dinas Kesehatan)**
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga **(Dinas Kesehatan)**
c. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis **(Puskesmas)**
d. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) **(Puskesmas)**

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.4 Reviu terhadap Ranwal RKPD dibawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**224.162.466.000**					**214.437.465.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**145.906.130.604**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**146.196.891.281**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**120.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**161.000.000**	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	40.000.000	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	4 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	2 dokumen	40.000.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	30.000.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	15.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	36.000.000	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pembayaran gaji,**	**100 %**	**140.793.362.005**	**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pembayaran gaji,**	**100 %**	**140.799.402.557**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Daerah		**tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			**Daerah**		**tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1357 orang	140.688.362.005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1.357 orang	140.688.361.357	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	24.000.000	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	125 dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 dokumen	62.041.200	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100 %**	**200.449.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100 %**	**244.642.000**	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	101 unit	200.449.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	2 Unit	244.642.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
								Disiplin Pegawai			
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**352.032.220**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**481.734.000**	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	22.528.520	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	22.528.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 unit	50.567.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	52.014.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	130.000 eksemplar	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	130.000 paket	45.000.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	600 kali	70.494.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	80 laporan	75.150.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	163.442.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	287.042.000	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100 %**	**1.115.970.875**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100 %**	**1.146.606.924**	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Mebel yang diadakan	75 unit	55.226.000	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	75 unit	100.000.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	756.238.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	713.576.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	304.506.875	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	333.030.924	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100 %**	**2.654.226.413**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100 %**	**2.632.185.800**	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Surat Terkirim	6.000 eksemplar	12.660.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000 laporan	12.660.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	410.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	380.000.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	163 orang	2.231.566.413	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.239.525.800	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**620.089.591**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**696.320.000**	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	47 unit	152.294.591	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 unit	209.025.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 unit	99.260.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 unit	118.760.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Mebel terpelihara	15 unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	5.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	22 unit	43.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	43,450,000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	320.085.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	320.085.000	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase layanan BLUD sesuai SOP**	**100 %**	**50.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase layanan BLUD sesuai SOP**	**100 %**	**35.000.000**	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34 layanan	50.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 unit kerja	35.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil**	**100 %**	**77.181.999.396**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil**	**100 %**	**67.004.497.719**	
		Dinas Kesehatan	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar**	**100 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Dinas Kesehatan	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC**	**100 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			sesuai standar					sesuai standar			
		Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %			Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %		
		Dinas Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	11 %			Dinas Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	11 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan STBM	90 %			Dinas Kesehatan	Cakupan STBM	90 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %			Dinas Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %			Dinas Kesehatan	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	15 %			Dinas Kesehatan	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	15 %		
		Dinas Kesehatan	Penderita diare yang ditangani	7 %			Dinas Kesehatan	Penderita diare yang ditangani	7 %		
		Dinas Kesehatan	Angka Kejadian HIV	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV			Dinas Kesehatan	Angka Kejadian HIV	0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		
		Dinas Kesehatan	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	40 /100.000 penduduk			Dinas Kesehatan	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	40 /100.000 penduduk		
		Dinas	Angka kejadian	< 1 /100.000			Dinas	Angka kejadian	< 1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Kesehatan	**Malaria**				**Kesehatan**	**Malaria**	**/100.000**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)**	**10 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)**	**10 %**		
		Dinas Kesehatan	**Angka Kejadian DBD**	**20 /100.000**			**Dinas Kesehatan**	**Angka Kejadian DBD**	**20 /100.000**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)**	**95 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)**	**95 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase pelayanan lab klinis dan lab air**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase pelayanan lab klinis dan lab air**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan**	**70 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan**	**70 %**		
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara**	**100 %**	**22.119.211.812**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara**	**100 %**	**22.619.211.812**	
1.02.02.2.01.	Pembangunan	Dinas	Jumlah gedung	1 unit	3.500.000.000	Pembangunan	Dinas	Jumlah Pusat	1 unit	3.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
02	Puskesmas	Kesehatan	puskesmas terbangun			Puskesmas	Kesehatan	Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dikembangkan kelasnya	1 unit	2.000.000.000	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa	1 unit	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah gedung puskesmas terehab	5 unit	250.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	***0***	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas pembantu terehab	3 unit	750.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 unit	1.500.000.000	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasyankes tersedia	2 unit	2.000.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	7 unit	2.181.081.812	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 unit	2.181.081.812	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan tersedia	20 unit	1.212.878.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 unit	1.212.878.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	30 unit	200.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Cente	400 unit	200.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas tersedia obat dan vaksin	34 puskesmas	4.243.881.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	34 paket	4.046.577.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas tersedia bahan habis pakai	34 puskesmas	5.685.161.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	34 paket	5.685.161.000	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah paket sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	2 paket	73.710.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	2 unit	73.710.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dipelihara dan dikelola manajemennya	2 unit	22.500.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 jenis	22.500.000	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase balita gizi buruk**	**0,4 %**	**54.812.089.584**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase balita gizi buruk**	**0,4 %**	**44.159.587.907**	
		Dinas Kesehatan	**Prevalensi balita gizi kurang**	**7,8 %**			**Dinas Kesehatan**	**Prevalensi balita gizi kurang**	**7,8 %**		
		Dinas Kesehatan	**Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.**	**4,6 %**			**Dinas Kesehatan**	**Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.**	**4,6 %**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Dinas Kesehatan	Prevalensi anemia pada ibu hamil	10 %			Dinas Kesehatan	Prevalensi anemia pada ibu hamil	10 %		
		Dinas Kesehatan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	84,5 %			Dinas Kesehatan	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	84,5 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	85 %			Dinas Kesehatan	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	85 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bayi	98,11 %			Dinas Kesehatan	Cakupan Kunjungan Bayi	98,11 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,08 %			Dinas Kesehatan	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,08 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,35 %			Dinas Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,35 %		
		Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan nifas	97,59 %			Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan nifas	97,59 %		
		Dinas Kesehatan	Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	40 %			Dinas Kesehatan	Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	40 %		
		Dinas Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,6 %			Dinas Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	94,6 %		
		Dinas Kesehatan	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	6 -			Dinas Kesehatan	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	6 -		
		Dinas Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %			Dinas Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %		
		Dinas	Respon PIE	100 %			Dinas	Respon PIE	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
		Kesehatan	**(Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam**				**Kesehatan**	**(Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam**			
		Dinas Kesehatan	**Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan**	**94,6 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan**	**94,6 %**		
		Dinas Kesehatan	**Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**	**80 %**			**Dinas Kesehatan**	**Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS**	**80 %**		
		Dinas Kesehatan	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Tingkat kematian akibat malaria**	**<1 -**			**Dinas Kesehatan**	**Tingkat kematian akibat malaria**	**<1 -**		
		Dinas Kesehatan	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**	**100 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar**	**88,24 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar**	**88,24 %**		
		Dinas Kesehatan	**Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga**	**100 %**			**Dinas Kesehatan**	**Persentase puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga**	**100 %**		
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	jumlah kasus	20 kasus	315.253.800	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	Jumlah Ibu Hamil	16320	316.253.807	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
01	Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan	kematian ibu terlacak dan teraudit kematian maternal			Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		
		Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil	281 orang							
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin mendapat jaminan persalinan	400 orang	502.246.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15300 orang	502.246.000	
		Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	98 orang							
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	68 orang	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.300 orang	100.000.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus kematian bayi/balita yang terlacak dan teraudit kematian neonatal	50 kasus	72.940.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.200 orang	73.072.000	
		Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita	60 orang							
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	34 orang	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.340 orang	35.000.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu	68 orang	135.950.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	597.500 orang	135.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
								Sesuai Standar			
		Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif	34 orang							
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	34 orang	59.814.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142.800 orang	59.814.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	68 orang	20.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95.750 orang	40.000.000	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	68 orang	28.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.410 orang	35.000.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa	10 orang	34.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.902 orang	34.000.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM	10 layanan	72.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.940 orang	150.000.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan VCT	10 layanan	457.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.540 orang	557.500.000	
1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	jumlah jenis kegiatan	7 jenis	359.775.000	Pengelolaan Pelayanan	Dinas	Jumlah Dokumen	4 dokumen	359.775.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
13	Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kesehatan	penanggulangan KLB Bencana			Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kesehatan	Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	3 jenis	75.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 dokumen	75.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektoral terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat	400 orang	679.840.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41 dokumen	679.840.100	
		Dinas Kesehatan	Jumlah kasus gizi buruk yang terlacak	40 kasus							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	34 puskesmas	177.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34 dokumen	177.000.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	34 puskesmas	1.145.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34 dokumen	1.145.000.000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang	100 kali	376.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi	11 dokumen	380.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			dilakukan					Kesehatan			
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	30 puskesmas	82.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34 dokumen	82.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	34 puskesmas	655,000,400	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 dokumen	80.000.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	jumlah puskesmas Menyusun Dokumen Perencanaan dan Penilaian Kinerja	34 puskesmas	655.000.400	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	68 dokumen	560.000.000	
			jumlah fasyankes dibina	40 fasyankes							
			jumlah RS di evaluasi	12 rs							
			Jumlah P3K terlaksana	34 paket							
			Organisasi yang diberikan bantuan hibah	1 organisasi							
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	473.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular	2 dokumen	473.000.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	1.276.905 orang	46.923.770.284	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	35.895.600.000	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	80 Kali	55.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80 paket	29.537.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	jumlah pasien terlayani	3.850 orang	850.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	850.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah fasyankes tereakreditasi	35 fasyankes	200.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 unit	200.000.000	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	75.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	75.000.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	240 kasus	782.500.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	959.000.000	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan**	**100 %**	**205.698.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Sistem Informasi Kesehatan**	**100 %**	**205.698.000**	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Tercetak	120 buku	45.800.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 dokumen	45.800.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Instansi Mengelola Informasi Kesehatan	35 unit	45,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	45.000.000	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2 Unit	114.898.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2 Unit	114.898.000	
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase penerbitan**	**100 %**	**45,000,000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase penerbitan**	**100 %**	**20.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes**			**dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes**			
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	90 unit	20,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	90 unit	20.000.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	1 unit	25,000,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	0	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Dinas Kesehatan	**Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**100 %**	**305,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Dinas Kesehatan	**Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**100 %**	**305.000.000**	
			Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar	**92 %**				**Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar**	**92 %**		
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Dinas Kesehatan	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan**	**100 %**	**53,000,000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Dinas Kesehatan	**Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan**	**100 %**	**53.000.000**	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	1.550 rekomendasi	20,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1500 dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	100 lokasi	33,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 dokumen	33.000.000	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK**	**100 %**	**140,000,000**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK**	**100 %**	**140.000.000**	
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil SDMK	2 dokumen	40,000,000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	40.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	100.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 orang	100.000.000	
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDMK tingkat kabupaten**	**100 %**	**112,000,000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDMK tingkat kabupaten**	**100 %**	**112.000.000**	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	2 kali	112,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	112.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan**	**50 %**	**445,002,000**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan**	**50 %**	**445.002.000**	
			Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	**50 %**				**Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan**	**50 %**		
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi**	**100 %**	**108,960,000**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi**	**100 %**	**108.960.000**	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	50 lokasi	40,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 dokumen	40.000.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Dinas Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	300 lokasi	68,960,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam	100 sarana	68.960.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	(UMOT)					(UMOT)		rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**	**100 %**	**27.500.000**	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**	**100 %**	**27.500.000**	
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan	5 Sertifikat	27.500.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 dokumen	27.500.000	
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat**	**100 %**	**136,390,000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat**	**100 %**	**136.390.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					**Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**			
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah P-IRT dibina dan diawasi	50 lokasi	136,390,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	60 dokumen	136.390.000	
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100 %**	**30,000,000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**100 %**	**30.000.000**	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Dinas Kesehatan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi	40 Lokasi	30,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	40 dokumen	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**100 %**	**35,000,000**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**100 %**	**35.000.000**	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan	40 lokasi	35,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40 dokumen	35.000.000	
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**100 %**	**107,152,000**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**100 %**	**107.152.000**	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	20 produk	107,152,000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut	30 unit	107.152.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
								Pengawasan			
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**62 %**	**324.334.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Dinas Kesehatan**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**62 %**	**486.074.000**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten**	**13 kebijakan**	**228.334.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten**	**13 kebijakan**	**390.074.000**	
1.02.05.2.01. 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	50 kali	228.334.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat	10 dokumen	390.074.000	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**98 %**	**50.000.000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**98 %**	**50.000.000**	
1.02.05.2.02. 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	25 Kali	50.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	11 dokumen	50.000.000	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**46.000.000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Kesehatan**	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 %**	**46.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	347 orang	46.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	245 dokumen	46.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	34 paket	197.304.000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	129.965 keluarga	100.000.000	

Perangkat Daerah : RSD Bagas Waras

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**78.946.142.370**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**90.946.143.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RSD Bagas Waras**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**78.946.142.370**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	RSD Bagas Waras	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**78.946.142.370**	
1 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**RSD Bagas Waras**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**0**						
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSD Bagas Waras	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	0						
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**RSD Bagas Waras**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100 %**	**16.846.142.370**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	RSD Bagas Waras	**Persentase pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100 %**	**16.846.142.370**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSD Bagas Waras	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	239 orang/bulan	16.846.142.370	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSD Bagas Waras	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	239 orang/ bulan	16.846.142.370	
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	RSD Bagas Waras	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100 %**							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSD Bagas Waras	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	0 orang	0						
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	RSD Bagas Waras	**Persentase layanan BLUD sesuai SOP**	**100 %**	**62.100.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**RSD Bagas Waras**	**persentase layanan BLUD sesuai SOP**	**100 %**	**62.100.000.000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSD Bagas Waras	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	62.100.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSD Bagas Waras	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	62.100.000.000	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	RSD Bagas Waras	**Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya**	**100 %**	**12.000.000.630**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	RSD Bagas Waras	**Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya**	**100%**	**12.000.000.630**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	RSD Bagas Waras	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara**	**100 %**	**12.000.000.630**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	RSD Bagas Waras	**Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara**	**100%**	**12.000.000.630**	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	RSD Bagas Waras	Jumlah gedung rumah sakit yang dikembangkan	0 buah	0						
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSD Bagas Waras	Jumlah Alat Kesehatan tersedia	0 jenis	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSD Bagas Waras	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2.000.000.000	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	RSD Bagas Waras	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	50 paket	12.000.000.630	Pengadaan Obat, Vaksin	RSD Bagas Waras	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan		10.000.000.630	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSD Bagas Waras	Jumlah Bahan Habis Pakai tersedia	0 jenis	0						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	RSD Bagas Waras	**Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)**	**100 %**	**0**						
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	RSD Bagas Waras	Jumlah kegiatan penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana	0 kegiatan	0						
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	RSD Bagas Waras	**Persentase dokter IGD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar**	**92 %**	**0**						
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	RSD Bagas Waras	**Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK**	**100 %**	**0**						
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSD Bagas Waras	Jumlah dokumen perencanaan SDM kesehatan yang disusun	0 buah	0						

Perangkat Daerah : 34 Puskesmas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**96.065.113.935**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**96.065.113.935**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**34 Puskesmas**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**70.258.560.907**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**34 Puskesmas**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**70.251.326.907**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**34 Puskesmas**			**70.258.560.907**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**34 Puskesmas**	**Persentase pemenuhan Layanan BLUD sesuai SOP**	**100%**	**70.251.326.907**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34 Puskesmas	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34 layanan	70.258.560.907	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34 Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	34 Unit kerja	70.251.326.907	
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	34 Puskesmas			24.018.194.515	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	34 Puskesmas	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**24.048.588.099**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	34 Puskesmas	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	24.018.194.515	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	34 Puskesmas	**Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**24.048.588.099**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34 Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	26.772 orang	2.398.502.045	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34 Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan	26.772	2.454.593.645	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
			ibu hamil sesuai standar					pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34 Puskesmas	Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.448 orang	304.815.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34 Puskesmas	Jumlah Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.007 orang	306.795.000	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34 Puskesmas	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	14.448 orang	264.078.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34 Puskesmas	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	14.448 orang	278.078.000	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34 Puskesmas	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	59.294 orang	1.716.094.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	34 Puskesmas	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	59.294 orang	1.726.394.400	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34 Puskesmas	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah	16.410 orang	1.149.953.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34 Puskesmas	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.410 orang	1.158.843.600	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34 Puskesmas	jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan	576.953 orang	812.601.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34 Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576.953 orang	802.101.184	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34 Puskesmas	jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar	139.130 orang	914.028.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	34 Puskesmas	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139.130 orang	909.512.200	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	34 Puskesmas	jumlah penderita hipertensi mendapat	90.700 orang	290.779.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	34 Puskesmas	Jumlah Penderita Hipertensi yang	88.491 orang	279.179.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Penderita Hipertensi		pelayanan kesehatan			Hipertensi		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34 Puskesmas	jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan	29.410 orang	261.858.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34 Puskesmas	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28.523 orang	260.258.600	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	34 Puskesmas	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	2.766 orang	286.115.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	34 Puskesmas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.766 orang	297.735.000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	34 Puskesmas	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	3.776 orang	298.530.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	32 Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.662 orang	301.040.100	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	34 Puskesmas	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	11.951 orang	200.124.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	33 Puskesmas	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11.589 orang	209.804.000	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34 Puskesmas	jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	3.403.203.302	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	511 Dokumen	3.253.823.302	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis	34 Puskesmas	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis	3 jenis	166.454.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	96 Dokumen	172.294.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana			Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34 Puskesmas	jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	51.064 orang	1.972.423.804	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.073 Dokumen	1.946.113.804	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	34 puskesmas	429.318.208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	187 Dokumen	442.868.208	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34 Puskesmas	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengelolaan limbah medis dan non medis	34 puskesmas	2.129.084.010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	756 Dokumen	2.128.204.010	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34 Puskesmas	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	102 kali	3.109.636.924	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	34 Puskesmas	Jumlah Promosi dan penyuluhan Kesehatan yang dilakukan	708 kali	3.189.920.924	
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34 Puskesmas	Jumlah puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupressure	34 puskesmas	198.324.376	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	128 Dokumen	194.709.376	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34 Puskesmas	Jumlah puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	34 puskesmas	458.468.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48 Dokumen	493.608.000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34 Puskesmas	jumlah jenis penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular terkendali	17 jenis	2.865.011.346	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	669 Dokumen	2.911.777.839	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
								dan Tidak Menular			
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34 Puskesmas	Jumlah investigasi awal KIPI	34 puskesmas	113.977.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34 Puskesmas	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	45 Laporan	113.817.000	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	34 Puskesmas	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7 jenis	274.814.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	217 Dokumen	217.117.000	
1 02 02 2.02 40						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2 Puskesmas	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 orang	8.800.000	
1 02 02 2.02 41						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1 Puskesmas	Jumlah orang Terduga Mendarita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	262 orang	1.000.000	
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**34 Puskesmas**	**Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	**100%**	**1.472.631.226**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**34 Puskesmas**	**Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar**	100 %	1.457.047.642	
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**	**34 Puskesmas**	**Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas**	**100%**	**1.472.631.226**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**	**34 Puskesmas**	**Persentase Pemenuhan tenaga kontrak di Puskesmas**	100 %	1.457.047.642	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	34 Puskesmas	jumlah gaji tenaga kontrak terbayar	3 orang	1.472.631.226	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	34 Puskesmas	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	102 orang	1.457.047.642	
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**34 Puskesmas**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**62%**	**322.354.352**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**34 Puskesmas**	**Cakupan Desa Siaga Aktif**	**62%**	304.884.352	
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34 Puskesmas**	**Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**322.354.352**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34 Puskesmas**	**Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	100 %	304.884.352	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34 Puskesmas	Jumlah petugas Promkes dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	3 orang	322.354.352	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34 Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	102 dokumen	304.884.352	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel berikut :

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Klaten	Program dalam Rencana Kerja 2023
1. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing :** Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.	**1. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing:** Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan.	1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** Yaitu Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada peningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, kualitas kesehatan, dan kualitas Pendidikan. Peningkatan kualitas kesehatan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang melibatkan lintas program dan sektoral	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu "**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**".

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah **"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat".**

c. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dirumuskan dalam program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja beserta pendanaannya. Rumusan program dan kegiatan tersebut disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana capaian target ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten maka dirumuskan lima (5) Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2023 dituangkan ke dalam Lampiran Tabel 4.1.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini memuat Rancangan kerangka ekonomi kesehatan, prioritas pembangunan kesehatan, Rencana Kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang, maka Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai dasar/pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah serta APBD Kabupaten Klaten 2023.

Adapun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan peraturan Pemerintah Pusat dan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah Kabupaten dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum-forum OPD Kabupaten maupun forum gabungan OPD kabupaten yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA).

Dokumen ini berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah serta sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Klaten sesuai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dapat terwujud.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Masih tingginya kematian ibu dan bayi di Kab Klaten terutama karena adanya covid 19.
2. Masih tingginya angka stunting dan masalah gizi di Kabupaten Klaten.
3. Masih rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
4. Kasus penyakit meningkat (DBD, HIV, dll) dikarenakan kegiatan difokuskan untuk covid 19.
5. Kurangnya kesiapan Fasilitas Kesehatan dalam pelayanan. Dari kasus covid 19 ini, diketahui bahwa RS di Klaten masih harus dilengkapi sarprasnya untuk peningkatan pelayanan.
6. Kurangnya sarana prasarana koordinasi secara online dalam kondisi darurat menjadikan koordinasi terhambat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 memfokuskan pada pencapaian target indikator SPM dan SDG's, oleh karena itu seluruh elemen kesehatan harus bekerja lebih optimal untuk pencapaian target SPM dan SDG's tersebut.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Pembangunan membutuhkan transparansi sebagai suatu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami masyarakat. Hal ini tentu saja membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun kebijakannya agar efektif sesuai dengan target kegiatan sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat terakomodir. Dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya sehingga memerlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat.
2. Membangun peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajad kesehatan masyarakat yang layak.
3. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan.
4. Memasifkan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan

partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi daerah yakni: ***"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".***

Klaten, Juli 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

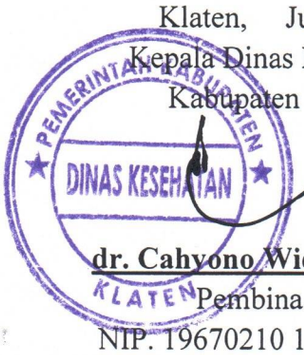

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

LAMPIRAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						214,437,465,000								111,523,839,000	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100.00 %	**146,196,891,281**						100.00 %	**16,671,630,000**	
1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%		%	100 %	**161,000,000**						100 %	**120,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	4 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen	40,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 dokumen	30,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 dokumen	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	1 Laporan	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29 laporan	36,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	29 laporan	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%		%	100 %	**140,799,402,557**						100 %	**12,161,630,000**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1357 orang/bulan	140,688,361,357	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1357 orang/bulan	12,021,630,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 dokumen	24,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				125 dokumen	62,041,200	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	125 dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	25,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 laporan	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	%		%	100 %	**244,642,000**						100 %	**110,000,000**	
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 unit	244,642,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	2 unit	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%		%	100 %	**481,734,000**						100 %	**469,000,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 paket	22,528,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10 paket	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 paket	52,014,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	15 paket	30,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				130000 paket	45,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	130000 paket	39,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				80 Laporan	75,150,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	80 Laporan	125,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	287,042,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	100 Laporan	250,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%		%	100 %	**1,146,606,924**						100 %	**450,000,000**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				75 unit	100,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	75 unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 unit	713,576,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	20 unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 unit	333,030,924	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	10 unit	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%		%	100 %	**2,632,185,800**						100 %	**2,565,000,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6000 Laporan	12,660,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6000 Laporan	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	380,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	36 Laporan	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2,239,525,800	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12 Laporan	2,150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	**696,320,000**						100 %	**676,000,000**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				47 unit	209,025,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	47 unit	156,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 unit	118,760,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	47 unit	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	5,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	15 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	43,450,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	22 Unit	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	320,085,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan Masyarakat	3 unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**120,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				35 unit kerja	35,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	BLUD PUskesmas dan Rumah Sakit	35 unit kerja	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kejadian DBD Angka Kejadian HIV Angka kejadian Malaria Cakupan balita pneumonia yang ditangani Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Cakupan STBM Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Penderita diare yang ditangani Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan	/100.000 /1000 penduduk /100.000 % % % % % /100.000 penduduk % % % % % % % % % % % % % %		/100.000 /1000 penduduk /100.000 % % % % % /100.000 penduduk % % % % % % % % % % % % % %	20 /100.000 0.18 /1000 penduduk <1 /100.000 15 % 100 % 100 % 100 % 90 % 40 /100.000 penduduk 7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 %	**67,004,497,719**					20 /100.000 0.18 /1000 penduduk <1 /100.000 15 % 100 % 100 % 100 % 90 % 40 /100.000 penduduk 7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 100 % 100 % 100 % 95 % 100 %	**93,507,521,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

								%		%	100 %						100 %		
								%		%	100 %						100 %		
								%		%	70 %						70 %		
								%		%	100 %						100 %		
								%		%	11 %						11 %		
	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
				pelayanan kesehatan bayi baru lahir													
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan													
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil													
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar													
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar													
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar													
				Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar													
				Persentase orang yang memerlukan intervensi													
				Persentase pelayanan lab klinis dan lab air													
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar													
				Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)													
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya													
				Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin													
				Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya													
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan													

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar													
					Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita													
1	**02**	**02**	2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	%		%	100 %	**22,619,211,812**						100 %	**44,269,881,000**	
1	02	02	2.01	02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 unit	3,500,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	1 unit	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	06 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 unit	2,000,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	1 unit	16,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 unit	1,500,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	7 unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 unit	2,000,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	2 unit	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				7 unit	2,181,081,812	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	7 unit	650,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	1,212,878,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	20 Unit	2,350,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				400 unit	200,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	400 unit	121,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				34 Paket	4,046,577,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	34 Paket	4,046,577,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				34 Paket	5,685,161,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	34 Paket	2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				2 Unit	73,710,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	2 Unit	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 unit	22,500,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	2 unit	275,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				34 Paket	197,304,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat	34 Paket	197,304,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Prevalensi anemia pada ibu hamil Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	% % % % %		% % % % %	0.4 % 84.5 % 10 % 0.4 % 4.6 %	**44,159,587,907**						0.4 % 84.5 % 10 % 0.4 % 4.6 %	**48,850,340,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16320 orang	316,253,807	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	16320 orang	950,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15300 orang	502,246,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15300 orang	2,750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15300 orang	100,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	15300 orang	350,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61200 orang	73,072,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	61200 orang	577,170,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17340 orang	35,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	17340 orang	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				597500 orang	135,950,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	597500 orang	240,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				142800 orang	59,814,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	142800 orang	87,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95750 orang	40,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	95750 orang	96,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34410 orang	35,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	34410 orang	108,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2902 orang	34,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	2902 orang	242,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3940 orang	150,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	3940 orang	181,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12540 orang	557,500,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	12540 orang	921,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 dokumen	359,775,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	4 dokumen	193,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 dokumen	75,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	4 dokumen	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				41 dokumen	679,840,100	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	41 dokumen	1,210,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				34 dokumen	177,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	34 dokumen	385,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				34 dokumen	1,145,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	34 dokumen	1,320,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	380,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	11 Dokumen	820,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				34 Dokumen	82,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	34 Dokumen	90,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	80,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	4 Dokumen	217,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				68 dokumen	560,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	68 dokumen	478,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 dokumen	473,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	2 dokumen	1,089,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 dokumen	35,895,600,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1 dokumen	29,958,802,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				80 Paket	29,537,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	80 Paket	277,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 dokumen	850,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1 dokumen	1,228,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				34 Unit	200,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	34 Unit	2,706,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	75,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	2 Dokumen	680,468,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 unit	959,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1 unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				129965 Keluarga	100,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	129965 Keluarga	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase Sistem Informasi Kesehatan	%		%	100 %	**205,698,000**						100 %	**308,550,000**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				2 Dokumen	45,800,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan masyarakat	2 Dokumen	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan masyarakat	1 Dokumen	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				2 unit	114,898,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan dan masyarakat	2 unit	211,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**78,750,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				85 unit	20,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85 unit	38,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100.00 %	**305,000,000**						100.00 %	**382,800,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	%		%	100 %	**53,000,000**						100 %	**72,600,000**	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1500 Dokumen	20,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	1500 Dokumen	36,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				100 Dokumen	33,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	36,300,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	%		%	100 %	**140,000,000**						100 %	**145,200,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 dokumen	40,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD	2 dokumen	72,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD	100 Orang	72,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	%		%	100 %	**112,000,000**						100 %	**165,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	112,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD	50 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	% %		% %	50.00 % 50.00 %	**445,002,000**						50.00 % 50.00 %	**384,518,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	%		%	100 %	**108,960,000**						100 %	**96,800,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50 Dokumen	40,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	50 Dokumen	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Sarana	68,960,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	100 Sarana	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.02		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	Persentase Penerbitan Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	%		%	100 %	**27,500,000**						100 %	**30,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				10 Dokumen	27,500,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Dokumen	30,250,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase terlaksananya penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	%		%	100 %	**136,390,000**						100 %	**48,400,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				60 Dokumen	136,390,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	60 Dokumen	48,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**61,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				40 Dokumen	30,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	40 Dokumen	61,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	Persentase terlaksananya penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	%		%	100 %	**35,000,000**						100 %	**111,368,000**	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				40 Dokumen	35,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	40 Dokumen	111,368,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%		%	100 %	**107,152,000**						100 %	**36,300,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				30 Unit	107,152,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	30 Unit	36,300,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62.00 %	**486,074,000**						62.00 %	**577,370,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten	kebijakan		kebijakan	13 kebijakan	**390,074,000**						13 kebijakan	**345,170,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	390,074,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	10 Dokumen	345,170,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%		%	97 %	**50,000,000**						97 %	**82,200,000**	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				11 Dokumen	50,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	11 Dokumen	82,200,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**46,000,000**						100 %	**150,000,000**	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				245 Dokumen	46,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	245 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
					TOTAL		214,437,465,000							111,523,839,000	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						90,946,143,000							78,814,616,000	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100.00 %	**78,946,142,370**						100.00 %	**76,695,305,000**	
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	239 orang/bulan	**16,846,142,370**						239 orang/bulan	**14,695,305,000**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				239 orang/bulan	16,846,142,370	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Buntalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	ASN	239 orang/bulan	14,695,305,000	DINAS KESEHATAN
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	**62,100,000,000**						1 unit kerja	**62,000,000,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan				1 unit kerja	62,100,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Buntalan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	BLUD RSUD	1 unit kerja	62,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%		%	100 %	**12,000,000,630**						100 %	**2,119,311,000**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%		%	100 %	**12,000,000,630**						100 %	**2,119,311,000**	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	2,000,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Buntalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas pelayanan kesehatan	10 Unit	1,283,172,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan				50 paket	10,000,000,630	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Buntalan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Fasilitas pelayanan kesehatan	50 paket	836,139,000	DINAS KESEHATAN
						TOTAL	90,946,143,000							78,814,616,000	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

Dr. Galuh Ardelia, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**1,938,975,000**							**1,939,111,400**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,298,430,000**						100 %	**1,298,430,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,298,430,000**						100 %	**1,298,430,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,298,430,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Karanganom	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Klaten Utara	1 Unit Kerja	1,298,430,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**594,671,400**						100 %	**594,671,400**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**594,671,400**						100 %	**594,671,400**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				480 orang	21,466,600	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	480 orang	21,466,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar				450 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	450 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				450 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	450 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				1800 orang	25,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1800 orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				510 orang	12,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	510 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17574 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	17574 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4200 orang	346,204,800	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	4200 orang	346,204,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2816 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	2816 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1012 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1012 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				85 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	85 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				116 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	116 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				369 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	369 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	7 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	3 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	25,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1529 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan				3 kali	15,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	3 kali	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Dokumen	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	7,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	1 Laporan	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Klaten Utara	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**41,223,600**						100 %	**41,010,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**41,223,600**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 orang	41,223,600	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Karyawan Non PNS Puskesmas Klaten Utara	3 orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Klaten Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Klaten Utara	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	**1,938,975,000**							**1,939,111,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**1,994,167,000**							**2,014,303,400**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,281,831,000**						100 %	**1,610,900,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,281,831,000**						100 %	**1,610,900,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,281,831,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten khususnya Klaten Tengah	1 Unit Kerja	1,610,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**644,199,008**						100 %	**357,393,400**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**644,199,008**						100 %	**357,393,400**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	76,607,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	471 Orang	37,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				441 orang	5,058,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	441 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	32,427,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1765 orang	37,257,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan di Sekolah				500 orang	28,370,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	500 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	1,440,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	17230 orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	4118 orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2761 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	2761 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	887 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	2,160,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	84 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	114 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	362 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	109,290,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	7 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	3 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	111,152,900	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	16,024,208	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 puskesmas	53,245,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 puskesmas	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	25,550,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	3 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Dokumen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Dokumen	19,135,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	97,874,900	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Klaten Khususnya Klaten Tengah	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 orang	63,136,992	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan Puskesmas Klaten Tengah	4 orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kabupaten Klaten khususnya Klaten Tengah	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**1,994,167,000**								**2,014,303,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**2,410,928,000**							**2,410,928,000**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,646,268,000**						100 %	**1,646,268,000**	
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,646,268,000**						100 %	**1,646,268,000**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,646,268,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya, sarana dan prasarana puskesmas	1 Unit Kerja	1,646,268,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**711,735,584**						100 %	**673,772,000**	
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**711,735,584**						100 %	**673,772,000**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5760 orang	36,580,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	5760 orang	39,330,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				375 orang	14,640,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	375 orang	18,900,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				500 orang	4,080,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	500 orang	10,080,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				2250 orang	22,140,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	2250 orang	47,340,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				405 Orang	46,330,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	405 Orang	37,440,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19527 orang	7,969,584	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	19527 orang	28,470,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5600 orang	19,734,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	5600 orang	24,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	18,840,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	84 orang	17,220,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				112 orang	12,960,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	112 orang	16,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standa				7 Dokumen	82,200,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	7 Dokumen	167,580,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	10,140,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	1 Dokumen	36,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga				1 Dokumen	23,180,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	1 Dokumen	9,630,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	19,440,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	1 Dokumen	10,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	226,600,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	3 Dokumen	37,590,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	45,760,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	1 Dokumen	10,620,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	121,142,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah klaten selatan	17 Dokumen	48,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,554,416**						100 %	**63,138,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	"Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	%		%	100 %	**47,554,416**						100 %	**63,138,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 orang	47,554,416	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kontrak BOK	3 orang	63,138,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,370,000**						62 %	**27,750,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**5,370,000**						100 %	**27,750,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,370,000	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Petugas promkes dan kader	1 Dokumen	27,750,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL		**2,410,928,000**							**2,410,928,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,927,105,000**							**2,119,815,499**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,222,500,000**						100 %	**1,344,750,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,222,500,000**						100 %	**1,344,750,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,222,500,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Unit Kerja	1,344,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**655,826,504**						100 %	**721,409,154**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**655,826,504**						100 %	**721,409,154**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	64,452,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	471 Orang	35,448,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	16,070,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	441 Orang	17,677,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	7,830,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	441 Orang	8,613,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	30,200,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1765 Orang	33,220,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	21,940,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	500 Orang	24,134,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	11,235,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	17230 Orang	12,358,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	19,475,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	4118 Orang	21,422,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	7,560,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	2761 Orang	8,316,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	7,560,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	887 Orang	8,316,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	18,050,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	84 Orang	19,855,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	8,670,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	114 Orang	9,537,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	5,565,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	362 Orang	6,121,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	144,500,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	7 Dokumen	158,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	3 Dokumen	2,200,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	92,255,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	101,480,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	18,290,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Kalikotes	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	20,119,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	48,690,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	53,559,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	66,794,504	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	3 Dokumen	108,922,554	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	2,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	22,660,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	24,926,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	36,030,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	39,633,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	1 Laporan	2,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kalikotes	7 Dokumen	2,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**34,725,345**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**34,725,345**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	31,568,496	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Kalikotes	2 Orang	34,725,345	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**17,210,000**						62 %	**18,931,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**17,210,000**						100 %	**18,931,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	17,210,000	Kab. Klaten, Kalikotes, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kalikotes	1 Dokumen	18,931,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**1,927,105,000**							**2,119,815,499**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,813,303,000**							**2,483,234,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,055,280,000**						100 %	**2,055,280,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**2,055,280,000**						100 %	**2,055,280,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja 0 Unit Kerja	2,055,280,000	Kab. Klaten, Ngawen, Ngawen	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ngawen	1 Unit Kerja 0 Unit Kerja	2,055,280,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**717,238,752**						100 %	**381,944,600**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**717,238,752**						100 %	**381,944,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 ORANG	88,711,752	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	471 ORANG	42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 ORANG	7,200,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	441 ORANG	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 ORANG	3,600,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	441 ORANG	11,363,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	23,400,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1765 Orang	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 ORANG	48,960,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	500 ORANG	18,581,600	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 ORANG	17,750,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	17230 ORANG	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 ORANG	15,318,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	4118 ORANG	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 ORANG	7,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	2761 ORANG	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 ORANG	10,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	887 ORANG	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 ORANG	4,500,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	84 ORANG	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 ORANG	10,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	362 ORANG	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	110,750,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	94,705,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1529 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	8,548,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	102,720,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 Dokumen	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	107,511,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	3 Dokumen	29,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	10,765,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 laporan	5,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	1 laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	7 dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				114 Orang	7,800,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja puskesmas Ngawen	114 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**35,784,248**						100 %	**41,010,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**35,784,248**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 ORANG	35,784,248	Kab. Klaten, Ngawen, Ngawen	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai & masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngawen	3 ORANG	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Ngawen	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,813,303,000**								**2,483,234,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,540,400,000**							**1,540,400,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**807,900,000**						100 %	**807,900,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**807,900,000**						100 %	**807,900,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan umlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja 1 Unit Kerja	807,900,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja	807,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**667,363,000**						100 %	**667,363,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**667,363,000**						100 %	**667,363,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	130,972,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	471 Orang	130,972,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatna Sesuai Standar				441 orang	7,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	441 orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				441 orang	9,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	441 orang	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	32,760,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1765 orang	32,760,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	26,717,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	500 orang	26,717,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	17230 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	33,505,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	4118 orang	33,505,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	2761 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	887 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	84 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	114 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	362 orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	106,290,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	7 Dokumen	106,290,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	3 Dokumen	2,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	40,540,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	40,540,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4,185,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	4,185,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	70,372,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	70,372,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	72,742,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	3 Dokumen	72,742,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5,580,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	5,580,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	106,700,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Dokumen	106,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	7 Dokumen	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,137,000**						100 %	**63,137,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**63,137,000**						100 %	**63,137,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	63,137,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	3 Orang	63,137,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**2,000,000**						62 %	**2,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**2,000,000**						100 %	**2,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Kebonarum, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kebonarum	3 Dokumen	2,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**1,540,400,000**							**1,540,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,600,460,000							3,600,810,000	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,803,100,000**						100 %	**2,803,100,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Presentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**2,803,100,000**						100 %	**2,803,100,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,803,100,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Wedi	1 Unit Kerja	2,803,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Presentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**761,141,120**						100 %	**761,141,120**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**761,141,120**						100 %	**761,141,120**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart				6400 Orang	63,969,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	6400 Orang	63,969,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart				375 orang	10,260,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	375 orang	10,260,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 orang	10,260,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	250 orang	10,260,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				2250 orang	63,360,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	2250 orang	63,360,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				480 orang	20,610,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	480 orang	20,610,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				22456 orang	110,005,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	22456 orang	110,005,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				5679 orang	13,984,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	5679 orang	13,984,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				2761 orang	12,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	2761 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				887 orang	12,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	887 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standart				84 orang	10,590,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	84 orang	10,590,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				137 orang	30,100,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	137 orang	30,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart				362 orang	12,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	362 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standart				7 Dokumen	149,114,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	7 Dokumen	149,114,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanan dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standart				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	23,800,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	2 Dokumen	23,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	13,520,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Dokumen	13,520,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	13,730,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Dokumen	13,730,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	81,042,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	3 Dokumen	81,042,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	16,077,120	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Dokumen	16,077,120	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	12,380,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Dokumen	12,380,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	74,340,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	17 Dokumen	74,340,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wedi	7 Dokumen	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,568,880**						100 %	**31,568,880**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**31,568,880**						100 %	**31,568,880**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standart di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	31,568,880	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Wedi	2 Orang	31,568,880	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Wedi	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL											**3,600,460,000**							**3,600,810,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**2,938,618,000**							**2,938,968,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100.00 %	**2,156,000,000**						100.00 %	**2,156,000,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**2,156,000,000**						100 %	**2,156,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,156,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Unit Kerja	2,156,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**714,831,008**						100 %	**714,831,008**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**714,831,008**						100 %	**714,831,008**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	81,560,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	471 Orang	81,560,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	9,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	441 Orang	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	22,020,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1765 Orang	22,020,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	22,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	500 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	32,420,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	17230 Orang	32,420,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	77,880,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	4118 Orang	77,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	2761 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	12,539,600	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	887 Orang	12,539,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	114 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	362 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	26,090,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	7 Dokumen	26,090,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	3 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	84,460,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen	84,460,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4,700,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen	4,700,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen Puskesmas	70,018,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen Puskesmas	70,018,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	116,545,408	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	3 Dokumen	116,545,408	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	3,180,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen	3,180,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	15,480,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen	15,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	59,938,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Dokumen	59,938,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**63,136,992**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**63,136,992**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	63,136,992	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	3 Orang	63,136,992	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 1	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	**2,938,618,000**							**2,938,968,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,491,558,000**								**2,416,938,500**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,618,820,000**						100 %	**1,643,850,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,618,820,000**						100 %	**1,643,850,500**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,618,820,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Unit Kerja	1,643,850,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**820,735,256**						100 %	**720,735,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**820,735,256**						100 %	**720,735,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	75,900,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	471 orang	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	25,900,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	441 orang	25,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	30,750,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	441 orang	30,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	30,750,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1765 orang	30,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	14,880,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	500 orang	14,880,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	31,170,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	17230 orang	31,170,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	32,520,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	4118 orang	32,520,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	2761 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	887 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	84 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	4,320,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	114 orang	4,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	362 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	77,380,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	7 Dokumen	77,380,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	3 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	74,500,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Dokumen	74,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Dokumen	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	98,200,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Dokumen	48,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	158,515,256	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	3 Dokumen	158,515,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	16,920,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Dokumen	16,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				17 Dokumen	75,030,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	17 Dokumen	75,030,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				8 Dokumen	12,000,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	8 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	47,352,744	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	3 Orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Jogonalan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan 2	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL		**2,491,558,000**							**2,416,938,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,826,525,000**								**3,204,223,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**3,040,313,000**						100 %	**2,765,080,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**3,040,313,000**						100 %	**2,765,080,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,040,313,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Unit Kerja	2,765,080,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**693,075,008**						100 %	**393,133,600**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**693,075,008**						100 %	**393,133,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	45,826,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	471 Orang	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	900,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	89,826,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1765 Orang	42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	21,140,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	500 Orang	21,133,600	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	22,944,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	17230 Orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	8,040,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	4118 Orang	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	2761 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	7,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	887 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	9,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	3,600,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	114 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	2,700,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	362 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	79,688,008	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	7 Dokumen	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,600,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	3 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	94,560,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	5,320,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	40,644,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	122,931,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	3 Dokumen	31,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	102,656,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	900,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	1,800,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	63,136,992	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Gantiwarno	3 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**30,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**30,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	30,000,000	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Gantiwarno	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,826,525,000**							**3,204,223,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**2,461,688,000**							**2,514,885,070**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,730,000,000**						100 %	**1,781,900,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,730,000,000**						100 %	**1,781,900,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,730,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Unit Kerja	1,781,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**695,469,000**						100 %	**695,469,000**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**695,469,000**						100 %	**695,469,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	37,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	471 Orang	37,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	441 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	37,609,600	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1765 Orang	37,609,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	50,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	500 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	17230 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standarJumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	4118 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	2761 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	12,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	887 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	52,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	114 Orang	52,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	362 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	38,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	7 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	47,859,400	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	47,859,400	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	69,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	69,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	79,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	3 Dokumen	103,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	110,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Dokumen	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Prambanan	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,569,000**						100 %	**32,516,070**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**31,569,000**						100 %	**32,516,070**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	31,569,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai & Masyarakat di wilayah puskesmas prambanan	3 Orang	32,516,070	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah puskesmas prambanan	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,461,688,000**							**2,514,885,070**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1,966,792,000**								**1,966,792,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,351,546,000**						100 %	**1,351,546,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,351,546,000**						100 %	**1,351,546,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,351,546,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Kebondalem Lor dan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Unit Kerja	1,351,546,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**563,243,256**						100 %	**563,243,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**563,243,256**						100 %	**563,243,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				376 Orang	36,550,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	376 Orang	36,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				351 Orang	16,640,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	351 Orang	16,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				1583 Orang	19,160,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1583 Orang	19,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1583 Orang	28,800,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1583 Orang	28,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	16,560,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	15 Orang	16,560,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				507 Orang	13,200,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	507 Orang	13,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				121 Orang	2,420,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	121 Orang	2,420,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81 Orang	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	81 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26 Orang	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	26 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	6,830,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	2 Orang	6,830,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	3 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	11 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	77,870,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	7 Dokumen	77,870,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	3 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				45 Dokumen	8,680,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	45 Dokumen	8,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	12,920,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	12,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	28,380,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	28,380,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	142,080,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	3 Dokumen	142,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7,700,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	7,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	113,453,256	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	113,453,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Laporan	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	7 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	47,352,744	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Non ASN di Puskesmas Kebondalem Lor	3 Orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**4,650,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**4,650,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Prambanan, Kebondalem Lor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Kebondalem Lor	1 Dokumen	4,650,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**1,966,792,000**							**1,966,792,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,213,364,000**								**3,213,364,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,286,844,000**						100 %	**2,286,844,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**2,286,844,000**						100 %	**2,286,844,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,286,844,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Manisrenggo dan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Unit Kerja	2,286,844,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**853,383,008**						100 %	**858,383,008**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**853,383,008**						100 %	**858,383,008**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	67,500,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	471 Orang	67,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	441 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	20,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	441 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	71,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1765 Orang	35,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	50,300,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	500 Orang	50,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	24,900,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	17230 orang	24,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	7,100,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	4118 orang	7,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	2761 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	40,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	887 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				114 Orang	30,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	114 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	30,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	362 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	81,933,008	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	7 Dokumen	164,933,008	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	35,500,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	35,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	24,900,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	24,900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	71,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	71,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	3 Dokumen	152,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	2,650,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	2,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	37,600,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	37,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	71,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Dokumen	71,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	9,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 Laporan	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	9,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	7 Dokumen	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**63,136,992**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**63,136,992**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	63,136,992	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Non ASN di Puskesmas Manisrenggo	4 Orang	63,136,992	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**10,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Manisrenggo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Manisrenggo	1 dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,213,364,000**								**3,213,364,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,560,230,000**								**3,661,805,600**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,680,718,000**						100 %	**3,225,362,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**2,680,718,000**						100 %	**3,225,362,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,680,718,000	Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Unit Kerja	3,225,362,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**836,303,000**						100 %	**390,433,600**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**836,303,000**						100 %	**390,433,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	103,659,000	Kab. Klaten, Kemalang, Kemalang	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	471 Orang	43,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	441 Orang	11,433,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1765 Orang	43,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	41,680,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	500 Orang	21,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	50,114,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	17230 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	13,640,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	4118 Orang	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	2761 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	887 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				84 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	11,320,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	114 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	362 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	110,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,430,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	71,708,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	18,128,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	126,462,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	32,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	125,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	3 Dokumen	28,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	4,716,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	46,160,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	11,286,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	5,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**15,784,248**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**15,784,248**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	15,784,248	Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	1 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**27,424,752**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**27,424,752**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	27,424,752	Kab. Klaten, Kemalang, Keputran	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kemalang	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,560,230,000**							**3,661,805,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,437,887,000**								**2,437,887,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,739,200,000**						100 %	**1,739,200,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,739,200,000**						100 %	**1,739,200,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,739,200,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Karangnongko dan Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 Unit Kerja	1,739,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**650,334,256**						100 %	**650,334,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**650,334,256**						100 %	**650,334,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	60,438,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	471 orang	60,438,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Seusai Standar				441 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	441 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar				441 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	441 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	40,320,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1765 orang	40,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesdehatan Sesuai Standar				500 orang	37,810,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	500 orang	37,810,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	17230 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	17,800,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	4118 orang	17,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	2761 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	887 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	84 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	114 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	362 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 dokumen	96,030,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	7 dokumen	96,030,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	3 dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 dokumen	58,710,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1529 dokumen	58,710,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 dokumen	5,325,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 dokumen	5,325,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 dokumen	86,300,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 dokumen	86,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 dokumen	88,976,250	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	3 dokumen	88,976,250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 dokumen	2,430,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 dokumen	2,430,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 dokumen	144,195,006	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 dokumen	144,195,006	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	1 laporan	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	7 dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 orang	47,352,744	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Non ASN di Puskesmas Karangnongko	3 orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**1,000,000**						62 %	**1,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**1,000,000**						100 %	**1,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangnongko Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karangnongko	3 dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,437,887,000**							**2,437,887,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,504,682,000**								**2,162,083,700**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,760,000,000**						100 %	**1,821,073,700**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD sesuai SOP	%		%	100 %	**1,760,000,000**						100 %	**1,821,073,700**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,760,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Jatinom dan masyarakt wilayah Puskesmas Jatinom	1 Unit Kerja	1,821,073,700	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**664,945,000**						100 %	**295,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Kunjungan Bay Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan Prevalensi anemia pada ibu hamil Jumlah ibu hamil dengan Hb<11 mg/dl dibagi j	% % %		% % %	98.11 % 94.6 % 10 %	**664,945,000**						98.11 % 94.6 % 10 %	**295,000,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	80,888,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	441 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	41,760,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1765 Orang	42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	39,635,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	500 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	17230 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	21,880,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	4118 Orang	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	1,500,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	2761 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	2,500,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	887 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	84 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	3,500,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	114 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	2,500,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	362 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	96,030,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	7 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	52,105,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	5,325,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	82,451,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	103,156,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	3 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2,790,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	101,925,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas jatinom	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	%		%	100 %	**75,737,000**						100 %	**41,010,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	% %		% %	100 % 100 %	**75,737,000**						100 % 100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	75,737,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai non ASN Puskesmas Jatinom	4 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	**4,000,000**						100 % 100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Jatinom dan Masyarakat Wilayah Puskesmas Jatinom	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,504,682,000**							**2,162,083,700**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,350,880,000**								**2,350,880,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,660,680,000**						100 %	**1,660,680,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Persentase Layanan BLUD Sesuai SOP	%		%	100 %	**1,660,680,000**						100 %	**1,660,680,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,660,680,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	pegawai dan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Unit Kerja	1,660,680,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**637,847,256**						100 %	**637,847,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**637,847,256**						100 %	**637,847,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	95,322,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	471 Orang	95,322,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	15,480,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	441 Orang	15,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	12,960,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	441 Orang	12,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	63,654,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1765 Orang	63,654,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	38,210,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	500 Orang	38,210,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	15,210,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	17230 Orang	15,210,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	2,080,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	4118 Orang	2,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	2,874,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	2761 Orang	2,874,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	2,874,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	887 Orang	2,874,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	12,040,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	84 Orang	12,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	2,874,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	114 Orang	2,874,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	2,874,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	362 Orang	2,874,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	109,524,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	7 Dokumen	109,524,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,320,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	3 Dokumen	4,320,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	57,692,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	57,692,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3,266,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	3,266,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	75,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	88,953,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	3 Dokumen	88,953,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	3,754,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	3,754,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5,388,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	5,388,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	11,498,256	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	11,498,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	47,352,744	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	3 Orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Jatinom, Kayumas	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Kayumas	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,350,880,000**							**2,350,880,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,778,935,000**								**2,779,285,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Peningkatan Pelayanan BLUD	%		%	100 %	**2,026,474,000**						100 %	**2,026,474,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%		%	100 %	**2,026,474,000**						100 %	**2,026,474,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit kerja	2,026,474,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD & Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Unit kerja	2,026,474,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**716,242,504**						100 %	**716,242,504**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegitan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Tingkat Daerag Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**716,242,504**						100 %	**716,242,504**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	59,720,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	471 orang	59,720,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	8,200,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	441 orang	8,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	4,500,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	441 orang	4,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	69,646,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1765 orang	69,646,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	71,768,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	500 orang	71,768,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	38,754,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	17230 orang	38,754,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	38,598,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	4118 orang	38,598,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	2761 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	887 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	11,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	84 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	6,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	114 orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	362 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	102,720,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	7 Dokumen	102,720,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 orang	67,844,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1529 orang	67,844,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	51,114,504	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Dokumen	51,114,504	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	43,258,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	3 Dokumen	43,258,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	83,120,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Dokumen	83,120,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**31,568,496**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**31,568,496**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 orang	31,568,496	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Karyawan Non PNS Puskesmas Karanganom	2 orang	31,568,496	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbinan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Karanganom	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL		**2,778,935,000**							**2,779,285,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,236,620,000**								**1,918,393,500**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,486,885,000**						100 %	**1,499,727,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tercapainya pelayanan BLUD sesuai dengan SOP	%		%	100 %	**1,486,885,000**						100 %	**1,499,727,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,486,885,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Unit Kerja	1,499,727,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**713,166,504**						100 %	**372,656,500**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya kegiatan UKM di Puskesmas Tulung	%		%	100 %	**713,166,504**						100 %	**372,656,500**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				471 orang	59,788,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	471 orang	42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	1,800,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	441 orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	1,800,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	441 orang	12,274,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	130,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1765 orang	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	500 orang	25,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	37,430,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	17230 orang	16,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	2,430,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	4118 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	10,260,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	2761 orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 0rang	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	887 0rang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	84 orang	11,382,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 0rang	1,900,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	114 0rang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	362 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	75,600,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	81,828,504	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	59,730,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	45,600,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	115,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	18,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	3,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tulung	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terpenunhi tenaga kontrak di Puskesmas Tulung	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 orang	31,568,496	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kontrak BOK di Puskesmas Tulung	2 orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat/UKBM tingkat daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	**5,000,000**						100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Petugas Promkes Puskesmas Tulung	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,236,620,000**							**1,918,393,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,072,690,000**								**1,972,690,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,218,000,000**						100 %	**1,218,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**1,218,000,000**						1 Unit Kerja	**1,218,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,218,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Puskesmas Majegan	1 Unit Kerja	1,218,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**756,505,200**						100 %	**656,505,200**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas Majegan	Kegiatan		Kegiatan	23 Kegiatan	**756,505,200**						23 Kegiatan	**656,505,200**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	98,956,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	471 orang	58,956,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	1,620,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	441 orang	1,620,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	2,430,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	441 Orang	2,430,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	94,392,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1765 orang	94,392,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	79,654,600	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	500 Orang	79,654,600	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	15,480,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	17230 Orang	15,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	21,389,400	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	4118 Orang	21,389,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	2761 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan				887 Orang	2,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	887 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	3,240,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	84 Orang	3,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	9,450,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	114 Orang	9,450,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	362 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	82,655,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	7 Dokumen	82,655,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	8,190,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1529 Dokumen	8,190,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15,390,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Dokumen	15,390,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	121,395,500	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Dokumen	91,395,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	108,555,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	5 Dokumen	78,555,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	6,480,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Dokumen	6,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	64,227,700	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Dokumen	64,227,700	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Majegan	7 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,137,000**						100 %	**63,137,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	4 Orang	**63,137,000**						4 Orang	**63,137,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Puskesmas Majegan				4 Orang	63,137,000	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kontrak	4 Orang	63,137,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**35,047,800**						62 %	**35,047,800**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**35,047,800**						3 Dokumen	**35,047,800**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	35,047,800	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kesehatan	3 Dokumen	35,047,800	DINAS KESEHATAN
									TOTAL		**2,072,690,000**							**1,972,690,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,440,968,000**								**2,114,043,788**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,619,553,000**						100 %	**1,622,697,200**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**1,619,553,000**						1 Unit Kerja	**1,622,697,200**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,619,553,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Puskesmas	1 Unit Kerja	1,622,697,200	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**774,325,088**						100 %	**445,336,588**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas Polanharjo	%		%	100 %	**774,325,088**						100 %	**445,336,588**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	19,870,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	471 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	1,080,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	441 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	1,080,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	441 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	64,876,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	1765 Orang	51,055,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	47,940,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	500 Orang	32,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	26,108,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	17230 Orang	23,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	25,760,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	4118 Orang	10,281,588	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	2761 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	887 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	6,120,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	84 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	2,070,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	114 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	5,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	362 Orang	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	121,800,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	7 Dokumen	19,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	3 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	51,835,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	13 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga				1 Dokumen	23,310,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	1 Dokumen	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				16 Dokumen	128,360,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	16 Dokumen	44,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	135,775,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	3 Dokumen	41,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	18,420,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	3 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				7 Dokumen	72,921,088	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	2,000,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayan Kerja Puskesmas Polanharjo	7 Dokumen	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas Memiliki Tenaga Kesehatan dan Akuntan sesuai standart	%		%	100 %	**36,829,912**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terenuhinya Kebutuhan SDM di Fasilitan layanan Kesehatan sesuai standart	Orang		Orang	2 Orang	**36,829,912**						2 Orang	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	36,829,912	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kontrak BOK	2 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**10,260,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dok		Dok	3 Dok	**10,260,000**						3 Dok	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	10,260,000	Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Petugas Promkes dan Kader	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,440,968,000**							**2,114,043,788**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,758,282,000**								**3,783,632,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,970,511,000**						100 %	**2,995,511,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase layanan BLUD sesuai SOP	Unit Kerja %		Unit Kerja %	1 Unit Kerja 100 %	**2,970,511,000**						1 Unit Kerja 100 %	**2,995,511,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,970,511,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Pusk Delanggu dan Masyarakat wilayah Puskesmas Delanggu	1 Unit Kerja	2,995,511,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**767,336,000**						100 %	**767,336,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Orang % % %		Orang % % %	441 Orang 0.4 % 7.8 % 4.6 %	**767,336,000**						441 Orang 0.4 % 7.8 % 4.6 %	**767,336,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				471 orang	84,150,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	471 orang	84,150,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	17,280,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	441 orang	17,280,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	5,580,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	441 orang	5,580,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	103,800,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	1765 orang	103,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	JJumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	21,178,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	500 orang	21,178,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	114,100,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	17230 orang	114,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	40,800,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	4118 orang	40,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	2,880,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	2761 orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	2,880,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	887 orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	2,880,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	84 orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	2,880,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	114 orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	2,880,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	362 orang	2,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 dokumen	123,492,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	7 dokumen	123,492,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 dokumen	2,800,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	3 dokumen	2,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 dokumen	52,086,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	10 dokumen	52,086,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	JJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3,720,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	1 Dokumen	3,720,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	46,310,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	3 Dokumen	46,310,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	53,340,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	5 Dokumen	53,340,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1,260,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	1 Dokumen	1,260,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	9,180,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	2 Dokumen	9,180,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	36,420,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	5 Dokumen	36,420,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	21,600,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	3 Laporan	21,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	15,840,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Delanggu	2 Dokumen	15,840,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**15,785,000**						100 %	**15,785,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Orang %		Orang %	1 Orang 100 %	**15,785,000**						1 Orang 100 %	**15,785,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 orang	15,785,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai non ASN Puskesmas Delanggu	1 orang	15,785,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,650,000**						1 Dokumen	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Delanggu	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,758,282,000**							**3,783,632,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,899,562,000**								**4,899,562,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**3,953,722,000**						100 %	**3,953,722,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**3,953,722,000**						1 Unit Kerja	**3,953,722,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,953,722,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Unit Kerja	3,953,722,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**870,871,208**						100 %	**870,871,208**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	**870,871,208**						100 Persen	**870,871,208**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	206,527,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	471 Orang	206,527,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	441 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	900,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	441 Orang	900,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	50,022,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1765 Orang	50,022,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	53,820,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	500 Orang	53,820,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	17230 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	12,844,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	4118 Orang	12,844,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	2761 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	887 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	10,660,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	84 Orang	10,660,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	6,579,100	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	114 Orang	6,579,100	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	362 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	156,020,032	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	156,020,032	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	86,177,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	86,177,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga				1 Dokumen	14,116,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	14,116,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	92,578,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	92,578,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	99,608,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	99,608,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	8,734,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	8,734,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	63,286,076	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	63,286,076	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Laporan	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**63,136,992**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	4 Orang	**63,136,992**						4 Orang	**63,136,992**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	63,136,992	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai & Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	4 Orang	63,136,992	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**11,831,800**						62 %	**11,831,800**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**11,831,800**						1 Dokumen	**11,831,800**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	11,831,800	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring	1 Dokumen	11,831,800	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**4,899,562,000**							**4,899,562,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,246,192,000**								**1,978,041,100**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,611,000,000**						100 %	**1,680,415,500**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%		%	100 %	**1,611,000,000**						100 %	**1,680,415,500**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,611,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Pegawai Puskesmas Wonosari 1 dan Masyarakat Wilayah Pusk Wonosari 1	1 Unit Kerja	1,680,415,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**589,318,400**						100 %	**251,615,600**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	% % % %		% % % %	100 % 0.4 % 7.8 % 4.6 %	**589,318,400**						100 % 0.4 % 7.8 % 4.6 %	**251,615,600**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	39,231,200	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	471 orang	19,615,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	5,000,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	441 orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	441 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	20,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1765 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	17,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	500 Orang	17,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	10,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	17230 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	4118 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	2761 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	887 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	84 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	114 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	362 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	7 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	7,377,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	3 Dokumen	7,377,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	22,623,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1529 Dokumen	22,623,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	14,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	3 Dokumen	14,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	9,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Dokumen	9,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	319,087,200	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	7,000,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	1 Laporan	7,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Puskesmas Wonosari 1	7 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**41,223,600**						100 %	**41,010,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	%		%	100 %	**41,223,600**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	41,223,600	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai non ASN Puskesmas Wonosari 1	3 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	**4,650,000**						100 % 100 %	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan masyarakat Puskesmas Wonosari 1	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,246,192,000**								**1,978,041,100**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,024,820,000**								**2,024,820,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,429,800,000**						100 %	**1,429,800,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	**1,429,800,000**						1 unit kerja	**1,429,800,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,429,800,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 Unit Kerja	1,429,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**593,020,000**						100 %	**593,020,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Pemenuhan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehata	%		%	100 %	**593,020,000**						100 %	**593,020,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	57,834,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	471 orang	57,834,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	6,480,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	441 orang	3,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	3,240,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	441 orang	3,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	32,288,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1765 orang	32,288,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	42,500,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	500 orang	42,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	26,950,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	17230 orang	26,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	6,880,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	4118 orang	6,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	2761 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	887 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	84 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	114 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	362 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 jenis	89,160,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	7 jenis	89,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 jenis	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	3 jenis	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 orang	50,266,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1529 orang	50,266,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 puskesmas	8,730,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 puskesmas	8,730,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 puskesmas	46,645,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 puskesmas	46,645,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 kali	52,110,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	3 kali	52,110,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 puskesmas	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 puskesmas	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Puskesmas	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 Puskesmas	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 jenis	159,937,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 jenis	163,177,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 puskesmas	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	1 puskesmas	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 jenis	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Wonosari II	7 jenis	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**1,000,000**						100 %	**1,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di Puskesmas	%		%	100 %	**1,000,000**						100 %	**1,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Karyawan Non PNS Puskesmas Wonosari II	3 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**1,000,000**						62 %	**1,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**1,000,000**						100 %	**1,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Puskesmas Wonosari II	3 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL		**2,024,820,000**							**2,024,820,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,693,065,000**								**2,693,065,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,007,663,000**						100 %	**2,007,663,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**2,007,663,000**						1 Unit Kerja	**2,007,663,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,007,663,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan masyarakat wilayah Puskesmas Ceper	1 Unit Kerja	2,007,663,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentase Pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**664,614,000**						100 %	**664,614,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**664,614,000**						100 %	**664,614,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	45,994,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	471 orang	45,994,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 0rang	15,300,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	441 0rang	15,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	2,340,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	441 orang	2,340,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	59,368,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1765 orang	59,368,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	10,530,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	500 orang	10,530,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	45,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	17230 orang	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	2,295,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	4118 orang	2,295,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	6,885,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	2761 orang	6,885,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	6,885,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	887 orang	6,885,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	2,385,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	84 orang	2,385,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	2,430,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	114 orang	2,430,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 orang	6,885,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	362 orang	6,885,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	153,086,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	7 Dokumen	153,086,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	3 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	39,285,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1529 Dokumen	39,285,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8,400,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Dokumen	8,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	69,385,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Dokumen	69,385,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 3 Dokumen	107,860,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	0 Dokumen 3 Dokumen	107,860,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya keluarga, dan akupressure				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	16,380,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Dokumen	16,380,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	52,941,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Dokumen	52,941,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1,260,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	1 Laporan	1,260,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	720,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah kerja Puskesmas Ceper	7 Dokumen	720,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**15,788,000**						100 %	**15,788,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	1 Orang	**15,788,000**						1 Orang	**15,788,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	15,788,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Karyawan Non PNS Puskesmas Ceper	1 Orang	15,788,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**5,000,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksanakannya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**5,000,000**						3 Dokumen	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah puskesmas Ceper	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,693,065,000**							**2,693,065,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,359,818,000**								**2,595,684,740**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**1,658,400,000**						100 %	**1,824,240,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja Kerja		Unit kerja Kerja	1 Unit kerja Kerja	**1,658,400,000**						1 Unit kerja Kerja	**1,824,240,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,658,400,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Layanan di wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	1 Unit Kerja	1,824,240,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**655,544,400**						100 %	**721,098,840**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%	100 %	**655,544,400**						100 %	**721,098,840**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 orang	50,060,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	345 orang	55,066,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 orang	13,095,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	343 orang	14,404,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				338 orang	13,350,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	338 orang	14,685,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1564 orang	102,171,800	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	1564 orang	112,388,980	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3012 orang	20,202,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	3012 orang	22,222,200	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18872 orang	12,039,600	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	18872 orang	13,243,560	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4356 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	4356 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8118 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	8118 orang	8,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				946 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	946 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	68 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				329 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	329 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				345 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	345 orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	108,926,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	7 Dokumen	119,818,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	3 Dokumen	4,400,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	44,900,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	10 Dokumen	49,390,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	10,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	5 Dokumen	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	40,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	7 Dokumen	44,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	52,490,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	12 Dokumen	57,739,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				3 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	3 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	3 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	105,310,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	13 Dokumen	115,841,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	2 Laporan	2,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	9,000,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	7 Dokumen	9,900,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**41,223,600**						100 %	**45,345,900**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes	Orang		Orang	2 Orang	**41,223,600**						2 Orang	**45,345,900**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 Orang	41,223,600	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Tenaga Kontrak di Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	2 Orang	45,345,900	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**4,650,000**						3 Dokumen	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Ceper, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dengan Wilayah Kerja Puskesmas Jambukulon	3 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,359,818,000**							**2,595,684,740**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,574,972,000**								**3,824,972,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,629,697,000**						100 %	**2,968,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**2,629,697,000**						1 Unit Kerja	**2,968,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	2,629,697,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Unit Kerja	2,968,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**867,052,256**						100 %	**778,749,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**867,052,256**						100 %	**778,749,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	172,037,093	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	471 Orang	83,734,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	25,200,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	441 Orang	25,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	29,320,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	441 Orang	29,320,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	40,256,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1765 Orang	40,256,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	68,684,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	500 Orang	68,684,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	4,230,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	17230 Orang	4,230,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	27,452,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	4118 Orang	27,452,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	27,000,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	2761 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	27,000,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	887 Orang	27,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	5,040,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	84 Orang	5,040,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	10,005,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	114 Orang	10,005,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	9,810,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	362 Orang	9,810,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	138,550,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	7 Dokumen	138,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	11,807,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	3 Dokumen	11,807,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	56,060,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1529 Dokumen	56,060,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	18,820,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Dokumen	18,820,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	53,090,163	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Dokumen	53,090,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	78,830,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	3 Dokumen	78,830,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	11,807,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Dokumen	11,807,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5,760,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Dokumen	5,760,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	22,680,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Dokumen	22,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	11,807,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	1 Laporan	11,807,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	11,807,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	7 Dokumen	11,807,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase terpenuhinya tenaga kontrak di puskesmas	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	47,352,744	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	3 Orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**30,870,000**						62 %	**30,870,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	%		%	100 %	**30,870,000**						100 %	**30,870,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	30,870,000	Kab. Klaten, Pedan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Pedan	3 Dokumen	30,870,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,574,972,000**							**3,824,972,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5,305,679,000**								**5,305,679,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**4,461,000,000**						100 %	**4,461,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase layanan BLUD sesuai SOP	unit kerja %		unit kerja %	1 unit kerja 100 %	**4,461,000,000**						1 unit kerja 100 %	**4,461,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	4,461,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah Puskesmas Karangdowo	1 unit kerja	4,461,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**796,326,256**						100 %	**796,326,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Kunjungan Bayi Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prevalensi anemia pada ibu hamil	% % % %		% % % %	98.11 % 94.6 % 100 % 10 %	**796,326,256**						98.11 % 94.6 % 100 % 10 %	**796,326,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				1 orang	88,376,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 orang	88,376,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar				441 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	441 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				441 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	441 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				1765 orang	43,605,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1765 orang	43,605,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				500 orang	23,832,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	500 orang	23,832,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				17230 orang	7,006,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	17230 orang	7,006,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah Penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4118 orang	6,310,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	4118 orang	6,310,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				2761 orang	46,610,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	2761 orang	46,610,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan Sesuai Standar				887 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	887 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				84 orang	15,584,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	84 orang	15,584,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	75,078,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	75,078,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	164,131,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1529 Dokumen	164,131,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	45,073,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	45,073,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	127,085,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	3 Dokumen	127,085,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	2,911,256	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	2,911,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	47,080,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	47,080,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	94,645,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	94,645,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	1 laporan	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	7 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				114 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	114 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang Terduga Mendarita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan				262 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah Puskesmas Karangdowo	262 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang		orang	3 orang	**47,352,744**						3 orang	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 orang	47,352,744	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Puskesmas Karangdowo	3 orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**1,000,000**						62 %	**1,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM	dokumen		dokumen	1 dokumen	**1,000,000**						1 dokumen	**1,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat wilayah puskesmas Karangdowo	1 Dokumen	1,000,000	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	**5,305,679,000**							**5,305,679,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,023,807,000**								**3,023,807,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,332,495,000**						100 %	**2,332,495,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUB yang Menyediakan Pelayan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**2,332,495,000**						1 Unit Kerja	**2,332,495,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,332,495,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Unit Kerja	2,332,495,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**639,369,256**						100 %	**639,369,256**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	**639,369,256**						100 %	**639,369,256**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	52,316,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	471 Orang	52,316,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	14,400,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	441 Orang	14,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	12,600,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	441 Orang	12,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar				1765 Orang	23,966,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1765 Orang	23,966,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	19,916,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	500 Orang	19,916,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	18,116,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	17230 Orang	18,116,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	6,675,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	4118 Orang	6,675,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	7,920,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	2761 Orang	7,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	9,990,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	887 Orang	9,990,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	27,116,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	84 Orang	27,116,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	25,676,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	114 Orang	25,676,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	9,990,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	362 Orang	9,990,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	105,390,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	7 Dokumen	105,390,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	3,960,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	3 Dokumen	3,960,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	44,216,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1529 Dokumen	44,216,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	11,816,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Dokumen	11,816,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	11,816,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Dokumen	11,816,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 3 Dokumen	96,945,256	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	0 Dokumen 3 Dokumen	96,945,256	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	2,700,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Dokumen	2,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	23,220,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Dokumen	23,220,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	103,695,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Dokumen	103,695,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1,980,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	1 Laporan	1,980,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	4,950,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	7 Dokumen	4,950,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**47,352,744**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	3 Orang	**47,352,744**						3 Orang	**47,352,744**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	47,352,744	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	3 Orang	47,352,744	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,590,000**						62 %	**4,590,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,590,000**						1 Dokumen	**4,590,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,590,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas I	3 Dokumen	4,590,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,023,807,000**							**3,023,807,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,090,826,000**								**1,791,684,200**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**1,506,466,000**						100 %	**1,506,466,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**1,506,466,000**						1 Unit Kerja	**1,506,466,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,506,466,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Unit Kerja	1,506,466,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**548,141,504**						100 %	**238,708,200**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%		%	100 %	**548,141,504**						100 %	**238,708,200**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	43,680,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	471 Orang	12,281,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	3,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	441 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	4,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	441 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	30,182,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1765 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	36,485,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	500 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	8,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	17230 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	20,020,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	4118 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	3,660,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	2761 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	9,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	887 Orang	10,426,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	13,110,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	84 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	3,150,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	114 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	1,800,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	362 Orang	6,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	135,320,254	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	7 Dokumen	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	3 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1529 Dokumen	63,515,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1529 Dokumen	17,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	5,325,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	26,570,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Dokumen	42,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	84,809,250	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	3 Dokumen	34,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	24,210,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	16,305,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Dokumen	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	7 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tenaga Kontrak di Puskesmas dibagi Jumlah Tenaga Kontrak yang Seharusnya Ada di Puskesmas dikali 100	%		%	100 %	**31,568,496**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	31,568,496	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	3 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,650,000**						62 %	**5,500,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan yang Terlaksana dibagi Jumlah Kegiatan yang ada dikali 100	%		%	100 %	**4,650,000**						100 %	**5,500,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	4,650,000	Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cawas II	3 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,090,826,000**							**1,791,684,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,362,636,000**								**3,363,076,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,684,000,000**						100 %	**2,684,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	**2,684,000,000**						1 Unit Kerja	**2,684,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,684,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BLUD & Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Unit Kerja	2,684,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%		%	100 %	**658,291,750**						100 %	**658,291,750**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%		%	100 %	**658,291,750**						100 %	**658,291,750**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	43,908,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	471 orang	43,908,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	3,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	441 orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 orang	4,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	441 orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 orang	47,628,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1765 orang	47,628,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 orang	42,066,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	500 orang	42,066,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 orang	20,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	17230 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 orang	2,878,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	4118 orang	2,878,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 orang	8,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	2761 orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	887 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	84 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	114 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan				362 orang	10,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	362 orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	71,262,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	71,262,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	36,630,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	36,630,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8,280,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	8,280,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	82,893,750	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	92,893,750	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	66,412,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	66,412,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1,890,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	1,890,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	163,444,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	163,444,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**15,784,250**						100 %	**15,784,250**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Orang		Orang	2 Orang	**15,784,250**						2 Orang	**15,784,250**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2 orang	15,784,250	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	2 orang	15,784,250	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,560,000**						62 %	**5,000,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**4,560,000**						1 Dokumen	**5,000,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4,560,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 1	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**3,362,636,000**							**3,363,076,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2,880,232,907**								**2,407,822,924**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**2,086,230,907**						100 %	**2,045,700,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Prosentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%		%	100 %	**2,086,230,907**						100 %	**2,045,700,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,086,230,907	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai & Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Unit Kerja	2,045,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	%		%	100 %	**702,535,008**						100 %	**315,796,924**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	%		%	100 %	**702,535,008**						100 %	**315,796,924**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 Orang	47,912,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	471 Orang	24,690,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	5,880,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	441 Orang	3,207,824	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				441 Orang	900,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	441 Orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1765 Orang	36,560,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1765 Orang	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	21,378,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	500 Orang	23,131,600	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17230 Orang	25,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	17230 Orang	13,151,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4118 Orang	12,420,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	4118 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2761 Orang	9,030,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	2761 Orang	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 Orang	9,030,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	887 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				84 Orang	8,940,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	84 Orang	9,792,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				114 Orang	2,880,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	114 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang	1,800,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	362 Orang	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				7 Dokumen	122,550,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	7 Dokumen	14,824,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				3 Dokumen	25,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	3 Dokumen	4,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakatzi				1 Dokumen	42,940,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	24,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	20,110,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	48,240,000	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	36,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	113,060,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	3 Dokumen	36,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1,800,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	96,835,008	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Dokumen	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	270,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	1 Laporan	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				7 Dokumen	25,000,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	7 Dokumen	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Prosentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	%		%	100 %	**63,136,992**						100 %	**41,010,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	63,136,992	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	3 Orang	41,010,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**28,330,000**						62 %	**5,316,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar	%		%	100 %	**28,330,000**						100 %	**5,316,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	28,330,000	Kab. Klaten, Trucuk, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Trucuk 2	3 Dokumen	5,316,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL	**2,880,232,907**							**2,407,822,924**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4,344,980,093**								**4,582,235,900**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**3,430,000,000**						100 %	**3,825,230,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	%		%	100 %	**3,430,000,000**						100 %	**3,825,230,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,430,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	1 Unit Kerja	3,825,230,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%		%	100 %	**863,387,349**						100 %	**703,505,900**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	%		%	100 %	**863,387,349**						100 %	**703,505,900**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				471 orang	116,833,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	471 orang	25,184,600	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 orang	270,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	4 orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 orang	1,440,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 orang	4,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1253 orang	102,607,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	1253 orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				693 orang	39,748,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	693 orang	26,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1229 orang	24,530,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	1229 orang	47,921,300	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				234 orang	11,180,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	234 orang	13,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 orang	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	12 Orang	1,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				248 Orang	6,650,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	248 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				54 Orang	2,676,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	54 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	12 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				300 Dokumen	81,525,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	300 Dokumen	82,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 dokumen	1,100,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Orang	50,220,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	200 Orang	51,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				150 dokumen	14,490,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	150 dokumen	15,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				700 dokumen	133,481,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	700 dokumen	134,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				600 dokumen	120,387,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	600 dokumen	121,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				10 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 dokumen	1,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 dokumen	1,260,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	12 dokumen	1,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				600 dokumen	149,090,349	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	600 dokumen	142,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 laporan	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				10 dokumen	1,000,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	10 dokumen	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**48,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	**47,352,744**						100 %	**48,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang 3 orang	47,352,744	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	tenaga kesehatan puskesmas	0 Orang 3 orang	48,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan Desa Siaga Aktif	%		%	62 %	**4,240,000**						62 %	**5,500,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	petugas promkes dan tenaga kesehatan lain yang dilatih	%		%	100 %	**4,240,000**						100 %	**5,500,000**	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 dokumen	4,240,000	Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan kualitas sumber daya manusia	masyarakat di wilayah kerja puskesmas bayat	3 dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
										TOTAL	**4,344,980,093**							**4,582,235,900**	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN KLATEN

dr. Cahyono Widodo, M.Kes
Pembina Tk.I
NIP. 19670210 199603 1 006

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Jalan Pemuda Nomor 297

Telp. (0272) 321030 KLATEN – 57412

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Dalam Penyusunan Rencana Kerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten mempedomani Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta dalam proses penyusunannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Satpol PP serta berpedoman RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten secara strategis dimaksudkan untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD yang dituangkan dalam perencanaan strategis, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap isu yang berkembang.

Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten sebagai tolak-ukur pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten Tahun 2023, kami sampaikan terima kasih.

Klaten, Juli 2022

KEPALA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SATPOL PP
DAN DAMKAR
KLATEN

JOKO HENDRAWAN,SH.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19680510 199603 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

I. **BAB I Pendahuluan** 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

II. **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu** 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 36

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 50

III. **BAB III Tujuan dan Sasaran Peraturan Daerah** 51

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Rasional dari Provinsi 51

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 52

IV. **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah** 53

V. **BAB V Penutup** 54

5.1 . Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 54

5.2 . Kaidah Pelaksanaan 54

5.3 . Rencana Tindak Lanjut 55

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a.persiapan penyusunan, b.penyusunan rancangan awal, c.penyusunan rancangan, d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Mempedomani Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah berpedoman pada renstra perangkat daerah, hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman yang baru diterbitkan menggantikan Renstra Tahun 2016-2021.

Penyusunan juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dimana pada tahun 2020 terjadi pandemi *corona virus disease 2019* (*COVID-19*) dan masih berlangsung sampai saat ini. Memperhatikan keadaan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dalam pelaksanaan tugasnya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ikut serta

dalam upaya mencegah penularan COVID-19 dengan menambah kuantitas kegiatan patroli pencegahan penularan COVID-19.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rencana Kerja perangkat daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana Kerja RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rencana kerja RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja RKPD yang disusun kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Mempedomani Pasal 84 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan rencana kerja RKPD.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian

pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

54. Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
55. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
56. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
57. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten;
58. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2021);
59. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
60. Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman pada Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dalam Bab ini memuat memuat point-point meliputi :

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisa kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam bab ini meliputi :
3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan dituangkan dalam tabel yang telah ditampilkan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Klaten yaitu Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten mengemban Fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten sudah ditetapkan program dan kegiatan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2021 dapat dikatakan mencapai target sesuai yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

A. Realisasi program/kegiatan/Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

d. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Astribut Kelengkapannya

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Inslalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel

d. Penyediaam Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
        - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
        - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
        - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
        - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
        - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
        - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
        - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
        - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
        - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Program Penanggulanagan Bencana
    a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
        - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
    a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (Tidak ada)

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerjaCprogram/kegiatan

- Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
  - Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 di tahun 2021;
  - Adanya *refocusing* anggaran kegiatan;
  - Ketidaktepatan penentuan target kinerja.
- Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :
  - Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Tersedianya anggaran yang cukup sehingga kegiatan terlaksana dengan baik;
  - Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil.
- Faktor-faktor yang menyebabkan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan (tidak ada)

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, tercapainya program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten dan bisa di rasakan oleh semua lapisan masyarakat.

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil mengatasi faktor-faktor penyebab di atas

a. Perlunya menjaga konsistensi Renstra Perangkat Daerah dan Renja

Perangkat Daerah;

b. Perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi program kegiatan dan kepemihakan anggaran;
c. Perlunya fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah dilampirkan pada ***Tabel 2.1***

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pilihan :										
Bidang Urusan : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten										
1.1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	**100%**		**100%**	**100%**	**100**		**100%**	
1.1.05.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun*	**100%**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	
1.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		-			7 Dokumen	7 Dokumen	
1.1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		-			10 Laporan	10 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.05.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*	100%		100%	100%		100%		
1.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan		55 orang	55 orang	100	55 orang	55 orang	
1.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen					468 dokumen	468 dokumen	
1.1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan					15 laporan	15 laporan	
1.1.05.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu*	100%		100%	100%	100	100%	100%	
1.1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 paket		106 orang	106 orang	100	190 paket	190 paket	
1.1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 dokumen		-	-	-	15 dokumen	15 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	300 orang		-	-	-	-	-	-
1.1.05.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu*	100%		100%	100%		100%	100%	
1.1.5.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket		8 unit	8 unit	100	2 unit	2 unit	
1.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket		25 unit	25 unit	100	20 unit	20 unit	
1.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket		10 paket	10 paket	100	3 paket	3 paket	
1.1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	
1.1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan		20 laporan	20 laporan	100	20 laporan	20 laporan	
1.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan		10 laporan	10 laporan	100	15 laporan	15 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.05.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*	100%		100%	100%		100%	100%	
1.1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit		0 unit	1 unit		4 unit	4 unit	
1.1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		0 unit	0 unit		1 unit	1 unit	
1.1.05.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*	**100%**		**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	
1.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan		1500 laporan	1500 laporan	100	1500 laporan	1500 laporan	
1.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	
1.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	3 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah terpelihara*	100%		100%	100%	100	100%	100%	
1.1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit		30 unit	16 unit	53	10 unit	10 unit	
1.1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit		1 unit	1 unit	
1.1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	
1.1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit		20 unit	20 unit	100	15 unit	15 unit	
1.1.05.02	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	*Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan* *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan* *Persentase gangguanmTrantibum yang dapat diselesaikan*	*43%* *100%* *92,40%*		100%	42%	42	*42 %* *100 %* *92 %*	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	*100%*					*100 %*		
1.1.05.02.2.01	*Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	*Prosentase peningkatan lingkungan yang nyaman dan aman*	100%		100%	100%	100		100%	
1.1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	85 kasus		110 kasus	110 kasus	100		70 kasus	
1.1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	40 kasus		30 kasus	15 kasus	50		20 kasus	
1.1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban	10 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100		5 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
1.1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1000 dokumen		1000 dokumen	1000 dokumen	100		1000 dokumen	
1.1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	36 orang		20 orang	20 orang	100		50 orang	
1.1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100		5 dokumen	
1.1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 laporan		-	-			3 laporan	
1.1.05.02.2.02	*Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan*	*Persentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian*	100%		100%	100%	100		100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bupati/Walikota	*masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten*								
1.1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 laporan		20 laporan	20 laporan	100		10 laporan	
1.1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	365 Laporan		440 laporan	440 laporan	100		440 laporan	
1.1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Klaten	30 laporan		37 laporan	12 laporan	32		30 laporan	
1.1.05.02.2.03	*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	*Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina*	100%		-	-		100%	100%	
1.1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan	4 Laporan		-	-		4 Laporan	4 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada								
1.1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran:**	**Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** **Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** **Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**	70% 15 menit 100%		100%	100%		65% 15 menit 100%		
1.1.05.04.2.01	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten*	100%		100%	100%		100%	100%	
1.1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulanga Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen						1 dokumen	
1.1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan		29 laporan	27 laporan	93		29 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 dokumen						8 dokumen	
1.1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27 orang						27 orang	
1.1.05.04.2.02	*Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	*Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan*	100%					100%	100%	
1.1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkung yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	
1.1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pendataan	40 dokumen					20 dokumen	20 dokumen	
1.1.05.04.2.04	*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*	*Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran*	100%					100%	100%	
1.1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan	50 orang					4 kegiatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya								
1.1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan					6 kegiatan	6 desa/kelurahan	
1.1.05.04.2.05	*Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	*Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	100%					100%	100%	
1.1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 laporan					10 laporan	10 laporan	
1.1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 unit					2 unit	2 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program,Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 laporan					75 laporan	75 laporan	

Klaten, Juli 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KLATEN

JOKO HENDRAWAN,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680510 199603 1 001

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Satuan Kerja Pangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten dibentuk berdasarkan Peratuan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten; adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. **Tugas Satuan Polisi Pamong Praja** adalah,
   a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   b. Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
   c. Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
2. **Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah sebagai berikut :

   Melaksanakan kebijakan di bidang
   1. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
   2. Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
   3. Pemadam Kebakaran
   4. Koordinasi dengan Kepolisian, PPNS dan atau aparatur lainnya
   5. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, Badan Hukum agar mematuhi Perda dan Perbub
   6. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran** adalah sebagai berikut :

   Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang Pemadam Kebakaran dan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

   a. penyusunan program kerja bidang pemadam kebakaran;
   b. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
   c. pelaksan aan koordinasi bidang Pemadam kebakaran;
   d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemadam kebakaran;
   e. pengoordinasian program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Pemerintah mengeluarkan pedoman dalam menetapkan standar pelayanan minimal untuk diterapkan pada Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal sub-Urusan Kebakaran daerah kabupaten/kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan minimal sub-Urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota.

Pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum. Jenis pelayanan dasar ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten yang mengemban urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk jenis pelayanan dasar :

1. Jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran adalah Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum adalah Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada

Pada tahun 2020 terjadi peristiwa menyebarnya *coronavirus disease 2019*, disingkat COVID-19 di Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pandemi ini berlangsung sampat saat ini dengan kecenderungan penurunan kasus di Tahun 2022. Memperhatikan keadaan tersebut maka Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten tetap melaksanaan tugas kegitan patroli pencegahan penularan COVID-19 dengan memfokuskan pada penegakkan prokes dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Hal tersebut ikut mempengaruhi indikator standar pelayanan minimal jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum. Tabel penyajian pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah sebagai mana tercantum dalam tabel 2.2.

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	√	100	100	100	100	100		100	100	
2.	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	√	100	100	100	100	100		100	100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten ada dua (2) indikator dimana di Target Renstra 2021-2026 keduanya 100%. Realisasi indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah 100% dimana setiap laporan kejadian kebakaran selalu dilayani oleh pemadam kebakaran. Sedangkan realisasi presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada tahun 2022 belum dapat dihitung karena masih tahun berjalan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten, sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran di mana kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan pengisian kelas jabatan masih ada yang kosong.
b) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
c) Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain (terkait) dalam mengatasi permasalahan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran di Kabupaten Klaten;

d) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.
e) Peristiwa penyebaran COVID-19 mempengaruhi dan merubah sistem kerja aparatur dimana mereka tidak hanya bekerja sesuai tugas fungsinya namun juga bekerja memperhatikan protokol kesehatan terutama untuk anggota Satpol PP harus bekerja lebih keras dalam upaya menyadarkan masyarakat akan bahayanya COVID-19 dengan sering melaksanakan tugas patroli operasi penegakan protokol kesehatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a) Terbatasnya SDM (Personil dan Kemampuan);
b) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana dalam menjalankan tugas;
c) Kurangnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan pencegahan penanganan COVID-19;
d) Terdapat *refocussing* anggaran untuk kegiatan prioritas.

2.3.3. Dampak Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

1) Dampaknya Terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Berdampak Pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
   a) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan operasional dan pengembangan pelayanan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

- Kerjasama dan dukungan sektor lain terhadap bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan trantibum merupakan tanggung jawab Satpol PP dan Damkar Kab.Klaten saja.
- Ketersedian Sumber Daya Trantibum baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana serta distribusi penempatan yang belum optimal.
- Belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja.
- Kurangnya ketersediaan anggaran di bidang Trantibum dan Damkar
- Bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Masih banyaknya WTS, Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar yang angkanya meningkat karena kesuliatan ekonomi akibat situasi pandemi.
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya
  a. Masih banyaknya PKL yang berjualan di trotoar padahal itu mengganggu pejalan kaki dikarenakan sedikit tersedianya area khusus berjualan untuk para PKL.
  b. Masih banyaknya pemasangan reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda Penyelenggaraan Reklame sehingga kelihatan tidak rapi (liar).
- Pemadam Kebakaran
  - Luas wilayah Kabupaten Klaten 655,6 km^2 berdasarkan kajian rencana induk sistem proteksi kebakaran pada tahun 2011 bahwa Kabupaten Klaten terbagi dalam 13 wilayah manajemen kebakaran. Sampai kondisi saat ini, dari ke-13 wilayah tersebut baru dapat dilayani dalam 1 (satu) wilayah manajemen.
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan (Mobil pompa, mobil *rescue*, mobil komando, dan sarana penyelamatan lainnya)
  - Kekurangan jumlah Personil Pemadam Kebakaran untuk menjangkau wilayah Kabupaten Klaten idealnya 1 unit 8

Personil. Sementara Pemadam Kebakaran Klaten memiliki 5 Unit dengan jumlah Personil 30.

- Jumlah pos pemadam yang hanya 1,tidak bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten, sehingga standar *response time* yang ditetapkan dalam satu wilayah manajemen kebakaran 7,5 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi.
- Hidran kota yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan baik.
- Minimnya pengetahuan sebagian warga masyaraat Klaten dalam pemadaman kebakaran.
- Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam peran serta dalam pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran.
- Layanan *emergency call* seringkali mengalami gangguan sehingga menghambat pelayanan pemadam kebakaran.

b. Peluang

- Adanya dukungan data dan informasi baik dari Pemkab Klaten, Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kabupaten/Kota lain maupun dari instansi terkait.
- Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan Tekonologi Informasi
- Munculnya organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sukarela seperti SAR, Sukarela Bencana, dan lain-lain sebagai sebagai mitra dalam mempermudah urusan ketentraman dan ketertiban umum.

2.3.5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas di Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati

a. Satpol PP bekerja sama dengan Dinas terkait (DPMPTSP, Diskominfo dan Disperwaskim) melakukan upaya pengawasan

terhadap menara telekomunikasi seluler (Tower BTS) yang dilengkapi ijin, apabila pemilik tower tidak mematuhi aturan maka bangunannya ditutup/disegel;

b. Satpol PP dan Dinas Sosial terkait mengadakan pembinaan dan Operasi rutin penertiban WTS, pengemis, gelandangan dan orang terlantar supaya tidak melakukan kegiatan pelanggaran perda dan perbub yang serupa.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peluang dan solusi sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Satpol PP dan Dinas terkait melakukan upaya penempatan PKL di tempat tersendiri (dibuatkan tempat khusus untuk berjualan sesuai peraturan bupati);
b. Satpol PP secara rutin melakukan penertiban reklame yang melanggar Perda K3 dan Perda penyelenggaraan reklame;
c. Turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19 secara menyeluruh di seluruh kecamatan wilayah kabupaten Klaten terutama pada area yang rawan penyebaran COVID-19 sesuai instruksi Peraturan Bupati Klaten.

3. Bidang Pemadam Kebakaran

Peluang dan solusi sebagai kesempatan yang dapat dilakukan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Perlunya penambahan Alat Pelindung Diri bagi Personil Pemadam Kebakaran;
b. Perlu Penambahan Pesonil Pemadam Kebakaran dengan petugas siaga minimal 1 hari dibagi 3 *shift*;
c. Perlunya penambahan posko damkar di daerah, berdasarkan kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang pernah dilaksanakan (Th 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 7 posko pemadam kebakaran;
d. Perlunya pemeliharaan Hidran di seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara rutin;

e. Perlu tambahan personil dan peralatan yang memadai untuk operasi tangkap tawon;
f. Perlunya kesadaran masyarakat/sosialisasi tentang bahaya tawon dan untuk antisipasinya perlunya melibatkan instansi terkait (SAR, tenaga medis dan para ahli);
g. Perlu dibentuk Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran) yang terbina dan berwawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2023 terdapat penambahan anggaran terutama pada sub kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan. Hal ini diproyeksikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.Klaten akan melaksanakan pengawalan dan pengamanan lebih pada penyelenggaraan pilkades, *car free day,* pengamanan hari raya idul fitri, idul adha dan hari raya natal tahun 2023. Kemudian sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan sesuai rencana dan terdapat anggaran dana untuk tahun 2023 mengingat pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Rincian review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.KLATEN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten /Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**6.501.571.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota**	**Satpol PP dan Damkar**	**Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**6.509.871.000**	
1.1.05.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Satpol PP dan Damkar*	*Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun*	**100%**	**13.770.000**	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Satpol PP dan Damkar*	*Presentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun*	**100%**	**14.770.000**	
1.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.770.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.770.000	
1.1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.000.000	
1.1.05.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase pembayaran gaji tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*	100 %	**5.894.922.950**	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	**5.894.922.950**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	5.884.362.950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/bulan	5.884.362.950	
1.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 dokumen	6.000.000	
1.1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	4.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 laporan	4.560.000	
1.1.05.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu*	100%	**103.878.000**	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %	**111.178.000**	
1.1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115 paket	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP dan Damkar	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115 paket	100.000.000	
1.1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 dokumen	3.878.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 dokumen	3.878.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 orang	7.300.000	
1.1.05.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu*	100%	**90.500.050**	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu*	100%	**90.500.050**	
1.1.5.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	2.500.000	
1.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	10.000.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	10.000.050	
1.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.000.000	
1.1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.000.000	
1.1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	20 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	20 laporan	15.000.000	
1.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*	100 %	***22.000.000***	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*	100 %	***22.000.000***	
1.1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	10.000.000	
1.1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung Gedung KantoratauBangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.000.000	Pengadaan Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.000.000	
1.1.05.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Presentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*	**100 %**	***72.500.000***	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Presentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*	**100 %**	***72.500.000***	
1.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 laporan	2.500.000	
1.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	25.000.000	
1.05.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara*	100 %	***304.000.000***	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara*	100 %	***304.000.000***	
1.1.05.01.2.09.02	Penyediaan JasaPemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	244.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	244.000.000	
1.1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	50.000.000	
1.1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000	
1.1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
	Kantor atau Bangunan Lainnya										
1.1.05.02	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	Satpol PP dan Damkar	**Presentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**	100 %	**1.072.500.000**	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	Satpol PP dan Damkar	**Presentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan**	100 %	**3.799.200.000**	
1.1.05.02.2.01	*Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman*	100 %	***794.500.000***	*Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman*	100 %	***3.347.200.000***	
1.1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	85 kasus	660.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	90 kasus	3.212.700.000	
1.1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban UmumBerdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban danPenanganan Unjuk Rasa dan	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	40 kasus	10.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban UmumBerdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban danPenanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	40 kasus	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
	Kerusuhan Massa		Penindakan					Penindakan			
1.1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 dokumen	5.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 dokumen	5.000.000	
1.1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentramandan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1000 dokumen	70.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentramandan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1000 dokumen	70.000.000	
1.1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP dan Damkar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	36 orang	39.500.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP dan Damkar	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	36 orang	39.500.000	
1.1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7 dokumen	5.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahandan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	7 dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
	Pencegahandan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
1.1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda danPerkada	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 laporan	5.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda danPerkada	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 laporan	5.000.000	
1.1.05.02.2.02	*Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota*	Satpol PP dan Damkar	*Presentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten*	100 %	***275.000.000***	*Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota*	Satpol PP dan Damkar	*Presentase kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran perda/perbub di kabupaten klaten*	100 %	***449.000.000***	
1.1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 laporan	5.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 laporan	5.000.000	
1.1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	365 laporan	250.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	365 laporan	250.000.000	
1.1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 laporan	20.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	30 laporan	194.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.02.2.03	*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina*	100 %	**3.000.000**	*Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota*	Satpol PP dan Damkar	*Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terbina*	100 %	**3.000.000**	
1.1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	3.000.000	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	3.000.000	
1.1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran:**	**Satpol PP dan Damkar**	**Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** **Tingkat waktu tanggap *(response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** **Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**	100 %	**630.772.000**	**Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran:**	**Satpol PP dan Damkar**	**Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** **Tingkat waktu tanggap *(response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)** **Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran**	100 %	**830.772.000**	
1.1.05.04.2.01	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran Dalam Daerah*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten*	100 %	***610.700.000***	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten*	100 %	***810.700.000***	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
	Kabupaten/Kota										
1.1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	3.200.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	3.200.000	
1.1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	600.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 laporan	800.000.000	
1.1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 dokumen	5.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	10 dokumen	5.000.000	
1.1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27 orang	2.500.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27 orang	2.500.000	
1.1.05.04.2.02	*Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan*	100 %	**9.000.000**	*Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan pelayanan pemeriksaan dan pendataan*	100 %	**9.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 dokumen	4.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	5 dokumen	4.000.000	
1.1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40 dokumen	5.000.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40 dokumen	5.000.000	
1.1.05.04.2.04	*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran*	100 %	***5.000.000***	*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran*	100 %	***5.000.000***	
1.1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	10 laporan	2.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 orang	2.000.000	
1.1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 desa/ kelurahan	3.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 desa/kelurahan	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Catatan Penting**
1.1.05.04.2.05	*Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	100 %	***6.072.000***	*Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	Satpol PP dan Damkar	*Cakupan Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	100 %	***6.072.000***	
1.1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan padaPeristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan manusia	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 laporan	2.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan padaPeristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan manusia	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 laporan	2.000.000	
1.1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolonganterhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 unit	2.072.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 unit	2.072.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap KondisiMembahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 laporan	2.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP dan Damkar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	50 laporan	2.000.000	
Jumlah					**8.322.491.000**	**Jumlah**				**11.139.843.000**	

Klaten, Juli 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KLATEN

JOKO HENDRAWAN,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680510 199603 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak ada perubahan program namun ada penambahan sub kegiatan yaitu sosialisasi peraturan perundangan guna sosialisasi peraturan daerah yang komprehensif hingga ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Terdapat inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman tan ketertiban umum diantaranya Sanggar Pedati (Satuan Anti Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati).

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	NIHIL	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERATURAN DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah hal tersebut dapat di uraikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan usulan rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Rancangan Awal Rencana Kerja 2023
1	2	3	4
1. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa tujuan OPD yaitu

"**Meningkatkan penanganan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat".**

2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa sasaran OPD adalah

a. **Meningkatnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten;**
b. **Meningkatnya waktu tanggap darurat serta Penanggulangan kebakaran dalam WMK (Wilayah Managemen Kebakaran).**

3. Kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- Kebijakan bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- Kebijakan terkait standar, prosedur dan kriteria penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- Kebijakan terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman masyarakat;
- Kebijakan bidang operasi ketentraman dan ketertiban.

4. Kebijakan Bidang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Kebijakan terkait program kerja bidang pemadam kebakaran;
- Kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- Kebijakan terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemadam kebakaran;
- Kebijakan terkait program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten tahun 2023 disajikan pada ***Tabel*** dalam dokumen ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENUTUP

Rencana kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib yaitu Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sehingga Rencana Kerja tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.

a. Catatan penting

Dalam upaya mensikapi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan diperlukan upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program/ kegiatan serta pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN.

b. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan rencana kerja perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022.

Agar pelaksanaan renja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan teruta masinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan pelaksanaan arah kebijakan dan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Rumusan arah kebijakan terdapat enam program unggulan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Klaten Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Enam program unggulan yaitu Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi (Klaten Mapan, Keren, Laris, Santer), Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran (Klaten Subur, Cetar, Tangkis), Peningkatan kualitas SDM (Klaten Toleran, Waras, Tuntas), Peningkatan kelestarian lingkungan hidup, SDA dan pengurangan resiko bencana (Klaten Tangguh, Lestari), Peningkatan kualitas pelayanan publik (Klaten Cerdas, Cekatan), serta Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Klaten Mantap). Hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten tahun 2022 merupakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten yang mendukung mewujudkan visi misi Kabupaten Klaten Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

KEPALA
SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN KLATEN

JOKO HENDRAWAN,SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680510 199603 1 00

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**11,139,843,000**					**11,209,394,000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,509,871,000**					**8,171,000,000**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,770,000**					**25,000,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	7 Dokumen	100 %	7,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	10 Laporan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	15,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,894,922,950**					**6,730,000,000**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	45 orang/bulan	100 %	5,884,362,950	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	6,700,000,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	360 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	16 Laporan	100 %	4,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**111,178,000**					**360,000,000**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terselesaikannya Administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	115 Paket	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	150,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselesaikannya Administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	20 Dokumen	100 %	3,878,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselesaikannya Administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	300 Orang	100 %	7,300,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	200,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**90,500,050**					**165,000,000**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	8 Paket	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	20 Paket	100 %	10,000,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	5 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	3 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	20 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	25,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	85,000,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**22,000,000**					**35,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	5 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	1 Unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	25,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,500,000**					**75,000,000**
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	1500 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,000,000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	12 Laporan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	35,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	12 Laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	35,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**304,000,000**					**781,000,000**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	5 Unit	100 %	244,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	750,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	2 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	0
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	2 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 %	15 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	6,000,000
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**3,799,200,000**					**1,976,191,000**
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**3,347,200,000**					**1,585,000,000**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	90 Kasus	100 %	3,212,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	1,250,000,000
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	40 Kasus	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	45,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	10 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	20,000,000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	1000 Dokumen	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	36 orang	100 %	39,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	120,000,000
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	7 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Terwujudnya peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	5 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	15,000,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**449,000,000**					**376,191,000**
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	15 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	365 Laporan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	276,191,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Terlaksananya kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penyelesaian masalah pelanggaran Perda/Perbup di Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	30 Laporan	100 %	194,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	75,000,000
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**								**3,000,000**					**15,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Terbinanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	4 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	92.40 % 100.00 % 43.00 % 100.00 %	15,000,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**830,772,000**					**1,062,203,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**810,700,000**					**860,000,000**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Terpenuhinya Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	1 Dokumen	100 %	3,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	130,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	100 Laporan	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	700,000,000
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Terpenuhinya Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	10 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	15,000,000
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terpenuhinya Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	27 Orang	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	15,000,000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								**9,000,000**					**28,203,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pendataan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 % 100.00 % 15.00 Menit	5 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 100.00 % 15.00 Menit	13,203,000
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya pelayanan pemeriksaan dan pendataan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 % 100.00 % 15.00 Menit	40 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 100.00 % 15.00 Menit	15,000,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**5,000,000**					**32,000,000**
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Terwujudnya pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	50 Orang	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Terwujudnya pelayanan pencegahan penanggulangan kebakaran	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	2 Desa/Kelurahan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	15,000,000
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**								**6,072,000**					**142,000,000**
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	10 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	25,000,000
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Terlaksananya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Mojayan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	3 Unit	100 %	2,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Terlaksananya Pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Tonggalan	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	50 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100.00 % 70.00 % 15.00 Menit	17,000,000
												TOTAL	**11,139,843,000**					**11,209,394,000**

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Semuan kebijakan Rencana Kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan system kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang semakin professional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsive, transparan dan akuntabel.

Klaten, Juli 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten

Drs. MUCH. NASIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampat tingkat Kabupaten, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja OPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan serta mengacu pada kebijakan pmerintah tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Kerja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten merupakan pedoman bagi Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya Renja OPD Dinas Ssoial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Angaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi pada tahun 2022 adalah munculnya wabah pandemi covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan daerah di tahun 2023 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020.

Perubahan isu strategis tahun 2023 karena adanya pandemic covid-19, sehingga prioritas rencana pembangunan yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan difokuskan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan daerah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dam/atau stabilitas system keuangan, maka program dan kegiatan yang ada dalam belanja langsung perangkat daerah difokuskan sasarannya pada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19, terutama Mitigasi Resiko Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), serta pemulihan perekonomian untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Selain itu, sasaran program dan kegiatan perangkat daerah juga ditekankan pada 3 hal antara lain : berorientasi pada keluarga, hasil, manfaat dan dampak yang terukur dengan memperhatikan pada capaian kinerja tahun 2021.

Pada RPJMD 2021-2026 arah kebijakan tahunan menjadi acuan dan penentuan prioritas dan focus pembangunan pada setiap tahunnya. Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang berkelanjutan”. Pada prioritas pembangunan tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten diarahkan untuk mendukung prioritas Pengurangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran dan Pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dari prioritas pembangunan tersebut Rancangan Renja OPD 2023 menjabarkan program dan kegiatan sesuai prioritas yang memuat kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun berikutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah :

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehya program-program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2023.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2023.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 Kabupaten Klaten

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 yakni :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021)
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Renja Tahun 2021 telah ditetapkan 15 Program, 29 Kegiatan dan 59 subkegiatan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISSOSP3AKB yang mencakup 3 urusan pemerintahan yaitu Sosial, PPPA dan Dalduk KB. Pelaksanaan Program/Kegiatan DISSOSP3AKB pada tahun 2021 dapat dikatakan mencapai target yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah indicator dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu Tahapan Kabupaten Layak Anak dengan target Nindya sedangkan realisasi masih Madya, tidak tercapai. Hal ini dikarenakan cakupan Desa Layak Anak yang belum memenuhi kriteria tingkat Nindya, belum adanya kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok, serta kurangnya koordinasi secara intensif terkait Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok.

   Realisasi Kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 4 kegiatan yaitu :

   1. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 85 %
   2. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 81%
   3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 55%
   4. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 90%
   5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 75%
   6. Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 70%

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ada 60 kegiatan, yaitu :

   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   10. Pengadaan Mebel
   11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   18. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

19. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
20. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
21. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
22. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
23. Pemberian Layanan Kedaruratan
24. Penyediaan Permakanan
25. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
26. Penyediaan Makanan
27. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
28. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
29. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
30. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
31. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
33. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
35. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
36. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
37. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
40. Perumusan Parameter Kependudukan
41. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
42. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
43. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
44. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
45. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
46. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
47. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
48. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
49. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas
Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

50. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
51. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
52. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
53. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
    1) Tidak tercapainya target subkegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK dikarenakan volume pelaksanaan Rapat koordinasi kecamatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target akibat aturan PPKM di masa pandemi ;
    2) Tidak tercapainya target subkegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dikarenakan uang harian yang tidak dapat terserap, akan tetapi secara kegiatan sudah terlaksana sesuai target yang direncanakan;
    3) Tidak tercapainya target subkegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dikarenakan pada kondisi pandemic tidak diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, yaitu rapat koordinasi teknis terkait penyuluhan dan pengolahan data, sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana sesuai target;
    4) Tidak tercapainya target subkegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dikarenakan untuk uang harian penyuluhan oleh kader bagi masyarakat tidak dapat terserap akan tetapi untuk frekuensi kegiatan tetap berjalan;
    5) Tidak tercapainya target subkegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dikarenakan untuk uang harian penyuluhan oleh kader bagi masyarakat tidak dapat terserap akan tetapi untuk frekuensi kegiatan tetap berjalan. Subkegiatan ini merupakan hasil pemetaan subkegiatan oleh kemendagri, sehingga subkegiatan ini secara subtansi sama dengan subkegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB ;
    6) Tidak tercapainya target subkegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dikarenakan pada kondisi pandemic tidak diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, yaitu pertemuan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana sesuai target;

    Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan pada 53 kegiatan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
    1) Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil, misalnya Penyediaan ATK, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
    2) Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;
    3) Terpenuhinya kebutuhan anggaran pada perubahan anggaran 2021 sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Tidak tercapainya target capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada

tahun n+1 karena kalau hal itu tidak dilakukan maka target pada akhir Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :
   1) Evaluasi pelaksanaan renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai dengan ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan;
   2) Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja apabila diketemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

   Adapun evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara lengkap disajikan pada lampiran Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DISSOSP3APPKB mencakup 3 urusan pemerintahan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kinerja pelayanan Pertangkat daerah yang meliputi 3 (tiga) urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai target yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian di bawah ini :

a. Urusan sosial
   1) Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS;
   2) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS;
   3) Pendanaan untuk jaminan perlindungan social terbatas.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1) Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga;
   2) Belum optimalnya jaminan perlindungan perempuan dan anak.

c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   1) Belum optimalnya pemerataan advokasi dan pelayanan KB;
   2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ber-KB;
   3) Masih rendahnya caupan pelayanan KB di Pedesaan dan Keluarga Pra Sejahtera.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program Renstra, dimana untuk target kegiatan tersebut juga tidak mencapai hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni :

a. Urusan Sosial
   1) Dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga intervensi/penanganan terhadap PMKS dapat tepat sasaran;
   2) Sinergi dengan sektor lain untuk memberikan jaminan dan perlindungan PMKS;
   3) Kemitraan dengan pihak lain untuk ikut memberikan bantuan sosial ekonomi;

b. Urusan PPPA
   1) Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan.

c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Metode KIE yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berKB, serta dukungan kuat pembiayaan, peningkatan sarana prasarana KB yang menjangkau daerah-daerah perdesaan dan Keluarga Pra Sejahtera.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja pelayanan secara lengkap disajikan dalam lampiran Tabel 2.2

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase PMKS yang tertangani			65	67,5	68	68,5	97,24		68	68,5	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			65	65,5	66	66,5	97,24		66	66,5	
3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dikalikan 100			100	100	100	100	100		100	100	
4	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti			65,5	66	66,5	67			66,5	67	
5		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						134,37				
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti						264,22				
7		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar						111,67				

		Panti										
8		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti						79,47				
9	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)				88,5	89	89,5			89	89,5	
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			100	100	100	100			100	100	
11		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100	100	100	100	100				
12	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	100	100	100	100		100	100	
13	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			NA	73,34	73,67	74	NA		73,67	74	
14	Nilai Dimensi Prasyarat PUG			NA	70	80	85	NA		80	85	
15	Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			NA	30	45	60	NA		45	60	
16	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,3	0,4	0,6	0,7	0,38		0,6	0,7	

17	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
18	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan			30	30	35	40	30		35	40	
19	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak			40,4	40,4	46,2	51,9			46,2	51,9	
20	Persentase desa/kelurahan layak anak			70,1	70,1	76,3	82,5	80,3		76,3	82,5	
21	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
22	Laju Pertumbuhan Penduduk			0,3	0,28	0,26	0,24	-4,12		0,26	0,24	
23	Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,08	2,06	2,04	1,6		2,06	2,04	
24	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan			83,33	83,33	100	100	83,33		100	100	

25	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan			85,71	85,71	85,71	100	85,71		85,71	100	
26	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71,5	71,5	72	72,5	70,3		72	72,5	
27	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15,95	15,95	15,45	14,95	14,45		15,45	14,95	
28	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB			82	82	83	84			83	84	
29	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB			75,42	75,42	75,92	76,42			75,92	76,42	
30	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB			64,88	64,88	65,38	65,88			65,38	65,88	
31	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB			63,29	63,29	63,79	64,29			63,79	64,29	
32	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						54				54	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan pada Dissosp3appkb, pada urusan Sosial sebagaimana diuraikan pada pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Program masih jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka *97,27%,* dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kabupaten Klaten mencapai *97,27%.*

   Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keberhasilan capaian indikator kinerja untuk perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) telah diraih pada tahun 2021 yaitu APE tingkat Madya dan penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya belum dapat diraih. Untuk Kabupaten Layak Anak belum dapat mencapai Nindya salah satunya dikarenakan kurangnya cakupan desa layak anak di kabupaten klaten, seharusnya minimal ada 320 desa layak anak dari 401 desa yang ada di Kabupaten Klaten, saat ini sudah terdapat 322 desa layak anak. Untukpendampingan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini dikarenakan kerjasama dengan Tim P2TP2A yang telahmelakukan advokasi dan fasilitasi pendampingan terhadap korban kekerasanterhadap perempuan dan perlindungan anak.Program/kegiatan secara umum telahsesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi atau dinilai antara lain penanganan tindak kekerasan bisa naik dan bisa turun namun tingkat penyelesaian yang berbeda-beda dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin paham terkait aturan-aturan sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.

   Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana target untuk persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tidak dapat disajikan datanya, dikarenakan pada pendataan tahun 2021 variabel dan metode pengukuran berbeda dengan pendataan sebelumnya. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik, namun perlu upaya-upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang harus ditingkatkan. Untuk capaian drop out KB dan Unmet Need juga masih relatif tinggi.

2. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klatententunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :
   a. Rumah Singgah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten masih belum memiliki pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk ketersediaan kebutuhan dasar pun belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan masalah sosial di Kabupaten Klaten, karena sarana dan prasarana terbatas.
   b. Data fakir miskin yang belum update sesuai kondisi di lapangan.
   c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat optimal.

d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (C*orporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
e. Belum adanya kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok, serta terkait Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok
f. Jumlah SDM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang kurang memadai, dan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh KB yang terbatas. Untuk menggalakkan program kependudukan maka memanfatkan adanya kader KB Desa untuk dapat membantu penggerakan dan penyuluhan.
g. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Klaten.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, pada dissosp3akb standar pelayanan minimal terdapat pada urusan sosial. Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Klaten sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Klaten.
4. Tantangan dan peluang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :
   a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Klaten terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya 3 (tiga) urusan pemerintahan yang ada di DISSOSP3AKB yaitu urusan sosial, PPPA dan Dalduk KB masuk dalam indikator sasaran RPJMD tahun 2021-2026 dan urusan sosial yaitu dalam hal penanganan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan tahun 2023.
   b. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
5. Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih terdapat indikator yang masih belum tercapai yakni tentang penanganan keluarga miskin dan pelayanan terhadap PMKS. Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten pada Tahun 2021.

   Berkembangnya tahapan Kabupaten Layak Anak dan APE menjadi fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya menyiapkan serta mengusulkan Peraturan daerah dan Peraturan lainnyayang terkait dengan Kabupaten Layak Anak dan PUG.Target berkembangnya kabupaten menuju kota layak anak di 21 kecamatan telah dievaluasi dengan melakukan identifikasi lokasi layak untukanak, program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkantingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitasyang lebih fokus pada aspek-aspek yang

dievaluasi atau dinilai antara lain terbangunnya komitmen disemua pihak (OPD, Swasta, Masyarakat) untuk menuju kabupaten layak anak tahap Nindya.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten KlatenTahun 2016-2021, dimana apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Klaten tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Klaten, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

1. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Klaten, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 28.327.145.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) peruntukan belanja tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Urusan Wajib non pelayanan dasar), penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (Urusan wajib non pelayanan dasar) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan). Apabila melihat usulan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan usulan Musrenbang Kabupaten Klaten maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dapat tercapai sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.
2. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 terlampir pada lampiran Tabel 2.4.
3. Pada rumusan RKPD sudah menampung/mengakomodir kebutuhan dari Dissosp3akb, karena pada rumusan ini disusun berdasarkan *breakdown* renstra untuk Tahun anggaran 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Klaten dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

2. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Klaten selama bulan Februari 2022. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klatenperlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, hal ini menyebabkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023.
3. Daftar usulan warga masyarakat yang diakomodir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana renja Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten klaten disajikan dalam table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Beku	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo, Dukuh Ngasinan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Menden	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang tata boga
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngremboko	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

		Desa Bumiharjo, Dukuh Pusung	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Margi	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngudi	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Gondang	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karangan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Gondangsari	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

		Desa Dukuh	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Surowono	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Glonggong	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Tibayan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Lemahireng	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Pereng	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Kadilanggon	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karangduren	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Persandingan antara prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan usulan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kapasitas & Daya Saing Ekonomi Rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan LH, Pengurangan Resiko Bencana, dalam Rangka Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM Jateng Menuju SDM Jateng yang Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaani	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan & Kondusivitas Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

3.1.1 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:
a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.1.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Berdasarkan kebijakan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terciptanya kondisi sebagai berikut:
a. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

b. Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keadilan gender tercipta apabila tidak

terjadi diskriminasi atau ketidakadilan meliputi: (1) sterotype artinya pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat); (2) kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya; (3) beban ganda (*double burden*), artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya; (4) marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan; dan (5) subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.

c. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan menurut Kemen PPPA [1] adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

d. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak *(Convention On The Rights of The Child)*.

3.1.3 Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alatdan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatanKB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
c. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untukkeberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KBlanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif danEfisien (REE).
d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KBdan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan danpenyuluhan KB.
e. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, danpembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, sertapromosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaanalat dan obat kontrasepsi KB.
f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksibagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnyaWajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usiaperkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasanganusia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melaluikelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikankesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluargacalon akseptor untuk ber-KB.
h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data daninformasi kependudukan dan KB.
i. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasilpenelitian/ kajian Kependudukan, Keluarga Berencana danKetahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitiandengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sebagaimana dimuat dalam Renstra DISSOSP3AKB Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)
3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah. Sasaran DISSOSP3AKB sebagaimana tersebut dalam Renstra DISSOSPE3AKB Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	68
2.	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG	Nilai dimensi prasyarat PUG	%	80%
3.	Meningkatnya Nilai dimensi pelaksanaan PUG	Nilai dimensi pelaksanaan PUG	%	45%
4.	Menurunnya angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)		2,06

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2023 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berisi program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan focus pada penuntasan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan potensi local.

Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, Rencana Kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standard belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiscal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023.

Indikasi rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 terdiri dari 15 program dengan 34 kegiatan dan 98 subkegiatan.

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 tetap merujuk pada aturan-aturan yang tentunya perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2023, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 maka pada tahun 2023 ini disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Rancangan Rumusan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah program dan kegiatan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Pelaksanaan program dan kegiatan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Untuk pelayanan terutama pada penanganan PMKS tergantung anggaran/bantuan sosial yang disediakan baik pemerintah kabupaten klaten, provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah pusat. Capaian kinerja untuk penanganan PMKS mengikuti anggaran yang telah disiapkan, ketika anggaran tidak sesuai kebutuhan maka capaian kinerja untuk penanganan PMKS pun rendah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Rancangan Renja Perangkat DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2022 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre-point* (pokok-pokok) rencana, sebagai berikut:

a. Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung RKPD Tahun 2023.
b. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 28.657.145.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai 15 program dengan 34 kegiatan dan 98 subkegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera .***

Klaten, Juli 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Drs. MUCH. NASIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199302 1 002

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : DISSOSP3APPKB

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					URUSAN SOSIAL									
					BIDANG URUSAN SOSIAL									
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditunjang**			100	100	1	100	200	
1	06	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase konsistensi perencanaan**			100	100	100	100	200	
1	06	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			9	9	100	9	18	
1	06	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan**			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri			12	12	100	43	55	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah			216	216	100	0	216	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Peneragan			4	4	100	5	9	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia			62	62	100	970	1032	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan			8	8	100	200	208	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2	2	100	2400 %	26	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tersedia			775	775	100	48	823	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah			77	77	100	214	291	
1	06	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**			100	100	100	100	200	
					Pengadaan Mebel	Meubelair Terbeli			1	1	100	0	1	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor Terbeli			7	7	100	10	17	
						Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Terbeli			2	2	100		2	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim			200	175	87,5	300	475	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar			3	3	100	12	15	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL Administrasi Keuangan			4	4	100		4	
						THL Administrasi/Teknis Perkantor			2	2	100		2	
						THL Kebersihan Kantor			2	2	100		2	
1	06	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara			10	10	100	39	49	
						THL Pengemudi Kantor			1	1	100	1	2	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan gedung kantor terpelihara yang ramah anak dan ramah difabel			1	1	100	3	4	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara			32	32	100	25	57	
						THL Pengamanan Kantor			3	3	100		3	
1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Prosentase Keluarga Miskin, Penyandang Disabilitas, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan**			99	99	100	97	196	
					Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan**			100	100	100	0	100	
					Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Keluarga Miskin dan Penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan			175	175	100	0	175	
1	06	02	2.03		**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan**			100	100	100	97	197	
						Prosentase organisasi/lembaga yang terfasilitasi			100	100	100		100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan			26	26	100	26	52	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna aktif, CSR yang disalurkan untuk PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan			1	1	100	0	1	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			5	5	100	5	10	
						Pendamping PKH yang diberdayakan			230	230	100		230	
1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial)**			30	30	100	65,5	95,5	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	04	2.01		**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**			32	30	93,75	25	55	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belanja Bantuan Rehabilitasi Sosial			11	11	100	0	11	
						Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial			4		0	4	4	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Anak Rentan yang Mendapatkan Pelayanan			200	200	100	200	400	
						Lembaga Pemberi Layanan Data dan Pengaduan			2	2	100	2	4	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			2	2	100	0	2	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang yang mendapat layanan kedaruratan			10	11	110	10	21	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Jumlah mobil layanan kedaruratan yang terbeli			1	1	100	0	1	
1	06	04	2.02		**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**			32	32	100	30	62	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Ditangani			45	125	278	45	170	
1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial**			30	30	100	88,5	118,5	
1	06	05	2.02		**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan**			80	80	100	80	160	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Data Keluarga Miskin yang dimutakhirkan			100	100	100	240	340	
						Lembaga Yang Bermitra Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			253	261	103		261	
1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Prosentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan**			30	30	100	100	130	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	06	2.01		**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase difabel, trauma dan korban bencana yang telah mendapat bantuan**			30	30	100	30	60	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana			10	18	180		18	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Pelayanan Khusus			220	220	100	220	440	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			2	2	100	0	2	
						Lembaga yang diberikan Bantuan Sosial			1	1	100	0	1	
1	06	06	2.02		**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase difabel, trauma dan korban bencana yang telah mendapat bantuan**			30	30	100		30	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan			50	50	100		50	
1	06	07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Prosentase peziarah yang mendapat layanan di Taman Makam Pahlawan**			30	30	100		30	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	07	2.01		**Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Prosentase peziarah yang mendapat layanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten**			32	30	93,75		30	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Renungan Suci, Apel Kehormatan dan Renungan Suci serta Rehabilitasi TMP			4	4	100		4	
					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
					BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			96,72	N/A	N/A		N/A	N/A
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			60,32	N/A	N/A		N/A	N/A
2	08	02	2.01		**Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			96,72	N/A	N/A		N/A	N/A
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			60,32	N/A	N/A		N/A	N/A
2	08	02	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Lembaga PUG untuk Penguatan Kelembagaan PUG dan Jumlah OPD yang Paham dan Menerapkan PPRG			20	20	100		20	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	02	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang menerapkan PPRG**			80		0		0	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang Terkoordinasi dan Meningkatnya Kapasitas Bagi Lembaga Perempuan Bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi			0	0			0	
2	08	02	2.03		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			96,72		0		0	
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			60,37		0		0	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Peningkatan Taraf Hidup Bagi Perempuan			0	0			0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bagi Gabungan Organisasi Perempuan yang Ada di Kabupaten, PKK dan Dharma Wanita Kecamatan			0	0			0	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan**			1,35	3,72	275,6		3,72	
2	**08**	**03**	**2,01**		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**									
2	08	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jmlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan			60	60	100		60	
2	**08**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**						#DIV/0!		0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan korban kekerasan yang terlayani			20	20	100		20	
2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan			1,35	3,72	275,6		3,72	
2	08	04	2.02		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan			100		0		0	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Kegiatan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Secara Rutin Dalam 1 Tahun			12	12	100		12	
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan			30	30	100		30	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	05	2.01		**Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang menerapkan PPRG**			80		0		0	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD/Peserta Sosialisasi yang Mengetahui dan Menerapkan Data Pilah Gender dan Anak			0	0			0	
2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Tahapan Kabupaten Layak Anak**			Nindya	Madya	Madya		Madya	
2	08	06	2.01		**Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase forum anak yang terlibat dalamPersentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan keputusan**			100		0		0	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Gugus Tugas DLA dan Forum Anak Tingkat Desa yang Mengikuti Pendampingan Tentang Pemenuhan Hak Anak			39	39	100		39	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			1	1	100		1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	06	2.02		**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase forum anak yang terlibat dalamPersentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan keputusan**			100		0		0	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pertemuan Forum Anak Desa dan Kecamatan Aktif			2	2	100		2	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			1	1	100		1	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang diberikan bantuan hibah			1	1	100		1	
						Peserta Peningkatan Kapasitas Bagi SDM di P2TP2A Kabupaten dan PPT Kecamatan			0	1			1	
2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Kekerasan terhadap anak**			4,8	7,68	160		7,68	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	07	2.01		**Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus**			4,7		0		0	
						Rasio perempuan korban kekerasan			1,3		0		0	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekolah Sasaran Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Terutama Pencegahan Bulying di Sekolah			33	34	103,03		34	
						Forum Anak dan Gugus Tugas DLA			60	0	0		0	
2	08	07	2.02		**Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus**			4,7		0		0	
						Rasio perempuan korban kekerasan			1,3		0		0	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus/Data Korban Kekerasan yang Ditangani			60	24	40		24	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			1	1	100		1	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan pendampingan			25		0		0	
2	08	07	2.03	02	**Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus**			4,7		0		0	
						Rasio perempuan korban kekerasan			1,3		0		0	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aparat Penegak Hukum dan DLA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Keadilan Restoratif			0	0			0	
2	14				**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
					BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**			0,9	-4,12	-458		-4,12	
2	14	02	2.02		**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keluarga sejahtera I dan Prasejahtera**			26		0		0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Dokumen Kebijakan Terkait Kependudukan			0	1	#DIV/0!		1	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen Profil Kependudukan			1	1	100		1	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif**			70	70,3	100,4		70,3	
2	**14**	**03**	**2,01**		**Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)**			65,06		0		0	
						Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
						Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
2	14	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Koordinasi/Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Mitra Kerja			1	1	100		1	
2	14	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Media KIE			5	5	100		5	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Frekuensi Promosi KIE di Luar Gedung			35	26	74,3		26	
2	14	03	2,01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Harganas			1	1	100		1	
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai KB yang mendapat biaya operasional			21	21	100		21	
2	**14**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB**	**Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)**			65,06		0		0	
						Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
						Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Frekuensi Pembinaan di lini Lapangan			1	4	400		4	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang dibangun			2	2	100		2	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Frekuensi Pembinaan di lini Lapangan			3	3	100		3	
2	**14**	**03**	**2,03**		**Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)**			65,06		0		0	
						Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
						Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Frekuensi Visitasi Faskes			4	3	75		3	
						Ketersediaan Alokon di Faskes			80	80	100		80	
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Akseptor KB MKJP			1500	2237	149,1		2237	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	14	03	2,03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kegagalan MKJP yang Terayomi			8	4	50		4	
2	14	03	2,03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penggerakan Pelayanan KB			0	0			0	
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah IUD Kit yang terbeli			10	10	100		10	
						Jumlah sepeda motor yang terbeli			1	1	100		1	
						Jumlah Balai KB yang dibangun			2	2	100		2	
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jenis Kelompok remaja yang diberikan pembinaan (Genre dan Saka Kencana)			1	2	200		2	
2	14	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Frekuensi Kegiatan Pelayanan KB dengan Muyan			0	4	#DIV/0!		4	
2	**14**	**03**	**2,04**		**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)**			65,06		0		0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
						Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
						Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
2	14	03	2,04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kampung KB yang terbentuk			0	0			0	
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pertemuan Kampung KB			10	3	30		3	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga Pra Sejahtera**			28	N/A	N/A		N/A	
2	**14**	**04**	**2,01**		**Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)**			65,06		0		0	
						Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
						Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
						Persentase Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera			26		0		0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah BKB Kit Stunting terbeli			10	10	100		10	
						Jumlah Kit Siap Nikah anti stunting yang terbeli			5	5	100		5	
2	14	04	2,01	06	Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah desa stunting yang akan dilakukan pembinaan calon pengantin			10	10	100		10	
						Jumlah desa teredukasi stunting			10	10	100		10	
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi Pembinaan Kelompok Kegiatan			0	4			4	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	14	04	2,01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Frekuensi pembinaan desa stunting			0	0			0	
						Jumlah BKB Kit Stunting terbeli			0	10			10	

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase PMKS yang tertangani			65	67,5	68	68,5	97,24		68	68,5	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			65	65,5	66	66,5	97,24		66	66,5	
3	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti			65,5	66	66,5	67			66,5	67	
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	134,37				
5		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	264,22				
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	111,67				

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
7		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti		100	100	100	100	79,47				
8	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)				88,5	89	89,5			89	89,5	
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			100	100	100	100			100	100	
10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						100				
11	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	100	100	100	100		100	100	
12	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			NA	73,34	73,67	74	NA		73,67	74	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
13	Nilai Dimensi Prasyarat PUG			NA	70	80	85	NA		80	85	
14	Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			NA	30	45	60	NA		45	60	
15	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,3	0,4	0,6	0,7	0,38		0,6	0,7	
16	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
17	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan			30	30	35	40	30		35	40	
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak			40,4	40,4	46,2	51,9			46,2	51,9	
19	Persentase desa/kelurahan layak anak			70,1	70,1	76,3	82,5	80,3		76,3	82,5	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
20	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
21	Laju Pertumbuhan Penduduk			0,3	0,28	0,26	0,24	-4,12		0,26	0,24	
22	Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,08	2,06	2,04	1,6		2,06	2,04	
23	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan			83,33	83,33	100	100	83,33		100	100	
24	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan			85,71	85,71	85,71	100	85,71		85,71	100	
25	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71,5	71,5	72	72,5	70,3		72	72,5	
26	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15,95	15,95	15,45	14,95	14,45		15,45	14,95	
27	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB			82	82	83	84			83	84	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
28	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB			75,42	75,42	75,92	76,42			75,92	76,42	
29	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB			64,88	64,88	65,38	65,88			65,38	65,88	
30	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB			63,29	63,29	63,79	64,29			63,79	64,29	
31	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						54				54	

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**6.714.946.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.905.034.657**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**60.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**80.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	9 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	80.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**5.415.446.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.711.244.657**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 Orang	5.400.446.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	45 Orang	5.696.244.657	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD tersusun	12 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste	12 Laporan	10.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**283.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**210.291.040**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5 Unit	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	5.271.040	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	970 Unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	44.370.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	200 Eksempl	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	24.850.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	24 Eksempla	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	48 Kali	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	53.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214 Kali	160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	75.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**255.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**130.000.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 Unit	180.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	130.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**333.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**308.858.960**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Surat Terkirim	300 Eksempl	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	11 Orang	220.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.158.960	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**368.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**464.640.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	40 Unit	258.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	219.640.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	195.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terehabilitasi	25 Unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	25 Unit	25.000.000						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				**1.591.777.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1.473.177.000**	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				**1.591.777.000**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**1.473.177.000**	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah TKSK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	26 Orang	693.600.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	707.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga	843.177.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3850 Keluarg	730.177.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas	5 Orang	55.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	36.000.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				**3.257.931.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**1.506.517.000**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				**2.792.931.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				**1.096.511.000**	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial	4 Jenis	2.052.116.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2750 Orang	817.501.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.	340 Orang	15.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	11.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlangtar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	340 Orang	60.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	10.360.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga anak rentan yang mendapatkan pelayanan Jumlah lembaga pemberi layanan data dan pengaduan	210 Keluarga 2 Lembaga	577.115.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	212.770.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan	10 Orang	18.700.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	10 Orang	14.250.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.800.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	340 Orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	14.990.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				**465.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti**				**410.006.000**	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan permakanan	50 Orang	55.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	55.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan bimbingan sosial	50 Orang	240.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	280.206.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan	50 Orang	55.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.400.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layananan penelusuran	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.400.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layananan reunifikasi keluarga	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	50 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				**515.938.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**2.074.464.343**	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**515.938.000**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**2.074.464.343**	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan validasi	210000 Kelu	105.585.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	735000 oran	106.600.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	260 Desa	110.353.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluar	245.735.343	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial	60000 Keluar	100.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluar	413.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	20 Lembaga	200.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1.309.129.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				**1.395.730.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**325.275.000**	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				**1.362.455.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**				**292.000.000**	
	Penyediaan Makanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	230 Orang	180.555.000	Penyediaan Makanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	130 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	230 Orang	110.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	130 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 Unit	100.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	50.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan bantuan sosial/penanganan khusus	230 Orang	911.900.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	112.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	230 Orang	60.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	30.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				**33.275.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**				**33.275.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	50 Orang	33.275.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	33.275.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				**183.431.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**115.431.000**	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				**183.431.000**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**				**115.431.000**	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	4 Unit	108.431.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.431.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	4 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	1 Makam	65.000.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				**237.964.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**				**106.000.000**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				**87.964.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**				**53.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 Kali	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1 Kali	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	1 Kali	3.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Jenis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4 Jenis	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	5.000.000	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG	20 OPD	47.964.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	20 Perangkat Daerah	20.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				**90.000.000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**45.000.000**	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	25.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	1 Dokumen	20.499.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 Orang	65.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Organisas	24.500.560	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				**60.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**				**8.000.000**	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga (managemen kasus) penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	10 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	10 Orang	5.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta KIE tentang Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan	300 Orang	55.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	3.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				**238.359.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**40.000.000**	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**36.055.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**15.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan	4 Kali	26.095.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	4 Dokumen	0	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Frekuensi Rakor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12 Kali	9.960.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	15.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				**187.304.000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				**10.000.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	11 Lembaga	10.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	15 orang	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	177.304.000						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**15.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**15.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penerima bantuan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	20 Orang	10.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	umlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	0	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				**148.728.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**110.000.000**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**148.728.000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**110.000.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	35 Orang	70.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	52 Perangkat Daerah	70.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	68.728.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5.000.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	10 Lembaga/	10.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	35.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				**34.703.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**15.000.000**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**34.703.000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**15.000.000**	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	20 OPD	24.703.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	10.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				**323.234.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**203.000.000**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				**72.234.000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**				**102.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak	40 OPD	51.234.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	52 Organisasi	87.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	21.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	20 Dokumen	15.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				**251.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**101.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	20 Forum Anak	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900 Kali	155.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	74.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Lembaga	81.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	27.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				**484.255.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**45.000.000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				**273.304.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**10.000.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	96.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	4 Perangkat Daerah	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	177.304.000						
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**161.856.000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**5.000.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	11 Lembaga	96.856.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	4 Kali	60.000.000						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	5.000.000						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**49.095.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**30.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	2 Kali	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2 Laporan	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	26.095.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	4 Dokumen	19.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	12 Kali	12.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	12 Dokumen	10.500.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				**521.338.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**687.573.000**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				**48.538.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				**27.538.000**	
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan	2 Institusi/Le	27.538.000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	27.538.000	
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	2 Kali	21.000.000						
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**472.800.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**660.035.000**	
	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait	2 Kali	32.000.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 dokumen	31.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah dokumen kajian dampak kependudukan	1 Dokumen	40.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	63 Unit	30.000.000	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso			10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4 Dokumen	422.735.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan	2 Kali	374.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 dokumen	160.800.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				**8.871.602.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**8.680.488.000**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				**1.969.000.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1.444.115.000**	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja	5 Kali	44.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	7 Organisasi	44.375.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah jenis sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	5 Jenis	257.692.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25.000.000	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Promosi KIE Luar Gedung	35 Kali	67.308.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	78.640.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarananya	24 Unit	1.600.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan	405.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	24 Laporan	850.500.000	
						Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	40.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				**1.974.800.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				**1.924.800.000**	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB tersedia	5 Unit	50.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4089 orang	1.924.800.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi penggerakan kader	4 Kali	1.924.800.000						
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				**3.593.194.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah**				**4.242.073.000**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	88 Faskes	255.300.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	48.150.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah akseptor MKJP	2700 Aksept	2.067.633.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2700 Orang	2.855.571.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi	8 Kasus	5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia	10 Unit	1.122.313.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	1.206.455.000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja	6 Kali	90.068.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	12 Laporan	35.400.000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan	5 Kali	52.880.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	290 orang	50.000.000	
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	36.497.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				**1.334.608.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				**1.069.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kampung KB yang terbentuk	10 Buah	50.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	71 kampung	1.069.500.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	26 Lokasi	1.284.608.000						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				**915.465.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				**6.370.185.000**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**905.465.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**6.364.185.000**	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbeli	15 Unit	230.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	866.340.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	15 kelompok	594.800.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2913 orang	5.397.180.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kali	50.665.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kelompok	45.000.000	
	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	3 Kali	30.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	40.665.000	
						Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks	30 orang	15.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				**10.000.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				**6.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas	3 Kali	10.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Organisasi	6.000.000	
					25.435.401.000					**28.657.145.000**	

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah				
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Beku	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo, Dukuh Ngasinan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Menden	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang tata boga
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngremboko	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Pusung	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Margi	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngudi	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Gondang	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karangan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Gondangsari	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Dukuh	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Surowono	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Glonggong	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Tibayan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Lemahireng	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Pereng	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Kadilanggon	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Karangduren	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		2
KATA PENGANTAR		3
BAB. I	PENDAHULUAN	4
	1.1 Latar Belakang	4
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB. II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra	13
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
BAB.III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	50
	3.2 Tujuan dan Sasaran Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51
BAB.IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB.V	PENUTUP	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 telah dapat diterbitkan sebagai salah satu keluaran dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang, maka Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai dasar / pedoman untuk penyusunan APBD Kabupaten Tahun 2023.

Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023, kami sampaikan terima kasih.

Klaten, Juli 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

SUNARNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630712 199103 1 009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) Perangkat Daerah, tahap Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan tahap Penyusunan Rencana Kerja (Rankir) Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (Akhir) Perangkat Daerah yang definitif.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini

menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati No.58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dan evaluasi pelaksanaan Akhir Tahun 2021 dan proyeksi realisasi 2022.

2. Tujuan

   a. Menyelaraskan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya;
   b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023;
   c. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan;
   d. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
   e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN AKHIR SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Akhir SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Akhir SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Akhir SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Akhir SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Akhir SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan perumusan program dan kegiatan disertai dengan target kinerja dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI AKHIR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

EVALUASI PROGRAM TAHUN 2021

Anggaran Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebesar Rp **9.758.508.601**,- (termasuk perubahan) dengan 4 program dan 22 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp **8.132.174.010**,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **83,33%**.

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Angaran 2021 tidak ada.

B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 semuanya memenuhi target, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
      - Fasilitasi Kunjungan Tamu
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

a. Penyusunan Profil Kependudukan

- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

B. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada.

C. Realisasi Program/Kegiatan yang penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Penyediaan Bahan Logistik penyerapan anggaran 35% karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.

D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapaianya target kinerja program/kegiatan:

- Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemic covid-19.
- Adanya refocusing anggaran kegiatan
- Kurangnya sumber daya manusia, baik segi kuantitas dan kualitas.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan :

- Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan

kegiatan.

- Tersedianya anggaran yang cukup sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.
- Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil.

c. Faktor-faktor yang menyebabkan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan :

- Adanya beberapa kegiatan yang diluar perencanaan tetapi harus dilaksanakan.
- Ketidaktepatan dalam penentuan target kinerja.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah secara keseluruhan dengan adanya beberapa kegiatan yang belum memenuhi target bisa mengakibatkan terhambatnya target capaian program Renstra, akan tetapi hal tersebut bisa teratasi dengan adanya program dan kegiatan lain yang sudah memenuhi target .

F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Perlunya menjaga konsistensi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2) Evaluasi pelaksanakaan Renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai dengan ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segeran dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan.

3) Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja apabila diketemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran

4) Perlunya peningkatan kualitas dan validitas data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan perencanaan, dan pelaporan.

5) Perlunya fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan Akhir Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 dilampirkan pada Tabel 2.1 berikut merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Akhir Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Klaten.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Klaten

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan 2023	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi 2021 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7 / 6)	9	(10) = (5 + 7 + 9)	(11) = (10 / 4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terpenuhi**	**100%**		**100%**			100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**		**100%**			**100%**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	6 dokumen		6	6	100	6 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	7 dokumen		-	-	-	7 dokumen		

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	1 dokumen		1	1	100	1 dokumen		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**		**100%**			**100%**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	33 orang		12	12	100	33 orang		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	12 bulan		60	60	100	12 bulan		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100%**					**100%**		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelatihan Tingkat Desa Dan Kecamatan	506 orang		40	0	0	506 orang		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang		2	2	100	50 orang		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**			**100%**		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan	15 unit		15	15	100	15 unit		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Atk Tersedia Disdukcapil	80 unit		80	80	100	80 unit		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Tersedia	1 unit		1	1	100	1 unit		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan	7 ekslempar		7	7	100	7 ekslempar		

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 ekslempar		4	4	100	4 ekslempar		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Tamu	75 kali		75	75	100	75 kali		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	60 kali		27	27	100	60 kali		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**			**100%**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	18 unit		18	30	100	18 unit		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**			**100%**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen Surat Masuk Dan Keluar Kependudukan Dan Surat Menurat Lainnya	1100 ekslempar		1100	1100	100	1100 ekslempar		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar (Langganan Bandwidth Selama 12 Bulan)	1 jenis		12	12	100	1 jenis		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Dan Thl Administrasi Keuangan,Perencanaan,Umum Kepegawaian,Kebersihan Disduk	9 orang		12	12	100	9 orang		
			Jenis Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia			30	30	100			

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**					**100%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	30 unit		30	30	100	30 unit		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	75 unit		75	75	100	75 unit		
		Program Pendaftaran Penduduk	**PERSENTASE PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK**	**99.03 %**					**99.02 %**		
			CAKUPAN KEPEMILKAN KK	**98%**					97.90 %		
			PERSENTASE ANAK USIA 0-17 TAHUN KURANG 1 (SATU) HARI YANG MEMILIKI KIA	**60%**					50%		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA**	**100%**					100%		
			Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk	**100%**					100%		
			Persentase ke-valid-an data kependudukan	**100%**					100%		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dan Jenis Penerbitan Dokumen Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 dokumen		5	5	100	5 dokumen		

		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perjalanan dinas untuk verifikasi KTP-El calon jamaah haji dan verifikasi data adminduk disdukcapil	5 data		2	1	100	5 data		
		Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah dan jenis penerbitan SKPWNI, SKTT	2 dokumen		0	0	0	2 dokumen		
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100%**					**100%**		
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksana	4 kali		**0**	**0**	0			
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan kk pindah datang	14000 orang		0	0	0	14000 orang		
		Program Pencatatan Sipil	**Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.**	**98%**					**97%**		
			Cakupan penerbitan akta kematian	100%					100%		
			Cakupan penerbitan akta perkawinan	100%					100%		
			Cakupan penerbitan akta perceraian	100%					100%		
			Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	100%					100%		
			Cakupan penerbitan pengangkatan anak	100%					100%		
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil**	**100%**					**100%**		

		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Arsip Akte Pencatatan Sipil			740	740	100			
			Jumlah Dan Jenis Penerbitan Dokumen Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil								
			Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	21000 dokumen					21000 dokumen		
			Jumlah akta perkawinan dan akta perceraian yang diterbitkan	450 dokumen					450 dokumen		
			Penerbitan akta pengakuan anak, akta pengesahan anak, dan akta kematian	3000 dokumen					3000 dokumen		
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	-		0	0		-		
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**					**100%**		
		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah frekuensi fasilitasi /penyelesaian akte kelahiran	36 kali		0	0		36 kali		
			Jumlah frekuensi fasilitasi /penyelesaian akte perkawinan dan perceraian	12 kali		0	0		12 kali		
			Jumlah frekuensi fasilitasi /penyelesaian akte perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian	24 kali		0	0		24 kali		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	**Persentase Ketersediaan database kependudukan**	**100%**					**100%**		

		KEPENDUDUKAN									
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	**22%**				**17.65%**		
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase jumlah perjanjian kerjasama**	**100%**				**100%**		
			Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfataan data	**100%**				**100%**		
			Persentase Jumlah Inovasi pelayanan	**100%**				**100%**		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfaatan data	11 OPD		0	0			
			Jumlah Inovasi pelayanan	2 dokumen		**0**	**0**			
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama	5 dokumen		0	0	5 dokumen		
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**				**100%**		
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk	1 dokumen		0	0	1 dokumen		
		Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi**	**100%**				**100%**		

		Kependudukan	**Administrasi Kependudukan**								
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi Pendukung Adminduk yang dikembangkan	2 aplikasi		0	0		2 aplikasi		
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan**	**100%**					**100%**		
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	1 dokumen					1 dokumen		
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	1 dokumen		2	2	100	1 dokumen		

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2022 dengan usulan sebesar **Rp.8.531.560.000,-** terurai dalam 5 program, 15 kegiatan dan 30 subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten adalah sebagai dasar pelayanan untuk setiap pelayanan public, walaupun bukan merupakan pelayanan dasar tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan karena untuk bias mengakses terhadap pelayanan pemerintah memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Kendala Infrastruktur

a. Adanya kendala konektivitas dengan pusat, atau gangguan jaringan, yang menyebabkan pelayanan menjadi lambat atau bahkan terhenti.
b. Tidak adanya gedung arsip. Dengan kondisi masyarakat Klaten yang terbanyak di Jawa Tengah, wajib adanya gedung arsip dan sistem penataan arsip yang memadai. Setiap tahun Dinas Kependudukan membutuhkan ruang penyimpanan arsip sebesar 14,4 meter persegi dan kondisi ruang arsip yang ada saat ini sudah penuh.
c. Kurangnya alat rekam dan cetak KTP. Hal tersebut dikarenakan mahalnya harga alat cetak, sampai saat ini baru ada 5 kecamatan yang memiliki alat pencetakan KTP.
d. Kurangnya jumlah alat rekam di kecamatan dan dinas. Hanya terdapat 1 unit di kecamatan dan di dinas tidak ada. Hal tersebut dikarenakan banyaknya alat yang rusak, dan alat-alat tersebut masih menjadi milik pusat (Kemendagri). Kekurangan alat tersebut menyebabkan tidak bisa melakukan pelayanan rekam di dinas dan rekam keliling.

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas di bidang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan kearsipan, sehingga untuk menopang pelaksanaan pelayanan, harus mengangkat Tenaga Harian Lepas, yang saat ini jumlah telah mencapai 40-an orang yang hal ini menjadi beban tersendiri dalam penganggaran.

b. Kurangnya tenaga PNS dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. Dalam kurun waktu tersebut juga terdapat banyak PNS yang memasuki masa purna tugas. Hal ini jelas menimbulkan masalah tersendiri, apalagi pada saat ini, segala sistem perkantoran dan pelaporan dilakukan dengan komputerisasi baik offline maupun online

c. Kurangnya kontrol dinas terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas di kecamatan – kecamatan dikarenakan jauh dari Dinas. Di kecamatan hanya terdapat operator yang sebagian besar berstatus tenaga harian lepas (THL) dan tidak ada PNS Dinas yang bertugas di kecamatan sebagai koordinator pelayanan.

Kendala dari luar

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat baru akan mengurus dokumen setelah memerlukan dokumen tersebut, bukan sejak awal mula terjadi peristiwa;

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan sendiri, sehingga masyarakat mengurus dokumen tersebut melalui perantara/calo. Hal ini mengakibatkan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dengan adanya biaya pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pelayanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan	Meningkatkan kualitas layanan melalui pembinaan dan pengawasan penyeleraan pendaftaran penduduk, percepatan pendafataran kependudukan, layanan online, layanan jemput bola,	Peningkatan kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan prioritas pelayanan online dan pelayanan jemput bola.

	sipil	pelayanan keliling desa/sekolahan/keluarahan dan pelayanan bagi masyarakat difable dan penduduk rentan administrasi kependudukan.	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Klaten. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan peraturan diatas, maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretarariat, terdiri dari :
   - Sub Bagian Perencanaan
   - Sub Bagian Keuangan
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   - Seksi Identitas Penduduk;
   - Seksi Pindah Datang Penduduk;
   - Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   - Seksi Kelahiran
   - Seksi Perkawinan dan Perceraian
   - Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
   - Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
   - Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
   - Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
   - Seksi Kerjasama;

- Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
- Seksi Inovasi Pelayanan.

g. Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif good govermance dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing−masing sasaran strategis dapat disajikan pada skala nilai peringkat kinerja dan disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Baik	
2	75,1≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 2.1 Skala Nilai Peringkat Progresif

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 terkait dengan target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n-2)	2024 (thn n+1)	
1	2	3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk			91%				98,00%				
2	Cakupan penerbitan KTP			90,94%				98,44%				
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran penduduk berusia 1-18 tahun			92,52%				94,37%				
4	Keluarga mempunyai KK			98,50%				98,76%				
5	Penduduk berakta kelahiran			98%				94,37%				
6	Keluarga yang mempunyai akta nikah (yang non muslim)			277.800				256.836				

7	Penerbitan akta kematian			3500				5.169				
8	Persentase Perekaman KTP elektronik				99,02%	99,03%	99,04%			99,02%	99,03	
9	Cakupan kepemilkan KK				97,90%	98%	98,02%			97,90%	98	
10	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				50%	60%	70%			50	60	
11	Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran.				97	98	100			97	98	
12	Cakupan penerbitan akta kematian				100	100	100			100	100	
13	Cakupan penerbitan akta perkawinan				100	100	100			100	100	
14	Cakupan penerbitan akta perceraian				100	100	100			100	100	
15	Cakupan penerbitan akta pengesahan anak				100	100	100			100	100	
16	Cakupan penerbitan pengangkatan anak				100	100	100			100	100	
17	Persentase Ketersediaan database kependudukan				100	100	100			100	100	

18	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama				17,65	22	25			17,65	21,57	
19	Ketersediaan profil kependudukan tahunan				100	100	100			100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hal Kritis yang Terkait dengan Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

a. Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil di mana kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan.
b. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
c. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Klaten.
d. Disiplin aparatur yang belum optimal.
e. Keterbatasan blangko (form) kependudukan, sehingga terjadi antrian penduduk yang memerlukan layanan kependudukan.
f. Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a. Terbatasnya akses dan layanan kependudukan;
b. Belum sepenuhnya data dan informasi kependudukan dijadikan basis data perencanaan;
c. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana layanan yang representatif.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Klaten akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional yaitu Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta Negara yang memiliki daya saing,berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menginstruksikan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar melaksanakan pelayanan secara daring yakni pelayanan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan cara media elektronik yang berbasis web dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Sehingga dengan adanya terobosan dan inovasi pelayanan tersebut akan memberikan dampak positip terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Klaten.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya :

a. Peningkatan akses dan mobilitas penduduk memerlukan kelengkapan dan percepatan administrasi mutasi kependudukan;

b. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. Mengupayakan legalisasi dan perlindungan dokumen kependudukan, dan;

d. Pendataan kependudukan dan pencatatan sipil secara tersandar.

2.3.5. Formula Isu-Isu Penting Brupa Rekomendasi Dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain sebagai berikut :

a. Ketersediaan Gedung Dinas Dukcapil.

b. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kependudukan.

c. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dengan instansi lainnya

d. Belum optimalnya data kependudukan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen

kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan awal RKPD, akan tetapi pada saat pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana maka ada perbedaan dan penambahan serta perubahan pada kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Berdasarkan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan yang perlu untuk ditambah antara lain yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan ini dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi tentang regulasi regulasi dan kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui spanduk, leaflet dan banner serta melalui talk show dan siaran melalui radio. Juga digunakan untuk kegiatan pelatihan dan bimtek bagi operator untuk meningkatkan kemampuan pelayanan administasi kependudukan.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung pelayanan dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan, antara lain untuk pembelian alat/bahan pencetakan ktp-el, pembelian alat/bahan pencetakan kia, pembelian toner untuk cetak dokumen adminduk (kartu keluarga,surat pindah, akta pencatatan sipil)
3. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan ini bergunan untuk menunjang dalam hal pengadaan sarana prasarana dalam rangka untuk mendukung pelayanan adminduk. Seperti pengadaan personal computer, laptop, printer, scanner, mesin cetak ktp-el, mesin cetak KIA.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.262.304.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**8.531.560.000**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.202.913.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**7.456.169.000**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**16.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**16.000.000**	

2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen RKA- SKPD tersusun	6 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	5.000.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen LKJiP tersusun	7 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen	6.000.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	1 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**4.484.048.951**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**4.621.499.853**	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	33 orang	4.469.048.951	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang	4.606.499.853	

2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	15.000.000	
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100%**	**28.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100%**	**208.000.000**	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	506 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	506 Orang	190.000.000	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	18.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	18.000.000	
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**137.283.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**1.575.933.000**	

2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Unit	9.373.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.373.000	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	80 Unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.423.650.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah bahan logistik kantor tersedia	1 Unit	4.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	7 Eksemplar	14.350.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.350.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	4 Eksemplar	4.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4.560.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	75 Kali	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 Laporan	30.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	45.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	90.000.000	

2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**14.728.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**359.533.098**	
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	25 Unit	14.728.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	359.533.098	
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**421.803.049**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**589.153.049**	
2.12.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Surat Terkirim	1100 Eksemp	30.908.049	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	15.908.049	
2.12.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik terbayar	12 bulan	197.245.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	197.245.000	

2.12.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	9 Orang	193.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	376.000.000	
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**101.050.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**86.050.000**	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	30 Unit	72.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	57.800.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	75 Unit	28.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	28.250.000	
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan kepemilkan KK**	**98.00 %**	**669.030.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan kepemilkan KK**	**98.00 %**	**645.030.000**	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**	**60.00 %**			Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA**	**60.00 %**		

		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase perekaman KTP elektronik**	**99.03 %**			Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase perekaman KTP elektronik**	**99.03 %**		
2.12.02.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk**	**100%**	**644.030.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Dokumen surat pindah datang penduduk**	**100%**	**629.030.000**	
			Persentase ke-valid-an data kependudukan	**100%**				Persentase ke-valid-an data kependudukan	**100%**		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA	**100%**				Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP, KIA	**100%**		
2.12.02.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dan jenis penerbitan dokumen kependudukan bidang pelayanan pendaftaran penduduk	5 dokumen	606.056.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	606.056.000	
2.12.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dan jenis verifikasi validasi data adminduk Disdukcapil	5 Data	27.974.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	12.974.000	

2.12.02.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dan jenis penerbitan SKPWNI, SKTT	2 Dokumen	10.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	10.000.000	
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**16.000.000**	
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk terlaksana	4 Kali	10.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	10.000.000	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penerbitan kk pindah datang	14000 Orang	15.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	6.000.000	
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan penerbitan akta kematian**	**100.00 %**	**331.860.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan penerbitan akta kematian**	**100.00 %**	**331.860.000**	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Cakupan penerbitan akta pengesahan anak**	**100.00 %**			**Kab. Klaten, Klaten Selatan,**	**Cakupan penerbitan akta pengesahan anak**	**100.00 %**		

							Tegalyoso				
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Cakupan penerbitan akta perceraian**	**100.00 %**			**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan penerbitan akta perceraian**	**100.00 %**		
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Cakupan penerbitan akta perkawinan**	**100.00 %**			**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan penerbitan akta perkawinan**	**100.00 %**		
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Cakupan penerbitan pengangkatan anak**	**100.00 %**			**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Cakupan penerbitan pengangkatan anak**	**100.00 %**		
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil**	**100%**	**321.860.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil**	**100%**	**321.860.000**	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan	21000 Dokumen	321.860.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6 Dokumen	321.860.000	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah akte pengakuan anak,akta pengesahan anak dan akta kematian yang	3000 Dokumen							

			diterbitkan								
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	450 Dokumen							
2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100%**	**10.000.000**	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah fasilitasi/penyelesaian akte kelahiran	36 Kali	10.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	10.000.000	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah fasilitasi/penyelesaian akte perkawinan dan perceraian	12 Kali							
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah fasilitasi/penyelesaian akte perubahan status anak,pewargane garaan dan kematian	24 Kali							
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase ketersediaan database kependudukan**	**100%**	**44.619.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	**Persentase ketersediaan database kependudukan**	**100%**	**44.619.000**	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	22.00 %			Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	22.00 %		

2.12.01.2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfataan data	**100%**	**14.619.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Persentase Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfataan data	**100%**	**14.619.000**	
			Persentase Jumlah Inovasi pelayanan	**100%**				Persentase Jumlah Inovasi pelayanan	**100%**		
			Persentase jumlah perjanjian kerjasama	**100%**				Persentase jumlah perjanjian kerjasama	**100%**		
2.12.01.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Inovasi pelayanan	2 Dokumen	9.619.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	9.619.000	
		Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD yang bekerja sama dalam pemanfataan data	11 OPD							
2.12.01.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah perjanjian kerjasama	5 Dokumen	5.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5.000.000	
2.12.01.2.02	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**5.000.000**	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**5.000.000**	

	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	
2.12.01.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase penyelenggaraan pengelolaan infromasi administrasi kependudukan**	**100%**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase penyelenggaraan pengelolaan infromasi administrasi kependudukan**	**100%**	**10.000.000**	
2.12.01.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah aplikasi pendukung adminduk yang dikembangkan	2 Aplikasi	10.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	10.000.000	
2.12.01.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan**	**100%**	**15.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan**	**100%**	**15.000.000**	

2.12.01.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	34 orang	15.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	15.000.000	
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan**	**100%**	**13.882.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan**	**100%**	**53.882.000**	
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun**	**2 jenis**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso**	**Jumlah Jenis Dokumen Profil Kependudukan Tersusun**	**2 jenis**		
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Tersusun	2 Dokumen	13.882.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	53.882.000	
					6.262.304.000					**8.531.560.000**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten, tidak ada usulan kegiatan dari kecamatan yang belum diakomidir di usulan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sesuai dengan **Tabel 2.5** berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai prioritas program urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelayanan publik (Perpres 83 Th 2021), serta selaras dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi yaitu Penyediaan akses pemanfatan data kependudukan bagi institusi/lembaga untuk mendukung seluruh sektor pembangunan**,** program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten telah sesuai dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan provinsi yaitu dengan tersedianya Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan sehingga apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Renja 2023
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	* Program Pendaftaran Penduduk * Program Pencatatan Sipil * Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan * Program Pengelolaan Profil Kependudukan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 2021-2026 adalah ***meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten periode tahun 2021-2026 adalah ***meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.***

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Klaten
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2023	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7a	7b	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84
	Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	indeks	82,92	83,51	83,28	83,46	83,64	83,82	84

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan Program/Kegiatan yang harus diusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, yang mencakup 4 Program Utama serta 1 Program Penunjang sebagai berikut :

1. Program Utama

   - Program Pendaftaran Penduduk

     Program ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya perekaman KTP elektronik, kepemilikan KK dan kepemilikan KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan public dalam bidang administrasi kependudukan

   - Program Pencatatan Sipil

     Program ini bertujuan untuk memenuhi kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk umur 0-18 tahun, cakupan penerbitan akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, penerbitan pengangkatan anak melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pelayanan public dalam bidang pencatatan sipil.

   - Program Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan

     Program ini bertujuan untuk menyediakan database kependudukan serta pemanfataan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

   - Progam Pengelolaan Profil Kependudukan

     Program ini bertujuan untuk menyediakan profil kependudukan yang bersifat tahunan.

2. Program Penunjang

   - Progam Penunjang Urusan Pemerintan Daerah Kabupaten/Kota

     Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran serta sebagai pendukung program kegiatan utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Adapun rincian usulan kegiatan dan pendanaan dari masing-masing program dapat dilihat dari ***Tabel 4.1***

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**8.531.560.000**					**7.767.784.000**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7.456.169.000**					**6.716.957.000**
2	**12**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16.000.000**					**16.000.000**
2	12	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	6 dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
2	12	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	7 Laporan	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	6.000.000

2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
2	**12**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.621.499.853**					**4.484.048.951**
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	38 orang/bul	an100 %	4.606.499.853	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	4.469.048.951
2	12	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	15.000.000
2	**12**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**208.000.000**					**30.000.000**
2	12	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselesaikannya administrasi kepegawain tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	506 Orang	100 %	190.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000

2	12	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselesaikannya administrasi kepegawain tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	50 Orang	100 %	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	20.000.000
2	**12**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.575.933.000**					**157.933.000**
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Paket	100 %	9.373.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	9.373.000
2	12	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	3 Paket	100 %	1.423.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	45.000.000
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Paket	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	4.000.000
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Paket	100 %	14.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	15.000.000

2	12	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	4 Dokumen	100 %	4.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	4.560.000
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	75 Laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	30.000.000
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	60 Laporan	100 %	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	50.000.000
2	**12**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**359.533.098**					**1.478.080.049**
2	12	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	25 Unit	100 %	359.533.098	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	1.478.080.049
2	**12**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**589.153.049**					**440.895.000**
2	12	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Laporan	100 %	15.908.049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	50.000.000

								waktu									
2	1 2	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Laporan	100 %	197.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	197.245.000
2	1 2	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Laporan	100 %	376.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	193.650.000
2	**1 2**	**0 1**	**2,0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**86.050.000**					**110.000.000**
2	1 2	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	30 Unit	100 %	57.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	76.750.000

2	1 2	0 1	2,0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	75 Unit	100 %	28.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	33.250.000
2	**1 2**	**0 2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**645.030.000**					**649.177.000**
2	**1 2**	**0 2**	**2,0 1**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**629.030.000**					**629.177.000**
2	1 2	0 2	2,0 1	0 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya dokumen pindah datang penduduk, kevalid-an data kependudukan, pemenuhan kebutuhan KK, KTP, KIA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.00 % 60.00 % 99.03 %	5 Dokumen	100 %	606.056.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	98.00 % 60.00 % 99.03 %	606.056.000
2	1 2	0 2	2,0 1	0 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya dokumen pindah datang penduduk, kevalid-an data kependudukan, pemenuhan kebutuhan KK, KTP, KIA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.00 % 60.00 % 99.03 %	5 Laporan	100 %	12.974.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	98.00 % 60.00 % 99.03 %	13.121.000

2	12	02	2,01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terselenggaranya dokumen pindah datang penduduk, kevalid-an data kependudukan, pemenuhan kebutuhan KK, KTP, KIA	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.00 % 60.00 % 99.03 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	98.00 % 60.00 % 99.03 %	10.000.000
2	**12**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**								**16.000.000**				**20.000.000**
2	12	02	2,03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Kegiatan Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.00 % 60.00 % 99.03 %	4 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	98.00 % 60.00 % 99.03 %	10.000.000

2	12	02	2,03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Terselenggaranya Kegiatan Pendaftaran Penduduk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.00 % 60.00 % 99.03 %	12 Laporan	100 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Cakupan kepemilkan KK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase perekaman KTP elektronik	98.00 % 60.00 % 99.03 %	10.000.000
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**331.860.000**					**341.751.000**
2	**12**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**321.860.000**					**331.751.000**
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan penerbitan akta pengesahan anak Cakupan penerbitan akta perceraian Cakupan penerbitan akta perkawinan Cakupan penerbitan pengangkatan anak	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terpenuhinya jumlah dan jenis dokumen kependudukan bidang pencatatan sipil	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	6 Dokumen	100 %	321.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan penerbitan akta pengesahan anak Cakupan penerbitan akta perceraian Cakupan penerbitan akta perkawinan Cakupan penerbitan pengangkatan anak	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	331.751.000
2	**12**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**10.000.000**					**10.000.000**

2	12	03	2,02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan penerbitan akta pengesahan anak Cakupan penerbitan akta perceraian Cakupan penerbitan akta perkawinan Cakupan penerbitan pengangkatan anak	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	12 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Cakupan penerbitan akta kematian Cakupan penerbitan akta pengesahan anak Cakupan penerbitan akta perceraian Cakupan penerbitan akta perkawinan Cakupan penerbitan pengangkatan anak	100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	10.000.000
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**44.619.000**					**46.016.000**
2	**12**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**14.619.000**					**16.016.000**
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Terpenuhinya jumlah OPD yang bekerjasama dalam pemanfaatan data, jumlah inovasi pelayanan, jumlah perjanjian kerjsama	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	22,00 % 100,00 %	12 Dokumen	100 %	9.619.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	22,00 % 100,00 %	11.016.000

2	12	04	2,01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terpenuhinya jumlah OPD yang bekerjasama dalam pemanfaatan data, jumlah inovasi pelayanan, jumlah perjanjian kerjsama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,00 % 100,00 %	5 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	22,00 % 100,00 %	5.000.000
2	**12**	**04**	**2,02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**5.000.000**					**5.000.000**
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Terselenggaranya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	22,00 % 100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	22,00 % 100 %	5.000.000
2	**12**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**10.000.000**					**10.000.000**

2	12	04	2,03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama Persentase persediaan database kependukukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	22 % 100 %	12 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama Persentase persediaan database kependukukan	22 % 100 %	10.000.000
2	**12**	**04**	**2,04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**15.000.000**					**15.000.000**
2	12	04	2,04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	22.00 % 100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan database kependukukan Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependukukan berdasarkan janjian kerjasama	22.00 % 100 %	15.000.000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**53.882.000**					**13.883.000**
2	**12**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**53.882.000**					**13.883.000**
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan profil kependukukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersusunnya jumlah jenis dokumen profil kependuduka	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyos	100,00 %	1 Dokumen	100 %	53.882.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ketersediaan profil kependukukan	100,00 %	13.883.000

						tahunan		n	o							tahunan		
												TOTAL	**8.531.560.000**					**7.767.784.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan Administrasi Kependudukan dan Capil sehingga Rencana Kerja ini akan bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.

Dokumen ini berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah serta sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugsas-tugas pemerintahan umum. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten selain dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Klaten sesuai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dapat terwujud.

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelayanan publik (Perpres 83 Th 2021) memberikan dampak bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadikan dasar bagi semua pelayanan public, sehingga perlu kebijakan program dan kegiatan yang bisa mendukung untuk pemanfaatan dan penggunaan NIK
2. Dengan diterapkannya identitas penduduk digital dan pelayanan adminduk berbasis online/digital memberikan konsekuensi untuk kesiapan sumber daya manusia, sarana prasaranan pendukung serta regulasi dan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Akhir Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre−point* (pokok−pokok) rencana, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema Rancangan RKPD Tahun 2023: ***mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.***
2. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan dalam Akhir sebesar Rp. 8.531.560.000,− untuk membiayai 5 program dengan 16 kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.***

Klaten, Juli 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

SUNARNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630712 199103 1 009

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 34

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 37

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD..... 42

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegaiatan Masyarakat 53

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 55

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 55

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISPERMASDES Kabupaten Klaten 56

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 57

BAB V. PENUTUP 58

5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa..... 58
5.2. Kaidah Pelaksanaan..... 59
5.3. Rencana Tindak lanjut..... 60

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Rencana Kerja (Renja) ini di susun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi dan *stake holder* yang membutuhkannya.

Klaten, Juli 2022

Plt. Kepala DISPERMASDES

Kabupaten Klaten

Jaka Purwanto, S.Sos, MM

NIP. 19671101 1986031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dispermasdes Kab. Klaten merupakan dokumen perencanaan Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dispermasdes Kabupaten Klaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dispermasdes Kabupaten Klaten.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penentuan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, sejauh mana capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Anggaran yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka Dispermasdes Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten; dan
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2023 adalah dokumen Rencana Kerja untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2023.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan landasan operasional acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
2. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Terciptanya efisiensi dan efektifias anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dispermasdes Kabupaten Klaten Tahun 2023, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Utama/Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisi kajian mengenai tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispermasdes Kab. Klaten, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dispermasdes Kab. Klaten, pencapaian visi dan misi Bupati, tantangan dan peluang dalam meningktkan pelayanan Dispermasdes Kab. Klaten serta rekomendasi atau catatan strategis untuk ditindaklanjuti

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Renja Dispermasdes.

BAB IV. Rencana Kerja DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaanya.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2021)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DISPERMASDES Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten mengemban fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa, memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.
2. Meningkatkan pemantapan sistem administrasi pemerintahan desa.
3. Meningkatkan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat melalui pengembangan BUMDes.

Sebagai wujud komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam mengemban fungsi diatas maka setiap awal tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten membuat Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja. Dengan Penetapan Kinerja tersebut diharapkan tolok ukur pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksnakan akan dapat dinilai dengan secara akuntabel.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tujuan antara lain:

1. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Rencana Kerja (Renja SKPD Tahun sebelumnya).
2. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kenja tahun-tahun sebelumnya.
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya.

Evaluasi ini juga mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bahan penyusunan RKPD untuk periode selanjutnya;
2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Indikator penilaian kinerja SKPD; dan
4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk tahun 2021 Dispermasdes Kab. Klaten melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut yang tersaji dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2021

No	Uraian Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%) (6/4) x 100	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5	4	6	8	9	10
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**100**	**100**	**4.280.486.989**	**3.744.553.205**
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3.966.103.448**	**3.444.329.898**
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan daerah	Bulan	12	12	**100**	3.963.628.448	3.444.329.898
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah	Kegiatan	50	0	**0**	2.475.000	-
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100%**	**100**	**100**	**82.414.107**	**80.720.850**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	Jenis	4	4	**100**	2.979.900	2.512.500
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK tersedia	ATK	28	28	**100**	18.000.000	16.852.500
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak penggandaan	Jenis	2	2	**100**	25.463.207	25.461.350
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Surat Kabar	5	5	**100**	2.724.000	2.724.000
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	Kegiatan	40	22	**55**	18.000.000	18.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	Kali	40	35	**87,5**	15.247.000	15.170.500
3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100%**	**100**	**100**	**98.232.900**	**87.077.511**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	Surat	1500		**0**	2.000.000	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	Rekening	4	4	**100**	40.000.000	34.686.985

c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor	Orang	3	3	**100**	56.232.900	50.390.526
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**%**	**100%**	**100**	**100**	**133.736.534**	**132.424.946**
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	Unit	22	22	**100**	58.005.294	57.986.142
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah THL pengamanan Kantor	THL Pengamanan	5	5	**100**	75.731.240	74.438.804
II	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Prosentase peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesionel, transparan, dan akuntabel**	**%**	**100**	**100**	**100**	**3.918.136.966**	**3.416.167.404**
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**%**	**100**	**75**	**75,00**	**3.918.136.966**	**3.416.167.404**
		Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	**%**	**100**	**100**	**100,00**		
		Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	**%**	**70**	**99,49**	**142,13**		
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan fasilitasi aparatur pemerintahan	Kegiatan	13	13	100	3.398.752.312	3.246.267.592
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun	Desa	391	391	100		
		Jumlah peserta lomba tertib desa	Kecamatan	26	26	100		
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah peraturan yang disosialisasikan kabupaten klaten	Peraturan	2	2	100	48.125.154	48.025.000
		jumlah peraturan yang disusun	Peraturan	2	2	100		
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan partisipatif bagi LPMD / LKMD	Kecamatan	26	26	100	10.000.000	9.598.000
d	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah unsur aparatur pemerintah dan lembaga desa, aparatur kecamatan yang mengikuti pelatihan / bimtek	Kades baru	344	0	0	296.759.500	-

e	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Terfasilitasi	BUMDes	5	32	640	67.000.000	45.607.648
		Jumlah Kawasan Pedesaan yang Terfasilitasi	Kawasan	2	2	100		
f	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang di nilai perkembangan pembangunan	Kecamatan	26	26	100	70.000.000	49.321.364
g	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah penyelesaian masalah tanah kas desa	Masalah	11	11	100	12.500.000	8.347.800
h	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam 1 tahun	Desa / Kel	401	401	100	15.000.000	9.000.000
III	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Rata-rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)**	**%**	**100**	**85,5**	**85,50**	**685.934.800**	**652.986.640**
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna**	**%**	**100,00**	**67,86**	**67,86**	**685.934.800**	**652.986.640**
		Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	**%**	**100,00**	**33**	**33**		
		Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	**%**	**91,00**	**91**	**100**		
b	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kader Posyandu	2313	2313	100	103.140.000	100.573.700
		Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun	BP SPAMS	100	100	100		
		Jumlah KPMD yang di Bina dalam 1 Tahun	Desa	391	391	100		
c	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa lokasi TMMD dan Karya Bhakti dalam 1 tahun	Desa	6	6	100	40.000.000	34.326.778

d	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG	peserta	100	50	50	44.225.000	22.433.700
		Jumlah Posyantek yang di fasilitasi	Posyentek	2	4	200		
f	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa binaan PKK dalam 1 tahun	Desa Binaan	52	52	100	498.569.800	495.652.462
							8.884.558.755	7.813.707.249

Realisasi anggaran belanja menurut program dan kegiatan Dispermasdes Kabupaten Klaten untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 7.813.707.249,- atau 87,97 % dari anggaran yang ada sebesar Rp 8.884.558.755,- sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa hampir seluruh program dan kegiatan capaiannnya sesuai target, secara rinci penjabaran program dan kegiatan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

      1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

         - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan indicator kinerja Jumlah frekuensi perjalanan dalam Daerah target 50 kegiatan tidak terealisasi karena adanya Peraturan Bupati terkait perjalanan dinas dalam daerah

   b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

      1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

         - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu,
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
   - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
   - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
   - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat,
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa,
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga,

3. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

      1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

         - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan. Faktor penyebab tidak tercapainya dan tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a) adanya rasionalisasi anggaran untuk prioritas penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

b) adanya pembatasan pertemuan di karenakan pandemic covid-19 sehingga kegiatan pelatihan-pelatihan tidak di laksanakan/ di laksanakan dengan pembatasan peserta.

Untuk faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a) Komitmen seluruh pihak yang terkait dalam mendukung tercapainya target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan

b) Konsistensi terhadap target waktu dan capaian dari program dan kegiatan yang telah direncanakan

c) Peningkatan pengelolaan adminstrasi desa dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa yang bisa di akses secara online.

d) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa

Faktor pendukung melampauinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a) Komitmen seluruh pihak yang terkait dalam mendukung tercapainya target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan

b) Peran aktif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendorong pembentukan BUMDes sebagai salah saku langkah dalam mendukung program Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Kemiskinan

c) Peran aktif penggurus dan anggota BUMDes untuk mengolah kekayaan desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Berdasarkan target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, maka implikasi yang timbul yaitu adanya perubahan indikator kinerja dan target capaian sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

   a) Menjaga konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

   b) Fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

c) Mengusulkan / Menganggarkan kembali sub – sub kegiatan sebagai pendukung capaian indicator kinerja selanjutnya.

Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dispermasdes Kabupaten Klaten tahun lalu secara rinci sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021

KABUPATEN KLATEN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10=(5+7+9)**	**11=(10/4)**
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2,13	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

2.13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
2.13 01 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan daerah	0	0	12	12	100	29	41	**0**
2.13 01 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi perjalanan dalam daerah	0	0	50	-	-	-	-	**0**
2.13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	0	0	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
2.13 01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	0	0	7	4	57	4	8	**0**
2.13 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK tersedia	0	0	28	28	100	28	56	**0**
2.13 01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetak penggandaan	0	0	2	2	100	77.850	77.852	**0**

2.13 01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	0	0	5	5	100	2	7	**0**
2.13 01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman tersedia	0	0	40	22	55	40	62	**0**
2.13 01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan luar daerah	0	0	40	35	88	90	125	**0**
2.13 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia**	0	0	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**0**
2.13 01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	0	0	1500	1.663	111	1.500	3.163	**0**
2.13 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening terbayar	0	0	4	4	100	12	16	**0**
2.13 01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL Kebersihan Kantor	0	0	3	3	100	10	13	**0**
2.13 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia**	**0**	**0**	**100**	-	-	-		**0**
2.13 01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli	0	0	10	-	-	-	-	**0**

2.13 . 01 . 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	0	0	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**0**
2.13 . 01 . 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	0	0	22	22	100	22	44	**0**
2.13 . 01 . 2.09.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Gedung kantor terpelihara	0	0	1	-	-	1	1	**0**
2.13 . 01 . 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	THL pengamanan Kantor	0	0	5	5	100	15	20	**0**
2.13 . 04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Meningkatanya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesionel, transparan, dan akuntabel**	0	0	**100**	**100**	100	-	**100**	**0**
2.13 . 04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	0	0	**100**	**75**	75	-	**75**	**0**
		Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	0	0	**100**	**100**	100		**100**	**0**

		Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	0	0	**70**	99	141		**99**	**0**
2.13 . 04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan fasilitasi aparatur pemerintahan	0	0	13	13	100	-	13	**0**
		Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan DD dan ADD dalam 1 tahun	0	0	391	391	100	391	782	**0**
		Jumlah peserta lomba tertib desa	0	0	26	26	100	-	26	**0**
2.13 . 04.2.01.,02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah peraturan yang disosialisasikan kabupaten klaten	0	0	3	3,	100	2,	5	**0**
		jumlah peraturan yang disusun	0	0	3	3,	100	0,	3	**0**
2.13 . 04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi perencanaan partisipatif bagi LPMD / LKMD	0	0	26	26	100	391	417	**0**
2.13 . 04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Unsur aparatur pemerintah dan lembaga desa, aparatur kecamatan yang mengikuti pelatihan / bimtek	0	0	1955	-	-	280	280	**0**

2.13 . 04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Terfasilitasi	0	0	26	32	123	80	112	**0**
		Jumlah Kawasan Pedesaan yang Terfasilitasi	0	0	2	2	100	-	2	**0**
2.13 . 04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang di nilai perkembangan pembangunan	0	0	26	26,	100	391,	417	**0**
2.13 . 04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Penyelesaian masalah tanah kas desa	0	0	11	11	100	26	37	**0**
2.13 . 04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan dalam 1 tahun	0	0	401	401	100	401	802	**0**
		Jumlah desa yang terfasilitasi SID dalam 1 tahun	0	0	391	391	100	-	391	**0**
2.13 . 05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya**	**0**	**0**	**100**	**85**	85	-	**85**	**0**

		Meningkatnya peran LEM,LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan kecamtan dalam penanggulangan kemiskinan	**0**	**0**	**58**	**58**	100	**0**	**58**	**0**
2.13 . 05 2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna**	**0**	**0**	**100**	**68**	68	**0**	**68**	**0**
		Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	**0**	**0**	100	**33**	33	**0**	**33**	**0**

		Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	**0**	**0**	91	**91**	100	**0**	**91**	**0**
2.13 . 05 2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa yang menunjang pelestarian adat istiadat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat	0	0	235	0,	-	10,	10	**0**
2.13 . 05 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP SPAMS yang di bina dalam 1 tahun	0	0	100	100	100	100	200	**0**
		Jumlah posyandu aktif yang di bina	0	0	2313	2.313	100	2.313	4.626	**0**
		Jumlah KPMD yang di Bina dalam 1 Tahun			1955	1.955	100	1.955	3.910	**0**

2.13 . 05 2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa lokasi TMMD dan Karya Bhakti dalam 1 tahun	0	0	6	6	100	-	6	**0**
2.13 . 05 2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan TTG	0	0	100	4,	4	80,	84	**0**
		Jumlah Posyantek yang di fasilitasi	0	0	6	4,	67	2,	6	**0**
		umlah mengikuti pameran TTG Tingkat Nasional dalam 1 tahun	0	0	1	-	-	1	1	**0**
2.13 . 05 2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan Gerakan Gotong Royong setiap tahunnya	0	0	2	-	-	6	6	**0**
2.13 . 05 2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa binaan PKK dalam 1 tahun	0	0	52	52	100	52	104	**0**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja pelayanan Dispermasdes Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KABUPATEN KLATEN

NO	Indikator	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	Tahun 2021	Tahun 2022	2023	2024	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel		Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
2	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dan Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan		Prosentase kecamatan yang memiliki posyantek/ Posyantek antar desa	58%	-	-	-	58%	-	-	-	
3	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya		Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Meningkatnaya Kerjasama Desa		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	5	10	15	-	5	10	15	
	Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase BUMDes berkembang dan Maju	-	12,79	15,86	19,18	-	12,79	15,86	19,18	

	Meningkatnya Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu		Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	-	100	100	100	-	100	100	100	
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase PKK aktif	-	100	100	100	-	100	100	100	
			Persentase Posyandu aktif	-	100	100	100	-	100	100	100	
			Prosentase Posyantek aktif	-	26,67	29,41	31,58	-	26,67	29,41	31,58	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dispermasdes Kabupaten Klaten terus melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam membangun desa.

2.3.1 Tingkat pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dan Hal-Hal Kritis Yang Terkait Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis yang telah diidentifikasi untuk dipilih Dispermasdes Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Mendukung pemeritah daerah kab. Klaten dalm usaha pengentasan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan-kegiatan pemberayaan masyarakat dan desa.
2. Meningkatkan indeks desa membangun (IDM) Kab. Klaten menjadi mandiri.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan di desa

2.3.2. Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan dukungan dari Perangkat Daerah, beberapa permasalahan yang harus di hadapi terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang, khususnya selama periode 1 (satu) tahun ke depan, yaitu:

1. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
2. Pengisian kekosongan Kepala Desa
3. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
4. Pelatihan teknologi tepat guna berbasis ketahanan pangan,
5. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
   - kader pemberdayaan masyarakat Desa;
   - kelompok usaha ekonomi produktif;
   - kelompok perempuan/PKK,
   - kelompok masyarakat miskin,
   - kelompok pengrajin,
   - kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
   - kelompok pelestarian adat budaya; dan
   - kelompok lain sesuai kondisi Desa

2.3.3. Dampak Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan – permasalahan tersebut diatas akan berdampak menghambat kinerja pelayanan Dispermasdes Kab. Klaten dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain sebagai berikut :

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Misi	Masalah	Dampak Masalah
Misi ke 2 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	1. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa 2. Pengisian kekosongan Kepala Desa .	Dalam rangka mendukung mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, Pemerintah Desa yang yang merupakan bagian dari pemerintah daerah harus memiliki tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor tidak bisa mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada, kurangnya ketersediaan informasi untuk masyarakat terkait prosedur administratif, kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh beberapa aparatur desa, dan minimnya sarana dan prasarana. Sehingga semua hal tersebut telah mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Misi ke 3 Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi local	3. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. 4. Pelatihan teknologi tepat guna berbasis ketahanan pangan	Meningkatknya pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif di desa akan ikut mendorang pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sehingga Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fasilitasi pembentukan dan pembinaan LED BUMDes , Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan dan Pelatihan teknologi tepat guna berbasis ketahanan pangan kepada masyarakat desa
Misi ke 6 Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian	5 peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: - kader pemberdayaan masyarakat Desa; - kelompok usaha ekonomi produktif - kelompok perempuan/PKK, - kelompok masyarakat miskin - kelompok pengrajin, - kelompok pemerhati dan	Meningkatnya pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan melalui Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dan gotong royong,Fasilitasi kelembagaan masyarakat,Fasilitasi kelembagaan yang menunjang pelestarian adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dan Pendampingan perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan BBGRM

	perlindungan anak, - kelompok pelestarian adat budaya; - kelompok lain sesuai kondisi Desa	

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Klaten menghadapi tantangan yang cukup kompleks namun dari tantangan tersebut ada peluang sebagai dasar untuk penyelesaian dalam menghadapi tantangan. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pmberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Tantangan.
   a. Belum ter-inventarisasi potensi yang ada di Desa/Kelurahan untuk diadakan pengkajian, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna
   b. Keterbatasan pengetahuan di tingkat desa dalam pengelolaan dana desa.
   c. Regulasi yang mengatur sering berubah-ubah.
   d. Perlu peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar SKPD.
   e. Penyerahan Pasar Desa belum bisa terlaksana.
   f. Sulitnya mencari data LEM di desa.
   g. Belum adanya regulasi tentang pengelolaan Asset PNPM berkaitan dengan berakhirnya Program PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Peluang

a. Ketersediaan anggaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, alam, lingkungan dan Teknologi Tepat Guna secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Ketersediaan regulasi dalam rangka pengembangan bidang sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna di Kabupaten Klaten.

c. Terselenggaranya lomba kreanova di tingkat Kabupaten sebagai ajang pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.

d. Ketersediaan SDM Perangkat Desa yang menguasai Teknologi Informasi yang bisa menghadapi tantangan jaman.

e. Kemajuan Teknologi dan Informasi memudahkan dalam pengaturan dan pemanfaatan struktur ruang dan waktu.

f. Tersedianya dana desa dan ADD yang besar untuk membangun desa.

g. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

h. Pelestarian dan Pengelolaan asst dari program PNPM menjadi modal dalam kegiatan perekonomian desa.

i. Tersedianya regulasi yang mengatur kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

j. Dengan adanya pemihakan dari pemerintah untuk pendirian BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.3.5. Rekomendasi dan Catatan Isu Strategi

Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah Dispermasdes Kab. Klaten sesuai tugas fungsinya yaitu memberdayakan masyarakat terkait isu – isu strategis dan permaslahan yang di hadapi antara lain sebagai berikut :

a) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
b) Meningkatkan kualitas Pemerintahan/ Perangkat dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
c) Memfungsikan institusi (Kelembagaan Desa) asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Ketiga intervensi dari perangkat daerah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.

Rancangan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023, telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Proses penyusunan rancangan telah mengikuti mekanisme partisipatif.

Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Klaten selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 2.4.

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KLATEN

RANCANGAN AWAL RKPD									HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO			Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	NO			Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*			*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					**8.717.866.000**				**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					**8.807.866.000**
I			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**4.430.637.000**	**I**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota**	**%**	**100**	**4.430.637.000**
	I		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**	**3.933.309.681**		**I**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**	**3.933.309.681**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disper masdes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26	3.933.309.681			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disper masdes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	26	3.933.309.681

	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**110.296.000**		**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**110.296.000**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disper masdes	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.980.000			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disper masdes	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.980.000
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disper masdes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	14.550.000			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disper masdes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	14.550.000
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disper masdes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	31.815.000			3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disper masdes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	31.815.000
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disper masdes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.724.000			4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disper masdes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Dokumen	2	2.724.000
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disper masdes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	40	18.000.000			5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disper masdes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	40	18.000.000
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kab. Klaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	60	40.227.000			6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kab. Klaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	60	40.227.000

	3		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**96.900.319**		**3**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**96.900.319**
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	96.900.319			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	96.900.319
	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**98.233.000**		**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**98.233.000**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.000.000			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.000.000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	40.000.000			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	40.000.000
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	56.233.000			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disper masdes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	56.233.000

	4		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**%**	**100**	**191.898.000**		**4**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**%**	**100**	**191.898.000**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disper masdes	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	21	85.056.000			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disper masdes	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	21	85.056.000
		2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	31.110.000			2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	31.110.000
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	15	75.732.000			3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disper masdes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	15	75.732.000
II			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	Desa	**10**	**40.000.000**	**II**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	Desa	**10**	**40.000.000**

	I		**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**		**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	Desa	**5**	**40.000.000**		**I**		**Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa**		**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa**	Desa	**5**	**40.000.000**
		1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	1	40.000.000			**###**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	1	40.000.000
III			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase BUMDes berkembang dan Maju**	**%**	**15,86**	**3.830.659.200**	**III**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase BUMDes berkembang dan Maju**	**%**	**15,86**	**3.920.659.200**
					Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	**%**	**100**							**Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu**	**%**	**100**	
	1		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**7,29**	**3.830.659.200**		**1**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya**	**%**	**7,29**	**3.920.659.200**
		1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Dokumen	3	3.314.916.800			1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Dokumen	3	3.304.916.800
		2	Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Dokumen	2	42.847.300			2	Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Dokumen	2	42.847.300

		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	1	10.000.000			3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	1	10.000.000
		4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Klaten	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	60	10.000.000			4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Klaten	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	60	10.000.000
		5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	Dokumen	2	70.000.000			5	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	Dokumen	2	70.000.000
		6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	150.000.000			6	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	250.000.000
		7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen profil desa	Dokumen	1	38.895.100			7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen profil desa	Dokumen	1	38.895.100
		8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	28	12.500.000			8	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	28	12.500.000
		9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Klaten	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	180	162.500.000			9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Klaten	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	180	162.500.000

		10	fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa		jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapaan dan penegasan batas desa			10.000.000			10	fasilitas penetapan dan penegasan batas desa		jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa			10.000.000
		11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	9.000.000			11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	9.000.000
IV			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase PKK aktif**	**%**	**100**	**416.569.800**	**IV**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Persentase PKK aktif**	**%**	**100**	**416.569.800**
					Persentase Posyandu aktif	**%**	**100**							**Persentase Posyandu aktif**	**%**	**100**	
					Prosentase Posyantek aktif	**%**	**29,41**							**Prosentase Posyantek aktif**	**%**	**29,41**	

	I		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**	**%**	**100**	**416.569.800**		**I**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK**	**%**	**100**	**416.569.800**
					Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan	**%**	**100**							**Persentase Posyantek yang dilakukan pembinaan**	**%**	**100**	
					Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi	**%**	**100**							**Persentase Kelompok Pelestarian Adat Istiadat yang terfasilitasi**	**%**	**100**	
					Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan	**%**	**100**							**Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan**	**%**	**100**	

		1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/keluraha n dan masyarakat hukum adat	Dokumen	1	16.000.000			1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/keluraha n dan masyarakat hukum adat	Dokumen	1	16.000.000
		2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	Lembaga	4	77.000.000			2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Klaten	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Keluraha n (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	Lembaga	4	77.000.000
		3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	35.000.000			3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	35.000.000

		4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Failitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Laporan	1	40.000.000			4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Failitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Laporan	1	40.000.000
		5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil faslitasi Tim Penggerak PKK dakam penyeenggaraan gerakan pemberdayaan masayarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	248.569.800			5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil faslitasi Tim Penggerak PKK dakam penyeenggaraan gerakan pemberdayaan masayarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	248.569.800

Hasil analisis kebutuhan tahun 2023 adalah :

1. Seluruh Program dan Kegiatan yang ada di RKPD tahun 2023 Urusan Pemerintahan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sama dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam renja Dispermasdes tahun 2023.
2. Tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, rancangan RKPD sudah mengakomodir hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk lima tahun kedepan. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten, ada beberapa usulan kegiatan dari kecamatan yang perlu diakomodir di usulan kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI MASYRAKAT

NO	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa tengah serta menselaraskan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Klaten yang telah tertuang dalam visi dan misi Bupati Klaten. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Adapun Rencana Kerja dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Klaten tahun 2023, apabila disandingkan dengan arah kebijakan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten diuraikan pada Tabel.3.1

Tabel. 3.1
Persandingan prioritas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja tahun 2023.

PUSAT	PROPINSI	KABUPATEN	PROGRAM RENJA 2023
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 2 Program Administrasi Pemerintah Desa 3 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

3.2. Tujuan dan sasaran Renja DISPERMASDES Kabupaten Klaten

Tujuan merupakan hasil akhir *(results)* yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah *(direction)* yang akan menunjukkan kemana tujuan *(destination)* yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun.

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya status berkembangnya desa, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1) **Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**
2) **Persentase peningkatan status desa mandiri**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai target indikator kinerja utama / kunci yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Dispermades Kabupaten Klaten tahun 2022-2026, maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 mencakup program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Rincian program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) DISPERMASDES Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rencana Kerja DISPERMASDES Kab. Klaten ini menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja DISPERMASDES Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan OPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dispermasdes tahun 2022-2026 dalam menunjang tercapainya visi misi Kabupaten Klaten serta target dan sasaran pembangunan yang di operasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa

1. Mendukung pemeritah daerah kab. Klaten dalm usaha pengentasan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan-kegiatan pemberayaan masyarakat dan desa.

2. Meningkatkan indeks desa membangun (IDM) Kab. Klaten menjadi mandiri.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan di desa

5.2. Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tepat waktu dan sasaran,maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

juga Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun lainnya maka setiap perangkat darah wajib disinkronkan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah dengan pokok-pokok rencana sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun 2023.

2. Proyeksi rencana belanja Dispermasdes Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 8.807.866,00,- (delapan milyar delapan ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh enam rupiah) untuk membiayai 4 program dengan 8 kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dispermasdes Kab. Klaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan desa yang bersumber dari anggaran APBD tahun anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi rencana kerja tahun lalu.

Klaten, Juli 2022

Plt. Kepala DISPERMASDES

Kabupaten Klaten

Jaka Purwanto, S.Sos, MM

NIP. 19671011986031001

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**8,807,866,000**					**13,577,019,000**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,430,637,000**					**5,812,373,000**
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,933,309,681**					**4,445,772,000**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tambahan penghasilan ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	26 Orang/bulan	26 Orang	3,933,309,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	4,445,772,000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**110,296,000**					**335,000,000**
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Paket	100 %	2,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,000,000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Paket	100 %	14,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	60,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Paket	100 %	31,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	60,000,000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Dokumen	100 %	2,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5,000,000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	40 laporan	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	100,000,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya penyediaan kebutuhan administrasi umum dinas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	60 Laporan	100 %	40,227,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	100,000,000
2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**96,900,319**					**200,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	6 Unit	100 %	96,900,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	200,000,000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**98,233,000**					**153,435,000**
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	3,435,000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	50,000,000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Laporan	100 %	56,233,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	100,000,000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**191,898,000**					**678,166,000**
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	21 Unit	100 %	85,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	150,000,000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Unit	100 %	31,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	428,166,000
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Unit	100 %	75,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	100,000,000
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**40,000,000**					**98,810,000**
2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**								**40,000,000**					**98,810,000**
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Terlaksananya fasilitasi dalam kerja sama antar desa	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	5 Desa	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100.00 %	98,810,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**3,920,659,200**					**5,195,597,000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**3,920,659,200**					**5,195,597,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	3 Dokumen	7.29 %	3,304,916,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	3,535,597,000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah Dokumen hasil penyusunan produk hukum desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	2 Dokumen	7.29 %	42,847,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	145,000,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	1 Dokumen	7.29 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	35,000,000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	60 Orang	7.29 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	2 Dokumen	7.29 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	570,000,000
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	1 Laporan	7.29 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	0
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah dokumen profil desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	1 Dokumen	7.29 %	38,895,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	110,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	28 Dokumen	7.29 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	180 Orang	7.29 %	162,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	500,000,000
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	401 Desa/Kel	7.29 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	0
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan aparatur desa dan anggota BPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,86 % 100 %	1 Dokumen	7.29 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BUMDes berkembang dan Maju Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	15,86 % 100 %	150,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**416,569,800**					**2,470,239,000**
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**416,569,800**					**2,470,239,000**
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	Jumlah Dokumen hasil penataan , pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	Terlaksananya pembinaan PKK, Posyandu, Kelompok Adat dan Posyantek	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 29.41 %	1 Dokumen	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	100.00 % 100.00 % 29.41 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang taruna) Lembaga adat desa/keluarahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	Terlaksananya pembinaan PKK, Posyandu, Kelompok Adat dan Posyantek	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 29.41 %	4 Lembaga	100 %	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	100.00 % 100.00 % 29.41 %	1,115,000,000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya pembinaan PKK, Posyandu, Kelompok Adat dan Posyantek	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 29.41 %	3 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	100.00 % 100.00 % 29.41 %	375,000,000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya pembinaan PKK, Posyandu, Kelompok Adat dan Posyantek	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 29.41 %	1 Laporan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	100.00 % 100.00 % 29.41 %	210,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembinaan PKK, Posyandu, Kelompok Adat dan Posyantek	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 29.41 %	1 Dokumen	100 %	248,569,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PKK aktif Persentase Posyandu aktif Persentase Posyantek aktif	100.00 % 100.00 % 29.41 %	670,239,000
												TOTAL	**8,807,866,000**					**13,577,019,000**

Klaten, Juli 2022
Plt. Kepala DISPERMASDES
Kabupaten Klaten

Jaka Purwanto, S.Sos, MM
NIP. 196711011986031001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

Dengan Visi *"Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"* menjadikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten sebagai organisasi perangkat daerah yang mampu menciptakan sistem informasi perpustakaan dan kearsipan yang lengkap, dinamis dan efektif.

Dalam Rencana Kerja tahun 2023 ini menyajikan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Klaten, Juli 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DISPERSIP

SYAHRUNA, SH, CN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 44
BAB V PENUTUP..... 47
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 47
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 47
5.3 Rencana Tindak Lanjut 48
LAMPIRAN v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2021 15
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 24
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 30
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 40
Tabel 3.1 Telaah Usulan Rencana Kerja Tahun 2023 Terhadap Prioritas Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten 41
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 42
Tabel 4.1 Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten bertumpu pada tugas pokok dan fungsi, Undang-undang di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta adanya peluang dan tantangan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 24 menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip statis yang ada di SKPD, desa, perusahaan dan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dan pembinaan kearsipan terhadap penciptaan arsip di lingkungan daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyebutkan latar belakang lahirnya Undang-Undang ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpustakaan menjadi salah satu wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dan menumbuhkembangkan budaya gemar membaca dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai wahana belajar bagi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca. Untuk itu perlu dikembangkan tidak terbatas pada sekolah dan desa dengan memprioritaskan daerah-daerah terpencil.

Di sisi lain tuntutan masyarakat dalam layanan informasi di era keterbukaan informasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi tantangan dan sekaligus menjadi tanggung jawab pengelolaan kearsipan dan perpustakan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan dan penyelamatan sumber informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten melakukan

identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di bidang Kearsipan dan Perpustakan. Dari isu-isu strategis tersebut dilakukan strategi pemecahan masalah yang menjadi konsep dan kerangka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. Rencana strategis dilaksanakan dengan skala prioritas yang tertuang dalam program dan kegiatan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sejak tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang berdampak negatif terhadap laju pertumbuhan pembangunan dan perekonomian nasional termasuk di Kabupaten Klaten. Hal ini berpengaruh terhadap penganggaran pada Pemerintah Daerah yang difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga akan mempengaruhi pagu anggaran pada program dan kegiatan lainnya. Dengan difokuskan penanganan pandemi Covid-19, bertujuan agar pandemi Covid-19 cepat tertangani sehingga pemerintah dapat segera menyusun stimulan yang tepat dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah melalui sektor-sektor tertentu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
x. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
y. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
z. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -

Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

aa. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

bb. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

cc. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

dd. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

ee. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

nn. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

oo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

pp. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

qq. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

rr. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

ss. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

tt. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

uu. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

vv. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

ww. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

xx. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
yy. Peraturan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
zz. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten yang dapat memastikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan serta sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 1 (satu) tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah:

a. Mewujudkan tertib sistem perencanaan pembangunan daerah;
b. Menciptakan perencanaan yang konsisten dan sinergis;
c. Tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
d. Untuk memberikan arah yang jelas dalam pencapaian visi melalui misi yang ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tahun 2021 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada tahun 2021 terdapat 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang tidak dapat terealisasi dan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, diantaranya:

   a. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
      1) Kegiatan Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
         a) Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
   b. Program Perizinan Penggunaan Arsip
      1) Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
         a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2021 terdapat 9 kegiatan dengan 20 sub kegiatan yang terealisasi dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran mencapai 100%, diantaranya:

a. Program Pembinaan Perpustakaan
    1) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
        b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        c) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
    2) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        a) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah
        a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
        d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Program Pengelolaan Arsip
1) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
1) Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan
a) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor penyebab tidak tercapainya dan tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu adanya rasionalisasi anggaran untuk prioritas penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a. Komitmen seluruh pihak yang terkait dalam mendukung tercapainya target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan.
b. Konsistensi terhadap target waktu dan capaian dari program dan kegiatan yang telah direncanakan.
c. Adanya inovasi-inovasi dalam bidang perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
d. Adanya pengembangan inovasi dalam bidang kearsipan untuk meningkatkan pengelolaan dan penataan arsip daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Berdasarkan target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, maka implikasi yang timbul yaitu adanya perubahan indikator kinerja dan target capaian sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

   a. Menjaga konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
   b. Fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Kenaikan kunjungan masyarakat**			**1%**	**-83%**	**-8300**			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kenaikan kunjungan masyarakat**			**100%**	**-83%**	**-8300**			
		Pembinaan Perpustakaan khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Desa/Sekolah yang dibina			18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	100%			
			Jumlah Perpustakaan Desa/Sekolah yang dimonitor			10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	100%			
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan			1 Kali	1 Kali	100%			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka			60 Eksemplar	60 Eksemplar	100%			
		Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kenaikan kunjungan masyarakat**			**100%**	**-83%**	**-8300**			
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokasi kunjungan kendaraan perpustakaan keliling			26 Lokasi	26 Lokasi	100%			
			Jumlah Jenis publikasi dan Lomba Perpustakaan			1 Jenis	1 Jenis	100%			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase urusan pemerintahan bidang pelayanan administrasi perkantoran yg ditunjang**			**100%**	**100%**	**100%**			
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan Laporan Keuangan**			100%	100%	100%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan			7 Dokumen	7 Dokumen	100%			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Keuangan**			**100%**	**100%**	**100%**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayarkan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah			2 Kali	2 Kali	100%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran**			**100%**	**100%**	**100%**			
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			8 Jenis	9 Jenis	112,50%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK tersedia			37 Jenis	37 Jenis	100%			
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga tersedia			20 Buah	13 Buah	65%			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan			10 Jenis	4 Jenis	40%			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia			200 Paket	185 Paket	92,50%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah			50 Kali	10 Kali	20%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana dalam kondisi baik**			**100%**	**100%**	**100%**			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim cek surat masuk keluar			1500 Surat	1500 Surat	100%			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening terbayar			5 Rekening	5 Rekening	100%			
		Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL administrasi keuangan			2 Orang	2 Orang	100%			
			Jumlah THL kebersihan kantor			4 Orang	4 Orang	100%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana prasarana dalam kondisi baik**			**100%**	**100%**	**100%**			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional terpelihara			27 Unit	27 Unit	100%			
			Jumlah THL pengemudi kantor			5 Orang	5 Orang	100%			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah THL pengamanan kantor			6 Orang	6 Orang	100%			
			Jumlah Peralatan Gedung Terpelihara			2 Unit	2 Unit	100%			
			Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara			5 Unit	5 Unit	100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Prosentase peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar**			**5%**	**5%**	**5%**			
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	**Persentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan**			**100%**	**100%**	**100%**			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tingkat Kabupaten/Kota									
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diaudit			24 OPD	24 OPD	100%			
			Jumlah OPD yang akan dibina kearsipannya			9 OPD	9 OPD	100%			
			Jumlah Produk Hukum			3 Produk Hukum	3 Produk Hukum	100%			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Kenaikan Koleksi arsip terakuisisi**			**3%**	**2%**	**66,67%**			
		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Rentensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	**Persentase Kenaikan Koleksi arsip**			**0**	**0**	**0**			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Rentensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah hasil penilaian arsip			0	0	0			
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kotayang digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Persentase Kenaikan Koleksi arsip**			**50%**	**50%**	**100%**			
		Pendataan, Penyusunan daftar dan Penilaian serta penyerahan atau pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen inaktif dan statis milik OPD yang diserahkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan			50 Meter lari	50 Meter lari	100%			
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase Kenaikan Jumlah Pameran yang diikuti**			0	0	0			
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Persentase Kenaikan Jumlah Pameran yang diikuti**			0	0	0			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti			0	0	0			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Melalui pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Dengan pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 terkait dengan target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah			Eksemplar	49.934	49.962	51.962	52.062	50.156	50.251	51.962	52.062	Renstra 2021-2026
2.	Persentase perpustakaan yang dibina			%	24,55	21	22	23	32,23	21	22	23	Renstra 2021-2026
3.	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah			%	100	100	100	100	100	100	100	100	Renstra 2021-2026
4.	Persentase arsip yang diakuisisi			%	0	77	78	79	0	77	78	79	Renstra 2021-2026
5.	Persentase pengawasan kearsipan internal			%	12	100	100	100	47	100	100	100	Renstra 2021-2026
6.	Arsip usul musnah			Meter lari	0	60	60	60	0	60	60	60	Renstra 2021-2026
7.	Persentase arsip yang dialihmediakan			%	19,96	20	20,91	21,82	36,87	20	20,91	21,82	Renstra 2021-2026

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Kinerja Pelayanan dan Hal-Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Bupati Klaten Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. Dalam struktur organisasi baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan urusan yang ditangani, yaitu bidang Kearsipan menangani urusan kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menangani urusan perpustakaan. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing bagian serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi dapat lebih efektif.

Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten pada misi yang kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten pada bidang Perpustakaan diwujudkan dalam bentuk pelayanan perpustakaan kepada masyarakat seperti perpustakaan umum dan perpustakaan keliling. Dalam rangka menjangkau masyarakat umum yang jauh dari lokasi perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten membuat inovasi pelayanan perpustakaan yaitu Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku (Bejanaku) dan Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin). Dengan adanya inovasi pelayanan ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan perpustakaan serta minat baca masyarakat pada umumnya.

Pada bidang kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan kearsipan dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*). Sedangkan pada aspek pelayanan masyarakat, Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten meluncurkan program preservasi arsip atau perbaikan arsip yang diwadahi dalam program inovasi Perbaikan Arsip Masyarakat dan Instansi (PEAR MANIS) sehingga masyarakat umum maupun instansi dapat memperbaiki arsip yang rusak dengan memanfaatkan layanan kearsipan ini. Selain itu, juga terdapat layanan kearsipan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana melalui program inovasi Titip Berkas Arsip Digitalku (Titip Bandaku).

2.3.2 Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan, permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten yang perlu mendapat perhatian untuk dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yaitu:

1. Permasalahan Sekretariat

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan Kesekretariatan antara lain:

   a. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan sekretariat.
   b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) belum optimal.

2. Permasalahan Bidang Kearsipan

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Kearsipan antara lain:

   a. Masih kurangnya jumlah fungsional arsiparis di Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan.
   b. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan.
   c. Masih kurangnya pengelolaan kearsipan di Organisasi Perangkat Daerah.

3. Permasalahan Bidang Perpustakaan

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Perpustakaan antara lain:

   a. Terbatasnya literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung.
   b. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai standar pelayanan.

c. Masih minimnya pemenuhan kebutuhan perpustakaan berbasis inklusi.
d. Masih kurangnya jumlah fungsional pustakawan di perpustakaan sekolah.

2.3.3 Dampak yang dihadapi terhadap pencapaian Visi dan Misi

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dampak terhadap pencapaian visi dan misi yaitu:

a. Tidak tercapainya jumlah pengunjung perpustakaan.
b. Terhambatnya capaian kinerja di bidang kearsipan seperti penilaian pengawasan kearsipan, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Klaten. Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan melalui analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Faktor Internal

   Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

   a. Kekuatan (*Strength*)
      1) Tersedianya fungsional arsiparis dan pustakawan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan bidang kearsipan dan perpustakaan.
      2) Tersedianya dana operasional dan kegiatan yang cukup memadai.
   b. Kelemahan (*Weakness*)
      1) Pengembangan sistem informasi sudah dilakukan namun masih belum optimal.
      2) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan kearsipan dan perpustakaan.

2. Identifikasi Faktor Eksternal

   Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang maupun ancaman yang datang dari luar lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

   a. Peluang (*Opportunity*)
      1) Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Klaten.
      2) Pengembangan sistem informasi dalam meningkatkan layanan kearsipan dan perpustakaan dari pemerintah pusat dan daerah.
   b. Tantangan (*Thread*)
      1) Masih kurangnya kesadaran dalam pengelolaan kearsipan.
      2) Meningkatkan minat baca masyarakat yang masih rendah.
      3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan dan perpustakaan.
      4) Meningkatkan pelayanan kearsipan dan perpustakaan bagi masyarakat.

2.3.5 Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting yang perlu untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten adalah:

1. Keterbatasan jumlah fungsional arsiparis dan pustakawan sehingga pembinaan kearsipan dan perpustakaan belum optimal.
2. Masih kurangnya jumlah buku dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan desa.
3. Masih rendahnya digitalisasi arsip daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku.
5. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

2.4 REVIEW TERHADAP USULAN RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan perlu dilakukan review terhadap usulan rancangan awal RKPD untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Adapun review terhadap usulan rancangan awal RKPD tercantum dalam tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina**	**51.962 Eksemplar 22 %**	**139,033,000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina**	**51.962 Eksemplar 22 %**	**189,033,000**	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah**	**10 %**	**55,515,000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah**	**10 %**	**55,515,000**	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) Jumlah pengadaan buku Elektronik / ebook	1 Layanan	5,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management) Jumlah pengadaan buku Elektronik / ebook	1 Layanan	5,000,000	
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	12,515,000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	12,515,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	10,000,000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan	10,000,000	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180 Orang	5,000,000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180 Orang	5,000,000	
Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100 Eksemplar	20,000,000	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	100 Eksemplar	20,000,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25 Eksemplar	3,000,000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	25 Eksemplar	3,000,000	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan**	**10 %**	**83,518,000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemenuhan baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan**	**10 %**	**133,518,000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	76,518,000	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	30 Lokus	86,518,000	
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	7,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	47,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	**100%**	**3,900,533,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	**100%**	**3,900,533,000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**10,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**10,500,000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,500,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**3,357,293,889**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**3,357,293,889**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	3,351,293,889	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	3,351,293,889	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	6,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	6,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**78,383,111**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100 %**	**78,383,111**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	7,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	9,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	9,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	30,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	30,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	2,383,111	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	2,383,111	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100 %**	**336,130,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100 %**	**336,130,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	95,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	95,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Tengah, Bareng	Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	236,130,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	236,130,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**118,230,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100 %**	**118,230,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	102,730,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	102,730,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	10,500,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal**	**78 % 100 %**	**192,033,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal**	**78 % 100 %**	**192,033,000**	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya**	**10 %**	**165,183,000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Prosentase peningkatan OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya**	**10 %**	**165,183,000**	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	72,883,000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas	72,883,000	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	92,300,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Laporan	92,300,000	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi**	**10 %**	**16,850,000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi**	**10 %**	**16,850,000**	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20 Arsip	16,850,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20 Arsip	16,850,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**20 %**	**10,000,000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**20 %**	**10,000,000**	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45 Pengguna	10,000,000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	45 Pengguna	10,000,000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan**	**60.00 Meter lari 20.91 %**	**73,365,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan**	**60.00 Meter lari 20.91 %**	**73,365,000**	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan**	**5 %**	**34,175,000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan**	**5 %**	**34,175,000**	
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250 Arsip	24,175,000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250 Arsip	24,175,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	350 Berkas	10,000,000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	350 Berkas	10,000,000	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan**	**10 %**	**17,540,000**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan**	**10 %**	**17,540,000**	
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	17,540,000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	17,540,000	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi**	**5 %**	**7,100,000**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Kenaikan Jumlah Arsip Terakuisisi**	**5 %**	**7,100,000**	
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Daftar	4,100,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Daftar	4,100,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan /Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	250 Arsip	3,000,000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	250 Arsip	3,000,000	
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang telah dialih media**	**10 %**	**10,000,000**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang telah dialih media**	**10 %**	**10,000,000**	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	25 Arsip	10,000,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	25 Arsip	10,000,000	
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip**	**1 %**	**4,550,000**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan**	**Persentase Jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip**	**1 %**	**4,550,000**	
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	4,550,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	4,550,000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 ini tidak ada usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Hasil Reses.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Adapun telaah program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi tersaji dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Telaah Usulan Rencana Kerja Tahun 2023 terhadap Prioritas Kebijakan Pusat, Provinsi dan Kabupaten

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Klaten	Program dalam Rencana Kerja Tahun 2023
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pengelolaan Arsip 3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten harus memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

Tujuan dari Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tahun 2023 sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan publik".

Adapun sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tahun 2023 yaitu Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat dan Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2023
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil perkalian antara hasil pengusulan NRR Tertimbang dengan hasil rasio tertimbang dengan nilai dasar 25 di konversikan dengan tabel konversi Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,01
	Meningkatnya pelayanan perpustakaan sesuai Standar Nasional dan minat baca masyarakat	Persentase budaya baca masyarakat	Jumlah pengunjung yang datang perpustakaan pada seluruh perpustakaan pada tahun N dibagi Jumlah penduduk dikali 100	%	3,77
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi	Indeks Kearsipan	Indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/ Disarpus Prov Jateng/ ANRI kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring	Indeks	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Tahun 2023
			pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan serta indikator kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten dilakukan secara terinci dan terencana sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Klaten yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode 2021-2026. Adapun visi tersebut yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera*". Untuk misi pembangunan yang selaras dengan tujuan Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten pada Misi Kedua yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi*".

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sejumlah 4 program dengan 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten. Sumber pendanaan untuk kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Klaten tahun anggaran 2023. Untuk penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran
1.	Program Pembinaan Perpustakaan		
	• Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Wilayah Kabupaten Klaten	• Perpustakaan desa/kelurahan • Perpustakaan sekolah
	• Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat	Tersebar di Wilayah Kabupaten Klaten	• Masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran
	Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Program Pengelolaan Arsip		
	• Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten Klaten	• Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten
	• Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Wilayah Kabupaten Klaten	• Badan/Lembaga/ OPD di Kabupaten Klaten • Masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten
	• Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Luar Wilayah Kabupaten Klaten	• Masyarakat umum • Badan/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah
3.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		
	• Kegiatan Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Pemerintah Kabupaten Klaten	• Badan/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten
	• Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Klaten	• Masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana
	• Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan	Pemerintah Kabupaten Klaten	• Badan/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten yang digabung dan/atau dibubarkan • Kecamatan dan desa/kelurahan yang mengalami pemekaran daerah
	• Kegiatan Autentikasi Arsip statis dan Arsip	Pemerintah Kabupaten Klaten	• Badan/Lembaga/ Organisasi Perangkat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Sasaran
	hasil alih media kabupaten/kota		Daerah di Kabupaten Klaten
	• Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	Pemerintah Kabupaten Klaten	• Badan/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten

Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci dalam ***Lampiran.***

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten periode 2021-2026 *disinkronkan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020* yang memuat Output, Outcome dan kelompok sasaran beserta prakiraan pendanaan. Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Adapun hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten yaitu:

a. Keterbatasan jumlah fungsional arsiparis dan pustakawan sehingga pembinaan kearsipan dan perpustakaan belum optimal.
b. Masih kurangnya jumlah buku dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan perpustakaan desa.
c. Belum optimalnya digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip secara baku.
d. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan pokok–pokok rencana, sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023;
b. Proyeksi rencana belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 4.354.964.000 untuk membiayai 4 program dengan 15 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi

dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yaitu **"*Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*"**.

Klaten, Juli 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DISPERSIP KLATEN

SYAHRUNA, SH, CN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199603 1 008

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**189,033,000**					**330,917,000**
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**189,033,000**					**330,917,000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**55,515,000**					**69,917,000**
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	1 Layanan	10 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	5,000,000
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	18 Perpustakaan	10 %	12,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	17,917,000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	15 Perpustakaan	10 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	16,000,000
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	180 Orang	10 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	8,000,000
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	100 Eksemplar	10 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	18,000,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan Desa dan sekolah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	25 Eksemplar	10 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	5,000,000
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**133,518,000**					**261,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Terpenuhinya baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	30 Lokus	10 %	86,518,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	250,000,000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Terpenuhinya baca untuk masyarakat yang jauh dari jangkauan perpustakaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.962 Eksemplar 22 %	1 Perpustakaan	10 %	47,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persentase perpustakaan yang dibina	51.962 Eksemplar 22 %	11,000,000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**4,165,931,000**					**4,853,918,000**
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,900,533,000**					**4,503,826,000**
2	**24**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,500,000**					**10,500,000**
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	7 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	7,500,000
2	24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	4 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	3,000,000
2	**24**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,357,293,889**					**4,058,930,000**
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	32 Orang/bulan	100 %	3,351,293,889	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,043,930,000
2	24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	3 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
2	**24**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**78,379,111**					**62,178,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	6 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	15 Paket	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,000,000
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	15 Paket	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	5 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	6,500,000
2	24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	20 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	20,000,000
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	500 Dokumen	100 %	2,379,111	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,678,000
2	**24**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**336,130,000**					**286,218,000**
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	500 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	12 Laporan	100 %	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	101,000,000
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	16 Laporan	100 %	236,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	180,218,000
2	**24**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118,230,000**					**86,000,000**
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	27 Unit	100 %	102,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	70,500,000
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	1 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	10,000,000
2	24	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Bareng	100.00 %	8 Unit	100 %	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,500,000
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**192,033,000**					**275,748,000**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**165,183,000**					**241,678,000**
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Meningkatnya OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.00 % 100.00 %	100 Berkas	10 %	72,883,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	78.00 % 100.00 %	71,678,000
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya OPD yang dibina Tata Kelola kearsipannya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.00 % 100.00 %	60 Laporan	10 %	92,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	78.00 % 100.00 %	170,000,000
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**16,850,000**					**19,070,000**
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Meningkatnya jumlah arsip inaktif yang retensinya sekurang-kurangnya 10 tahun dan arsip statis milik OPD yang diakuisisi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.00 % 100.00 %	20 Arsip	10 %	16,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	78.00 % 100.00 %	19,070,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**								**10,000,000**					**15,000,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Meningkatnya Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.00 % 100.00 %	45 Pengguna	20 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase arsip yang diakuisisi Persentase pengawasan kearsipan internal	78.00 % 100.00 %	15,000,000
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**73,365,000**					**74,344,000**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**								**34,175,000**					**18,924,000**
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlaksananya Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	250 Arsip	5 %	24,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	8,924,000
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Terlaksananya Arsip kategori musnah yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	350 Berkas	5 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	10,000,000
2	**24**	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**								**17,540,000**					**20,420,000**
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksanakannya Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota yang terlindungi dan terselamatkan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	50 Arsip	10 %	17,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	20,420,000
2	**24**	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**								**7,100,000**					**15,000,000**
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Arsip Terakuisisi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	8 Daftar	5 %	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	10,000,000
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Arsip Terakuisisi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	250 Arsip	5 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	5,000,000
2	**24**	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**								**10,000,000**					**10,000,000**
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Terlaksananya Autentikasi Arsip statis Kabupaten/kota yang dialih media	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	25 Arsip	10 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	10,000,000
2	**24**	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**								**4,550,000**					**10,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Terhitungnya jumlah arsip yang dinyatakan hilang dan diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.00 Meter lari 20.91 %	1 Arsip	1 %	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Arsip usul musnah Persentase arsip yang dialihmediakan	60.00 Meter lari 20.91 %	10,000,000
												TOTAL	**4,354,964,000**					**5,184,835,000**

RENCANA KERJA

Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten tahun 2023 yang memuat Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan di Tahun 2023.

Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 dengan mengacu pada visi dan misi Bupati Klaten untuk kurun waktu 2021-2026. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Setda Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat menuntun kita menuju Setda yang lebih baik dan kompeten.

a.n BUPATI KLATEN
Pj. SEKRETARIS DAERAH

JAJANG PRIHONO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19810216 199912 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iv
I	PENDAHULUAN		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	3
	1.3.	Maksud dan Tujuan	8
	1.4.	Sistematika Penulisan	9
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	63
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	69
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah	71
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	110
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	111
	3.2.	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	111
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		113
V	PENUTUP		138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Sekretariat Kabupaten Klaten
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal Renja Setda Kab Klaten Tahun 2023
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tabel 4.1	Matrik Rencana Kerja (Renja)Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi mulai tahun 2020 adalah munculnya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun- tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan di tahun 2023 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah,
b. Penyusunan Rancangan Akhir,
c. Penyusunan Rancangan Akhir,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah,
e. Perumusan Rancangan Akhir Akhir, dan
f. Penetapan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021- 2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yang menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 masih berkonsentrasi kepada penyusunan dan pengawalan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 . Perangkat Daerah diharuskan melakukan efisiensi anggaran, merencanakan kembali kegiatan yang tertunda/tidak dapat dilaksanakan di tahun 2022, memfokuskan anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan menyesuaikan perubahan indikator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 juga harus dapat menjawab selain isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus harus mampu berperan dalam penyelesaian dampak yang ditimbulkan wabah Covid-19di Kabupaten Klaten.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD dan penyesuian kebijakan Pasca Covid-19. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Kemudian Rencana Kerja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Sekretariat Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten terhadap suatu rencana di tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam pelaksanaan program kegiatan Setda Kab. Klaten di tahun 2023.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Diperolehnya suatu rencana tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di Setda Kab Klaten, dengan melihat sumber daya yang ada.
b. Diperoleh hanya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan di Tahun 2023.
c. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Klaten Tahun 2023.
d. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkait antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasiprogram/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihitarget kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs *(Suistanable Development Goals)*;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RENJA Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RENJA Perangkat Daerah, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RENJA Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang :

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya. Rumusan program dan kegiatan dituangkan ke dalam tabel dibawah ini :

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, anatara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel Rumusan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 (Tabel 4.1)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkuta

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dan realisasi Anggaran yang mengacu pada APBD tahun sebelumnya (n-1).

Sedangkan realisasi program dan kegiatan mengacu pada kinerja anggaran tahun lalu (Tahun 2021), Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten mempunyai 3 (tiga) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang tersebar ke dalam 9 (sembilan) bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan total anggaran Rp. 53.393.767.099,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp. 40.540.735.311,00 (76 %).

2.1.1. Realisasi program / kegiatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program /kegiatan yang tidak memenuhi target sebagian besar di bagian-bagian Setda adalah sub kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan lapangan dikarenakan masih adanya :

- Pembatasan kegiatan masyarakat (sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan , Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air)
- Pembatasan perjalanan dinas (sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN)
- Penambahan Tenaga Harian Lepas yang telah direncanakan penambahan tetapi belum terlaksana dikarenakan efisiensi anggaran (pemanfaatan tenaga yang tersedia secara maksimal) (Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)

Dengan perincian sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)
BAGIAN HUKUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	900	605	67,22
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	900	605	67,22
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2 .06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	59	51	86,44
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terfasilitasi	8	6	75,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD	15	9	60,00
BAGIAN KESRA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2 .02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .01.2.02.02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	208	21	10,10
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2 .06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**			0	
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.06.08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	2800	1026	36,64
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01 .01.2.06.09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	75	31	41,33

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.08	**Keg. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat terkirim	50	31	62,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.02.2.02.03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat**				
		Jumlah Peserta Sarasehan dan Senam Lansia	600	0	0,00
		Jumlah Peserta Sosialisasi HIV/AIDS	300	0	0,00
BAGIAN PENGADAAN					
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD	22	12	54,55
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20	13	65,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah derah tersedia**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	20	16	80,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	23	16	69,57

4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Prosentase pengadaan barang dan jasa penunjang perekonomian pembangunan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Prosentase pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai regulasi**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dilelangkan/ditenderkan	150	139	92,67
BAGIAN PEREKONOMIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	16	6	37,50
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah frekuensi : Koordinasi tentang pengendalian dan distribusi perekonomian, TPID	39	28	71,79
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.04	**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah frekuensi Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi bidang pertanian dan jumlah frekuensi Koordinasi, sosialisasi dan monev kegiatan DBHCHT	96	70	72,92
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi bidang energi dan air	24	12	50,00
BAGIAN PROKOPIM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80	0	0,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tesedia	8	6	75,00
BAG ADM PEMBANGUNAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi keuangan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah /Frekuensi Perjalanan Dinas	12	6	50,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia	365	364	99,73
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah /Frekuensi Perjalanan Dinas	12	9	75,00
BAGIAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	57	56	98,25

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tenaga Kelistrikan	4	3	75,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	100	91,59	91,59
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suat Menyurat	Jumlah Thl Administrasi persuratan	3	2	66,67
		Thl Kebersihan Kantor	69	63	91,30
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Thl Pengemudi Kantor	13	10	76,92

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Sebagian besar Kegiatan/Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai denga yang ditargetkan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja merupakan kegiatan/sub kegiatan rutin (operasional). Dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)
BAGIAN PEMERINTAHAN					
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	12	12	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan pelayanan administrsi perkantoran**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK Yang Tersedia	32	32	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terbeli	5	5	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terbeli			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara Dengan Baik	5	5	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	4	4	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	29	29	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah**	100	100	100,00
		Kejelasan Batas antar Kabupaten	10	10	100,00

		Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Rutin Bupati Dengan Seluruh OPD	48	48	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan, Monitoring Dan Fasilitasi Tertib Adminsitrasi Kecamatan	26	26	100,00
		Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PATEN	26	26	100,00
		Jumlah Pilar Batas Daerah Yang Terpelihara/Terpasang/Termonitor	10	10	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Jumlah Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)	5	5	100,00
		Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	3	100,00
BAGIAN HUKUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi keuangan**	12	12	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	12	12	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30	30	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6	6	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	5	5	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia**	3	3	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	3	3	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	24	24	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	4	4	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor Terpelihara	20	20	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah kebijakan daerah yang tersusun			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah yang tepat waktu	350	350	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terpenuhinya perlindungan hukum dan penegakan HAM	15	15	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terpenuhinya kegiatan pelayanan informasi produk-produk hukum	350	350	100,00
BAGIAN KESRA					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	25	25	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji PNS	12	12	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	45	45	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Sub Keg. Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia	3	3	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.08	**Keg. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			0	
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	26	26	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			0	
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.09.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	6	6	100,00
BAGIAN PENGADAAN					
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi keuangan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	18	18	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya	7	7	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30	30	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	1	1	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel terbeli	1	1	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Periizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	5	5	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Prosentase pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai regulasi**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD dan penyedia yang dilayani	351	351	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pembinaan	1	1	100,00
BAGIAN PEREKONOMIAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	1	1	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	14	14	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3	3	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Peralatan Kerja**			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah perbaikan peralatan kerja	16	16	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terpelihara	6	6	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pertumbuhan setoran Bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah, Persentase BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis, persentase rekomendasi team pengendalian inflasi Daerah yang ditindak**			

		lanjuti pertumbuhan, pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan.			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah frekuensi : Pembinaan BUMD dan BLUD, Koordinasi Direksi/karyawan BUMD dan BLUD, koordinasi/penagihan PAD, sosialisasi peraturan BUMD dan BLUD	24	24	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah frekuensi koordinasi ekonomi mikro kecil, Dekranasda dan TPAKD	35	35	100,00
BAGIAN PROKOPIM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	12	12	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	85168	85166	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK Tersedia	62	62	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak Dan Penggandaan	85000	85000	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tesedia	18	18	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah	80	80	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel Terbel	1	1	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor Terbeli	13	13	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar	4	4	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat Kebersihan	12	12	100,00
		Perbaikan Peralatan Kerja	50	50	100,00
		Tenaga Kontrak Kebersihan	1	1	100,00
		THL Administrasi Kebersihan	3	3	100,00
		THL Administrasi Keuangan	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	18	17	
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	15	15	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Non Kantor Terpelihara	1	1	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Komunikasi Dan Informasi Terpelihara	1	1	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi pendokumentasian Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan Protokoler	350	350	100,00
		Tenaga Teknis Keprotokolan	9	9	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Alat Studio Komunikasi Terbeli	1	1	100,00
		Jumpa Pers, Kegiatan Hari Pers Nasional dan HUT RSPD	3	3	100,00
		Publikasi Yang Disampaikan Melalui Media Massa, Radio, Komunikasi Budaya dan Sambutan Bupati	120	120	100,00
		Tenaga Teknis LPPL RSPD Klaten	10	10	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	360	360	100,00
		Publikasi Melalui Spanduk, Baliho, Penyuluhan, Publikasi Keliling dan Media Sosial	1720	1720	100,00
BAG ADM PEMBANGUNAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi keuangan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	12	12	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara			

	Daerah				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	7	7	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03	**Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase urusan pemerintah daerah bagian pembangunan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Administrasi Pembangunan**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	51	51	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	51	51	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	51	51	100,00
BAGIAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500	500	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia	63	63	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Tersedia	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak Dan Penggandaan	13	13	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Tersedia	6	6	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman Tersedia	180	180	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair Terbeli	6	6	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumjab/Dinas Terbeli	10	10	100,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Terbeli	10	10	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Terbeli	5	5	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**			
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	3	3	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia	13	13	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Thl Administrasi Keuangan	3	3	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Terpelihara	5	5	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	33	33	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeulair Terpelihara	55	55	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	3	3	100,00
		Jumlah Lingkungan Kantor Tertata	4	4	100,00
		Jumlah Rumdin Terpelihara	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumjab/Dinas Terpelihara	51	51	100,00
		Jumlah Perlengkapan Gedung Terpelihara	54	54	100,00
		Jumlah Thl Pengaman Kantor	61	61	100,00
		Jumlah Peralatan Gedung Terpelihara	72	72	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	pembayaran gaji KDH/WKDH	2	2	100,00

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20	20	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terbayar	2	2	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam luar daerah	300	300	100,00
		pembayaran biaya operasional kdh/wkdh	60	60	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	100	100	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah acara jamuan tamu	35	35	100,00
		jumlah kebutuhan	13	13	100,00
		jumlah rapat	14	14	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah acara jamuan tamu	20	20	100,00
		jumlah kebutuhan	12	12	100,00
		jumlah rapat	10	10	100,00
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	kegiatan pelantikan bup/wabup	1	1	100,00

.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yangdirencanakan.

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target adalah Bagian Pemerintahan . Kegiatan /Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yang telah ditentukan yaitu :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

  ⇨ dikarenakan tingginya tingkat koordinasi fasilitasi jalan tol

- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan indikator Jumlah Obyek Rupa Bumi Yang Teridentifikasi Dan Terbakukan

  ⇨ target 15 obyek, realisasi 25 obyek dikarenakan, obyek rupa bumi diusulkan dari Kecamatan melebihi 15 obyek, dan saat pendataan di lapangan, ditemukan 25 obyek peninggalan sejarah

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan indikator Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru serta Perbup tentang Kerjasama

  ⇨ target 6, realisasi 14, Capaian di atas 100% dikarenakan Bagian pemerintahan memfasilitasi ajuan kerjasama dari Perangkat daerah, sehingga setelah dilakukan fasilitasi da pembahasan kerjasama menghasilkan lebih dari 6 dokumen

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 terdapat deviasi 2,40 % , hal ini tidak lepas dari kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka mendukung kinerja Bupati Klaten. Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Adanya perbaikan sistem manajemen kinerja, yang ditunjukkan dengan meningkatnya komitmen pemimpin daerah bersama dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
b. Adanya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Teknologi Informasi
c. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lintas Perangkat Daerah
d. Adanya produk-produk kebijakan yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu perlunya peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka percepatan pencapaian target agar terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya :

a. Perlunya menjaga konsistensi Renstra Perangkat Daerah dan Rencana KerjaPerangkat Daerah.
b. Perlunya fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.
c. Perlunya perencanaan yang matang dan meminimalisasi penambahan kegiatandalam perubahan
d. Adanya konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan time schedule yang telah ditetapkan
e. Peningkatan koordinasi dengan lintas perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan
f. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat
g. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD.

Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sebagaimana pada tabel 2.1

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : .Sekretariat Daerah Kab Klaten										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
BAGIAN PEMERINTAHAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Urusan Pemerintahan Bidang Unsur Pendukung Pemerintahan yang ditunjang**								
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan**	-	-	100	100	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	-	-	12	12	100,00	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	-	-	10	26	260,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan pelayanan administrsi perkantoran**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK Yang Tersedia	-	-	32	32	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Dan Penggandaan	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman Tersedia	-	-	1387	1436	103,53	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	-	-	15	24	160,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik**	-	-	100	100	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terbeli	-	-	5	5	100,00	-	-	-
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terbeli	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara Dengan Baik	-	-	5	5	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	-	-	4	4	100,00	-	-	-
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	-	-	29	29	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
		Kejelasan Batas antar Kabupaten	-	-	10	10	100,00	-	-	-
		Jumlah Obyek rupa bumi yang terbakukan	-	-	15	25	166,67	-	-	-

		Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Rutin Bupati Dengan Seluruh OPD	-	-	48	48	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan, Monitoring Dan Fasilitasi Tertib Adminsitrasi Kecamatan	-	-	26	26	100,00	-	-	-
		Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PATEN	-	-	26	26	100,00	-	-	-
		Jumlah Pilar Batas Daerah Yang Terpelihara/Terpasang/Termonitor	-	-	10	10	100,00	-	-	-
		Jumlah Obyek Rupa Bumi Yang Teridentifikasi Dan Terbakukan	-	-	15	25	166,67	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah danJumlah Perbup tentangStandar PelayananMinimal (SPM)	-	-	5	5	100,00	-	-	-
		Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	3	3	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	Persentase peningkatan kerjasama daerah	-	-	15	21,51	143,38	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen perjanjian kerjasama dan kesepakatan bersama baru serta Perbup tentang Kerjasama	-	-	6	14	233,33	-	-	-
BAGIAN HUKUM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	1098	709	64,57	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi keuangan**	-	-	12	12	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	-	-	12	12	100,00	-	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya	-	-	0	0	0,00	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	-	-	900	605	67,22	-	-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	900	605	67,22	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	-	-	59	51	86,44	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	-	-	30	30	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan tersedia	-	-	0	0	0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terfasilitasi	-	-	8	6	75,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	15	9	60,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah tersedia**	-	-	100	5	5,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel terbeli	-	-	0	0	0,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	-	-	5	5	100,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia**	-	-	3	12	400,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	-	-	3	3	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	-	-	24	24	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	-	-	4	4	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor Terpelihara	-	-	20	20	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE KOORDINASI PENATAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN , BANTUAN HUKUM DAN HAM SERTA PENDOKUMENTASIAN DAN INFORMASI PRODUK HUKUM**	-	-	715	562	78,60	-	-	-
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah kebijakan daerah yang tersusun						-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah yang tepat waktu	-	-	350	350	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terpenuhinya perlindungan hukum dan penegakan HAM	-	-	15	15	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terpenuhinya kegiatan pelayanan informasi produk-produk hukum	-	-	350	350	100,00	-	-	-
BAGIAN KESRA										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	-	-
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-				-	-	-
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	-	-	25	25	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji PNS	-	-	12	12	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	208	21	10,10	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah**		-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	-	-	45	45	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Sub Keg. Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia	-	-	3	3	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	-	-	2800	1026	36,64	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	-	-	75	31	41,33	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.08	**Keg. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	-				-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.01	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat terkirim	-	-	50	31	62,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	-	-	26	26	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.09	**Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.09.02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang Terkoordinasi**	-	-	0	0	0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat**		-	-	0	0	0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.02.2.02.01	**Sub Keg. Fasilitasi Pengelolaan bina mental spiritual**		-	-	2	2	100,00	-	-	-
		Jumlah haji yang berangkat terfasilitasi	-	-	0	0	0,00	-	-	-
		Jumlah qori/qoriah, hafidz/hafidoh tingkat pelajar dan umum	-	-	0	0	0,00	-	-	-

		Jumlah Peringatan Hari besar keagamaan di Kab. Klaten	-	-	0	0	0,00	-	-	-
		Jumlah Masid Pemda yang Difasilitasi	-	-	2	0	0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .02.2.02.02	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Sosial**		-	-	10	14	140,00	-	-	-
		Jumlah Pemohon/Organisasi yang difasilitasi, Organisasi yang mendapat Bantuan Hibah	-	-	14		0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .02.2.02.03	**Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat**		-	-	600	500	83,33	-	-	-
		Jumlah Peserta Sarasehan dan Senam Lansia	-	-	600	0	0,00	-	-	-
		Jumlah Peserta Sosialisasi HIV/AIDS	-	-	300	0	0,00	-	-	-
BAGIAN PENGADAAN										
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi keuangan**	-	-	18	24	133,33	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	-	-	18	18	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya	-	-	7	7	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	-	-	30	30	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	-	-	1	1	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terfasilitasi	-	-	10	8	80,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-	22	12	54,55	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedia**	-	-				-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel terbeli	-	-	1	1	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	20	13	65,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah derah tersedia**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	-	-	20	16	80,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara**	-	-	28	21	75,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Periizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	-	-	5	5	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	-	-	23	16	69,57	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Prosentase pengadaan barang dan jasa penunjang perekonomian pembangunan**	-	-				-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Prosentase pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai regulasi**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang dilelangkan/ditenderkan	-	-	150	139	92,67	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD dan penyedia yang dilayani	-	-	351	351	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.06.4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pembinaan	-	-	1	1	100,00	-	-	-
BAGIAN PEREKONOMIAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	1	1	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	-	-	0	0	0,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu**	-	-	3	3	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK yang tersedia	-	-	14	14	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	-	-	3	3	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah	-	-	16	6	37,50	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Peralatan Kerja**	-	-	16	16	100,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah perbaikan peralatan kerja	-	-	16	16	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terpelihara	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA**	-	-				-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pertumbuhan setoran Bagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah, Persentase BLUD yang mendapatkan pembinaan teknis, persentase rekomendasi team pengendalian inflasi Daerah yang ditindak lanjuti pertumbuhan, pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapatkan akses keuangan.**	-	-	3			-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah frekuensi : Pembinaan BUMD dan BLUD, Koordinasi Direksi/karyawan BUMD dan BLUD, koordinasi/penagihan PAD, sosialisasi peraturan BUMD dan BLUD	-	-	24	24	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah frekuensi : Koordinasi tentang pengendalian dan distribusi perekonomian, TPID	-	-	39	28	71,79	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah frekuensi koordinasi ekonomi mikro kecil, Dekranasda dan TPAKD	-	-	35	35	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.03.2.04	**PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM**	**Kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	-	-	2	2		-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah frekuensi Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi bidang pertanian dan jumlah frekuensi Koordinasi, sosialisasi dan monev kegiatan DBHCHT	-	-	96	70	72,92	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.04.4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah koordinasi bidang energi dan air	-	-	24	12	50,00	-	-	-
BAGIAN PROKOPIM										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	-	-				-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	-	-	12	12	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	80	0	0,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	-	-	85168	85166	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK Tersedia	-	-	62	62	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak Dan Penggandaan	-	-	85000	85000	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tesedia	-	-	8	6	75,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tesedia	-	-	18	18	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	80	80	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	-	-	14	14	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel Terbel	-	-	1	1	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor Terbeli	-	-	13	13	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	-	-	72	72	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar	-	-	4	4	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Alat Kebersihan	-	-	12	12	100,00	-	-	-
		Perbaikan Peralatan Kerja	-	-	50	50	100,00	-	-	-
		Tenaga Kontrak Kebersihan	-	-	1	1	100,00	-	-	-
		THL Administrasi Kebersihan	-	-	3	3	100,00	-	-	-
		THL Administrasi Keuangan	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	-	18	17		-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara	-	-	15	15	100,00	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Gedung Non Kantor Terpelihara	-	-	1	1	100,00	-	-	-
		Lingkungan Kantor Tertata	-	-	1	0	0,00	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Peralatan Komunikasi Dan Informasi Terpelihara	-	-	1	1	100,00	-	-	-

	Lainnya									
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi pendokumentasian Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP	-	-	2573	2573	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan Protokoler	-	-	350	350	100,00	-	-	-
		Tenaga Teknis Keprotokolan	-	-	9	9	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Alat Studio Komunikasi Terbeli	-	-	1	1	100,00	-	-	-
		Jumpa Pers, Kegiatan Hari Pers Nasional dan HUT RSPD	-	-	3	3	100,00	-	-	-
		Publikasi Yang Disampaikan Melalui Media Massa, Radio, Komunikasi Budaya dan Sambutan Bupati	-	-	120	120	100,00	-	-	-
		Tenaga Teknis LPPL RSPD Klaten	-	-	10	10	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.09.4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah	-	-	360	360	100,00	-	-	-

		Publikasi Melalui Spanduk, Baliho, Penyuluhan, Publikasi Keliling dan Media Sosial	-	-	1720	1720	100,00	-	-	-
BAG ADM PEMBANGUNAN										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan administrasi keuangan**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	-	-	12	12	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah /Frekuensi Perjalanan Dinas	-	-	12	6	50,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia	-	-	365	364	99,73	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah /Frekuensi Perjalanan Dinas	-	-	12	9	75,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terpelihara	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.02.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	-	-	7	7	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03	**Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase urusan pemerintah daerah bagian pembangunan**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Administrasi Pembangunan**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	51	51	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	51	51	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.05.4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah	-	-	51	51	100,00	-	-	-
BAGIAN UMUM										

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	100	97,87	97,87	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	-	-	100	99,12	99,12	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	-	-	57	56	98,25	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.03.4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	500	500	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	-	-	100	96,88	96,88	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tenaga Kelistrikan	-	-	4	3	75,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia	-	-	63	63	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Tersedia	-	-	2	2	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Tersedia	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak Dan Penggandaan	-	-	13	13	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Tersedia	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman Tersedia	-	-	180	180	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeulair Terbeli	-	-	6	6	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumjab/Dinas Terbeli	-	-	10	10	100,00	-	-	-
		Jumlah Perlengkapan Gedung Terbeli	-	-	10	10	100,00	-	-	-

		Jumlah Peralatan Gedung Terbeli	-	-	5	5	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	-	-	100	91,59	91,59	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suat Menyurat	Jumlah Thl Administrasi persuratan	-	-	3	2	66,67	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Terbayar	-	-	3	3	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedia	-	-	13	13	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Thl Administrasi Keuangan	-	-	3	3	100,00	-	-	-
		Thl Kebersihan Kantor	-	-	69	63	91,30	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Terpelihara	-	-	5	5	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Thl Pengemudi Kantor	-	-	13	10	76,92	-	-	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	-	-	33	33	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeulair Terpelihara	-	-	55	55	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	-	-	3	3	100,00	-	-	-
		Jumlah Lingkungan Kantor Tertata	-	-	4	4	100,00	-	-	-
		Jumlah Rumdin Terpelihara	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumjab/Dinas Terpelihara	-	-	51	51	100,00	-	-	-
		Jumlah Perlengkapan Gedung Terpelihara	-	-	54	54	100,00	-	-	-
		Jumlah Thl Pengaman Kantor	-	-	61	61	100,00	-	-	-
		Jumlah Peralatan Gedung Terpelihara	-	-	72	72	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	-	-	100	100	100,00	-	-	-

4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	pembayaran gaji KDH/WKDH	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	20	20	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terbayar	-	-	2	2	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam luar daerah	-	-	300	300	100,00	-	-	-
		pembayaran biaya operasional kdh/wkdh	-	-	60	60	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	-	-	100	100	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah acara jamuan tamu	-	-	35	35	100,00	-	-	-
		jumlah kebutuhan	-	-	13	13	100,00	-	-	-
		jumlah rapat	-	-	14	14	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah acara jamuan tamu	-	-	20	20	100,00	-	-	-

		jumlah kebutuhan	-	-	12	12	100,00	-	-	-
		jumlah rapat	-	-	10	10	100,00	-	-	-
4.01.4-1.0-0.0-0.01.07.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	kegiatan pelantikan bup/wabup	-	-	1	1	100,00	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif *good govermance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat disajikan pada skala nilai peringkat kinerja dandisajikan pada Tabel berikut :

Skala Pengukuran Capaian LKj IP Tahun 2021

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat tinggi
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	≤ 50,00%	Sangat tinggi
2	50,00% – 65,00%	Tinggi
3	65,01%– 75,00%	Sedang
4	≥90,01%	Sangat Rendah

Sumber : Bagian Organisasi

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,1	3,2109	103,58	3,1	103,58

Dalam *Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih* yang dijabarkan ke dalam Renstra Sekretariat Daerah, Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2021 dengan *skor 3,2109* tergolong *sangat tinggi*,. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan Setda Klaten melaksanakan koordinasi dan desk secara rutin bersama seluruh perangkat daerah dalam menyajikan data dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2. Seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menyajikan data dukung capaian kinerja secara tepat waktu.
3. Koordinasi dan konsultasi dilakukan secara rutin dengan Pemerintah Jawa tengah dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam melengkapi data dukung yang diperlukan.
4. Asistensi dari BPKP Perwakilan provinsi Jawa Tengah dilakukan secara aktif saat proses verifikasi data dukung EKPPD.
5. Rata-rata capaian Kinerja setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) masuk kategori "sangat tinggi" baik dari aspek pengambilan kebijakan, aspek pelaksana kebijakan administrasi umum dan aspek pelaksana kebijakan urusan wajib dan pilihan. Capaian IKK belum masuk kategori "sangat tinggi" diharapkan bisa ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
2. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	95	95	100	95	100

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2021 adalah Terjalinnya kerjasama yang baik antar stakeholder meliputi koordinasi dan fasilitasi yang menunjang pada program dan kegiatan pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan Dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	90	100	111,11	90	111,11
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	90	100	111,11	90	111,11
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	100	100	100,00	100	100,00

Upaya yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam *Meningkatkan Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan*, pada tahun 2021, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah

   Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada tahun 2021 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1710 (atau 99,42%), sedangkan pada tahun 2021 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720 kegiatan, dan terealisasi sebanyak 1720 (atau 100%).
2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

   Pada tahun 2020 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 355 (atau 98,61%), sedangkan pada tahun 2021 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 360 (atau 100%).
3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah

   Pada tahun 2020 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 445 (atau 98,89%), sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 350 dan terealisasi sebanyak 350 (atau 100%).

Sasaran Meningkatkan Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Optimalisasi Sumber Daya yang Dimiliki

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	3,5 (± 1)	2,58	73.71	3,5 (± 1)	73.71

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2021 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 2,58%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,38%. Kenaikan nilai inflasi sebagai dampak adanya beberapa program stimulus dari pemerintah bagi masyarakat dan umkm terdampak covid-19 yaitu berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai) , Bantuan Subsidi Bunga , Bantuan bagi pelaku UMKM .

Sasaran Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui sasaran Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan dengan berbagai pihak dalam rangka perencanaan pembangunan capaiannya sebesar 97%. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi rutin kepala daerah yang dilaksanakan setiap hari senin dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada Tahun 2021 di Setda Kabupaten

Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Data pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak

134 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 110, gagal lelang sebanyak 13 usulan, 11 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD. Sedangkan Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 139 usulan paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dengan perincian sebagai berikut :

- Lolos tender/seleksi secara elektronik sebanyak 134 paket
- Gagal tender sebanyak 4 paket
- Yang dikembalikan ke OPD karena tender di batalkan sebanyak 1 paket

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	68(B)	**62,88** (B)	92.47	70 (B)	92.47

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung–jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 62.88 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,79	20,96
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,16	15,43
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,42
d.	Evaluasi Internal	10	5,29	5,39
e.	Capaian Kinerja	20	10,49	10,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,07	62,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

1. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
3. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kemendagri guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Memperhatikan pencapaian target kinerja jangka menengah sampai dengan target kinerja OPD.
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam menyusun perencanaan kinerja, seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (result oriented), kualitas indikator kinerja,keterpaduan perencanaan serta mekanisme cascade kinerja, penyempurnaan proses penjenjangan (cascading) kinerja.
c. Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang sudah dibangun.
d. Pengoptimalan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran.
e. Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam system akuntabilitas kinerja di lingkungan Kabupaten Klaten dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu system yang terintegrasi dan tidak terpisahkan.

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Serta Bantuan Hukum dan Hak Azasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	90	100	90	
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	98	95,7	95,7	80	

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Realisasi Pada tahun 2021 :

- Propemperda sebanyak 11 Peraturan Daerah, dengan realisasi sebanyak 7 Peraturan Daerah.
- Produk hukum daerah yang tersusun di tahun 2021 sebanyak 7 Peraturan daerah, 78 Peraturan Bupati dan 329 Surat Keputusan Bupati.
- Pendampingan penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum sebanyak 15 Perkara sesuai dengan perkara yang di daftarkan. terdiri dari 14 Perkara yang berkaitan dengan Tanah Kas Desa (TKD) dan 1 perkara tentang penanganan permasalahan gedung Disdukcapil Kabupaten Klaten.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM. Indek Kabupaten Klaten untuk tahun 2021 untuk sementara penilaian ditunda sesuai dengan Surat edaran dari Direktur Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor W13-HA 02 04-376 Tanggal 25 Nopember 2021 tentang penundaan penilaian Kabupaten Peduli HAM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan isu strategis daerah yaitu Tata Kelola Pemerintahan , dan berdasarkan pada analisa permasalahan pembangunan, maka isu strategis Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a. Pelayanan publik yang mudah, cepat dan transparan berbasis IT

b. Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan umum dan otonomi daerah

c. Peningkatan akuntabilitas kinerja ,kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

a. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

c. Perumusan Kebijakan Penanganan Dampak Pasca Covid-19

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Sektratiat Daerah Kabupaten Klaten. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Pada Tahun anggaran 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten telah menetapkan 8 (delapan) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dengan capaian kinerja terendah yaitu indikator Tingkat Inflasi YoY yang diampu oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 73,71 % (target sebesar 3,5 (± 1) dan realisasi 2,58).

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas danfungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a. Adanya keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari Penerima Belanja Hibah;

b. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan produk hukum daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang

c. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayananan;

d. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPDuntuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Depelopment Goals)

Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat dampak NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Depelopment Goals).

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah,diantaranya:

1. Tantangan

a. Penerapan reward and punishment yang seimbang;
b. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah secara optimal
c. Mewujudkan citra Pemerintah Daerah di tengah tumbuh denganmemanfaatkan media sosial;
d. Penyusunan SOP Pelayanan setiap bagian dan SKM;
e. Adanya Standar Pelayanan Publik;
f. Kualitas kinerja Sekretariat Daerah & Pemerintah Daerah meningkat;
g. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan.

2. Peluang

a. Telah disusunnya analisis jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
b. Telah disusunnya Kelas Jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
c. Banyaknya media massa dan perkembangan IT memudahkan pemerintahdaerah mendorong pesan informasi secara akurat, luas dan cepat dalam peningkatan citra pemerintah daerah;
d. Adanya Perbup No 15 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan SOP;
e. Perda No.14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
f. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Adanya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Klaten

danstabilitas inflasi 4 tahun terakhir;

h. Adanya tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD), program KUR Nasional dan program subsidi bunga dari APBD Kabupaten Klaten;
i. Perda No. 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
j. Perbup No 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten.

2.3.5 Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

a. Penyusunan dan implementasi regulasi tentang tunjangan kinerja sesuai kelasjabatan;
b. Penyusunan regulasi yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
c. Peningkatan kualitas kemitraan media massa dan pemanfaatan IT dalam rangkameningkatan citra pemerintah daerah;
d. Penyusunan Standar Operation Prosedur Bagian & Standar Pelayanan Publik
e. Peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah & Pemerintah Daerah(SAKIP);
f. Peningkatan koordinasi dengan lembaga jasa keuangan dan dinas terkait dalam rangka memberikan kemudahan akses permodalan bagi UMK dan wirausahawan baru;
g. Evaluasi dan revisi Perda No 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD;
h. Sosialisasi, pendampingan dan bantuan hukum baik bagi litigasi maupun nonlitigasi; dan
i. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten telah sesuai dengan analisis kebutuhan tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 telah mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan Perubahan indikator sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten secara garis besar

tidak terdapat penambahan dan pengurangan kegiatan maupun sub kegiatan, hanya perubahan dan penyesuaian volume target serta indikator kinerja menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Review terhadap rancangan awal dapat kami sajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kab Klaten

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)**										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**36.792.480.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**36.792.476.008**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**50.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**36.792.476.008**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**19.787.689.008**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**19.807.689.008**	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 orang	19.547.449.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 orang/bl	19.547.449.008	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 dok	165.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 dokumen	141.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 dok	65.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 dokume	89.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	30.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**100%**	**10.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**100%**	**10.000.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**100%**	**10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**100%**	**10.000.000**	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**2.827.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**2.700.100.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 paket	350.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 paket	300.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	66 paket	250.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	153 orang/bl	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	42.000.000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 laporan	1.200.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	325 laporan	1.023.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	750.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	750.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**512.943.992**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**512.940.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	279.193.992	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	279.190.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600 unit	233.750.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	600 unit	233.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**6.772.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**6.752.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	72.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	95.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	3.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	2.977.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	480.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3.200.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3.200.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**2.597.600.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**2.649.500.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 unit	367.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 unit	409.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	1.300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	1.300.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah Mebel yang Dipelihara	132 unit	40.000.000	

		Tegalyoso					Tegalyoso				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	700.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	700.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 unit	200.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	**100%**	**1.974.747.000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu**	**100%**	**2.049.747.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	174.747.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	174.747.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 paket	100.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	150.000.000	

	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	150.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	175.000.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 orang/bulan	1.550.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48 orang/bulan	1.550.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	**100%**	**2.250.000.000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah**	**100%**	**2.250.000.000**	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	1.510.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	1.510.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 paket	740.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 paket	740.000.000	
2	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROKOPIM)**				**2.027.475.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROKOPIM)**				**3.527.470.000**	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**2.027.475.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**3.527.470.470**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**12.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**12.000.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**154.355.144**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**154.350.144**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	62 paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	62 paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakantersedia	8 paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakantersedia	10 paket	35.000.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 Dokumen	7.203.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72 Dokumen	7.203.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	67.152.144	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	67.147.144	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**50.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**50.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	25.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 unit	25.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**110.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**110.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	110.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**84.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**84.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	84.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	84.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan yang sesuai dengan SOP**	**100%**	**1.617.119.856**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Keprotokolan yang sesuai dengan SOP**	**100%**	**3.117.119.856**	
			Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**100%**				**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang sesuai dengan SOP**	**100%**		

			Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP	**100%**				**Persentase Pelaksanaan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang sesuai dengan SOP**	**100%**		
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	340 Laporan	381.080.000	Fasilitasi Keprotokolan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	340 Laporan	381.080.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	350 Laporan	534.999.856	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	500 Laporan	2.034.999.856	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1720 Laporan	701.040.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1720 Laporan	701.040.000	
3	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)**				**374.325.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)**				**374.320.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**	**100%**	**374.325.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**	**100%**	**374.320.000**	
			Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	**100%**				**Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik**	**100%**		

			Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	**100%**				**Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi**	**100%**		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**74.968.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**74.963.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	6.072.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	6.072.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3.084.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3.084.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2.812.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	2.807.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	51.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	51.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**1.237.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**1.237.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	1.237.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	1.237.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**44.220.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**44.220.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.880.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.880.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.340.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.340.000	
	Penataan Organisasi		**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**	**100%**	**253.900.000**	**Penataan Organisasi**		**Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun**	**100%**	**253.900.000**	

	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	59.300.209	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	59.300.209	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	75.335.148	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	75.335.148	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6 Dokumen	103.399.943	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	103.399.943	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	15.864.700	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	15.864.700	
4	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)**				**483.919.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)**				**483.910.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**195.476.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**195.467.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**111.967.500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**111.958.500**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	15.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1143 Dokumen	4.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1143 Dokumen	4.560.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	62.407.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	62.398.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**15.432.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**15.432.500**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	3.500.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	3.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.932.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.932.500	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**68.076.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**68.076.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.506.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	47.506.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 unit	2.230.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 unit	2.230.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	18.340.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	18.340.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana**	**100%**	**288.443.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana**	**100%**	**288.443.000**	
			Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	**65,38%**				**Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana**	**65,38%**		

	Administrasi Tata Pemerintahan		**Persentase administrasi Kewilayahan yang terkelola**	**100%**	**213.443.000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase administrasi Kewilayahan yang terkelola**	**100%**	**213.443.000**	
			Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana	**100%**				**Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang terlaksana**	**100%**		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	15.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	15.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	67.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	67.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	131.443.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	131.443.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana**	**100%**	**75.000.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Persentase fasilitasi kerjasama yang terlaksana**	**100%**	**75.000.000**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	68.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6 Dokumen	68.000.000	

	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	3.000.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	4.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	4.000.000	
5	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)**				**941.486.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)**				**1.016.480.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase penyelesaian adminitrasi kepegawaian tepat waktu**	**100%**	**312.245.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase penyelesaian adminitrasi kepegawaian tepat waktu**	**100%**	**312.240.000**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentasi penyelesaian administrasi kepegawai tepat waktu**	**100%**	**200.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentasi penyelesaian administrasi kepegawai tepat waktu**	**100%**	**200.000.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	600 orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	400 orang	200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**48.300.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**48.300.000**	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	50 paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 dokumen	1.800.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	35 laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	35 laporan	30.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	350 dokumen	1.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	350 dokumen	1.500.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu**	**100%**	**14.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu**	**100%**	**14.500.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	3.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	3.000.000	

		Tegalyoso					Tegalyoso				
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	5 unit	1.500.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	5 unit	1.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**100%**	**49.445.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**100%**	**49.440.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	43.355.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	43.350.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	6.090.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	6.090.000	

	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum**	**90%**	**629.241.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum**	**90%**	**629.240.000**	
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	**90%**				**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan**	**90%**		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		**Persentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum**	**90%**	**629.241.000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase kasus hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum**	**90%**	**704.240.000**	
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	**90%**				**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan**	**90%**		
			Persentase produk hukum yang diinformasikan	**100%**				**Persentase produk hukum yang diinformasikan**	**100%**		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	350 dokumen	238.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	425 dokumen	313.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	209.241.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	209.240.000	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	350 dokumen	182.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	425 dokumen	182.000.000	
6	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)**				**4.189.508.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)**				**4.314.500.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu**	**100%**	**597.812.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu**	**100%**	**603.362.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**27.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**26.520.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	27.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	26.520.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**100.199.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**101.199.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 Paket	14.484.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 Paket	14.484.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	43300 Paket	12.895.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	13.895.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	22160 Dokumen	3.084.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	3.084.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37 Laporan	31.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	31.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	37.936.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	37.936.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**49.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**39.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 paket	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	24.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	24.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 Unit	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**362.613.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**379.013.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	5.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	1.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	290.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Laporan	18.460.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	26 Laporan	18.460.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	68.753.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	68.753.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**100%**	**59.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara**	**100%**	**57.630.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	59.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	57.630.000	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**100%**	**3.591.696.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**100%**	**3.711.138.000**	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**100%**	**3.591.696.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan**	**100%**	**3.711.138.000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	234 Dokumen	2.548.950.160	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	23 Dokumen	2.543.392.160	

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	35 Dokumen	994.745.840	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	35 Dokumen	1.119.745.840	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	46 Dokumen	48.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	48.000.000	
7	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)**				**458.651.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)**				**458.650.000**	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**197.904.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**197.903.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**2.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100%**	**2.000.000**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu**	**12 bulan**	**16.920.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**16.920.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	16.920.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	16.920.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**83.974.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**83.973.000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	328 paket	1.476.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	328 Dokumen	1.476.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	82.498.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	82.497.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**16.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**16.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Unit	4.400.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Unit	4.400.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 unit	11.600.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	2 unit	11.600.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**79.010.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**79.010.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	72.760.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	72.760.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	6.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	6.250.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan**	**100%**	**260.747.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan**	**100%**	**260.747.000**	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				**260.747.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase Administrasi Pembangunan**	**100%**	**260.747.000**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	51 Dokumen	19.788.800	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	51 Dokumen	19.788.800	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51 Laporan	180.517.200	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	51 Laporan	180.517.200	

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	51 Laporan	60.441.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	51 Laporan	60.441.000	
					458.650.000					**458.650.000**	
8	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA)**				**705.923.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA)**				**705.920.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**224.318.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**224.315.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**3.650.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**3.650.000**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	1 dokumen	3.650.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dokumen	3.650.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**58.548.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**58.545.000**	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	30 Unit	10.048.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	10.045.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	2 paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	2 dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	3.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	10 laporan	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**100.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**100.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	10.000.000	

		Tegalyoso					Tegalyoso				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah unit sarana dan prasaranag gedung kantor atau bangunanl lainnya yang disediakan	10 unit	90.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**2.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**2.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah surat terkirim	12 laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**60.120.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**60.120.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinan terbayar	5 unit	45.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	45.120.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	21 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21 unit	15.000.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**100%**	**481.605.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**100%**	**481.605.000**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		**Prosentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**100%**	**481.605.000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Prosentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement**	**100%**	**481.605.000**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket yang dilelangkan atau di Tenderkan	130 jumlah paket	405.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	150 dokume	405.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD dan Penyedia yang dilayani Pengadaan secara Elektronik	351 opd dan penyedia	35.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	350 dokume	35.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa	200 orang	41.605.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	200 orang	41.605.000	
					705.920.000					**705.920.000**	
9	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA)**				**7.751.353.000**	**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA)**				**6.926.352.000**	

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**190.000.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP**	**100%**	**69.270.188**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**3 dokumen**	**66.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**	**-**	**0**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	66.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**45.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**24.390.188**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 paket	12.390.188	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	13.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Laporan	20.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0 Laporan	0	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 unit	0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**59.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**60.660.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	50.680.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 unit	9.980.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				**7.561.353.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis**	**100%**	**6.841.301.812**	

								Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan	**100%**		
								Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah	**5%**		
								Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti	**100%**		
								Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	**5%**		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				**2.535.000.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis**	**5%**	**2.311.000.000**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	39 dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	39 dokumen	50.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Dokumen	185.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	211.000.000	

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	2.200.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	2.050.000.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				**5.026.353.000**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**4.530.301.812**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi , sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, tebaga kerja	3 dokumen	4.951.353.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi , sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, tebaga kerja	3 dokumen	4.520.291.812	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	75.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tidak terdapat usulan program dan kegiatandari para pemangku kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah pasca Covid-19. Pemerintah Pusat menetapkan salah satu unsur dari tujuh pilar pembangunan nasional dalam RPJMN 2020- 2024 sebagai salah satu arah kebijakan yaitu Pembangunan Polhukhankam terfokus pada bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten , Sekretariat Daerah masuk dalam pendukung ketercapaian Misi dari Bupati yang ke-2 (dua) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan mapping integrasi program yang direncanakan Sekretariat Daerah terhadap prioritas kebijakan nasional, provinsi dan daerah tahun 2023arah kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Klaten	Program Setda dalam Renja Th 2023
Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Perekonomian Dan Pembangunan • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan, sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

Misi ke 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur dan bersih, transparan, bertujuan dan anti korupsi;

a. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah ;

Tujuan jangka menegah Sekretariat Daerah adalah Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja Peringkat/ Nilai SAKIP dan target kinerja di Tahun 2023 Kabupaten Klaten memperoleh Skor 63,00.

b. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan indikator sasaran sebagai berikut :

a) SAKIP Aspek Pelaporan

Target kinerja Tahun 2023 mendapat nilai 10.61

b) Nilai EPPD

Target kinerja di Tahun 2023 mendapat skor 3,223

c) Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi

Target kinerja di Tahun 2023 mendapat nilai 33,00

d) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Target kinerja di Tahun 2023 mencapai indeks 83,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Setda Kabupaten Klaten berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023. Rencana Kerja Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"** dengan penjelasan dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Maju,** merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.
    - Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
    - Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
    - Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas social yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
    - Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.
- **Mandiri,** perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangantantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.
- **Sejahtera,** perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas

kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya..

Upaya untuk mewujudkan visi "**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**" dirumuskan melalui 6 (Enam) misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur,bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 berisi pendayagunaan potensi ekonomi di setiap daerah. Kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong Kabupaten Klaten untuk mengembangkan potensi ekonominya. Sekretariat Daerah Kabupetan Klaten melalui pemangku kebijakan dibidang perekonomian mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur,bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi yang didukung dengan 2 sasaran yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Setda Kabupaten Klaten terdapat 3 (tiga) program , 19 (sembilan belas) dan 66 (enam puluh enam) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1) Pengadaan Mebel
    2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
    3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3) Pemeliharaan Mebel
    4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

j. Penataan Organisasi
1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1) Fasilitasi Keprotokolan
2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan

l. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Administrasi Tata Pemerintahan
1) Penataan Administrasi Pemerintahan
2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
3) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
2) Fasilitasi Bantuan Hukum
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

d. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

a. Pelaksanaan kebijakan perekonomian
    1) Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
    2) Pengendalian dan distribusi perekonomian
    3) Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
c. Pengadaan barang dan jasa
    1) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
    2) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
    3) Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
d. Pemantauan kebijakan Sumber daya alam
    1) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
    2) Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air.

Rencana Kerja Setda Kabupaten Klaten Tahun 2023 ada 1 (satu) sub kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD yaitu dengan adanya penambahan dana DBHCHT pada Bagian Hukum Setda meliputi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sosialisasi Peraturan perundang-undangan dengan indikator jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan. Pagu indikatif disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten di Tahun Anggaran 2023. Secara rinci tabel rumusan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah kabupaten klaten Tahun 2023 terdapat dalam Tabel 3

TABEL 4.1

MATRIK RENCANA KERJA (RENJA)PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)**								**36.792.476.008**					**35.674.206.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**36.792.476.008**					**35.674.206.000**
4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50.000.000**					**50.000.000**
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	6 dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	50.000.000
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**19.807.689.008**					**21.143.623.000**
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	153 orang/bl	100 %	19.547.449.008	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelu		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	20.918.383.000

														mnya				
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	28 dokumen	100 %	141.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	165.240.000
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	400 dokume	100%	89.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	55.000.000
4	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	5.000.000
4	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10.000.000**					**5.000.000**

4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselesaikan administrasi barang milik daerah pada sekretariat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	16 laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	5.000.000
4	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**10.000.000**					**5.000.000**
4	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	5 dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	5.000.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2.700.100.000**					**2.114.000.000**
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	75 paket	100 %	300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	281.000.000
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	66 paket	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	150.000.000
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	3 paket	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	50.000.000
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	25.000.000

4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	153 orang/bl	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	116.000.000
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	6 dokumen	100 %	42.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	42.000.000
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	325 laporan	100 %	1.023.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	800.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	250 laporan	100 %	750.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	650.000.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**512.940.000**					**200.000.000**
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	6 unit	100 %	279.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	50.000.000
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	600 unit	100 %	233.750.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	150.000.000
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6.752.500.000**					**5.911.260.000**

4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 laporan	100 %	95.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	72.500.000
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	4 laporan	100 %	2.977.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	2.400.000.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	200 laporan	100 %	480.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	300.000.000
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	3 laporan	100 %	3.200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	3.138.760.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.649.500.000**					**1.976.747.000**
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Setda	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	9 unit	100 %	409.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	325.700.000

4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Setda	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	46 unit	100 %	1.300.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	940.000.000
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Setda	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	132 unit	100 %	40.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	30.000.000
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Setda	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	5 unit	100 %	700.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	513.797.000
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di Setda	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	120 unit	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	167.250.000
4	**01**	**01**	**2,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**2.049.747.000**					**2.018.576.000**
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 orang/bulan	100%	174.747.000	Pajak Hotel		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	268.576.000

4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	6 paket	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	100.000.000
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 orang	100 %	175.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	100.000.000
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	48 orang/bulan	100%	1.550.000.000	Pajak Restoran Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	1.550.000.000
4	**01**	**01**	**2,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**2.250.000.000**					**2.250.000.000**
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	10 paket	100 %	1.510.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	1.510.000.000
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	9 paket	100 %	740.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	740.000.000
												TOTAL	**36.792.476.008**					**35.674.206.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													

4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROKOPIM)**								**3,527,470,000**					**2.500.546.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,527,470,000**					**2.500.546.000**
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12.000.000**					**12.000.000**
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Presentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	12 Dokumen	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Presentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	12.000.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154.350.144**					**238.546.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	62 paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	40.000.000
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakantersedia	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	10 paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	40.000.000

4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	72 Dokumen	100 %	7.203.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	15.000.000
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	12 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	30.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 %	180 Laporan	100 %	67.147.144	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	113.546.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**50.000.000**					**160.000.000**

4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tersedianya mebel dan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	2 unit	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	60.000.000
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Tersedianya mebel dan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	2 unit	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	100.000.000
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**110.000.000**					**110.000.000**
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	2 Laporan	2 laporan	110.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	110.000.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**84.000.000**					**90.000.000**

4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl Lapangann	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 %	10 unit	10 unit	84.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	90.000.000
4	**01**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**3.117.119.856**					**1.890.000.000**
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 %	340 Laporan	100 %	381.080.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	410.000.000
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 %	500 Laporan	100 %	2.034.999.856	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	735.000.000

4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 %	1720 Laporan	100%	701.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	100.00 % 100.00 %	745.000.000
TOTAL													**3.527.470.000**					**2.500.546.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)**								**374.320.000**					**499.919.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**374.320.000**					**499.919.000**
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**74.963.000**					**93.807.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	43 Paket	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	15.000.000

4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	20 Paket	100 %	6.072.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	7.807.000
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	36 Dokumen	100 %	3.084.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	4.000.000

4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	6 Laporan	100 %	2.807.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	7.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 100.00 %	40 Laporan	100 %	51.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	60.000.000
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.237.000**					**1.292.000**

4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	200 Laporan	100 %	1.237.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	1.292.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44.220.000**					**44.220.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	5 Unit	100 %	39.880.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	39.880.000

4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	5 Unit	100 %	4.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	4.340.000
4	**01**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**								**253.900.000**				**360.600.000**
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	5 Dokumen	100 %	59.300.209	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	84.600.000

4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	3 Laporan	100 %	75.335.148	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	90.700.000
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 % 100.00 %	5 Dokumen	100 %	103.399.943	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	147.100.000

4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terpenuhinya Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100.00 % 100.00 %	3 Dokumen	100 %	15.864.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	100.00 % 100.00 % 100.00 %	38.200.000
TOTAL													**374.320.000**					**499.919.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)**								**483.910.000**					**658.465.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**195.467.000**					**318.680.000**
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**111.958.500**					**208.000.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	33 Paket	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	25.000.000
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	3 Paket	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	30.000.000
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1143 Dokumen	100%	4.560.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	5.000.000

4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Laporan	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	20.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	40 Laporan	100 %	62.398.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	128.000.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15.432.500**					**26.000.000**
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Unit	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	0
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Unit	100 %	11.932.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	26.000.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68.076.000**					**84.680.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	5 Unit	100 %	47.506.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	55.680.000

4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	7 unit	100 %	2.230.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	4.000.000
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	26 unit	100 %	18.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	25.000.000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**288.443.000**					**339.785.000**
4	**01**	**02**	**2,01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**213.443.000**					**254.785.000**
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terfasilitasinya Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	4 Dokumen	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	45.000.000
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terfasilitasinya Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	4 Dokumen	100 %	67.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	76.000.000

4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	5 Dokumen	100 %	131.443.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	133.785.000
4	**01**	**02**	**2,04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**75.000.000**				**85.000.000**
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	6 Dokumen	100 %	68.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	70.000.000
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	1 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	10.000.000

4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 30.77 %	2 Laporan	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana Persentase Kecamatan mencapai kategori Wasana	100.00 % 30.77 %	5.000.000
TOTAL													**483.910.000**					**658.465.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)**								**1.016.480.000**					**1.146.948.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**312.240.000**					**405.876.000**
4	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**200.000.000**					**300.000.000**
4	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyelesaian adminitrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	400 orang	100 %	200.000.000	DBH CHT		Persentase penyelesaian adminitrasi kepegawaian tepat waktu	100 %	300.000.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**48.300.000**					**38.300.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	30 paket	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	5.000.000
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	6 paket	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	5.000.000

4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	360 dokumen	100%	1.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	1.800.000
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	5.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	20.000.000
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	350 dokumen	100%	1.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100 %	1.500.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**14.500.000**					**14.500.000**
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	Jumlah paket mebel yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	1 unit	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	100 %	3.000.000
4	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	5 unit	100 %	1.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	100 %	1.500.000

4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 unit	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tepat waktu	100 %	10.000.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49.440.000**					**53.076.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	4 unit	100 %	43.350.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	46.986.000
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	20 unit	100 %	6.090.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100 %	6.090.000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**704.240.000**					**741.072.000**
4	**01**	**02**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**704.240.000**					**741.072.000**
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terselesaikannya produk hukum daerah dan bantuan hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 % 90.00 %	425 dokumen	90%	313.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	90.00 % 90.00 %	285.000.000

4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya produk hukum daerah dan bantuan hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 % 90.00 %	8 kasus	90 %	209.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	90.00 % 90.00 %	256.072.000
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terselesaikannya produk hukum daerah dan bantuan hukum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.00 % 90.00 %	425 dokumen	90%	182.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	90.00 % 90.00 %	200.000.000
TOTAL													**1.016.480.000**					**1.146.948.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)**								**4.314.500.000**					**2.892.572.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**603.362.000**					**485.757.000**
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26.520.000**					**27.000.000**
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	26.520.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	27.000.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**101.199.000**					**99.743.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	45 Paket	100 %	14.484.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	12.370.000

4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	13.895.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	14.289.000
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	3.084.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	3.084.000
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	100 %	31.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	31.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Laporan	100 %	37.936.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	39.000.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**39.000.000**					**22.000.000**
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	24.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	22.000.000
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	0
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**379.013.000**					**261.514.000**

4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	1.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	5.400.000
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 Laporan	100 %	290.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	160.000.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Laporan	100 %	18.460.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	12.500.000
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	68.753.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	83.614.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57.630.000**					**75.500.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	57.630.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %	75.500.000
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**3.711.138.000**					**2.406.815.000**
4	**01**	**02**	**2,02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**3.711.138.000**					**2.406.815.000**

4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Dokumen	100 %	2.543.392.160	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	100 %	1.838.815.000
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 Dokumen	100 %	1.119.745.840	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	100 %	520.000.000

4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	48.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	100 %	48.000.000
TOTAL												**4.314.500.000**					**2.892.572.000**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)**							**458.650.000**					**494.667.500**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**197.903.000**					**207.845.800**
4	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**2.000.000**					**2.000.000**
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	2.000.000
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**16.920.000**					**18.612.000**
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya pemenuhan administrasi keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Dokumen	100 %	16.920.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	18.612.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**83.973.000**					**92.223.800**

4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	328 Dokumen	100%	1.476.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	1.476.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	30 Laporan	100 %	82.497.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	90.747.800
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16.000.000**					**16.000.000**
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Unit	100 %	4.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	4.400.000
4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 unit	100 %	11.600.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	11.600.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**79.010.000**					**79.010.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	5 Unit	100 %	72.760.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	72.760.000

4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	13 Unit	100 %	6.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	6.250.000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**260.747.000**					**286.821.700**
4	**01**	**03**	**2,02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**260.747.000**					**286.821.700**
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terpenuhinya administrasi pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	51 Dokumen	100 %	19.788.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	100,00 %	21.767.680
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terpenuhinya administrasi pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	51 Laporan	100 %	180.517.200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	100,00 %	198.568.920
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terpenuhinya administrasi pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	51 Laporan	100 %	60.441.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	100,00 %	66.485.100
TOTAL													**458.650.000**					**494.667.500**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA)**								**705.920.000**					**1.050.722.754**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**224.315.000**					**379.722.754**
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.650.000**					**9.000.000**
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksana tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 dokumen	100 %	3.650.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	9.000.000
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**58.545.000**					**92.522.754**

4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	30 paket	100 %	10.045.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	14.022.754
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 paket	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	8.000.000
4	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 dokumen	100 %	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	3.500.000
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	10 laporan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	12.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 laporan	100 %	25.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	55.000.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100.000.000**					**170.000.000**

4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100 %	2 Unit	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100.00 % 100 %	30.000.000
4	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah unit sarana dan prasaranag gedung kantor atau bangunanl lainnya yang disediakan	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100 %	10 unit	100 %	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100.00 % 100 %	140.000.000
4	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.000.000**					**2.200.000**
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	12 laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	100 %	2.200.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.120.000**					**106.000.000**

4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 % 100 %	5 unit	100 %	45.120.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100.00 % 100 %	88.000.000
4	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100 %	21 unit	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100.00 % 100 %	18.000.000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**481.605.000**					**671.000.000**
4	**01**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**481.605.000**					**671.000.000**
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	150 dokume	100%	405.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	100,00 %	550.000.000
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	350 dokume	100%	35.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	100,00 %	65.000.000

4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	200 orang	100 %	41.605.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	100,00 %	56.000.000
TOTAL													**705.920.000**					**1.050.722.754**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA)**								**6.926.352.000**					**3.426.519.000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**85.050.188**					**134.997.000**
4	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**0**					**0**
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan daerah tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	0 Dokumen	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yg sesuai SOP	100,00 %	0
4	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**24.390.188**					**41.000.000**
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 paket	100 %	12.390.188	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	13.000.000
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terlaksananya administrasi umum daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 paket	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	13.000.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Laporan	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan adminstrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	15.000.000
4	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0**					**35.000.000**

4	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Terlaksananya Pengadaan BMD di Bbagian Perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 unit	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	35.000.000
4	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60.660.000**					**58.997.000**
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan BMD di bag.perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	50.680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	42.000.000
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terlaksananya pemeliharaan BMD di bag.perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 unit	100 %	9.980.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	100 %	16.997.000
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**6.841.301.812**					**3.291.522.000**
4	**01**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**2.311.000.000**					**2.926.522.000**

4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya kebijakan perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	39 dokumen	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	150.000.000

4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya kebijakan perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	1 Laporan	100 %	211.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	265.000.000

4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	Jumlah Dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Terlaksananya kebijakan perekonomian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	1 dokumen	100 %	2.050.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase BLUD yang mendapat pembinaan teknis Persentase Kebijakan sumber daya alam yang terlaksana sesuai dengan ketentuan Persentase pertumbuhan setoran bagian laba BUMD kepada pemerintah daerah Persentase rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi daerah yang ditindaklanjuti Pertumbuhan jumlah unit usaha mikro yang mendapat akses keuangan	100 % 100 % 5 % 100 % 5 %	2.511.522.000
4	**01**	**03**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**4.530.301.812**				**365.000.000**

4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi , sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, tebaga kerja	Terlaksananan ya pemantauan kebujakan SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 dokumen	100 %	4.520.291.812	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan	100 %	300.000.000
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Terlaksananan ya pemantauan kebujakan SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	10.010.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan Sumber Daya Alam yang terlaksana sesuai ketentuan	100 %	65.000.000
												TOTAL	**6.926.352.000**				**3.426.519.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang telah dijabarkan dalam renstra Sekretariat Daerah.Pagu indikatif akan berubah menyesuaiakan dengan kondisi keuangan daerah di akhir tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan Setda Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 akan fokus dan mengutamakan program dan kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran Renstra Setda Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Akhir APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klatenini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre−point*

(pokok−pokok) rencana, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun 2023: ***"Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan*"**
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan melakukan pendekatan pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja pembangunan RPJMD/Renstra PD sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbasis pada indikator kinerja pencapaian tujuan pada masing-masing urusan bidang penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian kinerja periode sebelumnya dan isu strategis serta permasalahan pembangunan yang ada.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: "***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".***

Klaten,.....Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

JAJANG PRIHONO, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19810812161999121 00

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Kata Pengantar

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam rangka mensinergikan, mensikronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Akhirnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, serta untuk ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, Juli 2022

PIt. SEKRETARIS DPRD KABU. KLATEN

SIP ANWAR, SE.MSi.

NIP. 19640304 198812 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

I PENDAHULUAN I - 1

1.1 Latar Belakang I - 1
1.2 Landasan Hukum I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan I - 8
1.4 Sistematika Penulisan I - 8

II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2022) II - 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II - 4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II - 5
2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD II - 6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II - 7

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III - 1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III - 1

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV - 1

V PENUTUP V - 1

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian V - 1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V - 1
5.3 Rencana Tindaklanjut V - 2

Lampiran I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

Lampiran II

Rumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Lampiran II

Klaten

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Organisasi Daerah. Renja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan.

Memedomani Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD.

Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Memedomani Pasal 84 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Secara khusus klausul ini belum bisa dilaksanakan mengingat Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan secara mandiri, tidak menterlibatkan pamangku-kepentingan. Sekalipun begitu mekanisme penyempurnaan Renja Sekretariat DPRD dengan menghimpun masukkan saat pembahasan alat kelengkapan DPRD dan saat Reses, maupun publik hearing DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian Renja Perangkat Daerah dengan RKPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahu 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Stamdar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal-Semarang-salatiga-Demak-Grobokan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembngunan Jangka Mengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tetang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Berita Negara Republik ndonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1142);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jaw Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambaran Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jaw Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jaw Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten ;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta lokasi kegiatan satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indicator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah DPRD Tahun 2023, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang
1.2. LandasanHukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. SistematikaPenulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWLAN II TAHUN BERKENAAN (2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Akir Renja Perangkat Daerah ; dan

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional; dan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2022)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dengan memperhatikan pelaksanaan APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, serta memperhatikan capaian kinerja APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatandan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, serta dengan Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan target 11 buah Raperda yang dibahas tepat waktu, namun hanya terealisasi sebanyak 9 buah Raperda yang dibahas tepat waktu, karena terkendala ketentuan perundang-undangan yang lebih atas. Raperda yang belum dibahas tepat waktu pada tahun 2021, adalah:

- Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

2.1.2. Realisasi program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:

2.1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan, diantaranya:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyeiaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Kunjunagan Tamu; dan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan JasaKomuniksi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor.

c. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaa, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Mebel;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

d. Kegiatan Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan Sub Kegiatan :
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; dan
- Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.

e. Kegiatan Layanan administrasi DPRD dengan Sub Kegiatan:
- Fasilitasi Fraksi DPRD;
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; dan
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD.

2.1.2.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan:

a. Kegiatan Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiaan :
- Pendalaman Tugas DPRD;
- Publikasidan Dokumen Dewan; dan
- Penyusunan Program Kerja DPRD.

c. Kegiaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Pelasanaan Reses.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, diantaranya:

a.Adanya aturan produk hokum pemerintah pusat, yang belum ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya.

b. Banyaknya surat-surat masuk dan keluar.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, mengingat Sekretariat DPRD satu sisi bertugas membantu bupati selaku pimpinan perangkat Daerah, dipihak lain harus mendukung tugas pokok dan fungsi DPRD, mengingat mobilitas anggota DPRD yang tinggi, tidak semua pejabat struktural dapat mengikuti kinerja DPRD, dan hanya mewakilkan staf untuk mengikuti agenda DPRD, hal ini mengakibatkan lambatnya keputusan yang harus diambil dan tindaklanjut penyelesaian yang diperlukan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

a. Perlunya tetap menjaga konsistensi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

b. Perlunya peningkatan kualitas dan validitas data dari masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD sebagai bahan perencanaan, dan pelaporan; dan

c. Fokus pada target indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan Matrik Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 disajikan pada ***Lampiran I*** (table 2.1) dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Bab ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja,

sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif *good govermance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah untuk penetapan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupten Klaten berdasarkan indicator SPM (Standart Nasional) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum dijadikan acuan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sedangkan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dengan menggunakan Norma Standart Prosedur dan Kreteria (NSPK). Adapun pencapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dapat disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupten Klaten

No.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Aalisis
				Tahun 2021 (Th. n-2)	Tahun 2022 (Th. n-1)	Tahun 2023 (Th. n)	Tahun 2024 (Th. N+1)	Tahun 2021 (Th. n-2)	Tahun 2022 (Th. n-1)	Tahun 2023 (Th. n)	Tahun 2024 (Th. N+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

a) Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;

b) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Sekretariat DPRD sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal;
c) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Klaten;
d) Penyediaan data dan informasi Kesekretariatan DPRD sebagai bahan perencanaan kurang memadai; dan
e) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti di daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a) Sumber daya manusia Sekretariat DPRD belum semuanya mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberi dukungan atas hak dan kewajiban DPRD;
b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja legislatif;
c) Belum optimalnya penegakan produk hukum daerah dan masih adanya produk hukum daerah yang belum responsif, akomodatif dan akuntabel bagi kebutuhan masyarakat luas; dan
d) Belum optimalnya kualitas pelayanan.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya:

a. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Mewujudkan produk hukum daerah yang mendorong pencapaian akuntabilitas kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah;
d. Meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikapdan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, tranparan dan akuntabel;
f. Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanana set daerah; dan
g. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

2.3.4 Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

a) Kurang responsifnya SDM Sekretariat terhadap mobilitas DPRD karena tuntutan beban kerja yang tinggi;
b) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publick menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD dalam member dukungan tugas pokok dan fungsi DPRD untuk lebih optimal dalam mewujudkan budaya kerja; dan
c) Lambatnya penyesuaian SDM Sekretariat terhadap perkembangan/perubahan peraturan perundang-undangan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Konsultasi Publik terhadap Rancangan RKPD terkait dengan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, dan setelah dilakukan pembahasan internal di Lingkungan Sekretariat DPRD dan dipandang perlu tidak melakukan penambahan dan atau pengurangan program/kegiatan pada RKPD, hal ini dengan pertimbangan:

1). Usulan program dan kegiatan di Renja Sekretariat DPRD sudah mengakomodir usulan masyarakat/pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten.

2). Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2023 sedapat mungkin tetap konsisten dengan proses dan hasil pembahasan Renja Sekretariat DPRD maupun RKPD. Sehingga Reviu terhadap RKPD tidak ada penambahan maupun pengurangan terhadap Program/kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD. Adapun hasil Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4. ***sebagaimana terlampir.***

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat saat Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Tahun 2023 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maupun saat *Publik Hearing* tidak ada usulan masyarakat terkait dengan penambahan maupun pengurangan usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Sehingga usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan adalah nihil. Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sekalipun begitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten akan tetap memperhatikan usulan pemangku kepentingan dengan kesesuaian isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung tugas pokok DPRD Kabupaten Klaten, akan tetap memperhatikan kondisi penyelenggaraan pemerintah secara umum.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Daerah. Adapun agenda aksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten
Dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab Klaten	Program dalam Renja 2023
a. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik..	a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan viskal daerah.	a. Peningkatan kwalitas pelayanan public dan reformasi birokrasi.	a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten /Kota b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2021-2026, adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(Good and clean Governance)*

Sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Klaten, maka ditetapkan sasaran jangka menengah perangkat Daerah adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sedangkan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026, disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Renstra Perangkat Daerah Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang Mengacu dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Visi **Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**		
Misi		
Tujuan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and clean Governance)	
	Sasaran	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 disajikan pada ***Lampiran II*** dalam dokumen ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang disusun merupakan pedoman dan sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, diantaranya :

a. Mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran;
b. Memproporsionalkan prioritas belanja yang berbasis kinerja dan program yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Sehingga agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2023 tidak hanya memuat program pelayanan publik, tetapi juga memuat program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah dengan *entre-point* (pokok-pokok) rencana, sebagai berikut:

a. Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Tahun 2023:**" Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan saranan Prasarana Wilayah yang berkelanjutan"**
b. Proyeksi belanja langsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten tahun 2023 sebesar Rp. 55.256.584.000,- untuk membiayai 2 program dengan 15 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni : ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Klaten, Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD KABU. KLATEN

SIP ANWAR, SE.MSi.
NIP. 19640304 198812 1 001

LAMPIRAN I

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan Tahun Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiaan Tahun Lalu (2021)						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)		(9)		(10)=(5+7+9)		(11)=(10/4)	
4.02.01	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**195,614,921,000**		3,844,318,205	100	40,100,748,000	117.70	35,873,820,003	117.70	89.46	100	**39,879,308,000**	72.57	79,818,886,208	72.57	41
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100	**137,500,000**			0	0	0		0	0		**26,250,000**	0.00	-	0	-
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	45000	137,500,000									9	26,250,000	0.00	-	0	-
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	**21,426,830,000**		-	100	4,261,269,000	100	3,828,379,968	100	89.84	100	**4,518,916,000**	100.00	8,089,648,968	100	38
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	39	21,270,830,000			12	4,261,269,000	12	3,827,479,968	100	89.82	40	4,492,666,000	24.00	8,088,748,968	61.54	38
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekfensi perjalanan dinas dalam daerah					12	50,000,000	12	900,000	100	1.80						
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	60	156,000,000						-			12	26,250,000	0.00	-	0.00	-
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	**4,259,880,000**		520,235,111	100	813,530,000	100.00	559,058,712	100.00	68.72	100	**872,976,000**	66.67	1,892,823,823	66.67	44
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50	72,175,000	10	4,200,500	10	11,685,000	10	4,342,000	100	37.15875053	10	12,935,000	30.00	20,227,500	60.00	28
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	35	104,750,000	7	2,875,000	7	18,200,000	7	9,662,450	100	53.09038462	7	19,450,000	21.00	30,737,450	60.00	29
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	175000	183,750,000	13	20,073,000	15	40,000,000	15	35,649,000	100.00	89.1225	35000	35,250,000	43.00	95,722,000	0.02	52
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2415	682,410,000	12	68,833,300	12	133,732,000	12	64,742,450	100	48.41208536	483	134,982,000	36.00	267,307,750	1.49	39
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	450	1,021,625,000			2900	230,771,000	2900	146,317,315	100	63.40	85	202,825,000	5800.00	377,088,315	1288.89	37
	Penyediaan makan dan minum	Jumlah peserta rapat dan tamu			2850	166,934,311												
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	umlah akomodasi untuk rapat koordinasi dalam daerah			40	3,810,000												
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah akomodasi untuk rapat koordinasi luar daerah			40	253,509,000												
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	560	2,195,170,000			20	379,142,000	20	298,345,497	100	78.69	115	467,534,000	40.00	677,487,497	7.14	31
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100	**1,070,000,000**		713,617,944	100	472,056,000	100.00	461,354,110	100.00	97.73	100	**400,000,000**	66.67	1,647,028,054	66.67	154
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	130	250,000,000									130	250,000,000	0.00	-	0.00	-
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	22	820,000,000			19	472,056,000	19	461,354,110	100.00	97.73	6	150,000,000	38.00	933,410,110	172.73	114

		Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang terbeli			7	102,181,144													
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli			15	611,436,800													
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	5,254,558,000		939,127,872	100	1,130,443,000	106.23	721,092,547	106.23	63.79	100	**1,167,064,000**	68.74	1,660,220,519	68.74	32
4.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat terkirim	40600	232,500,000	7800	40,216,000	8500	53,280,000	13000	29,297,500	152.9412	54.99	8000	45,000,000	29300.00	69,522,000	72.17	30
4.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	2,163,225,000	4	227,908,589	4	470,000,000	4	195,767,493	100	41.65	12	431,145,000	12.00	423,676,086	100.00	20
4.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	175	465,880,000	11	75,879,000	12	91,156,000	12	80,684,700	100	88.51	35	91,676,000	35.00	156,563,712	20.00	34
4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum eterbayar	16	2,392,953,000			16	516,007,000	16	415,342,854	100	80.49	16	599,243,000	32.00	415,342,870	200.00	17
		Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor			12	222,252,026													
		Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan			3	97,597,245													
		Penyedia Jasa keamanan kantor	Jumlah jasa pengamanan kantor			16	275,275,012	8532		13032										
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100	**6,506,910,000**		861,911,744	100	1,385,438,000	100.00	965,546,276	100	69.69	100	**1,296,882,000**	66.67	3,212,896,020	66.67	49
4.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	5	1,033,005,000	4	91,690,402	5	228,837,000	5	218,960,611	100	95.68409436	5	206,601,000	14.00	539,488,013	280.00	52
4.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	21	1,660,350,000	20	51,195,250	21	406,900,000	21	309,260,621	100	76.00	21	332,070,000	62.00	767,355,871	295.24	46
4.02.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	200	263,750,000	6	4,250,000	6	19,550,000	6	15,240,000	100	77.95396419	40	51,250,000	18.00	39,040,000	9.00	15
4.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	3	1,939,360,000	1	163,195,500	3	385,122,000	3	146,825,038	100.00	38.12429256	3	386,372,000	7.00	695,142,538	233.33	36
		Pemeliharaan rutin rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang terpelihara			1	92,841,038													
		Fasilitasi Rumah Jabatan				1	380,382,154													
		Pemeliharaan rutin/berkla perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dipelihara			10	14,354,000													
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedun Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			12	64,003,400													
4.02.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	70	1,610,445,000			15	345,029,000	15	275,260,006	100	79.78	14	320,589,000	30.00	620,289,006	42.86	39
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	100	**150,406,567,000**	100	323,685,600	100	30,257,910,000	100	28,411,486,810	100	93.90	100	**30,360,153,000**	100.00	58,993,082,410	100.00	39
4.02.01.2.15.01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	250	147,865,197,000			12	29,911,879,000	12	28,160,460,110	100	94.14	50	29,911,879,000	24.00	58,072,339,110	9.60	39
4.02.01.2.15.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dan jenis penyediaan Pakaian Dinas Beserta Astribut DPRD	1100	2,270,490,000	200	261,429,000	200	291,855,000	200	228,820,000	100	78.40	250	394,098,000	600.00	782,104,000	54.55	34
		Pengadaan Pakaian Khusus Har-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu			50	19,951,500													
4.02.01.2.15.03		Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Medical Check Up DPRD	250	270,880,000	50	42,305,100	50	54,176,000	50	22,206,700	100	40.98992174	50	54,176,000	150.00	118,687,800	60.00	44
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase DPRD terlayani administrasinya	100	**6,552,676,000**	100	485,739,934	100	1,780,102,000	100	926,901,580	100	52.07	100	**1,237,067,000**	100.00	3,192,743,514	100.00	49
4.02.01.2.16.02		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi Fraksi DPRD	7	416,770,000	7	328,113,250	7	365,984,000	7	312,379,250	100	85.35	7	81,854,000	21.00	1,006,476,500	300.00	241
4.02.01.2.16.03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Risalah Rapat Paripurna DPRD yang tersusun	336	3,647,924,000	28	33,630,300	28	944,310,000	28	367,928,024	100	38.96	64	684,155,000	84.00	1,345,868,324	25.00	37

				Jumlah Pablik Hearing/dialog denganTokoh Masyarakat/Agama yang dilaksanakan	240	-	40	123,996,384	48		48		100	#DIV/0!	48	-	136.00	123,996,384	56.67	#DIV/0!
4.02.01.2.16.04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	67	2,487,982,000			1	469,808,000	1	246,594,306	100	52.48831565	9	471,058,000	2.00	716,402,306	2.99	29
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda**	**75**	**104,388,607,000**		19,651,700,636	75	17,360,512,000	75	11,769,303,223	100	67.79	75	**18,541,797,000**	150.00	48,781,515,859	200.00	47
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	100				100		100		100		100		200.00	-	200.00	#DIV/0!
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	100				100		100		100		100		200.00	-	200.00	#DIV/0!
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	100	**28,861,505,000**	100	2,672,428,750	100	4,565,616,000	100	1,154,341,200	100	25.28	100	4,595,916,000	100.00	8,392,385,950	100.00	29
4.02.02.2.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terbahas dan tersusun	100	3,463,550,000			24	510,664,000	24	84,775,000	100	16.60	20	692,710,000	48.00	595,439,000	48.00	17
4.02.02.2.01.02			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Raperda yang dibahas	47	24,137,955,000	6	2,672,428,750	11	4,054,952,000	11	1,069,566,200	100	26.38	8	3,783,206,000	28.00	7,796,946,950	59.57	32
4.02.02.2.01.03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian perundang-undangan yang dilaksanakan	14	280,000,000									2	40,000,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.01.04			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif DPRD terfasilitasi	12	480,000,000									2	80,000,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.01.05			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tatib DPRD yang ditetapkan	2	500,000,000									0	-	0.00	-	0.00	-
			Penyusunan Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang disusun																
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Prosentase kebijakan Anggaran yang dibahas	100	**5,624,560,000**		0		0	0	0	0	0	100	964,912,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.02.03			Pembahasan APBD	Jumlah frekuensi pembahasan APBD	30	5,624,560,000							0	0	6	964,912,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	100	**22,123,080,000**		0		0	0	0	0	0	100	3,788,905,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang diawasi	80	5,039,230,000									16	926,346,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur yang diawasi	35	5,769,290,000									7	912,358,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat terawasi	25	5,598,665,000									5	972,198,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah OPD urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian terawasi	30	5,715,895,000									6	978,003,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	100	**13,553,815,000**		2,043,481,539	100	10,493,957,000	100	8,821,115,523	100	84.06	100	2,459,513,000	66.67	21,358,554,062	66.67	158
4.02.02.2.04.01			Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD	50	450,000,000									0	-	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.04.02			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah peserta pendalaman tugas DPRD	15000	10,288,275,000			306	2,999,150,000	306	1,604,775,255	100	53.51	300	1,897,655,000	612.00	4,603,925,255	4.08	45
4.02.02.2.04.03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50	1,320,540,000			10	260,819,000	10	200,775,548	100	76.98	10	262,858,000	20.00	461,594,548	40.00	35
			Penyebaranluasan Informasi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah dan jenis penyebarluasan informasi kedewanan			8	124,353,539												
			Penyusunan Profil DPRD				200	49,916,750												

			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumah dialog interaktif di Media elektronik			2	30,452,500												
4.02.02.2.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	35	1,495,000,000										7	299,000,000	0.00	-	0.00	-
			Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dan jenis penyusunan program kerja DPRD					325	7,233,988,000	325	7,015,564,720	100	96.98						
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Workshop peningkatan kapasitas DPRD			6	1,838,758,750												
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase reses yang dilaksanakan	100	**14,272,300,000**		1,946,940,000	100	2,300,939,000	100	1,793,846,500	100	77.96	100	2,854,460,000	66.67	6,041,725,500	66.67	42
4.02.02.2.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD tersusun	15	150,000,000									3	30,000,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.05.03			Pelaksanaan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan	15	14,122,300,000	3	1,946,940,000	3	2,300,939,000	3	1,793,846,500	100	77.96	3	2,824,460,000	9.00	6,041,725,500	60.00	43
4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	100	**1,936,080,000**									100	247,216,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik DPRD tersusun	4	700,000,000										-	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.06.02			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pengawasan pelaksanaan Kode Etik DPRD	30	1,236,080,000									6	247,216,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya	100	**18,017,267,000**		12,988,850,347							100	3,630,875,000	0.00	12,988,850,347	0.00	72
4.02.02.2.08.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD yang dilaksanakan	180	2,500,000,000									25	350,000,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.08.03			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah frekuensi fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	65	5,448,334,000									13	1,129,667,000	0.00	-	0.00	-
4.02.02.2.08.04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah frekuensi fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	185	10,068,933,000									15	2,151,208,000	0.00	-	0.00	-
			Rapat-rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna			50	151,394,500												
			Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah kegiatan alat kelengkapan DPRD			115	12,837,455,847												
				Jumlah		300,003,528,000	-	23,496,018,841		57,461,260,000		47,643,123,226				58,421,105,000		128,600,402,067		

Klaten, Juli 2022

PIC. SEKRETARIS DPRD KABU. KLATEN

SIP ANWAR, SE.MSI.

NIP. 19640304 198812 1 001

LAMPIRAN II

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Klaten	**100 %**	**40,901,311,924**			**100 %**	**39,245,304,000**
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kab. Klaten	100 %	**20,000,000**			100 %	**27,500,000**
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Klaten	9 Dokumen	20,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		9 Dokumen	27,500,000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten	100 %	**4,300,583,869**			100 %	**4,225,916,000**
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Klaten	39 Orang	4,259,333,869	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum dan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		39 Orang	4,193,916,000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kab. Klaten	12 Dokumen	41,250,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	32,000,000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten	100 %	**841,789,000**			100 %	**851,401,000**
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Klaten	10 paket	12,935,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		10 paket	14,185,000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Klaten	7 paket	19,450,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		7 paket	20,700,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Klaten	75 paket	34,470,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		80 paket	36,500,000

4.02.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Klaten	483 dokumen	108,400,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		483 dokumen	136,232,000
4.02.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Klaten	85 laporan	199,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		80 laporan	175,000,000
4.02.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Klaten	25 laporan	467,534,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		27 laporan	468,784,000
4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten	100 %	**500,000,000**			100 %	**90,000,000**
4.02.01.2.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Klaten	111 Unit	250,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		0 Unit	-
4.02.01.2.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Klaten	16 Unit	250,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	90,000,000.0
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten	100 %	**1,535,216,131**			100 %	**998,885,000**
4.02.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Klaten	12 laporan	45,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	46,250,000
4.02.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Kab. Klaten	12 laporan	400,216,131	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	432,395,000
4.02.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Klaten	12 laporan	220,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	92,926,000
4.02.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Klaten	12 laporan	870,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	427,314,000
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Kab. Klaten	100 %	**1,102,428,000**			100 %	**1,300,632,000**
4.02.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Klaten	1 unit	48,350,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	206,601,000
4.02.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Klaten	22 Unit	362,828,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		21 Unit	332,070,000
4.02.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kab. Klaten	40 Unit	51,250,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		40 Unit	52,500,000

4.02.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Klaten	3 Unit	330,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		3 Unit	387,622,000
4.02.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Klaten	14 Unit	310,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		14 Unit	321,839,000
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	Kab. Klaten	100 %	**31,318,020,000**			100 %	**30,510,153,000**
4.02.01.2.15.01			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	Kab. Klaten	50 Orang	30,868,922,000	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan		50 Orang	29,911,879,000
4.02.01.2.15.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Kab. Klaten	200 paket	394,098,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		250 paket	544,098,000
4.02.01.2.15.03			Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti medical check up DPRD	Kab. Klaten	50 Orang	55,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		50 Orang	54,176,000
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD		Persentase DPRD terlayani administrasinya	Kab. Klaten	100 %	**1,283,274,924**			100 %	**1,240,817,000**
4.02.01.2.16.02			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	Kab. Klaten	12 laporan	81,854,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	83,104,000
4.02.01.2.16.03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Kab. Klaten	24 laporan	730,362,924	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		24 laporan	685,405,000
4.02.01.2.16.04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Kab. Klaten	12 paket	471,058,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 paket	472,308,000
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda**	Kab. Klaten	**75 %**	**14,355,272,076**			**75 %**	**21,293,086,000**
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	Kab. Klaten	**100 %**				**100 %**	
				Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	Kab. Klaten	**100 %**				**100 %**	
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	Kab. Klaten	100 %	**2,904,744,000**			100 %	**6,059,580,000**

4.02.02.2.01.01			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Kab. Klaten	20 Dokumen	692,710,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	692,710,000
4.02.02.2.01.02			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	Kab. Klaten	8 dokumen	2,092,034,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		10 dokumen	5,246,870,000
4.02.02.2.01.03			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	Kab. Klaten	2 Dokumen	40,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	40,000,000
4.02.02.2.01.04			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	Kab. Klaten	2 Dokumen	80,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	80,000,000
4.02.02.2.01.05			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tatib DPRD yang ditetapkan	Kab. Klaten	0 Dokumen	-			0 Dokumen	-
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Prosentase kebijakan Anggaran yang dibahas	Kab. Klaten	100 %	**1,164,912,000.00**			100 %	**1,164,912,000**
4.02.02.2.02.03			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	Kab. Klaten	6 dokumen	1,164,912,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		6 Kali	1,164,912,000
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	Kab. Klaten	100 %	**3,889,077,000**			100 %	**4,728,524,000**
4.02.02.2.03.01			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kab. Klaten	14 laporan	1,072,356,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		14 laporan	1,027,596,000
4.02.02.2.03.02			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Kab. Klaten	12 laporan	912,365,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	1,213,608,000
4.02.02.2.03.03			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pegawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Klaten	12 laporan	926,346,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	1,303,472,000
4.02.02.2.03.04			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Kab. Klaten	12 laporan	978,010,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		12 laporan	1,183,848,000
4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	Kab. Klaten	100 %	**2,149,843,000**			100 %	**3,110,763,000**
4.02.02.2.04.01			Orientasi DPRD	Jumlah peserta orientasi DPRD	Kab. Klaten	0 Orang	-			50 Orang	450,000,000
4.02.02.2.04.02			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	Kab. Klaten	6 dokumen	1,587,985,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		6 dokumen	2,097,655,000
4.02.02.2.04.03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Klaten	10 dokumen	262,858,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		10 dokumen	264,108,000
4.02.02.2.04.05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	Kab. Klaten	7 Orang	299,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		7 Orang	299,000,000
4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase reses yang dilaksanakan	Kab. Klaten	100 %	**1,492,340,000**	APBD II		100 %	**2,854,460,000**

4.02.02.2.05.02			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	Kab. Klaten	3 Dokumen	30,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	30,000,000
4.02.02.2.05.03			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	Kab. Klaten	3 dokumen	1,462,340,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		3 Kali	2,824,460,000
4.02.02.2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	Kab. Klaten	100 %	**247,216,000**			100 %	**247,216,000**
4.02.02.2.06.01			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik DPRD tersusun	Kab. Klaten	0 Dokumen	-			0 Dokumen	-
4.02.02.2.06.02			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	Kab. Klaten	6 laporan	247,216,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		6 laporan	247,216,000
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya	Kab. Klaten	100 %	**2,507,140,076**			100 %	**3,127,631,000**
4.02.02.2.08.01			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Kab. Klaten	12 dokumen	250,000,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		25 dokumen	550,000,000
4.02.02.2.08.03			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Kab. Klaten	13 dokumen	947,906,000	Dana transfer umum- Dana Alokasi Umum		13 dokumen	947,906,000
4.02.02.2.08.04			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kab. Klaten	15 dokumen	1,309,234,076	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		40 Kali	1,629,725,000
						Jumlah	**55,256,584,000**				**60,538,390,000**

Klaten, Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD KABU. KLATEN

SIP ANWAR, SE.MSI.

NIP. 19640304 198812 1 001

Lampiran III

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Klaten

Nomor	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Kab. Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**39,437,032,869**	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**	Kab. Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**40,901,311,924**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	**26,250,000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 %	**20,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	26,250,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	20,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	**4,289,333,869**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	**4,300,583,869**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang	4,259,333,869	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang	4,259,333,869	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	30,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	41,250,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	100 %	**872,976,000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	**841,789,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah paket komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	12,935,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah paket komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	12,935,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	19,450,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7 paket	19,450,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	35,250,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	34,470,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	483 dokumen	134,982,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	483 dokumen	108,400,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	85 laporan	202,825,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	85 laporan	199,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	467,534,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	467,534,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	**150,000,000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	100 %	**500,000,000**	
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	-	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah paket mebel yang disediakan	111 Unit	250,000,000	

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	150,000,000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	16 Unit	250,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	**1,030,731,000**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100 %	**1,535,216,131**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	45,000,000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	45,000,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	331,145,000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	400,216,131	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	91,676,000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	220,000,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	562,910,000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	870,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %	**1,169,281,000**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 %	**1,102,428,000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39,500,000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	48,350,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	22 Unit	371,570,000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	22 Unit	362,828,000	
		Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah mebel yang dipelihara	40 Unit	51,250,000			Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten	Jumlah mebel yang dipelihara	40 Unit	51,250,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	386,372,000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	330,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 Unit	320,589,000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 Unit	310,000,000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Kab. Klaten	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	100 %	**30,661,394,000**		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Kab. Klaten	Persentase capaian Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD	100 %	**31,318,020,000**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Klaten	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	50 Orang	30,213,120,000			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Klaten	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	50 Orang	30,868,922,000	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Klaten	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	200 paket	394,098,000			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Klaten	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	200 paket	394,098,000	
		Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 Orang	54,176,000			Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Kab. Klaten	Jumlah Orang yang mengikuti medical check up DPRD	50 Orang	55,000,000	
	Layanan Administrasi DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD terlayani administrasinya	100 %	**1,237,067,000**		Layanan Administrasi DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD terlayani administrasinya	100 %	**1,283,274,924**	
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	12 laporan	81,854,000			Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	12 laporan	81,854,000	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	24 laporan	684,155,000			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	24 laporan	730,362,924	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Klaten	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12 paket	471,058,000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Klaten	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12 paket	471,058,000	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda**	**75 %**	**15,819,555,131**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda**	**75 %**	**14,355,272,076**	

			Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran**	**100 %**					Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran**	**100 %**		
			Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan**	**100 %**					Kab. Klaten	**Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan**	**100 %**		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Kab. Klaten	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	100 %	**2,904,744,131**		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Kab. Klaten	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	100 %	**2,904,744,000**	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	20 Dokumen	692,710,000			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	20 Dokumen	692,710,000	
		Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	8 dokumen	2,092,034,131			Pembahasan Rancangan Perda	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	8 dokumen	2,092,034,000	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	2 Dokumen	40,000,000			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	2 Dokumen	40,000,000	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	80,000,000			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen	80,000,000	
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Klaten	Jumlah tatib DPRD yang ditetapkan	0 Dokumen	-			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kab. Klaten	Jumlah tatib DPRD yang ditetapkan	0 Dokumen	-	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Kab. Klaten	Prosentase kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	**1,164,912,000.00**		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Kab. Klaten	Prosentase kebijakan Anggaran yang dibahas	100 %	**1,164,912,000.00**	
		Pembahasan APBD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	6 dokumen	1,164,912,000			Pembahasan APBD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	6 dokumen	1,164,912,000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Kab. Klaten	Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	100 %	**3,889,077,000**		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Kab. Klaten	Persentase OPD Penyelenggaraan Pemerintahan terawasi	100 %	**3,889,077,000**	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	14 laporan	1,072,356,000			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	14 laporan	1,072,356,000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 laporan	912,365,000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	12 laporan	912,365,000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pegawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12 laporan	926,346,000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pegawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	12 laporan	926,346,000	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 laporan	978,010,000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	12 laporan	978,010,000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	100 %	**2,659,513,000**		Peningkatan Kapasitas DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD yang diberikan peningkatan kapasitas	100 %	**2,149,843,000**	
		Orientasi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah peserta orientasi DPRD	0 Orang	-			Orientasi DPRD	Kab. Klaten	Jumlah peserta orientasi DPRD	0 Orang	-	
		Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	2,097,655,000			Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	6 dokumen	1,587,985,000	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	10 dokumen	262,858,000			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Klaten	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	10 dokumen	262,858,000	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Klaten	Jumlah tenaga ahli fraksi	7 Orang	299,000,000			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Klaten	Jumlah tenaga ahli fraksi	7 Orang	299,000,000	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Kab. Klaten	Persentase reses yang dilaksanakan	100 %	**1,492,340,000**		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Kab. Klaten	Persentase reses yang dilaksanakan	100 %	**1,492,340,000**	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	30,000,000			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	30,000,000	
		Pelaksanaan Reses	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1,462,340,000			Pelaksanaan Reses	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1,462,340,000	

	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Kab. Klaten	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	100 %	**247,216,000**		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Kab. Klaten	Persentase Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan	100 %	**247,216,000**	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Klaten	Jumlah kode etik DPRD tersusun	0 Dokumen	-			Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Klaten	Jumlah kode etik DPRD tersusun	0 Dokumen	-	
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	6 laporan	247,216,000			Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Klaten	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	6 laporan	247,216,000	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya	100 %	**3,461,753,000**		Fasilitasi Tugas DPRD		Kab. Klaten	Persentase DPRD terfasilitasi Tugasnya	100 %	**2,507,140,076**	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	350,000,000			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	250,000,000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	13 dokumen	1,129,667,000			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	13 dokumen	947,906,000	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	35 dokumen	1,982,086,000			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	15 dokumen	1,309,234,076	
						55,256,588,000							**55,256,584,000**	

Klaten, Juli 2022

PIt. SEKRETARIS DPRD KABU. KLATEN

SIP ANWAR, SE.MSI.

NIP. 19640304 198812 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RENCANA KERJA
BAPPEDALITBANG
TAHUN 2023

Jln. Pemuda No. 294 (Gedung Pemda II)

https://bappeda-litbang.klaten.go.id
bappedalitbang@klaten.go.id

Telp. 0272-321046 Psw. 314,318
Fax. 0272-328730

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya dapat disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan operasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2021 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun sebelumnya serta mendasari hasil analisis permasalahan dan isu strategis yang berkembang yang kemudian dirumuskan ke dalam program dan kegiatan yang mampu menangani permasalahan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdampak pada dukungan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan dimaksud meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi beserta pagu indikatif serta prakiraan maju tahun mendatang.

Kami menyadari dokumen ini tidak dapat tersusun tanpa adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak, untuk itu perlu adanya saran masukkan yang sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Dengan dokumen ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat sebagai pedoman meningkatkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Demikian rencana kerja ini kami buat, sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

Klaten, 18 Juli 2022
Plt. Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Klaten

PANDU WIRABANGSA, S.H., M.Eng.
Pembina
NIP 197508142006041005

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN I

1.1. Latar Belakang I–1

1.2. Landasan Hukum I–2

1.3. Maksud dan Tujuan I–8

1.4. Sistematika Penyusunan I–9

BAB II HASIL EVALUASI **RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU** II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II–1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II–32

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda II–35

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II–40

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat/ Pemangku Kepentingan II–61

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III–1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III–6

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV

BAB V PENUTUP V

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian V–1

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan V–1

5.3. Rencana Tindak Lanjut V–2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappeda s.d Tahun 2021	II–2
Tabel 2.2.	Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan	II–25
Tabel 2.3.	Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021	II–25
Tabel 2.4.	Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021	II–26
Tabel 2.5.	Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021	II–30
Tabel 2.6.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II–33
Tabel 2.7.	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022	II–41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja program dan kegiatan operasional tahunan yang merupakan penjabaran dan perwujudan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Dalam perumusannya, program dan kegiatan menitikberatkan pada pencapaian kinerja tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten. Rencana Kerja tahunan ini juga dirumuskan dalam rangka sinkronisasi pencapaian Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang mempunyai kedudukan strategis dalam menghubungkan perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, prinsip keterpaduan perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah sebagai perumusan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten untuk periode Tahun 2023 sebagai implementasi

pelaksanaan dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan serta menjadi tolok ukur penilaian kinerja.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2023, sebagai pedoman:

- ✓ Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi;
- ✓ Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
- ✓ Pedoman Penyusunan rencana anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah;

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini terdiri dari evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan tahun lalu dan capaian atas rencana strategis perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu stategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas fungsi perangkat daerah serta tujuan dan sasaran renja perangkat daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai target kinerja dan kerangka pendanaan rencana kerja perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan pencapaian Renstra Bappedalitbang Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2022, adalah sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bappedalitbang s.d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
4	**Urusan Penunjang**										
4.03	**Bidang Perencanaan**										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pelayanan administrai perkantoran**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	surat	1600	4.970	1.600	320	20	1.600	4.970	59,66
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	3	3	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	jenis	11	11	11	-	-	11	11	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	orang	10	10	10	10	100	10	10	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	orang	10	6	10	-	-	10	6	-
		Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang tersedia	Orang	3	0	3	-	-	3	0	-
	Penyediaan alat tulis kantor	jenis dan jumlah ATK yang tersedia	jenis	65	190	65	60	92	65	190	62,92
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia	jenis	65	65	65	-	-	65	65	-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	jenis	3	18	12	3	100	12	18	75
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia	jenis	15	41	11	15	100	11	41	47,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	21	48	21	0	0	21	48	38,10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar	jenis	8	18	4	6	75	4	18	37,50
	Penyediaan makanan dan minuman	Frekuensi rapat dan tamu	Jenis/buah	8.280	7.2707	1.380	307	22	1.380	7.207	87,04
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman yang tersedia	buah	-	1.477	2.086	-	-	2.086	1.477	-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinas keluar daerah	kali	390	260	65	25	38	65	350	89,74
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	kali	-	-	65	-	-	65	23	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	kali	100	136	100	30	30	100	266	266
	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	orang	3	3	3	3	150	3	3	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan baik**	**%**	**96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**312,5**
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	jenis	3	3	7	0	0	7	10	83,33
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor	paket	0	0	0	0	0	0	0	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang terbeli	jenis	-	-	3	-	-	3	3	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	1	1	0	0	1	1	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	34	34	34	34	100	34	34	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	unit	-	-	34	-	-	34	34	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	jenis	5	6	5	3	60	5	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	unit	-	-	1	-	-	1	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung kantor terpelihara	jenis	-	-	3	-	-	3	0	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara	jenis	3	3	3	0	0	3	3	100
	Pemeliharaan Mebel	Jenis Mebeleur yang dipelihara	jenis	-	-	3	-	-	3	0	-
	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang disediakan	jenis	0	0	-	0	0	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Mebeleur yang tersedia	jenis	-	-	1	-	-	1	1	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	Bulan	-	-	14	-	-	14	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam daerah	Kali	-	-	100	-	-	100	-	-
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	**▪ Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dgn PERDA**	**Ada/Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**	**Tidak Ada**		**Ada**	**Ada**	**Ada**
		▪ Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**	**Tidak Ada**	**Ada**	**Tidak Ada**		**Ada**	**Ada**	**100**
		▪ Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dgn PERKADA	**Ada/Tidak Ada**	**Ada**	**Ada**	**100**	**Ada**		**100**	**100**	**100**
		▪ Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	**%**	**100**	**95**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
			%	**100**	**98,8**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		▪ **Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD**									
	Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	100	1	100	100
	Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	6	4	1	1	100	1	100	100
	Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	6	4	1	1	100	1	100	100
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Jumlah dokumen KUA-PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	12	4	2	2	100	2	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP)	Jumlah dokumen KUPA-PPASP yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	12	8	2	2	100	2	100	100
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran yang tersusun	%	-	-	100	-	-	100	100	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	12	2	2	2	100	2	12	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	12	2	2	2	100	2	12	100
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Aparatur Perencana Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	-	-	100	-	-	100	0	-
		Peningkatan Kapasitas Perencana	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perubahan RKPD yang disususn dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	-	-	11	-	-	11	0	-
		Dokumen RKPD yang disususn dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	-	-	1	-	-	1	0	-
		Dokumen RPJMD yang disususn dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	-	-	-	1	-	-	0	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan	Kegiatan	7	6	1	1	100	1	8	114,28
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Frekuensi Kegiatan musrenbang RPJMD yang terlaksana	Kegiatan	-	-	1	1	-	1	1	-
		Frekuensi Kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan	Kegiatan		-	1	1	-	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov)	Jumlah kegiatan perencanaan daerah yang tersinkronisasi	Kegiatan	0	-	6	6	-	6	-	-
	Kegiatan Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Jumlah sistem Informasi perencanaan pembangunan yang diupdate	Sistem	6	4	1	1	100	1	6	100
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate	sitem aplikasi	-	-	1	-	-	1	0	-
	Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	336	125	100	125	100	100	350	104,17
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	▪ **Persentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi**	**%** **%**	**80** **Ada**	**70** **Ada**	**80** **Ada**	**75** **Ada**	**100** **Ada**	**80** **Ada**	**80** **Ada**	**100** **100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		▪ **Persentase ketersediaan data dan infomasi bidang ekonomi** ▪ **Persentase jumlah perusahaan yang berkonstribusi terhadap pembangunan daerah**	**%**	**28,57**	**15,3**	**27,92**	**15**	**54**	**28,57**	**28,57**	**100**
	Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen rencana bidang ekonomi Jumlah OPD yang dikoordinasikan	Dokumen OPD	6 7	6 28	6 7	3 7	150 100	6 7	6 7	100 100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang	Program	-	-	18	-	-	18	18	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang terkoordinasi ▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif yang terkoordinasi	Program	-	-	15	-	-	15	-	-
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian yang terasistensi ▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif yang terasistensi	Program Program	- -	- -	18 15	- -	- -	18 15	- -	- -
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi	Program	- -	-	18 15	- -	- -	18 15	- -	- -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif yang dimonitoring dan evaluasi			-						
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	▪ **Persentase konsistensi perencanaan bidang sosial budaya dengan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya** ▪ **Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya**	**%** **100**	**100** **100**	**90** **100**	**92** **100**	**92** **100**	**100** **100**	**92** **100**	**92** **100**	**100** **100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kali	258	162	0	60	109	48	210	81,39
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					48					
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Program RKPD/RPJMD Bidang Pemerintahan yang terkoordinasi	Program	-	-	35	-	-	35	-	-
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Program RKPD/RPJMD Bidang Pemerintahan yang terasistensi	Program	-	-	35	-	-	35	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Program RKPD/RPJMD Bidang Pemerintahan yang telah dimonitoring dan dievaluasi	Program	-	-	35	-	-	35	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	▪ Program RKPD/RPJMD Bidang Pembangunan Manusia yang terkoordinasi ▪ Program RKPD/RPJMD Bidang Kesejahteraan yang terkoordinasi	Program Program	- -	- -	21 23	- -	- -	21 23	- -	- -
	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	▪ Program RKPD/RPJMD Bidang Pembangunan Manusia yang terasistensi ▪ Program RKPD/RPJMD Bidang Kesejahteraan	Program Program	- -	- -	21 23	- -	- -	21 23	- -	- -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
		Masyarakat yang terasistensi									
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	▪ Program RKPD/RPJMD Bidang Pembangunan Manusia yang telah dimonitoring dan Dievaluasi ▪ Program RKPD/RPJMD BidangKesejahteraan Masyarakat yang telah dimonitoring dan dievaluasi	Program Program	- -	**-** **-**	23 **-**	**-** **-**	**-** **-**	23 21	**-** **-**	**-** **-**
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	▪ **Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah** ▪ **Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW**	**Ada** **Ada**	**Ada** **Ada**	**Ada** **Ada**	**Ada** **Ada**	**Ada** **Ada**	**Ada** **100**	**Ada** **100%**	**Ada** **100%**	**Ada** **100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik Dan Prasarana	▪ Jumlah Dokumen Rencana Bidang Fisik dan Prasarana ▪ Jumlah OPD yang dikoordinasikan	Dokumen OPD	18 7	14 7	3 7	3 7	100 100	3 7	17 7	94 100
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang SDA yang terkoordinasi	Program	-	-	1	-	-	1	-	-
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan yang terkoordinasi	Program	-	-	3	-	-	3	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan yang terkoordinasi ▪ Jumlah Program RKPD/RPJMD Bidang Lingkungan Hidup dan SDA yang terkoordinasi	Program Program	- -	- -	6 9	- -	- -	6 9	- -	- -
	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	**Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Kegiatan Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	dokumen	8	0	4	4	100	4	8	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Pelaporan pembangunan daerah	Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah	dokumen	12	6	2	4	100	2	12	100
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	-	-	100	-	-	100	-	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	dokumen	-	-	1	-	-	1	0	-
		Jumlah dokumen pelaporan triwulan	dokumen	-	-	4	-	-	4	1	-
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Capaian program/Kegiatan Perangkat Daerah	dokumen	-	-	2	-	-	2	0	-
		Dokumen Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	dokumen	-	-	1	-	-	1	0	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
4.07	**Bidang Penelitian dan Pengembangan**										
	Program penelitian dan pengembangan	▪ **Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova** ▪ **jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan daerah**	Peserta Jenis Inovasi	35 22	3 21	30 19	5 34	16,67 178,95	30 19	135 52	83,33 53
	Kegiatan Koordinasi penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah lembaga koordinasi, volume koordinasi forum litbang	kali	6	8	9	8	100	9	5	83
	Kegiatan Penelitian perspektif masyarakat terhadap kualitas pembangunan	Jumlah penelitian	dokumen	30	1	1	1	100	1	3	100
	Kegiatan Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah	Jumlah kegiatan kelitbangan	kegiatan	9	10	7	10	100	7	20	66,67
	Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah pengembangan SIDa	kegiatan	1	4	3	3	100	3	5	55,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen Penelitian	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pariwisata	Dokumen	-	-	1	-	-	1	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) /Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkhat Daerah s.d Tahun 2022	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9 = 8/7*	*10*	*11=(6+8+10)*	*12=(11/5)*
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kegiatan	-	-	2	-	-	2	-	-
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian Pengembangan Dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kegiatan	-	-	5	-	-	5	-	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Kegiatan	-	-	3	-	-	3	-	-

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas Bappedalitbang Kabupaten telah melakukan penilaian terhadap indikator program/kegiatan per urusan. Adapun penilaian (status) didasarkan pada tingkat capaian masing-masing indikator. Tingkat capaian indikator diperoleh dari persentase kondisi capaian indikator terhadap target Tahun 2021. Adapun kriteria status dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan

No	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1	Tercapai	Apabila persentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target sebesar X ≥90 %
2	Tidak Tercapai	Apabila persentase realisasi/capaian indikator dibandingkan dengan target sebesar X < 90 %

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021 dan perkiraan capaian hasil Tahun 2022. Pada Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten melaksanakan sebanyak 4 program, 16 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Dari sejumlah program/kegiatan tersebut, berdasarkan evaluasi Renja Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2021 teridentifikasi sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Tabel 2.3
Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	Unit	1	0	0

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

Tabel 2.4
Realisasi Program dan Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	Bulan	14	14	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam daerah	Kali	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jenis	11	11	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang tersedia	Jenis	65	65	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis	21	21	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jenis	12	12	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	4	4	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman yang tersedia	Buah	2.086	2.033	97,5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	Kali	65	65	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Mebel	Mebeleur yang tersedia	Jenis	1	1	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang terbeli	Jenis	3	3	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat terkirim	Surat	1.600	1.600	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang terbayar	Rekening	2	2	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Orang	3	3	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit	24	24	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung kantor terpelihara	Jenis	3	31	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Aparatur Perencana Yang Mengikuti PeningkatanKapasitas SDM	Orang	45	45	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Frekuensi Kegiatan musrenbang RPJMD yang terlaksana	Kegiatan	1	1	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD dan RPJMD yang disususn dan ditetapkan tepat waktu	Dokumen	3	3	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Sistem Aplikasi	1	1	100
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan triwulan	Dokumen	4	4	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Capaian program/Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan Yang Terkoordinasi	Program	35	35	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan Yang Terasistensi	Program	35	35	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pemerintahan Yang Telah Dimonitoring Dan Dievaluasi	Program	35	35	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pembangunan Manusia Yang Terkoordinasi	Program	21	21	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pembangunan Manusia Yang Terasistensi	Program	21	21	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Pembangunan Manusia Yang Telah Dimonitoring dan Dievaluasi	Program	23	23	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian Yang Terkoordinasi	Program	18	18	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian Yang Terasistensi	Program	18	18	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian Yang Dimonitoring Dan Dievaluasi	Program	18	18	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang SDA Yang Terkoordinasi	Program	1	1	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur Yang Terkoordinasi	Program	3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Program Rkpd/Rpjmd Bidang Kewilayahan Yang Terkoordinasi	Program	6	6	100
URUSAN KEUANGAN					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUPA dan PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu	Dokumen	2	2	100
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen Penelitian yang tersusun	Dokumen	1	1	100
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen data kelitbangan yang tersusun	Dokumen	1	1	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pariwisata yang tersusun	Dokumen	1	1	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang terlaksana	Kegiatan	2	2	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kegiatan Penelitian Pengembangan Dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kegiatan	5	5	100

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Tabel 2.5
Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2021

Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Satuan	Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
NIHIL				

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Berikut beberapa faktor penyebab pada program/kegiatan yang tidak tercapai antara lain:

a. Tidak terealisasinya renovasi Gedung Kantor Bappedalitbang lama yang tidak sesuai dengan perencanaan, karena gedung tersebut masih dipergunakan untuk Layanan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil, seperti Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan jasa dan lain sebagainya.
b. Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan.
c. Terpenuhinya kebutuhan anggaran pada anggaran 2021 sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan memenuhi target.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap pencapaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Klaten pada umumnya.
b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra akan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten, namun tidak berpengaruh terhadap tercapaianya output kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan khusus pelaksanaan kegiatan rutin hanya menjadi pendukung pencapaian output.

c. Terhadap program yang realisasinya melebihi target sesuai Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten merupakan bentuk prestasi kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten yang berdampak pada pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

2.1.6. Kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

a. perlu adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
b. Perlu juga adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam memahami aturan-aturan yang baru pada saat pelaksanaan program/kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan atau kerjasama kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Klaten didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
I	**Tujuan**											
	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah			22,50	23,00	24,00	25,00	20,96	NA	24,00	25,00	
I.1	**Sasaran**											
	Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Status kinerja pembangunan daerah			76	77	78	79	76	NA	78	79	
a.	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**											
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
b.	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**											
	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD			76	77	78	79			78	79	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
c.	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**											
	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan			100	100	100	100	100		100	100	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			100	100	100	100	100		100	100	
II	**Tujuan**											
	Indeks Inovasi Daerah			1.960	2.001	2.051	2.101	1.960	NA	2.051	2.101	
II.1	**Sasaran**											
	Persentase Inovasi yang Diterapkan			87	88	89	90	87	NA	89	90	
a.	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**											
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbanga			63	54,8	59,4	64	63	NA	59,4	64	
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah			13,34	14,68	15	15,5	13,34	NA	15	15,5	

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDALITBANGLITBANG

Isu-isu penting merupakan kajian atas permasalahan strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam upaya untuk menentukan kebijakan perumusan program dan kegiatan. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Klaten tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappedalitbang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain **Tata Kelola Pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah.**

2.3.1. Sejauh mana tingkat pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Klaten terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan terutama pada Dokumen Renja Tahun 2021 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui meskipun ada beberapa target indikator yang belum tercapai.

Bappedalitbang Kabupaten Klaten merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan 2 (dua) bidang urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Bappedalitbang Kabupaten Klaten terus pengupayakan peningkatan usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD dan selalu berusaha memenuhi ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang untuk mengakomodir pengarusutamaan gender, keterlibatan difabilitas, perguruan tinggi, beberapa stakeholders dan organisasi/lembaga masyarakat lainnya serta menghadirkan delegasi/peserta yang ditugaskan mengikuti Musrenbang RKPD berdasarkah hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dan kesepakatan Forum SKPD.

2.3.2. Permasalahan yang dihadapi

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

a. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta

pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar pentahapan dokumen, mulai tahap Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan sampai pada penetapan dokumen perencanaan sehingga tidak optimalnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

b. Tidak semua informasi alokasi dana Non APBD turun di awal tahun anggaran (Bantuan Keuangan, DBHCHT, Tugas Pembantuan), sehingga harus dilaksanakan perubahan pada dokumen tahun berjalan.

c. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

2.3.3. Dampak dari permasalahan yang dihadapi terhadap pencapain visi dan misi

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

a. Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan antar tahapan dokumen.
   Untuk mencapai konsistensi perencanaan antar tahapan dokumen diperlukan koordinasi, pendampingan serta bimbingan teknis dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh OPD.

b. Identifikasi Dana Non APBD.
   Diperlukan peningkatan koordinasi dalam mengidentifikasi dana Non APBD dengan OPD penerima sehingga diperoleh informasi lebih awal terkait dengan pengendalian dan pelaporannya.

c. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi.

   Diperlukan kesamaan pemahaman OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang untuk menggambarkan kondisi existing sebagai dasar menentukan permasalahan dan isu strategis sampai pada perumusan kebijakan.

d. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah.

   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappedalitbang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

e. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

f. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

Peluang:

a. Semakin strategisnya peran Bappedalitbang sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan harus berkualitas dikarenakan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

b. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat

pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

d. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan atau diklat penyusunan dokumen perencanaan terutama bagi fungsional perencana agar dapat menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berperan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah.

e. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.3.5. Formulasi isu penting (rekomendasi dan catatan strategis)

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Klaten dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Klaten sebagai berikut::

1. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Peningkatan konsistensi dan konsolidasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat maupun provinsi sejalan dengan perkembangan regulasi peraturan perundang-undangan lintas sektoral yang berpengaruh terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

2. Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi

Penyediaan data-data teknis maupun data statistik sebagai dasar perumusan prioritas dan kebijakan program pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan agar perencanaan pembangunan tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.

3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang
4. Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam Musrenbang.
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegratif.
6. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis holistik, integratif, tematik dan spasial.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2022 serta memperhatikan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan, program kegiatan, indikator, target kinerja serta pagu indikatif jangka menengah, maka analisa kebutuhan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**6.155.521.000**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**5.483.383.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**Dokumen**	**3**		**115.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**	**Dokumen**	**3**		**136.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2		50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2		26.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1		25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1		10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4		40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4		100.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**		**5.216.328.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**		**4.476.876.679**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33		5.156.328.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33		4.465.546.679
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40		10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40		9.010.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40		50.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40		2.320.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**		**257.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100**		**300.801.321**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9		10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	9		10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25		25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25		25.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10		10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10		10.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4		15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4		15.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	5		7.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	5		7.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	240		40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	240		44.911.321
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50		150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50		188.890.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**		**38.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**		**58.105.000**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1		28.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1		1.250.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5		10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5		56.855.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**213.763.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**201.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	350		10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	350		10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Laporan	12		118.177.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Laporan	12		142.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Unit	34		85.586.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Unit	34		49.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**315.430.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**310.600.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	34		230.390.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	34		230.390.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20		10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20		20.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	unit	1		50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	unit	1		34.570.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	25		25.040.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	25		25.040.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**2.197.807.000**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**1.221.822.000**
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	**%**	**78**				**Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD**	**%**	**78**		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran**	**%**	**100**		**1.587.807.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran**	**%**	**100**		**866.822.000**
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD	dokumen	2		75.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD	dokumen	2		50.000.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	2		100.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	2		50.000.000
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita acara	1		100.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita acara	1		91.684.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Beita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3		131.190.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Beita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3		75.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1		250.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1		100.000.000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1		100.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1		15.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD)	dokumen	2		831.617.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RKPD)	dokumen	2		485.138.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersedianya analisis data dan informasi pemerintah daerah**	**%**	**100**		**300.000.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersedianya analisis data dan informasi pemerintah daerah**	**%**	**100**		**30.000.000**
Analisis Data dan Informasi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk	masukan	10		300.000.000	Analisis Data dan Informasi	Jumlah Masukan Analisis Data untuk	masukan	10		30.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah					Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**	Laporan	**7**		**310.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**	Laporan	**7**		**325.000.000**
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	3		210.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	3		210.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan	4		100.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	laporan	4		115.000.000
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**1.552.067.000**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan**	**%**	**100**	**Kab. Klaten**	**1.000.000.000**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
	Infrastruktur dan Kewilayahan										
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	**100**				**Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	%	**100**		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**%**	**100**		**465.350.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**%**	**100**		**300.000.000**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		65.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan dalam Asistensi Penyusunan	Perangkat Daerah	7		50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan dalam Asistensi Penyusunan	Perangkat Daerah	7		20.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja Bidang Perekonomian					Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Renstra/Renja Bidang Perekonomian				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7		40.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7		15.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1		100.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1		100.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	dokumen	1		100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1		55.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	1		25.350.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	1		20.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	1		25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	1		15.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1		25.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1		10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**100**		**450.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**%**	**100**		**400.000.000**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1		75.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	1		50.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat daerah	22		40.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat daerah	22		50.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	22		25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan	22		25.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1		50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1		50.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		50.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4		50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4		50.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
						Pembangunan Manusia					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Penstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4		25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Penstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4		25.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1		85.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	1		100.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**%**	**100**		**636.717.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**%**	**100**		**300.000.000**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		65.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	Perangkat Daerah	5		50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	Perangkat Daerah	5		20.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	Perangkat Daerah	5		25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang infrastruktur	Perangkat Daerah	5		15.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktu	Laporan	1		50.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktu	Laporan	1		10.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		150.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	umlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1		55.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		50.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		20.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		25.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2		15.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	1		186.717.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	1		100.000.000
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	%	**59,40**	**Kab. Klaten**	**909.219.000**	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**	%	**59,40**	**Kab. Klaten**	**755.000.000**
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	**%**	**15,00**				**Pertumbuhan inovasi perangkat daerah**	**%**	**15,00**		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**3**		**220.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Dokumen**	**3**		**130.000.000**
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan	1		120.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1		60.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
	Bidang Pemerintahan Umum										
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	laporan	1		40.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	laporan	1		38.000.000
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	laporan	1		60.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	laporan	1		32.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**3**		**290.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Dokumen**	**3**		**355.000.000**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1		90.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1		40.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1		150.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1		275.000.000
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1		50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1		40.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**2**		**225.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Dokumen**	**2**		**140.000.000**
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1		175.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1		100.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1		50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1		40.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Terlaksannya Pengembangan**	**Dokumen**	**3**		**174.219.0000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Terlaksannya Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Dokumen**	**3**		**130.000.000**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)**	**Satuan**	**Target**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5)***	***(6)***	***(7)***	***(8)***	***(9)***	***(10)***	***(11)***	***(12)***
	Inovasi dan Teknologi										
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1		102.219.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1		80.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	laporan	1		40.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	laporan	1		30.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	umlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan IntelektualIntelektual yang terfasilitasi	laporan	1		32.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	umlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan IntelektualIntelektual yang terfasilitasi	laporan	1		20.000.000
					10.814.614.000						**8.460.205.000**

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT/PEMANGKU KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan masyarakat/pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan bottom-up secara demokratis baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pengumpulan informasi, penelitian dan pengamatan pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja perangkat daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada perangkat daerah juga bisa diperoleh dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan pada saat Musrenbang Kabupaten. Untuk Bappedalitbang Kabupaten Klaten tidak ada usulan.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dan juga dilakukan sinkronisasi terhadap kebijakan nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Skala prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, merupakan implementasi tahap ke-4 dari RPJPN 2005-2025 yaitu "Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Dengan prioritas tersebut, maka tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 ditetapkan dalam rangka "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sebagaimana penjabaran RPJMN 2020-2024 dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional serta mendasarkan pada 5 (lima) arahan Presiden, yaitu (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi, maka arah kebijakan nasional diarahkan pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Difokuskan pada peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dipacu untuk lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
    a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta kehutanan; dan

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Diarahkan pada pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui :
   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
   c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keuanggulan wilayah;
   d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
   e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta keytahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM dengan dukungan manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui :
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental yang diartikan sebagai gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, dilaksanakan secara terpadu melalui :

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
c. Moderasi beragama; dan
d. Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui :
   a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
   b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
   d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
   e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Pembangunan nasional harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim yang diarahkan melalui :
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
   c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Perkuatan stabilitas diartikan bahwa negara wajib hadir dalam melayanan dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara yang diarahkan melalui :
   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
   c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Mendasari pada arah kebijakan dan agenda pembangunan nasional yang terkait dengan tugas fungsi Bappedalitbang, yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, maka dukungan Bappedalitbang Kabupaten Klaten dalam pencapaian arah kebijakan nasional adalah melakukan sinkronisai, sinergitas, konsolidasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menjamin konsistensi perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.1
Hasil Telaahan antara Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jateng	Kebijakan Daerah	Program dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja 2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Diprioritaskan pada pelayanan dan perlindungan segenap bangsa, menegakkan kedaulatan negara serta reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas	**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah** Diprioritaskan pada pemantapan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif dan inovatif	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi** Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai berikut:

- Tujuan I : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah
  - Indikator Tujuan : Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah
  - Target Tujuan : 24,00
  - Sasaran : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - Indikator Sasaran :
    - ✓ Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah
      Target kinerja sasaran: 100%
    - ✓ Status kinerja pembangunan daerah
      Target kinerja sasaran: 78%

- Tujuan II : Terwujudnya pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah secara berkelanjutan
  - Indikator Tujuan : Indeks Inovasi Daerah
  - Target Tujuan : 2.051
  - Sasaran : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah
  - Indikator sasaran :
    - ✓ Persentasi inovasi yang diterapkan
      Target kinerja sasaran: 89%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 merupakan jabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja yang disertai pagu indikatif dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 serta pencapaian tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Memperhatikan arah kebijakan nasional tahun 2023 serta prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka fungsi pengkoordinasian, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah menjadi tugas penting Bappedalitbang. Di sisi lain, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah menjadi tugas pokok yang sangat berperan mendukung pencapaian pembangunan daerah. Peran sinkronisasi, konsolidasi, sinergitas dan harmonisasi dokumen-dokumen perencanaan yang ada menjadi poin mendasar sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan yang dapat diukur dengan keselarasan antar level dokumen, baik dokumen perencanaan daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional dalam upaya menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum pada Halaman ***Lampiran.***

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan mempedomani sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, Renja Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 lebih bersifat operasional sebagai pedoman pelaksanaan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pedoman pengukuran kinerja yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Bappedalitbang Kabupaten Klaten antara lain bahwa perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappedalitbang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Penyusunan Renja Bappedalitbang ini berpedoman pada Renstra Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja yang bersifat strategis dan dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu mengatur kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh ASN Bappedalitbang Kabupaten Klaten secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
    a. Mempedomani dan melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan tanggungjawab dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan antara RPJMD, RKPD, Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen lainnya;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaanya agar dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja dimaksud.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusun dan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka dokumen tersebut dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada KUA-PPAS sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Klaten, 18 Juli 2022
Plt. Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDALITBANG KLATEN

PANDU WIRABANGSA, S.H., M.Eng.
Pembina
NIP 197508142006041005

LAMPIRAN

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**7,705,205,000**					**9,403,827,000**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,483,383,000**					**6,246,983,000**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**136,000,000**					**115,000,000**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 Dokumen	3 Dokumen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	50,000,000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	25,000,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	4 Laporan	3 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	40,000,000
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,476,876,679**					**5,216,328,000**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	33 orang/bulan	100 %	4,465,546,679	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5,156,328,000
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	40 Dokumen	100 %	9,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,000,000
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	40 Dokumen	100 %	2,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	50,000,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**300,801,321**					**362,000,000**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	9 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	25 Paket	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	25,000,000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	10 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,000,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	4 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	15,000,000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	5 Dokumen	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	7,000,000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	240 Laporan	100 %	44,911,321	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	40,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umu perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	50 Laporan	100 %	188,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	250,000,000
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**58,105,000**					**78,000,000**
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 Unit	100 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	28,000,000
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	5 unit	100 %	56,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	50,000,000
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**201,000,000**					**160,225,000**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	350 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	12 Laporan	100 %	142,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	64,639,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	3 Laporan	100 %	49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	85,586,000
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**310,600,000**					**315,430,000**
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	34 Unit	100 %	230,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	230,390,000
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	20 Unit	100 %	20,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,000,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 Unit	100 %	34,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	50,000,000
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	25 Unit	100 %	25,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	25,040,000
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,221,822,000**					**1,610,128,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**866,822,000**					**985,128,000**
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	50,000,000
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	91,684,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	125,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	3 Berita Acara	2 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	75,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	1 Berita Acara	2 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	100,000,000
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	1 usulan	2 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	485,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	535,128,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**30,000,000**					**300,000,000**
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tersedianya analisas data dan informasi pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	10 Masukan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	300,000,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**325,000,000**					**325,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya laporan pengendalian dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	3 Laporan	7 Laporan	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	210,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluas Kinerja Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan pengendalian dan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 78.00 %	4 Laporan	7 Laporan	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konsisten penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	100 % 78.00 %	115,000,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,000,000,000**					**1,546,716,000**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**400,000,000**					**450,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	75,000,000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	22 Perangkat Daerah	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	40,000,000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	22 Laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	25,000,000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	1 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	100,000,000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	4 Perangkat Daerah	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	50,000,000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	4 Perangkat Daerah	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	25,000,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 % 100.00 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 % 100.00 %	85,000,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**300,000,000**					**465,350,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	100,000,000
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	7 Perangkat daerah	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	50,000,000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	7 Perangkat daerah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	40,000,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	100,000,000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Perangkat daerah	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	25,350,000
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Perangkat Daerah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	25,000,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	25,000,000
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**300,000,000**					**631,366,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	100,000,000
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	5 Perangkat Daerah	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	50,000,000
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	5 Perangkat Daerah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	25,000,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Dokumen	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	150,000,000
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	2 Perangkat Daerah	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	50,000,000
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	2 Perangkat Daerah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	25,000,000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 % 100 %	1 Laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 %	181,366,000
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**755,000,000**					**905,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**755,000,000**					**905,000,000**
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**130,000,000**					**220,000,000**
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	120,000,000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	40,000,000
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	60,000,000
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**355,000,000**					**250,000,000**
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	50,000,000
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	3 Dokumen	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	150,000,000
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	3 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	50,000,000
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**140,000,000**					**250,000,000**
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	50,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**130,000,000**					**185,000,000**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksannya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Dokumen	3 Dokumen	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	110,000,000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksannya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	50,000,000
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksannya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	59.40 % 15.00 %	1 Laporan	3 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	59.40 % 15.00 %	25,000,000
												TOTAL	**8,460,205,000**					**10,308,827,000**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (BAPPEDALITBANG)

Jln. Pemuda No. 294 (Gedung Pemda II)

https://bappeda-litbang.klaten.go.id
bappedalitbang@klaten.go.id

Telp. 0272-321046 Psw. 314,318
Fax. 0272-328730

TAHUN 2023

RENCANA KERJA
(RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2023

mswordcoverpages.com

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat disusun.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mempunyai acuan dan pedoman umum tentang arah pembangunan ke depan selama 1 (satu) tahun. Arah atau pedoman tersebut masih dirinci dan dijabarkan ke dalam setiap kegiatan dan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Juli 2023

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLATEN

SLAMET, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19690621 199103 1 006

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 7

1.4. Sistematika 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2021..... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM tahun 2021 dan Capaian Renstra BKPSDM..... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BKPSDM 26

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja (Renja)..... 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLATEN.... 40

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencan Kerja BKPSDM 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB V PENUTUP 54

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Menadapat Perhatian 54

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 54

5.3. Rencana Tindak Lanjut 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;

   Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai pasal 125 Permendagri 86 tahun 2017meliputi tahapan sebagai berikut :

   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;

   b. Orientasi mengenai Renja SKPD;

   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan

   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
   Sesuai pasal 128 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mencakup hal-hal sebagai berikut :

   a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
   Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah;
   Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah sesuai pasal 136 ayat (3) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem

perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi .

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD, juga untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Penetapan Renja Perangkat meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi;

b. Jika ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan dari hasil verifikasi perangkat daerah melakukan penyempurnaan sesuai hasil verifikasi.

c. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi;

d. Verifikasi memastikan rancangan Renja Perangkat daerah telah sesuai dengan RKPD Kabupaten;

e. Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat yang telah sesuai dengan RKPD Kabupatern kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Bagan alur penyusunan Renja SKPD mengacu sebagai berikut sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

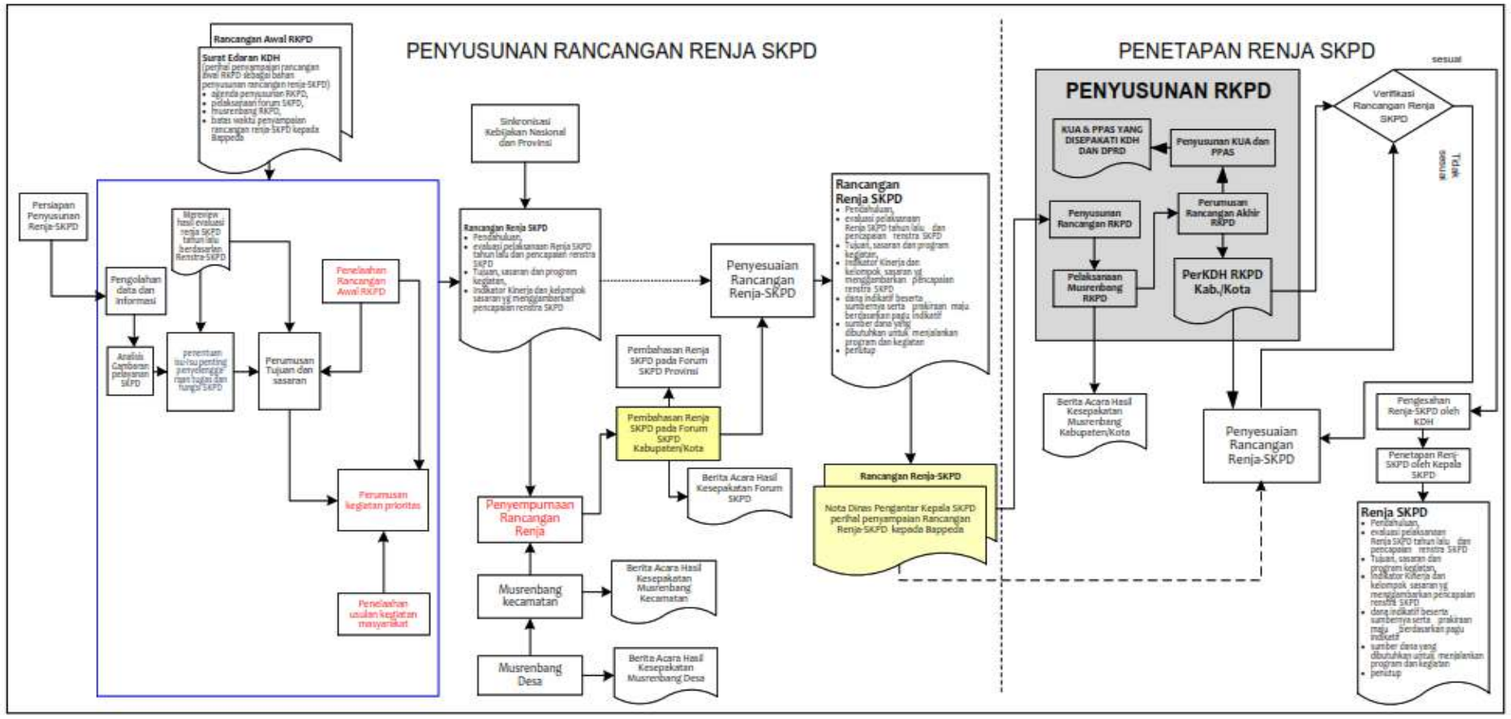

1.2 LANDASAN HUKUM RENJA

Landasan hukum utama yang mengatur tentang Renja Perangkat Daerah , yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
52. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Klaten.

2. Tujuan

   Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah menjabarkan arah Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM serta mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan perencanaan BKPSDM Kabupaten Klaten.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM;

2.4. Review terhadap Rencana Kerja (Renja)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2.Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah;

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN 2021

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023) secara lebih rinci disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Sub Kegiatan yang tidak tercapai targetnya adalah sebagai berikut :
   a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN capaian kurang dari 66% , rendahnya capaian kinerja dikarenakan rendahnya persentase peserta yang ikut ujian dinas kenaikan pangkat maupun ujian dinas penyesuaian ijazah disebabkan dari peserta yang direncanakan mengikuti 2 kegiatan tersebut tidak dapat teralisasi semua dikarenakan hanya sedikit PNS yang mengajukan ujian.
   b. Pengelolaan Assessment Center capaian kurang dari 66% , rendahnya capaian kinerja dikarenakan rendahnya minat PNS untuk mengikuti uji kompetensi jabatan.
   c. Pengelolaan Mutasi ASN capaian dari target indikator kinerja jika dirata-rata hanya tercapai 77,31% dikarenakan ASN yang ditempatkan tidak dapat terealisasi karena terbatasnya jumlah ASN yang akan dimutasi untuk pemenuhan kebutuhan organisasi.
   d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sub kegiatan ini walau dari serapan anggaran jauh dari yang diharapkan namun target realisasi kinerja kurang dari 100 % karena hanya bersifat penyediaan.

e. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN kurang dari 100% dikarenakan ajuan ijin belajar, tugas belajar, ijin gelar dan iji penggunaan gelar bersifat menunggu dari PNS.

2. Realisasi Sub Kegiatan yang tercapai Targetnya adalah sebagai berikut

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hal ini dapat tercapai dikarenakan pagu anggarannya untuk kebutuhan gaji ASN maka target kinerjanya harus dipastikan tercapai 100%.

   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dapat terlaksana 100% dikarenakan semua kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dapat dilaksanakan.

   c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat terlaksana 100% dikarenakan mulai perencanaan dan pelaksanaan tidak ada kendala.

   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dapat terlaksana 100% dikarenakan mulai perencanaan dan pelaksanaan tidak ada kendala.

   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dapat terlaksana 100% dikarenakan sub kegiatan tersebut bersifat penyediaan jadi tergantung dengan kebutuhan real dan kebetulan di tahun 2021 pelaksanaan sub kegiatan mendekati perencanaan.

   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dapat terlaksana 100% dikarenakan sub kegiatan tersebut bersifat penyediaan jadi tergantung dengan kebutuhan real dan kebetulan di tahun 2021

pelaksanaan sub kegiatan mendekati perencanaan.

g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan dapat terlaksana 100% dikarenakan kendaraan dinas yang direncanakan mendapatkan pemeliharaan dapat terealisasi sesuai rencana..

h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya dapat terlaksana 100% dikarenakan sarana dan prasarana yang direncanakan mendapatkan pemeliharaan dapat terealisasi sesuai rencana.

i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian capaian kinerja mencapai 100% karena semua tahapan sejak perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi dapat terlaksana dengan baik

j. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional dapat tercapai 100% karena pejabat fungsional yang mengajukan fasilitasi dapat di fasilitasi semua

k. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur capaian kinerja mencapai 100% karena semua tahapan sejak perencanaan, pelaksnaan dan evaluasi dapat terlaksana dengan baik

l. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dapat tercapai 100% karena tidak adanya kasus yang membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang

3. Realisasi Sub Kegiatan yang melebihi target adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan capaian lebih dari 100% dikarenakan adanya

penyelesaian ASN PPPK dari formasi tenaga honore yang pada 2021 diselesaiakan tahap I sebanyak 1400 calon PPPK.

b. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN capaian kinerja mencapai 100% dengan anggaran Rp. 0,00 dapat terlaksana karena informasi dan pendampingan LHKPN bisa dilaksanakan secara bergiliran jadi tidak memerlukan anggaran makan minum.

c. Pengelolaan Data Kepegawaian capaian kinerja melebihi 100% karena file arsip kepegawaian yang masuk dikelola lebih banyak dari yang direncanakan, data PNS yang dimutakhirkan melebihi data pemutakhiran yang direncanakan dan usulan dokumen kepegawaian di tahun 2021 yang telah terbit melebihi target yang direncanakan.

d. Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan satya lancana realisasi kinerja lebih dari 100% dikarenakan sebagaian besar satya lancana yang turun merupakan usulan tahun tahun sebelumnya sehingga target yang direncanakan bertambah.

e. Evaluasi Disiplin ASN capaian dapat melebihi 100% karena optimalisasi pelaksanaan sub kegiatan sehingga dapat menambah OPD yang di monitoring.

f. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan secara keseluruhan jika dirata-rata dari target indikator yang direncanakan lebih dari 100% dengan catatan sebagai berikut untuk PNSD yang mengikuti diklat lebih dari target karena adanya optimalisasi panambahan peserta latsar dari 80 menjadi 160, untuk diklat fugnsional yang

semula direncanakan tidak dilakukan pengiriman karena COVID 19 ternyata ada penawaran untuk kegiatan tersebut tanpa kontribusi, untuk diklat teknis ada optimalisasi pelaksanaan dengan mengalihkan tempat yang rencana di luar Klaten dan dapat dilaksanakan di Klaten dengan system daring.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program/kegiatan/Sub disebabkan beberpa hal, antara lain disebabkan oleh kondisi nasional maupun internasional karena pandemi Covid 19, secara lebih rinci sudah disampaikan pada angka 1(satu),2 (dua) dan 3(tiga) bab ini.
5. Implikasi yang yang akan terjadi dari target kinerja baik itu program maupun kegiatan adalah tidak tercapaianya target sasaran yang direncanakan, juga berdampak pada kinerja OPD karena beberapa target kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ASN tidak dapat terpenuhi.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah dengan melakukan perencanaan dan penganggaran lebih cermat serta melakukan inovasi inovasi jika ada keterbatasan anggaran.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pencapaian perencanaan Strategis (renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*) /Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03					KEPEGAWAIAN									
5	03	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	95%	100%	100%	100%	100	100	100%
5	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrsi Perkantoran	100%		90%	100%	111%	100	100	100%
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	41 orang	100%	12	12	100%	41	41	100%

5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya	12 bulan	200	111	111	100%	12	12	100%
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrsi Perkantoran	100%		90%	100%	111%	100	100	100%
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang dikelola	60 unit	71	62	62	100%	59	59	100%
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Barang Cetakan dan Penggandaan Yang dikelola	6 eksemplar	10	5	5	100%	6	6	100%
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	makanan dan minuman yang disediakan	1226 kali	1500	1226	1226	100%	1226	1226	100%
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	222 kali	130	222	222	100%	222	222	100%
5	03	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrsi Perkantoran	100%		90%	0		100	100	100%
5	03	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 unit	2	-	0		7	7	100%

						Kantor atau Bangunan Lainnya									
							peralatan gedung kantor yang diadaka		29						
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrsi Perkantoran	100%		90%	99%	110%	100	100	100%
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	8350 eksemplar	8350	8350	8345	99%	8350	8350	100%
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrsi Perkantoran	85%		90%	100%	111%	90	90	100%
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit		19	19	100%	19	19	100%
5	03	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	95 unit	17	17	17	100%	95	95	100%
							Jumlah peralatan gedung kantor yang		97	80	80				

							dipelihara								
5	03	02				KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan Sumber Daya Aparatur	80%	100%	96%	95,11%		80	80	100%
							Persentase informasi kepegawaian yang akurat	90%	54%	100%	101,2%		90	90	100%
							Persentase pengembangan aparatur	80%	70%	100%	90,93%		90	90	100%
							Persentase Pembinaan disiplin ASN	75%	100%	100%	103,03%		75	75	100%
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan Sumbr Daya Aparatur	80%		96			80	80	100%
							Persentase informasi kepegawaian yang akurat	100%		90			100	100	100%
								94%					94	94	100%
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah calon ASN yang terisi	1000 ASN	0	1000	1400	140%	1000	1000	100%
							Jumlah dokumen formasi kepegawaian tersusun		0	1	1	100%			

5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PNS yang pensiun	682 ASN	841	848	857	101,06%	773	773	100%
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PNS yang melaporkan harta kekayaan	1 lembaga	282	268	268	100%	1	1	100%
5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dikembangkan	3 aplikasi	1	3	3	100%	3	3	100%
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah File Arsip yang dikelola	9000 data	500	10.500	10.500		9000	9000	100%
							Jumlah data PNS yang dimutakhirkan		5500	9.300	9634	103,59%			
							Jumlah dokumen kepegawaian yang diterbitkan		260	260	388	149,23%			
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan Sumbr Daya Aparatur	75%		96			75	75	100%
								95%		2000			95	95	100%
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	ASN yang ditempatkan (mutasi)	500 ASN	50	96	1032	52%	500	500	100%
							Pegawai Yang Dikelola		0	2500	96	100%			
							SK pengangkatan CPNSke PNS,		2200	50	1.998	79,92%			

							penjaringan gaji,Jumlah SK sumpah janji, dan kenaikan gaji berkala								
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat	1300 SK		100	16	32%	1300	1300	100%
							Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah			1375	48	48%			
							Jumlah SK Kenaikan Pangkat		1300		1226	89,16%			
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan aparatur	80%		100%			80	80	100%
								100%					100	100	100%
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi jabatan	300 ASN	125	350	128	37%	300	300	100%
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang menyelesaikan tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	200 ASN	280	270	244	90,37%	200	200	100%

5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen laporan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	300 Pejabat Fungsional	1	1	1	100%	300	300	100%
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan disiplin ASN	90%		98			90	90	100%
								80%					90	90	100%
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang di evaluasi	9000 ASN	5	52	52	100%	9000	9000	100%
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapatkan Penghargaan satya lancana	75 ASN	20	40	50	125%	75	75	100%
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Kasus yang ditangani	7 kasus	10	20	20	100%	7	7	100%
5	03	02	2	04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		5 kasus					5	5	100%
5	03	02	2	04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah OPD yang di monitoring dan sidak yang dilaksanakan	55 OPD	55	55	60	109,09%	55	55	100%
5	04	02				PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase ASN yang mengikuti	80%	11,26%	100%	155,86		80	80	100%

						MANUSIA	diklat								
5	04	02	2	01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	80%		0			80	80	100%
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis	285 ASN	0	0	0		220	220	100%
							Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan		0	0	0				
5	04	02	2	02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	80%		50			86	86	100%
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan	890 CASN dan ASN	41	80	160	200%	1100	1100	100%

						Prajabatan									
							Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional		0	0	42				
							Jumlah Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim		0	0	0	-			
							Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis		20	74	198	267,57%			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten membantu Fungsi Badan Kepegawaian Negara di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten berupaya Meningkatkan manajemen ASN Kabupaten Klaten. Hal merupakan prioritas BKPSDM Kabupaten Klaten yang tercantum dalam Sasaran Strategis Renstra BKPSDM Kabupaten Klaten. Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten yaitu : Meningkatnya Kompetensi ASN, dimana capaian hasil pengukuran indikator kinerja sasarannya sebesar 78,06.

Dengan pengukuran indek profesionalitas ASN tujuan yang hendak dicapai akan diketahui jumlah dan tingkat profesionalisme pegawai ASN dilihat dari aspek kompetensi, kinerja, kualifikasi , serta tingkat disiplin. Hal ini akan menggambarkan manfaat baik bagi pemerintah sebagai pemberi kerja dan bagi pegawai ASN sebagai pekerja. Pemerintah akan mendapatkan data tentang berapa jumlah dan tingkat profesionalime ASN baik dari sisi kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin untuk evaluasi guna melakukan perbaikan. Sedangkan bagi pegawai ASN dapat digunakan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dilakukan Tahun 2021 dapat dianalisa bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis BKPSDM tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi peningkatan/penurunan(tidak terjadi perubahan realiasai kinerja) Nilai IP ASN dari 78,06 menjadi 78,06. (ini dikarenakan rilis hasil penilaian IP ASN belum keluar dari BKN jadi masih menggunakan hasil realisasi kinerja sasaran tahun 2020).Belum tercapainya target IP ASN karena di belum optimalnya nilai kompetensi dan kualifikasi PNS.

Hal ini disebabkan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dalam hal ini diklat dan semacamnya yang tidak bisa dipenuhi dari anggaran yang ada di BKPSDM Klaten dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 dan masih rendahnya pelaksanaan peningkatan kompetensi dengan cara daring.

Belum optimalnya nilai Kualifikasi pada IP ASN tahun 2021 karena masih adanya ASN kabupaten Klaten yang tingkat pendidikan belum sesuai dengan penilaian IP ASN. Khususnya untuk pengadaan ASN yang sesuai kualifikasi yang di butuhkan sesuai formasi yang didasarkan pada Anjab ABK juga belum bisa optimal karena adanya gap antara usulan formasi dengan penetapan formasi dari pusat.

Pencapaian kinerja BKPSDM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KLATEN

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profisionalisme ASN		IPP	87,36	78,00	79,00	80,00	78,06	-	79,00	80,00	

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Indek Profesionalitas Pegawai tersebut dapat tercapai dengan 2 (dua) program yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten yaitu : Program Peningkatan Kapasitaas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Dalam pencapaian program yang telah ditetapkan tersebut perlu juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan core

bisnis (urusan pokok) masing-masing program agar mencapai target program yang telah ditetapkan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI BKPSDM

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Daerah dan Hal Kritis Terkait kinerja Pelayanan Daerah.

Melihat dari hasil analisi kinerja pelayanan BKPSDM di atas dapat di simpulkan bahwa untuk capaian sasaran strategis BKPSDM belum mencapai angka baik (≥ 80).

Hal- hal yang menjadi catatan kritis terhadap belum optimalnya capaian sasaran strategis BKPSDM jika dikaitkan dengan pelayanan sebagi berikut :

a. Belum optimalnya kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang diharapkan hal ini dikarenakan tingginya gap antar usulan formasi yang di ajukan dengan realisasi persetujuan formasi dari Kementrian PAN RB. Beberapa Sub Kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan capaian kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang diharapkan yaitu : *Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK ; Pengelolaan Pendidikan Lanjutan.*
b. Belum Optimalnya Kompetensi ASN, ini disebabkan tidak mencukupunyi kemampuan anggaran dari BKPSDM untuk pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh ASN di seluruh Kabupaten Klaten. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 setiap ASN berhak atas 20 JP untuk pengembangan kompetensi. Sub kegiatan yang ada di BKPSDM untuk pengembangan kompetensi yaitu : *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.*

Untuk mendukung kekurangan pengembangan kompetensi kerna keterbatasan anggaran perlu dilakukan beberapa terobosan diantaranya kerjasama dengan instansi vertical dalam pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun secara daring, Pengembangan kompetensi dengan model pelatihan kantor sendiri, mendorong pengembangan kompetensi dengan model couching dan mentoring serta dengan magang ke instansi lain.

c. Belum optimalnya disiplin ASN. Ini terbukti dengan masih adanya laporan terkait pelanggaran disiplin. Sub kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin yaitu : *Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; Evaluasi Disiplin ASN*
d. Belum optimalnya kinerja ASN secara lebih obyektif ini terbukti masih rendahnya capaian sasaran strategis OPD. Untuk melakukan penilaian kinerja sub kegiatan yang ada yaitu : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

2.3.2 Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, diantaranya adalah :

a. Belum optimalnya penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensinya.
b. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta.
c. Belum adanya sistem pola karier yang jelas dan terukur.
d. Terbatasnya ketersediaan pejabat (ASN) potensial yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensinya.
e. Belum terintegrasi secara optimal sistem informasi kepegawaian.
f. Terbatasnya PNS yang ahli dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

g. Belum optimalnya data diklat ASN meliputi data kebutuhan diklat, data evaluasi pasca diklat dan data peserta yang telah mengikuti diklat.
h. Usulan formasi dari OPD yang tidak sesuai dengan Anjab ABK.
i. Belum optimalnya penegakkan hukuman disiplin ASN.
j. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen kinerja.
k. Belum kuatnya sistem reward dan punishment di kepegawaian.

2.3.3 Dampak terhadap masalah yang dihadapai terhadap Visi dan Misi

Permasalahan yang ada akan menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM di atas, terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kinerja BKPSDM tidak akan tercapai maksimal karena adanya kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai 100% sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi misi (kepala daerah)

2.3.4 Tantangan dan Peluanag

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ada Peluang dan Tantangan yang ada dihadapi BKPSDM adalah sebagai berikut :

Peluang :

a. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur
b. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran

Tantangan :

a. Teknologi informasi menjadi tantangan untuk integrase data menuju 1 (satu) data.
b. Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur.

2.3.5 Formulasi Isu Penting

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka formulasi Isu-isu

penting yang perlu di tindaklanjuti Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM adalah:

a. Optimalisasi peningkatan pemenuhan kualifikasi ASN sesuai formasi;
b. Pemenuhan Kompetensi ASN dari segala aspek.
c. Perbaikan Kinerja ASN dengan alat ukur yang lebih obyektif;
d. Penerapan penegakkan disiplin ASN secara lebih optimal;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

Review terhadap Renja BKPSDM tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Akhir Renja BKPSDM tahun 2023

No	Rancangan Awal Renja					Hasil Analisa Kebutuhan (Rencana Kerja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**6.044.269.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	100%	**5.644.459.906**	Penyelarasan Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	100%	5.298.269.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	100%	**4.969.340.656**	Penyelarasan Pagu Indikatif
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	41 orang	5.248.269.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	4.950.890.656	1.Penyelarasan Pagu Indikatif, 2.Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	50.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	18.450.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	100%	450.000.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	100%	**379.199.250**	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60 unit	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	43.199.250	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6 eksemplar	57.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	57.000.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	1226 kali	95.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1226 Laporan	66.500.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222 kali	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222 laporan	212.500.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	100%	100.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	100%	**99.920.000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna5n Lainnya yang Disediakan	4 unit	99.920.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	100%	24.000.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	100%	**24.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Surat terkirim	8350 eksemplar	24.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8350 laporan	24.000.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	85%	172.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	85%	**172.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	19 unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	75.000.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	95 unit	97.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 unit	97.000.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		**Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi**	80%	**2.271.856.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi**	80%	**1.989.313.900**	
			Persentase Kinerja ASN bernilai baik	90%				**Persentase Kinerja ASN bernilai baik**	90%		
			Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	80%				**Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan**	80%		
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	75%				**Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah**	75%		

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi**	80%	1.121.156.000	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi**	80%	**995.183.100**	
			Persentase ASN yang pensiun tepat waktu	100%				**Persentase ASN yang pensiun tepat waktu**	100%		
			Persentase Data ASN yang terkelola dengan baik	94%				**Persentase Data ASN yang terkelola dengan baik**	94%		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Calon ASN yang sesuai Formasi	1000 ASN	780.556.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1000 dokumen	693.392.550	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Klaten	Jumlah ASN Purna tugas yang menerima SK Pensiun	682 ASN	70.600.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	682 dokumen	57.456.650	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Klaten	Jumlah lembaga profesi ASN yang terfasilitasi	1 lembaga	10.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Klaten	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	7.724.500	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Klaten	Jumlah Aplikasi Yang dikelola	3 aplikasi	60.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	47.757.200	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Klaten	Jumlah Data ASN yang dikelola	9000 data	200.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 dokumen	188.852.200	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Mutasi dan Promosi ASN		**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya**	75%	452.300.000	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya**	75%	**369.621.479**	

			Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu	95%				**Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu**	95%		
	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Klaten	Jumlah ASN yang ditempatkan	500 ASN	226.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 dokumeb	183.641.400	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Klaten	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terselesaaikan	1300 SK	226.300.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Klaten	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 dokumen	185.980.079	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengembangan Kompetensi ASN		**Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan**	80%	508.400.000	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan**	80%	**469.668.321**	
			Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	100%				**Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan**	100%		
	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Klaten	Jumlah ASN Yang Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan	300 ASN	400.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment center Kompetensi Jabatan	300 dokumen	381.309.600	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Klaten	Jumlah Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan	200 ASN	50.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Klaten	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	41.057.179	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021

	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Klaten	Jumlah Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	300 Pejabat Fungsional	58.400.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Klaten	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 orang	47.301.542	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi**	90%	190.000.000	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi**	90%	**154.841.000**	
			Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan	80%				**Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan**	80%		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Klaten	Jumlah Sasaran Kerja Pegawai ASN yang bernilai baik	9000 ASN	50.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9000 dokumen	39.752.500	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Klaten	Jumlah usulan ASN Yang Mendapatkan Penghargaan	75 ASN	25.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Klaten	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	75 ASN	21.073.500	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Klaten	Jumlah Kasus Pelanggaran disiplin Yang terselesaikan	7 kasus	60.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7 laporan	49.388.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Klaten	Jumlah Izin Perceraian ASN yang terselesaikan	5 kasus	25.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Klaten	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 dokumen	19.870.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Klaten	Jumlah OPD yang di Monitoring dan di sidak	55 OPD	30.000.000	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Klaten	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	55 laporan	24.757.000	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	PROGRAM PENGEMBANGAN		**Persentase ASN yang meningkat**	80%	**6.594.711.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN**		**Persentase ASN yang meningkat**	**80%**	**2.594.671.100**	Penyelarasan Pagu Indikatif

	SUMBER DAYA MANUSIA		**Kompetensinya**			**SUMBER DAYA MANUSIA**		**Kompetensinya**			
	Pengembangan Kompetensi Teknis		**Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis**	80%	594.711.000	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis**	**80%**	**562.012.650**	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis	285 ASN	594.711.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetens	285 orang	562.012.650	Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan**	80%	6.000.000.000	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan5**	**80%**	**2.032.658.450**	Penyelarasan Pagu Indikatif
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jabatan	890 CASN dan ASN	6.000.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	890 laporan	2.032.658.450	1.Penyelarasan Pagu Indikatif, 2.Penyesuaian Kepemendagri 050-5889 th 2021

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan hasil hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BKPSDM, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Klaten melalui forum konsultasi Publik yang dilaksnakan secara hybrid pada tanggal 18 Januari 2023, secara umum tidak ada usulan yang disampaikan terhadap Program/kegiatan/Sub Kegiatan di BKPSDM.

Melalui tabel 2.5 dibawah ini dapat dilihat bahwa tidak ada usulan yang disampaikan kepada BKPSDM:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kabupaten Klaten (Satpol PP)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	Usulan diklat Fungsional PPNS di Satpol PP (Satpol PP)
2	Pengelolaan Mutasi ASN	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	Usulan agar penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya (DKPP , Kec. Prambanan dan DLHK)
3	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-	Perlu adanya data valid terkait jumlah PNS, P3K, tenaga honorer

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KLATEN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana sasaran pembangunan jangka menengah pada Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Memperhatikan arahan Presiden RI sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan nasional diarahkan pada 5 (lima) fokus yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Fokus pembangunan tersebut diarahkan pada pencapaian Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

RKPD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”, dengan 4 prioritas pembangunan.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada tabel 3.1 dibawah:

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat	Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Renja BKPPD 2023
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Kepegawaian Daerah 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) BKPSDM

1. Tujuan

Tujuan dari Rencana Kerja (Renja) BKPSDM sesuai dengan Tujuan dari Renstra BKPSDM yaitu " Terlaksananya Penerapan Sistem Merit dengan baik dalam Manajemen ASN"

2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja (Renja) BKPSDM sesuai dengan dari Renstra BKPSDM yaitu Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan indikator kinerja Indek Profesionalitas ASN.

Tujuan dan Sasaran dari Renja BKPSDM mendukung Tujuan RPJMD Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi yang secara langsung mendukung Misi 2 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.

BAB IV
RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu untuk dilakukan pengembangan ASN agar kedepan mampu mengikuti perkembangan jaman yang semakin komplek. Untuk itu diperlukan perencanaan yang detail terkait semakin banyaknya regulasi yang terus berkembang dalam rangka mewujudkan Good Governent. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya *kepemerintahan yang baik* dibutuhkan perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan, diantaranya adalah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BKPSDM merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait dengan dokumen perencanaan yang lain yaitu merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dan implementasi dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) BKPSDM mengacu pada Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2021 – 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2023 disusun dengan mengacu Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Klaten sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di BKPSDM.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program/ Kegiatan/ sub kegiatan adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Terpilih khususnya misi ke-2 : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.*
b. Secara garis besar rekapitulasi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    1) Jumlah Program sebanyak 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan
    2) Secara Umum penyebaran Lokasi Program , Kegiatan dan sub Kegiatan berada di Kabupaten Klaten kecuali untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia menyesuaikan lokasi pelaksnaan sub kegiatan.

3) Dari Renja 2023 pagu indikatif yang dibutuhkan sebesar Rp**.** 10.228.444.906**,**00 yang di rencanakan sumber pendanaannya dari Transfer Dana Umum Dana Alaokasi Umum

c. Secara umum diharapkan tidak terjadi ketidak sesuaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan rancangan awal RKPD tapi sangat dimungkinkan terjadi ketidak sesuaian pada pagu indikatif karena hrus menyesuaikan pagu indikatif yang diputuskan oleh TAPD menyesuaikan priosritas penganggaran yang ada.

d. Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						Urusan								
5	03					Bidang Urusan								
5	03	01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**		100%	**5.644.459.906**			100%	**6.072.835.000**
5	03	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**		100%	**4.969.340.656**			100%	5.276.835.000
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	BKPSDM Kab. Klaten	41 orang/bulan	4.950.890.656	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		40 orang/bulan	5.226.835.000

							Tunjangan ASN							
5	03	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKPSDM Kab. Klaten	12 dok	18.450.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 dok	50.000.000
5	03	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**		100%	**379.199.250**			100%	450.000.000
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM Kab. Klaten	60 paket	43.199.250	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		60 paket	48.000.000
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM Kab. Klaten	6 paket	57.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		6 paket	57.000.000
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKPSDM Kab. Klaten	1226 Laporan	66.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1226 Laporan	95.000.000
5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	222 laporan	212.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		222 Laporan	250.000.000

5	03	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**		100%	**99.920.000**			100%	150.000.000
5	03	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BKPSDM Kab. Klaten	4 unit	99.920.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 unit	150.000.000
5	03	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**		100%	**24.000.000**			100%	24.000.000
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Klaten	8350 laporan	24.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		8350 laporan	24.000.000
5	03	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**		85%	**172.000.000**			80%	172.000.000

							terpelihara							
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BKPSDM Kab. Klaten	19 unit	75.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		19 unit	75.000.000
5	03	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM Kab. Klaten	95 unit	97.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		95 unit	97.000.000
5	03	02				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi**		80%	**1.989.313.900**			80%	2.312.144.000
							Persentase Kinerja ASN bernilai baik		90%				90%	
							Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan		80%				80%	
							Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan		75%				75%	

							Perangkat Daerah							
5	03	02	2	01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase terpenuhinya Calon ASN yang sesuai Formasi**		80%	**995.183.100**			80%	1.142.144.000
							Persentase ASN yang pensiun tepat waktu		100%				100%	
							Persentase Data ASN yang terkelola dengan baik		94%				94%	
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Klaten	1000 dokumen	693.392.550	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1000 dokumen	772.144.000
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Klaten	682 dokumen	57.456.650	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		591 dokumen	75.000.000
5	03	02	2	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Klaten	1 lembaga	7.724.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 lembaga	15.000.000

5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Klaten	3 dokumen	47.757.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		3 dokumen	60.000.000
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Klaten	9000 dokumen	188.852.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9000 dokumen	220.000.000
5	03	02	2	02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai Kualifikasi dan kompetensinya**		75%	**369.621.479**			75%	460.000.000
							Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang terselesaikan tepat waktu		95%				95%	
5	03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Klaten	500 dokumeb	183.641.400	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		500 dokumen	230.000.000
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Kab. Klaten	1300 dokumen	185.980.079	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		1300 dokumen	230.000.000

							ASN				Tahun Sebelumnya			
5	03	02	2	03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan**		80%	**469.668.321**			80%	510.000.000
							Persentase Tugas Belajar, Ijin Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Ijin penggunaan Gelar ASN yang terselesaikan		100%				100%	
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment center Kompetensi Jabatan	Kab. Klaten	300 dokumen	381.309.600	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		300 dokumen	400.000.000
5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Klaten	200 orang	41.057.179	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		150 orang	50.000.000
5	03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Klaten	300 orang	47.301.542	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		300 orang	60.000.000

5	03	02	2	04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Sasaran Kerja Pegawai yang di nilai dan di evaluasi**		90%	**154.841.000**			90%	200.000.000
							Persentase Kasus Pelanggaran disiplin dan perceraian yang terselesaikan		80%				80%	
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Klaten	9000 dokumen	39.752.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		9000 dokumen	60.000.000
5	03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Klaten	75 ASN	21.073.500	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		75 ASN	25.000.000
5	03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Klaten	7 laporan	49.388.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		7 laporan	60.000.000
5	03	02	2	04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Klaten	5 dokumen	19.870.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 dokumen	25.000.000
5	03	02	2	04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	Kab. Klaten	55 laporan	24.757.000	Sisa Lebih Perhitungan		55 laporan	30.000.000

							Disiplin ASN				Anggaran Tahun Sebelumnya			
						PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
5	04	02				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya**		80%	**2.594.671.100**			80%	7.084.837.000
5	04	02	2	01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase ASN yang mengikuti Bintek/ Diklat Teknis**		80%	**562.012.650**			80%	694.642.000
5	04	02	2	01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetens	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	285 orang	562.012.650	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		279 orang	694.642.000
5	04	02	2	02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti Diklat Jabatan**		80%	**2.032.658.450**			80%	6.390.195.000
5	04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	DKI Jakarta, Jabar, Jateng , DIY	890 laporan	2.032.658.450	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1195 laporan	6.390.195.000

							Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
										10.228.444.906				**15.469.816.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) disusun agar untuk mengawali penyusunan Rencana Kerja sesuai jadwal yang harus dipedomani. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2023.

5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten memiliki prioritas yakni mengirimkan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dalam 2 (tahun) tidak melakukan pengiriman Pejabat struktural yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.
2. Kebutuhan pengisian formasi jabatan berdasarkan kualifikasi pendidikan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja karena semakin banyaknya ASN yang pensiun rentang 5 tahun (2016-2021).
3. Optimalisasi penyelesaian pelanggaran disiplin dan pembinaan disiplin ASN untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan.
4. Peningkatan kinerja dengan penilaian kinerja yang lebih obyektif menyesuaikan regulasi yang ada dengan mengoptimalkan aplikasi yang ada.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten Tahun 2023, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023;
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang dikehendaki;
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Klaten, Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KLATEN

SLAMET, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19690621 199103 1 006

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang dapat kami sajikan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Klaten, Juli 2022

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT DAERAH KLATEN

JAJANG PRIHONO, S.STP.
Pembina Tk I
NIP. 19810216 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Landasan Hukum 2

1.3.Maksud Dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Pembahasan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten 8

BAB II **10**

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021 .....**10**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 10

Tabel 2.1 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten..... 20

Tabel 2.2 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten 22

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

Tabel 2.4 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....**38**

Tabel 2.5 38

BAB III.....**39**

TUJUAN DAN SASARAN.....**39**

3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 39

Tabel 3.1. Persandingan antar Prioritas Nasional, Provinsi,.....**39**

3.2.Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten..... 41

BAB IV **42**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....**42**

BAB V **65**

PENUTUP **65**

5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi pengawasan antara lain:..... 65

5.2. Kaidah Pelaksanaan..... 65

5.3. Rencana Tindak Lanjut..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bupati terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan antara lain RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan RENJA Inspektorat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat penjelasan ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan rancangan rencana kerja, daftar program dan kegiatan, tolok ukur dan target capaian program yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 masih belum dapat diketahui kapan akan dapat berakhir. Meskipun pada akhir tahun 2022 sudah sangat kecil jumlah yang dinyatakan positif

covid-19, akan tetapi dengan adanya libur sekolah, libur natal dan libur tahun baru serta adanya ancaman varian baru yang sangat besar kemungkinannya masuk ke Indonesia, dalam perencanaan kinerja dan anggaran masih sangat perlu mewaspadai ancaman covid-19. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang diberi tugas untuk mengampu bidang pengawasan masih sangat memperhatikan dan mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dalam penyusunan rencana kerjanya dan sesuai dengan arah kebijakan tahun 2023 yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan".

1.2.Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahu'n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati Klaten nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023.

1.3.Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kerja adalah untuk menjabarkan rencana pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Tujuan penyusunan rencana kerja sebagai berikut:

1. Menyelaraskan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

1.4 Sistematika Pembahasan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah 2021 dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

2.2. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional dan propinsi

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

BAB IV RENCANA KERJA RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

c Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan– kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten untuk tahun 2021 telah ditetapkan Inspektorat Daerah dalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada untuk mencapai suatu kinerja yang baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016–2021 pada dasarnya telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, diantaranya:

a. Kegiatan Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tergantung dari jumlah laporan yang masuk;
b. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

a. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
   1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2) Administrasi Umum Perangkat
   3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
   4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
   5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
   1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
   2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi
   1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
   2) Pendampingan dan Asistensi

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   2) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
   1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
   2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
   1) Pendampingan dan Asistensi.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan tersebut tergantung pada SKPD/Instansi lainnya;
b. Banyaknya mandatory baru.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja program di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

a. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal;
b. Perlunya koordinasi dengan BPKP selaku pembina untuk bahan perencanaan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dan peningkatan kompetensi APIP.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase Urusan Bidang Pengawasan yang Ditunjang							-	
6.01.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan pelayanan Administrasi Keuangan**			100		103.75			
6.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN			12	12	100			
6.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dinas dalam Daerah			80	86	107.5			

6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **2.. Persentase sarana dan prasarana kondisi baik Perkantoran**			1. 100 2. 100		91.39			
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik tersedia			30	30	100.00			
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK tersedia			40	40	100.00			
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen tergandakan			45800	45800	100.00			
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tersedia			48	48	100.00			
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia			2000	1330	66.50			
6.01.01.2.06.09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah			33	27	81.82			

6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				100		100.00			
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor			25	25	100.00			
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				100		89.11			
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim			1300	1289	99.15			
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayar			4	4	100.00			
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL kebersihan Kantor			22	15	68.18			
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**				100		132.73			
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara			22	22	100.00			

	Operasional atau Lapangan									
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1	2	200.00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan saran dan pasarana pendukung gedung kantor			55	54	98.18			
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	Peningkatan Kapabilitas APIP								
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Prosentase peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					69.45			
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit Kinerja			8	8	100.00			
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	jumlah kegiatan reviu dan evaluasi			18	10	55.56			
6.01.02.2.01.04	Reviu laporan Keuangan	jumlah reviu laporan keuangan			14	9	64.29			

6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	jumlah obrik terperiksa			96	54	56.25			
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah obrik yang menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pengawasan			104	74	71.15			
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**					238.89			
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah	jumlah laporan kerugian daerah terselesaikan			1	1	100.00			
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan pengaduan terselesaikan			90	30	33.33			
		jumlah laporan audit dengan tujuan tertentu			12	70	583.33			
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**	Peningkatan Level Maturitas SPIP								

6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Prosentase Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**					86.33			
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah dokumen PKPT			1	1	100.00			
		jumlah peserta rapat dinas			500	300	60.00			
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	jumlah rakorwas terlaksana			4	2	50.00			
		jumlah APIP yang sudah dinilai angka kreditnya			40	40	100.00			
		jumlah APIP yang mengikuti diklat yang dipersyaratkan			50	54	108.00			
		jumlah bimtek Kapabilitas APIP			2	2	100.00			
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Prosentase Peningkatan Asistensi dan Pendampingan**					89.29			

6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pelayanan konsultasi			50	25	50.00			
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah skpd yang didampingi dalam upaya Peningkatan Indeks RB			51	51	100.00			
6.01.03.2.02.03	Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan gratifikasi terselesaikan			2	2	100.00			
		jumlah peserta sosialisasi			2000	2000	100.00			
		jumlah sosialisasi terlaksana			4	4	100.00			
6.01.03.2.02.04	Pendampingan,Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	jumlah LHKASN terverifikasi			4000	3000	75.00			
		jumlah OPD yang didampingi dalam upaya penegakan Integritas			10	10	100.00			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Seiring dengan adanya kemajuan tuntutan dari masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyakat yang lebih akuntabel, transparan, cepat dan murah, isu strategis yang diambil dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang disesuaikan dengan tugas pokok sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanurusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Guna mewujudkan pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten maupun di tingkat pemerintahan desa, maka isu strategis ialah "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang mendukung *roadmap* reformasi birokrasi serta kurangnya pemanfaatan tehnologi dalam rangka menuju kepemerintahan yang baik *(good governance)*." Hal ini masih terlihat sering terjadinya:

a ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku;
b kelemahan sistem pengendalian interen;
c ketidakhematan/pemborosan.;
d keterlambatan pencatatan dan pelaporan.

Kinerja Inspektorat Daerah secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP berdasarkan kriteria Internal Audit Capability Model (IACM) yang mengelompokkan kapabilitas APIP ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial)*, Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated)*, Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing)*. Sesuai dengan target RPJMN, kapabilitas APIP pada akhir tahun 2020 harus mencapai level 3. Untuk itu Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan upaya upaya meningkatkan kapabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah mencapai Level 3 berdasarkan hasil QA oleh BPKP.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Level Maturitas SPIP	Level 3 tahun 2020	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	N/A	3	3	Sesuai target RPJMN bahwa pada tahun 2019, Kapabilitas APIP harus sudah mencapai level 3
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3 tahun 2020	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	N/A	3	3	Sesuai target RPJMN bahwa pada tahun 2019, Kapabilitas APIP harus sudah mencapai level 4

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten yaitu pada misi yang ke 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pengawasan daerah, mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, oleh karena itu harus ditunjang oleh adanya kebijakan publik dalam pelaksanaan tugasnya.

Melalui kebijakan publik ini dapat dilakukan penyempurnaan kebijakan birokrasi terutama dalam melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur untuk menghadapi tuntutan peningkatan mutu pengawasan sesuai harapan masyarakat terhadap tuntutan kualitas pelayanan aparatur.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Klaten, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berada dalam Misi ke 2 Bupati Klaten dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukkan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
4. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Inspektorat Daerah dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yakni untuk kegiatan pemeriksaan reguler. Sedang untuk pemeriksaan kasus karena adanya aduan ataupun pemeriksaan khusus atas perintah atasan/bupati dilakukan sewaktu-waktu di luar jadwal PKPT.

Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan bentuk akhir pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemeriksaan. Setelah berakhirnya tugas pemeriksaan, seorang pemeriksa wajib segera menyusun laporannya untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kecepatan penerbitan laporan akan sangat bermanfaat bagi objek pemeriksaan sebagai bahan masukan/*feed back* untuk perbaikan kinerja mereka. Sebaliknya, jika laporan hasil pemeriksaan diterbitkan terlambat maka *feed back* dan rekomendasi seringkali menjadi basi. Keterlambatan penerbitan laporan hasil pemeriksaan seringkali terjadi karena ketidaklengkapan data perolehan saat dilaksanakannya pemeriksaan. Disamping itu juga sering pemeriksa merasa kesulitan mencari landasan hukum/aturan sebagai acuan temuan pemeriksaan. Banyaknya aturan yang tidak dikuasai banyak disebabkan oleh keengganan para pemeriksa untuk secara proaktif mencari aturan-aturan baru, padahal aturan-aturan baru selalu saja muncul, seiring dengan makin kompleknya permasalahan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini karena kurangnya upaya pendalaman atas aturan-aturan yang ada.

2.3.1. Isu-isu penting terkait dengan tugas pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di lingkungan SKPD Kabupaten Klaten , dengan hasil QA dari BPKP berada level 3 .
2. Masih terdapat temuan berulang-ulang sama setiap tahunnya.
3. Jumlah Pejabat Fungsinal Auditor yang belum sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan yang harus diperiksa.
4. Tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 3 (skala 5) hasil QA dari BPKP.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan:

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

a Kesadaran/kedisiplinan dan kemampuan dari obyek pemeriksaan untuk menindaklanjuti Surat Bupati atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten khususnya untuk temuan yang bersifat finansial masih rendah;

b Auditan/obyek pemeriksaan kurang optimal dalam melakukan penagihan kepada pihak ke III;

c Realisasi penerapan sanksi sesuai pasal 21 Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum ada;

d Lemahnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap OPD.

e Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berdasarkan Self Assasment berada pada level 3 dari 5 level yang ada, yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif.

f Perubahan paradigma APIP dari *watchdog* ke *quality assurance* dan*consulting partner* dengan pendekatan pencegahan dan sistem peringatandini belum sepenuhnya berjalan.

g Keterbatasan jumlah APIP dibandingkan beban kerja pengawasan/jumlah obyek pemeriksaan menyebabkan kinerja pengawasan yang tidak optimal.

Dampak dari permasalahan tersebut terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah antara lain tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih belum dapat sepenuhnya terwujud. Beberapa indikator yang menunjukkan belum tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik antara lain:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Klaten masih berada pada level 3 (skala 5). Artinya praktik pengendalian intern sudah ada, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
2. Nilai SAKIP Kabupaten Klaten masih berada pada level BB.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi atas rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di delapan area perubahan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan

pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

Tantangan:

1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Implementasi sistem pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan baik.
3. Semakin besarnya alokasi APBD di Desa semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.
4. Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan paktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peluang:

1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintahan daerah.
2. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengefektifkan sistem pengawasan intern dan sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas KKN.
3. Adanya dukungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Pusdiklat Pengawasan BPKP serta lembaga lain yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
4. Adanya semangat Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mempertahankan opini tersebut untuk tahun berikutnya.

2.3.4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

a Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler, kasus dan khusus dengan mendatangi obyek pemeriksaan (jemput bola), pemanggilan kepada obrik ataupun penagihan tindak lanjut kepada obrik melalui surat secara intensif.

b Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di setiap OPD.

c Mendorong peningkatan Kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi SDM, dukungan dari pimpinan dan dukungan anggaran.

d Menambah jumlah auditor berdasar analisis beban kerja bidang pengawasan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, serta penjelasan mengenai perubahan tersebut dilakukan, dan secara garis besar dapat disajikan pada Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Program Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Kabupaten / Kota	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**12.812.811.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Kabupaten / Kota**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**12,691,575,078**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**100**	**57.120.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**100**	**45,320,000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3	10.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3	10,200,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	3.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	1	3,060,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun	1	3.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun	1	6,060,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	1	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun	1	-	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen LKJIP tersusun	1	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen LKJIP tersusun	1	3,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	25.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	20,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pembayaran Gaji,Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat waktu**	**100**	**8.981.895.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pembayaran Gaji,Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat waktu**	**100**	**9,248,455,078**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	54	8.851.295.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	66	9,120,455,078	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	110,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	5.100.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12	3,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	12	5.100.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	12	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	3,000,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	4	5.100.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun	4	3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	16	5.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	16	3,000,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	12	5.100.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	12	3,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100**	**50.700.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu**	**100**	**43,000,000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228	45.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	210	40,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	4	5.100.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Dokumen Data Administrasi Kepegawaian	4	3,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu**	**100**	**785.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat waktu**	**100**	**717,400,000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	210	51.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	180	40,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3150	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3000	80,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	20	20.400.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	20	20,400,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah bahan Logistik tersedia	450	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah bahan Logistik tersedia	450	20,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	66650	80.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah barang cetak dan penggandaan tersedia	65000	100,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3624	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	302	17,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	225	91.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	180	80,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Tengah, Semangkak					Tengah, Semangkak				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200	380.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	350,000,000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	100	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	100	10,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100**	**1.379.196.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100**	**1,250,000,000**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2	650,000,000	
Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah mebel yang tersedia	10	130.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah mebel yang tersedia	8	100,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	14	286.196.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	14	300,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15	313.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15	200,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100**	**745.400.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100**	**684,400,000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Surat Terkirim	1300	20.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Surat Terkirim	12	20,400,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	325.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12	300,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	14	400.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	12	364,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100**	**813.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100**	**703,000,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	25	425.720.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	25	350,000,000	
Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	jumlah mebel terpelihara	32	5.100.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	jumlah mebel terpelihara	32	3,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	158	132.680.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	14	150,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ Terpelihara	1	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ Terpelihara	1	200,000,000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1**	**100**	**1.287.977.000**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1**	**100**	**772,557,604**	
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	**100**				**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2**	**100**		
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	**100**				**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3**	**100**		
		Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	**100**				**Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4**	**100**		
		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	**100**				**Persentase pelaksanaan pengawasan khusus**	**100**		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	**100**	**887.177.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**	**100**	**581,357,000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Pengawasan kinerja pemerintah daeah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit kinerja	8	56.100.000	Pengawasan kinerja pemerintah daeah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit kinerja	4	56,100,000	
Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit keuangan	8	55.257.000	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit keuangan	8	55,257,000	
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan revieu Kinerja	58	150.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan revieu Kinerja	53	80,000,000	
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan revieu keuangan	223	190.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan revieu keuangan	223	150,000,000	
Pengawasan Desa	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Audit Desa	72	266.843.000	Pengawasan Desa	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Audit Desa	54	120,000,000	
Kerjasama pengawasan internal	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan kerjasama terlaksana	1	20.000.000	Kerjasama pengawasan internal	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan kerjasama terlaksana	1	20,000,000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	86	148.977.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI/APIP	4	100,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti**	**100**	**400.800.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase aduan/kerugian daerah yang di tindaklanjuti**	**100**	**191,200,604**	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2	40.800.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2	36,458,604	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit tujuan tertentu	71	360.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah laporan audit tujuan tertentu	5	154,742,000	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1**	**100**	**4.270.450.000**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 1**	**100**	**2,310,150,318**	
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2	**100**				**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 2**	**100**		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	**100**				**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3**	**100**		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	**100**				**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4**	**100**		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	**100**				**Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus**	**100**		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan**	**100**	**1.963.450.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan**	**100**	**1,095,150,318**	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di tetapkan	5	863.450.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang di tetapkan	51	495,150,318	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang)	54	1.100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah pengawas yang mendapatkan peningkatan kapasitas (orang)	54	600,000,000	
Pendampingan dan Asistensi	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Nilai MCP Korsupgah KPK**	**68**	**2.307.000.000**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Nilai MCP Korsupgah KPK**	**68**	**1,215,000,000**	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan,	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	50	1.000.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan,	jumlah laporan pendampingan dan asistensi	50	350,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Pada Perangkat Daerah	51	247.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Pada Perangkat Daerah	51	200,000,000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (dokumen)	15	750.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (dokumen)	12	375,000,000	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (dokumen)	8	310.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (dokumen)	8	290,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan alat untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah merupakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Perubahan atau penambahan kegiatan selama ini merupakan mandatori dari pemerintah pusat atau ketentuan peraturan-peraturan yang baru.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Program kerja dalam rencana kerja tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antar Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Klaten	Program dalam Renja 2022
1. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan system layanan terintegrasi	1. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	1. Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan, kebijakan, pendampingan dan asistensi

Sesuai dengan Program Nawacita Presiden Joko Widodo yang salah satunya yaitu membangun **tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya** serta Visi pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu **Menuju Jawa Tengah Sehatera dan Berdikari " Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"**, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten memandang bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sangat penting dan perlu mendapat prioritas. Sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten mengacu dan memasukkannya pada RPJMD yaitu pada misi yang ke 2 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan antikorupsi,** misi ini sangat mendukung dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga para stakeholder puas dengan kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung sasaran Rencana Jangka Panjang Nasional (2016–2025) yaitu: Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan dan semua kegiatan. Peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur

negara melalui pengawasan internal. Pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, serta untuk mendukung sasaran rencana kerja pembangunan di Jawa Tengah Tahun 2023 bidang pengawasan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat dengan pelaksanaan audit kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan kebijakan kepala daerah dan hasil pemeriksaan, review perencanaan penganggaran dan pelaporan, audit dengan tujuan tertentu, serta pengawasan lainnya
b. Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP dengan peningkatan kapabilitas APIP
c. Peningkatan manajemen mutu dengan penyusunan PKPT berbasis risiko.
d. Implementasi Manajemen Risiko dengan melakukan melakukan pemetaan risiko.
e. Pembangunan Budaya Integritas
f. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
g. Pengimplementasian rencana aksi pencegahan dan penanggulangan korupsi.
h. Optimalisasi satuan tugas sapu bersih pungli.
i. Peningkatan kemampuan pengawasan untuk mendukung kualitas hasil pengawasan dilakukan antara lain dengan pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme.
j. Peningkatan kualitas dan kuantitas laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
k. Penyelesaian tindak lanjut, artinya semua temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tuntas.
l. Optimalisasi penanganan aduan masyarakat melalui berbagai media elektronik atau media langsung.

Maka Sasaran Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan tahun berikutnya 2024 ialah secara nyata semakin meningkatnya pelaksanaan pengawasaan dan pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, terjadwal, teratur, tidak tumpang tindih, pencegahan pungutan liar, pengendalian gratifikasi. Laporan Hasil Pemeriksaan dan laporan hasil evaluasi laporan

akuntabilitas kinerja OPD yang profesional dapat dengan mudah dipahami dan cepat untuk ditindaklanjuti, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau evaluasi yang benar, tepat dan cepat dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat berjalan di semua lini organisasi, semakin profesional tenaga dan/atau aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Klaten.

3.2.Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

a. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten 2021–2026 ialah meningkatnya akuntabilitas keuangan dan transparasi serta kinerja pemerintah daerah. Dengan indikator tujuan Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) yang merupakan hasil penilaian KPK atas Survey Penilaian Integritas (SPI). Target indeks SPI tahun 2023 mengalami perubahan dari yang telah tertera di Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, yakni yang semula ditargetkan senilai 81 turun menjadi 74 akibat adanya penurunan capaian indeks SPI Kabupaten Klaten Tahun 2021.

b. Sasaran

Sasaran rencana strategis jangka menengah 2021–2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten ialah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Klaten yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Klaten diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dalam evaluasi RKPD dan LKjIP.

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 terdapat 3 Program dan 11 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah selaras dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan,maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya disajikan dalam tabel berikut.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH DAERAH KABUPATEN KLATEN

INSPEKTORAT DAERAH -

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			Rencana Tahun 2023					Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							15,774,283,000					19,033,833,005
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah Kabupaten / Kota							12,691,575,078					12,842,289,005
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							45,320,000					57,222,000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	3 dokumen	100%	10,200,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,220,000
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	1 dokumen	100%	3,060,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,366,000

6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	1 dokumen	100%	6,060,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,366,000
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	1 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	1 laporan	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100%	4 laporan	100%	20,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28,050,000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,248,455,078					8,994,602,000

6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	66 orang/bulan	100%	9,120,455,078	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,850,942,000
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	12 dokumen	100%	110,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	110,000,000
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	12 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	12 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	1 laporan	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000

6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	4 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	16 laporan	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya prosentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	12 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							43,000,000					55,770,000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	210 paket	100%	40,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50,160,000

6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	4 dokumen	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							717,400,000					824,500,000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	180 paket	100%	40,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56,100,000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	3000 paket	100%	80,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,000,000
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	20 paket	100%	20,400,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22,440,000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	450 paket	100%	20,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22,000,000

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	65000 paket	100%	100,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88,000,000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	302 dokumen	100%	17,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	13,200,000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	180 laporan	100%	80,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91,760,000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	100 laporan	100%	350,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	420,000,000
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	100%	100 dokumen	100%	10,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,000,000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,250,000,000					1,205,906,005

6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2 unit	100%	650,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	392,714,000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8 unit	100%	100,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	188,000,005
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	14 unit	100%	300,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	315,192,000
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15 unit	100%	200,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	310,000,000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							684,400,000					809,440,000
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12 laporan	100%	20,400,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22,440,000

6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12 laporan	100%	300,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	347,000,000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	12 laporan	100%	364,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	440,000,000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							703,000,000					894,849,000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	25 unit	100%	350,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	468,292,000
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang dipelihara	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	32 unit	100%	3,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,610,000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	14 unit	100%	150,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	145,947,000

6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	1 unit	100%	200,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	275,000,000
6.01.02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**							772,557,604					1,432,184,000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							581,357,000					992,304,000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan kinerja pemerintah daeah	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	4 laporan	100%	56,100,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		72,810,000

6.01.02.2.01.02	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	8 laporan	100%	55,257,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		72,149,000

6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 6	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	53 laporan	100%	80,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		166,100,000

6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 7	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	223 Laporan	100%	150,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		214,500,000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 8	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	54 laporan	100%	120,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum				293,527,300

6.01.02.2.01.06	Kerjasama pengawasan internal	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 9	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Meningkatnya pelaksanaan PKPT	100% 100% 100% 100% 100%	1 kesepakatan	100%	20,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		22,000,000

6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 10	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya pelaksanaan	100% 100% 100% 100% 100%	4 dokumen	100%	100,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		151,217,700
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							191,200,604					439,880,000

6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Meningkatnya aduan/kerugian daerah yang ditindaklanjuti	100% 100% 100% 100% 100%	2 laporan	100%	36,458,604	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		44,880,000

6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatnya aduan/kerugian daerah yang ditindaklanjuti	100% 100% 100% 100% 100%	5 laporan	100%	154,742,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		395,000,000
6.01.03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**							**2,310,150,318**					
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							1,095,150,318					

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100% 100% 100% 100% 100%	51 rekomendasi	100%	495,150,318	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		942,268,000

6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Meningkatnya pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	100% 100% 100% 100% 100%	54 rekomendasi	100%	600,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		1,227,732,000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi							1,215,000,000					2,589,360,000

6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Capaian MCP Korsupgah KPK	100% 100% 100% 100% 100%	50 perangkat daerah	68 nilai	350,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		1,082,660,000

6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Nilai Capaian MCP Korsupgah KPK	100% 100% 100% 100% 100%	51 perangkat daerah	68 nilai	200,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		271,700,000

6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatnya Nilai Capaian MCP Korsupgah KPK	100% 100% 100% 100% 100%	12 kegiatan	68 nilai	375,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		875,000,000

6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Meningkatnya Nilai Capaian MCP Korsupgah KPK	100% 100% 100% 100% 100%	8 perangkat daerah	68 nilai	290,000,000	Dana Transfer UmumDana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan pengawasan khusus Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3 Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4		360,000,000
							TOTAL	**15,774,283,000**					**19,033,833,005**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat operasional.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Dokumen Renja ini menjadi acuan bagi pemangku peran untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten. Hasil kinerja penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Klaten tahun 2022 diharapkan dapat mendukung Visi daerah yakni: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera .

5.1. Hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian terkait fungsi pengawasan antara lain:

1) Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sehingga dapat terwujud *good governance* dan *clean goverment*.
1) Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai salah satu upaya mengawal jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, maka wajib disinkronkan dengan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Inspektorat Daerah ini disusun berdasar atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Adapun pokok-pokok rencana sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mengawal tema RKPD Tahun 2023 "**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan**".
2. Proyeksi rencana belanja daerah pada rancangan awal diproyeksikan sebesar Rp. 18.371.238.000,– untuk jalannya pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Namun demikian, setelah dilakukan analisis kebutuhan, proyeksi belanja daerah menjadi sebesar Rp.15.774.283.000,–

Demikian program kerja dan kegiatan RENCANA KERJA Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Klaten, Juli 2022
INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

JAJANG PRIHONO, S.STP.
Pembina Tk I
NIP 19810216 199912 1 001

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		.....	i
KATA PENGANTAR		.....	ii
BAB I.	**PENDAHULUAN**	.....	**1**
	1.1. Latar Belakang	.....	1
	1.2. Landasan Hukum	.....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	.....	9
	1.4. Sistematika Penulisan	.....	9
BAB II.	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	.....	**12**
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....	12
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	.....	30
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	32
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	.....	40
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegaiatan Masyarakat	.....	51
III.	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	....	**58**
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	.....	58
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKD Kabupaten Klaten	.....	59
BAB IV.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	.....	**60**
BAB V.	**PENUTUP**	.....	**61**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan izin-Nya jugalah sehingga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan waktunya. Rencana Kerja ini di susun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Setiap OPD secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi dan *stake holder* yang membutuhkannya.

Klaten, Juli 2022

Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten

Muh. Himawan P., SSTP, M.Si

NIP. 19761005 199602 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja BPKPAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana kerja OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
2. Rencana kerja OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penentuan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana kerja OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, sejauh mana capaian kinerja program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Anggaran yang dikenal sebagai Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan

dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten 2023 yakni peningkatan dan pemantapan kapasitas pembangunan berbasis pedesaan dan tata kelola ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka BPKPAD Kabupaten Klaten memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah termasuk pengelolaan aset daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten menyusun Rencana Kerja Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 72).
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2023, serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bagian ini memuat review (kajian) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Utama/Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisi kajian mengenai tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKPAD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD, pencapaian visi dan misi Bupati, tantangan dan peluang dalam meningktkan pelayanan BPKPAD serta rekomendasi atau catatan strategis untuk ditindaklanjuti

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional serta Tujuan dan sasaran Renja BPKPAD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaanya.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKPAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setia223p dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, BPKPAD Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu "Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dengan indikator Opini Laporan Keuangan".

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, BPKPAD melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa hampir seluruh program dan kegiatan capaiannnya sesuai target, secara rinci penjabaran program dan kegiatan dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada tahun 2021 terdapat 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang mengalami pemangkasan anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD di karenakan adanya Refokusing Anggaran, diantaranya:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

      1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

         a) Sub.Kegiatan Pemeliharaan Mebel

   b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

      1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

         b) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada tahun 2021 terdapat 4 Program dengan 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang terealisasi dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran mencapai 100%, diantaranya:

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

      1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

         a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

         b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

      2) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

         a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Fasilitasi Kunjungan Tamu

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.

b) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.

c) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

d) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

e) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas

f) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

g) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

h) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

a) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

b) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

c) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

d) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

e) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

a) Penyusunan Standar Harga

b) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

c) Pengamanan Barang Milik Daerah

d) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

e) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

f) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

g) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

a) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

b) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

c) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

d) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

e) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

f) Penagihan Pajak Daerah

g) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

h) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

3. Realisasi Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2021 tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor penyebab tidak tercapainya dan tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu adanya rasionalisasi anggaran untuk prioritas penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga ada program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a) Komitmen seluruh pihak yang terkait dalam mendukung tercapainya target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan

b) Konsistensi terhadap target waktu dan capaian dari program dan kegiatan yang telah direncanakan

c) Penyempurnaan terhadap aplikasi pengelolaan pendapatan daerah, tetap melakukan terobosan-terobosan metode pembayaran pajak daerah secara online maupun jemput bola, melakukan upaya penagihan piutang PBB dan piutang pajak lainnya, serta tetap melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah

d) Pengelolaan aset daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset yang bisa di akses secara online, serta tetap melakukan upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah secara bertahap

e) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, baik dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun penyusunan laporan keuangan, termasuk penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan keuangan baik yang sifatnya *local wisdom* maupun *update* terhadap peraturan diatasnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan target capaian program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, maka implikasi yang timbul yaitu adanya perubahan indikator kinerja dan target capaian sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:
    a) Menjaga konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
    b) Fokus pada indikator kinerja sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja BPKPAD Kabupaten Klaten tahun lalu secara rinci sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KLATEN

Perangkat Daerah : BPKPAD Kab. Klaten

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
		Bidang Urusan Keuangan									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			100	100	100%			

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi keuangan			100	100	100%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya			93	93	100%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Frekwensi Perjalanan Dinas			75	75	100%			
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah			100	100	100%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah pembayaran jasa jaminan barang milik daerah			73	73	100%			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administras umum perangkat daerah			100	100	100%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia			7	7	100%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK tersedia			49	49	100%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan dan kebersihan dan pengelolaan sampah tersedia			115	115	100%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia			11	11	100%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia			4000	4.000	100%			

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah			100	100	100%			
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pesentase pemenuhan penyediaan BMD yang direncanakan			100	100	100%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terbeli			1	1	100%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terbeli			23	23	100%			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang perangkat Darah			100	100	100%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat/SPJ terkirim			900	900	100%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening terbayar			3	3	100%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL Administrasi keuangan			5	5	100%			
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terpelihara			100	100	100%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/operasional Terpelihara			95	2	2%			
	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur terpelihara			50	-	0%			

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara dan Arsip kantor tertata			2	2	100%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banyaknya peralatan kantor terpelihara			60	60	100%			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di susun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran			2	2	100%			
			Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di sampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir			5	5	100%			
			Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di laksanakan			Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
			Prosentase penyerapan belanja daerah			85	84,5	99%			
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di laksanakan			Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD terverifikasi			69	69	100%			

		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD terverifikasi			69	69	100%			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD terverifikasi			69	69	100%			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD terverifikasi			69	69	100%			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Banyaknya Jenis Dokumen APBD			2	2	100%			
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Banyaknya Jenis Dokumen APBD			2	2	100%			
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase penyerapan belanja daerah			85	84,5	99%			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Pengelolaan kasda			12	12	100%			
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Banyaknya Bandel SPD			12.000	12.000	100%			
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Frekuensi Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah			12	12	100%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Banyaknya Laporan Terpenuhi			12	12	100%			

		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Frekuensi Pengelolaan TPTGR			12	12	100%			
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Frekuensi Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran			2	2	100%			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Banyaknya Perda/Perbub tersusun			2	2	100%			
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pembinaan Bendahara Pengeluaran			12	12	100%			
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di susun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran			2	2	100%			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Banyaknya jenis Dokumen Pertanggungjawaban APBD			2	2	100%			

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Banyaknya jenis Dokumen Pertanggungjawaban APBD			2	2	100%			
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Banyaknya jenis data yang di kelola			1	1	100%			
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Banyaknya Sisdur/Sim keuangan Daerah			1	1	100%			
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di sampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir			2	2	100%			
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)			99	99	100%			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Sosialisasi dan penyerahan pagu bantuan keuangan			2	2	100%			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak			40	40	100%			
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Persentase pencairan belanja bagi hasil			84	84	100%			

		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat			54	60	110%			
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat			54	60	110%			
		Penyusunan Standar Harga	Banyaknya Jenis Dokumen Standarisasi			3	3	100%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Banyaknya Jenis dokumen kebutuhan dan Pemeliharaan BMD			2	2	100%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Banyaknya Sertifikat Tanah,; Banyaknya SPPT PBB dibayar, Banyaknya Tugu Aset			203	203	100%			
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Banyakya Unit Pengelola Barang			51	51	100%			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Banyakya Unit Pengelola Barang			1.400	1.400	100%			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Banyakya Unit Pengelola Barang yang di Rekonsiliasi			930	930	100%			

		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi Diklat/Bintek aset, dan Peningkatan pengelolaan pembinaan pengurus barang			9	9	100%			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD			8	-4	-53%			
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD			8	-4	-53%			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi Penyuluhan Pajak Daerah			30	30	100%			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Banyaknya Aplikasi SIM			3	3	100%			
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Frekuensi Pendataan Objek Pajak			15	15	100%			
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi Kegiatan update data wajib pajak daerah			12	12	100%			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi			20	20	100%			
		Penagihan Pajak Daerah	Banyaknya SPPT dan SKPD			645.000	645.000	100%			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Frekuensi Pemeriksaan Pajak Daerah dan penertiban Reklame			12	12	100%			

		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Frekuensi Penyampaian ketetapan dan Pemungutan Pajak Daerah			12	12	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Realisasi capaian kinerja pelayanan BPKPAD Kabupaten Klaten yang merupakan sasaran BPKPAD sampai dengan tahun 2021 terhadap target akhir renstra untuk indikator sasaran "Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah" mencapai 100%.

Secara lebih rinci realisasi capaian kinerja pelayanan BPKPAD Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KABUPATEN KLATEN

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah

NO	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKPAD					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini untuk tahun 2021 baru akan diketahui pada bulan Mei 2022, sedangkan opini yg diterima di tahun 2020 adalah WTP, sehingga capaian terhadap target akhir renstra mencapai 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Kinerja Pelayanan dan Hal-Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan BPKPAD Kabupaten Klaten

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten BPKPAD Menjalankan misi yang kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi, BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang keuangan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPKPAD menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang keuangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan

e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan, permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten yang perlu mendapat perhatian untuk dapat ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yaitu:

a. Permasalahan Sekretariat
   - Belum Optimalnya pelayanan Sekretariat terhadap penyelenggaran tugas dan Fungsi BPKPAD
b. Permasalahan Bidang Akuntansi
   - Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
c. Permasalahan Bidang Perbendaharaan
   - Masih Rendahnya Penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah
d. Permasalahan Bidang Anggaran
   - Masih adanya kesalahan OPD dalam input kesesuian belanja dalam RKA
e. Permasalahan Bidang Aset Daerah
   - Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah
f. Bidang Pendapatan Asli Daerah
   - Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD

2.3.3 Dampak yang dihadapi terhadap pencapaian Visi dan Misi

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dampak terhadap pencapaian visi dan misi yaitu:

a. Rendahnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan OPD akan berdampak pada tidak terwujudnya pencapaian misi Kabupaten Klaten yaitu "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

b. Capain Visi Pemerintah Kabupaten Klaten Tata kelola Pemerintahan yang baik, Profesional dan Transparansi tidak akan terwujud.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.

Dengan adanya permasalahan tersebut menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan melalui analisis SWOT.

Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan Teknik Analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity & Threat)* dengan sudut pandang Pemerintah Kabupaten Klaten secara langsung, setelah ditetapkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kinerja organisasi baik eksternal maupun internal maka dirumuskan asumsi-asumsi strategis sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal bertujuan mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan kinerja BPKPAD Kabupaten Klaten. Kajian internal pada hakikatnya adalah analisis dan evaluasi atas kondisi yang meliputi Kekuatan*(strength)* dan Kelemahan *(weakness)*

a.1. Kekuatan*(strength)*

1) SDM/aparatur dengan jumlah memadai dan tingkat pendidikan yang baik (S-1 dan S-2).
2) Adanya dukungan anggaran (dana operasional) yang memadai.
3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta mengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
4) Komitmen yang kuat dalam meningkatkan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan aset daerah.
5) Tersedianya peraturan yang inovatif dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

a.2. Kelemahan*(weakness)*

1) Profesionalisme dan penempatan apparat pengelola keuangan daerah belum seperti yang diharapkan (*job-description*).
2) Kurang optimalnya penyelenggaraan koordinasi.
3) Inventarisasi data base potensi pajak, retribusi, aset, dan bantuan keuangan belum optimal.
4) System *reward* dan *punisment* belum berjalan baik.
5) Distribusi beban kerja belum merata.
6) Pelayanan masyarakat belum optimal.
7) Terbatasnya sarana dan prasarana.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal dalam hal ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman bagi kinerja BPKPAD Kabupaten Klaten. Kajian eksternal pada analisis dan evaluasi atas kondisi diluar yang meliputi *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman).

b.1. Peluang*(Opportunity)*

1) Keberadaan Peraturan Perundang-undangan level atasnya maupun lintas urusan.
2) Pendapatan perkapita masyarakat meningkat.
3) Kewenangan dan Potensi pajak dan retribusi, aset semakin besar.
4) Komitmen dan dukungan stakeholders dalam Pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.
5) Kemajuan teknologi dan situasi daerah yang kondusif.
6) Adanya dukungan dan koordinasi antar masing-masing OPD.

b.2. Ancaman*(Threat)*

1) Krisis ekonomi dan inflasi yang cukup tinggi.
2) Inovasi/perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
3) Sikap keberatan/penolakan masyarakat, Wajib Retribusi dan Wajib Pajak.
4) Implementasi ketat bidang investasi.
5) Kurang optimalnya ketertiban dan koordinasi antar OPD terkait dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Analisis SWOT

Dari hasil analisis lingkungan strategis dirumuskan beberapa strategi umum yang digunakan dalam merumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perumusan strategi pada dasarnya mencakup strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengoptimalkan peluang untuk mengurangi kelemahan, serta strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancamansebagai berikut:

a. Strategi S + O

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S + O) sebagai berikut:

(1) Memanfaatkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset daerah.

(2) Dengan semangat dan etos kerja yang tinggi melaksanakan Tupoksi BPKPAD untuk mewujudkan peningkatan PAD, pengelolaan aset, serta pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Strategi S + T

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (S + T) sebagai berikut :

(1) Penyesuaian peraturan di bidang PAD, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

(2) Sosialisasi dan koordinasi berbagai kebijakan dan peraturan.

(3) Penegakan supremasi hukum.

c. Strategi W + O

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (W + O) sebagaiberikut :

(1) Untuk meningkatkan profesionalisme SDM diadakan Bintek/Diklat, perlu dukungan dana.

(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana BPKPAD.

(3) Pemutakhiran atau *up grade* data potensi Pendapatan dan Aset Daerah.

d. Strategi W + T

Strategi mengurangi kelemahan dan menghindari tantangan ancaman (W+T):

(1) Peningkatan pelayanan masyarakat maupun OPD terkait.

(2) Perbaikan budaya organisasi.

(3) Perbaikan *system reward dan punishment.*

2.3.5 Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan penting yang perlu untuk ditindaklanjuti

BPKPAD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan (meliputi pengelolaan keuangan, PAD dan aset daerah), isu yang perlu mendapat perhatian untuk dapat ditindaklanjuti dalam rencana program dan kegiatan seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.3.5

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten

No	Permasalahan	Strategi Pemecahan/Kebijakan	Program	Kegiatan	Ket
1	Kurang optimalnya penerimaan pajak daerah	Penyempurnaan terhadap aplikasi pengelolaan pendapatan daerah, tetap melakukan terobosan-terobosan metode pembayaran pajak daerah secara online maupun jemput bola, melakukan upaya penagihan piutang PBB dan piutang pajak lainnya, serta tetap melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-
2	Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan aset daerah akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset yang bisa di akses secara online, serta tetap melakukan upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah secara bertahap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-
3	Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, baik dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun penyusunan laporan keuangan, termasuk penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan keuangan baik yang sifatnya *local wisdom* maupun *update* terhadap peraturan diatasnya	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni dan Pelaporan Keuangan Daerah.	-

Dari strategi pemecahan/kebijakan tersebut dan dengan dukungan dari para stakeholder dan pengelola keuangan yang ada, maka diharapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan akan dapat dipertahankan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, serta penjelasan mengenai perubahan tersebut dilakukan, dan secara garis besar dapat disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini..

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN KLATEN

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							Catatan Penting
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Keluaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Keluaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.02	PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN						5.02	PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN						
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	602,720,884,000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	631,752,728,831	
			Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100					Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100		
			Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	84.5					Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	84.5		
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	%	100	2,434,000,000	5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	%	100	1,311,610,00	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	-

5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	35,000,000	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	35,000,000	-
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	50,000,000	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	50,000,000	-
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	10,000,000	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	10,000,000	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	15,000,000	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	15,000,000	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	760,000,000	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	131,610,000	-
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	924,000,000	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	500,000,000	-
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	120	170,000,000	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	120	100,000,000	-
5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah**	**%**	**84.5**	729,843,000	**5.02.02.2.02**	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah**	**%**	**84.5**	439,806,000	

5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12	73,949,000	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12	45,000,000	-
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	900	19,247,000	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	900	19,000,000	-
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12	120,547,000	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12	72,500,000	-
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12.000	97,248,000	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12.000	67,306,000	-
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	dokumen	12	41,533,000	5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	dokumen	12	25,000,000	-

5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	3,500	166,132,000	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	3,500	100,000,000	-
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	2	36,468,000 -	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	2	22,000,000	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2	174,719,000	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2	89,000,000	-
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)**	**%**	**100**	1,339,163,000	**5.02.02.2.03**	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)**	**%**	**100**	**805.668.000**	
502.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	3	123,563,000	502.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	1	65,577,000	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaPenjabaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	202,600,000	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaPenjabaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	100,000,000	-
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	101,300,000	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	53,440,000	-

5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	1	759,750,000	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	1	551,651,000	-
5.0202.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	102	151,950,000	5.0202.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2	35,000,000	-
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)**	%	99	598,217,878,000	**5.02.02.2.04**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)**	%	99	629,195,644,831	
5.02.02.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	2	579,090,000,000	5.02.02.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	2	598,319,309,492	-
5.02.02.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	42	5,000,000,0	5.02.02.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	42	16,000,000,000	-
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	85	14,127,878,00	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	85	14,876,335,339	-
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Prsesentasi barang milik daerah yang teregristrasi**	%	100	2,870,870,000	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Prsesentasi barang milik daerah yang teregristrasi**	%	100	1,804,656,645	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah**	%	100	2,870,870,000	**5.02.03.2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah**	%	100	1,804,656,645	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	278,575,000	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	92,344,000	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	151,950,000	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	82,570,000	-

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	310	506,500,000	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	310	250,000,000	-
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	50,650,000	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	30,000,000	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	930	814,436,000	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	930	742,261,345	-
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	930	151,950,000	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	930	79,900,000	-
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	930	916,809,000	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	930	527,581,300	-
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Rasio PAD**	**%**	10.5	**2,775,933,000**	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Rasio PAD**	**%**	10.5	**2,509,310,200**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Rasio PAD**	**%**	10.5	**2,775,933,000**	**5.02.04.2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Rasio PAD**	**%**	10.5	**2,509,310,200**	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	478,643,000	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	30	385,000,000	-
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	5	681,952,00	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	659,550,000	-

5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	120,040,000	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15	158,700,000	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	419,085,000	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	306,326,600	-
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	12	304,625,000	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	12	287,000,000	-
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	743,714,000	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	685,217,600	-
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	16,512,000	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	16,300,000	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	11,362,000	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	11,216,000	-
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**20,284,964,000**	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**100**	**19,845,314,324**	
5.02.01.201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**%**	**71**	**31,214,000**	**5.02.01.201**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**%**	**71**	**31,214,000**	
5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**3**	15,607,000	5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**3**	15,607,000	-

5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	15,607,000	5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	15,607,000	-
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**%**	**100**	**17,882,924,000**	**5.02.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**%**	**100**	**17,823,100,324**	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	97	17,706,646,324	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	97	17,706,646,324	-
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	116,454,000	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	116,454,000	-
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**%**	**100**	**304,913,000**	**5.02.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**%**	**100**	**200,000,000**	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	73	304,913,000	5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	73	200,000,000	-
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	422,321,000	**5.02.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**411,000,000**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	15,195,000	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	15,000,000	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	50,650,000	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	50,000,000	-
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	11,043,000	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan,	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	11,000,000	-

		Tegalyoso							Tegalyoso					
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	50,650,000	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	50,000,000	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	10,130,000	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	5,000,000	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	101,300,000	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	100,000,000	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	152,963,000	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	150,000,000	-
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,000	30,390,000	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,000	30,000,000	-
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**68,250,000**	**5.02.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**275,000,000**	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	%	-	0	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	%	100	210,000,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	15,000,000	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	15,000,000	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	53,250,000	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	50,000,000	-

5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**273,789,000**	**5.02.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**299,000,000**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	eksemplar	300	4,052,000	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	eksemplar	300	4,000,000	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	192,470,000	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	190,000,000	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	5	77,267,000	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	5	105,000,000	-
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	1,130,553,000	**5.02.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**806,000,000**	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	1,190,022,000	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	700,000,000	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	6,939,000	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	6,000,000	-
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,650,000	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,000,000	-
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	53,942,000	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	50,000,000	-
				TOTAL PAGU		**628.652.651.000**						**TOTAL PAGU**	**655,912,010,000**	

Hasil analisis kebutuhan tahun 2023 adalah :

1. Seluruh Program dan Kegiatan yang ada di RKPD tahun 2023 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan sama dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam renja BPKPAD tahun 2023.
2. Tidak terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, rancangan RKPD sudah mengakomodir hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses pengajuan usulan kegiatan BPKPAD Kabupaten Klaten dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait pengelolaan keuangan daerah dan pendekatan politis dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan Dan Sub. Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Keluaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02	PENUNJANG FUNGSI KEUANGAN						
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	631,752,728,831	
			Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100		
			Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	84.5		
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tepat waktu sesuai Surat Edaran Bupati	%	100	1,311,610,000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	-
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA PPAS	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	235,000,000	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	35,000,000	-
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	50,000,000	-
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	10,000,000	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	15,000,000	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	131,610,000	-
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	500.000.000	-
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	120	100,000,000	-

5.02.02.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah**	**%**	**84.5**	**439,806,000**	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12	45,000,000	-
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	900	19,000,000	-
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12	72,500,000	-
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12.000	67,306,000	-
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	dokumen	12	25,000,000	-
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	dokumen	3,500	100,000,000	-
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	2	22,000,000	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2	89,000,000	-
5.02.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)**	**%**	**100**	**805,668,000**	
502.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	laporan	3	65,577,000	-

5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaPenjabaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	2	100,000,000	-
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	53,440,000	-
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	1	551,651,000	-
5.0202.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	2	35,000,000	-
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Persentase penyaluran belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus)**	%	99	**629,195,644,831**	
5.02.02.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	2	598,319,309,492	-
5.02.02.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	42	16,000,000,000	-
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	85	14,876,335,339	-
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**Prsesentasi barang milik daerah yang teregristrasi**	%	100	**1,804,656,645**	
5.02.03.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**Persentase penyelesaian registrasi Barang Milik Daerah**	%	100	**1,804,656,645**	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	92,344,000	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	82,570,000	-
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	310	250,000,000	-
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	30,000,000	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	930	742,261,345	-
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	930	79,900,000	-

5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	930	527,581,300	-
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Rasio PAD**	%	10.5	**2,509,310,200**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Rasio PAD**	%	10.5	**2,509,310,200**	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	30	385,000,000	-
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	3	659,550,000	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15	158,700,000	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	306,326,600	-
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	20	287,000,000	-
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	30	685,217,600	-
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	16,300,000	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	11,216,000	-
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	%	**100**	**19,845,314,324**	
5.02.01.201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	%	**71**	**31,214,000**	
5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**3**	15,607,000	-
5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	15,607,000	-
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	%	**100**	**17,823,100,324**	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	97	17,706,646,324	-

5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	116,454,000	-
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**%**	**100**	**200,000,000**	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	73	200,000,000	-
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**411,000,000**	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	15,000,000	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	48	50,000,000	-
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	11,000,000	-
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	50,000,000	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	5,000,000	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	100	100,000,000	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	150,000,000	-
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,000	30,000,000	-
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**275,000,000**	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	210,000,000	-
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	15,000,000	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	50,000,000	-
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**%**	**100**	**299,000,000**	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	eksemplar	300	4,000,000	-

5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	190,000,000	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Orang	5	105,000,000	-
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**%**	**100**	**806,000,000**	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	95	700,000,000	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	50	6,000,000	-
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50,000,000	-
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	50,000,000	-
					TOTAL PAGU	**655,912,010,000**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional`

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Klaten mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Adapun telaah program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Klaten terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi tersaji dalam tabel 3.1 berikut :

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Klaten	Program dalam Rencana Kerja Tahun 2023
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Program Pengelolaan Keuangan Daeral 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD Kabupaten Klaten

Tujuan merupakan hasil akhir *(results)* yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misinya melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan juga merupakan arah *(direction)* yang akan menunjukkan kemana tujuan *(destination)* yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Tujuan yang diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten adalah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator tujuan yaitu **Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan**..

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai BPKPAD Kabupaten Klaten adalah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasaran yaitu **Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. BPKPAD Kabupaten Klaten dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, utamanya di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagi masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara rinci Rencana kerja program, kegiatan dan Sub. Kegiatan BPKPAD Kabupaten Klaten tahun 2023 sebagaimana terebut dalam lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan Daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rencana Kerja BPKPAD ini menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah untuk selalu ditingkatkan, sehingga akan mengurangi ketergantungan dari pendapatan pemerintah pusat.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu mendapat perhatian terutama dalam hal rekonsiliasi aset dan inventarisasi barang milik daerah.
3. Perlunya peningkatan pemahaman OPD dalam hal penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan keuangan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten KLaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2023 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang;
2. Renja Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten KLaten Tahun 2023 memfokuskan pada pencapaian target indikator Program oleh karena itu seluruh elemen harus bekerja lebih optimal untuk pencapaian target tersebut.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
4. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Penyempurnaan terhadap aplikasi pengelolaan pendapatan daerah, tetap melakukan terobosan-terobosan metode pembayaran pajak daerah secara online maupun jemput bola, melakukan upaya penagihan piutang PBB dan piutang pajak lainnya, serta tetap melakukan intensifikasi penerimaan pajak daerah.
2. Pengelolaan aset daerah akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset yang bisa di akses secara online, serta tetap melakukan upaya pengamanan aset milik pemerintah daerah secara bertahap.
3. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan yang berlaku serta melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan, baik dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun penyusunan laporan keuangan.

Demikian Renja Tahun 2023 BPKPAD Kabupaten Klaten disusun, semoga target sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPAD Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan dapat mendukung visi Bupati Klaten yakni: "Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"

Klaten, Juli 2022
Kepala BPKPAD Kab. Klaten

Muh Himawan P., S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197610051996021004

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5.02	KEUANGAN								655,912,010,000					663,670,038,000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								19,845,314,324					21,280,827,000
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								31,214,000					32,480,000
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	3 dokumen	100 %	15,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	16,240,000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 laporan	100 %	15,607,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	16,240,000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,823,100,324					18,607,183,000
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya penghasilan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	87 orang/bulan	100 %	17,706,646,324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	18,486,012,000
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya penghasilan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 dokumen	100 %	116,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	121,171,000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								200,000,000					317,262,000
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Teradministrasinya barang milik daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	317,262,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								411,000,000					439,424,000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	15,810,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	52,701,000
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 paket	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	11,490,000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	52,701,000
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	8 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	10,540,000
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	12 laporan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	105,403,000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	12 laporan	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	159,158,000
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum BPKD Kabupaten Klaten	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1000 dokumen	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	31,621,000
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**275,000,000**					**493,531,000**
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya peralatan kantor yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 Unit	100 %	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	378,531,000
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya peralatan kantor yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	15,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya peralatan kantor yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	100,000,000
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**299,000,000**					**284,877,000**
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	4 Laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	4,216,000
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	12 laporan	100 %	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	200,265,000
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	12 laporan	100 %	105,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	80,396,000
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**806,000,000**					**1,106,070,000**
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya aset tetap yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	95 unit	100 %	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	990,022,000
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya aset tetap yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	50 Unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	7,220,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya aset tetap yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	1 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	52,701,000
5 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya aset tetap yang direncanakan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	60 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	56,127,000
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**631,752,728,831**					**636,533,968,000**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**1,311,610,000**					**2,433,624,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 dokumen	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	245,000,000
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 Dokumen	100 %	235,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	245,000,000
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	52 dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	36,891,000
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	52 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	52,701,000
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	52 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	10,540,000
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	52 dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	15,810,000
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 dokumen	100 %	131,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	801,060,000
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 dokumen	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	973,921,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya RKA OPD tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	120 orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	100 %	52,701,000
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**439,806,000**					**759,402,000**
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	12 dokumen	85 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	76,944,000
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	6 dokumen	85 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	20,027,000
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainny	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	12 dokumen	85 %	72,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	125,429,000
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	12 laporan	85 %	67,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	101,187,000
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	2 dokumen	85 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	43,215,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	7 dokumen	85 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	172,860,000
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	2 dokumen	85 %	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	37,945,000
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Realisasi belanja daerah optimal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	158 orang	85 %	89,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	181,795,000
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**805,668,000**					**1,393,399,000**
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	3 Laporan	3 bulan	65,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %	128,567,000
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	2 Dokumen	3 bulan	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %	210,805,000
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	1 Dokumen	3 bulan	53,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %	105,403,000
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	1 dokumen	3 bulan	551,651,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	100 %	790,520,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan – setelah TA berakhir)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan keuangan pemerintah daerah disusun tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100 %	102 Orang	3 bulan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan – setelah TA berakhir)	100 %	158,104,000
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**629,195,644,831**					**631,947,543,000**
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersalurkannya belanja transfer ke desa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	2 laporan	99 %	598,319,309,492	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	599,600,637,814
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersalurkannya belanja transfer ke desa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	12 laporan	99 %	16,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	16,800,000,000
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersalurkannya belanja transfer ke desa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	84.50 %	4 laporan	99 %	14,876,335,339	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA		Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	84.50 %	15,546,905,186
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**1,804,656,645**					**2,976,843,000**
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**1,804,656,645**					**2,976,843,000**
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 dokumen	100 %	92,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	289,858,000
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 dokumen	100 %	82,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	158,104,000
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	3 laporan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	527,014,000
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	3 laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	52,701,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	10 dokumen	100 %	742,261,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	837,122,000
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	2 laporan	100 %	79,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	158,104,000
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Barang Milik Daerah teregistrasi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100.00 %	930 orang	100 %	527,581,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	100.00 %	953,940,000
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**2,509,310,200**					**2,878,400,000**
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**2,509,310,200**					**2,878,400,000**
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 laporan	11 %	385,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	498,028,000
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	5 unit	11 %	659,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	709,571,000
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 laporan	11 %	158,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	224,902,000
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 laporan	11 %	306,326,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	336,058,000
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 Layanan	11 %	287,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	316,962,000
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 dokumen	11 %	685,217,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	763,876,000
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rasio PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 dokumen	11 %	16,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	17,181,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rasio PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	10.50 %	12 laporan	11 %	11,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio PAD	10.50 %	11,822,000
								TOTAL	**655,912,010,000**					**663,670,038,000**

Klaten, Juli 2022

Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN BPKPAD KLATEN

Muh Himawan P., SSTP, M.Si
NIP. 19781005 199602 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Nya atas tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , dimana dilakukan guna menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Klaten yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggran 2023.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Klaten, Juni 2022
KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN

SUGENG HARYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671020 199303 1 011

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar.....**i**

Daftar Isi..... **ii**

I. Pendahuluan.....1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 1
1.3. Maksud dan Tujuan..... 4
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..…..…… 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... ...8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah … 9
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD…….. 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……..……10

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah…….. 11
3.1. .Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ……..... 11
3.2. .Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 12

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah …… ……... 14

V. Penutup..... 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten. Dasar Penyusunan Renja 2023 ini dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan , yaitu : teknokratik, top down, bottom up partisipatif dan politis. Dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum musrenbang OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
28. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
52. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja 2023 adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Klaten tahun 2023.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah :

1. Memberikan landasan operasional acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
2. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Terciptanya efisiensi dan efektifitas anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Akhir RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3

BAB IV RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dengan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten 2021.

Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerjahasil atau keluaran yang direncanakan, diantaranya:

a. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan
d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Nasional

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Bakesbangpol tidak ada.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya Pepbatasan Kegiatan atau PPKM sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan
b. Adanya Mutasi sehingga anggaran gaji masih tersisa banyak

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPerangkat Daerah:

Pada beberapa kegiatan, kinerja kegiatan tidak dapat memenuhi target. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja program di Bakesbangpol Daerah Kabupaten Klaten.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

a. Melakukan inovasi kegiatan yang tidak memerlukan tatap muka langsung
b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak ada kelebihan pagu gaji dan tunjangan ASN

Secara terinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021 Bakesbangpol Kabupaten Klaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam	Target Capaian Kinerja Progam /kegiatan/ sub kegiatan (akhir Periode RenstraPerangkat Daerah)	Realisai Target Kinerja Hasil Progam dan Keluaran Kegiatan dan sub kegiatans/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Progam, kegiatan dan sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Progam, kegiatan dan sub Kegiatan (renja perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S/d tahun berjalan	
									Target renja 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Progam dan dan Kegiatan tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0			

8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan									
8	**01**	**01**	**2.02**	**01**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Gaji dan Tunjanagan ASN terbayar**			**12**	**12**	**100**				
8	**01**	**01**	**2.02**	**02**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**Frekuensi Perjalanan dalam daerah**			**230**	**20**	**3,33**				
						Gaji dan Tunjangan THL administrasi Terbayar			**48**	**48**	**100**				
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat**									
8	**01**	**01**	**2.06**	**01**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan			**10**	**8**	**80**				
8	**01**	**01**	**2.06**	**02**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jenis Alat Tulis Kator Tersedia			**49**	**48**	**80**				
8	**01**	**01**	**2.06**	**05**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**Jenis Cetak dan Penggandaan**			**2**	**2**	**87**				
8	**01**	**01**	**2.06**	**06**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan**	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia			**1680**	**740**	**84**				
8	**01**	**01**	**2.06**	**08**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Makanan dan minuman tersedia**			**300**	**80**	**73**				

8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar daerah			300	74	21			
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim			750	550	65.6			
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar			48	48	76.62			
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor THL Kebersihan Kantor, Jenis Peralatan dan bahan kebersihan kantor			12 18	12 9	95.16			
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas			7	8	83			
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Honor THL kemananan			36	36	97,89			
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung			2	2	77.649254			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan								

						kebangsaan									
8	**01**	**02**	**2.01**	**01**	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**								**100 %**	**100 %**	**100 %**
8	**01**	**02**	**2.01**	**03**	**Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	**Kegiatan**			**3 kali**	**3 kali**	**85**				
8	**01**	**02**	**2.01**	**05**	**Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**										
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**										
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										

8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kegiatan			4	3	79,49			
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik Terfasilitasi Bantuan Keuangan			9	9	100 %			
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan			1	1	100.00 %			
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan			4	0	0			
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									

8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan			2	2	100			
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah koordinasi kewaspadaan Dini			12	12	63			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Politik dan Kewaspadaan Nasional, serta Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat adalah memberikan pembinaan dan layanan fasilitasi bantuan hibah bagi partai politik dan ormas. Selain itu dilaksanakannya pelayanan pendataan dan pencatatan bagi organisasi masyarakat. Sedangkan pada bidang wawasan dan ideologi bangsa dilaksanakannya sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan bela Negara dengan sasaran kegiatan seluruh elemen masyarakat.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

Formula Indikator dan Sumber Referensi	SPM	IKK	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Proyeksi
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Potensi Konflik sosial yang terselesaikan dibagi jumlah potensi konflik X 100			%	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
Jumlah konflik sosial yang terjadi / jumlah potensi konflik yg terdeteksi X 100			%	0	0	0	80	80	85	85	0	0	85	85	
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memperoleh pembinaan dan pengawasan / jumlah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum X 100			%	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	
Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/ jumlah kelompok masyarakat X 100			%	0	1	1	4	7	11	13	1	0	12	12	
Jumlah sekolah (SMA/ sederajat) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/ jumlah			%	0	0	0	4	7	10	15	0	0	12	12	

sekolah (SMA/ sederajat) X 100													
Jumlah sekolah SMP dan SMA Sederajat) yang dibina/ jumlah sekolah SMP dan SMA Sederajat) X 100			**%**	**0**	**0**	**6**	**12**	**18**	**25**	**31**	**0**	**0**	**10**	**12**
Jumlah (PKUB terbentuk / jumlah desa X 100) + Tahun N-1			**%**	**0**	**0**	**34**	**67**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**
Jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik di bagi daftar pemilih pemula X 100			**%**	0	0	2	4	6	8	10	**10**	**0**	**12**	**12**
Parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu dibagi jumlah parpol yang memperoleh bantuan keuangan X 100			**%**	50	60	65	70	75	80	80	**60**	**0**	**80**	**80**
Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi kebutuhan dalam 1 tahun dikali 100			**%**	100	100	100	100	100	100	100	**100**	**50**	**100**	**100**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1). Beberapa target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam dokumen RPJMD belum tercapai sesuai yang direncanakan. Namun bukan berarti hal ini merupakan ketidakberhasilan BAKESBANGPOL dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang Pemerintahan Umum. Bakesbangpol terus berupaya untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian target.

2). Beberapa permasalahan yang menjadi isu penting dan terus mendapat perhatian diantaranya adalah masih tingginya angka Kasus Penggunaan Narkoba dan Penyimpangan Ideologi Pancasila. Permasalahan lain yang sedang dihadapi di tahun ini yaitu adanya pandemic Covid-19 sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

3). Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Berdampak Pada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

a) Kinerja Bakesbangpol tidak akan tercapai maksimal karena adanya kegiatan yang kemungkinan tidak tercapai 100% sehingga akan mempengaruhi pencapaian visi misi (kepala daerah).

b) Keterbatasan Anggaran Karena adanya Refokusing untuk penanggulangan Covid -19 mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam memenuhi target kinerja.

4). Tantangan dan Peluang Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

- Kerjasama dan dukungan sektor lain masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan

kesehatan merupakan tanggung jawab Bakesbangpol saja.

- Adanya PPKM sehingga membatasi kegiatan untuk dilaksanakan.

b. Peluang

- Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
- Adanya dukungan dari Pemerintah melalui SE Permendagri untuk pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemerintahan Umum
- Adanya dukungan dari Bakesbangpol Provinsi dalam melaksanaakan kegiatan di urusan yang ditangani oleh Bakesbangpol Kabupaten.

5). Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan OPD Tahun Anggaran 2021 adalah

a. Prioritas kegiatan Kesbangpol yang mendukung prioritas daerah tahun 2021 adalah Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba. Beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan OPD lain seperti kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba maupun kegiatan lain bidang kesatuan bangsa dan politik seperti sosialisasi wawasan kebangsaan yang menjadi tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar dilaksanakan koordinasi sehingga tidak overlaping sasaran.

b. Adanya wabah virus covid 19 di seluruh dunia, termasuk di wilayah Kabupaten Klaten, sehingga menghambat pencapaian target kinerja OPD, Sehingga perlu adanya inovasi agar dapat menjalakan semua kegiatan agar target kinerja dapat dipenuhi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam rencana pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Klaten tahun 2023 terdiri dari 6 program

dan 58 kegiatan, Ada beberapa program yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan bahwa program tersebut dilaksanakan oleh OPD

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			100%	5185494000					**6,95,972,000**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Kab Klaten	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditunjang	100	**3,073,756,000**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditunjang	100	**5,135,082,500**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran	100%	**10,000,000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran	1	**0**
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Klaten	jumlah rencana kerja tersusun	1dokumen	**10,000,000**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Klaten	jumlah rencana kerja tersusun	1dokumen	0
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	100	**2,717,397,000**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan	100	**4,754,912,546**
a	Penyediaan Gaji Dan	Kab	Gaji dan	12	2,642,397,000	Penyediaan Gaji Dan	Kab Klaten	Gaji dan Tunjangan	12	**4,690,132,258**

	Tunjangan ASN	Klaten	Tunjangan ASN terbayar			Tunjangan ASN		ASN terbayar		
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Klaten	Frekwensi Perjalanan Dalam Daerah dan Gaji dan Tunjangan THL Administrasi Terbayar	48	75,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Klaten	Frekwensi Perjalanan Dalam Daerah dan Gaji dan Tunjangan THL Administrasi Terbayar	48	**64,780,288**
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	**131,446,000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	**156,448,342**
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Klaten	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan	10	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Klaten	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan	10	**1,132,242**
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	49	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	49	**18,575,000**
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Klaten	Jenis Cetak dan Pengadaan	2	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Klaten	Jenis Cetak dan Pengadaan	2	**11,230,700**
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Klaten	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	1680	4,440,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Klaten	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	1680	1,502,400
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Klaten	Makanan dan Minuman Tersedia	220	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Klaten	Makanan dan Minuman Tersedia	220	**13,250,000**
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab Klaten	Frekwensi Perjalanan Luar Daerah	77	100,006,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab Klaten	Frekwensi Perjalanan Luar Daerah	77	**110,758,000**

3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	**84,619,000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	**92,750,288**
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Klaten	Surat Terkirim	750	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Klaten	Surat Terkirim	750	1,440,000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Klaten	Jenis Rekening Terbayar	48	23,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Klaten	Jenis Rekening Terbayar	48	36,050,000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Klaten	Honor THL Kebersihan Kantor	12	60,419,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Klaten	Honor THL Kebersihan Kantor	12	55,260,288
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	**130,294,000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	**130,971,324**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab Klaten	Kendaraan Dinas	7	25,479,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab Klaten	Kendaraan Dinas	7	**130,971,324**
	Pemeliharaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Mebel terpelihara	4 Unit	2,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Mebel terpelihara	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya terpelihara	4 Unit	2,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya terpelihara	0	0

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya terehabilitasi/ terpelihara	2	98,135,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Laiinya terehabilitasi/ terpelihara	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2	2,680,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	0	0
		Kab Klaten				0	Kab Klaten	0		
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Klaten	Persentase urusan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di	100	**56,517,000**	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Klaten	Persentase urusan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di	100	**8,800,000**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Klaten	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	1	**56,517,000**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Klaten	Prosentase tokoh agama , tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	1	**8,800,000**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1 dokumen	5,000,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1 dokumen	3,800,000

						Kebangsaan				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinekka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Klaten	kegiatan	3	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinekka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Klaten	kegiatan	3	5,000,000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1 kali	1,517,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	0	0
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik	Kab Klaten	Persentase urusan politik yang didukung pemerintah daerah	100	**1,121,213,000**	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik	Kab Klaten	Persentase urusan politik yang didukung pemerintah daerah	100	**1,317,779,500**

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	3 Kali	5,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	3 Kali	**1,317,779,500**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	3 Kali	1,108,213,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	3 Kali	**1,317,779,500**

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	9 Kali	5,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	0	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah		3,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Klaten	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	0	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase urusan organisasi masyaraat yang dibina dan diawasi di	100	**431,309,000**	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	Persentase urusan organisasi masyaraat yang dibina dan diawasi di daerah	100	**260,000,000**

			daerah							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kab Klaten			**431,309,000**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Kab Klaten	0	0	**260,000,000**
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Progam Kerja Tahunan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tersusun	1 dokumen	4,000,000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Progam Kerja Tahunan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tersusun	0	0
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Kali	412,309,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Kali	**260,000,000**
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Kab Klaten	Jumlah Monitoring dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Kali	15,000,000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Kab Klaten	Jumlah Monitoring dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	0	**0**

	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Kemasyarakatan		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab Klaten	Persentase urusan ketahanan ekonomi sosial dan budaya yang dibina dan dikembangkan di daerah	100	**91,220,000**	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab Klaten	Persentase urusan ketahanan ekonomi sosial dan budaya yang dibina dan dikembangkan di daerah	100	**19,350,000**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab Klaten			**91,220,000**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab Klaten	0	0	**19,350,000**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Rencana Aksi P4GN tersusun	1 dokumen	4,220,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Rencana Aksi P4GN tersusun	1 dokumen	2,000,000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Kali	75,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Kali	7,600,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Kali	10,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Kali	4,750,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Monitoring dan Pelaporan di Bidang FKUB dan P4GN terlaksana	1 Kali	2,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Monitoring dan Pelaporan di Bidang FKUB dan P4GN terlaksana	1 Kali	5,000,000

	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kab Klaten	Persentase Pelaksanaan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan konflik sosial di daerah	100	**411,479,000**	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kab Klaten	Persentase Pelaksanaan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan konflik sosial di daerah	100	**224,960,000**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab Klaten			**411,479,000**	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab Klaten	0	0	**224,960,000**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial di Daerah tersusun	1 dokumen	5,000,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial di Daerah tersusun	0	0

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Rumusan Kebijakan Kewaspadaan Daerah Tersusun	1 dokumen	5,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Rumusan Kebijakan Kewaspadaan Daerah Tersusun	0	0
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kali	55,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Klaten	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan		Jumlah Frekuensi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Terlaksana	12 Kali	91,479,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	0	Jumlah Frekuensi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Terlaksana	0	0

	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah tersusun	1 Kali	5,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah tersusun	0	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana	12 Kali	250,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0	Jumlah Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana	12 Kali	203,000,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2023 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan
   (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2023 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN Rencana Kerja 2021 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah 2
4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	**Kebijakan Provinsi**	**Prioritas Pembangunan Kab Klaten**	**Program dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja 2023**
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya politik 2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. 4. Pembinaan dan Pengembangan

			Ketahanan Ekonomi, sosial, dan budaya 5. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial serta pendidikan politik masyarakat

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sesuai Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 telah ditetapkan bahwa sasaran Bakesbangpol Kabupaten Klaten adalah Terkendalinya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku, ras dan agama dan

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menuntun pada hasil-hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang ditetapkan, tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Kebijaksanaan pembangunan di bidang Kesatuan bangsa dan politik diarahkan untuk menciptakan suasana daerah yang sehat dan dinamis bagi berlangsungnya proses pembangunan bidang lainnya. Untuk itu ditetapkan beberapa program kegiatan. Adapun rencana kerja Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada table 3.4. berikut :

Tabel 4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**6,965,972,000**					**6,602,761,000**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,135,082,500**					**3,189,984,000**
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,754,912,546**					**2,792,397,000**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan administrasi Keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	39 Orang /bul	an100 %	4,690,132,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,642,397,000

8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pemenuhan administrasi Keuangan perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	12 dokumen	100 %	64,780,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	150,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**156,448,342**					**252,968,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	3 Paket	100 %	1,132,242	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	24 Paket	100 %	18,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,528,000

8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	24 Paket	100 %	11,230,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	48 dokumen	100 %	1,502,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	4,440,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	24 Laporan	100 %	13,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
		Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
						Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	

8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	50 Laporan	100 %	110,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	185,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,750,288**					**89,619,000**
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	750 Laporan	100 %	1,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	1,000,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	36 Laporan	100 %	36,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	28,200,000

8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	12 Laporan	100 %	55,260,288	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	60,419,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**130,971,324**					**55,000,000**
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	7 Unit	100 %	130,971,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	55,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**8,800,000**					**100,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**8,800,000**					**100,000,000**

8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika		Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Orang		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

							dan Sejarah Kebangsaan											
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target Capaian Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Sumber Dana**		**Target Capaian Kinerja**		**Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)**
										Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**				**Tolok Ukur**	**Target**	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**1,317,779,500**					**2,179,979,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**1,317,779,500**					**2,179,979,000**

8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Politik di Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.00 % 4.00 %	731013 Oran	g 100 %	1,317,779,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	65.00 % 4.00 %	2,179,979,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**260,000,000**					**632,798,000**
8	**01**	**04**	**2.0**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**260,000,000**					**632,798,000**

			1																
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya kebijakan Persentase Kebijakan Teknis Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	30 Orang	100 %	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	100.00 %	632,798,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**19,350,000**					**150,000,000**	
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**19,350,000**					**150,000,000**	
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan				1 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000	

					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun											
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Orang		7,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,000,000

8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang		4,750,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				0
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan		5.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum				50,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN**								**224,960,000**					**350,000,000**

					FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**224,960,000**					**350,000,000**
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase deteksi dini potensi konflik sosial Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya kebijakan Teknis Kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80.00 % 100.00 %	12 dokumen	100 %	224,960,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase deteksi dini potensi konflik sosial Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	80.00 % 100.00 %	350,000,000
												TOTAL	**6,965,972,000**					**6,602,761,000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.

Prioritas kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menekan konflik sosial dan penanganan konflik sosial. Beberapa kegiatan yang juga dilaksanakan OPD lain seperti kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba maupun kegiatan lain bidang kesatuan bangsa dan politik seperti sosialisasi wawasan kebangsaan yang menjadi tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dilaksanakan koordinasi sehingga tidak overlaping sasaran.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD

maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindak lanjut

Rencana Kerja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 6.965.972.000,- untuk membiayai 5 program.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten Tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

Klaten, Juni 2022

KEPALA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLATEN

SUGENG HARYANTO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671020 199303 1 011

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLATEN

Tahun 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN
Jl. Andalas no.3 Klaten, telp. (0272) 328564

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja
c. Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Inspektorat Kabupaten Klaten;
c. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
i. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
j. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
n. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
q. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
u. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
x. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
y. Kecamatan Klaten Utara;
z. Kecamatan Klaten Tengah;
aa. Kecamatan Klaten Selatan;
bb. Kecamatan Kalikotes;
cc. Kecamatan Ngawen;
dd. Kecamatan Kebonarum;
ee. Kecamatan Wedi;
ff. Kecamatan Jogonalan;
gg. Kecamatan Gantiwarno;
hh. Kecamatan Prambanan;
ii. Kecamatan Manisrenggo;
jj. Kecamatan Kemalang;
kk. Kecamatan Karangnongko;
ll. Kecamatan Jatinom;

mm. Kecamatan Karanganom;
nn. Kecamatan Tulung;
oo. Kecamatan Polanharjo;
pp. Kecamatan Delanggu;
qq. Kecamatan Juwiring;
rr. Kecamatan Wonosari;
ss. Kecamatan Ceper;
tt. Kecamatan Pedan;
uu. Kecamatan Karangdowo;
vv. Kecamatan Cawas;
ww. Kecamatan Trucuk; dan
xx. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN, Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,
Cap ttd
SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Kerja Perangkat (Renja) Daerah BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan program tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Kepala BPBD Kabupaten Klaten sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.

Kritik dan saran kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini untuk lebih meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Klaten.

Klaten, Juli 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KLATEN

SRI WINOTO,SH

NIP. 196302221990031007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB II PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN **38**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 39

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V : PENUTUP **50**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah menyusun RPJP Daerah Kabupaten Klaten dan RPJM Daerah Kabupaten Klaten. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Klaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2021 -2026 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Klaten. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif.

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) BPBD Klaten tahun 2023 disusun untuk lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksud untuk tersedianya dokumen awal perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencaa Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perubahan - perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman/acuan awal perencanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Menjabarkan visi, misi, tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
3. Mengakomodir hasil musrenbang.
4. Tersedianya bahan evaluasi kinerja tahun 2023.
5. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2023, mengacu pada APBD Kabupaten Klaten. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada, BPBD Kabupaten Klaten telah melaksanakan 28 sub kegiatan melalui 2 program yang ada dengan anggaran sebesar Rp. 7.613.596.294,- yang berasal dari APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023 pada Tabel 2.1.

Pada Tabel 2.1 memperlihatkan realisasi dari program/kegiatan yang dibandingkan dengan rencana target kinerja hasil/keluaran. Realisasi dari program/kegiatan ada yang tepat memenuhi target rencana hasil/keluaran yang direncanakan, namun ada juga program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat tinggi adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam.

Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan predikat sedang adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Belum terpenuhinya sumberdaya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana perkantoran baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
4. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
5. Motivasi yang tinggi dari aparatur BPBD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program/kegiatan

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun …. (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota ……

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1		Urusan Trantibumlinmas sub urusan bencana									

1	01				Bidang Urusan bencana									
1	01	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah		85	88	88	100	**100**	50	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						**85**	85	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun						4	4	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP						5	5	
1	01	01	01		Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	**100**	300	
1	01	01	01	01	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	12	12	12	12	100	30	54	
1	01	01	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan	Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60	60	60	12	20	12	84	

					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
													-	
1	01	01	02		Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu					#DIV/0!	**100**	100	
1	01	01	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor Tersedia	30	30	30	30	100	30	90	
1	01	01	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK tersedia	30	30	30	30	100	30	90	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak Penggandaan	6	6	6	6	100	30	42	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jenis Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan tersedia	2	2	2	1	50	6	9	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman tersedia	30	30	30	30	100	12	72	

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	80	80	80	80	100	15	175	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	100	100	100	**100**	100	100	300	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Tersedia	1	1	1	1	100	3	5	
					Pengadaan mebel	jumlah mebel yg diadakan						3	3	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**						**100**	100	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	700	700	700	**700**	100	100	1.500	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Terbayar	3	3	3	3	100	12	18	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia	84	84	84	84	100	3	171	
						THL Pembersih	6	6	6	6	100	6	18	

					Penyediaan Jasa Umum Kantor	THL Adminstrasi Kantor	8	8	8	8	100	**7**	23	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**						**100**	100	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara	3	3	3	3	100	29	35	
						THL Pengemudi	3	3	3	3	100	3	9	
					Pemeliharaan Mebel	Jenis Mebeleur Terpelihara	0	0	0	0	0	0	-	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Gudang Serta Shelter	5	5	5	5	100	0	10	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Tersedia	7	7	7	7	100	7	21	
						Jumlah THL Pengamanan Kantor	10	10	10	10	100	10	30	
					Progam penanggulangan bencana								-	

					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	**prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancanam**					**72,78**	73	
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Komunitas Sekolah Sungai	3	3	3	3	100	1	7	
						Sekolah Siaga Bencana	100	100	100	100	100	5	205	
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**					#DIV/0!	**10**	10	
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota tersusun	1	1	1	1	100	0	2	
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Risiko Bencana	350	350	350	350	100	1420	2.120	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peralatan Kebencanaan Terpelihara	5	5	5	5	100	50	60	

					Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Forum Penanggulangan Bencana	1	1	1	1	100	1	3	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Desa Tangguh Bencana	2	2	2	2	100	5	9	
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Buku Data Tahunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	2	2	2	100	1	5	
						Pelatihan Penanganan Pasca Bencana	1	1	1	1	100	4	6	
						Pembangunan Dinding Penahan Tanah Sungai Kali Dengkeng	2	2	2	2	100	0	4	
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengembangan dan Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	3	3	3	3	100	12	18	
					Penyusunan rencana kontijensi	jumlah rencana kontijensi sampai dinyatakan sampai dinyatakan sah/legal						1	1	
					Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah kegiatan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana						1	1	
					Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	jumlah penyusunan dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal						1	1	

					Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana	**prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana**			..			100	100	
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dana yang tesedia untuk Penanganan Darurat Bencana	26	26	26	26	100	1	53	
						Jumlah Dropping Air	800	800	800	800	100	800	2.400	
					Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Pemantauan dan Operasional Penanganan Darurat	26	26	26	26	100	177	229	
						Organisasi yang diberikan bantuan hibah	1	1	1	1	100	1	3	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bahan Logistik Tersedia	13	13	13	13	100	13	39	

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 tersebut diatas, maka perlu diambil Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target tersebut yaitu :

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran kembali dan diusulkan untuk tahun berikutnya.
2. Mengoptimalkan anggaran dan SDM yang ada dalam rangka pencapaian target kinerja program.
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Klaten
4. dalam rangka untuk pencapaian target kinerja program.
5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana agar tercapai target kinerja program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
e. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 6 perlindungan masyarakat sub urusan bencana meliputi penanggulangan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana daerah perjenis layanan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan		5.05	10	10	10	5,05	3	10	10	
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	pelayananan penyelamatan dan evakuasi korban		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	pelayanan informasi kebencanaan		40	40	50	50	40	20	50	55	
	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi			60	60	60	60	60	30	60	60	

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan yang mana Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari:

a. pelayanan informasi rawan bencana;
b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

Nomor	Jenis layanan dasar	Indicator Pencapaian	Target	Rancangan APBD
1	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	3.400 orang	804.000
2	pelayananan Pencegahan dan kesiapsiagaan	jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.812 orang	867.586.800
3	pelayananan penyelamatan dan evakuasi korban	jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.181 orang	4.400.906.063

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Koordinasi antara BPBD Kabupaten Klaten dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, dan Penanggulangan Bencana melalui Rakornas, pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia, bantuan penanganan bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Permasalahan yang dihadapi

   Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, diantaranya adalah :

   a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana. seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.
   b. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang penanggulangan bencana
   c. Belum adanya Sistem Informasi bencana sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.
   d. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan bencana.
   e. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan bencana.
   f. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
   g. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur.
3. Dampak yang dihadapi terhadap pencapaian Visi dan Misi Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dampak terhadap pencapaian visi dan misi yaitu:

   a. Tidak tercapainya target pelayanan wajib dasar standar pelayanan minimal (SPM)

   b. Terhambatnya capaian kinerja di bidang penanggulangan bencana , nilai Indeks Ketahan Dearah (IKD), pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dan pelayananan pencarian penyelamatan dan evakuasi korban.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat terselenggara tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dengan optimal.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi :
   a. Faktor internal
      1. Kekuatan

         Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program – program kegiatan.

Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara BPBD dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

2. Kelemahan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan.

Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang bencana.

Belum adanya Sistem Informasi bencana alam sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat.

b. Faktor Eksternal Peluang (*Opportunities)*

1. Peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana sangat baik.
2. Teknologi dan sistem informasi penanggulangan bencana yang semakin baik.
3. Adanya program CSR dari pihak swasta untuk penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, bencana dan pasca bencana.

Ancaman **(*Threats*)**

1. Kondisi geologi dan klimatologi wilayah yang rawan gempa bumi dan cuaca ekstrim.
2. Pembangunan fisik yang semakin pesat sehingga mengurangi ruang terbuka publik sebagai jalur dan sarana evakuasi saat terjadi bencana.
3. Banyaknya perumahan di bantaran sungai.

5. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis fungsi dan ketugasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka selanjutnya dapat disusun rekomendasi dan catatan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul stakeholder yang ada baik internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Membentuk forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang beranggotakan pemerintah daerah, LSM, akademisi, PMI, media, kelompok agama dan lainnya, dalam upaya percepatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Mengedukasi masyarakat sehingga dapat berpatisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kampung tangguh bencana terutama pada kawasan rawan bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
5. Meningkatkan kompetensi personil kebencanaan baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan pemerintah provinsi;

6. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi ke seluruh stakeholder;
7. Meningkatkan fasilitasi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan bagi korban terdampak;
8. Meningkatkan kerjasama dengan swasta melalui program CSR baik pada fase pra bencana, bencana dan pasca bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan Rencana Kerja (Renja) RKPD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Perangkat Daerah dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan bencana daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Catatan Penting**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**5.218.652.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**5.378.775.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	85 %	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	85 %	48.906.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 Dokumen	28.906.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	20.000.0030	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.710.452.139	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100 %	3.708.372,139	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	3.680.452.139	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	3.680.452.139	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	27.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	217.199.861	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	304.057.861	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.199.861	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.057.861	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	56.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	80 %	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Klaten	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	80 %	114.516.000	
	Pengadaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	49.500.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	65.016.000	

			Bangunan Lainnya yang Disediakan			atau Bangunan Lainnya		yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	435.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Klaten	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100 %	520.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.000.000	
		Kab Klaten	Honorarium THL Kebersihan	6 Orang/bulan	83.000.000		Kab Klaten		6 Orang/bulan	83.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Klaten	honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	8 Orang/bulan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Klaten	honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	11 Orang/bulan		
		Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	130.000.000		Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	2 Laporan	225.000.000	

			yang Disediakan					Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	706.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Klaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	682.923.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	472.000.000	
		Kab Klaten	Jumlah Honor THL Pengemudi	3 orang/bulan	95.000.000						
	Pemeliharaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Mebel terpelihara	3 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab Klaten	Jumlah Mebel terpelihara	3 Unit	5.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terehabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terehabilitasi	1 Unit	29.973.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh	7 Unit	33.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	33.000.000 142.000.000	

			abilitasi								
		Kab Klaten	Pembayaran gaji THL Keamanan	10 orang/bulan	142.000.000		Kab Klaten	Pembayaran gaji THL Keamanan	10 orang/bulan		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab Klaten	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100 %**	**2.205.000.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kab Klaten	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100 %**	**2.349.850.000**	
		Kab Klaten	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**72,78 %**			Kab Klaten	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**72,78 %**		
		Kab Klaten	**Persentase kelompok relawan bencana yang aktif**	**50 %**			Kab Klaten	**Persentase kelompok relawan bencana yang aktif**	**50 %**		
		Kab Klaten	**Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi**	**61 %**			Kab Klaten	**Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi**	**61 %**		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang	72,8 %	150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh		150.000.000	

			memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancanam					informasi rawan bencana sesuai jenis ancanam			
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab Klaten	jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi informasi dan edukasi rawan bencana kab scr tatap muka kpd penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5 Desa	100.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab Klaten	jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi informasi dan edukasi rawan bencana kab scr tatap muka kpd penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	5 Desa	100.000.000 50.000.000	
		Kab Klaten	fasilitasi komunitas sekolah sungai	1 Komunitas	50.000.000		Kab Klaten	fasilitasi komunitas sekolah sungai	1 Komunitas		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 %	1.295.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terlayani terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		1.309.850.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten			0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten				

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.420 Orang	200.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.420 Orang	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Paket	100.000.000 25.000.000	
		Kab Klaten	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terpelihara	5 Jenis	25.000.000		Kab Klaten	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terpelihara	5 Jenis		
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Jumlah koordinasi antar stake holder	1 dokumen 1 Kegiatan	250.000.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Jumlah koordinasi antar stake holder	1 dokumen 1 Kegiatan	262.000.000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab Klaten	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Desa	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Kab Klaten	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan	4 Desa	200.000.000	

			dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Kesiapsiagaan		Kesiapsiagaan Bencana			
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	dokumen buku data tahunan bencana	1 Dokumen	90.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	dokumen buku data tahunan bencana	1 Dokumen	90.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	290.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	292.850.000	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	90.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	60 Orang	50.000.000	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab Klaten	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	60 Orang	50.000.000	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab Klaten	**prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana**	**100 %**	**760.000.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Kab Klaten	**prosentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana**	**100 %**	**760.000.000**	
		Kab Klaten	**jumlah droping air yang diberikan dalam respon cepat**	**800 Tangki**			Kab Klaten	**jumlah droping air yang diberikan dalam respon cepat bencana**	**500 Tangki**		760.000.000

			bencana kekeringan					**kekeringan**			
		Kab Klaten	**SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat**	**1 Dokumen**			Kab Klaten	**SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat**	**1 Dokumen**		
		Kab Klaten	**dana siap pakai**	**1 Paket**			Kab Klaten	**dana siap pakai**	**1 Paket**		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	177 Kejadian	125.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	177 Kejadian	125.000.000 75.000.000	
		Kab Klaten	Hibah SAR	1 Kegiatan	75.000.000		Kab Klaten	Hibah SAR	1 Kegiatan		
		Kab Klaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	13 jenis	180.000.000		Kab Klaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	13 jenis	180.000.000	
	Aktivasi Sistem Komando	Kab Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	30.000.000	Aktivasi Sistem Komando	Kab Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan	2 Laporan	30.000.000	

	Penanganan Darurat Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Penanganan Darurat Bencana		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab Klaten	Persentase organisasi kebencanaan yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	1	130.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab Klaten	Persentase organisasi kebencanaan yang terlibat dalam penataan sistem penanggulangan bencana	1	130.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	20.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	20.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Klaten	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	30.000.000	410.000.000
		Kab Klaten	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	80.000.000		Kab Klaten	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	80.000.000	
	JUMLAH				***7.553.652.000***					***7.728.625.000***	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan melalui Forum Perangkat Daerah. Beberapa usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana sebagian dapat terakomodasi pada perencanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023, namun sebagian belum dapat terakomodasi karena tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksi penyelenggaraan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program penanggulangan bencana sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Tawang Rejo Kec Bayat	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Sengon Prambanan	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Tanwang rejo juwiring	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Juwiran kec Juwiring	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Pandes Kec Wedi	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Karang Kec Delanggu	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Sidorejo Kec Kemalang	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Menden Kec Kebonarum	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Gaden Kec Trucuk	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Pondok Kec Karanganaom	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	

	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Sidowarno Kec Wonosari	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Ngawen Kec Ngawen	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Tarubasan Kec Karanom	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desab Karangturi Kec Gantiwarno	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Kendaldari Kec Kemalang	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa minjung Kec Ngawen	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Bogor Cawas	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa daleman Kec tulung	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa manjungan Kec Ngawen	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Gondangsari Kec Juwiring	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Sidwayah Kec Polanharjo	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Tibayan Kec Jatinom	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	DEsa Malangjiwan Kec Kebonarum	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Gondang Kec Kebonarum	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	

	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Sabrang Kec Delanggu	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Gadungan Kec Wedi	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Brangkal Kec Karamnganom	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Dukuh Kec Bayat	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Krecek Kec Delanggu	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Gesikan Kec Gantiwarno	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa cawan Kec Jatinom	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	
	sub keg pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	Desa Mireng Trucuk	pelatihan mitigasi sosialisasi bencana	50 peserta	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang Nomr 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM kesatu (2005-2009), RPJM kedua (2010-2014), RPJM ketiga (2015-2019), dan RPJM keempat (2020-2025).

Pembangunan dalam RPJMN ketiga (2015-2019) diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN (2015-2019) disusun sebagai penjabaran visi, misi dan agenda pembangunan (NAWACITA) Presiden terpilih.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMN (2015-2019) melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum penanggulangan bencana adalah *mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana* yang dilaksanakan melalui strategi :

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

Program kerja dalam rencana kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Klaten	Program Dalam Renja 2023
Membangun lingkungan hidup, meningkatakan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pematapan pertumbuhan dan ketahanan eknomi secara berkelanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Program Penanggulangan Bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sedangkan sasaran stratejik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian program yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (Performance Plan). Adapun tujuan stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yaitu Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran stratejik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2023
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92 indeks
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase kelurahan/desa tangguh bencana	4 %
		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

Unit Organisasi : 1.050.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.050.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**7.728.625.000**					**11.741.449.000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.378.775.000**					**6.051.449.000**
1	**05**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48.906.000**					**50.000.000**
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	3 Dokumen	100 %	28.906.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30.000.000

1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	5 laporan	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20.000.000
1	**05**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.708.372.139**					**4.047.949.000**
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	27 Orang/Bul	an100 %	3.680.452.139	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.977.949.000

1	05	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	2 Dokumen	100 %	27.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	70.000.000
1	**05**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**304.057.861**					**296.000.000**
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 paket	100 %	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35.000.000
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 Paket	100 %	38.057.861	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	50.000.000

1	0 5	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 paket	100 %	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	44.000.000
1	0 5	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.000.000
1	0 5	0 1	2,0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	12 Laporan	100 %	56.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	70.000.000

1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	12 Laporan	100 %	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	90.000.000
1	**05**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**114.516.000**					**170.000.000**
1	05	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	3 Unit	100 %	49.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	70.000.000
1	05	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 Unit	100 %	65.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100.000.000
1	**0**	**0**	**2,0**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**520.000.000**					**477.500.000**

	5	**1**	**8**															
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	7.500.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	12 Laporan	100 %	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000
1	05	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	12 laporan	100 %	118.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	140.000.000

1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	12 laporan	100 %	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130.000.000
1	**05**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**682.923.000**					**1.010.000.000**
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	29 Unit	100 %	472.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	705.000.000
1	05	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	2 unit	100 %	5.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.000.000

1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	1 unit	100 %	29.973.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100.000.000
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	100 %	7 unit	100 %	175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.000.000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**2.349.850.000**					**5.690.000.000**
1	**05**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**150.000.000**					**200.000.000**

1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Prambanan, Sengon Kab. Klaten, Bayat, Talang Kab. Klaten, Cawas, Bogor Kab. Klaten, Trucuk, Gaden Kab. Klaten, Juwiring, Juwiran	51 % 62 % 73 % 100 %	500 orang	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	200.000.000
1	**05**	**03**	**2,02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**1.309.850.000**					**2.665.000.000**

1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	51 % 62 % 73 % 100 %	1420 orang	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	500.000.000

1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	10 Unit	100 %	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	545.000.000

1	05	03	2,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah dokumen analisis resiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	1 dokumrn	100 %	262.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	400.000.000

1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Wedi, Pesu Kab. Klaten, Trucuk, Kalikebo Kab. Klaten, Karangnongko, Demakijo Kab. Klaten, Wonosari, Kingkang	51 % 62 % 73 % 100 %	4 kawasan	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	200.000.000

1	05	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah dokumen penanganan pasca bencana kab/kota memalului pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstrukai pasca bencana (R3P)	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	2 dokumen	100 %	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	500.000.000

1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	30 Orang	100 %	292.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	350.000.000

1	05	03	2,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	51 % 62 % 73 % 100 %	1 Dokumen	100 %	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	100.000.000

1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Terpenuhinnya layanan informasi kebencanaan Kab/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	100 Orang	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	70.000.000
1	**05**	**03**	**2,03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**760.000.000**					**2.675.000.000**

1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Terlayaninya warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	1 Dokumen	100 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	1.100.000.000

1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Terlayaninya warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	117 Orang	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	750.000.000

1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayaninya warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 % 62 % 73 % 100 %	117 Orang	100 %	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	750.000.000

1	05	03	2,03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlayaninya warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi saat masa tanggap darurat bencana	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	51 % 62 % 73 % 100 %	2 Laporan	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	51 % 62 % 73 % 100 %	75.000.000
1	**05**	**03**	**2,04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**130.000.000**					**150.000.000**

1	05	03	2,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	73 % 62 % 72.8 % 100 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73 % 62 % 72.8 % 100 %	50.000.000

1	05	03	2,04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	73 % 62 % 72.8 % 100 %	1 Dokumen	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73 % 62 % 72.8 % 100 %	50.000.000

1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semangkak	73 % 62 % 72.8 % 100 %	1 Dokumen	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73 % 62 % 72.8 % 100 %	50.000.000
												TOTAL	**7.728.625.000**					**11.741.449.000**

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) yang telah disahkan. DPA SKPD berdasarkan berdasarkan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

5.1. Catatan Penting yang harus diperhatikan

Adapun hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten yaitu:

a. Keterbatasan jabatan fungsional analis kebencanaan sehingga kurang optimal dalam menganalisis kriteria standar dan norma dalam penyusunan laporan kebencanaan
b. Ketrrbatasan penyuluh kebencanaan dan fasilitator kebencanaan untuk mengantisipasi hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan relawan dan SAR Kabupaten Klaten dalam melaksanakan sosialisasi mitigasi penanghulanagn bencana
c. Belum optimalnya manajemen logistic dan peralatan sehingga banyak peralatan kebencaaan yang kurang terawat dengan baik.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka penanggulangan bencana dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rencana kerangka pelayanan wajib dasar standar pelayanan minimal (SPM), prioritas pembangunan daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3. Rencana Tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan

kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan pokok−pokok rencana, sebagai berikut:

a. Rencana Kerja Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023;
b. Proyeksi rencana belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 7.553. 652.000 untuk membiayai 2 program dengan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 **yaitu "Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"**

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten tahun 2023 kami susun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023.

Klaten, Juli 2022
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KLATEN

SRI WINOTO,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196302221990031007

RENCANA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

KATA PENGANTAR 3

BAB. I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 38

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan 39

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB.V PENUTUP 49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Rencana Kerja Tahun 2023 Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten telah dapat diterbitkan sebagai salah satu keluaran dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten memuat kerangka ekonomi prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif sebagaimana amanat Undang-Undang, maka Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten disusun sebagai dasar / pedoman untuk penyusunan APBD Kabupaten Tahun 2023.

Selanjutnya diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data atau informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, kami sampaikan terima kasih.

Klaten, 11 Juli 2022

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DISPERINAKER

Drs. H. SLAMET WIDODO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620715 199003 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan tahap Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Klaten.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten.

Akan tetapi melihat kondisi yang sedang terjadi saat ini, tentang penyebaran wabah virus covid 19 (Corona) jika dilihat dari tugas pokok fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sangat mempengaruhi dalam perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yaitu mengakibatkan banyak tenaga kerja yang terkena PHK sehingga menambah pengangguran yang ada di Kabupaten Klaten disamping itu pada Tahun 2021 banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana akibat dari adanya rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi target kinerja Renja maupun Renstra.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2023;

   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;

   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Berisikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota.

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang bersangkutan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat disajikan dalam beberapa pokok, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   - Program Perencanaan dan Tenaga Kerja
   - Program Penempatan Tenaga Kerja
   - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
   - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   - Program Hubungan Industrial
   - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
   - Program Perencanaan dan Tenaga Kerja belum tercapai dikarenakan pada tahun 2021 belum tersusun dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) akan tetapi kegiatan yang dilalukan meliputi pengumpulan data ketenagakerjaan dan pengembanganan aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Industri (SIKENDI).
   - Program Penempatan Tenaga Kerja belum tercapai dikarenakan pandemi berdampak pada lesunya dunia usaha industri , maka itulah yang mempengaruhi penempatan pecari kerja
   - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi belum tercapai dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada penemapatan transmigrasi sehingga tidak dilakukan sosialisasi transmigrasi.

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja tercapai melebihi target kinerja dikarenakan anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk peningkatan peserta pelatihan
- Program Hubungan Industrial tercapai melebihi target kinerja dikarenakan kasus yang masuk di Dinas semua sudah terselesaikan lewat mediasi, bipartit dan perjanjian bersama dan tidak sampai ke pengadilan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

   Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
   - Mempercepat pelaksanaan fisik pekerjaan.
   - Memperketat pengawasan di lapangan

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Sampai Dengan Tahun 2021 Kabupaten Klaten, sebagaimana pada ***Tabel 2.1.***

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)						Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
							K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (%)
					Urusan Perindustrian																	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase perencanaan pembangunan industri**					**4%**	**1.966.900**	5,8	**1.470.374**	14500	74,76	**17,31**	**300.000**	23,11	1.770.374	#DIV/0!	#DIV/0!
3	**31**	**02**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI**					**7,40%**	**1.966.900**	**0**	**1.470.374**	0	74,76	**7,54**	**300.000**	7,54	1.770.374	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	02	2,01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Bertambah Pengetahuannya Tentang Usaha Dalam Mendirikan/Melakukan Usahanya Terhadap Lingkungan Masyarakat Sekitar Dan Peraturan Yang Berlaku	26	40.100.705	1.039	1.044.826	150	444.200	**150**	**170.115**	100	38,30	60	300.000	1249	1.514.941	4803,85	3,78
						Jumlah Pelaku Industri Yang Disosialisasi Tentang UU Dan Peraturan Perindustrian	0		0		80		**80**		100				80	-	#DIV/0!	#DIV/0!

						Jumlah Pembinaan Ikm Klaster Industri	514		1660		0		**0**		#DIV/0!				1660	-	322,96	#DIV/0!
						Jumlah IKM yang diundang dalam temu kemitraan usaha IKM dan industri besar di Kab. Klaten	0		800		0		**0**		#DIV/0!				800	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						Jumlah dokumen studi kelayakan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau)					1		**1**		100	#DIV/0!			1	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	02	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					1		**1**	**1.213.036**	100	#DIV/0!	1	1.000.000	2	2.213.036	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	02	2,01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bansos		300.000		367.045	1000	1.522.700	**0**	**87.223**	0	5,73	330	892.481	330	1.346.749	#DIV/0!	448,92
						Jumlah Pameran Industri Yang Diselenggarakan 1 kali	0		0		0		**0**		#DIV/0!				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						Jumlah IKM Kerajinan Yang Dikirim Magang	0		0		20		**20**		100,00				20	-	#DIV/0!	#DIV/0!
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilatih	240		400		0		**0**		#DIV/0!				400	-	166,67	#DIV/0!
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Urussan Pemerintah Bidang Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjang**	**100**	**#######**	**100**	**1.754.807**	100%	**6.238.989**	**100**	**4.276.501**	10000	68,54	**100**	**#REF!**	300	#REF!	300,00	#REF!
3	**31**	**01**	**2,01**		**Kegiatan Perencanaan , Penganggarn, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**					**100%**	10.000	**100**	**5.433**	10000	54,33	**100**	**8.083.318**	200	8.088.751	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	16	37.209	22	37.414	10	10.000	8	5.433	80	54,33	3	5.000	33	47.847	206,25	128,59

					Perencanaan Perangkat Daerah																
3	**31**	**01**	**2,02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**					**100%**	4.041.836	100	3.599.062	10000	89,05	**100**	**4.039.159**	200	7.638.221	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji pegawai negeri					12	4.011.836	30	3.599.062	250	89,71	30	4.039.159	60	7.638.221	#DIV/0!	#DIV/0!
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekwensi Perjalanan Dalam Daerah	353	159.567	439	155.028	20	30.000	20	0	100,00	0,00			459	155.028	130,03	97,16
3	**31**	**01**	**2,06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**					**100**	**245.200**	50	148.202	50	60,44	**100**	**279.700**	150	427.902	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Atk Tersedia	234	104.210	238	96.270	50	21.000	50	20.983	100	99,92	50	21.000	338	138.253	144,44	132,67
3	31	01	2,06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga tersedia	39	54.443	39	51.266	26	25.000	24	24.781	92,31	99,12	20	25.000	83	101.047	212,82	185,60
3	31	01	2,06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak Dan Penggandaan	34	61.960	38	57.474	8	14.000	8	13.995	100	99,96	46800	14.000	46846	85.469	137782,35	137,94
3	31	01	2,06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	23.624	20	21.318	7	5.200	5	3.552	71,43	68,31	48	5.200	73	30.070	365,00	127,29
3	31	01	2,06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan Dan Minuman Tersedia	252	152.730	247	96.911	60	30.000	58	27.268	96,67	90,89	30	30.000	335	154.179	132,94	100,95
3	31	01	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi perjalanan luar daerah	743	902.641	713	703.042	90	150.000	60	57.623	66,67	38,42	440	184.500	1213	945.165	163,26	104,71
3	**31**	**01**	**2,07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah tersedia**					**100**	**160.000**	60	192.270	60	120,17	**100**	**125.400**	160	317.670	#DIV/0!	#DIV/0!

					Pemerintah Daerah																
3	31	01	2,07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang Terbeli					3	40.000	3	32.350	100	80,88			3	32.350	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terbeli	21	325.976	37	470.279	10	120.000	5	159.920	50	133,27	20	125.400	62	755.599	295,24	231,80
3	**31**	**01**	**2,08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia**					**100**	**147.600**	60	148.240	60	100,43	**100**	**184.620**	160	332.860	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Dan Listrik	3	48.831	3	43.267	3	9.600	3	1.307	100	13,61	12	30.000	18	74.574	600,00	152,72
3	31	01	2,08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Thl Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	12	176.140	60	247.093	12	138.000	12	146.933	100	106,47			72	394.026	600,00	223,70
						Cakupan Tertib Administrasi Keuangan Yang Optimal	5		10		12		11		91,67		14	154.620	35	154.620	700,00	#DIV/0!
3	**31**	**01**	**2,09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**					100	**1.634.353**	100	183.294	100	11,22	**100**	**358.000**	200	541.294	#DIV/0!	#DIV/0!
3	31	01	2,09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	17	93.170	92	310.789	14	75.000	14	104.305	100,00	139,07	13	232.000	119	647.094	700,00	694,53
3	31	01	2,09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor Terpelihara	1	448.896	1	761.892	12	1.559.353	12	78.989		5,07	60	126.000	73	966.881	7300,00	215,39

					atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah THL jasa pengamanan kantor	21		37		2		2						39	-	185,71	#DIV/0!
					Urusan Tenaga Kerja														0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kesesuaian Renja terhadap RKT**					**80**	**135.000**	**0**	**108.394**	0,00	80,29	**85**	**135.739**	85	244.133	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**					62	135.000	50	**108.394**	80,65	80,29	**100**	**135.739**	150	244.133	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Pendataan ketenagakerjaan	0	0		0	1	135.000	1	**108.394**	100,00	80,29	1	135.739	2	244.133	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase jumlah yang mendapatkan pelatihan dengan pendaftar pelatihan**					75	**1.001.500**	**80**	**953.908**	106,67	95,25	**3,75**	**744.051**	83,75	1.697.959	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**					**62**	821.500	**50**	**858.908**	80,65	104,55	**0,00 %**	**704.051**	50	1.562.959	#DIV/0!	#DIV/0!
						Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan					**25,5**		15,87						15,87	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Jenis Pendidikan Dan Pelatihan	172	132.400	172	962.344	2	821.500	2	858.908	100,00	104,55	120	704.051	294	2.525.303	170,93	1907,33
						Jumlah Wirausaha Baru					175		100		57,14				100	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**03**	**2,02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**					**62**	**140.000**	**50**	**95.000**	80,65	67,86	**11,96**	**40.000**	61,96	135.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lpks Yang Dibina	150	109.676	105	97.128	40	140.000	0	95.000	0,00	67,86	20	40.000	125	232.128	83,33	211,65
						Jumlah lembaga yang diberikan					1		1		100,00	#DIV/0!			1	-	#DIV/0!	#DIV/0!

						bantuan hibah															
2	**07**	**03**	**2,05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**					**62**	**40.000**	**50**	**0**	80,65	0,00			50	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Siap Kerja Melalui Pemagangan Dalam Negeri	250	30.000	160	164.587	0	40.000	0	0	#DIV/0!	0,00			160	164.587	64,00	548,62
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**					**70**	**413.000**	15,87	**60.955**	22,67	14,76	**21**	**325.000**	36,87	385.955	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**04**	**2,01**		**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**					**25,5**	**223.000**	15,87	**48.361**	62,24	21,69	**100**	**100.000**	115,87	148.361	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	04	2,01	02	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dibina	1300	317.699	980	208.139	250	203.000	250	48.361	100,00	23,82	3	100.000	1233	356.500	94,85	112,21
					Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	1800	151.886	1126	115.032	0	20.000	**0**	**0**	#DIV/0!	0,00			1126	115.032	62,56	75,74
2	**07**	**04**	**2,03**		**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**					**25,5**	**190.000**	15,87	**12.594**	62,24	6,63	**71**	**225.000**	86,87	237.594	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	04	2,03	02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja (Ipk) Online	1	216.811	7	164.642	13	40.000	**13**	**12.594**	100,00	31,49	13	25.000	33	202.236	3300,00	93,28
					Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	10000	166.375	8.475	242.652	0	150.000	**0**	**0**	#DIV/0!	0,00	1	200.000	8476	442.652	84,76	266,06
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial**					**90**	**485.000**	**100**	**177.768**	111,11	36,65	**49,43**	**-**	149,43	177.768	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**05**	**2,01**		**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah**	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**					**81**	**160.800**	**12,5**	**48.833**	15,43	30,37	0	0	12,5	48.833	#DIV/0!	#DIV/0!

					Kabupaten/Kota																
						Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun					**5,9**								0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	05	2,01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0	0	0	0	1	160.800	**1**	**48.833**	100,00	30,37	0	0	1	48.833	#DIV/0!	#DIV/0!
2	**07**	**05**	**2,02**		**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)**					**81**	**324.200**	**12,5**	**128.935**	15,43	39,77	**6,66**	**207.217**	19,16	336.152	#DIV/0!	#DIV/0!
						Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun					**5,9**		**6,42**						6,42	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	05	2,02	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Dipantau Pengupahannya	600	408.153	660	368.838	30	179.000	30	88.129	100,00	49,23	50	70.000	740	526.967	123,33	129,11
						Jumlah Pengusaha Dan Pekerja Yang Disosialisasi Upah Minimum	66		97		100		30		30,00				127	-	192,42	#DIV/0!
						Jumlah Perusahaan yang disosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan	210		230		30		30		100,00				260	-	123,81	#DIV/0!

						Jumlah Perusahaan Yang Dilatih Cara Membuat Peraturan Perusahaan Dan Struktur Skala Upah	800		500		50		48		96,00				548	-	68,50	#DIV/0!
2	07	05	2,02	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Phi/Phk Antara Pengusaha Dan Pekerja	75	47.385	72	62.632	15	12.000	16	5.316	106,67	44,30	20	30.000	108	97.948	144,00	206,71
2	07	05	2,02	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Lembaga ketenagakerjaan yang dibina dan difasilitasi	0	0	0	0	20	53.400	20	16.879	100,00	31,61	30	27.217	50	44.096	#DIV/0!	#DIV/0!
2	07	05	2,02	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Lks Tripartit	290	174.605	240	148.317	1	79.800	1	18.611	100,00	23,32	1	80.000	242	246.928	83,45	141,42
					Urusan Transmigrasi														0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase jumlah minat masyarakat yang disosialisasi terhadap program transmigrasi**					**40**	**255.000**	**0**	**21.332**	0,00	8,37	**75**	**231.807**	75	253.139	#DIV/0!	#DIV/0!
3	**32**	**03**	**2,01**		**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan**					**36**	**255.000**	**0**	**21.332**	0,00	8,37	**85**	**231.807**	85	253.139	#DIV/0!	#DIV/0!

3	32	03	2,01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Mou/ Kerjasama Antara Kab/Prov Yang Dituju Dengan Kab.Klaten	3	323.046	9	267.934	1	65.000	**1**	**21.332**	100,00	32,82	2	70.000	12	359.266	400,00	111,21
3	32	03	2,01	04	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kab/Prov Lokasi Penempatan Transmigrans	83	48.454	44	275.225	1	190.000	**0**	**0**	0,00	0,00	20	161.807	64	437.032	77,11	901,95
						Transmigran Yang Diberangkatkan Ke Penempatan Transmigrasi	20	96.023	15	51.368	6		**0**		0,00				15	51.368	75,00	53,50

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada Tahun Anggaran 2021, semula di dukung dengan Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 10.495.388.698,-, akan tetapi mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.8.800.642.410,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD II, DBHCHT, dan DAK secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 4.293.136.210,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.651.628.200,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 760.878.000,-
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 95.000.000,-

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2021 capaian realisasi anggarannya sebesar Rp. 7.069.240.663,- atau sebesar 80,33 % dari total anggaran belanja operasi sebesar Rp.8.800.642.410,-

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan uraian Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dengan target sebesar Rp.350.000.000,-. Sedangkan realisasi sebesar Rp. 386.135.800,- atau sebesar 110,32%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Peragkat Daerah

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Tabel penyajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana pada **Tabel 2.2** sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rasio Penduduk yang Bekerja			68,81	69,5	70,18	70,87	76,18	76,18	70,18	70,87	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			68,79	69,25	69,71	70,17	86,94	86,94	69,71	70,17	
	Besaran Pekerjaan Buruh yang Menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan			26,21	27,41	28,61	29,81	10,62	10,62	28,61	29,81	
	Presentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga kerja		√	0	85	87	89	0	0	87	89	

	daerah											
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		√	3,6	3,75	4,12	4,61	3,6	3,6	4,12	4,61	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			75	93,75	95,83	96,43	100	100	95,83	96,43	
	Persentase LPK yang Terakreditasi		√	11	11,96	13,04	16,30	8	8	13,04	16,30	
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja				0	11,34	22,68	0,25	0,25	11,34	22,68	
	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota		√	21,50	21	22,50	23	15,87	15,87	22,50	23	
	Presentase Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)			1200	71	72	74	1.125	1.125	72	74	
	Persentase Pekerjaan Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat				100	100	100	0	0	100	100	
	Presentase sengketa hubungan industrial yang terlesaikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS,Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		√	40,36	49,43	53,97	58,50	4,10	4,10	53,97	58,50	
	Persentase pengiriman Transmigrasi ke lokasi transmigrasi			0	75	80	85	0	0	80	85	
	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, Serikat Pekeja/Serikat Buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan			0	30	30	30	31	31	30	30	
	Persentase transmigran yang mendapat pelatihan			0	75	80	85	0	0	80	85	
	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi			0	75	80	80	0	0	80	80	
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah		√	0,36	0,38	0,42	0,48	0,11	0,11	0,42	0,48	
	Persentase IKM yang memiliki daya saing			3,60	3,70	3,80	3,90	7,90	7,90	3,80	3,90	

	Presentase Industri kecil dan menengah IKM yang di bina			13,20	17,31	21,44	25,50	13,20	13,20	21,44	25,50	
	Presentase IKM yang terfasilitasi dalam sistem Informasi industri Nasional (SIINas)			10,65	14,56	18,13	21,42	1,27	1,27	18,13	21,42	

Faktor yang mempengaruhi belum dan berhasilnya capaian kinerja dari beberapa indikator antara lain:

1. Kondisi partisipasi angkatan kerja di Kabupaten mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja di Kabupaten yang belum terisi. Keadaan ini diperburuk dengan adanya Covid-19, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal). AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2017-2021 selalu meningkat dengan ditunjukkan meningkatnya persentase Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Perhitungan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) menurut PP Nomor 78 Tahun 2015 perhitunganya melihat Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) tahun sebelumnya. Inflasi Nasional dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jika dilihat dari tabel diatas Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) mengalami kenaikan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) yang hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Dengan kenaikan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) diharapkan kesejahteraan para pekerja juga semakin meningkat. Akan tetapi belum semua dari perusahaan bisa menerapkan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) dengan melihat kondisi dari perusahaan masing-masing, maka dari itu bagi para perusahaan yang sekiranya mampu menerapkan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) perlu kita dorong untuk menerapkan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) di perusahaan mereka.
3. Dalam sebuah perusahaan. baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Hal tersebut disebabkan karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap

ketentuan peraturan perundang-sundangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4. **Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).** Perjanjian Besama (PB) merupakan jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha/perusahaan dan pekerja. Di Kabupaten Klaten. berikut besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), akan tetapi belum semua kasus di Kabupaten Klaten dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan masih banyak yang diselesaikan dengan cara bipartit. Masih ada permasalahan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Di sisi lain Pemerintah Daerah belum mempunyai kewenangan untuk menindak pengusaha yang tidak mematuhi sistem pengupahan atau peraturan tenaga kerja lainnya.
5. **Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.** Pencari kerja yang terdaftar dapat difasilitasi penempatannya melalui sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Berdasarkan data tersebut Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020 sebesar 21,11% sedangkan pada tahun 2021 (data yang tersaji sampai dengan triwulan tiga) mengalami penurunan sebesar 15,87%, hal tersebut dikarenakan lowongan kerja yang ada belum sesuai dengan kultur, skill, dan ketrampilan angkatan kerja karena investasi yang masuk cenderung membutuhkan keahlian khusus sehingga penempatan tenaga kerja masih rendah. Sehingga, perlu dilakukan beberapa upaya untuk memperbesar peluang kerja seperti pemenuhan target jumlah lowongan kerja yang tersedia, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, serta pemenuhan jumlah sarana dan prasana pelatihan yang memadai.
6. **Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.** Selain keselamatan dan perlindungan bagi pekerja juga diwajibkan setiap pekerja menjadi peserta program jamsostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program perlindungan sosial-ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Prinsipnya juga sama dengan asuransi, Jamsostek mengalihkan pertanggungan risiko karyawan kepada pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak dibayangi oleh ketidakpastian.
7. **Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.** Pelatihan kewirausahaan (*Entrepreurship Training Program*) merupakan program yang cenderung fokus dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha, dimana dalam program pelatihan ini menuntun peserta untuk terlibat kedalam praktek. Dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar

80%. Kondisi tersebut masih diperlukan peningkatan dikarenakan terdapat tujuan dan manfaat pelatihan sebagai berikut: 1) mempersingkat masa belajar untuk memenuhi standar kinerja yang ditentukan, 2) meningkatkan kinerja pekerjaan, 3) membentuk sikap dan tingkah laku para pengusaha dalam menjalin hubungan baik antar pengusaha, pengusaha dengan patner bisnis, pengusaha dengan karyawan, maupun pengusaha dengan konsumen, 4) memecahkan masalah-masalah operasional perusahaan sehari-hari, 5) mempersiapkan para pengusaha memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan kewirausahaan.

8. Pendaftar calon transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan daerah transmigrasi yang dituju tidak sesuai dengan daerah yang diminati oleh para calon transmigran yang mendaftar sehingga mereka tidak jadi mendaftar menjadi calon transmigran. Selain daripada itu bertambah atau berkurangnya penempatan transmigrasi oleh Kabupatan Klaten masih tergantung dengan quota yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah, sedangkan akibat dari adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada pemberangkatan atau penempatan transmigrasi dan refocusing anggaran yang lebih diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi tersebut.
9. Dengan terdampaknya Covid-19 berakibat pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), berkurangnya alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri menurun, terganggunya *supply* bahan baku serta berkurangnya permintaan pasar. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan di berbagai macam pelatihan industri klister, pembinaan sentra-sentra industri daerah, perlunya diterapkan teknologi industri yang tepat guna serta peningkatan daya saing industri.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat kinerja pelayanan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dalam melaksanakan pelayanan urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi sudah mengacu pada standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan perindustrian, urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi antara lain :
    1) Belum optimalnya koordinasi mengenai kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
    2) Rendahnya daya saing tenaga kerja.

3) Belum optimalnya tenaga kerja.
4) Rendahnya Tingkat kepatuhan pelaku usaha/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan dan belum optimalnya fungsi pekerja/ buruh, serikat buruh/ pekerja.
5) Belum optimalnya penempatan transmigrasi.

c. Dampak terhadap pecapaian visi misi kepala daerah.

Dampak yang ditimbulkan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pencapaian visi misi kepala daerah antara lain:

1) Meningkatkan profesionalisme SDM di Bidang IKM.
2) Meningkatkan kreatifitas SDM di Bidang IKM.
3) Meningkatkan kualitas produk-produk IKM agar lebih berdaya saing.
4) Mengurangi pengangguran.
5) Mengurangi kemiskinan dengan program transmigrasi.
6) Mengurangi diskriminasi tenaga kerja.
7) Menciptakan hubungan yang harmonis dalam hubungan Industrial dari perusahaan.
8) Menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan bidang industri, tenaga kerja dan transmigrasi

1) Peningkatan sumber daya manusia di bidang IKM agar lebih berdaya saing
2) Peningkatan skill, ketrampilan dan kompetensi masyarakat Kabupaten Klaten;
3) Peningkatan kualitas SDM Bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4) Penerapan IT terhadap pelayanan publik perindustrian dan ketanagakerjaan;
5) Peningkatan kualitas, kemudahan pelayanan ketenagakerjaan sampai tingkat kecamatan.

e. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1) Isu-isu Penting bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi
   a) Masih rendahnya tingkat profesionalisme SDM di Bidang IKM .
   b) Rendahnya daya saing produk IKM dalam menghadapi dampak globalisasi
   c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan dari perkembangan usahanya.
   d) Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.
   e) Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan para pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
   f) Terbatasnya lapangan pekerjaan/kesempatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran di setiap tahun.

g) Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,minat, dan kemampuan pencari kerja;

h) Pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;

i) Kuota transmigrasi yang tergantung pada Pemerintah Pusat;

j) Masih kurang optimalnya Pelayanan Publik Bidang Ketanagakerjaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja adalah membandingkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi indikator target dan besaran dana yang dibutuhkan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Hasil Analisa Kebutahan terdapat beberapa ketidaksesuaan antara lain ada beberapa subkegiatan yang direncanakan di Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 akan tetapi tidak direncanakan di hasil analisa kebutuhan selain itu terdapak ketidaksesuaian anatara indikator sub kegiatan dan target capaian karena menyesuaikan pagu yang berubah di hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada **Tabel 2.4** berikut ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	87,00 %	**20.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	87,00 %	**20.000.000**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				**20.000.000**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**				**20.000.000**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	20.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,12 %	**872.533.000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,12 %	**875.000.000**
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				**750.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**				**800.000.000**

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan	120 Orang	750.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 Orang	800.000.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				**80.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				**50.000.000**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah LPKS yang dibina	40 Lembaga	80.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	50.000.000
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**42.533.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**25.000.000**
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja	1 Dokumen	42.533.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	**3.048.905.000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	**1.725.000.000**
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				**1.790.000.000**	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**				**980.000.000**
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah jenis fasilitasi Pelayanan Antar Kerja	3 jenis	80.000.000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 orang	80.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang diberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan	700 orang	30.000.000					
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah disabilitas yang terlayani	50 orang	280.000.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 orang	100.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah wirausaha baru	260 orang	1.400.000.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	100 Orang	800.000.000
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				**233.905.000**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				**25.000.000**
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah laporan Informasi Pasar Kerja (IPK)	13 laporan	33.905.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5000 orang	25.000.000
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Job Fair	1 kegiatan	200.000.000					

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				**1.000.000.000**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**				**700.000.000**
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	80 Orang	800.000.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	80 Orang	600.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang dibina	40 orang	200.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 orang	100.000.000
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**25.000.000**	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**20.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Perusahaa	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Perusahaa	20.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	**456.097.000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	**255.000.000**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				**81.097.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**55.000.000**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	238 Perusaha	51.097.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	238 Perusaha	30.000.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan dan kesejahteraan	100 Laporan	30.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	80 Laporan	25.000.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				**375.000.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**				**200.000.000**

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Perusahaa	70.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	35 Perkara	50.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terselesaikan	30 Kasus	30.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 Perkara	20.000.000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan yang tercatat, Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar perusahaan yang tercatat dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan	30 Lembaga	25.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi/S	10.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	1 LKS	80.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	50.000.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100 Lembaga	170.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 Orang	70.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	**7.317.270.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	**5.025.493.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**30.000.000**

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	4 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	7 Dokumen	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	15.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**5.201.650.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.867.104.778**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	38 Orang	5.169.650.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bu	3.844.104.778
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	12 Dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun	12 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	15.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**342.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**292.500.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Unit	8.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8.500.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Unit	21.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	16.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50000 Eksem	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55 Eksempla	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	8.000.000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Kali	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Kali	190.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Unit	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	100.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**770.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**134.888.222**
	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit	40.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	40.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	20 Unit	120.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	94.888.222
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 unit	500.000.000					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 unit	10.000.000					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 unit	100.000.000					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**229.620.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**214.000.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	30 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	14 Orang	154.620.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	184.000.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**743.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**487.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	15 Unit	272.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	232.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel terpelihara	60 Unit	45.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	60 Unit	126.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	60.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	**1.199.732.000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	**1.552.390.000**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				**1.199.732.000**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**				**1.552.390.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan pembangunan sumber daya industri yangterfasilitasi	40 IKM	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 lokasi	300.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.072.390.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah industri yang terkoordinasi	210 IKM	589.732.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pembangunan industri yang terevaluasi	150 IKM	110.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	80.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				**99.152.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				**50.000.000**

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				**99.152.000**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**				**50.000.000**
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 IKM	99.152.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	50.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**361.903.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**225.000.000**
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				**361.903.000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**225.000.000**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	**361.903.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	**225.000.000**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah MoU / Kerjasama Antar Daerah	2 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.000.000
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah fasilitasi pemberangkatan transmigrasi	20 KK	196.903.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 KK	100.000.000
	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah lokasi penyuluhan transmigrasi	5 lokasi	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 KK	50.000.000
	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Jumlah calon transmigran yang mengikuti pelatihan	20 orang	50.000.000	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	10 KK	25.000.000
					13.375.592.000					**9.727.883.000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Beberapa usulan kegiatan dari kecamatan terkait dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini yaitu pengurangan pengangguran dan menumbuhkan wirausaha baru dan peningkatan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM). Berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang kecamatan, kabupaten dan pelaksanaan forum SKPD, ada beberapa usulan antara lain:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	***Program*** Perencanaan dan Pembangunan Industri ***Kegiatan*** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ***SubKegiatan*** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Sidorejo, kec. Kemalang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30 IKM	Dipertimbangkan Sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, dimohon untuk membuat pengajuan proposal ke dinas perindustrian dan tenaga kerja
2	***Program*** Perencanaan dan Pembangunan Industri ***Kegiatan*** Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ***SubKegiatan*** Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bolopleret, Kec. Juwiring	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30 IKM	Dipertimbangkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, diminta desa untuk membuat proposal dan diajukan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	***Program*** Penempatan Tenaga Kerja , ***Kegiatan*** Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, ***Sub Kegiatan*** Perluasan Kesempatan Kerja	Tibayan, Kec. Jatinom	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	Sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan perluasan kesempatan kerja

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Renja 2023
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan potensi ekonomi kerakyatan untuk pengurangan pengangguran	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran;	Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja 2023 merujuk pada tujuan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian
2. Meningkatkan kesempatan,produktifitas dan daya saing tenaga kerja.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja 2023 merujuk pada sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut

1. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.
2. Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
3. Meningkatnya kapasitas transmigran.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

3.3.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri kecil menengah
2. Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten
3. Peningkatan hubungan industrial yang tertib dan baik
4. Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran

3.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri
2. Optimalisasi Industri Kecil Menengah yang berdaya saing dan Inovatif
3. Optimalisasi dan Pemanfaatn data informasi industri kecil menengah
4. Penyiapan Sumber daya yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Balai Latihan Kerja
6. Penyebarluasan Informasi dan Kesempatan Kerja
7. Memastikan perusahaan memiliki tata kelola kerja yang layak
8. Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih

Tabel 3.2.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang Mengacu pada Strategi, Arah dan Kebijakan

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan nilai tambah, produktifitas, dan daya saing Perindustrian	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Peningkatan daya saing industri kecil menengah melalui pameran industri, pengiriman peserta magang ke balai industri, penguatan asosiasi, kemitraan industri	Meningkatkan daya saing industri dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku dan mutu produk IKM utamanya pada 8 cluster IKM.
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kesempatan, produktifitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing, kompetensi, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan produktivitas tenaga kerja; optimalisasi peran dan fungsi BLK Komunitas serta LPKS; penyebarluasan informasi dan kesempatan kerja; menjaga hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/ buruh agar tetap harmonis	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada penyiapan tenaga kerja yang kompten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; perluasan informasi dan kesempatan kerja serta optimalisasi pembinaan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja/ buruh.
	Meningkatnya kapasitas transmigran	Peningkatan kapasitas dan kesiapan transmigran melalui pemberian pelatihan dan ketrampilan, pemberian bantuan sarana pengolahan lahan	Mengoptimalkan kordinasi dan penyiapan transmigran yang terlatih pengolahan lahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pencapian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023. Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2023 juga mempertimbangkan prioritas pembangaunan daerah yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 urusan antara lain:

1. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja**

   Urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung pencapaian mengurangi kemiskinan dengan mengurangi pengangguran, adapun upaya yang dilakukan dengan penciptaan kesempatan kerja, mengurangi sengketa hubungan industrial. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

   a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
   c. Program Penempatan Tenaga Kerja
   d. Program Hubungan Industrial

2. **Urusan Perindustrian**

   Urusan perindustrian diarahkan untuk mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah, adapun upaya yang dilakukan dengan membangun Industri Kecil Menengah (IKM) agar lebih produktiv dan lebih berdaya saing. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

   a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
   b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

3. **Urusan Transmigrasi**

   Urusan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pencapaian mengurangi kemiskinan, adapun upaya yang dilakukan dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut di atas dengan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Adapun rincian usulan kegiatan dan pendanaan dari masing-masing program dapat dilihat dalam **Tabel 4.1** sebagai berikut:

TABEL 4.1
RUMUSAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**2.875.000.000**				**8.939.527.000**
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**20.000.000**				**20.000.000**
2	**07**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**20.000.000**				**20.000.000**
2	07	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Terwujudnya penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan atau review tersusun	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,00 %	1 Dokumen	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	87,00 %	20.000.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**875.000.000**				**2.984.049.000**
2	**07**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**800.000.000**				**900.000.000**
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Terwujudnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,12 %	120 Orang	95,83 %	800.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,12 %	900.000.000
2	**07**	**03**	**2,02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**								**50.000.000**				**2.034.049.000**
2	07	03	2,02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Terwujudnya LPK yang terakreditasi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,12 %	30 Lembaga	13,04 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,12 %	2.034.049.000
2	**07**	**03**	**2,05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**25.000.000**				**50.000.000**
2	07	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Terwujudnya perusahaan yang menerapakan pengukuran produktivitas tenaga kerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,12 %	1 Dokumen	11,34 %	25.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	4,12 %	50.000.000

2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**1.725.000.000**				**5.471.073.000**
2	**07**	**04**	**2,01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**980.000.000**				**4.410.000.000**
2	07	04	2,01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Terwujudnya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kotawujudnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	200 orang	100 %	80.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	90.000.000
2	07	04	2,01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Terwujudnya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kotawujudnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	50 orang	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	300.000.000
2	07	04	2,01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kotawujudnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	100 Orang	100 %	800.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	4.020.000.000
2	**07**	**04**	**2,03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**25.000.000**				**36.073.000**
2	07	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Terwujudnya penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	5000 orang	72 %	25.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	36.073.000
2	**07**	**04**	**2,04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**								**700.000.000**				**1.000.000.000**

2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	80 Orang	100 %	600.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	800.000.000
2	07	04	2,04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Indonesia (TKI) yang mendapat sertifikat	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	20 orang	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	200.000.000
2	**07**	**04**	**2,05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**20.000.000**				**25.000.000**
2	07	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya perpanjangan IMTA	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,50 %	16 Perusahaa	n60 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	22,50 %	25.000.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**255.000.000**				**464.405.000**
2	**07**	**05**	**2,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**55.000.000**				**84.405.000**
2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Terwujudnya koordinasi Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	238 Perusaha	an53.97 %	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	54.405.000

2	07	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terwujudnya koordinasi Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	80 Laporan	53,97 %	25.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	30.000.000
2	**07**	**05**	**2,02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**200.000.000**			**380.000.000**
2	07	05	2,02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Terwujudnya koordinasi perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	35 Perkara	13,32 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	70.000.000
2	07	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Terwujudnya koordinasi perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	20 Perkara	13,32 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	30.000.000
2	07	05	2,02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Terwujudnya koordinasi perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	20 Asosiasi/S	P 13.32 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	25.000.000
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Terwujudnya koordinasi perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	1 Lembaga	13,32 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	80.000.000

2	07	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terwujudnya koordinasi perusahaan yang dilakukan pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	50 Orang	13,32 %	70.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	175.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**6.627.883.000**				**8.489.941.000**
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5.025.493.000**				**6.889.226.000**
3	**31**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30.000.000**				**30.000.000**
3	31	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	3 Dokumen	100 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
3	31	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	4 Dokumen	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
3	31	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	7 Laporan	100 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	15.000.000
3	**31**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.867.104.778**				**5.226.726.000**
3	31	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	30 Orang/bul	an100 %	3.844.104.778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.186.726.000

3	31	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Dokumen	100 %	4.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
3	31	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Dokumen	100 %	4.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
3	31	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Laporan	100 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	20.000.000
3	**31**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**292.500.000**				**381.000.000**
3	31	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Paket	100 %	8.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	15.000.000
3	31	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	40 Paket	100 %	16.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	21.000.000
3	31	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	20 Paket	100 %	25.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	40.000.000

3	31	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 Paket	100 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	15.000.000
3	31	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	48 Dokumen	100 %	8.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
3	31	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Laporan	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	40.000.000
3	31	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	100 Laporan	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	200.000.000
3	31	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	2 Dokumen	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	40.000.000
3	**31**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**134.888.222**				**185.000.000**
3	31	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	4 Unit	100 %	40.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	60.000.000
3	31	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	10 Unit	100 %	94.888.222	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	125.000.000

3	**31**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**214.000.000**				**368.000.000**
3	31	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	12 Laporan	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	30.000.000
3	31	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Laporan	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	50.000.000
3	31	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	14 Laporan	100 %	184.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	288.000.000
3	**31**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**487.000.000**				**698.500.000**
3	31	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terwujudnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	15 Unit	100 %	232.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	272.500.000
3	31	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terwujudnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	20 Unit	100 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	50.000.000

3	31	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	1 Unit	100 %	180.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	250.000.000
3	31	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terwujudnya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	100,00 %	20 Unit	100 %	60.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	126.000.000
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**1.552.390.000**				**1.501.905.000**
3	**31**	**02**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**1.552.390.000**				**1.501.905.000**
3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terwujudnya koordinasi IKM	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,44 %	1 Dokumen	10,01 %	100.000.000	DBH CHT	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	281.905.000
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terwujudnya koordinasi IKM	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,44 %	1 Dokumen	10,01 %	1.072.390.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	300.000.000
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terwujudnya koordinasi IKM	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,44 %	1 Dokumen	10,01 %	300.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	800.000.000
3	31	02	2,01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terwujudnya koordinasi IKM	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,44 %	1 Dokumen	10,01 %	80.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	21,44 %	120.000.000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**								**50.000.000**				**98.810.000**

3	**31**	**04**	**2,01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50.000.000**				**98.810.000**
3	31	04	2,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terwujudnya IKM yang sudah berizin	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,13 %	1 Dokumen	8,67 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	18,13 %	98.810.000
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**225.000.000**				**360.655.000**
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**225.000.000**				**360.655.000**
3	**32**	**03**	**2,01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**225.000.000**				**360.655.000**
3	32	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya transmigran yang lolos seleksi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	2 Laporan	87 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	65.000.000
3	32	03	2,01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Terwujudnya transmigran yang lolos seleksi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 KK	87 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	195.655.000
3	32	03	2,01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Terwujudnya transmigran yang lolos seleksi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	100 KK	87 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	50.000.000
3	32	03	2,01	06	Pelatihan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Terwujudnya transmigran yang lolos seleksi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,00 %	10 Orang	87 %	25.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	80,00 %	50.000.000
												TOTAL	**9.727.883.000**				**17.790.123.000**

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Tenaga Kerja, urusan pilihan perindustrian dan urusan pilihan transmigrasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindaklanjut

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre–point* (pokok–pokok) rencana, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung tema Rancangan RKPD Tahun 2023 :

   " Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkelanjutan"

2. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja sebesar Rp. 9.727.883.000,– untuk membiayai 8 program dengan 19 kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".***

Klaten, 11 Juli 2022
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN DISPERINAKER KLATEN

Drs. H. SLAMET WIDODO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620715 199003 1 010

2023

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAHAN KABUPATEN

KLATEN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat disusun.

Rencana Kerja ini merupakan arah dan tujuan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang mendasari Perubahan Nomenklatur Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ke Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja ini. Kami menyadari sepenuhnya dalam menyusun Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan dari semua pihak sangat kami perlukan.

Akhirnya kami berharap, semoga Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, demi peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Klaten, 2022

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO, SIP. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …….. i

DAFTAR ISI …… ii

BAB I PENDAHULUAN ……

1.1. Latar Belakang …… 1 – 3

1.2. Landasan Hukum …… 3 – 9

1.3. Maksud dan Tujuan …… 9

1.4. Sistematika Penulisan ……. 9 – 10

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU …….

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu …….. 11 – 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……... 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …..……. 14 – 18

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal …… 19 – 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….. 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …….

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional …….. 21 – 22

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …….. 22 – 23

BAB IV RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……... 24 – 27

BAB V PENUTUP …….

5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian dalam Rangka Pelaksanaan dan Ketiadaan Dana Sesuai dengan Kebutuhan …….. 28

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan …….. 28

5.3. Rencana Tindak Lanjut ……. 28 – 30

LAMPIRAN ……

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagai mana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a) persiapan penyusunan, b) penyusunan rancangan awal, c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e) perumusan rancangan akhir, dan f) penetapan.

Memedomani Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Disbudporapar Kabupaten Klaten masih mengacu dengan Renstra Perangkat Daerah Disbudporapar Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai pedoman transisi, mengingat belum adanya Perubahan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD.

Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Memedomani Pasal 84 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya hasil pembahasan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKPD.

Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi

pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakansebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

51. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
53. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/074/31 tanggal 26 Januari 2022 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3. Maksud danTujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan untuk periode satu tahun anggaran pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dantujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Dalam Bab ini memuat memuat poin-poin meliputi :

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam bab ini meliputi :

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Perangkat Daerah Disbudporapar Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. Realisasi program/kegiatan sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:

I. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VI. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

VII. Program Pemasaran Pariwisata

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

VIII. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3. Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota dikarenakan adanya *recofusing* pada anggaran dana sub kegiatan tersebut yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ialah tidak tercapainya target capaian program Renstra perangkat

Daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada tahun n+1 karena apabila hal ini tidak dilakukan maka target pada Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut ialah :
    - Evaluasi pelaksanaan Renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan.
    - Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja apabila ditemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

Tabel Penyajian Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (lampiran tabel 2.1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Sasaran, Pengukuran Kinerja Program dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan dalam suatu sasaran kemudian dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja sasaran.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten (lampiran tabel 2.2)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, yaitu :

1. Pendukung
    a. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kualitas budaya;
    b. Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai;
    c. Adanya program-program terkait pelestarian dan pengembangan

kebudayaan;

d. Adanya lembaga/organisasi dan komunitas seni budaya;
e. Terwujudnya program pengembangan kepemudaan dan program pengembangan olahraga;
f. Ketersediaan Pendanaan;
g. Kondisi Kabupaten Klaten yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisnus maupun wisman;
h. Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata dan para stakeholder pariwisata untuk menjalankan berbagai program yang telah direncanakan;
i. Semakin meningkatnya layanan dan sadar wisata para pelaku usaha jasa pariwisata;
j. Semakin meningkatnya sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

2. Penghambat
   a. Kurangnya minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya; Masuknya budaya aktif negatif yang tidak sesuai dengan budaya setempat;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga sehingga menghambat pencapaian prestasi olahraga;
   c. Kurangnya sarana dan prasarana umum yang memadai untuk mendukung kepariwisataan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan tersebut antara lain:

1. Jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata disetiap kecamatan;
2. Belum optimalnya pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya;
3. Kurangnya pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah;
4. Belum optimalnya perlindungan/pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual);

5. Komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa Jawa masih lemah;
6. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;
7. Belum optimalnya pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang keolahragaan penyandang *disabilitas*;
8. Rendahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi kepemudaan dan olahraga;
9. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar;
10. Masih kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
11. Masih lemahnya SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;
12. Kurangnya informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
13. Belum berkembangnya wisata unggulan sebagai destinasi wisata;
14. Sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal; dan
15. Belum berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada kawasan dan potensi lokal.

2.3.3 Dampak Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah antara lain :

a. Kurangnya Koordinasi dan Kerjasama Internal dan Eksternal sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai harapan;
b. Pentingnya Hubungan baik antara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata dan para stakeholder pariwisata agar lancar dalammenjalankan berbagai program dan kegiatan;
c. Kendala Perangkat regulasi yang belum memadai bisa menjadikan pondasi kurang kokoh sehingga perlu dicari alternatif payung hukum yang bisa dijadikan pedoman supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan aman;
d. Belum adanya Tim Ahli Cagar Budaya sehingga banyak Benda Cagar Budaya yang belum tersertifikasi.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan:

   Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya adalah :

   a. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata
   b. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan kepariwisatan di Kabupaten Klaten
   c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi
   d. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda
   e. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabor dan atlit berprestasi

2. Peluang:

   Kabupaten Klaten mempunya aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang tak terkira. Aset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Klaten. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

   a. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Klaten
   b. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah
   c. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata
   d. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Klaten
   e. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda
   f. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu, dan meningkatnya kesadaraan masyarakat untuk berolahraga semakin tinggi pasca Pandemi Covid-19.

2.3.5 Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata antara lain:

1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
    a. Meningkatkan pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan bidang kepemudaan;
    b. Meningkatkan pembinaan yang terpadu dan berkelanjutanbidang keolahragaan penyandang *disabilitas*;
    c. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi Kepemudaan dan Olahraga;
    d. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar.
2. Bidang Kebudayaan
    a. Meningkatkan jumlah sarana prasarana kebudayaan belum sebanding dan belum merata di setiap kecamatan;
    b. Meningkatkan pelestarian seni budaya lokal dan situs serta cagar budaya dikarenakan keterbatasan anggaran;
    c. Meningkatkan pembinaan, promosi serta pengembangan atraksi dan seni budaya daerah dikarenakan keterbatasan anggaran;
    d. Meningkatkan perlindungan/ pelestarian kekayaan budaya daerah berbentuk HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual);
    e. Meningkatkan komitmen dan konsistensi penggunaan kewajiban berbahasa Jawa masih lemah.
3. Bidang Pariwisata
    a. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
    b. Meningkatkan SDM dan kelembagaan pengelola kepariwisataan;
    c. Meningkatkan informasi, kerjasama dan promosi kepariwisataan;
    d. Mengembangkan wisata unggulan sebagai destinasi wisata;
    e. Mengoptimalkan sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah;
    f. Mengembangkan industri pariwisata yang berbasis pada Kawasan dan potensi lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/ organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Buttom-up dan Top-down).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

a. Perbandingan Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan dalam Rancangan Renja tahun 2023. Dalam Rancangan awal Renja tahun 2023 Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mengusulkan 11 Program dengan 25 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan, dan pada Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2023 Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan

Pariwisata Kabupaten Klaten mengusulkan 11 Program, 25 Kegiatan,dan 73 Sub Kegiatan, melalui proses desk indikator kinerja Renstra.

b. Proses tersebut dilakukan melalui rangkaian desk untuk bisa mensinkronkan program dan kegiatan dengan OPD yang lain, dalam upaya menyesuaikan program- program yang sesuai dengan *core business* masing-masing OPD supaya Program dan kegiatan dimaksud bisa ditempatkan/dikembalikan kepada pemangku urusan yang membidangi.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Klaten (lampiran tabel 2.4)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh Penelahaan atau kajian/ proses usulan program/ kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten yang tertuang pada Musrenbang RKPD Tahun 2023 di Kecamatan adalah lebih menitik beratkan pada Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Pembangunan Sanggar Kesenian dan Kebudayaan. Kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan dari masyarakat terkait Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Pembangunan Sanggar Kesenian dan Kebudayaan merupakan bidang urusan Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan prioritas dann kegiatan aksi dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 di kecamatan, yang menjadi dasar prioritas usulan.

Usulan Prioritas dan Kegiatan Aksi Musrenbang Kabupaten Klaten Tahun 2023 OPD : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023 (lampiran tabel 2.5)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten guna menunjang Pembangunan Kabupaten Klaten secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Kepariwisataan
3. Kebudayaan
4. Kepemudaan, dan
5. Keolahragaan

Keseluruhan prioritas tersebut tentunya diharapkan bisa mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Klaten sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata sebagai perangkat daerah Kabupaten Klaten memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan

prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 (lampiran tabel 3.1)

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah implementasi dari Misi Bupati Klaten terpilih, yaitu Misi 3 dan Misi 5, dengan bunyi sebagai berikut :

- Misi 3 : Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan EkonomiKerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal.
- Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan *responsive gender*.

Tujuan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Pelestarian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
3. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga
4. Meningkatkan Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
2. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek

Pemajuan Kebudayaan

3. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
4. Meningkatnya Kemandirian Pemuda
5. Meningkatnya Prestasi Olahraga
6. Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Klaten terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

Dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya haris dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu.

Sasaran tertentu yang dimaksud antara lain adalah :

1. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya;
3. Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor

Kepariwisataan.

(1) Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata di tahun 2023

I. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

III. Program Pengembangan Kebudayaan

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pembinaan Sejarah

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VI. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

VII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VIII. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

IX. Program Pemasaran Pariwisata
1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

X. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatandan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

XI. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah 11 Program dengan 25 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, sifat penyebarannya adalah di beberapa wilayah Kabupaten Klaten.

c) Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Di tahun 2023 kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar **Rp 19.090.423.000,-**

URAIAN	JUMLAH
JUMLAH PROGRAM	11
a) Program Operasional/Non Urusan	1
b) Program Tusi	10
JUMLAH KEGIATAN	25
a) Kegiatan Operasional/Non Urusan	6
b) Kegiatan Tusi	19
JUMLAH SUB KEGIATAN	73
a) Sub Kegiatan Operasional/Non Urusan	14
b) Sub Kegiatan Tusi	59
PAGU ANGGARAN	**Rp 19.090.423.000,-**
a) Pagu Anggaran Operasional/Non Urusan	Rp 14.296.500.460,-
b) Pagu Anggaran Tusi	Rp 4.793.922.540,-

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan

Pelaksanaan semua program dan kegiatan sudah dilaksanakan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata tidak ada kendala.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.
b. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten tahun 2023 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Perangkat Daerah Disbudporapar Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. Realisasi program/kegiatan sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ialah adanya pandemi Covid-19. Target yang tidak tercapai dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan adanya pegawai yang mutasi dan pensiun.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ialah tidak tercapainya target capaian program Renstra perangkat Daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada

penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada tahun n+1 karena apabila hal ini tidak dilakukan maka target pada Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut ialah :
   - Evaluasi pelaksanaan Renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan.
   - Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja apabila ditemukan ketidaksesuaian agar diambil Langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

Klaten, 2022

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kab. Klaten

SRI NUGROHO, SIP. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

(Tahun berjalan) Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Disparbudpora

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021 TW IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.02	**Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**	Prosentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan			5	5	100	1,04	6,04	
2.19.02.2.01	penyadaraan, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader yang dibina			80	80	100	20	100	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/Kota	Jumlah fasilitasi kepemudaan pemuda pelopor			2	2	100	5	7	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, Advokasi, akses pengembangan diri pengunaan sarana dan prasarana tanpa Diskriminatif , partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapatkan pemahaman bahaya narkoba			250	250	100	50	300	
2,19,03	**Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	Prosentase meningkatnya hasil pengembangan dan pembinaan olahraga			10	10	100	2,85	12,85	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana			50	50	100	25	75	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanaan Pemberdayaan			2	2	100	2	4	
					50	50	100	50	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
3.26.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda Olahraga yang ditunjang			100	100	100	100	200	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Atk yang tersedia			60	60	100	60	120	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peralatan kantor dan Rumah tangga terpelihara THL pengaman kantor			100	100	100	100		
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Terpelihara			6	6	100	6	12	
					51	51	100	51	102	
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan			100	100	100	20	120	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kab/Kota**	Persentase adat istiadat dan ritus yang dilindungi			100	100	100	100	200	
2.22.02.2.01.01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan	jumlah adat istiadat dan ritus yang dilindungi			2	2	100	3	5	
					2	2	100	3	5	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pelaku adat istiadat dan ritus yang dibina			1	1	100	1	2	
					120	120	100	15	135	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	persentase kesenian tradisional yang dilindungi			1	1	100	100	101	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kesenian tradisional yang dilindungi			10	10	100	2	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021 TW IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	persentase objek cagar budaya yang dilestarikan			100	100	100	14	114	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan			5	5	100	100	105	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan dikaji			5	5	100	11	16	
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
	PARIWISATA									
3.26.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda Olahraga yang ditunjang			100	100	100	100	200	
3.26.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			10	10	100	10	20	
3.26.01.2.02	**Administrasi keuangan daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjanganya			12	12	100	12	24	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	terlaksananya adminitrasi pelaksanaan tugas ASN			90	83	92	90	173	
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	42		7	7	100	7	14	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44		9	9	100	9	18	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia			36	36	100	36	72	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah			145	145	100	145	290	
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terbeli dan gedung kantor yang terbeli			2	2	100	5	7	
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	5807		1000	1000	100	1000	1000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	24		4	4	100	4	4	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL kebersihan kantor, pengemudi, pengamanan / penjaga malam			26	26	100	26	26	
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				100	100	100	100	200	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Terpelihara			22	22	100	22	44	
					1	1	100			
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara			1	1	100	3	4	
3.26.02	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	Prosentase meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata			16	16	100,0	73	89	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	Persentase Desa Wisata yang terbentuk			70	70	100,0	70	140	
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan			1	1	100	1	2	
					24	24	100	5	29	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola			82	81	99	82	163	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah pengelola destinasi pariwisata			120	118	98	2	120	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata			2	2	100	6	8	
					14	14	100	6	20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021 TW IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek wisata yang dikerjasamakan pengelolaanya			0	0	0	1	1	
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	Prosentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan			5	5	100	68	73	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	Jumlah konten pemasaran pariwisata yang dirilis			6	6	100	6	12	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka promosi pariwisata yang dirilis			4	4	100	5	9	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi pariwisata yang diikuti			0	0	0	2	2	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata yang terlaksana			1	1	100	1	2	
3.26.05	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang terlaksana			9	9	100	25	34	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah SDM pariwisata bersertifikasi			25	25	100	25	50	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			24	24	100	250	274	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang berpartisipasi dalam pengembangan kemitraan pariwisata			1	1	100	4	5	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disbudporapar
Provinsi/Kabupaten/Kota Klaten

				Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
no	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Tahun(thn-2) 2021	Tahun(thn-1) 2022	Tahun(thn) 2023	Tahun(thn+1) 2024	Tahun(thn-2) 2021	Tahun(thn-1) 2022	Tahun(thn) 2023	Tahun(thn+1) 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan	-	-	5	4,2	4,45	4,46	5	4	4,45	4,46	
2	Prosentase meningkatnya hasil pengembangan dan pembinaan olahraga	-	-	10	2,85	4,29	5,71	10	4	4,29	5,71	
3	Prosentase urusan pemerintah Bidang Pariwisata,Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda Olahraga yang ditunjang	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	
4	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan	-	-	100	20	25	25	100	10	25	25	
5	Prosentase Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	-	100	14	17	21	100	8	17	21	
6	Prosentase urusan pemerintah Bidang Pariwisata,Bidang Kebudayaan dan Bidang Pemuda Olahraga yang ditunjang	-	-	100	100	100	100	100	50	100	100	
7	Prosentase meningkatnya produktifitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata	-	-	16	73	74	75	16	30	74	75	
8	Prosentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan	-	-	5	68	70	72	5	30	70	72	
9	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang terlaksana	-	-	5	25	30	35	5	14	30	35	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP.19650402 198703 1 018

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	**1,08**	**410.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	**1,08**	**810.000.000**	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**4,45**				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**4,45**		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina	20	340.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader yang dibina	20	740.000.000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Kepemudaan Pemuda Pelopor	20	15.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Kepemudaan Pemuda Pelopor	20	15.000.000	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	kab.klaten	Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang terbentuk	55	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	kab.klaten	Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang terbentuk	40	40.000.000	
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Pemuda Kader yang terpilih	5	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Pemuda Kader yang terpilih	5	20.000.000	
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	kab.klaten	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pemahaman Bahaya Narkoba	225	100.000.000	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	kab.klaten	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pemahaman Bahaya Narkoba	50	100.000.000	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Perencanaan Pembangunan Kepemudaan yang Tersusun	1	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Perencanaan Pembangunan Kepemudaan yang Tersusun	1	15.000.000	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan	1	0						
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	kab.klaten	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Memperoleh Penghargaan	5	20.000.000	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	kab.klaten	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Memperoleh Penghargaan	5	20.000.000	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	kab.klaten	Jumlah Pemuda Kader yang dilatih Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	10	30.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	kab.klaten	Jumlah Pemuda Kader yang dilatih Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	10	230.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	kab.klaten	Jumlah Paskibraka yang dilatih	10	100.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	kab.klaten	Jumlah Paskibraka yang dilatih	10	300.000.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	20	70.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase organisasi kepemudaan yg dikembangkan	20	70.000.000	
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Wirausaha Pemula	60	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Wirausaha Pemula	30	20.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	20	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1	50.000.000	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Persentase atlet berprestasi	**4,29**	**1.545.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Persentase atlet berprestasi	**4,29**	**2.070.000.000**	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	25	1.110.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab terlaksana	25	1.635.000.000	
2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	kab.klaten	Jumlah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan secara terkoordinasi, tersinkronisasi	1	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	kab.klaten	Jumlah Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga yang diselenggarakan secara terkoordinasi, tersinkronisasi	1	10.000.000	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	kab.klaten	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanaan Pemberdayaan	2	650.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	kab.klaten	Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terkoordinasi, tersinkronisasi dan dilaksanaan Pemberdayaan	2	1.175.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang tersedia	1	450.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang tersedia	1	450.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	100	350.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Event OR Prestasi Tingkat Daerah	100	350.000.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	2	50.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Event Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	1	50.000.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Peserta Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	1.000	150.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Peserta Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	1	150.000.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	kab.klaten	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan	150	150.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	kab.klaten	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kejuaraan	150	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Prestasi Olahraga	25	55.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Prestasi Olahraga	25	55.000.000	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi	20	10.000.000	Seleksi Atlet Daerah	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi	20	10.000.000	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pemusatan Latihan	20	10.000.000	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pemusatan Latihan	1	10.000.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan	25	10.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Atlet yang Mengikuti Pembinaan	25	10.000.000	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapatkan Penghargaan Olahraga	50	15.000.000	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Insan Olahraga yang Mendapatkan Penghargaan Olahraga	15	15.000.000	
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	kab.klaten	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	1	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	kab.klaten	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Terkoordinasi dan Tersinkronisasi	1	10.000.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Persentase Organisasi Olahraga yang mendapatkan Pembinaan	0	0						
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	kab.klaten	Jumlah Organisasi Olahraga yang terstandarisasi	0	-						
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	kab.klaten	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan	0	-						
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	25	30.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Presentase Olahraga Rekreasi yang mendapatkan Pembinaan	25	30.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	kab.klaten	Jumlah Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	1	20.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	kab.klaten	Jumlah Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	1	20.000.000	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	kab.klaten	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang diberdayakan	0	-						
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	kab.klaten	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang dikembangkan	0	-						
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	kab.klaten	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan	1	10.000.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	kab.klaten	Jumlah Olahraga Tradisional yang dimanfaatkan	1	10.000.000	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	**25**	**715.029.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	**25**	**1.315.029.000**	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan	100	365.029.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan	100	265.029.000	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Adat Istiadat dan Ritus yang dilindungi	4	265.029.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Adat Istiadat dan Ritus yang dilindungi	2	165.029.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Pelaku Adat Istiadat dan Ritus yang dibina	40	100.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Pelaku Adat Istiadat dan Ritus yang dibina	25	100.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	100	350.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	100	1.050.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	kab.klaten	Jumlah data pokok kebudayaan yang tersusun dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	1	150.000.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	kab.klaten	Jumlah data pokok kebudayaan yang tersusun dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	1	850.000.000	
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	kab.klaten	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang dibina	1	150.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	kab.klaten	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang dibina	1	150.000.000	
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Penghargaan Kesenian Tradisional	1	50.000.000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	kab.klaten	Jumlah Penghargaan Kesenian Tradisional	2	50.000.000	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	**40**	**158.388.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**		Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	**40**	**158.388.000**	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku seni tradisional yang terbina	100	158.388.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku seni tradisional yang terbina	100	158.388.000	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	kab.klaten	Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaku Kesenian Tradisonal yang dilakukan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	50	68.388.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	kab.klaten	Jumlah Sumber Daya Manusia Pelaku Kesenian Tradisonal yang dilakukan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan	25	68.388.000	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	kab.klaten	Jumlah Pelaku Seni Tradisional tersertifikasi	20	45.000.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	kab.klaten	Jumlah Pelaku Seni Tradisional tersertifikasi	15	45.000.000	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	kab.klaten	Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	3	45.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	kab.klaten	Jumlah Sanggar Seni yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	2	45.000.000	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		Persentase Pembinaan Sejarah	**35**	**105.431.000**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**		Persentase Pembinaan Sejarah	**35**	**105.431.000**	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal	100	105.431.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Masyarakat yang dibina tentang Sejarah Lokal	100	105.431.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Karya Ilmiah Masyarakat tentang Sejarah Lokal	40	40.431.000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Karya Ilmiah Masyarakat tentang Sejarah Lokal	40	42.931.000	
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	kab.klaten	Jumlah Objek Sejarah yang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarahnya tersedia	2	25.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	kab.klaten	Jumlah Objek Sejarah yang Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarahnya tersedia	2	22.500.000	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	kab.klaten	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Sejarah	10	40.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	kab.klaten	Jumlah Penyebaran Data dan Informasi Sejarah	5	40.000.000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	**17**	**186.945.000**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	**17**	**186.945.000**	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	100	51.945.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	100	51.945.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah TACB yang terbentuk dan Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan dikaji	11	51.945.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah TACB yang terbentuk dan Objek Cagar Budaya yang didaftarkan dan dikaji	11	51.945.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya yang diterbitkan	0	-						
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	100	135.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	100	135.000.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah Objek Cagar Budaya yang diselamatkan	10	85.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah Objek Cagar Budaya yang diselamatkan	4	85.000.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diteliti	3	50.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang diteliti	3	50.000.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	kab.klaten	Jumlah cagar budaya yang terkelola	0	-						
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan	**0**	**0**						
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Persentase Museum Kabupaten terkelola	0	-						
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	kab.klaten	Jumlah Koleksi Terlindungi Secara Terpadu	0	-						
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	kab.klaten	Jumlah SDM Permuseuman terlatih	0	-						
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	kab.klaten	Jumlah Masyarakat yang terlayani	0	-						
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	kab.klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum tersedia	0	-						
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	kab.klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum terevitalisasi	0	-						
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**6.161.838.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**6.161.838.000**	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	158.585.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	130.000.000	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab.klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun	10	145.585.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kab.klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tersusun	10	130.000.000	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kab.klaten	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	10	13.000.000						
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	4.793.922.540	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	4.793.922.540	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab.klaten	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya	45	4.793.922.540	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab.klaten	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya	45	4.793.922.540	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	203.830.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	211.415.460	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab.klaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60	57.480.460	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kab.klaten	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60	50.480.460	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab.klaten	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan tersedia	7	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	kab.klaten	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan tersedia	9	39.000.000	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab.klaten	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9	6.350.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kab.klaten	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9	6.350.000	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab.klaten	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	36	35.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab.klaten	Jumlah kunjungan tamu terfasilitasi	36	35.000.000	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab.klaten	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145	65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab.klaten	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	145	80.585.000	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	68.000.000	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	kab.klaten	Jumlah mebel yang diadakan		-						
3.26.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab.klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab.klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	8	68.000.000	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	565.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	565.500.000	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab.klaten	Jumlah Surat Terkirim	1.000	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab.klaten	Jumlah Surat Terkirim	1.000	3.500.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab.klaten	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12	210.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab.klaten	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12	320.200.000	
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab.klaten	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayarkan	26	352.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab.klaten	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayarkan	26	241.800.000	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	380.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	393.000.000	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab.klaten	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	22	240.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab.klaten	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	24	253.000.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab.klaten	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1	0						
3.26.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab.klaten	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	50	140.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab.klaten	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terehabilitasi/terpelihara	50	140.000.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**74**	**7.209.965.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**74**	**7.384.965.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Persentase Desa Wisata yang terbentuk	72	90.000.000	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Persentase Desa Wisata yang terbentuk	72	90.000.000	
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan	5	30.000.000	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Keputusan KDH tentang Desa Wisata yang diterbitkan	5	30.000.000	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah dokumen perencanaan daya tarik wisata yang tersusun (profil, FS, DED, masterplan dll)	1	10.000.000	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah dokumen perencanaan daya tarik wisata yang tersusun (profil, FS, DED, masterplan dll)	1	10.000.000	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dikembangkan	7	30.000.000	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dikembangkan	7	30.000.000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	50	20.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah daya tarik wisata dan Desa Wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	50	20.000.000	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3	30.000.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3	205.000.000	
3.26.02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis yang tersusun	0	-						
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata	0	-						
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	0	-						
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	2	10.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	2	10.000.000	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	500	20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	500	195.000.000	
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Penerapan Kawasan Startegis Pariwisata Berkelanjutan	0	-						
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	83	7.049.965.000	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	83	7.049.965.000	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Tersusun	1	100.000.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata yang Tersusun	1	100.000.000	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	2	256.233.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	2	256.233.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Lokasi yang difasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	6	6.663.732.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Lokasi yang difasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	6	6.663.732.000	
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dilakukan monitoring dan evaluasi	0	-						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2	5.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2	5.000.000	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	6	25.000.000	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	6	25.000.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Pariwisata Terbina	60	40.000.000	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Usaha Pariwisata Terbina	60	40.000.000	
3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan	20	15.000.000	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Rekomendasi Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan	20	15.000.000	
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	13	25.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina	1	25.000.000	
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	kab.klaten	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata	0	-						
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	**70**	**193.515.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Tingkat intensitas promosi pariwisata**	**70**	**193.515.000**	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	442	193.515.000	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Konten Pemasaran Pariwisata yang dirilis	442	193.515.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka Promosi Pariwisata yang dirilis	12	70.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya dalam rangka Promosi Pariwisata yang dirilis	12	70.000.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti	1	70.000.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	kab.klaten	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti	1	70.000.000	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Jenis data informasi pariwisata yang tersedia	4	18.515.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Jenis data informasi pariwisata yang tersedia	4	18.515.000	
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang terlaksana	5	35.000.000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	kab.klaten	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata yang terlaksana	5	35.000.000	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	-						
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**15**	**29.746.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI**	**15**	**29.746.000**	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	3	29.746.000	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	3	29.746.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	kab.klaten	Jumlah Pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	15	24.746.000	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	kab.klaten	Jumlah Pelaku ekraf yang mendapatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	15	24.746.000	
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	kab.klaten	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	0	-						
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	kab.klaten	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1	5.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	kab.klaten	Jumlah dokumen pelaporan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	1	5.000.000	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**30**	**674.566.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**30**	**674.566.000**	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	475	674.566.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	475	674.566.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	kab.klaten	Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	300	270.216.000	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	kab.klaten	Jumlah SDM Pariwisata yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	300	270.216.000	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	4	374.350.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Stakeholder Bidang Pariwisata yang Berpartisipasi dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	4	374.350.000	
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	kab.klaten	Jumlah Masyarakat, Guru dan Pelajar yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepariwisataan	0	-						
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	30.000.000	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	kab.klaten	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	30.000.000	
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kab.klaten	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi	0	-						
					17.390.423.000					**19.090.423.000**	

Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klaten

SRI NUGROMO, SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP 19650402 198703 1 018

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

NO	Pogram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	4	3	5	8
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Kab. Klaten	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	**25**	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Persentase Komunitas Budaya yang Dilegalkan	100	Usulan : Pembinaan Kelembagaan Budaya
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Persentase Kesenian Tradisional yang dilindungi	100	Usulan : Pembinaan Kelembagaan Budaya
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Kab. Klaten	**Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola**	**74**	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Persentase Desa Wisata yang terbentuk	72	Usulan : Pembinaan Kelembagaan Desa Wisata
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	3	Usulan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Persentase Destinasi Pariwisata yang terkelola	83	Usulan : Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kab. Klaten	**Persentase SDM pariwisata yang kompeten**	**30**	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Klaten	Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikasi	475	Pembinaan Kelompok sadar wisata dan ekonomi kreatif

Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO,SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja 2023
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya	1. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	1. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Sing Kepemudaan
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Program Pengembangan Kebudayaan
			4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			5. Program Pembinaan Sejarah
			6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secaara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan berencana	3. Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			9. Program Pemasaran Pariwisata
			10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			11. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DISBUDPORAPAR
KLATEN

SRI NUGROHO, SIP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650402 198703 1 018

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**2,880,000,000**					**3,818,216,000**
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**810,000,000**					**701,310,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**740,000,000**					**591,310,000**
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	20 orang	20 %	15,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	35,000,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	40 Orang	20 %	40,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	70,000,000
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	5 Orang	20 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	25,000,000
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	50 orang	20 %	100,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	207,779,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	1 Dokumen	20 %	15,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	18,531,000
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	5 Orang	20 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	20,000,000
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	10 Orang	20 %	230,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	40,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Terbinanya pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	10 Orang	20 %	300,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	175,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**70,000,000**					**110,000,000**
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terwujudnya pengembangan organisasi kepemudaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	30 Orang	20 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Terwujudnya pengembangan organisasi kepemudaan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	1.08 % 4.45 %	1 Dokumen	20 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.08 % 4.45 %	60,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**2,070,000,000**					**3,116,906,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**1,635,000,000**					**1,711,906,000**
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha yang dikembangkan	Terlaksananya Pemibinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Unit	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	11,906,000
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pemibinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	2 Dokumen	25 %	1,175,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	1,500,000,000
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Terlaksananya Pemibinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 unit	25 %	450,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	200,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**350,000,000**					**950,000,000**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Event OR Prestasi Tingkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Dokumen	100 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	250,000,000
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Event OR Prestasi Tingkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	350,000,000
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Terselenggaranya Event OR Prestasi Tingkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	150 orang	100 %	150,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	350,000,000
2	**19**	**03**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**								**55,000,000**					**265,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Persentase atlet berprestasi	Jumlah atlet Daerah yang Diseleksi	Terwujudnya Prestasi Olahraga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	20 orang	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	0
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Terwujudnya Prestasi Olahraga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Pelatda	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	50,000,000
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Terwujudnya Prestasi Olahraga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	25 Orang	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	100,000,000
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima Penghargaan	Terwujudnya Prestasi Olahraga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	15 Orang	25 %	15,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	100,000,000
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Persentase atlet berprestasi	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	Terwujudnya Prestasi Olahraga	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 dokumen	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	15,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**30,000,000**					**190,000,000**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pembinaan olahraga rekreasi	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Dokumen	25 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	90,000,000
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase atlet berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Terlaksananya pembinaan olahraga rekreasi	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4.29 %	1 Dokumen	25 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase atlet berprestasi	4.29 %	100,000,000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**1,765,793,000**					**3,976,133,000**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**1,315,029,000**					**3,058,156,000**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**265,029,000**					**645,000,000**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan komunitas budaya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	2 objek	100 %	165,029,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	420,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan komunitas budaya	Kab. Klaten, Klaten Utara, Jonggrangan	25 %	25 orang	100 %	100,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	225,000,000
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**1,050,000,000**					**2,413,156,000**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	Jumlah 0bjek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Terwujudnya perlindungan kesenian Tradisional	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Objek	100 %	850,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	1,763,156,000
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terwujudnya perlindungan kesenian Tradisional	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten	25 %	1 Laporan	100 %	150,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	500,000,000
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya perlindungan kesenian Tradisional	Kab. Klaten, Klaten Utara, Jonggrangan	25 %	2 Sertifikat	100 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	25 %	150,000,000
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**158,388,000**					**237,143,000**
2	**22**	**03**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**158,388,000**					**237,143,000**
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terbinanya Pelaku seni tradisional	Kab. Klaten, Klaten Utara, Jonggrangan	40.00 %	25 orang	100 %	68,388,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	40.00 %	77,143,000
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Terbinanya Pelaku seni tradisional	Kab. Klaten, Klaten Utara, Jonggrangan	40.00 %	15 Sertifikat	100 %	45,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	40.00 %	80,000,000
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Terbinanya Pelaku seni tradisional	Kab. Klaten, Klaten Utara, Jonggrangan	40.00 %	2 Lembaga	100 %	45,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	40.00 %	80,000,000
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**								**105,431,000**					**237,143,000**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**105,431,000**					**237,143,000**
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	Terbinanya Jumlah masyarakat tentang sejarah lokal	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.00 %	40 Orang	100 %	42,931,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pembinaan Sejarah	35.00 %	82,143,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terbinanya Jumlah masyarakat tentang sejarah lokal	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.00 %	2 Unit	100 %	22,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pembinaan Sejarah	35.00 %	75,000,000
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat	Terbinanya Jumlah masyarakat tentang sejarah lokal	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.00 %	5 Dokumen	100 %	40,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pembinaan Sejarah	35.00 %	80,000,000
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**186,945,000**					**443,691,000**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**51,945,000**					**193,691,000**
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan	Terbentuknya TACB dan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	11 objek	100 %	51,945,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	17 %	193,691,000
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**								**135,000,000**					**250,000,000**
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi	Terkelolanya Cagar Budaya secara Terpadu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	4 objek	100 %	85,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	17 %	150,000,000
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	Terkelolanya Cagar Budaya secara Terpadu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	3 objek	100 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	17 %	100,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**14,444,630,000**					**14,281,197,000**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,161,838,000**					**7,703,098,000**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**130,000,000**					**192,276,000**
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	10 Dokumen	100 %	130,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	177,976,000
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,793,922,540**					**5,952,222,000**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	45 Orang/bulan	100 %	4,793,922,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	5,952,222,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**211,415,460**					**362,700,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	60 paket	90 %	50,480,460	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	150,000,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	9 paket	90 %	39,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	66,000,000
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	365 dokumen	90 %	6,350,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	6,500,000
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	36 laporan	90 %	35,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	65,000,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	145 laporan	90 %	80,585,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	75,200,000
3	**26**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**68,000,000**					**175,000,000**
3	26	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	8 unit	90 %	68,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	175,000,000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**565,500,000**					**560,900,000**
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	2 laporan	90 %	3,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	3,700,000
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	12 laporan	90 %	320,200,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	170,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	12 laporan	90 %	241,800,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	387,200,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**393,000,000**					**460,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas operasional ata lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	24 unit	90 %	253,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	240,000,000
3	26	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100.00 %	50 unit	90 %	140,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100.00 %	220,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**7,384,965,000**					**5,077,978,000**
3	**26**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								**90,000,000**					**315,000,000**
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terbentuknya Desa Wisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Cawas, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	74 %	5 Lokasi	70 %	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	20,000,000
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Terbentuknya Desa Wisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	1 dokumen	70 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	150,000,000
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Terbentuknya Desa Wisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	7 lokasi	70 %	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	45,000,000
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Terbentuknya Desa Wisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	50 dokumen	70 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	100,000,000
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**205,000,000**					**85,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	74 %	2 dokumen	3 lokasi	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	10,000,000
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota	Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	74 %	500 laporan	3 lokasi	195,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	75,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**7,049,965,000**					**4,602,978,000**
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Kab. Klaten, Polanharjo, Ponggok Kab. Klaten, Tulung, Cokro Kab. Klaten, Tulung, Daleman	74 %	1 dokumen	82 %	100,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	215,000,000
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan	74 %	2 lokasi	82 %	256,233,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	0

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang tersedia dan terpelihara	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	74 %	6 unit	82 %	6,663,732,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	4,277,978,000
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	74 %	2 Laporan	82 %	5,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	10,000,000
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / kota	Terkelolanya Destinasi Pariwisata	Kab. Klaten, Prambanan, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Bayat, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Polanharjo, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Karanganom, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan Kab. Klaten, Kemalang, Semua Kelurahan	74 %	6 lokasi	82 %	25,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	100,000,000
3	**26**	**02**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**								**40,000,000**					**75,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Dokumen layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Terbinanya usaha pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	20 dokumen	50 %	15,000,000	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	15,000,000
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Terbinanya usaha pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	1 Laporan	50 %	25,000,000	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	74 %	60,000,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**193,515,000**					**987,798,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**193,515,000**					**987,798,000**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tingkat intensitas promosi pariwisata	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Terilisnya konten pemasaran pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	12 dokumen	442 Konten	70,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat intensitas promosi pariwisata	70 %	75,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Tingkat intensitas promosi pariwisata	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Terilisnya konten pemasaran pariwisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 laporan	442 Konten	70,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat intensitas promosi pariwisata	70 %	787,798,000
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Tingkat intensitas promosi pariwisata	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten / kota, baik dalam dan luar negeri	Terilisnya konten pemasaran pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4 dokumen	442 Konten	18,515,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat intensitas promosi pariwisata	70 %	25,000,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Tingkat intensitas promosi pariwisata	Jumlah dokumen Kerjasama dan kemitraan Pariwisata dalam dan luar negeri	Terilisnya konten pemasaran pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	5 dokumen	442 Konten	35,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Tingkat intensitas promosi pariwisata	70 %	100,000,000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**								**29,746,000**					**108,096,000**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**								**29,746,000**					**108,096,000**
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif	Terlaksananya pengembangan sektor ekonomi kreatif	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	15 dokumen	1 sektor	24,746,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	15 Orang	98,096,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Terlaksananya pengembangan sektor ekonomi kreatif	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	1 Dokumen	1 sektor	5,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	15 Orang	10,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**674,566,000**					**404,227,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**674,566,000**					**404,227,000**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.00 %	300 Orang	400 orang	270,216,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	294,227,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangann kemitraan	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.00 %	4 orang	400 orang	374,350,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	75,000,000
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	30.00 %	30 Orang	400 orang	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	35,000,000
												TOTAL	**19,090,423,000**					**22,075,546,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.22.2.19.3.26.04.0000 DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 26 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Terlaksananya pengembangan sektor ekonomi kreatif	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	1 Dokumen	1 sektor	5,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	15 Orang	10,000,000
3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**674,566,000**					
3 26 05 2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**674,566,000**					**404,227,000**
														404,227,000
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.00 %	300 Orang	400 orang	270,216,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	294,227,000
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangann kemitraan	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.00 %	4 orang	400 orang	374,350,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	75,000,000
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Tersertifikasinya SDM Pariwisata	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Semua Kelurahan	30.00 %	30 Orang	400 orang	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	30.00 %	35,000,000
								TOTAL	**19,090,423,000**					**22,075,546,000**

Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan
Dan Olahraga Dan Pariwisata
Kabupaten Klaten

SRI NUGROHO, S.IP. MM
Pembina, TK.I, IVb
NIP. 19650402 198703 1 018

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 34

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 40

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 46

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 48

BAB V PENUTUP 60

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam deseminasi dengan Bappedalitbang dan Bidang Aset BPKPAD yang kemudian hasilnya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD menjadi penetapan RKPD. Dalam penyusunannya harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2021-2026 serta arah kebijakan pembangunan tahun kedua sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pasal 273 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan rumusan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian Renja-PD adalah dokumen perencanaan yang berlaku satu tahun dan dibuat dengan mengacu pada RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan usulan dari masyarakat (*partisipatory approach*). Renja-PD Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses penyusunan Renja PD mempedomani ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah

(RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. PeraturanBupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten KlatenTahun 2021-2026;

51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada urusan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan di tahun 2023 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas pembangunan sesuai tupoksi di Kabupaten Klaten.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten pada tahun 2023 dengan berdasarkan pengkajian terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023;
c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan urusan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas dan/atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut DPPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp 49.268.860.463,- dengan 4 program bidang pangan, 4 program bidang kelautan dan perikanan serta 6 program bidang pertanian. Dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 41.324.695.420,- (83,88%) dengan capaian realisasi fisik sebesar 98,88%.

Penyerapan anggaran untuk masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.494.951.136,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.213.010.150,- (81,14%) dan fisik sebesar 98,12%
2. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.611.530.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 1.487.477.734,- (92,30%) dan fisik sebesar 100%
3. Bidang Urusan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 46.162.379.327,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 38.624.207.536,- (83,67%) dan fisik sebesar 96,79%

Realisasi fisik dan keuangan yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Realisasi Fisik serta Keuangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021

No	Uraian Program /Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Target dan Realisasi Kinerja			Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pangan									
I	***PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN***	***Skor Pola Pangan Harapan***	***93,25 Skor***	***91 Skor***	***97,59***	***96***	***667.450.000***	***528.211.900***	***79,14***
1	**Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketersediaan pangan utama/beras**	**270.287 Ton**	**285.205,06 Ton**	**105,52**	**96**	**667.450.000**	**528.211.900**	**79,14**
a	*Penyediaan infrastruktur lumbung pangan*	*Jumlah kelompok lumbung pangan yang dibina*	*9 kelompok*	*8 kelompok*	*88,89*	*88,89*	*317.450.000*	*179.793.900*	*56,64*
b	*Penyediaan infrastruktur lantai jemur*	*Jumlah lantai jemur yang dibangun*	*1 unit*	*1 unit*	*100*	*100*	*50.000.000*	*49.950.000*	*99,90*
c	*Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan lainnya*	*Jumlah rumah RMU dan RMU yang dibangun*	*2 unit*	*2 unit*	*100*	*100*	*300.000.000*	*298.468.000*	*99,49*
II	***PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT***	***Skor Pola Pangan Harapan***	***93,25 Skor***	***91 Skor***	***97,59***	***96***	***756.501.136***	***630.964.150***	***83,41***
1	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**	**ketersediaan energi**	**3.015 kkal/kapita/ hari**	**2.663 kkal/kapita/ hari**	**88**	**91**	**173.538.636**	**119.798.750**	**69,03**
		ketersediaan protein	**84,5 gram/kapita/ hari**	**72,64 gram/kapita/ hari**	**86**				
a	*Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal*	-					-	-	*#DIV/ 0!*

b	*Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan*	*Jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pangan murah yang dilakukan*	*3 kali*	*3 kali*	*85*	*85*	*51.300.000*	*35.067.750*	*68,36*
c	*Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan*	*Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan administrasi*	*2 kelompok*	*2 kelompok*	*100*	*100*	*45.778.636*	*25.531.500*	*55,77*
d	*Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia*	*Jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti*	*8 kali*	*7 kali*	*87,50*	*87,50*	*76.460.000*	*59.199.500*	*77,43*
2	**Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota**	**Penguatan cadangan pangan**	**40 Ton**	**39,11 Ton**	**97,78**	**98**	**17.000.000**	**6.799.800**	**40,00**
a	*Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota*	*Stok beras untuk gudang cadangan pangan*	*40000 kg*	*39105 kg*	*97,76*	*97,76*	*17.000.000*	*6.799.800*	*40,00*
3	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**ketersediaan energi**	**3.015 K.kal/kapita/ hari**	**2.663 K.kal/kapita/ hari**	**88**	**100**	**565.962.500**	**504.365.600**	**89,12**
		ketersediaan protein	**84,5 gram/kapita/ hari**	**72,64 gram/kapita/ hari**	**86**				
a	*Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal*	*Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal*	*100 orang*	*100 orang*	*100*	*100*	*565.962.500*	*504.365.600*	*89,12*
		Jumlah kelompok penerima fasilitasi pekarangan pangan lestari (P2L)	*7 lokasi/ kelompok*	*7 lokasi/ kelompok*	*100*				
III	***PENANGANAN KERAWANAN PANGAN***	***Skor Pola Pangan Harapan***	***93,25 Skor***	***91 Skor***	***97,59***	***100***	***31.000.000***	***28.859.800***	***93,10***
1	**Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani**	**5 lokasi**	**4 lokasi**	**80**	**100**	**31.000.000**	**28.859.800**	**93,10**
a	*Koordinasi dan sinkronisasi penangananan kerawanan pangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah kelompok afinitas yang dibina*	*20 kelompok*	*20 kelompok*	*100*	*100*	*31.000.000*	*28.859.800*	*93,10*
IV	***PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN***	***Skor Pola Pangan Harapan***	***93,25 Skor***	***91 Skor***	***97,59***	***100***	***40.000.000***	***24.974.300***	***62,44***

1	**Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**79 %**	**83 %**	**105,06**	**100**	**40.000.000**	**24.974.300**	**62,44**
a	*Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota*	*Jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina*	*100 orang*	*100 orang*	*100*	*100*	*40.000.000*	*24.974.300*	*62,44*
Urusan Kelautan dan Perikanan									
I	***PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP***	***Produksi perikanan tangkap***	***537 Ton***	***311,82 Ton***	***58,07***	***100***	***20.000.000***	***18.020.000***	***90,10***
1	**Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota**	**cakupan bina kelompok nelayan**	**33 %**	**33 %**	**100**	**100**	**20.000.000**	**18.020.000**	**90,10**
a	*Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil*	*Jumlah kelompok nelayan yang dibina*	*2 poknel*	*2 poknel*	*100*	*100*	*20.000.000*	*18.020.000*	*90,10*
II	***PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA***	***Produksi perikanan budidaya***	***28.315 Ton***	***30.109,31 Ton***	***106,34***	***100***	***1.498.280.000***	***1.390.347.834***	***92,80***
1	**Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**	**Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan**	**5 %**	**5 %**	**100**	**100**	**26.680.000**	**18.880.000**	**70,76**
a	*Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil*	*Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan*	*50 orang*	*50 orang*	*100*	*100*	*26.680.000*	*18.880.000*	*70,76*
2	**Pengelolaan Pembudidayaan ikan**	**jumlah produksi perikanan budidaya**	**28.315 Ton**	**30.109,31 Ton**	**106,34**	**104**	**1.471.600.000**	**1.371.467.834**	**93,20**
a	*Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*	*Jumlah fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan air tawar*	*18 paket*	*18 paket*	*100*	*100*	*700.400.000*	*633.401.000*	*90,43*
b	*Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*	*Jumlah produksi benih ikan*	*800000 ekor*	*898000 ekor*	*112,25*	*112,25*	*75.000.000*	*74.053.400*	*98,74*
c	*Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat*	*Jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan induk ikan*	*15 pokdakan*	*15 pokdakan*	*100*	*100*	*696.200.000*	*664.013.434*	*95,38*
III	***PENGAWASAN***	***Produksi***	***537 Ton***	***311,82 Ton***	***58,07***	***100***	***37.000.000***	***33.380.000***	***90,22***

	SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	***perikanan tangkap***							
1	**Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota**	**Cakupan tabur benih ikan/restoking perairan umum**	**8 %**	**8 %**	**100**	**100**	**37.000.000**	**33.380.000**	**90,22**
a	*Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota*	*Jumlah lokasi penebaran benih di perairan umum*	*2 lokasi*	*2 lokasi*	*100*	*100*	*37.000.000*	*33.380.000*	*90,22*
IV	***PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN***	***Konsumsi Ikan***	***20,41 kg/kapita/ tahun***	***20,28 kg/kapita/ tahun***	***99,36***	***100***	***56.250.000***	***45.729.900***	***81,30***
1	**Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	**jumlah produk olahan ikan**	**1.050.400 kg**	**1.052.400 kg**	**100,2**	**100**	**56.250.000**	**45.729.900**	**81,30**
a	*Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil*	*Jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemari*	*4 kali*	*4 kali*	*100*	*100*	*56.250.000*	*45.729.900*	*81,30*
Urusan Pertanian									
I	***PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	***80 %***	***80 %***	***100***	***99***	***34.377.081.630***	***27.734.986.961***	***80,68***
1	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase Penyusunan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**90 %**	**90 %**	**100**	**100**	**42.522.330**	**21.914.500**	**51,54**

a	*Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun*	*10 dokumen*	*10 dokumen*	*100*	*100*	*25.000.000*	*15.266.500*	*61,07*
b	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun*	*7 laporan*	*7 laporan*	*100*	*100*	*17.522.330*	*6.648.000*	*37,94*
2	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**persentase pemenuhan administrasi keuangan**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**33.131.899.301**	**26.656.559.034**	**80,46**
a	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya*	*227 orang*	*227 orang*	*100*	*100*	*33.100.399.301*	*26.643.679.034*	*80,49*
b	*Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN*	*Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya*	*227 orang*	*227 orang*	*100*	*100*	*31.500.000*	*12.880.000*	*40,89*
3	**Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**24.000.000**	**23.730.638**	**98,88**
a	*Pengamanan barang milik daerah*	*Jumlah pembayaran jasa jaminan Barang Milik Daerah*	*1 jenis*	*1 jenis*	*100*	*100*	*24.000.000*	*23.730.638*	*98,88*
4	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian**	**80 %**	**80 %**	**100**	**100**	**10.700.000**	**6.700.000**	**62,62**
a	*Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-undangan*	*Jumlah bimbingan teknis terlaksana*	*1 kali*	*1 kali*	*100*	*100*	*10.700.000*	*6.700.000*	*62,62*
5	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum**	**80 %**	**80 %**	**100**	**97**	**249.600.000**	**214.785.200**	**86,05**
a	*Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	*Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia*	*16 jenis*	*16 jenis*	*100*	*100*	*20.000.000*	*19.995.500*	*99,98*
b	*Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia*	*69 jenis*	*69 jenis*	*100*	*100*	*133.100.000*	*122.221.900*	*91,83*

c	*Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*	*Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia*	*14 jenis*	*14 jenis*	*100*	*100*	*28.000.000*	*15.934.800*	*56,91*
d	*Fasilitasi kunjungan tamu*	*Jumlah tamu terfasilitasi*	*60 kali*	*51 kali*	*85*	*85*	*30.100.000*	*18.436.000*	*61,25*
e	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD*	*87 kali*	*87 kali*	*100*	*100*	*38.400.000*	*38.197.000*	*99,47*
6	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia**	**85 %**	**85 %**	**100**	**100**	**55.552.500**	**55.178.200**	**99,33**
a	*Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia*	*40 unit*	*40 unit*	*100*	*100*	*55.552.500*	*55.178.200*	*99,33*
7	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia**	**85 %**	**85 %**	**100**	**100**	**516.465.610**	**449.904.800**	**87,11**
a	*Penyediaan jasa surat menyurat*	*Jumlah surat terkirim*	*5000 surat*	*5000 surat*	*100*	*100*	*9.000.000*	*5.789.300*	*64,33*
b	*Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik*	*Jumlah jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terbayar*	*3 jenis*	*3 jenis*	*100*	*100*	*165.500.000*	*152.641.296*	*92,23*
c	*Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*	*Jumlah jasa pelayanan umum kantor tersedia*	*17 orang*	*17 orang*	*100*	*100*	*341.965.610*	*291.474.204*	*85,23*
8	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	**85 %**	**85 %**	**100**	**92,66**	**346.341.889**	**306.214.589**	**88,41**
a	*Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan*	*Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara*	*293 unit*	*250 unit*	*85,32*	*85,32*	*96.051.125*	*67.342.137*	*70,11*
b	*Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya*	-	-	-	-	-	-	-	*#DIV/0!*

c	*Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya*	*Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara*	*72 unit*	*72 unit*	*100*	*100*	*250.290.764*	*238.872.452*	*95,44*
II	***PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN***	***Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar***	***66,98 kwt/ha***	***66,92 kwt/ha***	***99,91***	***100***	***1.376.335.135***	***1.165.837.700***	***84,71***
		Produktivitas cabe	***8,90 kwt/ha***	***7,87 kwt/ha***	***88,43***				
		Produksi tembakau rajang	***1092 Ton***	***1567,45 Ton***	***143,54***				
		Produksi Tembakau asepan	***946 Ton***	***1270,83 Ton***	***134,34***				
1	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Produksi jagung**	**101.059 Ton**	**88537,89 Ton**	**87,61**	**100**	**944.819.135**	**784.550.450**	**83,04**
		Produksi kedele	**1.045 Ton**	**1998,21 Ton**	**191,22**				
		Produksi cabe	**623,89 Ton**	**1699,68 Ton**	**272,43**				
		Produksi tembakau rajangan	**1.605 Ton**	**1567,45 Ton**	**97,66**				
		Produksi tembakau asepan	**2.320 Ton**	**1270,83 Ton**	**54,78**				
a	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*Jumlah kelompok penerima bantuan alsinbun*	*34 kelompok*	*34 kelompok*	*100*	*100*	*881.769.335*	*723.600.750*	*82,06*
b	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*Jumlah UPJA yang dibina*	*250 kelompok*	*250 kelompok*	*100*	*100*	*63.049.800*	*60.949.700*	*96,67*
		Jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	*2 kelompok*	*2 kelompok*	*100*				
2	**Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel**	**13 %**	**16 %**	**123,08**	**100**	**431.516.000**	**381.287.250**	**88,36**
a	*Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman*	*Jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele*	*10 ha*	*10 ha*	*100*	*100*	*300.136.000*	*264.385.000*	*88,09*
b	*Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	*Jumlah luasan pengembangan padi, jagung, kedelai*	*100 ha*	*100 ha*	*100*	*100*	*131.380.000*	*116.902.250*	*88,98*
III	***PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN***	***Persentase Infrastruktur***	***36 %***	***36 %***	***100***	***100***	***8.707.076.400***	***8.428.086.500***	***96,80***

	PRASARANA PERTANIAN	***irigasi dalam kondisi baik/ fungsional***							
		Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	***26 %***	***26 %***	***100***				
		Produktivitas padi	***64,01 kwt/ha***	***65,58 kwt/ha***	***102,45***				
1	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah luasan LP2B/KP2B**	**32000 ha**	**32000 ha**	**100**	**100**	**970.826.400**	**934.693.690**	**96,28**
a	*Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan LCP2B*	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) LP2B yang disusun*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*100*	*100*	*50.340.000*	*46.140.000*	*91,66*
b	*Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B*	*Jumlah peta LP2B yang disusun*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*100*	*100*	*10.000.000*	*5.893.690*	*58,94*
c	*Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya*	*Terlaksananya pengadaan roda tiga dan rumah pengering untuk kelompok tani perkebunan*	*29 unit*	*29 unit*	*100*	*100*	*910.486.400*	*882.660.000*	*96,94*
2	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun**	**15 unit/lokasi**	**15**	**100**	**100**	**7.670.000.000**	**7.429.729.510**	**96,87**
		Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana infrastruktur irigasi	**38 unit/lokasi**	**38**	**100**				
		Jumlah BPP yang direnovasi	**2 lokasi**	**2**	**100**				
a	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani*	*Jumlah jaringan irigasi tanah dangkal/ dalam yang dibangun*	*15 unit/lokasi*	*15 unit/lokasi*	*100*	*100*	*3.340.000.000*	*3.304.250.500*	*98,93*
b	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian*	*Jumlah embung yang dibangun/ rehabilitasi*	*12 unit/lokasi*	*12 unit/lokasi*	*100*	*100*	*1.440.000.000*	*1.393.440.000*	*96,77*

c	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*	*Jalan usaha tani yang dibangun/ rehabilitasi*	*4 km*	*4 km*	*100*	*100*	*800.000.000*	*761.855.000*	*95,23*
d	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit*	*Jumlah Dam parit yang dibangun/ direhabilitasi*	*4 unit/lokasi*	*4 unit/lokasi*	*100*	*100*	*480.000.000*	*457.060.000*	*95,22*
e	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage*	*Jumlah long storage yang dibangun/ direhabilitasi*	*3 unit/lokasi*	*3 unit/lokasi*	*100*	*100*	*360.000.000*	*343.590.000*	*95,44*
f	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya*	*Jumlah BPP kecamatan yang direnovasi dan tersedianya sarana informasi pertanian*	*23 unit*	*23 unit*	*100*	*100*	*1.250.000.000*	*1.169.534.010*	*93,56*
3	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil**	**277500 ekor**	**273419 ekor**	**99**	**100**	**66.250.000**	**63.663.300**	**96,10**
a	*Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit ternak dan Rumpun/Galur ternak*	*Peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina*	*200 peternak*	*200 peternak*	*100*	*100*	*66.250.000*	*63.663.300*	*96,10*
IV	***PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER***	***Populasi ternak sapi***	***117492 ekor***	***112517 ekor***	***95,77***	***100***	***572.935.200***	***451.112.472***	***78,74***
		Produksi daging sapi	**3211 ton**	***2268 ton***	***70,63***				
1	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis**	**89 %**	**89 %**	**100**	**100**	**170.764.860**	**147.875.800**	**86,60**
a	*Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi antraks*	*6.000 ekor*	*6.000 ekor*	*100*	*100*	*170.764.860*	*147.875.800*	*86,60*
		Jumlah lokasi identifikasi dan pemeriksaan penyakit AI	*10 lokasi*	*10 lokasi*	*100*				
2	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan**	**Cakupan pelayanan kesehatan hewan,**	**86 %**	**86 %**	**100**	**100**	**87.214.340**	**67.551.590**	**77,45**

	dan Produk Hewan Daerah kabupaten/Kota	**IB dan penanganan gangguan reproduksi**							
a	*Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan dan IB*	*11000 ekor*	*12000 ekor*	*109,09*	*100*	*87.214.340*	*67.551.590*	*77,45*
3	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan**	**30 %**	**30 %**	**100**	**100**	**255.000.000**	**191.823.600**	**75,22**
a	*Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan*	*Pelaku usaha peternakan rakyat; Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan*	*75 unit*	*75 unit*	*100*	*100*	*210.000.000*	*169.495.100*	*80,71*
b	*Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*Pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/ bahan asal ternak*	*10 lokasi*	*10 lokasi*	*100*	*100*	*45.000.000*	*22.328.500*	*49,62*
4	**Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Produksi daging ruminansia**	**2300 ton**	**2595 ton**	**112,83**	**100**	**59.956.000**	**43.861.482**	**73,16**
a	*Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan*	*Jumlah pemotongan ternak di Rumah Potong Hewan*	*1898 ekor*	*1980 ekor*	*104,32*	*104,32*	*59.956.000*	*43.861.482*	*73,16*
V	***PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN***	***Produktivitas padi***	***64,01 kwt/ha***	***65,58 kwt/ha***	***102,45***	***100***	***365.730.962***	***330.684.628***	***90,42***
1	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT**	**55 %**	**55 %**	**100**	**100**	**365.730.962**	**330.684.628**	**90,42**
a	*Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan*	*Jumlah petani yang mengikuti pelatihan PHT*	*20 orang*	*20 orang*	*100*	*100*	*290.930.962*	*256.034.628*	*88,01*
		Jumlah pestisida untuk pengendalian OPT	*5 jenis*	*5 jenis*	*100*				
b	*Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha*	*Jumlah aplikasi yang dikembangkan*	*1 aplikasi*	*1 aplikasi*	*100*	*100*	*74.800.000*	*74.650.000*	*99,80*

	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
VI	***PENYULUHAN PERTANIAN***	***Persentase kelompok tani madya dan utama***	***8,33 %***	***8,33 %***	***100***	***82,04***	***763.220.000***	***513.499.275***	***67,28***
1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**jumlah kelompok tani kelas pemula**	**1055 poktan**	**1055 poktan**	**100**	**82,04**	**763.220.000**	**513.499.275**	**67,28**
		jumlah kelompok tani kelas lanjut	**535 poktan**	**535 poktan**	**100**				
		jumlah kelompok tani kelas madya	**135 poktan**	**135 poktan**	**100**				
		jumlah kelompok tani kelas utama	**9 poktan**	**9 poktan**	**100**				
a	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya*	*93 orang*	*30 orang*	*32,26*	*66,13*	*111.882.200*	*45.732.500*	*40,88*
		Jumlah BPP yang mendapatkan fasilitasi pendataan pertanian	*26 BPP*	*26 BPP*	*100*				
b	*Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	*Jumlah peserta/ petani tembakau yang dilatih/ mengikuti bimtek/ temu karya pelaku agribisnis/ sosialisasi dan snkronisasi kebijakan pertanian bersubsidi*	*700 orang*	*560 orang*	*80*	*80*	*384.837.800*	*296.426.775*	*77,03*
c	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	*Terlaksananya pengadaan sarana keinformasian di 21 BPP kecamatan dan rehab 2 unit kantor BPP*	*23 unit*	*23 unit*	*100*	*100*	*266.500.000*	*171.340.000*	*64,29*
Total (3 Urusan)						**98,88**	**49.268.860.463**	**41.324.695.420**	**83,88**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memenuhi target apabila capaian target Renja antara 91,01 % sampai dengan 100 %, seperti pada tabel Kriteria Penilaian Predikat Kinerja dibawah ini.

Tabel Kriteria Penilaian Predikat Kinerja Pelaporan Triwulan Periode Waktu Per Triwulan

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja Triwulan I	Interval Nilai Realisasi Kinerja Triwulan II	Interval Nilai Realisasi Kinerja Triwulan III	Interval Nilai Realisasi Kinerja Triwulan IV
1	Sangat Tinggi	ST	15,01 % > 25 %	40,01 % ≤	65,01 ≤	91,01 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	10,01 % ≤ 15 %	25,01 % ≤ 40 %	55,01 % ≤ 65 %	76,01 % ≤ 91%
3	Sedang	S	5,01 % ≤ 10 %	15,01 % ≤ 25 %	45,01 % ≤ 55 %	66,01 % ≤ 76 %
4	Rendah	R	1 % ≤ 5 %	5,01 % ≤ 15 %	35,01 % ≤ 45 %	51,01 % ≤ 66 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 0 %	≤ 5 %	≤ 35 %	≤ 51 %

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra dengan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi/telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2						**Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**											
2	**09**					**Pangan**											
2	**09**	**02**	-	-	-	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**(Skor PPH)**	-	-	**93,25**	**91**	-	**90,5**	**90,5**	-	-
2	***09***	***02***	***2***	***01***		***Keg. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Ketersediaan pangan utama/beras***	***Ton***	***284.075***		***270.287***	***285.205,06***		***272.990***	***272.990***		
2	**09**	**02**	2	01	01	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan	Kelompok	84		**20**	8	40	3	11	13	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
2	**09**	**02**	2	01	02	Sub keg. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	jumlah lantai jemur yang dibangun	Unit	6		1	1	100	0	1	17	
2	**09**	**02**	2	01	03	Sub keg. Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah rumah RMU dan RMU yang dibangun	Unit	11		2	2	100	0	2	18	
-	-	-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**80**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**16**	
-	-	-									**Predikat Kinerja**		**T**				
2	**09**	**03**	-	-	-	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**(Skor PPH)**	-	-	**93,25**	**91**	-	**90,5**	**90,5**	-	-
2	***09***	***03***	***2***	***01***		***Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	***ketersediaan energi dan ketersediaan protein***	***K.kal/kapita/ hari***	***3.090***		***3.015***	***2.663***		***3.030***	***3.030***		
								gram/kapita/ hari	***86,4***		***84,50***	***72,64***		***85,2***	***85,2***		
2	09	03	2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	lokasi/ kelompok	89		11	-	-	9	9	10	th 2021 refokusing

2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	kali	18		3	3	100	3	6	33	
2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	kelompok	35		2	2	100	4	6	17	
2	09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	kali	33		8	7	88	1	8	24	
2	***09***	***03***	***2***	***02***		***Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota***	***Penguatan cadangan pangan***	***ton***			***40***	***39***					
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Stok beras untuk gudang cadangan pangan	ton	100		40	39	98	*1,00*	40	40	di th 2022 sm di Renstra masuk di Prog penanganan Kerawanan Pangan
2	***09***	***03***	***2***	***04***		***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi***	***ketersediaan energi dan ketersediaan protein***	***K.kal/kapita/ hari***	***3.090***		***3.015***	***2.663***		***3.030***	***3.030***		
								gram/kapita/ hari	***86,4***		***84,50***	***72,64***		***85,2***	***85,2***		
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	orang	600		100	100	100	70	170	28	
-	-	-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**97**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**26**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
2	**09**	**04**	-	-	-	**PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**(Skor PPH)**	-	-	**93,25**	**91**	-	**90,5**	**90,5**	-	-
2	***09***	***04***	***2***	***02***		***Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota***	***jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani***	***lokasi***	***37***		***5***	***4***		***5***	***9***		
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina	orang	120		20	20	100	20	40	33	
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan	Ton	100								di th 2021 masuk ke Prog Peningkatan Diversifikasi dan KP masyarakat
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**100**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**33**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
2	**09**	**05**	-	-	-	**PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**(Skor PPH)**	-	-	**93,25**	**91**	-	**90,5**	**90,5**	-	-
2	***09***	***05***	***2***	***01***		***Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota***	***Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman***	***%***	***100***		***79***	***83***					***indikator berbeda***
2	09	05	2	01	01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	orang	600		100	100	100	100	200	33	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**100**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**33**	
-	-	-	-	-						-	**Predikat Kinerja**		**ST**	-	-		

3	-	-	-	-		**Ururan Pemerintahan Pilihan**				-	-	-		-	-		
3	**25**	-	-	-		**Kelautan dan Perikanan**				-	-	-		-	-		
3	**25**	**03**	-	-	-	**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**562**	-	**537**	**311,82**	-	**543**	**543**	-	-
3	***25***	***03***	***2***	***02***		***Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota***	***cakupan bina kelompok nelayan***	***%***	***41***		***33,00***	***33,00***		***33***	***33***		
3	25	03	2	02	02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	Poknel	23		2	2	100	2	4	17	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**100**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**17**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**25**	**04**	-	-	-	**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**32.000**	-	**28.315**	**30.109,31**	-	**29.165**	**29.165**	-	-
3	***25***	***04***	***2***	***02***		***Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil***	***Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan***	***%***	***10***		***5***	***5***		***5***	***5***		
3	25	04	2	02	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan	orang	790		50	50	100	100	150	19	beda indikator di renstra jumlah peserta pemberdayaan Pokdakan ikan dikawasan sentra / kawasan Minapolitan
3	***25***	***04***	***2***	***04***		***Pengelolaan Pembudidayaan ikan***	***jumlah produksi perikanan budidaya***	***Ton***	***32.000***		***28.315***	***30.109,31***		***29.165***	***29.165***		
3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan air tawar	paket	134		18	18	100	3	21	16	
3	25	04	2	04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan pakan untuk indukan dan operasional	lokasi			2	2	100			0	ada perbedaan indikator
3	25	04	2	04	05	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan induk ikan	pokdakan	105		15	15	100	10	25	24	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**100**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**15**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**25**	**05**	-	-	-	**PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	-	-	**537**	**311,82**	-	-	-	-	ada perbedaan indikator
3	***25***	***05***	***2***	***01***		***Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota***	***Cakupan tabur benih ikan/restoking perairan umum***	***%***			***8***	***8***					ada perbedaan indikator
3	25	05	2	01	02	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum	lokasi	18		2	2	100	2	4	22	

		-									Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		22	
											Predikat Kinerja		ST				
3	**25**	**06**	-	-	-	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Ikan**	**kg/kapita/tahun**	-	-	**20,28**	**20,28**	-	-	-	-	ada perbedaan indikator
3	***25***	***06***	***2***	***02***		***Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil***	**jumlah produk olahan ikan**	**kg**			**1.050.400**	***1.052.400***					ada perbedaan indikator
3	25	06	2	02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	kali	24		4	4	100	3	7	29	
		-									Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		29	
											Predikat Kinerja		ST				
3	**27**					**Pertanian**											
3	**27**	**01**	-	-	-	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	***%***	**84**	-	**80**	**80**	-	**82**	**82**	-	-
3	***27***	***01***	***2***	***01***		***Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Persentase Penyusunan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***%***	***100***		***90***	***90***		***100***	***100***		
3	27	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	72		10	10	100	12	22	31	
3	27	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	42		7	7	100	7	14	33	
3	***27***	***01***	***2***	***02***		***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***persentase pemenuhan administrasi keuangan***	***%***	***100***		***100***	***100***		***100***	***100***		
3	27	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	bulan			12	12	100				ada perbedaan satuan
3	27	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	kali			300	227	76				ada perbedaan indikator dan beda target atr Renja dgn DPA
3	***27***	***01***	***2***	***03***		***Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah***	***%***	***100***		***100***	***100***		***100***	***100***		
3	27	01	2	03	02	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah Tersedia	kali			12	12	100				ada perbedaan satuan
3	***27***	***01***	***2***	***05***		***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian***	***%***	***100***		***100***	***80***		***100***	***100***		
3	27	01	2	05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang / kali	275		25	25	100	35	60	22	
3	***27***	***01***	***2***	***06***		***Administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum***	***%***	***92***		***80***	***80***		***90***	***90***		

3	27	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	jenis	20		16	16	100	16	16	33	
3	27	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli dan jenis atk tersedia	jenis	65		57	69	121	65	65	33	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	jenis	15		4	4	100	14	14	33	
3	27	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	kali	420		60	51	85	60	111	26	
3	27	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	kali	667		85	87	102	100	187	28	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	***27***	***01***	***2***	***07***		***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Pesentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia***	***%***	***92***		***85***	***85***		***90***	***90***		ada perbedaan satuan
3	27	01	2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	unit	260		40	40	100	40	80	31	
3	***27***	***01***	***2***	***08***		***Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia***	***%***	***92***		***85***	***85***		***90***	***90***		
3	27	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	surat	30.000		5.000	5.000	100	5.000	10.000	33	
3	27	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terbayar	jenis			3	3	100			0	
3	27	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor tersedia	orang	38		17	17	100	38	38	33	
3	***27***	***01***	***2***	***09***		***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara***	***%***	***92***		***85***	***85***		***90***	***90***		
3	27	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	unit	300		293	250	85	300	300	33	
3	27	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor terpelihara	unit	19		4	-	-	3	3	16	th 21 refokusing
3	27	01	2	09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	260		72	72	100	40	112	43	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**98**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**24**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**27**	**02**	-	-	-	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi tembakau rajangan**	**Ton**	**1.685**	-	**1.605**	**1.567,45**	-	**1.620**	**1.620**	-	-
							Produksi tembakau asepan	**Ton**	**2.395**	-	**2.320**	**1.270,83**	-	**2.335**	**2.335**	-	-
3	***27***	***02***	***2***	***01***		***Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian***	***Produksi padi***	***Ton***	***463.025***		***457.641***	***480.023,75***		***458.539***	***458.539***		

							Produksi jagung	***Ton***	***102.247***		***101.059***	***88.537,89***		***101.257***	***101.257***		
							Produksi kedele	***Ton***	***1.070***		***1.045***	***1.998,21***		***1.052***	***1.052***		
							Produksi cabe	***Ton***	***659,40***		***623,89***	***1.699,68***		***630,40***	***630,40***		
							Produksi tembakau rajangan	***Ton***	***1.685***		***1.605***	***1.567,45***		***1.620***	***1.620***		
							Produksi tembakau asepan	***Ton***	***2.395***		***2.320***	***1.270,83***		***2.335***	***2.335***		
3	27	02	2	01	01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	kelompok	116		**29**	34	117	15	49	42	
3	27	02	2	01	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	kelompok	25		2	2	100	3	5	20	
							Jumlah unit pengelola jasa alsintan/UPJA yang dibina	kelompok			250	250					ada perbedaan satuan
3	***27***	***02***	***2***	***02***		***Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikrroorganisme kewenangan kabupaten/kota***	***Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel***	***%***	***25***		***13***	***16***		***15***	***15***		
3	27	02	2	02	01	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele	Ha	10	-	10	10	100	10	10	33	-
3	27	02	2	02	03	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	jumlah luasan pengembangan padi, jagung, kedele	Ha	2220		100	100	100	120	220	10	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		104	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		26	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**27**	**03**	-	-	-	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Produktivitas padi***	***(kwt/ha)***	-	-	***64,01***	***65,58***	-	**37**	**37**	-	ada perbedaan indikator
3	***27***	***03***	***2***	***01***		***Pengembangan Prasarana Pertanian***	***Jumlah luasan LP2B/KP2B***	***Ha***	***32.000***		***32.000***	***32.000***		***32.000***	***32.000***		
3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peraturan bupati (Perbub) LP2B yang disusun	dokumen	6		**1**	1	100	1	2	33	
3	27	03	2	01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	dokumen	4		**1**	1	100	1	2	50	
3	27	03	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya pengadaan Roda tiga 23 unit dan rumah pengering 6 unit untuk kelompok tani perkebunan	unit	90	-	**29**	29	100	15	44	49	
3	***27***	***03***	***2***	***02***		***Pembangunan Prasarana Pertanian***	***Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun***	***unit/lokasi***			***15***	***15***					ada perbedaan indikator
							Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana infrastruktur irigasi	***unit/lokasi***			***38***	***38***					
							Jumlah BPP yang direnovasi	***lokasi***			***2***	***2***					

3	27	03	2	02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	112	-	**12**	15	125	11	26	23	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	03	2	02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	25		**9**	12	133		12	48	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	03	2	02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	km	34		4	4	100	1	5	15	
3	27	03	2	02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	16	-	4	4	100		4	25	-
3	27	03	2	02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	16	-	**3**	3	100		3	19	
3	27	03	2	02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan penyediaan sarana pendukungnya	unit/lokasi	12		**2**	2	100	2	4	33	
3	27	03	2	02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	54		**0**	**0**		0	0	-	2021 dan 2022 tidak ada
3	***27***	***03***	***2***	***03***		***Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota***	***Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil***	***ekor***			***277.500***	***273.419***					ada perbedaan indikator
3	27	03	2	03	01	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	jumlah bantuan ternak domba yang diterima kelompok tani	ekor	1.830		140	-	-	48	48	12	
							jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	peternak	2.000		200	200	100	200	400		
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**106**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**31**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**27**	**04**	-	-	-	**PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Populasi ternak sapi**	**ekor**	-	-	**117.492**	**112.517**	-	**-22**	**1546**	-	ada perbedaan indikator
-	-	-	-	-	-	-	**Produsi daging sapi**	**ton**	-	-	**3.211**	**2.268**	-	-	-	-	-
3	***27***	***04***	***2***	***01***		***Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota***	***Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis***	***%***	***94***		***89***	***89***		***90***	***90***		
3	27	04	2	01	01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	ekor	38.545		6.000	6.000	100	6.000	12.000	31	
3	***27***	***04***	***2***	***02***		***Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota***	***Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi***	***%***	***92***		***86***	***86,00***		***88***	***88***		
3	27	04	2	02	03	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah kabupaten/kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan	ekor	***63000***		11.000	12.000	109	10.000	22.000	35	
3	***27***	***04***	***2***	***04***		***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner***	***Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan***	***%***	***50***		***30***	***30***		***40***	***40***		

3	27	04	2	04	01	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil ternak yang dibina	unit usaha	595		60	50	83	90	140	24	
							Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina	pengusaha			25	13	52				
3	27	04	2	04	02	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal ternak	lokasi	60		10	10	100	10	20	33	
3	***27***	***04***	***2***	***05***		***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesejahteraan hewan***	***Produksi daging ruminansia***	***Ton***			***2.300***	***2.595***					ada perbedaan indikator
3	27	04	2	05	01	Pendampingan unit kesejahteraan hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	ekor	2.100		1.898	1.980	104	1.950	1.950	33	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**99**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**31**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**27**	**05**				**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Produktivitas padi**	**(kwt/ha)**			**64,05**	**65,58**					**ada perbedaan indikator**
3	***27***	***05***	***2***	***01***		***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/kota***	***Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT***	***%***	***66***		***55***	***55***		***58***	***58***		
3	27	05	2	01	01	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pestisida untuk pengendalian OPT	jenis	6	-	5	5	100	6	6	33	-
3	27	05	3	01	03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pengembangan aplikasi pengendalian OPT	aplikasi	6	-	1	1	100	1	2	33	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**100**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**33**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
3	**27**	**07**	-	-	-	**PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**%**	**10,63**	-	**8,33**	**8,33**	-	**8,63**	**8,63**	-	-
2	***01***	***07***	***2***	***01***		***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	***jumlah kelompok tani kelas pemula***	***poktan***	***1.020***		***1.055***	***1.055***		***1.055***	***1.055***		
							jumlah kelompok tani kelas lanjut	***poktan***	***545***		***535***	***535***		***535***	***535***		
							jumlah kelompok tani kelas madya	***poktan***	***140***	-	***135***	***135***		***135***	***135***		-
							jumlah kelompok tani kelas utama	***poktan***	***10***	-	***9***	***9***		***9***	***9***		
2	01	07	2	01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	182	-	93	93	100	184	184	33	
2	01	07	2	01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih	orang	1090	-	200	160	80	90	250	34	
							Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis dan temu karya pelaku agribisnis	orang	1580		200	80		230	310		

							Jumlah petani yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan pertanian bersubsidi	orang	1200		201	560		200	760		
							Jumlah kelompok tani berbasis gender yang difasilitasi	desa			1	-					
2	01	07	2	01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terlaksananya pengadaan sarana keinformasian di 21 BPP Kecamatan dan rehab 2 unit kantor BPP	BPP	26		21	21	100	26	26	33	
		-									**Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021**		**93**	**Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**34**	
											Predikat Kinerja		**ST**				
		-									**Rata-Rata Keseluruhan Capaian Kinerja Renja 2021**		**98**	**Rata-Rata Keseluruhan Capaian Kinerja Renstra s/d 2022**		**26**	

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa rata-rata keseluruhan capaian kinerja Renja tahun 2021 adalah 98 %, hal tersebut masuk dalam kategori predikat kinerja *Sangat Tinggi*, sedangkan rata-rata keseluruhan capaian kinerja Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 26 %.

Realisasi program/kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 1 (satu) program, yaitu Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan (80 %), dengan Predikat Kinerja adalah Tinggi.

Realisasi program yang *telah memenuhi* target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan capaian kinerja antara 91% s/d 100%, dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi ada 11 (sebelas) program, yaitu :

a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (98%)
b) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (97%)
c) Program penanganan kerawanan pangan (100%)
d) Program pengawasan keamanan pangan (100%)
e) Program pengelolaan perikanan tangkap (100%)
f) Program pengelolaan perikanan budidaya (100%)
g) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (100%)
h) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (100%)
i) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (99%)
j) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (100%)
k) Program penyuluhan pertanian (98%)

Realisasi program yang *melebihi* capaian kinerja Renja (diatas 100 %), dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi ada 2 (dua) program, yaitu :

a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (104 %)
b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (106 %)

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

a) Adanya perbedaan target capaian kinerja antara dokumen Renja dan DPA.
b) Adanya refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang ditetapkan (tahun 2021).

c) Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab telah memenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan diantaranya adalah :

a) Adanya persamaan target capaian kinerja antara dokumen Renja dan DPA.
b) Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan (sesuai *time schedule*).

Implikasi yang timbul akibat tidak tercapainya target kinerja adalah tidak terpenuhinya target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya adalah :

a) Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 0,50 %. Pada tahun 2021 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91 % dan pada tahun 2022 sebesar 90,50 %.
d) Adanya kenaikan kasus penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, sehingga berdampak pada kontribusi pertumbuhan PDRB sektor pertanian dari target 2,63 % dan baru tercapai 1,12 % di semester I.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil salah satunya adalah dengan menambah anggaran pada sub kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, yaitu pada perubahan II tahun 2022. Penambahan pagu anggaran tersebut dari Rp. 130.000.000,- menjadi Rp. 825.880.000,-.

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan, serta skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) agar sesuai dengan target maka seharusnya penganggaran tetap direncanakan berdasarkan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021 – 2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Klaten yang memiliki basis kinerja mencakup 3 (tiga) urusan yaitu urusan pangan, urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada petani, peternak dan pembudidaya ikan di Kabupaten Klaten. Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tentunya akan berdampak langsung pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten memberikan dampak kepada pelayanan untuk masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masuk kedalam aspek daya saing daerah.

Indikator pada aspek daya saing daerah memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara rinci, penyajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022**)	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Layanan Urusan Wajib											
I	***Urusan Pangan***											
1	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan											
	Ketersediaan pangan utama/beras (Ton)			270.287	272.990	275.720	278.477	285.205	272.990	275.720	278.477	
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat											
	Ketersediaan energi (K.kal/kapita/ hari)			3.015	3.030	3.045	3.060	2.663	3.030	3.045	3.060	
	Ketersediaan protein (Gram/kapita/ hari)			84,5	85,2	85,5	85,8	72,64	85,2	85,5	85,8	
3	Program penanganan kerawanan pangan											
	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)			8	10	12	14	8	3	12	14	
4	Program pengawasan keamanan pangan											
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman (%)			79	80	81	82	83	83	81	82	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
II	***Urusan Kelautan dan Perikanan***											
1	Program pengelolaan perikanan tangkap											
	Produksi perikanan tangkap (Ton)			537	543	547	552	311,82	95,85	547	552	

2	Program pengelolaan perikanan budidaya											
	Produksi perikanan budidaya (Ton)			28.315	29.165	30.039	30.940	30.109	10.428	30.039	30.940	
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
	Cakupan tebar benih ikan (restocking) perairan umum (%)			8	15	23	30	8	15	23	30	
4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan											
	Jumlah produk olahan ikan (Kg)			1.050.400	1.168.588	1.191.958	1.214.860	1.052.400	492.147	1.191.958	1.214.860	
III	***Urusan Pertanian***											
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota											
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)			80	82	82	83	80	40	82	83	
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian											
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ku/Ha)			66,98	66,99	67,01	67,03	66,92	69,04	67,01	67,03	
	Produktivitas cabe (Ku/Ha)			8,90	8,98	9,06	9,15	7,87	8,38	9,06	9,15	
	Produktivitas tembakau rajang (Ku/Ha)			12,10	12,20	12,21	12,22	12,8	-	12,21	12,22	
	Produktivitas tembakau asepan (Ku/Ha)			9,81	9,83	9,86	9,88	10,3	-	9,86	9,88	

3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian											
	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional (%)			36	37	38	39	36	36	38	39	
	Persentase ketersediaan prasarana penyuluhan pertanian (%)			26	35	42	50	26	26	42	50	
	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) (Ekor)			277.500	286.000	288.384	297.039	273.419	267.161	288.384	297.039	
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner											
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)			22	22	22	22	50	15	22	22	
5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian											
	Cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya (%)			55,3	58	60	62	55,3	55	60	62	
6	Program penyuluhan pertanian											
	Persentase kelompok tani madya dan utama (%)			8,33	8,63	9,13	9,63	8,33	8	9,13	9,63	

			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	2,52	2,63	2,68	2,88	2,12	2,63	2,68	2,88	

Dari tabel 2.2 terlihat skala nilai capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2022 berdasarkan peringkat kinerja dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

Pada urusan pangan, terdapat satu program capaian kinerjanya memenuhi kriteria sangat rendah yaitu Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan realisasi capaian 30%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan belum selesai sehingga target akan tercapai pada akhir pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk tiga program lainnya capaian kinerjanya memenuhi kriteria sangat tinggi.

Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat tiga program dengan capaian kinerja memenuhi kriteria sangat rendah yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan realisasi capaian 17,65%, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 35,75%, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 42,11%. Capaian realisasi ketiga program tersebut masih rendah karena pelaksanaan kegiatan masih berjalan sehingga akan mencapai target pada akhir pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan capaian kinerjanya memenuhi kriteria sangat tinggi.

Untuk urusan pertanian 5 (lima) program. Capaian kinerjanya yaitu terdapat 2 (dua) program memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 (satu) program memenuhi kriteria tinggi, 1 (satu) program memenuhi kriteria sedang dan 1 (satu) program memenuhi kriteria sangat rendah. Program dengan capaian kinerja sedang sebesar 68,18% yaitu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan masih berjalan sehingga akan mencapai target pada akhir pelaksanaan kegiatan. Sedangkan program dengan capaian kinerja sangat rendah sebesar 49,10% yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Hal ini disebabkan karena terdapat dua indikator dari empat indikator pada program tersebut masih mempunyai realisasi 0% sehingga sangat berpengaruh pada realisasi capaian kinerjanya.

Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007). Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan tahun 2022 realisasinya sebesar 2,63%** (angka sementara) dari target 2,63% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Untuk realisasi capaian indikator tersebut belum dapat dihitung karena terkait data PDRB baru keluar pada tahun depan.

Indikator kinerja kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas Ketahanan dan Pertanian mencakup urusan pangan, urusan pilihan kelautan dan perikanan serta urusan pilihan pertanian sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 telah diakomodir menjadi indikator program dan termuat dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang urusan pangan, urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan. Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain, visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Tahun 2020 dengan program unggulan Klaten Mandiri Pangan *(Klaten Mapan)* dan terjadinya wabah pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020. Untuk menghadapi isu-isu penting tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyusun beberapa kegiatan di tahun 2023.

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya komoditas beras, namun terindikasi ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dilakukan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan sudah baik, akan tetapi tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya

peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Padi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang di kembangkan yaitu varietas jenis padi **Rojolele Srinuk dan Srinar**. Potensi komoditas lain yang bisa di kembangkan jagung, kedelai, durian khas Klaten, dll.

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta sektor perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Klaten yaitu varietas padi Rojolele. Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di Desa Gempol Kecamatan Karanganom, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Patent sedang dalam tahap uji substansi serta proses

pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP (*Agro Techno Park*) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersediaan stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Untuk menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, Pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelian melalui Perusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Kawasan Minapolitan I Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karanganom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Kawasan Minapolitan II meliputi Kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonarum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produk unggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain; belum optimalnya pemanfaatan sumber

daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumberdaya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan turunan dari dokumen Renstra OPD Tahun 2021-2026, yang memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pada tahun berkenaan maka perlu dilakukan review terhadap dokumen rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tersebut.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan/subkegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan/subkegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam dokumen RKPD Kabupaten Klaten.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen Rancangan Awal Renja dengan Rancangan Akhir Renja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Perbedaan tersebut terdapat pada usulan program/kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan seiring dilakukannya penyesuaian pagu anggaran Rancangan Awal Renja yang semula disusun berpedoman pada dokumen Renstra OPD beserta penyesuaiannya dengan Rancangan Akhir Renja dimana pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, hasil analisa kebutuhan dan adanya penyesuaian dengan standarisasi harga barang dan jasa yang berlaku selama pentahapan perencanaan. Hal tersebut juga berimplikasi pada jumlah usulan program/kegiatan/subkegiatan.

Dalam dokumen Rancangan Awal Renja DKPP Tahun 2023 usulan program/kegiatan/subkegiatan terdiri dari 14 (empat belas) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) subkegiatan dengan usulan kebutuhan pendanaan sebesar Rp 50.217.788.000,- (lima puluh milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Sedangkan dalam dokumen Rancangan Akhir Renja DKPP Tahun 2023 usulan program/kegiatan/subkegiatan terdiri dari 14 (empat belas) program, 30 (tiga puluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) subkegiatan dengan pendanaan sesuai pagu indikatif yang diberikan dan hasil analisa kebutuhan sebesar Rp 50.269.788.000,- (lima puluh milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Selain itu pada dokumen Rancangan Akhir Renja DKPP Tahun 2023 yang secara simultan menjadi dokumen Renja DKPP Tahun 2023 juga dilakukan penyesuaian indikator kinerja subkegiatan yang mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya penyesuaian indikator kinerja subkegiatan ini serta merta juga dilakukan penyesuaian pada volume target kinerja masing-masing subkegiatan.

Review terhadap Ranwal Renja secara lebih terperinci dapat dilihat pada matrik persandingan antara Ranwal Renja dengan analisa kebutuhan dalam tabel 2.4 di bagian lampiran dokumen Renja ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kedungampel Kec. Cawas	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
2	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pundungan Kec. Juwiring	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
3	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kotesan Kec. Prambanan	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
4	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Gedaren Kec. Jatinom	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
5	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Kendalsari Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
6	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Panggang Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
7	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Tangkil Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, sampai tahun 2022 masih berupaya untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya prioritas yang sesuai dangan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Salah satu Program Nasional adalah UPSUS Pajale (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai) dalam rangka terwujudnya swasembada pangan/beras. Untuk mendukung UPSUS Pajale tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten di tahun 2023 salah satunya merencanakan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman (demplot padi organik); pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mendukung pelaksanaan kegiatan dalam kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Dimana komando ini nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Usulan program/kegiatan/subkegiatan dalam dokumen Renja Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki sinergitas dan keselarasan dengan prioritas daerah, provinsi dan nasional yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 pada lampiran dokumen ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tujuan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang
2. Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan

Sedangkan sasaran yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah tersedianya pangan yang beragam bergizi seimbang; meningkatnya produksi perikanan; meningkatnya produksi sektor pertanian

tanaman pangan dan hortikultura; meningkatnya produksi sektor perkebunan dan meningkatnya sektor peternakan dengan indikator sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan;
2. Jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap;
3. Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi, palawija, dan cabe);
4. Jumlah produksi komoditas perkebunan (13 komoditas);
5. Jumlah produksi daging (ruminansia dan unggas).

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Ketersediaan pangan beragam bergizi seimbang		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,75	91	91,25	91,50
		Tersedianya pangan yang beragam bergizi seimbang	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,75	91	91,25	91,50
2	Meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2,68	2,88	3,04	3,14
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.586	31.492	32.057	32.562
		Meningkatnya produksi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi, palawija, dan cabe)	Ton	590.816	591.924	593.662	594.823
		Meningkatnya produksi sektor perkebunan	Jumlah produksi komoditas perkebunan (13 komoditas)	Ton	12.250	12.500	12.750	12.980
		Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah produksi daging (ruminansia dan unggas)	Ton	10.542	11.576	12.712	13.952

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan program dan kegiatan/subkegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan pagu indikatif yang diberikan.

Dalam merumuskan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 yang berisikan program/kegiatan/subkegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Program/kegiatan/subkegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten;
2. Program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya program unggulan Klaten Mandiri Pangan (*Klaten Mapan*), pengembangan potensi sumber daya alam (pengembangan varietas jenis padi **Rojolele Srinuk dan Srinar**) dan belum berakhirnya wabah pandemi Covid-19;
3. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pembangunan.

Pada tahun 2023 jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp 50.269.788.000,- yang bersumber dari SiLPA, DBHCHT, DAK Fisik Bidang Pertanian dan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pagu indikatif yang digunakan untuk belanja program/kegiatan/subkegiatan sebesar Rp 14.585.349.000,- diperuntukkan bagi pelaksanaan 3 (tiga) urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten dengan rincian yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pangan sebesar Rp 3.657.503.000,- , Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 460.000.000,- dan Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 10.467.846.000,-.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan/subkegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 program, yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan dan 13 program pelaksanaan urusan mencakup 4 program urusan bidang pangan, 4 program urusan bidang kelautan dan perikanan, serta 5 program urusan bidang pertanian;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah sebanyak 30 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang urusan pemerintahan dan 22 kegiatan pelaksanaan urusan mencakup 6 kegiatan urusan bidang pangan, 5 kegiatan urusan bidang kelautan dan perikanan, serta 11 kegiatan urusan bidang pertanian;
3. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah sebanyak 56 subkegiatan, yang terdiri dari 18 subkegiatan penunjang urusan pemerintahan dan 38 subkegiatan pelaksanaan urusan mencakup 10 subkegiatan urusan bidang pangan, 7 subkegiatan urusan bidang kelautan dan perikanan, serta 21 subkegiatan urusan bidang pertanian.

Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2023 tersaji pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. MATRIKS RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

NO	URUSAN	KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
I.1	BIDANG PANGAN	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Ketersediaan pangan utama/beras**	**ton**	**275.720**	**3.056.003.000**
		2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan**	**%**	**47,83**	**3.056.003.000**
		2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	unit	3	3.056.003.000
I.2		**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan energi perkapita**	**K.kal/kapita/ hari**	**3.045**	**516.500.000**
				Ketersediaan protein perkapita	**gram/kapita/ hari**	**85,5**	
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya**	**%**	**33,33**	**264.000.000**
		2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	laporan	1	124.000.000
		2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	dokumen	3	32.500.000

		2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	unit	4	32.500.000
		2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	unit	1	75.000.000
		2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan**	**%**	**100**	**10.000.000**
		2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	laporan	1	10.000.000
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka Pencapaian Target Konsumsi Pangan**	**%**	**40**	**242.500.000**
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	laporan	7	242.500.000
I.3		**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**persentase penanganan daerah rawan pangan**	**%**	**12**	**50.000.000**
		2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani**	**lokasi**	**6**	**50.000.000**
		2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	laporan	1	30.000.000
		2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	dokumen	1	20.000.000
I.4		**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**%**	**81**	**35.000.000**

		2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar**	**%**	**40**	**35.000.000**
		2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	dokumen	1	35.000.000
II.1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**Ton**	**547**	**25.000.000**
		3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Bina kelompok nelayan**	**%**	**36**	**25.000.000**
		3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	kelompok	2	25.000.000
II.2		**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**Ton**	**30.039**	**335.000.000**
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Cakupan Bina kelompok Pembudidaya Ikan**	**%**	**7**	**100.000.000**
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	kelompok	17	100.000.000
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**	**%**	**38,80**	**235.000.000**
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	unit	3	110.000.000
		3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	unit	1	85.000.000
		3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	orang	150	40.000.000

II.3		**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan tebar benih ikan/restoking perairan umum**	**%**	**23**	**30.000.000**
		3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum**	**lokasi**	**3**	**30.000.000**
		3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	2	30.000.000
II.4		**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**jumlah produk olahan ikan**	**Kg**	**1.191.958**	**70.000.000**
		3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**%**	**40**	**70.000.000**
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	unit usaha	3	70.000.000
III.1	BIDANG PERTANIAN	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**%**	**82**	**35.684.439.000**
		3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**%**	**100**	**54.000.000**

3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12	40.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	7	14.000.000
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**	**34.408.441.701**
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	298	34.268.441.701
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	4	140.000.000
3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**%**	**100**	**25.000.000**
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	dokumen	4	25.000.000
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**%**	**100**	**25.000.000**
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	35	25.000.000
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**%**	**90**	**195.000.000**
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	16	20.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	65	50.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	14	50.000.000
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	60	25.000.000

		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	100	50.000.000
		3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**%**	**90**	**40.000.000**
		3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	40	40.000.000
		3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**%**	**90**	**726.997.299**
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	10.000.000
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	170.000.000
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disedikan	laporan	12	546.997.299
		3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara**	**%**	**90**	**210.000.000**
		3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	300	100.000.000
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	3	75.000.000

		3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	unit	40	35.000.000
III.2		**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**kwt/ha**	**67,01**	**4.785.746.000**
				Produktivitas cabe	**kwt/ha**	**9,06**	
				Produktivitas tembakau rajangan	**kwt/ha**	**12,21**	
				Produktivitas tembakau asepan	**kwt/ha**	**9,86**	
		3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Produksi padi**	**ton**	**459.885**	**4.055.746.000**
				Produksi jagung	**ton**	**101.554**	
				Produksi kedele	**ton**	**1.061**	
				Produksi cabe	**ton**	**636,92**	
				Produksi tembakau rajangan	**ton**	**1.640**	
				Produksi tembakau asepan	**ton**	**2.335**	
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi	laporan	18	1.264.000.000
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	laporan	12	2.791.746.000
		3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kabupaten Klaten**	**%**	**15**	**730.000.000**
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	3	500.000.000
		3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	dokumen	2	230.000.000
III.3		**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN**	**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional**	**%**	**38**	**4.010.000.000**

		PRASARANA PERTANIAN	**Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian**	**%**	**42**	
			Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil	**ekor**	**288.384**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah luasan LP2B/KP2B**	**ha**	**32.000**	**110.000.000**
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	dokumen	1	75.000.000
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	dokumen	1	15.000.000
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	laporan	4	20.000.000
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi**	**%**	**47,26**	**3.775.000.000**
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	unit	11	1.575.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	200.000.000
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	2	2.000.000.000
3.27.03.2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan failitasi pengelolaan bibit ternak**	**%**	**38,72**	**125.000.000**
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	laporan	1	125.000.000

III.4		**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**22**	**565.000.000**
		3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan pelayanan vaksinasi/ penanggulangan PHM dan zoonosis**	**%**	**91**	**130.000.000**
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	laporan	5	130.000.000
		3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi**	**%**	**88**	**265.000.000**
		3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	laporan	12	265.000.000
		3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan**	**%**	**40**	**95.000.000**
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	laporan	12	50.000.000
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	laporan	10	45.000.000
		3.27.04.2.05	**Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan**	**%**	**100**	**75.000.000**
		3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	laporan	12	75.000.000
III.5		**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya**	**%**	**60**	**307.500.000**
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT**	**%**	**60**	**307.500.000**

			Kabupaten/Kota				
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	ha	10000	230.000.000
		3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	ha	1000	77.500.000
III.6		**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**%**	**9,13**	**799.600.000**
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**jumlah kelompok tani kelas pemula**	**Poktan**	**1055**	**799.600.000**
				jumlah kelompok tani kelas lanjut	**Poktan**	**535**	
				jumlah kelompok tani kelas madya	**Poktan**	**135**	
				jumlah kelompok tani kelas utama	**Poktan**	**9**	
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	26	380.000.000
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	200	267.500.000
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	26	152.100.000
			TOTAL				**50.269.788.000**

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2023. Keberadaan dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Klaten.

Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Pada akhirnya, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang/UPT yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten.

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP
KABUPATEN KLATEN

Ir. WIDIYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640806 199103 2 005

LAMPIRAN

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2						**Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**											
2	09					**Pangan**											
2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)			93,25	91		90,5	90,5		
2	*09*	*02*	*2*	*01*		*Keg. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Ketersediaan pangan utama/beras*	*Ton*	*284.075*		*270.287*	*285.205,06*		*272.990*	*272.990*		
2	09	02	2	01	01	Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	jumlah kelompok lumbung pangan yang difasilitasi penguatan kelembagaan	Kelompok	84		20	8	40	3	11	13	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
2	09	02	2	01	02	Sub keg. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	jumlah lantai jemur yang dibangun	Unit	6		1	1	100	0	1	17	
2	09	02	2	01	03	Sub keg. Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah rumah RMU dan RMU yang dibangun	Unit	11		2	2	100	0	2	18	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		80	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d		16	
											Predikat Kinerja		T				
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)			93,25	91		90,5	90,5		
2	*09*	*03*	*2*	*01*		*Keg. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	*ketersediaan energi dan ketersediaan protein*	*K.kal/kapit a/ hari*	*3.090*		*3.015*	*2.663*		*3.030*	*3.030*		
								gram/kapit a/ hari	*86,4*		*84,50*	*72,64*		*85,2*	*85,2*		
2	09	03	2	01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	jumlah penerima bantuan pemanfaatan pekarangan	lokasi/ kelompok	89		11	-	-	9	9	10	th 2021 refokusing
2	09	03	2	01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	jumlah pemantauan harga pangan dan bazar pasar murah yang dilakukan	kali	18		3	3	100	3	6	33	
2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan	kelompok	35		2	2	100	4	6	17	
2	09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah promosi hasil produksi pertanian unggulan yang diikuti	kali	33		8	7	88	1	8	24	
2	*09*	*03*	*2*	*02*		*Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota*	*Penguatan cadangan pangan*	*ton*			*40*	*39*					
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Stok beras untuk gudang cadangan pangan	ton	100		40	39	98	*1,00*	40	40	di th 2022 sm di Renstra masuk di Prog penanganan Kerawanan Pangan
2	*09*	*03*	*2*	*04*		*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi*	*ketersediaan energi dan ketersediaan protein*	*K.kal/kapit a/ hari*	*3.090*		*3.015*	*2.663*		*3.030*	*3.030*		
								gram/kapit a/ hari	*86,4*		*84,50*	*72,64*		*85,2*	*85,2*		
2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	orang	600		100	100	100	70	170	28	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		97	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		26	
											Predikat Kinerja		ST				
2	09	04				PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)			93,25	91		90,5	90,5		
2	*09*	*04*	*2*	*02*		*Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten/Kota*	*jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani*	*lokasi*	*37*		*5*	*4*		*5*	*9*		
2	09	04	2	02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kelompok afinitas yang dibina	orang	120		20	20	100	20	40	33	
2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1 (satu) daerah	Jumlah pengadaan beras untuk gudang cadangan pangan	Ton	100								di th 2021 masuk ke Prog Peningkatan Diversifikasi

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		33	
											Predikat Kinerja		ST				
2	09	05				PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan	(Skor PPH)			93,25	91		90,5	90,5		
2	*09*	*05*	*2*	*01*		***Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota***	***Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman***	*%*	*100*		*79*	*83*					***indikator berbeda***
2	09	05	2	01	01	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	jumlah produsen pangan segar dan pangan olahan yang dibina	orang	600		100	100	100	100	200	33	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		33	
											Predikat Kinerja		ST				
3						**Ururan Pemerintahan Pilihan**												
3	25					**Kelautan dan Perikanan**											
3	25	03				PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	562		537	311,82		543	543		
3	*25*	*03*	*2*	*02*		***Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota***	***cakupan bina kelompok nelayan***	*%*	*41*		*33,00*	*33,00*		*33*	*33*		
3	25	03	2	02	02	Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	jumlah kelompok nelayan yang dibina	Poknel	23		2	2	100	2	4	17	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		17	
											Predikat Kinerja		ST				
3	25	04				PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	32.000		28.315	30.109,31		29.165	29.165		
3	*25*	*04*	*2*	*02*		***Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil***	***Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan***	*%*	*10*		*5*	*5*		*5*	*5*		
3	25	04	2	02	01	Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan	orang	790		50	50	100	100	150	19	beda indikator di renstra jumlah peserta pemberdayaan Pokdakan ikan dikawasan sentra / kawasan Minapolitan
3	*25*	*04*	*2*	*04*		***Pengelolaan Pembudidayaan ikan***	***jumlah produksi perikanan budidaya***	*Ton*	*32.000*		*28.315*	*30.109,31*		*29.165*	*29.165*		
3	25	04	2	04	02	Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan air tawar	paket	134		18	18	100	3	21	16	
3	25	04	2	04	03	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan pakan untuk indukan dan operasional	lokasi			2	2	100			0	ada perbedaan indikator
3	25	04	2	04	05	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan didarat	jumlah pokdakan yang menerima bantuan benih dan induk ikan	pokdakan	105		15	15	100	10	25	24	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		15	
											Predikat Kinerja		ST				
3	25	05				PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap	Ton			537	311,82					ada perbedaan indikator
3	*25*	*05*	*2*	*01*		***Pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota***	***Cakupan tabur benih ikan/restoking perairan umum***	*%*			*8*	*8*					ada perbedaan indikator
3	25	05	2	01	02	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum	lokasi	18		2	2	100	2	4	22	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		22	
											Predikat Kinerja		ST				
3	25	06				PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun			20,28	20,28					ada perbedaan indikator
3	*25*	*06*	*2*	*02*		***Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil***	jumlah produk olahan ikan	kg			1.050.400	*1.052.400*					ada perbedaan indikator

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
3	25	06	2	02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	jumlah frekuensi pembinaan dan pelatihan berbasis ikan dan kampanye gemarikan yang dilaksanakan	kali	24		4	4	100	3	7	29	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		29	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27					**Pertanian**											
3	27	01				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota*	%	84		80	80		82	82		
3	*27*	*01*	*2*	*01*		***Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***Persentase Penyusunan perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	*%*	*100*		*90*	*90*		*100*	*100*		
3	27	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	72		10	10	100	12	22	31	
3	27	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	42		7	7	100	7	14	33	
3	*27*	*01*	*2*	*02*		***Administrasi keuangan perangkat daerah***	***persentase pemenuhan administrasi keuangan***	*%*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		
3	27	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	bulan			12	12	100				ada perbedaan satuan
3	27	01	2	02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	kali			300	227	76				ada perbedaan indikator dan beda target atr Renja dgn DPA
3	*27*	*01*	*2*	*03*		***Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah***	*%*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		
3	27	01	2	03	02	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah Tersedia	kali			12	12	100				ada perbedaan satuan
3	*27*	*01*	*2*	*05*		***Administrasi kepegawaian perangkat daerah***	***Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian***	*%*	*100*		*100*	*80*		*100*	*100*		
3	27	01	2	05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan per Undang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang / kali	275		25	25	100	35	60	22	
3	*27*	*01*	*2*	*06*		***Administrasi umum perangkat daerah***	***Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum***	*%*	*92*		*80*	*80*		*90*	*90*		
3	27	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	jenis	20		16	16	100	16	16	33	
3	27	01	2	06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor terbeli dan jenis atk tersedia	jenis	65		57	69	121	65	65	33	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	jenis	15		4	4	100	14	14	33	
3	27	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	kali	420		60	51	85	60	111	26	
3	27	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi perjalanan luar daerah	kali	667		85	87	102	100	187	28	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	*27*	*01*	*2*	*07*		***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	***Pesentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia***	*%*	*92*		*85*	*85*		*90*	*90*		ada perbedaan satuan
3	27	01	2	07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	unit	260		40	40	100	40	80	31	
3	*27*	*01*	*2*	*08*		***Penyedlaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia***	*%*	*92*		*85*	*85*		*90*	*90*		
3	27	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat terkirim	surat	30.000		5.000	5.000	100	5.000	10.000	33	
3	27	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terbayar	jenis			3	3	100			0	
3	27	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor tersedia	orang	38		17	17	100	38	38	33	
3	*27*	*01*	*2*	*09*		***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***	***Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara***	*%*	*92*		*85*	*85*		*90*	*90*		
3	27	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	unit	300		293	250	85	300	300	33	
3	27	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor terpelihara	unit	19		4	-	-	3	3	16	th 21 refokusing
3	27	01	2	09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	260		72	72	100	40	112	43	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		98	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		24	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27	02				PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi tembakau rajangan	Ton	1.685		1.605	1.567,45		1.620	1.620		
							Produksi tembakau asepan	Ton	2.395		2.320	1.270,83		2.335	2.335		
3	*27*	*02*	*2*	*01*		*Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian*	*Produksi padi*	*Ton*	*463.025*		*457.641*	*480.023,75*		*458.539*	*458.539*		
							Produksi jagung	*Ton*	*102.247*		*101.059*	*88.537,89*		*101.257*	*101.257*		
							Produksi kedele	*Ton*	*1.070*		*1.045*	*1.998,21*		*1.052*	*1.052*		
							Produksi cabe	*Ton*	*659,40*		*623,89*	*1.699,68*		*630,40*	*630,40*		
							Produksi tembakau rajangan	*Ton*	*1.685*		*1.605*	*1.567,45*		*1.620*	*1.620*		
							Produksi tembakau asepan	*Ton*	*2.395*		*2.320*	*1.270,83*		*2.335*	*2.335*		
3	27	02	2	01	01	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	jumlah kelompok penerima bantuan alsintanbun	kelompok	116		29	34	117	15	49	42	
3	27	02	2	01	02	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	jumlah kelompok penerima bantuan bibit hortikultura	kelompok	25		2	2	100	3	5	20	
							Jumlah unit pengelola jasa alsintan/UPJA yang dibina	kelompok			250	250					ada perbedaan satuan
3	*27*	*02*	*2*	*02*		*Pengelolaan sumberdaya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikrroorganisme kewenangan kabupaten/kota*	*Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel*	*%*	*25*		*13*	*16*		*15*	*15*		
3	27	02	2	02	01	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	jumlah luasan penanaman dan pengembangan benih padi varietas unggul rojolele	Ha	10		10	10	100	10	10	33	
3	27	02	2	02	03	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	jumlah luasan pengembangan padi, jagung, kedele	Ha	2220		100	100	100	120	220	10	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		104	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		26	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27	03				PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Produktivitas padi*	*(kwt/ha)*			*64,01*	*65,58*		*37*	*37*		ada perbedaan indikator
3	*27*	*03*	*2*	*01*		*Pengembangan Prasarana Pertanian*	*Jumlah luasan LP2B/KP2B*	*Ha*	*32.000*		*32.000*	*32.000*		*32.000*	*32.000*		
3	27	03	2	01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Peraturan bupati (Perbub) LP2B yang disusun	dokumen	6		1	1	100	1	2	33	
3	27	03	2	01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	jumlah peta LP2B yang disusun	dokumen	4		1	1	100	1	2	50	
3	27	03	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya pengadaan Roda tiga 23 unit dan rumah pengering 6 unit untuk kelompok tani perkebunan	unit	90		29	29	100	15	44	49	
3	*27*	*03*	*2*	*02*		*Pembangunan Prasarana Pertanian*	*Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun*	*unit/lokasi*			*15*	*15*					ada perbedaan indikator
							Jumlah pembangunan/ rehabilitasi prasarana infrastruktur irigasi	*unit/lokasi*			*38*	*38*					
							Jumlah BPP yang direnovasi	*lokasi*			*2*	*2*					
3	27	03	2	02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	112		12	15	125	11	26	23	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	03	2	02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	jumlah embung yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	25		9	12	133		12	48	tahun 2021 ada perbedaan target atr Renja dgn DPA
3	27	03	2	02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan usaha tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhabilitasi	km	34		4	4	100	1	5	15	
3	27	03	2	02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM parit	jumlah dam parit yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	16		4	4	100		4	25	
3	27	03	2	02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long storage	jumlah long storage yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	16		3	3	100		3	19	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	jumlah BPP kecamatan yang dibangun/renovasi dan										

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
3	27	03	2	02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun/direhabilitasi	unit/lokasi	54		0	0		0	0	-	2021 dan 2022 tidak ada
3	***27***	***03***	***2***	***03***		***Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota***	***Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil***	***ekor***			***277.500***	***273.419***					ada perbedaan indikator
3	27	03	2	03	01	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	jumlah bantuan ternak domba yang diterima kelompok tani	ekor	1.830		140	-	-	48	48	12	
							jumlah peternak sapi potong dan sapi perah yang dibina	peternak	2.000		200	200	100	200	400		
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		106	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		31	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27	04				PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Populasi ternak sapi	ekor			117.492	112.517		-22	1546		ada perbedaan indikator
							Produsi daging sapi	ton			3.211	2.268					
3	***27***	***04***	***2***	***01***		***Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota***	***Cakupan pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis***	***%***	***94***		***89***	***89***		***90***	***90***		
3	27	04	2	01	01	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	jumlah ternak yang mendapat pelayanan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	ekor	38.545		6.000	6.000	100	6.000	12.000	31	
3	***27***	***04***	***2***	***02***		***Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota***	***Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi***	***%***	***92***		***86***	***86,00***		***88***	***88***		
3	27	04	2	02	03	Pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas daerah kabupaten/kota	jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan Inseminasi Buatan	ekor	***63000***		11.000	12.000	109	10.000	22.000	35	
3	***27***	***04***	***2***	***04***		***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner***	***Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan***	***%***	***50***		***30***	***30***		***40***	***40***		
3	27	04	2	04	01	Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	jumlah usaha peternakan dan pengolahan hasil ternak yang dibina	unit usaha	595		60	50	83	90	140	24	
							Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil peternakan yang dibina	pengusaha			25	13	52				
3	27	04	2	04	02	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	jumlah lokasi yang mendapat pembinaan dan pengawasan peredaran produk pangan/bahan pangan asal ternak	lokasi	60		10	10	100	10	20	33	
3	***27***	***04***	***2***	***05***		***Penerapan dan Pengawasan Persyaratan teknis kesejahteraan hewan***	***Produksi daging ruminansia***	***Ton***			***2.300***	***2.595***					ada perbedaan indikator
3	27	04	2	05	01	Pendampingan unit kesejahteraan hewan	jumlah pemotongan ternak di rumah potong hewan	ekor	2.100		1.898	1.980	104	1.950	1.950	33	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		99	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		31	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27	05				PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi	(kwt/ha)			64,05	65,58					ada perbedaan indikator
3	***27***	***05***	***2***	***01***		***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/kota***	***Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT***	***%***	***66***		***55***	***55***		***58***	***58***		
3	27	05	2	01	01	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pestisida untuk pengendalian OPT	jenis	6		5	5	100	6	6	33	
3	27	05	3	01	03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	jumlah pengembangan aplikasi pengendalian OPT	aplikasi	6		1	1	100	1	2	33	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		100	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		33	
											Predikat Kinerja		ST				
3	27	07				PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	10,63		8,33	8,33		8,63	8,63		
2	***01***	***07***	***2***	***01***		***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	***jumlah kelompok tani kelas pemula***	***poktan***	***1.020***		***1.055***	***1.055***		***1.055***	***1.055***		
							jumlah kelompok tani kelas lanjut	***poktan***	***545***		***535***	***535***		***535***	***535***		
							jumlah kelompok tani kelas madya	***poktan***	***140***		***135***	***135***		***135***	***135***		
							jumlah kelompok tani kelas utama	***poktan***	***10***		***9***	***9***		***9***	***9***		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Keterangan
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
1						2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
2	01	07	2	01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	182		93	93	100	184	184	33	
2	01	07	2	01	02	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah peserta/petani tembakau yang dilatih	orang	1090		200	160	80	90	250	34	
							Jumlah petani yang mengikuti bimbingan teknis dan temu karya pelaku agribisnis	orang	1580		200	80		230	310		
							Jumlah petani yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan pertanian bersubsidi	orang	1200		201	560		200	760		
							Jumlah kelompok tani berbasis gender yang difasilitasi	desa			1	-					
2	01	07	2	01	03	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Terlaksananya pengadaan sarana keinformasian di 21 BPP Kecamatan dan rehab 2 unit kantor BPP	BPP	26		21	21	100	26	26	33	
											Rata-Rata Capaian Kinerja Renja 2021		93	Rata-Rata Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		34	
											Rata-Rata Keseluruhan Capaian Kinerja Renja 2021		98	Rata-RataKeseluruhan Capaian Kinerja Renstra s/d 2022		26	

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP

Ir. WIDIYANTI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196408061991032005

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Layanan Urusan Wajib											
I	***Urusan Pangan***											
1	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan											
	Ketersediaan pangan utama/beras (Ton)			270,287	272,990	275,720	278,477	285,205	272,990	275,720	278,477	Elemen data IKK Outcome Urusan Pangan
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat											
	Ketersediaan energi (K.kal/kapita/hari)			3,015	3,030	3,045	3,060	2,663	3,030	3,045	3,060	
	Ketersediaan protein (Gram/kapita/ hari)			84.5	85.2	85.5	85.8	72.64	85.2	85.5	85.8	
3	Program penanganan kerawanan pangan											
	Persentase penanganan daerah rawan pangan (%)			8	10	12	14	8	3	12	14	
4	Program pengawasan keamanan pangan											
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman (%)			79	80	81	82	83	83	81	82	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
II	***Urusan Kelautan dan Perikanan***											
1	Program pengelolaan perikanan tangkap											
	Produksi perikanan tangkap (Ton)			537	543	547	552	311.82	95.85	547	552	Elemen data IKK Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan
2	Program pengelolaan perikanan budidaya											
	Produksi perikanan budidaya (Ton)			28,315	29,165	30,039	30,940	30,109	10,428	30,039	30,940	Elemen data IKK Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan											
	Cakupan tebar benih ikan (restocking) perairan umum (%)			8	15	23	30	8	15	23	30	
4	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan											
	Jumlah produk olahan ikan (Kg)			1,050,400	1,168,588	1,191,958	1,214,860	1,052,400	492,147	1,191,958	1,214,860	
III	***Urusan Pertanian***											
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota											
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)			80	82	82	83	80	40	82	83	
2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian											
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ku/Ha)			66.98	66.99	67.01	67.03	66.92	69.04	67.01	67.03	IKK Outcome Urusan Pertanian
	Produktivitas cabe (Ku/Ha)			8.9	8.98	9.06	9.15	7.87	8.38	9.06	9.15	
	Produktivitas tembakau rajang (Ku/Ha)			12.1	12.2	12.21	12.22	12.8	-	12.21	12.22	
	Produktivitas tembakau asepan (Ku/Ha)			9.81	9.83	9.86	9.88	10.3	-	9.86	9.88	
3	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian											
	Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional (%)			36	37	38	39	36	36	38	39	
	Persentase ketersediaan prasarana penyuluhan pertanian (%)			26	35	42	50	26	26	42	50	
	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) (Ekor)			277,500	286,000	288,384	297,039	273,419	267,161	288,384	297,039	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner											
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)			22	22	22	22	50	15	22	22	IKK Outcome Urusan Pertanian
5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian											
	Cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya (%)			55.3	58	60	62	55.3	55	60	62	
6	Program penyuluhan pertanian											
	Persentase kelompok tani madya dan utama (%)			8.33	8.63	9.13	9.63	8.33	8	9.13	9.63	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	2.52	2.63	2.68	2.88	2.12	2.63	2.68	2.88	

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP

Ir. WIDIYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196408061991032005

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**Ketersediaan pangan utama / beras**	**275.720 Ton**	**3,056,003,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		**Ketersediaan pangan utama / beras**	**275.720 Ton**	**3,056,003,000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan**	**47.83 %**	**3,056,003,000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang disediakan**	**47.83 %**	**3,056,003,000**	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Klaten	jumlah lumbung pangan yang tersedia	3 unit	3,056,003,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Klaten	jumlah lumbung pangan yang tersedia	3 unit	3,056,003,000	
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Ketersediaan energi**	**3.045 K.kal/kapita/ hari**	**516,500,000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Ketersediaan energi**	**3.045 K.kal/kapita/ hari**	**516,500,000**	
			Ketersediaan protein	**85,5 Gram/kapita/ hari**				**Ketersediaan protein**	**85,5 Gram/kapita/ hari**		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya**	**33.33 %**	**264,000,000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga**		**Persentase kelompok wanita tani yang mendapatkan pendampingan penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya**	**33.33 %**	**264,000,000**	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Klaten	Pangan berbasis sumberdaya lokal yang tersedia	1 laporan	124,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Klaten	Pangan berbasis sumberdaya lokal yang tersedia	1 laporan	124,000,000	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Klaten	pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3 dokumen	32,500,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Klaten	pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3 dokumen	32,500,000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	4 unit	32,500,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	4 unit	32,500,000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 unit	75,000,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	1 unit	75,000,000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		**Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan**	**100 %**	**10,000,000**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**Persentase koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang diselenggarakan**	**100 %**	**10,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	10,000,000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka pencapaian target konsumsi pangan**	**40 %**	**242,500,000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Persentase pelaku usaha pengolahan pangan lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka pencapaian target konsumsi pangan**	**40 %**	**242,500,000**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Klaten	jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 laporan	242,500,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Klaten	jumlah Pemberdayaan kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7 laporan	242,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Persentase penanganan daerah rawan pangan**	**12 %**	**50,000,000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Persentase penanganan daerah rawan pangan**	**12 %**	**50,000,000**	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani**	**6 lokasi**	**50,000,000**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lokasi daerah rawan pangan yang tertangani**	**6 lokasi**	**50,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 laporan	30,000,000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,000,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	20,000,000	
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**81 %**	**35,000,000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman**	**81 %**	**35,000,000**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar**	**40 %**	**35,000,000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase produsen pangan segar dan pangan olahan yang mendapatkan pembinaan pengawasan keamanan pangan segar**	**40 %**	**35,000,000**	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	1 dokumen	35,000,000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	1 dokumen	35,000,000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi perikanan tangkap**	**547 Ton**	**25,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Produksi perikanan tangkap**	**547 Ton**	**25,000,000**	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**cakupan bina kelompok nelayan**	**36 %**	**25,000,000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**cakupan bina kelompok nelayan**	**36 %**	**25,000,000**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Klaten	jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 kelompok	25,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Klaten	jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 kelompok	25,000,000	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi perikanan budidaya**	**30.039 Ton**	**335,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Produksi perikanan budidaya**	**30.039 Ton**	**335,000,000**	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**cakupan bina kelompok pembudidaya ikan**	**7 %**	**100,000,000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**cakupan bina kelompok pembudidaya ikan**	**7 %**	**100,000,000**	
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Klaten	jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	5 kelompok	100,000,000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Klaten	jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	5 kelompok	100,000,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**	**38.8 %**	**235,000,000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Cakupan kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan**	**38.8 %**	**235,000,000**	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	110,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	110,000,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	85,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	85,000,000	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Klaten	jumlah pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	150 orang	40,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Klaten	jumlah pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	150 orang	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum**	**23 %**	**50,000,000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum**	**23 %**	**30,000,000**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab./Kota		**Jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum**	**3 Lokasi**	**50,000,000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab./Kota**		**Jumlah lokasi penebaran benih ikan diperairan umum**	**3 Lokasi**	**30,000,000**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	2 dokumen	50,000,000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kab/Kota	2 dokumen	30,000,000	
8	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah produk olahan ikan**	**1.191.958 kg**	**50,000,000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Jumlah produk olahan ikan**	**1.191.958 kg**	**70,000,000**	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**40 %**	**50,000,000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**40 %**	**70,000,000**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Klaten	jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	3 unit usaha	50,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Klaten	jumlah unit usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	3 unit usaha	70,000,000	
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**82 %**	**35,732,439,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**82 %**	**35,684,439,000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**54,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**54,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	40,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	14,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	14,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100 %**	**34,408,441,701**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100 %**	**34,408,441,701**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKPP Kab. Klaten	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	298 orang/bulan	34,268,441,701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKPP Kab. Klaten	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	298 orang/bulan	34,268,441,701	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	140,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	140,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**100 %**	**25,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	**100 %**	**25,000,000**	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DKPP Kab. Klaten	jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	4 dokumen	25,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**100 %**	**25,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	**100 %**	**25,000,000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKPP Kab. Klaten	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan per undang-undangan	35 orang	25,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DKPP Kab. Klaten	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan per undang-undangan	35 orang	25,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**90 %**	**195,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**90 %**	**195,000,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	16 paket	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	65 paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	65 paket	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKPP Kab. Klaten	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	50,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	25,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	50,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**90 %**	**40,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**90 %**	**40,000,000**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKPP Kab. Klaten	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 unit	40,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKPP Kab. Klaten	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	40 unit	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**90 %**	**774,997,299**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**90 %**	**726,997,299**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	170,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKPP Kab. Klaten	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	170,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKPP Kab. Klaten	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	594,997,299	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKPP Kab. Klaten	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	546,997,299	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	**90 %**	**210,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terpelihara**	**90 %**	**210,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKPP Kab. Klaten	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	300 unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKPP Kab. Klaten	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	300 unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKPP Kab. Klaten	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DKPP Kab. Klaten	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	75,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKPP Kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	40 unit	35,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	DKPP Kab. Klaten	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	40 unit	35,000,000	
10	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**67,01 Ku/Ha**	**4,785,746,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**67,01 Ku/Ha**	**4,785,746,000**	
			Produktivitas cabe	**9,06 Ku/Ha**				**Produktivitas cabe**	**9,06 Ku/Ha**		
			Produktivitas tembakau rajang	**12,21 Ku/Ha**				**Produktivitas tembakau rajang**	**12,21 Ku/Ha**		
			Produktivitas tembakau asepan	**9,86 Ku/Ha**				**Produktivitas tembakau asepan**	**9,86 Ku/Ha**		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		**Produksi padi**	**459.885 Ton**	**4,055,746,000**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Produksi padi**	**459.885 Ton**	**4,055,746,000**	
			Produsi jagung	**101.554 Ton**				**Produsi jagung**	**101.554 Ton**		
			Produksi kedele	**1.061 Ton**				**Produksi kedele**	**1.061 Ton**		
			Produksi cabe	**636,92 Ton**				**Produksi cabe**	**636,92 Ton**		
			Produksi tembakau rajang	**1.640 Ton**				**Produksi tembakau rajang**	**1.640 Ton**		
			Produksi tembakau asepan	**2.335 Ton**				**Produksi tembakau asepan**	**2.335 Ton**		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Klaten	jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18 laporan	1,264,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Klaten	jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	18 laporan	1,264,000,000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Klaten	jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	2,791,746,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Klaten	jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 laporan	2,791,746,000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten**	**15 %**	**730,000,000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten**	**15 %**	**730,000,000**	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	UPT ATP Kab. Klaten	jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	500,000,000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	UPT ATP Kab. Klaten	jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB	500,000,000	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Klaten	jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 dokumen	230,000,000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Klaten	jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 dokumen	230,000,000	
11	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional**	**38 %**	**4,010,000,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional**	**38 %**	**4,010,000,000**	
			Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	**42 %**				**Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian**	**42 %**		
			Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	**288.384 ekor**				**Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)**	**288.384 ekor**		
	Pengembangan Prasarana Pertanian		**Jumlah luasan LP2B/KP2B**	**32.000 Ha**	**110,000,000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Jumlah luasan LP2B/KP2B**	**32.000 Ha**	**110,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Klaten	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 dokumen	75,000,000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Klaten	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 dokumen	75,000,000	
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Klaten	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	15,000,000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Klaten	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4 laporan	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Klaten	jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	4 laporan	20,000,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		**Persentase prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi**	**47 %**	**3,775,000,000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Persentase prasarana Pertanian yang dibangun dan direhabilitasi**	**47 %**	**3,775,000,000**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Klaten	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	11 unit	1,575,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Klaten	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	11 unit	1,575,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Klaten	jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	200,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Klaten	jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	200,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Klaten	jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	2,000,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Klaten	jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit	2,000,000,000	
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan bibit ternak**	**38.72 %**	**125,000,000**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan bibit ternak**	**38.72 %**	**125,000,000**	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Klaten	jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	1 laporan	125,000,000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Klaten	jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	1 laporan	125,000,000	
12	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**22 %**	**565,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**22 %**	**565,000,000**	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan pelayanan vaksinasi/ penanggulangan PHM dan zoonosis**	**91 %**	**130,000,000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan pelayanan vaksinasi/ penanggulangan PHM dan zoonosis**	**91 %**	**130,000,000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Klaten	jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 laporan	130,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Klaten	jumlah wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5 laporan	130,000,000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi**	**88 %**	**265,000,000**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi**	**88 %**	**265,000,000**	
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	265,000,000	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten	jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah	12 laporan	265,000,000	
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		**Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan**	**40 %**	**95,000,000**	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Cakupan pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan**	**40 %**	**95,000,000**	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Klaten	jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	50,000,000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Klaten	jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Klaten	jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 laporan	45,000,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Klaten	jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 laporan	45,000,000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		**Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan**	**100 %**	**75,000,000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**		**Persentase ternak ruminansia besar yang dipotong dirumah potong hewan**	**100 %**	**75,000,000**	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	RPH Kota dan RPH Pedan	jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 laporan	75,000,000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	RPH Kota dan RPH Pedan	jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	12 laporan	75,000,000	
13	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya**	**60 %**	**307,500,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya**	**60 %**	**307,500,000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		**Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT**	**60 %**	**307,500,000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**		**Persentase ketersediaan sarana pengendalian OPT**	**60 %**	**307,500,000**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Klaten	jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	10.000 ha	230,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Klaten	jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	10.000 ha	230,000,000	
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Klaten	jumlah luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000 ha	77,500,000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Klaten	jumlah luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000 ha	77,500,000	
14	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**9.13 %**	**699,600,000**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase kelompok tani madya dan utama**	**9.13 %**	**799,600,000**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		**jumlah kelompok tani kelas pemula**	**1.055 poktan**	**699,600,000**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**jumlah kelompok tani kelas pemula**	**1.055 poktan**	**799,600,000**	
			jumlah kelompok tani kelas lanjut	**535 poktan**				**jumlah kelompok tani kelas lanjut**	**535 poktan**		
			jumlah kelompok tani kelas madya	**135 poktan**				**jumlah kelompok tani kelas madya**	**135 poktan**		
			jumlah kelompok tani kelas utama	**9 poktan**				**jumlah kelompok tani kelas utama**	**9 poktan**		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	26 Unit	280,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	26 Unit	380,000,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	200 unit	267,500,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Klaten	jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	200 unit	267,500,000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Klaten	jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	26 unit	152,100,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Klaten	jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	26 unit	152,100,000	
	TOTAL				50,217,788,000	TOTAL				50,269,788,000	

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP

Ir. WIDIYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196408061991032005

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kedungampel Kec. Cawas	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
2	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pundungan Kec. Juwiring	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
3	Optimalisasi lahan pekarangan/Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kotesan Kec. Prambanan	Termanfaatkannya lahan pekarangan	1 kelompok	
4	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Gedaren Kec. Jatinom	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
5	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Kendalsari Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
6	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Panggang Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	
7	Pemberian bantuan bibit tanaman (cengkeh, kopi, lada, alpukat, jahe, kelengkeng)	Tangkil Kec. Kemalang	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit tanaman	1 kelompok	

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP

Ir. WIDIYANTI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196408061991032005

TABEL 3.1

FORMULIR LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SINERGI DAN SELARAS DENGAN PRIORITAS DAERAH, PROVINSI DAN NASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Nama OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
3	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kab./Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
7	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
8	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
9	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
10	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
11	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
12	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS NASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
13	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
14	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Klaten, Juli 2022

KEPALA DKPP

KABUPATEN KLATEN

Ir. WIDIYANTI, M.Si

NIP. 196408061991032005

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**3,657,503,000**					**2,574,764,000**
2 09 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**3,056,003,000**					**786,310,000**
2 09 02 2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**3,056,003,000**					**786,310,000**
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Ketersediaan pangan utama / beras	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	Tersedianya infrastuktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275720.00 Ton	3 unit	47.83 %	3,056,003,000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Ketersediaan pangan utama / beras	275720.00 Ton	786,310,000
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**516,500,000**					**1,506,846,000**
2 09 03 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**264,000,000**					**906,846,000**
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan energi Ketersediaan protein	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Tercapainya pendampingan kwt dalam hal penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	1 Laporan	33.33 %	124,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Ketersediaan energi Ketersediaan protein	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	675,000,000
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan energi Ketersediaan protein	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Tercapainya pendampingan kwt dalam hal penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	3 Dokumen	33.33 %	32,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Ketersediaan energi Ketersediaan protein	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	70,000,000
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Ketersediaan energi Ketersediaan protein	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Tercapainya pendampingan kwt dalam hal penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	4 Unit	33.33 %	32,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Ketersediaan energi Ketersediaan protein	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	80,000,000
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Ketersediaan energi Ketersediaan protein	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Tercapainya pendampingan kwt dalam hal penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	1 Unit	33.33 %	75,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Ketersediaan energi Ketersediaan protein	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	81,846,000
2 09 03 2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**10,000,000**					**50,000,000**
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	ketersediaan energi ketersediaan protein	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.045 K.kal/kapita/ hari 85.5 gram/kapita/ hari	1 Laporan	100 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		ketersediaan energi ketersediaan protein	3.045 K.kal/kapita/ hari 85.5 gram/kapita/ hari	50,000,000
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**242,500,000**					**550,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan energi Ketersediaan protein	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Tercapainya peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan dalam rangka pencapaian target konsumsi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	7 Laporan	40 %	242,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		Ketersediaan energi Ketersediaan protein	3045.00 K.kal/kapita/hari 85.50 Gram/kapita/hari	550,000,000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**50,000,000**					**212,441,000**
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**50,000,000**					**212,441,000**
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Tercapainya penanganan lokasi daerah rawan pangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.00 %	1 Laporan	6 Lokasi	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penanganan daerah rawan pangan	12.00 %	65,000,000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tercapainya penanganan lokasi daerah rawan pangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.00 %	1 Dokumen	6 Lokasi	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penanganan daerah rawan pangan	12.00 %	147,441,000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**35,000,000**					**69,167,000**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**35,000,000**					**69,167,000**
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota yang dibina	Terbinanya produsen pangan segar dan pangan olahan tentang pengawasan pangan segar	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.00 %	1 Dokumen	40 %	35,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	81.00 %	69,167,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**460,000,000**					**1,674,824,000**
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**25,000,000**					**49,405,000**
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**25,000,000**					**49,405,000**
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Tercakupnya bina kelompok nelayan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	547 Ton	2 Kelompok	36 %	25,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produksi perikanan tangkap	547 Ton	49,405,000
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**335,000,000**					**1,432,739,000**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**100,000,000**					**432,739,000**
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Tercakupnya bina kelompok pembudidaya ikan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30039.00 Ton	17 Kelompok	7 %	100,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produksi perikanan budidaya	30039.00 Ton	432,739,000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**235,000,000**					**1,000,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercakupnya kelompok pembudidaya ikan yang mendapat sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30039.00 Ton	3 Unit	38.8 %	110,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produksi perikanan budidaya	30039.00 Ton	800,000,000
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercakupnya kelompok pembudidaya ikan yang mendapat sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30039.00 Ton	1 Unit	38.8 %	85,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produksi perikanan budidaya	30039.00 Ton	125,000,000
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Tercakupnya kelompok pembudidaya ikan yang mendapat sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30039.00 Ton	150 Orang	38.8 %	40,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produksi perikanan budidaya	30039.00 Ton	75,000,000
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**30,000,000**					**74,108,000**
3	**25**	**05**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**30,000,000**					**74,108,000**
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23 %	2 Dokumen	3 Lokasi	30,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum	23 %	74,108,000
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**70,000,000**					**118,572,000**
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**70,000,000**					**118,572,000**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk olahan ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Tercakupnya bina pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1191958 kg	3 Unit Usaha	40 %	70,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah produk olahan ikan	1191958 kg	118,572,000
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**46,152,285,000**					**55,149,286,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**35,684,439,000**					**39,393,393,000**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,000,000**					**90,000,000**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dna evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	12 Dokumen	100 %	40,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	75,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dna evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	7 Laporan	100 %	14,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	15,000,000
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**34,408,441,701**					**36,888,393,000**
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	298 Orang/Bulan	100 %	34,268,441,701	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	36,713,393,000
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	4 Dokumen	100 %	140,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	175,000,000
3 27 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**25,000,000**
3 27 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Teradministrasikannya barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	4 Dokumen	100 %	25,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	25,000,000
3 27 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**135,000,000**
3 27 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselesaikannya administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	35 Orang	100 %	25,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	135,000,000
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**195,000,000**					**580,000,000**
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	16 Paket	90 %	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	40,000,000
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	65 Paket	90 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	200,000,000
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	14 Paket	90 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	55,000,000
3 27 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	60 Laporan	90 %	25,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	125,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	100 Laporan	90 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	160,000,000
3	**27**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**40,000,000**					**75,000,000**
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	40 Unit	90 %	40,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	75,000,000
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**726,997,299**					**780,000,000**
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	12 Laporan	90 %	10,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	10,000,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	12 Laporan	90 %	170,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	175,000,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disedikan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	12 Laporan	90 %	546,997,299	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	595,000,000
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**210,000,000**					**820,000,000**
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	300 Unit	90 %	100,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	250,000,000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	3 Unit	90 %	75,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	485,000,000
3	27	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82.00 %	40 Unit	90 %	35,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	82.00 %	85,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**4,785,746,000**					**4,540,299,000**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**4,055,746,000**					**790,299,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tercapainya produksi cabe, kedele, padi, jagung, tembakau asepan dan tembakau rajang	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	18 Laporan	567111.92 Ton	1,264,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH CHT		Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	450,000,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Tercapainya produksi cabe, kedele, padi, jagung, tembakau asepan dan tembakau rajang	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	12 Laporan	567111.92 Ton	2,791,746,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	340,299,000
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**730,000,000**					**3,750,000,000**
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Terpenuhinya ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	3 VUB	15 %	500,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	1,450,000,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Terpenuhinya ketersediaan benih unggul padi berlabel di ATP Kab. Klaten	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	2 Dokumen	15 %	230,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Produktivitas cabe Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktivitas tembakau asepan Produktivitas tembakau rajang	9.06 Ku/Ha 67.01 Ku/Ha 9.86 Ku/Ha 12.21 Ku/Ha	2,300,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**4,010,000,000**					**7,839,764,000**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**110,000,000**					**810,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Tercapainya luasan LP2B/KP2B	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1 Dokumen	32000 Ha	75,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	300,000,000
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tercapainya luasan LP2B/KP2B	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1 Dokumen	32000 Ha	15,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	0
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Tercapainya luasan LP2B/KP2B	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	4 Laporan	32000 Ha	20,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	510,000,000
3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**3,775,000,000**					**5,589,764,000**
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	Terbangun dan terehabilitasinya prasarana pertanian	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	11 Unit	47 %	1,575,000,000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	3,339,764,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Terbangun dan terehabilitasinya prasarana pertanian	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1 Unit	47 %	200,000,000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	950,000,000
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Terbangun dan terehabilitasinya prasarana pertanian	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	2 Unit	47 %	2,000,000,000	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1,300,000,000
3 27 03 2.03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**125,000,000**					**1,440,000,000**
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Terfasilitasinya peternak ruminansia besar dan ruminansia kecil dalam pengelolaan bibit ternak	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1 Laporan	38.72 %	125,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil) Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	288384.00 ekor 38.00 % 42.00 %	1,440,000,000
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**565,000,000**					**1,185,715,000**
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**130,000,000**					**360,715,000**
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tercakupnya pelayanan vaksinasi/penanggulangan PHM dan zoonosis	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.00 %	5 Laporan	91 %	130,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	360,715,000
3 27 04 2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**265,000,000**					**400,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	Tercakupnya pelayanan kesehatan hewan, IB dan penanganan gangguan reproduksi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.00 %	12 Laporan	88 %	265,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	400,000,000
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**95,000,000**					**225,000,000**
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan	Tercakupnya pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.00 %	12 Laporan	40 %	50,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	175,000,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Tercakupnya pelayanan usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.00 %	10 Laporan	40 %	45,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	50,000,000
3	**27**	**04**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**								**75,000,000**					**200,000,000**
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Terpotongnya ternak ruminansia besar dirumah potong hewan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.00 %	12 Laporan	100 %	75,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	22.00 %	200,000,000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**307,500,000**					**1,309,227,000**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**307,500,000**					**1,309,227,000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	Terpenuhinya ketersediaan sarana pengendalian OPT	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	10000 Ha	60 %	230,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	60 %	834,227,000
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Terpenuhinya ketersediaan sarana pengendalian OPT	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	1000 Ha	60 %	77,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	60 %	475,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**799,600,000**					**880,888,000**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**799,600,000**					**880,888,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani madya dan utama	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Tercapainya jumlah kelompok tani kelas pemula, lanjut, madya dan utama	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.13 %	26 Unit	1734 poktan	380,000,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase kelompok tani madya dan utama	9.13 %	139,388,000
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase kelompok tani madya dan utama	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tercapainya jumlah kelompok tani kelas pemula, lanjut, madya dan utama	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.13 %	200 Unit	1734 poktan	267,500,000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase kelompok tani madya dan utama	9.13 %	475,000,000
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Tercapainya jumlah kelompok tani kelas pemula, lanjut, madya dan utama	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.13 %	26 Unit	1734 poktan	152,100,000	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		Persentase kelompok tani madya dan utama	9.13 %	266,500,000
								TOTAL	**50,269,788,000**					**59,398,874,000**

Klaten, Juli 2022
KEPALA DKPP
KABUPATEN KLATEN

Ir. WIDIYANTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196408061991032005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

Daftar Isi			i
Kata Pengantar			ii
I	**PENDAHULUAN**		I - 1
	1.1	Latar Belakang	I - 1
	1.2	Landasan Hukum	I - 4
	1.3	Maksud dan Tujuan	I - 17
	1.4	Sistematika	I - 17
II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		II - 1
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 8
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 11
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 14
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II - 14
III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**		III - 1
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	III - 1
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 2
IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		IV - 1
V	**PENUTUP**		V - 1
LAMPIRAN-AMPIRAN			

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selama tahun 2023. Rencana Kerja ini menyajikan Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten untuk 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Perumusan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pagu Anggaran Indikatif Rencana Kerja ini. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi seluruh penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Kabupaten Klaten

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan,
b. penyusunan rancangan awal,
c. penyusunan rancangan,
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
e. perumusan rancangan akhir, dan
f. penetapan.

Memedomani Pasal 126 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten mengacu dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Memedomani Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya hasil pembahasan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara No. 4866) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara No. 5355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, No. 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6346 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
34. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara tahun 2021Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641);
37. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
38. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
39. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
40. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
41. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
47. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
48. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
56. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

57. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279)
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
60. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
61. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 174);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 170);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
68. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 10);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
70. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi pelayanan Tera dan Tera Ulang;

71. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
73. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
74. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
75. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang;
76. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
77. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian penghargaan dan pendampingan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Klaten
78. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
79. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten
80. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Klaten Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerahdalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerahdalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerahdalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerahdalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika

Berpedoman Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) /2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)/2022 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tentang :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sehingga Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten, diantaranya:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada periode tahun anggaran 2021 yang tidak memenuhi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya program, kegiatan dan Sub Kegiatan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Pada program ini ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sub kegiatan ini hanya mampu mencapai target fisik sebesar 70 kali dari target

sebesar 555 kali sehingga capaian kinerjanya hanya sebesar 13%.

Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan Rapat koordinasi dalam daerah yang dilakukan tanpa tatap muka (hanya dengan zoom meeting)

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada sub kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, pada sub kegiatan ini targetnya 12 jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia, akan tetapi hanya mampu disediakan sebanyak 9 jenis sehingga capaian kinerjanya hanya 75%.
   b) Fasilitasi Kunjungan Tamu, pada sub kegiatan ini menargetkan 700 orang tamu yang terfasilitasi, akan tetapi hanya mencapai 477 orang yang terfasilitasi. Meskipun Kegiatan telah dilaksanakan namun terkendala PPKM dan Pembatasan Peserta Pertemuan Tatap Muka Sehingga mengurangi jumlah peserta yang difasilitasi

b. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dari Pemangku Jabatan, pada sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, pada sub kegiatan ini menargetkan 80 orang mendapatkan sertifikat PIRT dan hanya tercapai 20 orang, akan tetapi karena andanya pengurang anggaran untuk

penanganan covid 19, sedangkan sisa lebih penggunaan anggaran dikarenakan karena adanya Efisiensi anggaran alat tulis kantor dan honorarium Narsum yang berasal dari OPD terkait sebesar 50% .

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya pada sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, sub kegiatan ini menargetkan 230 orang (PKL) yang dilakukan pembinaan akan tetapi hanya tercapai 180 orang, hal ini disebabkan Kegiatan terkendala adanya PPKM dimana adanya pembatasan jumlah peserta tatap muka.

d. Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tigkat Agen dan Pasar Rakyat, sub kegiatan ini menargetkan 55 orang pelaku usaha yang mendapat pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan, akan tetapi hanya 35 orang yang dapat dilakukan pembinaan. Hal ini disebabkan Kegiatan terkendala Refocusing anggaran dan adanya PPKM dan pembatasan peserta tatap muka

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri, pada sub kegiatan ini menargetkan 4 event pameran yang diikuti, akan tetapi karena adanya pengurangan (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi covid 19 sehingga hanya tercapai 1 kali event atau 25% (tidak dapat tercapai).

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan:
   1) Administrasi Keuangan Daerah, sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.
   3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada sub kegiatan:
      a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
      b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
      d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada sub kegiatan:
      a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
      c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a) Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi , Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten, sub kegiatan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Keangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota.

c. Program Pelatihan dan Latihan Koperasi dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

d. Program Pengembangan UMKM, kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Tehnologi

e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, antara lain

1. kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

f. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera , Tera Ulang dan Pengawasan, sub kegiatan antara lain:
   1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera , Tera Ulang.
   2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2021 tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau, diantaranya:

1) adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan dikeluarkannya aturan pembatasan kegiatan masyarakat.
2) Adanya pengurang (refocusing) anggaran untuk penanganan pandemi covid 19.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, tidak terkomunikasinya informasi pelaksanaan pembangunan urusan koperasi Usaha Kecil Menengah dan Urusan perdagangan dengan publik mengingat terbatasnya informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Pandemi Covid 19 ini juga menyebabkan banyaknya anggaran kegiatan yang terpaksa harus mengalami refocusing anggaran untuk penangan pandemi seperti fasilitasi PIRT bagi UKM, Pembinaan PKL , stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting dan promosi produk UKM, sehingga menurunkan tingkat ketahanan ekonomi masayarakat.

Selain itu adanya pandemi ini juga mengakibatkan adanya beberapa aturan yang belum dapat tersosialisasikan, sebagai contoh adanya perubahan perda retribusi jasa umum dan jasa usaha yang didalamnya ada tarif retribusi pasar yang naik, karena belum tersosialisasikan dengan baik sehingga banyak gejolak yang terjadi pada para pedagang menanggapi kenaikan tersebut.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perludiambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

a. Perlunya mempedomani Renstra dan Renja Perangkat Daerah agar kinerja tercapai maksimal.
b. Perlunya perencanaan yang tepat dan didukung dengan SDM yang berkualitas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
c. Perlunya peningkatan kualitas dan validitas data dari masing–masing bidang urusan sebagai bahan perencanaan, dan pelaporan.
d. perlunya penganggaran kembali kegiatan yang belum terlaksana

Tabel penyajian hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada **tabel 2.1** (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsif *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, terkait dengan target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten, Tabel disajikan pada Tabel 2.2 (terlampir).

Indikator Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun, Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu, Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi, Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi, Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu, Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu, Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu, Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu , Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara, Meskipun bersifat menunjang, namun indikator-indikator kinerja ini mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten secara keseluruhan

1. **prosentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas**

   indikator ini membandingkan antara jumlah koperasi berkualitas dan sangat berkualitas dengan jumlah koperasi yang ada. Adapun prosentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas pada tahun 2020 sebesar 42,80% yang kemudian tahun 2021 menjadi 43,1% atau naik sebesar 0,3%. Sedangkan proyeksi target kinerja yang

diharapkan tercapai pada tahun 2022 sebesar 43,30% dan target kinerja tahun 2023 sebesar 43,50%.

2. **prosentase koperasi sehat**

   indikator ini membandingkan antara jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang ada. Adapun prosentase koperasi sehat pada tahun 2020 sebesar 19,78 % yang kemudian tahun 2021 menjadi 20,3 % atau naik sebesar 0,52%. Sedangkan proyeksi target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2022 sebesar 20,79% dan target kinerja tahun 2023 sebesar 21,80%.

3. **pertumbuhan UMKM**

   Jumlah UMKM Kabupaten Klaten pada tahun 2020 adalah 55.118, kemudian pada tahun 2021 menjadi 55.184 sehingga hanya terjadi kenaikan pertumbuhan UMKM sebesar 0,12%. sedangkan target kinerja yang diharapkan sebesar 0,5%. Sedangkan proyeksi target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun 2022 sebesar 0,13% dan target kinerja tahun 2023 diharapkan sebesar 0,14%.

4. **prosentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil**

   Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana dalam pasal tersebut UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam Peraturan pemerintah ini mengatur Kekayaan Bersih atau Modal Usaha, Usaha Mikro paling banyak Rp1 miliar, Usaha Kecil lebih dari Rp1miliar paling banyak Rp 5 miliar, Usaha Menengah: lebih dari Rp 5 miliar paling banyak Rp10 miliar, Diluar tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian Hasil Penjualan Tahunan Usaha Mikro paling banyak Rp 2 miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp 2 miliar – paling banyak Rp15 miliar,

Usaha Menengah lebih dari Rp15 miliar – paling banyak Rp 50 miliar.

Dengan adanya perubahan kriteria ini menyebabkan kecilnya capaian dan target kinerja usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil. Prosentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil tahun 2020 sebesar 0,0077% kemudian capaian target tahun 2021 sebesar 0,002%. Sedangkan proyeksi target kinerja yang akan dicapai ditahun 2022 diharapkan sebesar 0,006% dan tahun 2023 diharapkan sebesar 0,008%.

5. **pertumbuhan PDRB sektor perdagangan**

   Kontribusi Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan diperkirakan pada tahun 2020 mempunyai kinerja negatif yaitu sebesar -4,79 dan pada tahun 2021 juga mempunyai kinerja negatif sebesar -0,85, hal ini disebabkan adanya pandemi covid 19 yang telah melibas hampir semua sektor perekonomian. Meskipun begitu, kabupaten klaten optimis untuk dapat memulihkan perekonomian daerah dengan menargetkan kinerja positif pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ditahun 2022 diharapkan sebesar 1,24% dan tahun 2023 diharapkan sebesar 1,79%.

6. **prosentase sarana perdagangan (pasar) yang layak operasi**

   Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengelola 50 pasar rakyat/tradisional milik Pemerintah Daerah yang tersebar di 26 Kecamatan. prosentase sarana perdagangan (pasar) yang layak operasi dalam hal ini ditetapkan dengan indikator banyaknya pasar yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat untuk melaksanakan opersional perdagangan. Dari 50 pasar tersebut baru pada tahun 2020 sekitar 34% pasar yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat. Sedangkan tahun 2021 sebesar 38% yang memenuhi syarat. Adapun target kinerja prosentase sarana perdagangan (pasar) yang layak operasi tahun 2022 sebesar 42% dan tahun 2023 sebesar 46%.

7. nilai ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang diperdagangkan ke luar negeri yang ditentukan oleh permintaan luar negeri. Nilai ekspor Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 90.224.786 US$, tahun 2021 naik menjadi 188.408.012 US$. Optimisme perdagangan luar Negeri meningkatkan adanya kenaikan target capaian nilai ekspor ditahun tahun berikutnya.

Pada tahun 2022, Klaten menargetkan capaian nilai ekspornya sebesar 376.816.024 US$ dan tahun 2023 sebesar 565.224.036 US$.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumberdaya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan.

b) Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.

c) Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Klaten.

d) Disiplin aparatur yang belum optimal.

e) Kurangnya keterkaitan antara tugas poksi bidang-bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten.

f) Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

g) Penyediaan data dan informasi UKM sebagai bahan perencanaan kurang memadai,dan

h) Cepatnya reformasi birokrasi, dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

a. Permasalahan dan Hambatan Sekretariat

1) belum optimalnya manajemen pengelolaan administrasi perkantoran

b. Permasalahan dan Hambatan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah

1) masih ditemukannya usaha simpan pinjam yang belum berijin
2) Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi serta kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan
3) Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP
4) belum optimalnya manajemen pengelolaan koperasi
5) Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan, keuangan serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan hukum aktif
6) masih Rendahnya pertumbuhan usaha mikro
7) Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro

c. Permasalahan dan Hambatan terkait Bidang Perdagangan

1) belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal
2) Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif
3) belum terkendalinya lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) tertentu
4) masih rendahnya nilai ekspor
5) belum optimalnya pelaksanaan metrologi legal
6) Menurunnya event promosi produk dalam negeri

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, diantaranya:

1. Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah: mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen.
2. Peningkatan kualitas pasar tradisional
3. Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan "Aku Cinta Produk Klaten" dan pengembangan berbasis data Koperasi dan UKM
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing koperasi dan UKM.

2.3.4 Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

1. Belum optimalnya pertumbuhan usaha mikro yang didukung dengan kualitas pelayanan koperasi.
2. Belum optimalnya pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan dalam mendukung perekonomian daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu membandingkan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan, serta penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan secara garis besar dapat disajikan pada ***Tabel 2.4*** (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 banyak sekali mengalami perubahan hal ini dikarenakan ada aturan yang mensyaratkan bahwa usulan dari bawah merupakan usulan yang diprioritas tetapi harus lewat Musrenbang Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten disamping itu juga ada kegiatan yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Selain kegiatan-kegiatan yang merupakan usulan dari desa dan kegiatan yang sifatnya rutin Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Klaten Tahun 2023 juga mengusulkan kegiatan-kegiatan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Adapun usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan dengan kesesuaian isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah disajikan pada **Tabel 2.5 (terlampir)**.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1 (terlampir).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Kecil Menengah dan Perdagangan adalah :

1. Menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian.
2. Mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Koperasi, Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten

Tujuan 1: Menguatkan kualitas kelembagaan koperasi serta UMKM untuk mendukung perekonomian, dengan sasaran, yaitu:
   1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
   2. Meningkatnya kapasitas skala usaha mikro menjadi usaha kecil

Tujuan 2: Mengoptimalkan kinerja sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, dengan sasaran, yaitu:
   1. Meningkatnya kualitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri
   2. Nilai ekspor

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten pada tahun 2023 meliputi 14 Program, 29 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 24.153.679.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah),- dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).

Sedangkan pada prakiraan maju tahun 2024, rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten adalah 14 Program, 29 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan dan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 31,647,122,000,- (Tiga Puluh satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAU.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Klaten pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten disajikan pada ***tabel 4.1*** (terlampir)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang disusun merupakan pedoman sebagai arah kebijakan penyelenggaraan urusan wajib yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan. Sehingga Rencana Kerja Tahunan ini akan lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindaklanjut

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre–point* (pokok–pokok) rencana, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2022-2026.
2. Proyeksi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp. 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 24.153.679.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) untuk membiayai 14 Program, 29 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera .***

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Kabupaten Klaten

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	a. Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan b. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran c. Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	%									
1,1	Administrasi Keuangan Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan										
1,1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan Administrasi keuangan	bulan	0	0	0	12	12	100			
1,1,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Koordinasi Ke Dalam Daerah	kali	2.950	280.000.000	470	555	70	13			
1,2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang yang mendapat Pemahaman tentang Pita Cukai Palsu										
1,2,1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mendapat pemahaman tentang Pita Cukai Palsu	orang	0	0	0	500	500	100			
1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan										
1,3,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang tersedia	jenis	17	55.000.000	27	12	9	75			
1,3,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis	0	0	0	58	58	100			
1,3,3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan	jenis	8	750.000.000	10	10	10	100			
1,3,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jenis Surat kabar dan Buku yang tersedia	jenis	6	30.000.000	8	2	2	100			
1,3,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan rapat koordinasi dan tamu	orang	0	0	0	700	477	68			

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1,3,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Frekuensi koordinasi ke Luar Daerah	kali	1.650	1.500.000.000	470	90	87	97			
1,4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan										
1,4,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim	buah	4.056	25.000.000	527	585	585	100			
1,4,2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Terbayar	bulan	0	0	0	12	12	100			
1,4,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya THL Administrasi Keuangan dan Kebersihan										
		Jumlah tenaga harian lepas (THL) Administrasi Keuangan dan Kebersihan	orang	174	7.895.000	182	183	183	100			
1,4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional										
1,4,1	Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah THL Pengemudi	orang	1	80.000.000	4	4	4	100			
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	54	277.000.000	56	56	56	100			
1,4,2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang Terrehab	unit	1	1.750.000.000	0	1	1	100			
1,4,3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah THL Keamanan	orang	12	750.000.000	14	13	13	100			
		Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	38	202.000.000	1	38	38	100			
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif Presentase Pertumbuhan Koperasi	%									

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2,1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi , Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten											
2,1,1	Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Keangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Anggota dan Pengurus Koperasi yang terbina	koperasi	2.300	2.000.000.000	100	35	35	100			
3	Program Pelatihan dan Latihan Koperasi	Presentase Manajer Koperasi Bersertifikasi	%									
3,1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten											
3,1,1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota koperasi yang terlatih	orang	0	0	0	129	129	100			
4	Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPI-PIRT dan HALAL	%									
4,1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dari Pemangku Jabatan											
4,1,1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat Hak Merk	orang	30	250.000.000	0	0					
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat Sertifikat P-IRT	orang	0	0	0	80	20	25			

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4,1,2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Umkm yang terlatih	orang	0	0	0	180					
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%									
5,1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											
5,1,1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Tehnologi	Jumlah Pelaku Umkm yang terbina	orang	300	362.000.000	0	270	270	100			
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a. Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi b. Persentase PKL dan Asongan yang terbina c. Presentase Jumlah Pasar terhadap jumlah pedagang	a. Unit b.% c.%									
6,1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.500.000.000							
6,1,1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi	unit	2	1.500.000.000	0	2	13	93			
6,2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											
6,2,1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang mendapat pemahaman tentang Pita Cukai Palsu	orang	250	150.000.000	220	0	0				
6,2,2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang terkelola	Pasar				49	49	100			
		Jumlah PKL yang dibina	PKL									

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%				230	180	78			
7,1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota											
7,1,1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tigkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan	orang				55	35	64			
7,2	Pengendalian Harga dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota											
7,2,1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Kabupaten /Kota	Jumlah pasar murah yang terselenggara	kali	5	30.000.000	1	0	0	0			
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan Pelayanan UTTP	%									
8,1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera , Tera Ulang dan Pengawasan											
8,1,1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera , Tera Ulang	Jumlah metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang yang terlaksana	kali				50	50	100			
8,1,2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Raperda yang tersosialisasikan	raperda				1	1	100			
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase Promosi Produk UKM	%									
9,1	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				250.000.000							

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lau (n-2) / 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d tahun berjalan	
							Target Kinerja Renja PD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
9,1,1	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah event Pameran yang terlaksana	event				4	1	25			

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DKUKMP KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SPM/ standar nasional	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1) (*)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	prosentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	43,10	43,30	43,50	43,75	43,10	43,30	43,50	43,75	
2	prosentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,60	14,75	17,00	17,65	7,60	1,40	17,00	17,65	
3	prosentase UMKM yang melakukan kemitraan		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,27	0,30	0,32	0,35	0,27	0,13	0,32	0,35	
4	prosentase Tanda Daftar Gudang yang terbit		Persentase penerbitan TDG	58	62	65	67	58	60	65	67	
5	Persentase kinerja pupuk		Persentase kinerja realisasi pupuk	95	96	96	97	95	85	96	97	

Catatan : (*) realisasi capaian sampai dengan semester 1 tahun berjalan

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DKUKMP KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN KLATEN

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**20.710.800.286**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**20.710.800.286**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	*Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah*	*100 %*	**16.921.389.286**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah***	*100 %*	**16.921.389.286**		
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun*	*100 %*	**90.500.000**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun***	*100 %*	**90.500.000**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*6 Dokumen*	85.000.000	KAB. KLATEN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*6 Dokumen*	85.000.000	KAB. KLATEN	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	5.500.000	KAB. KLATEN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Dokumen*	5.500.000	KAB. KLATEN	
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	*100 %*	**12.878.389.286**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	*100 %*	**12.878.389.286**		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*132 orang/bulan*	12.842.389.286	KAB. KLATEN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*132 orang/bulan*	12.842.389.286	KAB. KLATEN	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	10.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 Dokumen*	10.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun*	*12 Dokumen*	20.000.000	KAB. KLATEN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang*	*12 Dokumen*	20.000.000	KAB. KLATEN	
4	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*2 Dokumen*	4.000.000		Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*2 Dokumen*	4.000.000		
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*2 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*2 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	
c	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	*100 %*	**5.000.000**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasi**	*100 %*	**5.000.000**		
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*24 Dokumen*	3.000.000	KAB. KLATEN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*24 Dokumen*	3.000.000	KAB. KLATEN	
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 laporan*	2.000.000	KAB. KLATEN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*1 laporan*	2.000.000	KAB. KLATEN	
d	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi**	*100 %*	**10.000.000**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah yang teradministrasi**	*100 %*	**10.000.000**		
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*2 Dokumen*	1.000.000	KAB. KLATEN	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*2 Dokumen*	1.000.000	KAB. KLATEN	
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 laporan*	4.000.000	KAB. KLATEN	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah*	*1 laporan*	4.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12 Dokumen*	5.000.000	KAB. KLATEN	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	*12 Dokumen*	5.000.000	KAB. KLATEN	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
e	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	*100 %*	**14.000.000**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu**	*100 %*	**14.000.000**		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	*12 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*12 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*12 Dokumen*	2.000.000	KAB. KLATEN	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	10.000.000	KAB. KLATEN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*100 Orang*	10.000.000	KAB. KLATEN	
f	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	*100 %*	**380.000.000**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	*100 %*	**380.000.000**		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*12 unit*	50.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*12 unit*	50.000.000	KAB. KLATEN	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*57 unit*	20.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*57 unit*	20.000.000	KAB. KLATEN	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*1 unit*	5.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*1 unit*	5.000.000	KAB. KLATEN	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*10 eksemplar*	100.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*10 eksemplar*	100.000.000	KAB. KLATEN	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*2 eksemplar*	5.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*2 eksemplar*	5.000.000	KAB. KLATEN	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*100 Kali*	50.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*100 Kali*	50.000.000	KAB. KLATEN	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*90 kali*	150.000.000	KAB. KLATEN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*90 kali*	150.000.000	KAB. KLATEN	
g	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	*100 %*	**55.000.000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	*100 %*	**55.000.000**		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*1 unit*	35.000.000	KAB. KLATEN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*1 unit*	35.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*40 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*40 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*5 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*5 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	
h	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	*100 %*	**3.258.500.000**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	*100 %*	**3.258.500.000**		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*500 eksemplar*	3.500.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*500 eksemplar*	3.500.000	KAB. KLATEN	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Bulan*	250.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 Bulan*	250.000.000	KAB. KLATEN	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*4 laporan*	10.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*4 laporan*	10.000.000	KAB. KLATEN	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 laporan*	2.995.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 laporan*	2.995.000.000	KAB. KLATEN	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
i	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	*100 %*	**230.000.000**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	*100 %*	**230.000.000**		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56 unit*	100.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*56 unit*	100.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	*10 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	*10 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*1 unit*	100.000.000	KAB. KLATEN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*1 unit*	100.000.000	KAB. KLATEN	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*38 unit*	20.000.000	KAB. KLATEN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*38 unit*	20.000.000	KAB. KLATEN	
II	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	*Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi* *Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi*	*23.93 %* *8.80 %*	**35.000.000**		**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	*Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi* *Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi*	*23.93 %* *8.80 %*	**35.000.000**		
a	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	*23.93 %*	**15.000.000**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	*23.93 %*	**15.000.000**		
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*5 unit*	15.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*5 unit*	15.000.000	KAB. KLATEN	
b	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	*8.80 %*	**20.000.000**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi**	*8.80 %*	**20.000.000**		
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*5 Koperasi*	20.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*5 Koperasi*	20.000.000	KAB. KLATEN	
III	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	*Persentase koperasi aktif* *Persentase koperasi yang patuh*	*69.50 %* *24.83 %*	**60.000.000**		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	*Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh*	*69.50 %* *24.83 %*	**60.000.000**		
a	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terperiksa dan terawasi*	*100 %*	**60.000.000**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	*Persentase Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang terperiksa dan terawasi*	*100 %*	**60.000.000**		
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*100 Orang*	40.000.000	KAB. KLATEN	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	*100 Orang*	40.000.000	KAB. KLATEN	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	*100 koperasi*	20.000.000	KAB. KLATEN	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	*100 koperasi*	20.000.000	KAB. KLATEN	
IV	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	*Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya*	*14.75 %*	**40.000.000**		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	*Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya*	*14.75 %*	**40.000.000**		
a	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	*14.75 %*	**40.000.000**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	*14.75 %*	**40.000.000**		
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	*100 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	*100 unit*	10.000.000	KAB. KLATEN	
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	*1,00 unit*	30.000.000	KAB. KLATEN	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	*1,00 unit*	30.000.000	KAB. KLATEN	
V	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan***	*30.20 %*	**759.411.000**		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan***	*30.20 %*	**759.411.000**		
a	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengurus/Manajer Koperasi yang terlatih***	*2 Orang*	**759.411.000**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengurus/Manajer Koperasi yang terlatih***	*2 Orang*	**759.411.000**		
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian*	*100 Orang*	759.411.000	KAB. KLATEN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian*	*100 Orang*	759.411.000	KAB. KLATEN	
VI	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	*Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan*	*18.20 %*	**15.000.000**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	*Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan*	*18.20 %*	**15.000.000**		
a	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase Koperasi yang terbina dan terlindungi*	*18.20 %*	**15.000.000**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*Persentase Koperasi yang terbina dan terlindungi*	*18.20 %*	**15.000.000**		
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*130 unit*	15.000.000	KAB. KLATEN	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*130 unit*	15.000.000	KAB. KLATEN	
VII	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	*Pertumbuhan usaha mikro* *Persentase UMKM yang melakukan kemitraan*	*0.13 %* *0.30 %*	**2.830.000.000**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	*Pertumbuhan usaha mikro* *Persentase UMKM yang melakukan kemitraan*	*0.13 %* *0.30 %*	**2.830.000.000**		
a	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Persentase UMKM yang terbina*	*340 %*	**2.830.000.000**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	*Persentase UMKM yang terbina*	*340 %*	**2.830.000.000**		
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan*	*10000 UKM*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan*	*10000 UKM*	10.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*	*50 UKM*	10.000.000		Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*	*50 UKM*	10.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan*	*160 UKM*	10.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan*	*160 UKM*	10.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*	*180 Orang*	2.800.000.000	KAB. KLATEN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro*	*180 Orang*	2.800.000.000	KAB. KLATEN	
VIII	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan***	*3.30 %*	**50.000.000**		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan***	*3.30 %*	**50.000.000**		
a	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	***Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi / Pendampingan***	*3 %*	**50.000.000**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	***Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi / Pendampingan***	*3 %*	**50.000.000**		
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	*300 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	*300 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**642.878.714**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**3.442.878.714**		
IX	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan***	*83 %*	**34.703.000**		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan***	*83 %*	**34.703.000**		
a	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	***Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit***	*100 izin*	**14.703.000**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	***Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang terbit***	*100 izin*	**14.703.000**		
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*100 izin*	14.703.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*100 izin*	14.703.000	KAB. KLATEN	
b	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	***prosentase Tanda Daftar Gudang yang terbit***	*62 %*	**5.000.000**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	***prosentase Tanda Daftar Gudang yang terbit***	*62 %*	**5.000.000**		
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*jumlah fasiilitasi penerbitan tanda daftar gudang*	*5 kali*	5.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*jumlah fasiilitasi penerbitan tanda daftar gudang*	*5 kali*	5.000.000	KAB. KLATEN	
c	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	***Jumlah surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit***	*2 STPW*	**10.000.000**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	***Jumlah surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit***	*2 STPW*	**10.000.000**		
1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	*1 Orang*	5.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	*1 Orang*	5.000.000	KAB. KLATEN	
2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	*1 Orang*	5.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	*1 Orang*	5.000.000	KAB. KLATEN	
d	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***prosentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkendali***	*2 %*	**5.000.000**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***prosentase Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terkendali***	*2 %*	**5.000.000**		
1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)*	*2 %*	5.000.000	KAB. KLATEN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)*	*2 %*	5.000.000	KAB. KLATEN	
X	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi*** ***Persentase PKL yang terbina*** ***Jumlah pendapatan retribusi pasar***	*42 %* *43.80 %* *4650000000 Rp*	**200.000.000**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi*** ***Persentase PKL yang terbina*** ***Jumlah pendapatan retribusi pasar***	*42 %* *43.80 %* *4650000000 Rp*	**3.000.000.000**		
a	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	***Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola***	*21 unit*	**100.000.000**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	***Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola***	*21 unit*	**2.900.000.000**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	*1 unit*	50.000.000	KAB. KLATEN	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	*1 unit*	2.850.000.000	KAB. KLATEN	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*51 unit*	50.000.000	KAB. KLATEN	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*51 unit*	50.000.000	KAB. KLATEN	
b	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	***Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang terbina***	*1250 orang*	**100.000.000**		**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	***Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang terbina***	*1250 orang*	**100.000.000**		
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*250 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*250 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*1000 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*1000 Orang*	50.000.000	KAB. KLATEN	
XI	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase pasar yang diawasi Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase Kinerja Pupuk***	*100 % 6 % 96 %*	**118.643.000**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase pasar yang diawasi Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase Kinerja Pupuk***	*100 % 6 % 96 %*	**118.643.000**		
a	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)***	*6 %*	**98.643.000**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)***	*6 %*	**98.643.000**		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*350 Orang*	98.643.000	KAB. KLATEN	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*350 Orang*	98.643.000	KAB. KLATEN	
b	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	***Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yg terkendali***	*18 Jenis*	**10.000.000**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	***Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting yg terkendali***	*18 Jenis*	**10.000.000**		
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*5 Kali*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*5 Kali*	10.000.000	KAB. KLATEN	
c	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***prosentase Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi***	*96 %*	**10.000.000**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***prosentase Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang terawasi***	*96 %*	**10.000.000**		
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*5 Jenis*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*5 Jenis*	10.000.000	KAB. KLATEN	
XII	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Jumlah komoditas yang mampu ekspor***	*2 jenis*	**170.000.000**		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Jumlah komoditas yang mampu ekspor***	*2 jenis*	**170.000.000**		
a	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah event pameran yang diselenggarakan***	*3 event*	**170.000.000**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah event pameran yang diselenggarakan***	*3 event*	**170.000.000**		
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	*1 Jenis*	50.000.000	KAB. KLATEN	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	*1 Jenis*	50.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	*3 Kali*	30.000.000	KAB. KLATEN	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	*3 Kali*	30.000.000	KAB. KLATEN	
3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	*1 Pelaku Usaha*	30.000.000	KAB. KLATEN	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	*1 Pelaku Usaha*	30.000.000	KAB. KLATEN	
4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	*1 Pelaku Usaha*	30.000.000	KAB. KLATEN	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	*1 Pelaku Usaha*	30.000.000	KAB. KLATEN	
5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	*3 produk*	10.000.000	KAB. KLATEN	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	*3 produk*	10.000.000	KAB. KLATEN	
6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	*15 Pelaku Usaha*	20.000.000	KAB. KLATEN	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	*15 Pelaku Usaha*	20.000.000	KAB. KLATEN	
XIII	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang***	*70 %*	**21.000.000**		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang***	*70 %*	**21.000.000**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Catatan Penting
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
a	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	***Jumlah UTTP metrologi terlaksana***	*8500 Objek*	**21.000.000**		**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	***Jumlah UTTP metrologi terlaksana***	*8500 Objek*	**21.000.000**		
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	*260 kali*	10.000.000	KAB. KLATEN	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	*260 kali*	10.000.000	KAB. KLATEN	
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	*1 kegiatan*	6.000.000	KAB. KLATEN	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	*1 kegiatan*	6.000.000	KAB. KLATEN	
3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	*1 unit*	5.000.000	KAB. KLATEN	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	*1 unit*	5.000.000	KAB. KLATEN	
XIV	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri***	*5 Orang*	**98.532.714**		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri***	*5 Orang*	**98.532.714**		
a	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	***Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	*5 Kali*	**98.532.714**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	***Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri***	*5 Kali*	**98.532.714**		
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*3 Kali*	90.000.000	KAB. KLATEN	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*3 Kali*	90.000.000	KAB. KLATEN	
2	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Perdagangan	*1 dokumen*	8.532.714	KAB. KLATEN	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	*1 dokumen*	8.532.714	KAB. KLATEN	
JUMLAH				**21.353.679.000**		**JUMLAH**			**24.153.679.000**		

Klaten, 11 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLATEN

PEMERINTAH KABUPATEN DKUKMP KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

OPD : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kabupaten Klaten	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih	180 ukm/orang	Pelatihan yang dilaksanakan untuk pelatihan e commerce, pelatihan packaging dan pelatihan batik warna alam
2	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Klaten	Jumlah Pengurus/manager Koperasi yang terlatih	100 orang pengurus/ manager koperasi	
3	Penyediaan Sarana disribusi perdagangan	Kabupaten Klaten	Jumlah pasar yang terevitalisasi	1 Unit	

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klaten

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

tabel 3.1

KESELARASAN ANTARA PRIORITAS NASIONAL, PROPINSI DAN KABUPATEN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Urusan Koperasi UKM			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaaan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja Pegawai	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Mebel	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan mebel	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
		Peningkatan Ekonomi Lokal	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
		Peningkatan Ekonomi Lokal	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
		Peningkatan Ekonomi Lokal	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	URUSAN PERDAGANGAN			
9	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Penyidikan Metrologi Legal	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Ekonomi Lokal**	**Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pameran Dagang Nasional	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pameran Dagang Lokal	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS NASIONAL
1	2	3	4	5
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Peningkatan Ekonomi Lokal	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DKUKMP KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**20.710.800.286**					**22.922.237.000**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**16.921.389.286**					**20.916.420.000**
2	**17**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**90.500.000**					**50.000.000**
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	6 dokumen	100 %	85.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	40.000.000
2	17	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	5 laporan	100 %	5.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
2	**17**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12.878.389.286**					**14.836.920.000**
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	132 orang/bu	la1n00 %	12.842.389.286	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	14.609.920.000
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	190.000.000
2	17	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Dokumen	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	30.000.000
2	17	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Dokumen	100 %	4.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	2.000.000
2	17	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terbayarnya gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Dokumen	100 %	2.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
2	**17**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5.000.000**					**6.000.000**
2	17	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Teradministrasinya barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Laporan	100 %	3.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	3.000.000
2	17	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Teradministrasinya barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Laporan	100 %	2.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	3.000.000
2	**17**	**01**	**2,04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**10.000.000**					**9.000.000**
2	17	01	2,04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Teradministrasinya pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Dokumen	100 %	1.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	2.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2,04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Teradministrasinya pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Laporan	100 %	4.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	2.000.000
2	17	01	2,04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Teradministrasinya pendapatan retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Dokumen	100 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**14.000.000**					**154.500.000**
2	17	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terselesaikannya administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Dokumen	100 %	2.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	2.000.000
2	17	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselesaikannya administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Dokumen	100 %	2.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	2.500.000
2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Terselesaikannya administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	20 Oang	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	150.000.000
2	**17**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**380.000.000**					**945.000.000**
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Paket	100 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	75.000.000
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Paket	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	250.000.000
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Paket	100 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Paket	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	150.000.000
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	2 Dokumen	100 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
2	17	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	20 Laporan	100 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	150.000.000
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00 %	60 Laporan	100 %	150.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	300.000.000
2	**17**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**55.000.000**					**550.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Unit	100 %	35.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	350.000.000
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Paket	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	50.000.000
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Unit	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	150.000.000
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3.258.500.000**					**3.665.000.000**
2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Laporan	100 %	3.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	5.000.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Laporan	100 %	250.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	450.000.000
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	4 Laporan	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	10.000.000
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	12 Laporan	100 %	2.995.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	3.200.000.000
2	**17**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**230.000.000**					**700.000.000**
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	56 Unit	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	350.000.000
2	17	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	10 Unit	100 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	20.000.000
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	1 Unit	100 %	100.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	300.000.000
2	17	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	100,00 %	20 Unit	100 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	30.000.000
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**35.000.000**					**59.286.000**
2	**17**	**02**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**15.000.000**					**29.286.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terekomendasinya permohonan izin usaha simpan pinjam	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.30 % 26.82 %	5 Unit Usaha	26,82 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	9.30 % 26.82 %	29.286.000
2	**17**	**02**	**2,02**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**20.000.000**					**30.000.000**
2	17	02	2,02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terekomendasinya permohonan izin pembukaan Kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.30 % 26.82 %	5 unit usaha	9,3 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	9.30 % 26.82 %	30.000.000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**60.000.000**					**197.620.000**
2	**17**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**60.000.000**					**197.620.000**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terperiksanya dan terawasinya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten atau kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	71.20 % 25.90 %	100 Unit Usaha	14,29 %	40.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh	71.20 % 25.90 %	147.620.000
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenagan Kabupaten/Kota Kinerja	Terperiksanya dan terawasinya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten atau kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	71.20 % 25.90 %	100 Unit Usaha	14,29 %	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase koperasi aktif Persentase koperasi yang patuh	71.20 % 25.90 %	50.000.000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**								**40.000.000**					**88.929.000**
2	**17**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**40.000.000**					**88.929.000**
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 wilayah kabupaten/kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	17,00 %	100 Unit Usaha	17 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	17,00 %	30.000.000
2	17	04	2,01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 wilayah kabupaten/kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	17,00 %	50 Unit Usaha	17 %	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	17,00 %	58.929.000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**759.411.000**					**247.004.000**
2	**17**	**05**	**2,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**759.411.000**					**247.004.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Terlatihnya Pengurus/manager koperasi	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	31,60 %	100 orang	100 orang	759.411.000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase pengurus/pengawas/ pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	31,60 %	247.004.000
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**								**15.000.000**					**29.643.000**
2	**17**	**06**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**15.000.000**					**29.643.000**
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan perlindungan koperasi	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	18,90 %	135 Unit Usaha	18,9 %	15.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	18,90 %	29.643.000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**								**2.830.000.000**					**1.037.501.000**
2	**17**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**2.830.000.000**					**1.037.501.000**
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah Unit usaha produktif, bernilai tambah, memiliki akes pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan managemen, standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi kewenagan Kab. Kota	Terbinanya UMKM	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	0.32 % 0.14 %	55000 Unit Usaha	0,78 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	0.32 % 0.14 %	100.000.000
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Terbinanya UMKM	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	0.32 % 0.14 %	50 Unit Usaha	0,78 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	0.32 % 0.14 %	200.000.000
2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Terbinanya UMKM	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	0.32 % 0.14 %	160 Unit Usaha	0,78 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	0.32 % 0.14 %	250.000.000
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Terbinanya UMKM	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	0.32 % 0.14 %	180 Unit Usaha	0,78 %	2.800.000.000	DAK Non Fisik-PK2UMK Dana Insentif Daerah		Persentase UMKM yang melakukan kemitraan Pertumbuhan usaha mikro	0.32 % 0.14 %	487.501.000
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**50.000.000**					**345.834.000**
2	**17**	**08**	**2,01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**50.000.000**					**345.834.000**
2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasi dan terdampinginya usaha mikro	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	3,50 %	300 Unit Usaha	3,5 %	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ Pendampingan	3,50 %	345.834.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**3.442.878.714**					**8.724.885.000**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**								**34.703.000**					**69.167.000**
3	**30**	**02**	**2,01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**14.703.000**					**29.167.000**
3	30	02	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terbitnya izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	90 %	35 Dokumen	210 izin	14.703.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	29.167.000
3	**30**	**02**	**2,02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**								**5.000.000**					**10.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	02	2,02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Terbitnya tanda daftar gudang	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	90 %	5 Dokumen	65 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	10.000.000
3	**30**	**02**	**2,03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**								**10.000.000**					**20.000.000**
3	30	02	2,03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terbitnya izin surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri.	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	90 %	2 Dokumen	2 STPW	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	10.000.000
3	30	02	2,03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Terbitnya izin surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri.	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	90 %	2 Dokumen	2 STPW	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	10.000.000
3	**30**	**02**	**2,06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**5.000.000**					**10.000.000**
3	30	02	2,06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terkendalinya fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat kabupaten/kota	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	90 %	5 Laporan	5 %	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	90 %	10.000.000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**								**3.000.000.000**					**6.373.216.000**
3	**30**	**03**	**2,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**2.900.000.000**					**6.073.216.000**
3	30	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang terbina	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagngan	Kab. Klaten, Klaten Tengah, Klaten	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	1 Unit	22 unit	2.850.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	5.923.216.000
3	30	03	2,01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang terbina	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagngan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	51 unit	22 unit	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	150.000.000
3	**30**	**03**	**2,02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**100.000.000**					**300.000.000**
3	30	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang terbina	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	12 Dokumen	1250 orang	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	150.000.000
3	30	03	2,02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang terbina	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbinanya pengelola sarana distribusi perdagangan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	12 Dokumen	1250 orang	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pendapatan retribusi pasar Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi Persentase PKL yang	4700000000 Rp 46.00 % 51.40 %	150.000.000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**118.643.000**					**335.953.000**
3	**30**	**04**	**2,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**98.643.000**					**245.953.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang diawasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terjaganya kestabilan lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 Bapokting)	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.00 % 6.00 % 100.00 %	12 Laporan	6 %	98.643.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang	96.00 % 6.00 % 100.00 %	245.953.000
3	**30**	**04**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**10.000.000**					**75.000.000**
3	30	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang diawasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.00 % 6.00 % 100.00 %	1 Laporan	18 jenis	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang	96.00 % 6.00 % 100.00 %	75.000.000
3	**30**	**04**	**2,03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**10.000.000**					**15.000.000**
3	30	04	2,03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang diawasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Terawasinya pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96.00 % 6.00 % 100.00 %	5 Laporan	96 %	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Kinerja Pupuk Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) Persentase pasar yang	96.00 % 6.00 % 100.00 %	15.000.000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**								**170.000.000**					**681.786.000**
3	**30**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**170.000.000**					**681.786.000**
3	30	05	2,01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	2 Pelaku Usaha	5 event	50.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	60.000.000
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	3 Pelaku Usaha	5 event	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	241.786.000
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	1 Pelaku Usaha	5 event	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	140.000.000
3	30	05	2,01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	1 Pelaku Usaha	5 event	30.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	100.000.000
3	30	05	2,01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	3 Produk	5 event	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	80.000.000
3	30	05	2,01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah komoditas yang mampu ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Terselenggaranya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Jenis	15 Pelaku Usaha	5 event	20.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah komoditas yang mampu ekspor	2 Jenis	60.000.000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**21.000.000**					**276.667.000**
3	**30**	**06**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**21.000.000**					**276.667.000**
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan Alat Perlengkapan di Tera ulang	Terlaksananya UTTP metrologi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	25 Unit	8500 objek	10.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	70 %	246.667.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	30	06	2,01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Terlaksananya UTTP metrologi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	20 Orang	8500 objek	6.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	70 %	20.000.000
3	30	06	2,01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya UTTP metrologi	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Unit	8500 objek	5.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	70 %	10.000.000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**98.532.714**					**988.096.000**
3	**30**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**98.532.714**					**988.096.000**
3	30	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksanya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.00 Orang	6 UMKM	7 kali	90.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	14.00 Orang	688.096.000
3	30	07	2,01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksanya event pameran	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.00 Orang	1 Dokumen	7 kali	8.532.714	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	14.00 Orang	300.000.000
												TOTAL	**24.153.679.000**					**31.647.122.000**

Klaten, 11 Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klaten

PEMERINTAH KABUPATEN DKUKMP KLATEN

ANANG WIDJATMOKO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680809 199703 1 003

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI		1
BAB I	**PENDAHULUAN .....**	2
	1.1. Latar Belakang..... …….....	2
	1.2. Landasan Hukum.....…….	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. .....**	5
	2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	5
	2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	6
	2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	12
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	15
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....**	16
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	16
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	18
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....**	25
BAB V	**PENUTUP.....**	25
LAMPIRAN		

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2021-2026 tahun terakhir dari RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan arah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kewajiban daerah, Perubahan Rencana Kerjabeserta indikasi pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan yaitu : Teknokrat, Top-down, Botton-up, Partisipatif dan Politis. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunanRencana Kerja bersifat srategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada kebutuhan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dan sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Rencana KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun atas dasar :

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Nomor 137,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tahun 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 2007 No105;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52,tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan pandemi Corona Virus Diseae 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 131,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
25. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Republik Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 110);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan ;
2. Untuk menciptakan keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan terkait;
3. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN.

Memuat latar belakang penyusunan Renja, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3 Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupunseandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan target kinerja Renstra SKPD.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya.

Hasil Kinerja program/kegiatan tahun 2022sampai dengan TW IV telah mencapai tingkat realisasi fisik mencapai 94% realisasi pelaksanaan keuangan sebesar 94%. Secara keseluruhan hasil kinerja yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten adalah baik.

Sedangkan Kinerja Program/Kegiatan untuk Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 telah mencapai tingkat realisasi fisik sebesar 90% sedangkan Realisasi pencapaian pelaksanaan keuangan dengan nilai 90%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya Covid-19

Dari uraian diatas dapat disajikan pada Lampiran III .hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dan 2021, Prakiraan capaian tahun berjalan n-2 (Tahun 2021) dan n-1 (Tahun 2022)

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Karena adanya wabah covid-19 adalah penurunan target pada Rentra Dan untuk mengatasi hal tersebut maka akan dilakukan upaya untuk penambahan terget kinerja pada tahun yang akan datang untuk mencukupi target Renstra yang telah ditetapkan. . Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Lebih teliti dalam pelaksanaan perencanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan pada tahun sebelumnya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Program dan Kegiatan Tahun 2023, terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaiannya antara lain :

1. **Ketidaksesuaian sasaran Program/Kegiatan dengan sasaran RPJMD dan Renstra DPMPTSP**

   a. Kendala dan Hambatan :

   Dalam kegiatan penyusunan anggaran di DPMPTSP Kabupaten Klaten ada beberapa program/kegiatan yang sasarannya tidak sesuai dengan sasaran program/kegiatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Klaten maupun dengan sasaran stratejik yang ada dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2021– 2026, hal ini mungkin dikarenakan ketidakmengertian bidang dalam memahami RPJMD Kabupaten Klaten dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026, atau mungkin juga disebabkan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai disesuaikan dengan program/kegiatan di tingkat pusat atau sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kondisi terkini yang berkembang dan mempengaruhi kegiatan yang ada di DPMPTSP.

   b. Sarana dan Prasarana

   Kendala dan Hambatan :

   Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta untuk meningkatkan kinerja aparat Dinas, tentunya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran menjadi suatu hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut.Terdapat beberapa sarana dan prasarana perkantoran yang saat ini dirasakan Dinas belum dapat mendukung dan mengurangi (walaupun tidak sampai pada tahapan menghambat) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Dinas.

2. Sumber Daya Aparatur

Kendala dan Hambatan :

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan serta untuk meningkatkan kinerja Dinas, tentunya selain fasilitas sarana dan prasarana perkantoran hal penting lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah adanya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam profesionalisme, produktivitas dan kompetensi. Salah satu hal yang dirasakan sangat kurang adalah pada masalah kompetensi, hal ini dapat dilihat dengan minimnya sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Klaten yang telah memilki sertifikat pengadaan barang dan jasa.Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Dinasyang saat ini dirasakan Dinas belum dapat mendukung dan mengurangi (walaupun tidak sampai pada tahapan menghambat) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Dinas.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten 1 tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah investor untuk PMDN dapat terealisasi sebanyak 1267 investor.
   Jumlah investor untuk PMA dapat terealisasi sebanyak 3 investor.
2. Nilai investasi PMDN dapat teralisasi:Rp. 1.009.425.875.263
   Nilai investasi PMA dapat terealisasi: 20.752.358 US$
3. Prosentase kenaikan nilai investasi PMDN dapat terealisasi -27%.
   Prosentase kenaikan nilai investasi PMA dapat terealisasi 5 %.
4. Presentase realisasi LOI : 0.29 %
5. Persentase pengendalian pelaksanaan PM 80 perusahaan
6. Jumlah pelayanan perizinan 4642 izin
7. Jumlah laporan data dan informasi PM 64 laporan
8. Nilai Kepuasan Masyarakat dapat terealisasi mencapai 781.75%.

Bahwa pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai 100% karena ditahun 2022 dijadikan tolok ukur untuk proyeksi tahun berikutnya, sehingga realisasi tahun 2022 digunakan sebagai target tahun 2023.

Sedangkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah investor untuk PMDN dapat terealisasi sebanyak 1267 investor.
   Jumlah investor untuk PMA dapat terealisasi sebanyak 3 investor.
2. Nilai investasi PMDN dapat teralisasi:Rp. 1.009425.875.263

Nilai investasi PMA dapat terealisasi: 4.860.000 US$

3. Prosentase kenaikan nilai investasi PMDN dapat terealisasi -27%.
   Prosentase kenaikan nilai investasi PMA dapat terealisasi 5%.
4. Presentase realisasi LOI 0.29%
5. Persentase pengendalian pelaksanaan PM 20 perusahaan
6. Jumlah pelayanan perizinan
7. Jumlah laporan data dan informasi PM
8. Nilai Kepuasan Masyarakat dapat terealisasi mencapai 78.3%.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Kuantitas dan Kompetensi SDM belum optimal
2. Data peluang investasi masih belum upto date
3. SOP dan Standar Pelayanan investasi up to date
4. Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal.
5. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya.
6. Kurangnya komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan
7. Sikap dan partisipasi dari masyarakat dalam mengurus perizinan
8. Kurang optimalnya koordinasi dengan satuan kerja teknis
9. Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan sistem di DPMPTSP
10. Pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal terhambat karena lokasi usaha tidak sesuai dengan Tata Ruang
11. Kewajiban membuat dokumen lingkungan yang memerlukan waktu yang lama.
12. Masih belum semua jenis pelayanan mengguanakan sistem on line.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten pada tahun 2023 sebagian besar ditujukan pada peningkatkan dan pengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta peningkatkan kapasitas pelayanan publik.Dengan sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat dan pemberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas.

Peningkatkan dan pengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta peningkatkan kapasitas pelayanan publik. Dengan kedua tujuan tersebut maka dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Klaten sehingga akan meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Klaten yang merupakan salah

satu komponen dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Pertumbuhan investasi yang besar diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Klaten. Pengaruh langsung yang dapat dirasakan dari adanya investasi di Kabupaten Klaten adalah penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi realisasi investasi diharapkan juga semakin tinggi penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten. Pencapaian 6 (enam) kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 dengan tingkat capaian 100 %, hal tersebut menunjukkan keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintah Kabupaten Klaten di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, sehingga pada tahun-tahun yang akan datang perlu lebih ditingkatkan dengan cara melakukan pengendalian dan pengawasan secara efektif dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Klaten khususnya pembangunan di sektor penanaman modal.

Kendala , Hambatan pencapaian Kinerja Sasaran Secara umum tidak terdapat permasalahan yang sangat mendasar dalam pencapaian kinerja.Seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.Namun kami menyadari bahwa segala upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik sekecil apapun selalu mendapatkan hambatan dan pelaksanaannya tidak sesempurna sesuai dengan harapan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan Awal RKPD dilakukan terhadap jenis program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif, setelah diadakan analisis kebutuhan perlu adanya penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

Hasil dari proses review terhadap rancangan awal RKPD ada beberapa perbedaan, walaupun perbedaan ini relatif kecil hanya pada lokasi,indikator dan target capaian terhadap kegiatan .

Pada tahun anggaran 2022, dengan adanya wabah covid-19,maka banyak kegiatan yang dirasionalisasi ,termasuk anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Klaten,sehingga mempengaruhi target pada Renstra.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan terkait dengam pelayanan perizinan adalah pelayanan yang terpadu dalam satu pintu, dengan pelaksanaan perizinan secara on line sehingg memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, selain itu terkait penertiban izin usaha yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya terdapat ketidaksesuaian dengan izin yang telah diterbitkan atau adanya usaha yang sudah berizin yang mengganggu lingkungan sekitar, baik dalam ketertiban umum maupun pencemaran lingkungan, Untuk itu perlu dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan perangkat daerah lain yang tergabung dalam Tim Teknis Perizinan. Usulan tersebut disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Vol	Catatan
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Pengembangan Sistem	Kab.Klaten	Terwujudnya tanda tangan secara elektronik (Digital Signature)	1 keg	UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Dari usulan tersebut diatas, besaran/volume kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan anggaran yang diterima karena pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai target diperlukan adanya dukungan anggaran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementrian Investasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020- 2024 yaitu sebagai berikut: BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementrian Investasi/BKPM adalah : BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sasaran Strategi yang ingin dicapai Kementrian Investasi/BKPM dalam periode 2020-2024 adalah :

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran

pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020- 2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;

2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan

3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran ke 1,2 dan 3 yaitu : (1).Meningkatnya realisasi penanaman modal. (2). Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk menjabarkan sesuatu yangingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi issu-issu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis stratejik.Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkritdan logis yang ingin dicapai di masa datang. Dengan tujuan yang telahditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatanakan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansipemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurunwaktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.Penetapan tujuan dan sasaran

organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi suatu instansi.

3.2.1. Telaahan terhadap Renstra DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten ,suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur Visi : Maju merupakan perwujudan kondisi masayarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke 3 yaitu**: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan**. Misi ini memiliki tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 5 indikator sasarannya 1) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; 2) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan; 4) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan 5) Persentase peningkatan investasi PMDM dan PMA.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023

A. TUJUAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkanhasil akhir yang diinginkan pada jangka waktu tertentu.Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten. Maka tujuan Dinas Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan adalah**:**

- Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
- Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka di tetapkan strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan DPMPTSP Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Mereview Rencana Umum Penanaman Modal
2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar lembaga dalam mengimplementasikan Rencana Umum Penanaman Modal dalam rangka pengembangan potensi daerah.
3. Meningkatkan dan pemantapkan iklim penanaman modal yang fokus pada kemudahan pelayanan perizinan,kepastian hukum dan kepastian lahan usaha.
4. Melaksanakan pengendalian penanaman modal dan perizinan.
5. Mengembangkan strategi promosi yang terarah, focus dan inovatif.
6. Meningkatkan kegiatan promosi investasi berskala Nasional.
7. Menyusun profil investasi dan peluang investasi.
8. Menyusun Standar Pelayanan
9. Penyempurnaan Standar Pelayanan
10. Mengembangkan dan pemantapan pelayanan perizinan on line.
11. Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pelayanan perizinan

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal danPerizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dari masing – masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapatd icapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja impact‟ yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan indikator yang dipicu oleh sasaran spesifiksebagai leading indicator .Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligusmenjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu SatuPintu Kabupaten Klaten.Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah

- Meningkat pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.
- Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas.

Hal ini sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan DPMPTSP untuk Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu kepada dan kegiatan yang ada dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026.

Adapun rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2023 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Klaten, sebagaimana dijabarkan dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam jurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
3. Di dalam Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini dimasukan beberapa Kegiatan Indikatif baru ke dalam program penunjang sebagai bentuk antisipasi terhadap beberapa kebijakan pimpinan yang diselaraskan dengan perubahan nomenklatur yang dimungkinkan munculnya berbagai kebutuhan penunjang yang harus disiapkan terutama dalam system perencanaan.

Dalam rangka mencapai tujuan ***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat*** dan ***memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas.***dan sasaran"***Meningkat dan berkembangnya produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor perindustrian, koperasi, UMKM, dan penanaman modal*** dan ***meningkatnya pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.***Dimana di dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu Satu Pintu tahun 2023 terdapat 5 (lima) program yang terdiridari 4 (empat) Program Utama dan 1(satu) program Penunjang.Maka disusun prioritas program dankegiatan dalam Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4. Penyediaan peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota

III. Program Promosi Penanaman Modal

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota

1. Penyusunan Strategi promosi Penanaman Modal
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan

V. Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

B. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah kabupaten/Kota

1. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusahan Terintegrasi secara elektronik

BABV
PENUTUP

A. CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023, Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi pada Tahun 2022 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Rencana KerjaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program pembangunan didalam RENJA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kabupaten Klaten 2021-2026, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifias, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. RENJA DPMPTSP Kabupaten Klaten tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2022 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
4. Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Klaten dan Renstra Dinas).
6. RENJA DPMPTSP Kabupaten Klaten Tahun 2023, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui

pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten,

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN CAWAS TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 2023.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Rancangan ini dibuat semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Cawas. Juga sebagai bahan penyempurnaan RKPD untuk menentukan Program dan Kegiatan serta Pengalokasian Anggaran Tahun 2023.

Klaten, Juli 2022.

CAMAT CAWAS

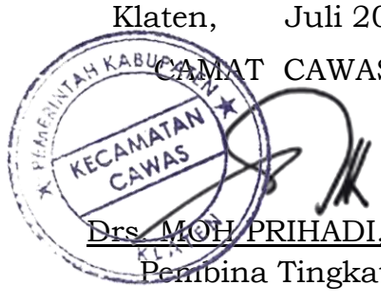

Drs. MOH. PRIHADI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720601 199203 1 005

DAFTAR ISI

		Halaman
Cover		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	8
1.4.	Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021)	10
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	34
BAB V	PENUTUP.....	35
5.1.	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	35
5.2	Kaidah Pelaksanaan	35
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah Kecamatan Cawas mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan juga berperan sebagai sarana peningkatan kinerja di Kantor Kecamatan Cawas. Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Cawas memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Proses dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2023 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ditempuh dengan memperhatikan 5 aspek pendekatan perencanaan, yaitu:

teknokratik, partisipatif, politis dan atas – bawah bawah – atas dengan berorientasi secara holistik, tematik, integratif dan spasial. Aspek pendekatan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Tahun 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Cawas Tahun 2023 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi mulai tahun 2020 adalah munculnya wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan daerah di tahun 2023 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2023, disusun melalui 6 tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
50. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
51. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Cawas Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Cawas.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamnatan Cawas adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Kecamatan Cawas telah mengadakan evaluasi dari Pelaksanaan kinerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja Tahun berjalan (2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :
   Program/Kegiatan di Tahun 2021 hampir semua dapat dilaksankan sesuai target, kecuali untuk program Penyediaan gaji dan tunjangan ASN hanya terealisasi sebesar 83 % karena banyak staff yang purna tugas dan mutasi. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi keuangan sebesar 46,87 % yang telah mengalami Silva, namun untuk kegiatannya dapat terealisasi 100% , realisasi rendah karena pembangunan Kantor Kecamatan Cawas. Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD hanya mencapai 50,17 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 dan regulasi Perjalanan Dinas Luar Daerah. Realisasi Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban tidak maksimal dikarenakan anggaran untuk Pengendalian Penularan Covid 19 , tetapi diakhir tahun 2021 sudah mereda. Pada beberapa kegiatan yang berupa Sosialisasi Peraturan Bupati tidak maksimal karena kehadiran Anggota DPRD sebagai Narasumber berkurang dimana pokok bahasan sosialisasi sudah ada keterwakilan beberapa anggota DPRD yang hadir.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target :
   Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Apabila ada yang belum memenuhi target dikarena menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di Tingkat Kabupaten, dan adanya efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Realisasi capaian program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cawas

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Urusan									
		Bidang Urusan									
		7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		100%
		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		0	0	0	100%		100%
		7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4		0	0	0	4		
		7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2		0	0	0	2		

						7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	21		21	21	100%	21	21	
						7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas	12		12	12	100%	12		
						7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	2		0	0	0	2		
						7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi Perkantoran terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
							2. Persentase Sarana Prasarana Kantor terjaga baik								
						7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10		10	10	100%	10		
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	5		5	5	100%	5		
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	3		3	3	100%	3		
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2		2	2	100%	2		
						7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	350		300	300	100%	350		
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekwensi perjalanan	120		9	9	100%	120		
						7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana prasarana Pendukung gedung kantor terbeli	4		3	3	100%	4		

						Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200		1200	1200	100%	1200		
						7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	12		4	4	100%	12		
						7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL perkantoran	7		3	3	100%	7		
						7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	11		11	11	100%	11		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	4		0	0	0	4		
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	4		2	2	100%	4		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	100%		0	0	0%	100%		100%
						7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%		0	0	0	100%		100%
						7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2		0	0	0	2		
						PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		100%

						7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	20		1	1	100%	20		
						7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	20		7	7	100%	20		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		100%
						7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14		14	14	100%	14		
						7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	20		20	20	100%	20		
						7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20		20	20	100%	20		
						7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20		0	0	0	20		

						7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7		0	0	0	7		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	95%		**100%**	**95%**	95%	95%		95%
						7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara	14		7	7	100%	14		
						7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	7		7	7	100%	7		
						7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7		0	0	0	7		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95%		**100%**	**95%**	95%	95%		95%
							Persentase desa tertib administrasi	84%		100%	84%	84%	84%		84%
						7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%		100%
						7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20		20	20	100%	20		
						7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	20		20	20	100%	20		

						7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20		20	20	100%	20		
						7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20		20	0	0	20		
						7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20		20	0	0	0		
						7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20		20	0	0	20		
						7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20		20	0	0	20		
						7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	20		20	20	100%	20		
						7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	20		20	20	100%	20		

Klaten, Juli 2022

CAMAT CAWAS

Drs. MOH PRIHADI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720601 199203 1 005

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja :

Program/kegiatan hampir dapat memenuhi target yang direncanakan dan tidak ada program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan karena beberapa program dan kegiatan terlaksana 100% .

d. Faktor penyebab tidak tercapainya target :

Program/kegiatan di Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan program/kegiatan semakin meningkat, antara lain :

- Kita perlu bersyukur kejadian bencana di wilayah Kecamatan tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, sehingga bisa efisiensi anggaran untuk membantu warga masyarakat berdampak bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Adanya Regulasi dan Pergeseran Kebijakan, karena masih ada kegiatan yang jadwal maupun pelaksanaanya menyesuaikan dengan kegiatan dan jadwal waktu dari tingkat Kabupaten.
- Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, misalnya Telephon Kantor, Laptop, kendaraan dinas bagi pejabat struktural. dll.

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah: Target Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Perangkat Daerah, dikarenakan adanya program/kegiatan baru yang bersifat Top Down dari Tingkat Kabupaten yang belum masuk dalam Renstra Perangkat Daerah., ataupun adanya pergeseran kebijakan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut:

- Program/kegiatan difokuskan pada Indikator Utama (IKU).
- Program/kegiatan diutamakan pada kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cawas.
- Diadakan pengangkatan/penambahan THL untuk menambah tenaga demi lancarnya pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan Cawas sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja.

- Untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana kita adakan kerja lembur, penambahan tugas atau merangkap beban tugas orang lain serta meningkatkan kerjasama dari unsur pejabat, staf maupun THL. Juga mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Cawas sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Cawas telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan saat ini Kecamatan Cawas hanya bersifat membantu memberikan arahan dalam pengisian aplikasi SOS berbasis website terkait perijinan usaha oleh DPMPTSP Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Cawas.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Cawas telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, pelayanan Raskin, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan penanggulangan percepatan covid-19 di Desa-Desa melalui penyemprotan disinfektan secara bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cawas dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Cawas adalah Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Cawas sehingga :

   1. Terbatasnya ruang gerak personil Kecamatan Kebonarum karena bencana pandemic Covid-19 yang terkonfirmasi positif covid-19 tinggi, dimana diharuskan untuk tidak bertatap muka dan mengurangi kontak agar tidak terjadi kerumunan antar lembaga demi meminimalisir penyebaran virus covid-19. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya komunikasi yang terjalin.
   2. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
   3. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Cawas hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.

c. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Cawas sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya demi keamanan perlu diadakan tempat parkir dan tralis pada jendela Kantor Kecamatan Cawas,peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Cawas terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti MDGs (Millenium Development Goals). Yaitu :

   1) Kinerja menurun tidak bisa maksimal;
   2) Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal;
   3) Usulan- usulan belum semua terpenuhi;

4) Lokasi tertentu lokasi tertentu sering tergenangi air sehingga usia teknis menjadi pendek.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan:

a) Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebih ditingkatkan dengan cara Pemberian Diklat dan Pelatihan ASN ,walaupun masih terdapat permasalahan;

b) Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

2) Peluang:

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya ;
3. Melaksanakan pelatihan , workshoop, study banding secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
4. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Cawas terlaksana dengan baik,tertib dan lancar.

e. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1) Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Cawas mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu

menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan Pemuda dan olahraga.

3) Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Cawas melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan.
4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Cawas melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
5) Urusan Sosial telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4 REVIEW TERHADAP USULAN RANCANGAN AWAL RKPD

a. Proses pengajukan program dan kegiatan diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran.
b. Untuk meningkatkan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2023 perlu diadakan Review terhadap Rancangan Awal SKPD yang telah diajukan terlebih dahulu dalam Renja 2022 Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Manju 2023.
c. Alasan Proses Review tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat Tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan Riel Masyarakat (Bottom Up).

Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya. Tabel 2.4 Revie Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Klaten (Terlampir).

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN CAWAS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	100	2.507.507.366	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	100	2.507.507.366
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cawas	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	4.000.000	**7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kecamatan Cawas	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100	4.000.000
	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	2.000.000	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cawas	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5	2.000.000
	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2	2.000.000	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2	2.000.000
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Cawas	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	100	2.212.276.866	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Cawas	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	100	2.212.276.866
	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cawas	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	21	2.199.316.866	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Cawas	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	21	2.199.316.866

	7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Cawas	Jumlah Pelaksana Tugas ASN Terpenuhi Administrasinya	12	10.000.000	7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Cawas	Jumlah Pelaksana Tugas ASN Terpenuhi Administrasinya	12	10.000.000
	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	3	2.960.000	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusun	3	2.960.000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Cawas	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	100	51.772.000	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Cawas	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	100	51.772.000
	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15	6.640.000	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15	6.640.000
	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	1	10.000.000	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	1	10.000.000
	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cawas	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	3	8.000.000	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Cawas	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	3	8.000.000
	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	2	1.492.000	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	2	1.492.000
	7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	19.000.000	7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	19.000.000
	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6.640.000	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	6.640.000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Cawas	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	100	67.870.000	**7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Cawas	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	100	67.870.000
	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecamatan Cawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	9.000.000	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kecamatan Cawas	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	9.000.000

	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	9	58.870.000	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	9	58.870.000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Cawas**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	**100**	**137.599.500**	**7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Cawas**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	**100**	**137.599.500**
	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	4.162.000	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	4.162.000
	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cawas	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12	31.800.000	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Cawas	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12	31.800.000
	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	8	101.637.500	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cawas	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedia	8	101.637.500
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kecamatan Cawas**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara**	**100**	**33.989.000**	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Cawas**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara**	**100**	**33.989.000**
	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	8	18.414.000	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	8	18.414.000
	7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Cawas	Jumlah Mebel yang dipelihara	30	1.525.000	7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Cawas	Jumlah Mebel yang dipelihara	30	1.525.000
	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	10	7.170.000	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	10	7.170.000
	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	2.000.000	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1	2.000.000

	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	4.880.000	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Cawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25	4.880.000
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	100	3.119.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	100	3.119.000
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Cawas	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	3.119.000	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Cawas	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	3.119.000
	7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	1	3.119.000	7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	1	3.119.000
3	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	100	77.956.500	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	100	77.956.500
	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cawas	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	77.956.500	**7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Cawas	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	77.956.500
	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	1	8.350.000	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	1	8.350.000

	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	20	69.606.500	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	20	69.606.500
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	100	86.005.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	100	86.005.000
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentar Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14	76.005.000	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentar Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14	76.005.000
	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	8	66.005.000	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	8	66.005.000
	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	10.000.000	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2	10.000.000
	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9	10.000.000	**7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9	10.000.000

	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	10.000.000	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Cawas	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9	10.000.000
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	95	107.956.634	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Cawas	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	95	107.956.634
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cawas	Jumlah KegiatanUrusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14	107.956.634	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Cawas	Jumlah KegiatanUrusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14	107.956.634
	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	50	102.956.634	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	50	102.956.634
	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	5.000.000	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20	5.000.000
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cawas	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	95	80.772.500	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Cawas	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	95	80.772.500

	Kecamatan Cawas	Persentase desa tertib administrasi	84	80.772.500		Kecamatan Cawas	Persentase desa tertib administrasi	84	80.772.500
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cawas	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	80.772.500	**7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Cawas	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	80.772.500
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20	4.100.000	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20	4.100.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	20	4.216.000	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	20	4.216.000
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	5.100.000	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	5.100.000
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	2.000.000	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	2.000.000
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20	20.000.000	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20	20.000.000
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	5.000.000	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20	5.000.000
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	5.700.000	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Cawas	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	5.700.000

	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	20	30.656.500	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cawas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	20	30.656.500
	7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	20	2.000.000	7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Cawas	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	20	2.000.000
	7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20	2.000.000	7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cawas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	20	2.000.000
	Jumlah				**2.860.198.000**	**Jumlah**				**2.860.198.000**

Klaten, Juli 2022

CAMAT CAWAS

Drs. MOH. PRIHADI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720601 199203 1 005

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

A. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.

B. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

C. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Hasil usulan musrenbangcam Cawas Tahun 2023 (Terlampir).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten ***"Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".*** Peranan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pedan adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

   Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan E-KTP, Penyaluran Bantuan Sosial Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)

b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tabel. 3.1
Persandingan antara Prioritas Propinsi Kabupaten
Dengan Usulan Renja Tahun 2020

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN KLATEN

1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reforasi Birokrasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah:

a. Meningkatkan pelayanan berbasis Online guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal;
b. Meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
c. Meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dan desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
d. Meningkatkan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang memadai;
e. Meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
f. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang tertib administrasi.

2. Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut yaitu:

a. Meningkatnya efektifitas dan efisien birokrasi;
b. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor;

c. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sarana prasarana wilayah;
d. Meningkatnya peran serta masyarakat dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	83,41
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	57,98

3. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program, Kegiatan dan Pendanaan yang akan dilakukan

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
03	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kecamatan Cawas Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana terlampir (Tabel 2.4).

BAB V
PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan / kendala, diantaranya:

1. Masih adanya pegawai yang kurang memahami tugas, fungsi dan kewajiban;
2. Masih adanya pegawai yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya;
3. Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Cawas tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Kecamatan Cawas tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/ acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Cawas merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
2. Agar kepada semua karyawan/karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam

perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;

3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Cawas;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Juli 2022

CAMAT CAWAS

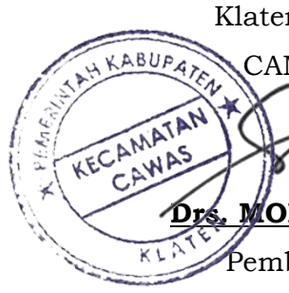

Drs. MOH PRIHADI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720601 199203 1 005

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN GANTIWARNO

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Jalan Raya Jabung No. 23 Telp. (0272) 3359555
Klaten 57455

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Narasi RKPD Tahun 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
b. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 5 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Gantiwarno Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gantiwarno yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Gantiwarno tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gantiwarno Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Gantiwarno.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gantiwrno tahun 2023 dapat tersusun. Perlu disadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Klaten, Juli 2022
CAMAT GANTIWARNO

Hj.LILIS YULIYATI,SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650701 199203 2 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU..... 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalanan (n-1) 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan. 16

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah..... 19

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD..... 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 23

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Persngkat Daerah..... 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 26

BAB V PENUTUP 27

5.1 Catatan penting yang harus mendapat perhatian. 27

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 27

5.3 Rencana Tindak Lanjut 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan , dan f. penetapan.

Mempedomani Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Gantiwarno masih mengacu dengan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gantiwarno tahun 2021-2026 sebagai pedoman transisi, mengingat belum adanya Perubahan RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, Lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja RKPD.

Rencana Kerja RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Perubahan Rencana Kerja RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Rencana Kerja RKPD yang disusun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Memedomani Pasal 84 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja renja Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian Rencana Kerja (Renja) .

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada

forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Pada akhir tahun 2019 terjadi permasalahan yang memberi dampak besar bagi dunia yaitu hadirnya virus Corona. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid-19 (Corona Viruse Diseasse -19) menjadi masalah kesehatan dunia . Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tidak hanya di Negara asal China namun Virus Corona telah menjadi masalah diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus Corona pertama kali masuk Indonesia pada Maret 2020. Selain menjadi masalah kesehatan virus corona juga berdampak pada sektor ekonomi, Pemerintahan , Sosial, dan masih banyak lagi. Menjalani kehidupan di era normal baru masa pandemi virus corona harus mentaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan sehingga dapat menjalani aktivitas dengan baik dan lancar, termasuk dalam bekerja, sehingga tugas

dan kewajiban dalam pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Begitu pula dengan menjalankan tugas , pokok dan fungsi di Kantor Kecamatan Gantiwarno.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gantiwarno Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susuan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gantiwarno Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Gantiwarno.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamnatan Gantiwarno adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN (2022)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPDP
2.5 enelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2 Kaidah Pelaksanaan
5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Triwulan II

Kecamatan Gantiwarno telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi renstra Kecamatan Gantiwarno yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Lampiran 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan, kecuali Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Karena Pelaksanaan Kegiatan dikerjakan oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu Hampir semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi dari target yang diusulkan (100%).
b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di berikut ini :

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**2,252,084,865.00**	**1,861,840,737.00**		
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**1,929,429,761.00**	**1,557,685,901.00**		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,902,429,761.00	1,553,005,901.00	81.63	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**36,000,000.00**	**35,770,000.00**		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	4,888,900.00	97.78	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,000,000.00	12,903,200.00	99.26	100

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,000,000.00	2,999,900.00	100.00	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000.00	14,978,000.00	99.85	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**118,968,000.00**	**106,909,366.00**	-	
Penyedia Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	2,799,900.00	93.33	100
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	16,000,000.00	7,979,796.00	49.87	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,968,000.00	96,129,670.00	96.16	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**167,687,104.00**	**161,475,470.00**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	48,830,000.00	44,577,500.00	91.29	100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan Lainya	98,857,104.00	98,370,600.00	99.51	100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	20,000,000.00	18,527,370.00	92.64	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**293,911,600.00**	**272,992,650.00**		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaaan Desa	**293,911,600.00**	**272,992,650.00**		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	293,911,600.00	272,992,650.00	92.88	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100,100,000.00**	**91,832,100.00**		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100,100,000.00**	**91,832,100.00**		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal I Wilayah Kecamatan	93,100,000.00	85,538,000.00	91.88	100

Program / kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7,000,000.00	6,294,100.00	89.92	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**18,000,000.00**	**17,540,600.00**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**18,000,000.00**	**17,540,600.00**		
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18,000,000.00	17,540,600.00	97.45	100
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**137,621,300.00**	**125,682,650.00**		
Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**137,621,300.00**	**125,682,650.00**		
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32,542,000.00	29,307,000.00	90.06	100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5,200,100.00	5,200,100.00	100.00	100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	6,000,000.00	5,999,800.00	100.00	100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00	100
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertirtiban Umum	88,879,200.00	80,275,750.00	90.32	100

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adanya program dan kegiatan terlaksana 100%.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural,

kurangnya SDM (Personil) yang memahani IT di Kecamatan Gantiwarno. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD.

e) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Gantiwarno sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Gantiwarno telah melaksanakan pada tahun 2017. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan saat ini Kecamatan Gantiwarno hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke Kantor Pelayanan Terpadu dan PM Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Gantiwarno.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Gantiwarno telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, pelayanan Raskin, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kirab budaya, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Laporan terkait dengan kepuasan masyarakat tertuang dalam Survey Kepuasan

Masyarakat, sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerntah tertuang dalam LKjIP. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gantiwarno sampai sebagaimana terlihat lampiran 2.2

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gantiwarno

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TH. 2021	TH.2022	TH.2023	TH.2024	TH. 2025	TH.2026	TH. 2021	TH.2022	
					NIHIL							

CAMAT GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650701 199203 2 006

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Gantiwarno dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Gantiwarno.
    a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Gantiwarno sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Gantiwarno.
    b) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
    c) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Gantiwarno hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.
    d) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Gantiwarno sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenangair sehingga usia teknis menjadi pendek;
3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
    a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software-Hardware) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
    b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
    c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
    d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

e. Pelaksanaan E- KTP di Kecamatan Gantiwarno saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e–KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten dan diberi pengantar dari Kecamatan Gantiwarno;

f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Gantiwarno cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat komputer hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

4) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

- ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- ✓ Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya;
- ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- ✓ Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari tantangan tersebut kami bisa mengatasi permasalan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Gantiwarno terlaksana denganbaik,tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- ✓ Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga beberapa kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi.

- ✓ Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan melalui program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Gantiwarno melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Namum ada Kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana karena adanya perubahan regulasi.
- ✓ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Gantiwarno melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana terhadap Rencana kerja PD tahun 2023.
2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat (prosesdur Bottom Up).
3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

   Adapun Rancangan Awal RKPD kecamatan Gantiwarno Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	**2.246.284.352**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**2.246.283.352**	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun	100%	**5.000.000**	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun	100%	**5.000.000**	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.000.000	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	98%	**1.975.449.352**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	98%	**1.975.449.352**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang/Bu	1.960.449.352	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bu	1.960.449.352	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Gantiwarno	Jumlah Pembayaran Honor KPA , PPTKA, PPA, SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	1 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	12.000.000	
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	4 Laporan	3.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	98%	**50.600.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	98%	**50.600.000**	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 Paket	13.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	6 Paket	4.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4.500.000	
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	3 Dokumen	3.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.100.000	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Tamu Terfasilitasi	7 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	10.000.000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	15.000.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100%	**20.000.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	100%	**20.000.000**	
a	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah mebel yang diadakan	3 Paket	8.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	8.000.000	
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	4 Unit	12.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	12.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100%	**114.000.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	100%	**113.999.000**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Surat Terkirim	2 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	999.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	12 Laporan	13.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	**81.235.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	**81.235.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara Serta Pajak dan Perijinannya Terbayar	9 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	60.000.000	
b	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah mebel yang terpelihara	4 Unit	1.985.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1.985.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	4 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Terehabilitasi / Terpelihara	1 Unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.000.000	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	2 Unit	3.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3.250.000	
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	7 Unit	3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	100%	**5.000.000**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	**5.000.000**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	97%	**5.000.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%	**5.000.000**	
a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	97%	5.000.000	
III	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF	95%	**57.965.648**	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga masyarakat aktif	95%	**72.965.648**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	97%	**57.965.648**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	97%	**72.965.648**	
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6 Lembaga Kemasyarakt	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desaipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakt	15.000.000	
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	6 Laporan	42.965.648	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	57.965.648	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96%	PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN	96%	**109.500.000**	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96%	**109.500.000**	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,97	presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	97%	**94.500.000**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	98%	**94.500.000**	
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	87.000.000	
b	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	7.500.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	7.500.000	
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,97	Presentase Koordinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	97%	**15.000.000**	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Presentase Koordinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	97%		
a	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI	96%	**6.500.000**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96%	**6.500.000**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96%	**6.500.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	96%	**6.500.000**	
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno,semua desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	50 Orang	5.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	5.000.000	
b	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1.500.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	1.500.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU	97%	**49.200.000**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97%	**84.200.000**	
			Persentase desa tertib administrasi	95%				Persentase desa tertib administras	95%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	98%	**49.200.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	98%	**84.200.000**	
a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	6.500.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	6.500.000	
b	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	1 Dokumen	9.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	9.000.000	
c	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	6.000.000	
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	20.000.000	
e	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1.500.000	
f	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	7 Dokumen	18.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	38.000.000	
g	fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5 Dokumen	1.700.000	fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1.700.000	
h	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Laporan	1.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.500.000	
					2.474.450.000					**2.524.449.000**	

Klaten, Juli 2022

CAMAT GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650701 199203 2 006

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gantiwarno disajikan pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
KBABUPATEN KLATEN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan pembangunan talud Jalan Sendang Sriningsih di sepanjang Desa Muruh	Dari Dk. Mulwo Rt. 018/009 s/d Timur Dk. Karangmojo Rt. 015/008, Kab. Klaten		P;1800 m xT;1 m xT;30 Cm	belum terpasang pengaman jalan (Talud) sehingga air sungai sering meluap dan menggenangi jalan sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, genangan air tersebut juga dapat merusak aspal pelapis jalan raya
2	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa dengan Pembangunan Talud Jalan Tani Dukuh Candi Desa Mlese	Jalan Tani Dukuh Candi Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Kab. Klaten		P;500 m xT;1 m xL;30 Cm	Ada Sungai Besar belum di Talud, Ketka musim hujan sangat rawan terkena luapan air yang akan mengancam puluhan Hektare lahan pertanian
3	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa dengan Pembangunan Talud Jalan Tani Dukuh Candi Desa Mlese	Jalan Tani Dukuh Candi Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Kab. Klaten		P; 850 m xT; 1 m xL;30 Cm	Ada Sungai Besar belum di Talud, Ketka musim hujan sangat rawan terkena luapan air yang akan mengancam puluhan Hektare lahan pertanian
4	Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan pembangunan talud Jalan Sendang Sriningsih di sepanjang Desa Muruh	Dari Dk. Mulwo Rt. 018/009 s/d Timur Dk. Karangmojo Rt. 015/008, Kab. Klaten		P;1.850 m xL; 4 m	Jalan Sendang Sriningsih di sepanjang Desa Muruh belum terpasang pengaman jalan (Talud) sehingga air sungai sering meluap dan menggenangi jalan sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, genangan air tersebut juga dapat merusak aspal pelapis jalan raya.
5	Rehabilitasi Jalan Kabupaten Rusak Berat dengan Pembangunan Talud	Dukuh Karangturi Desa Karangturi, Kab. Klaten		P;1000 m x L; 4 m	
6	Rehabilitasi Jalan Kabupaten dengan pavingisasi tepi jalan agar dapat mencegah tumbuhnya rumput	Jalan DPU Tugu ke Utara (dukuh Jabung Wetan), Kab. Klaten kecamatan Gantiwarno Desa Jabung		P;1200 m x L; 3 m	Jalan DPU banyak Tumbuh Rumput Liar, yang mengakibatkan jalan menjadi sempit, sehinga perlu adanya pavingisasi tepi jalan agar dapat mencegah tumbuhnya rumput Anggaran yang dibutuhkan Rp.95.480.000,-
7	Rehabilitasi Jalan Kabupaten jalan sendang sri ningsih di wilayah desa katekan	Jalan Sendang Sriningsih, Kab. Klaten kecamatan Gantiwarno Desa Katekan		P;1850 m x L; 4 m	jalan sendang sri ningsih di wilayah desa katekan sudah banyak yang rusak dan berlubang
8	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan Air Bersih beserta kelengkapannya .	Dk. Muruh Rt. 09/05, Kab. Klaten		KPM200 KK;	Antusiasme warga masyarakat untuk turut menggunakan fasilitas jaringan air bersih tidak sebanding lurus dengan fasilitas yang ada sehingga mengakibatkan kesenjangan diantara pelanggan, pelanggan yang dihulu debit airnya besar sedang dihilir sangat kecil hal ini terjadi karena over kapasitas pelanggan, pemecahan masalahnya dengan menambah sumur, pompa, jaringan beserta kelengkapannya

Klaten, Juli 2022
CAMAT GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650701 199203 2 006

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".** Peranan Kecamatan Gantiwarno sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Gantiwarno sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetkan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

   Hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah kebijkan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Gantiwarno adalah sesuai dengan tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Persandingan antara prioritas Nasional Provinsi Kabupaten dengan Usulan Renja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Program dalam Renja 2023
1	*2*	*3*	*4*
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptkan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah **”Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan”**

2. Sasaran

Sasaran ditetapakan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah ’’**Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan**’’

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kecamatan Gantiwarno Tahun 2021-2026.

Rencana kerja Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indukator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efisien dan efektif.

Rencana program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang. Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana terlampir.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN GANTIWARNO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN GANTIWARNO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7	**01**				**KECAMATAN**								**2.524.449.000**		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.246.283.352**		
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.000.000**		
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.975.449.352**		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	16 Orang/Bul	an98 %	1.960.449.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Dokumen	98 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	an Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta te n rsusunnya laporan keuangan tepat waktu ran	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Laporan	98 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50.600.000**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Paket	98 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Paket	98 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	6 Paket	98 %	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	3 Dokumen	98 %	3.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	7 Laporan	98 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	17 Laporan	98 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20.000.000**		
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	3 Paket	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**113.999.000**		
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Laporan	100 %	999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	12 Laporan	100 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	12 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81.235.000**		
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	9 Unit	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	1.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Unit	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Unit	100 %	3.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	7 Unit	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5.000.000**		
7	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5.000.000**		
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Laporan	97 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**72.965.648**		
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**72.965.648**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desaipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95,00 %	6 Lembaga Kemasyaraktn	97 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95,00 %	6 Laporan	97 %	57.965.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**109.500.000**		
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**94.500.000**		
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	12 Laporan	98 %	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	6 Laporan	98 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**15.000.000**		
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terkoordinasinya Penegakan Perundang- Undangan yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	1 Laporan	97 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.500.000**		
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.500.000**		
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	96,00 %	50 Orang	96 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	96,00 %	1 Laporan	96 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**84.200.000**		
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**84.200.000**		
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	98 %	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	98 %	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	98 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	4 Dokumen	98 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	01	06	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	98 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	7 Dokumen	98 %	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	95.00 % 97.00 %	5 Dokumen	98 %	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	95.00 % 97.00 %	1 Laporan	98 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
												TOTAL	**2.524.449.000**		

Klaten, Juli 2022

CAMAT KECAMATAN GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650701 199203 2 006

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang harus mendapat perhatian.

Hal penting Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan / kendala, diantaranya :

a. Masih adanya pegawai/SDM yang kurang memahami tugas, fungsi dan kewajiban;
b. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya;
c. Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Gantiwarno tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Rencana kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
b. Kecamatan Gantiwarno tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kalten;
c. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
d. Sebagai pedoman/ acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Gantiwarno merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
2. Agar kepada semua karyawan/ karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;

3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Gantiwarno;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan piak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Juli 2022
CAMAT GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19658701 199203 2 006

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Gantiwarno

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun (n-3)/2020		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)/2021						Target Program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi		Target	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)		Tingkat Capain Realisasi Target Renstra %	
1						2	3	4		5		6		7		8=7/6		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
7	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**12.218.324.000**			**100%**	**2.252.084.865**	**100%**	**1.861.840.737**	100%	83%		**2.235.649.352**		**3.876.193.723**	-	
7	01	01	2	01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tersusun**	**100%**	**63.000.000**				-		-		**0%**	**96%**	**2.650.000**		**2.650.000**		
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	20	39.000.000									4	1.050.000	4	1.050.000	**20%**	**3%**
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	10	24.000.000									2	1.600.000	2	1.600.000	**20%**	**7%**
																							\
7	01	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**98%**	**10.595.494.000**				**1.929.429.761**		**1.557.685.901**			**96**	**1.964.049.353**		**3.521.735.254**		
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16	10.431.865.000			12	1.902.429.761	12	1.553.005.901	100%	82%	14	1.960.449.353	14	3.513.455.254	**88%**	**34%**
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honor KPA , PPTKA, PPA, SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	135.000.000			300	27.000.000	175	4.680.000	58%	17%	15	1.350.000	190	6.030.000	**1583%**	**4%**
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	80	28.629.000									16	2.250.000	16	2.250.000	**20%**	**8%**
																					-		
7	01	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**98%**	**346.781.000**			**98%**	**36.000.000**		**35.770.000**			**96**	**36.450.000**		**72.220.000**		
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	42	**56.000.000**			11	5.000.000	11	4.888.900	100%	98%	10	5.000.000	21	9.888.900	**50%**	**18%**
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10	**67.000.000**			30	13.000.000	30	12.903.200	100%	99%	2	13.000.000	32	25.903.200	**320%**	**39%**
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	5	**24.581.000**			4	3.000.000	4	2.999.900	100%	100%	1	4.500.000	5	7.499.900	**100%**	**31%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun (n-3)/2020		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)/2021						Target Program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi		Target	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)		Tingkat Capain Realisasi Target Renstra %	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	15	**20.200.000**												-		
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	1250	**64.000.000**			566	15.000.000	566	14.978.000	100%	100%	188	10.000.000	754	24.978.000	**60%**	**39%**
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	**115.000.000**									10	3.950.000	10	3.950.000	**7%**	**3%**
7	01	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu**	**100%**	**150.000.000**			-	-		-			**98%**	**34.370.000**		**34.370.000**		
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	13	53.000.000									3	11.870.000	3	11.870.000	**23%**	**22%**
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	20	97.000.000									4	22.500.000	4	22.500.000	**20%**	**23%**
7	01	01	2	08	P	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu**	**100%**	**589.500.000**			**98%**	**118.968.000**		**106.909.366**			**98%**	**114.387.000**				
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1375	9.500.000			1.100	3.000.000	1.100	2.799.900	100%	93%	275	387.000	1.375	3.186.900	**100%**	**34%**
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terbayar	12	80.000.000			3	16.000.000	3	7.979.796	100%	50%	12	13.000.000	12	20.979.796	**100%**	**26%**
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	7	500.000.000			6	99.968.000	6	96.129.670	100%	96%	7	101.000.000	7	197.129.670	**100%**	**39%**
7	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**473.549.000**				**167.687.104**		**161.475.470**			**97%**	**83.742.999**		**245.218.469**		
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara Serta Pajak dan Perijinannya Terbayar	9	307.500.000			9	48.830.000	9	44.577.500	100%	91%	9	52.100.000	9	96.677.500	**100%**	**31%**
7	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	20	12.485.000													**0%**	**0%**
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	20	28.000.000									4	2.110.000	4	2.110.000	**20%**	**8%**
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Terehabilitasi / Terpelihara	1	85.000.000			1	98.857.104	1	98.370.600	100%	100%	1	28.312.999	1	126.683.599	**100%**	**149%**
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	8	16.564.000													**0%**	**0%**
7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Terpelihara	35	24.000.000			1	20.000.000	1	18.527.370	100%	93%	2	1.220.000	3	19.747.370	**9%**	**82%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun (n-3)/2020		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)/2021						Target Program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi		Target	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)		Tingkat Capain Realisasi Target Renstra %	
P	OG	AM	P			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	**100%**	**47.567.000**			**100%**	-	-					**2.000.000**		**2.000.000**		
7	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**97%**	**47.567.000**				-	-				**95**	**2.000.000**		**2.000.000**		
7	01	02	2	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10	47.567.000									2	2.000.000	2	2.000.000	**20%**	**4%**
P	OG	AM	P			**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95%**	**823.289.000**			**95%**	**293.911.600**		**272.992.650**				**22.350.000**		**295.342.650**		
7	01	03	2	01	Ko	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	**97%**	**823.289.000**				**293.911.600**		**272.992.650**				**22.350.000**		**295.342.650**		
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	16	105.000.000									16	2.500.000	16	2.500.000	**100%**	**2%**
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16	718.289.000			16	293.911.600	16	272.992.650	100%	93%	16	19.850.000	16	292.842.650	**100%**	**41%**
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**97%**	**652.759.000**			**97%**	**100.100.000**		**91.832.100**				**82.800.000**		**174.632.100**		
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**presentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**98%**	**417.759.000**				**100.100.000**		**91.832.100**			**96%**	**79.900.000**		**171.732.100**		
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	60	330.000.000			16	93.100.000	16	85.538.000	100%	92%	12	76.000.000	28	161.538.000	**47%**	**49%**
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	87.759.000			16	7.000.000	16	6.294.100	100%	90%	2	3.900.000	18	10.194.100	**180%**	**12%**
7	**01**	**04**	**2**	**02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Presentase Koordinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**98%**	**235.000.000**				-	-					**2.900.000**		**2.900.000**		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun (n-3)/2020		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)/2021						Target Program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi		Target	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)		Tingkat Capain Realisasi Target Renstra %	
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25	235.000.000									5	2.900.000	5	2.900.000	**20%**	**1%**
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**97%**	**259.657.000**			**96%**	**18.000.000**		**17.540.600**				**117.250.000**		**134.790.600**		
7	01	05	2	01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**96%**	**259.657.000**				**18.000.000**		**17.540.600**			**98%**	**117.250.000**		**134.790.600**		
7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	10	250.957.000			16	18.000.000	16	17.540.600	100%	97%	10	116.500.000	26	134.040.600	**260%**	**53%**
7	01	05	2	01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16	8.700.000									16	Rp750.000	16	750.000	**100%**	**9%**
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**98%**	**748.919.000**			**92%**	**137.621.300**		**125.682.650**		**0%**		**14.400.000**				
							Persentase desa tertib administrasi	97%	122.000.000			86%											
7	01	06	2	01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	98%	**748.919.000**				**137.621.300**		**125.682.650**			96	**14.400.000**		**140.082.650**		
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16	74.000.000			16	32.542.000	16	29.307.000	100%	90%	16	2.000.000	16	31.307.000	**100%**	**42%**
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16	126.000.000			16	5.200.100	16	5.200.100	100%	100%	16	1.800.000	16	7.000.100	**100%**	**6%**
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16	64.000.000			16	6.000.000	16	5.999.800	100%	100%	16	1.900.000	16	7.899.800	**100%**	**12%**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun (n-3)/2020		Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)/2021						Target Program dan kegiatan (Renja perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan			
								Target	Rp	Target	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)/2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021		Tingkat Realisasi		Target	Rp	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2022)		Tingkat Capain Realisasi Target Renstra %	
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	60.000.000			5	5.000.000	5	4.900.000	100%	98%	16	1.750.000	16	6.650.000	**100%**	**11%**
7	01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25	8.700.000									5	1.500.000	5	1.500.000	**20%**	**17%**
7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	16	398.719.000			16	88.879.200	16	80.275.750	100%	90%	16	2.450.000	32	82.725.750	**200%**	**21%**
7	01	06	2	01	13	fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	25	8.900.000									5	Rp 1.500.000	5	1.500.000	**20%**	**17%**
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15	8.600.000									3	Rp 1.500.000	3	1.500.000	**20%**	**17%**
						JUMLAH			**14.750.515.000**		**-**		**2.801.717.765**		**2.369.888.737**				**2.474.449.352**		**4.482.959.073**		**30%**

Klaten, Juli 2022
CAMAT GANTIWARNO

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650701 199203 2 006

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN GANTIWARNO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN GANTIWARNO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2.524.449.000**					**2.958.127.000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.246.283.352**					**2.453.302.000**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.000.000**					**11.500.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	7.500.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	4.000.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.975.449.352**					**2.119.002.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	16 Orang/Bul	an98 %	1.960.449.352	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	2.086.373.000
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Dokumen	98 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	27.000.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	₀₀Terbayarnya Gaji dan ₄tunjangan ASN serta te[n]rsusunnya laporan keuangan tepat waktu ran	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Laporan	98 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	5.629.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50.600.000**					**72.000.000**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Paket	98 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	12.000.000
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Paket	98 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	14.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	6 Paket	98 %	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	5.000.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	3 Dokumen	98 %	3.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	4.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	7 Laporan	98 %	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	13.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	17 Laporan	98 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	24.000.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20.000.000**					**41.000.000**
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	3 Paket	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	17.000.000
7	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	24.000.000
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**113.999.000**					**117.000.000**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Laporan	100 %	999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	2.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	12 Laporan	100 %	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	15.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	12 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100.000.000
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81.235.000**					**92.800.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	9 Unit	100 %	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	62.500.000
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	1.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	2.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	4 Unit	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	5.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	1 Unit	100 %	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	15.000.000
7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Unit	100 %	3.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	4.300.000
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	7 Unit	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	4.000.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5.000.000**					**8.893.000**
7	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5.000.000**					**8.893.000**
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	100,00 %	2 Laporan	97 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100,00 %	8.893.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**72.965.648**					**161.969.000**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**72.965.648**					**161.969.000**
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desaipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95,00 %	6 Lembaga Kemasyaraktn	97 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95,00 %	20.000.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95,00 %	6 Laporan	97 %	57.965.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95,00 %	141.969.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**109.500.000**					**133.393.000**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**94.500.000**					**88.393.000**
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	12 Laporan	98 %	87.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96,00 %	70.000.000
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	6 Laporan	98 %	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96,00 %	18.393.000
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**15.000.000**					**45.000.000**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terkoordinasinya Penegakan Perundang- Undangan yang dilakukan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	96,00 %	1 Laporan	97 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96,00 %	45.000.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.500.000**					**49.391.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.500.000**					**49.391.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	96,00 %	50 Orang	96 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96,00 %	47.691.000
7	01	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	96,00 %	1 Laporan	96 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96,00 %	1.700.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**84.200.000**					**151.179.000**
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**84.200.000**					**151.179.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	98 %	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	16.000.000
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	98 %	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	25.000.000
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	98 %	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	14.000.000
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	4 Dokumen	98 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	13.000.000
7	01	06	2,01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	98 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	1.700.000
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	7 Dokumen	98 %	38.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	77.979.000
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	95.00 % 97.00 %	5 Dokumen	98 %	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	1.700.000
7	01	06	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Gantiwarno, Jabung	95.00 % 97.00 %	1 Laporan	98 %	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	1.800.000
												TOTAL	**2.524.449.000**					**2.958.127.000**

Klaten, Juli 2022

CAMAT GANTIWARNO

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN GANTIWARNO KLATEN

Hj. LILIS YULIYATI, SH, MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650701 199203 2 006

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN KARANGDOWO

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat serta bimbingan sehingga kami dapat menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan pedoman dan acuan untuk perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten di Tahun 2023 yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor : 050 / 075 / 31 Tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rancangan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Serta Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) ini dibuat sebagai salah satu bahan penyempurnaan RKPD dan semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan kearah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karangdowo.

Klaten, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

TOMISILA ADHITAMA, A.P, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19740726 1993111 002

DAFTAR ISI

			Halaman
Cover Judul ……....			
Kata Pengantar ……..			i
Daftar Isi ……..			ii
BAB I	PENDAHULUAN ……		1
	1.1	Latar Belakang …….	1
	1.2	Landasan Hukum …….....	3
	1.3	Maksud dan Tujuan ……	10
	1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU …….....		13
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (n-1)……..	13
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..	15
	2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD …….....	15
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD…….....	18
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….…….....	19
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH…….		20
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …….....	20
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……..	21
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …….....		22
BAB V	PENUTUP.....		26
	5.1	Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian	26
	5.2	Kaidah – kaidah Pelaksananaan……	26
	5.3	Rencana Tindak Lanjut……..	26
LAMPIRAN ……..			27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan,
b. penyusunan Rancangan ,
c.penyusunan rancangan,
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
e. perumusan rencana kerja, dan
f. Rancangan .

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum dsempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan , dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes -

Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Karangdowo.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri)Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana

Kerja Perangkat Daerah Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Karangdowo telah mereviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Karangdowo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), dan untuk kegiatan dengan serapan terendah ada di kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang serapan anggarannya 57, 48 %

b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada table **Lampiran Tabel 2.1"Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022".**

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2021 tidak

ada program dan kegiatan yang melebihi target 100%. Semua program kegiatan terlaksana sebesar 100 %.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya /terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural, kurangnya SDM (Personil) Kecamatan Karangdowo dan adanya pandemi covid-19 yang juga berimbas pada rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD. Hal ini dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi saat pembuatan Renstra PD dan pada saat penyusunan Renja.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staff.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karangdowo sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Terkait dengan pelaksanaan PATEN, di Kecamatan Karangdowo telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih dilayani di Kecamatan Karangdowo adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangdowo.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Karangdowo telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat,peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kebudayaan, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. **Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo sebagaimana terlihat lampiran 2.2**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Karangdowo dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di KecamatanKarangdowo

yang paling dominan dihadapi di tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan ruang gerak dan ritme penyelenggaraan program kerja Kecamatan karangdowo menjadi terganggu sebagai imbas dari penerapan Protokol Kesehatan, guna menekan penyebaran virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada rasionalisasi anggaran yang peruntukannya harus dialihkan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa anggaran untuk beberapa subkegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan anggaran.

3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suitable Development Goals).
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

- ✓ Jaringan server layanan KTP yang kadang mengalami gangguan sehingga menghambat prosespelayanan ;
- ✓ Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sehingga sedikit banyak mempengaruhi kualitas pelayanan PATEN yang diberikan kepada masyarakat;

Peluang:

- ✓ Berkoordinasi dengan instansi terkait atau dalam hal ini DISPENDUKCAPIL Kabupaten Klaten guna mencari solusi yang tercepat dan efisien sehingga masalah jaringan server KTP yang sering mengalami gangguan bisa segera teratasi.
- ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada dan membangun soliditas semua pegawai Kecamatan sehingga semua pegawai bersemangat untuk saling bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

- ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan pelayanan terhadap masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut kami berhasil mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Karangdowo terlaksana denganbaik,tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   - ✓ Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan rencana yang diusulkan.
   - ✓ Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Karangdowo melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.

- ✓ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Karangdowo melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten. Selain itu Kecamatan Karangdowo juga berperan aktif dalam membantu Desa mengoptimalkan Undang-undang Desa yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan Desa untuk bisa lebih mandiri dalam hal merencanakan program pembangunan mereka masing-masing. Hal ini muaranya tentu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.
- ✓ Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya. Serta dengan adanya program bantuan logistic kepada masyarakat yang tidak mampu atau terdampak bencana di lingkungan Kecamatan Karangdowo.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap Rancangan rencana kerja PD tahun 2023.
2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosedur Bottom Up).

3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya**.** **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana terlihat lampiran 2.4**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlihat lampiran 2.5

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program kerja dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".** Peranan Kecamatan Karangdowo sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Karangdowo sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di

tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, Rancangan , penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah ”**Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**”

2. Sasaran

   Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah :”**Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan**”.

   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlihat lampiran 3.2

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Karangdowo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
   4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
   2) Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   1. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
   1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   2) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
   6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
   7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
   8) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Rancangan Akhir Renja dan pendanaan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Matriks Pendanaan Renja 2023**

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Kurangnya jumlah pegawai/SDM di Kecamatan Karangdowo
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Pandemi Covid-19yang mungkin saja masih terjadi.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Karangdowo tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Rencana Kerja Kecamatan Karangdowo tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Karangdowo merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;

2. Agar kepada semua pegawai selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Karangdowo;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Agustus 2022
CAMAT KARANGDOWO

TOMISIVA ADHITAMA, A.P,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 197407261993111002

LAMPIRAN

Lampiran 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Karanggowo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
7:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**		100%	100%	100%	100%	50%	100%	**Note : Rumus kolom 10 adalah Realisasi s/d 2020+realisasi 2021+realisasi 2022(Triwulan 2)**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**			**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Da	25 Dokumen		-	-	-	5 Dokumen	4 Dokumen	16%	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	10 Dokumen		-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	20%	
							-				
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 Orang		12 bulan	12 bulan	100%	21 orang	20 Orang	95%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan		21 Orang	21 Orang	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	20 Dokumen		-	-	-	4 Dokumen	2 Dokumen	20%	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	5 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Unit			-	-	3 Unit	1 Unit	4%	
7 01 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	75 Unit		20 Jenis	20 Jenis	100%	15 Unit	7 Unit	100%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	1300 Eksemplar		5 Jenis	5 Jenis	100%	200 Eksemplar	70 Eksemplar	5%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	10 Eksemplar		-	-	-	2 Eksemplar	1 eksemplar	20%	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	100 Kali		30 Paket	30 Paket	100%	20 Kali	10 Kali	10%	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali		-	-	-	10 kali	4 Kali	8%	
						-	-	-	-		
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	9 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	2 Unit	-	-	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	16 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	25%	
								-	-	-	

7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	3000 Eksemplar		500 Surat	500 Surat	100%	600 Eksemplar	300 eksemplar	10%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	10 Unit		3 Jenis	3 Jenis	100%	2 Unit	2 Unit	20%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang		3 Orang	3 Orang	100%	5 Orang	5 Orang	100%
						-	-	-	-	-
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	9 Unit	3 Unit	33%
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	16 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	-	12,5%
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	9		-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	2		3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	150%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	30		-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	50		4 Orang, Unit	4 Orang, Unit	100%	10 unit	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10 Jenis		-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	20%
7:01:03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**93%**	**80%**	**100%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**93%**	**93%**	**100%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7:01:04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**96%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	5 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	5 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**1 Kegiatan**		-	-	-	-	-	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kegiatan		-	-	-	-	-	

7:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**100%**		100%	100%	100%	-	-	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**		100%	100%	100%	-	-	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	4 Kegiatan		19 Desa	19 Desa	100%	-	-	
7:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**100%**		100%	100%	100%	95%	60%	60%
		Persentase desa tertib adminitrasi	**100%**					94%	70%	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terfasilitasi lomba administras	19 Desa		-	-		19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Tuga	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan ke	19 Desa					19 Desa	19 Desa	100%
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 Desa		-	-	-	-	-	100%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	95 Rekomendasi		-	-		19 Rekomendasi	2 rekomendasi	10,5%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	19 Desa		19 Desa	19 Desa	100%	19 Desa	1 Desa	5,2%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 Kegiatan		-	-				
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan		-	-				

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

A ADHITAMA, A.P., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197407261993111002

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangdowo

Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN KARANGDOWO

TO[illegible]MA, A.P., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 197407261993111002

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangdowo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2,409,811,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2,429,810,000**	
7.01.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 4,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp 4,000,000**	
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 2,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 2,000,000	
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	Rp 2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	Rp 2,000,000	
7.01.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 2,197,310,127**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 2,198,060,000**	
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	Rp 2,194,310,127	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	Rp 2,195,060,000	
7.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 3,000,000	
7.01.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 49,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 49,000,000**	

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	3,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	3,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Rp	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Rp	10,000,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp	10,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Rp	10,000,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp	1,500,000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp	19,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp	19,500,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp	5,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp	5,000,000	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**25,500,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	**Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**47,750,000**	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp	25,500,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp	47,750,000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**89,000,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**89,000,000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp	3,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp	16,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp	16,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	Rp	70,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	Rp	70,000,000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**Rp**	**45,000,873**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**Rp**	**42,000,000**	

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Rp	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp	20,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	2 Unit	Rp	15,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	2 Unit	Rp	10,000,000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	Rp	10,000,873	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 unit	Rp	12,000,000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**5,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**5,000,000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan**	**100%**	**Rp**	**5,000,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan**	**100%**	**Rp**	**5,000,000**	
7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	5,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	5,000,000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95%**	**Rp**	**189,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95%**	**Rp**	**174,000,000**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**Rp**	**189,000,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa**	**100%**	**Rp**	**174,000,000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Desa	Rp	15,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19 Lembaga Kemasyarakatan	Rp	15,000,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	174,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	159,000,000	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp**	**126,000,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp**	**146,000,000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp**	**126,000,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp**	**146,000,000**	

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	96,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	116,000,000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	Rp	30,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp	30,000,000	
7.01.05	**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani**	**-**	**Rp**	**-**	**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani**	**96%**	**Rp**	**10,000,000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**-**	**Rp**	**-**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100%**	**Rp**	**10,000,000**	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	-	-		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	40 Orang	Rp	10,000,000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp**	**53,500,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp**	**68,500,000**	
		Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**97%**				**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**97%**			
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**Rp**	**53,500,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten**	**Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**Rp**	**68,500,000**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	Rp	5,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 dokumen	Rp	5,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desaerintahan desa	12 Dokumen	Rp	5,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desaerintahan desa	12 Dokumen	Rp	5,000,000	

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 dokumen	Rp	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 dokumen	Rp	5,000,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen	Rp	10,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Dokumen	Rp	10,000,000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 dokumen	Rp	13,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 dokumen	Rp	28,500,000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 dokumen	Rp	15,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19 dokumen	Rp	15,000,000	
JUMLAH					Rp	2,783,311,000					Rp	2,833,310,000	

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO

ADHITAMA, A.P., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197407261993111002

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil musrenbang Tahun 2023				
1	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Glagah RW. 08 Desa Tulas, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	300 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
2	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa,	RW. 01 Dk. Bulusan, Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Poros Desa,	300 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
3	Pembangunan Gedung Pertemuan Desa	Dk. Ringin Mulyo, RT 03 RW 04, Desa Ringin Putih, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Gedung Pertemuan Desa	1 Unit	Belum ada gedung pertemuan yang representatif, perlu pembangunan gedung
4	Urug Perkerasan Jalan Usaha Tani Kas Desa	Timur Dukuh Jalin RT. 14 RW. 06 Desa Ringinputih, Kecamatan Karangdowo	Urug Perkerasan Jalan Usaha Tani Kas Desa	250 m	Jalan perlu dikeraskan agar lalu lintas kendaraan pengangkut lancar
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan Pemukiman	Desa Soka RT. 05 RW. 03, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Lingkungan Pemukiman	275 m	Jalan berlubang dan becek jika hujan
6	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olah Raga Milik Desa,	Komplek Kantor Desa, Desa Karangjoho, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Olah Raga Milik Desa,	1 Unit	Gedung olah raga sudah tidak layak pakai, perlu direhabilitasi
7	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jaringan Irigasi Desa	Sawah Blok F Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Jalan Usaha Tani / Jaringan Irigasi Desa	150 m	Kondisi jalan rusak, perlu perbaikan
8	Pembangunan Drainase Blok F	Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Drainase Blok F	100 m	Drainase yang ada kurang memadai
9	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Dukuh Kragilan RW 02, Desa Tambak, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Gedung Kantor Desa perlu perbaikan
10	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Gedung Kantor Desa perlu perbaikan

11	Pengaspalan Jalan Tengah Dukuh	Dukuh Plumbon, Desa Munggung, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Tengah Dukuh	250 m	Jalan dalam kondisi rusak dan belum diaspal
12	Pengaspalan Jalan Dukuh	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pengaspalan Jalan Dukuh	275 m	Jalan dalam kondisi rusak dan belum diaspal
13	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo	Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
15	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
16	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
17	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Dk. Pugeran RW. 04/05 Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	150 m	Belum terdapat ruang terbuka hijau
18	Pembangunan Talud Batas Kantor Desa	Desa Pugeran, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Talud Batas Kantor Desa	85 m	Belum ada talud untuk pembatas lahan kantor desa yang juga berfungsi untuk penguat kontur tanah
19	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	1 Unit	Kondisi gedung Kantor Desa perlu perbaikan
20	Betonisasi Pelebaran Jalan Dukuh	Dukuh Tegalampel RT. 04 RW. 02, Desa Tegalampel, Kecamatan Karangdowo	Betonisasi Pelebaran Jalan Dukuh	150 m	Kondisi jalan berlubang dan becek jika musim hujan
21	Pembangunan Talud Saluran Irigasi	Dukuh Kriyan RT. 13 RW. 06, Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo	Pembangunan Talud Saluran Irigasi	200 m	Saluran irigasi belum ditalud dan rawan longsor

KARANGDOWO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN KARANGDOWO

TOMSII[illegible]TAMA, AP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19740726 199311 1 002

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	90
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	68,7

Karangdowo, Agustus 2022

CAMAT KARANGDOWO

ASILA ADHITAMA, A.P., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 197407261993111002

.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan							
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai	90.00 Nilai
	Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan						
		Nilai SAKIP	68.50 Nilai	68.70 Nilai	69.25 Nilai	69.50 Nilai	69.50 Nilai

KLATEN , 7 September 2021

Camat Karangdowo

TOMISILA ADHITAMA, A.P., M.M.

NIP. 197407261993111002

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN
PADA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**2.808.727.000**	**100 %**	**2.779.293.000**	**100 %**	**2.879.264.000**	**100 %**	**2.813.821.000**	**100 %**	**2.948.171.000**	**100 %**	**14.229.276.000**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	100 %	6.000.000	100 %	8.000.000	100 %	8.000.000	100 %	14.000.000	100 %	42.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah tersusun	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	7.000.000	25 Dokumen	21.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	4.000.000	2 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	21.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100 %	2.566.438.000	100 %	2.542.793.000	100 %	2.536.264.000	100 %	2.482.821.000	100 %	2.510.171.000	100 %	12.638.487.000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21 Orang	2.539.438.000	21 Orang	2.515.793.000	21 Orang	2.505.264.000	21 Orang	2.451.821.000	21 Orang	2.475.171.000	21 Orang	12.487.487.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	82.000.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	8.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	10.000.000	20 Dokumen	44.000.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	4.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.000.000	5 dokumen	25.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	45.000.000	100 %	45.500.000	100 %	57.000.000	100 %	58.000.000	100 %	74.000.000	100 %	279.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	3 Unit	3.000.000	3 Unit	3.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	4.000.000	3 Unit	7.000.000	15 Unit	21.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 Unit	10.000.000	15 Unit	10.000.000	15 Unit	12.000.000	15 Unit	12.000.000	15 Unit	15.000.000	75 Unit	59.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	200 Eksemplar	8.000.000	200 Eksemplar	8.000.000	300 Eksemplar	10.000.000	300 Eksemplar	10.000.000	300 Eksemplar	12.000.000	1.300 Eksemplar	48.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksemplar	3.000.000	2 Eksemplar	3.000.000	2 Eksemplar	4.000.000	2 Eksemplar	4.000.000	2 Eksemplar	7.000.000	10 Eksemplar	21.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	20 Kali	9.000.000	20 Kali	9.500.000	20 Kali	11.000.000	20 Kali	12.000.000	20 Kali	15.000.000	100 Kali	56.500.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	12.000.000	10 Kali	12.000.000	10 Kali	16.000.000	10 Kali	16.000.000	10 Kali	18.000.000	50 Kali	74.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %	42.000.000	100 %	30.000.000	100 %	60.000.000	100 %	40.000.000	100 %	100.000.000	100 %	272.000.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit	10.000.000	Unit	-	3 Unit	25.000.000	Unit	-	4 Unit	40.000.000	9 Unit	75.000.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	4 Unit	32.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	35.000.000	3 Unit	40.000.000	3 Unit	60.000.000	16 Unit	197.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	100 %	103.000.000	100 %	112.000.000	100 %	119.000.000	100 %	126.000.000	100 %	135.000.000	100 %	595.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	600 Eksemplar	13.000.000	600 Eksemplar	16.000.000	600 Eksemplar	17.000.000	600 Eksemplar	18.000.000	600 Eksemplar	20.000.000	3.000 Eksemplar	84.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	2 Unit	20.000.000	2 Unit	21.000.000	2 Unit	22.000.000	2 Unit	23.000.000	2 Unit	25.000.000	10 Unit	111.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	70.000.000	5 Orang	75.000.000	5 Orang	80.000.000	5 Orang	85.000.000	5 Orang	90.000.000	5 Orang	400.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	46.289.000	100 %	43.000.000	100 %	99.000.000	100 %	99.000.000	100 %	115.000.000	100 %	402.289.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit	15.000.000	9 Unit	15.000.000	9 Unit	16.000.000	9 Unit	16.000.000	9 Unit	20.000.000	9 Unit	82.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	1 Unit	4.289.000	Unit	-	5 Unit	16.000.000	5 Unit	16.000.000	5 Unit	18.000.000	16 Unit	54.289.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	-	Unit	-	3 Unit	11.000.000	3 Unit	11.000.000	3 Unit	13.000.000	9 Unit	35.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 Unit	12.000.000	2 Unit	13.000.000	2 Unit	16.000.000	2 Unit	16.000.000	2 Unit	18.000.000	2 Unit	75.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	-	Unit	-	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	23.000.000	30 Unit	63.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10 Unit	15.000.000	10 Unit	15.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	20.000.000	10 Unit	23.000.000	50 Unit	93.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100 %**	**4.022.000**	**100 %**	**3.967.000**	**100 %**	**5.929.000**	**100 %**	**5.819.000**	**100 %**	**8.662.000**	**100 %**	**28.399.000**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	4.022.000	100 %	3.967.000	100 %	5.929.000	100 %	5.819.000	100 %	8.662.000	100 %	28.399.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	4.022.000	2 Jenis	3.967.000	2 Jenis	5.929.000	2 Jenis	5.819.000	2 Jenis	8.662.000	10 Jenis	28.399.000
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat aktif**	**93 %**	**288.572.000**	**95 %**	**262.752.000**	**95 %**	**267.774.000**	**95 %**	**269.602.000**	**95 %**	**298.330.000**	**95 %**	**1.387.030.000**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	93 %	288.572.000	95 %	262.752.000	95 %	267.774.000	95 %	269.602.000	95 %	298.330.000	95 %	1.387.030.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	19 Desa	13.572.000	19 Desa	12.752.000	19 Desa	12.774.000	19 Desa	18.000.000	19 Desa	20.000.000	19 Desa	77.098.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 Desa	275.000.000	19 Desa	250.000.000	19 Desa	255.000.000	19 Desa	251.602.000	19 Desa	278.330.000	19 Desa	1.309.932.000
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan**	**96 %**	**117.950.000**	**96 %**	**123.940.000**	**96 %**	**138.334.000**	**97 %**	**132.862.000**	**97 %**	**163.601.000**	**97 %**	**676.687.000**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100 %	117.950.000	100 %	110.000.000	100 %	120.000.000	100 %	117.000.000	100 %	140.000.000	100 %	604.950.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	1 Kegiatan	77.950.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	5 Kegiatan	402.950.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	37.000.000	1 Kegiatan	50.000.000	5 Kegiatan	202.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	%	-	100 %	13.940.000	100 %	18.334.000	100 %	15.862.000	100 %	23.601.000	100 %	71.737.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	-	1 Kegiatan	13.940.000	1 Kegiatan	18.334.000	1 Kegiatan	15.862.000	1 Kegiatan	23.601.000	4 Kegiatan	71.737.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani**	**96 %**	**-**	**96 %**	**69.407.000**	**97 %**	**74.108.000**	**97 %**	**72.735.000**	**97 %**	**86.612.000**	**97 %**	**302.862.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	-	100 %	69.407.000	100 %	74.108.000	100 %	72.735.000	100 %	86.612.000	100 %	302.862.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	-	1 Kegiatan	69.407.000	1 Kegiatan	74.108.000	1 Kegiatan	72.735.000	1 Kegiatan	86.612.000	4 Kegiatan	302.862.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**95 %**	**66.865.000**	**97 %**	**64.449.000**	**98 %**	**62.251.000**	**98 %**	**61.097.000**	**98 %**	**163.601.000**	**98 %**	**418.263.000**
		Persentase desa tertib administrasi	**94 %**		**95 %**		**96 %**		**96 %**		**97 %**		**97 %**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 %	66.865.000	100 %	64.449.000	100 %	62.251.000	100 %	61.097.000	100 %	163.601.000	100 %	418.263.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	46.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 Desa	9.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	49.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	7.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	46.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Desa	9.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	8.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	49.000.000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	-	2 Desa	5.000.000	Desa	-	17 Desa	5.000.000	Desa	-	19 Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Desa	-	19 Desa	4.449.000	19 Desa	4.251.000	19 Desa	3.000.000	19 Desa	16.000.000	19 Desa	27.700.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Rekomendasi	7.865.000	19 Rekomendasi	5.000.000	19 Rekomendasi	6.000.000	19 Rekomendasi	5.000.000	19 Rekomendasi	16.000.000	95 Rekomendasi	39.865.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	25.000.000	19 desa	20.000.000	19 desa	20.000.000	19 desa	18.097.000	19 desa	35.601.000	19 desa	118.698.000
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1 Kegiatan	16.000.000	1 Kegiatan	16.000.000
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	kegiatan	-	1 kegiatan	16.000.000	1 kegiatan	16.000.000

JUMLAH		**3.286.136.000**		**3.303.808.000**		**3.427.660.000**		**3.355.936.000**		**3.668.977.000**		**17.042.517.000**

KLATEN , 7 September 2021

CAMAT KARANGDOWO

TOMISILA ADHITAMA, A.P., M.M.

NIP. 197407261993111002

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,833,310,000**					**3,248,967,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,429,810,000**					**2,785,264,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,000,000**					**8,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,198,060,000**					**2,514,264,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	18 Orang/ Bulan	100 %	2,195,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	2,505,264,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta ran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	18 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	9,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**49,000,000**					**57,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	4,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	11,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**47,750,000**					**35,000,000**
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	47,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	35,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,000,000**					**119,000,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	22,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	80,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,000,000**					**52,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	16,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100 %	20,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5,000,000**					**5,929,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5,000,000**					**5,929,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	5,929,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**174,000,000**					**267,774,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**174,000,000**					**267,774,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 %	19 Lembaga Kemasyarakat	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	95 %	12,774,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 %	12 Laporan	100 %	159,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	95 %	255,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**146,000,000**					**120,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**146,000,000**					**120,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	116,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	80,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100 %	40,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10,000,000**					**20,000,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	96 %	40 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	20,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**68,500,000**					**50,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**68,500,000**					**50,000,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	7,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KARANGDOWO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	8,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	7,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	8,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	4 Dokumen	100 %	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Karangdowo, Semua Kelurahan	95 % 97 %	19 Dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Tertib Administrasi Persentase Desa yang Menyelesaikan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Tepat Waktu	95 % 97 %	20,000,000
												TOTAL	**2,833,310,000**					**3,248,967,000**

RENCANA KERJA
KECAMATAN NGAWEN TAHUN 2023

PEMERINTAH KECAMATAN NGAWEN

Jl. KLATEN – JATINOM KM. 4 KLATEN

Telp. (0272) 3354013KLATEN – 57466

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

Halaman

Cover Judul …….....

Kata Pengantar …….. i

Daftar Isi …….. ii

BAB I PENDAHULUAN …… 1
1.1 Latar Belakang ……. 1
1.2 Landasan Hukum ……..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan …… 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ……..... 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (n-1)…….. 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …….. 15
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ……..... 17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..... 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.……..……..... 32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……. 37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……..... 37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah …….. 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……..... 40

BAB V PENUTUP..... 43
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian 43
5.2 Kaidah – kaidah Pelaksananaan……. 43
5.3 Rencana Tindak Lanjut…….. 43

LAMPIRAN ……..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngawen Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada Program dan Kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngawen Tahun 2023 yang dapat kami sajikan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Kecamatan Ngawen mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.

Pembina Tk I

NIP. 19690417 199303 2 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Renja Kecamatan Ngawen Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
52. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaren Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Ngawen Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Ngawen.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat

menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngawen adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja,pagu pendanaan,lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan

Kecamatan Ngawen telah mereviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Ngawen yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hampir semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) atau paling tidak mendekati target (100%), dan untuk kegiatan dengan serapan terendah ada di sub kegiatan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan dengan serapan anggaran 42%.
b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana table di bawah ini.

No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Prosentase
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Urusan Pemerintah wilayah Kecamatan Ngawen yang ditunjang**	**100%**	**100%**	**100%**
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Kesejahteraan ASN Kecamatan Ngawen	100%	100%	100%
		Prosentase Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN Kecamatan Ngawen	100%	100%	100%
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji pegawai negeri	12 bulan	12 bulan	100%
1.1.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	frekuensi perjalanan dinas dalam daerah	20 kali	20 kali	100%

No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Prosentase
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Kesejahteraan ASN Kecamatan Ngawen	100%	100%	100%
		Prosentase Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN Kecamatan Ngawen	100%	100%	100%
1.2.1	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	10 jenis	10 jenis	100%
1.2.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK tersedia	38 jenis	38 jenis	100%
1.2.3	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetakan dan penggandaan	1 jenis	1 jenis	100%
1.2.4	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	makanan dan minuman tersedia	3000 paket	3000 paket	100%
1.2.5	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi perjalanan dinas luar daerah	8 kali	8 kali	100%
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	100%	100%	100%
1.3.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim	2000 surat	2000 surat	100%
1.3.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening terbayar	3 rekening	3 rekening	100%
1.3.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	4 orang	100%
1.4	Kegiatan Pemelihataan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Kondisi Baik	100%	100%	100%
1.4.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara Kec. Ngawen	8 paket	8 paket	100%
1.4.2	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Lingkungan kantor tertata Kec. Ngawen	1 paket	1 paket	100%
1.4.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor terpelihara Kecamatan Ngawen	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah THL pengamanan kantor	1 orang	1 orang	100%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Ngawen yang terkoordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**

No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Prosentase
1.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%
1.1.1	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan pembinaan administrasi tapem	13 desa	13 desa	100%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Ngawen yang terkoordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**
3.1	Kegiatan Koordinasi pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%
3.1.1	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiatan mesrenbang terfasilitasi	1 kali	1 kali	100%
		Kegiatan peningkatan koordinasi administrasi PMD	13 desa	13 desa	100%
		Kegiatan pembinaan administrasi PMD	13 desa	13 desa	100%
		Kegiatan fasilitasi administrasi PMD	13 desa	13 desa	100%
		Kegiatan penyampaian Bankeu di Tingkat Kecamatan terfasilitasi	13 desa	13 desa	100%
		Kegiatan TP PKK terbina	13 desa	13 desa	100%
		Profil desa sekecamatan tersusun	13 desa	13 desa	100%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Ngawen yang terkoordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ngawen	100%	100%	100%
4.1.1	Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kegiatan koordinasi administrasi trantibum	13 desa	13 desa	100%
4.1.2	Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan pembinaan administrasi trantibum	13 desa	13 desa	100%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Urusan Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Ngawen yang terkoordinasi dan terselenggara**	**100%**	**100%**	**100%**
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%

No	Program/kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Prosentase
	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsanaan dan ketahanan Nasional	kegiatan koordinasi administrasi tapem	13 desa	13 desa	13 desa
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Di Wilayah Kecamatan Ngawen**	**100%**	**100%**	**100%**
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
6.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	kegiatan fasilitasi administrasi tapem terlaksana	13 desa	13 desa	100%
6.1.2	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kegiatan intensifikasi PBB di kecamatan	13 desa	13 desa	100%
6.1.3	Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan fasilitasi administrasi trantibum	13 desa	13 desa	100%

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Semua program kegiatan dan Sub kegiatan terlaksana 100%.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja, kurangnya SDM (Personil) Kecamatan Ngawen dan adanya pandemi covid-19.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Ngawen sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Ngawen telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih masih dilayani di Kecamatan Ngawen adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu dan PM Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngawen.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Ngawen telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kirab budaya, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngawen sebagaimana terlihat Tebel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Ngawen dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Ngawen.
    a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Ngawen sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Ngawen.
    b) Sarana dan prasarana yang belum memadai di Kecamatan Ngawen.
    c) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Ngawen hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.
3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

    Tantangan:

    - ✓ Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat komputer, laptop, printer dll sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan;
    - ✓ Jaringan yang kadang tidak stabil sehingga menghambat proses pelayanan;
    - ✓ Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
    - ✓ Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

    Peluang:

    - ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
    - ✓ Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
    - ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan

pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;

- ✓ Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Ngawen terlaksana denganbaik, tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- ✓ Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.
- ✓ Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawen melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.

- ✓ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Ngawen melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
- ✓ Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan rencana kerja PD tahun 2023.
2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosesdur Bottom Up).
3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana terlihat Tabel 2.4

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah :
Kecamatan Ngawen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.159.053.839**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.159.053.839**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1.957.453.839**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1.957.453.839**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp 1.957.453.839	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp 1.957.453.839	

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**75.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**75.100.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	8.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp	10.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp	37.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp	37.100.000	

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	Rp	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	Rp	15.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**94.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**94.000.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp	20.000.000	

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp	72.000.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp**	**32.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp**	**32.500.000**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Rp	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Rp	20.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Rp	12.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penduku	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10 unit	Rp	12.500.000

	atau Bangunan Lainnya					ng Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**9.916.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**9.916.000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**9.916.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**9.916.000**	
7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di	2 laporan	Rp	9.916.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	2 laporan	Rp	9.916.000	

	Kecamatan		Wilayah Kecamatan			di Wilayah Kecamatan		di Wilayah Kecamatan			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYANMASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 41.639.161**	**PROGRAM PEMBERDAYANMASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 56.639.161**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 41.639.161**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 56.639.161**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 10.000.000	

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	Rp 31.639.161	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	Rp 46.639.161	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 134.497.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 163.497.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 99.497.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 99.497.000**	

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	94.497.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp	94.497.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp	5.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp	5.000.000	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp**	**35.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp**	**64.000.000**	

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp	35.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp	64.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp**	**2.975.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp**	**2.975.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**	**Rp**	**2.975.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan**	**100%**	**Rp**	**2.975.000**	

								nasional yang diselenggarakan			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	Rp 2.975.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	Rp 2.975.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 48.373.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 54.373.000**	

		Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**86%**			Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**86%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 48.373.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 54.373.000**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 dokumen	Rp 10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 dokumen	Rp 10.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	Rp 9.373.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayag	13 dokumen	Rp 9.373.000	

								unaan Aset Desa			
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Rp 9.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Rp 15.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 dokumen	Rp 20.000.000	
JUMLAH					Rp 2.396.454.000					Rp 2.446.454.000	

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.

Pembina Tk I

NIP. 19690417 199303 2 008

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

   Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlihat Tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil musrenbang Tahun 2023				
1	Pengerasan Bok Maron sampai dengan Dk. Kalitelu	Desa Ngawen		12 m2 x 10 = 120 m2	
2	Pembangunan Gorong-gorong	Kadus 1,2,3		54 m2	
3	Penataan penerangan jalan umum	Desa Ngawen		28 unit	
4	Pembangunan Talud dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Timur Dukuh Soprayan RT 11 RW 05	Timur Dk.Soprayan RT.11 RW.05		1000	
5	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kahuman		98	
6	Pengaspalan Jalan Dk Gojayan RW.03 sampai DK Kahuman RW.01	Dk Gojayan-Dk Kahuman		1	
7	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	pasar mayungan, ngawen, klaten, Kab. Klaten		200m x 0,75m x 0,75m	
8	Perbaikan Talud DAM Sungai Besar perbatasan Tempursari dan Mayungan	Gelang, Mayungan, Ngawen, Klaten, Kab. Klaten		30m x 0,4m x 4m	

9	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	perempatan SMP 1 Ngawen		8m x 1m x 1,5m	
10	TALUD SELATAN DK. KOKAP - PEREMPATAN TEGAL GELANGAN (DIMORO)	DK. KOKAP - TEGALGELANGAN (RT. 19 - 20)		600 X 1,2 X 0,4 M	
11	PENYERTAAN MODAL BUMDES	DESA SENDEN		1 PAKET	
12	TALUD SLADANGAN (PERBATASAN DS SENDEN - DS GATAK)	DK SENDEN - DS GATAK		275 X 2,5 X 0,4 M	
13	PEMBANGUNAN TALUD SELATAN DUKUH DUWETAN RT 02	SELATAN DUKUH DUWETAN RT 02		120 X 1,5 X 0,35 = 63M3	
14	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI SELATAN DK KARASAN S/D GADING SAWAHAN	SELATAN DK KARASAN RT. 06/RW.03		300 X 1,5 X 0,4 = 180M3	
15	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TEPUS GENTUNGAN	TIMUR DK. TEPUS-GENTUNGAN		300 X 1 X 0,4 = 120M3	
16	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI TARU MEKAR 2	Jl Usaha Tani Taru Mekar 2, Kwaren, Ngawen, Klaten		3 x 280 x 0,1	
17	PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN DI BARAT DK KRANDON	Barat Dk Krandon RW 07, Kwaren, Ngawen, Klaten		1 X 500 X 0,35	
18	PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN TARU MEKAR 1	Utara Dk Kwaren RW 01, Kwaren, Ngawen, Klaten		1 X 500 X 0,35	
19	rehabilitasi pasar tradisional	Dk. Drono Rw.4		1 titik	
20	Pembangunan jalan usaha tani	Timur SD Drono 1		p 1060 m	
21	Pemeliharaan jaringan irigasi	desa DRono		1 tahun	

22	Optimalisasi pemanfaatan	Desa Drono		1 kegiatan	
23	Pembangunan Gorong-gorong & Drainase di jl. Kabupaten	Dk. Mlandang RT. 19, 20 / RW. 09		15 m x 1 m x 0.5 m	
24	Pembangunan jembatan antar Desa Tempursari - Kwaren	Dk. Tempursari RT. 13 / RW. 06		20 m x 4 m x 7 m	
25	Pembangunan jalan tembus Kadipiro - Jembatan Bantengan	Dk. Kadipiro RT. 01 RW. 01		400m x 4 m x 0,1 m	
26	Pembangunan jalan perbatasan Manjung-Duwet	Tuban Kulon Rt 01/10, Manjung		800 m2	
27	Jalan usaha tani Timur Ngriman	Timur Ngriman		800 m2	
28	Pembangunan/ Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (Kwarter)	Desa Manjung			
29	Pengaspalan Jalan	Dk. Krandon RT 01 RW 01		4 x 350	
30	Pengaspalan Jalan	Dk . Pepe RT 05 RW 02		4 X 500	
31	Pembanguan Talud Saluran Irigasi	Dk Tempel RT 12 RW 05		80 cm X 600 M	
32	Rehabilitasi Jalan Citakan Timur Dk. Soran	TIMUR DK SORAN		600x3 m	
33	Rehabilitasi Selatan Dk. Mangsuran, Kab. Klaten	SELATAN DK MANGSURAN		400x3 m	
34	Rehabilitasi Talud Irigasi Barat Dk Duwet	BARAT DK DUWET		350 x 0,4 x 1,2m	
35	Dk Rehabilitasi Gedung Mlandang, Desa Manjungan, Kec. Ngawen	RT 26/RW 10		1 paket	
36	Rehabilitasi Jembatan Penghubung Dk Turasan, Desa Manjungan, Kec. Ngawen	Turasan		1 paket	

37	Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian	Desa Manjungan		1 paket	
38	Pembangunan Talud	Desa Gatak, Jln Usaha Tani, Jembatan Kedung-Gumuk Tengah – P Jadin		1200x1.5x0.4: 720 m3	
39	Pembangunan Talud	Desa Gatak, Selatan Jembatan Kedung - Selatan Jembatan Kokap		800x1x0.4: 320 m3	
40	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Gatak		1 Ls	

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.

Pembina Tk I

NIP. 19690417 199303 2 008

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program kerja dalam Renja Tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten	Rencana Program Tahun 2023
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **“Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Berdaya Sejahtera”.**

Peranan Kecamatan Ngawen sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Ngawen sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptkan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah : ”**Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**”

2. Sasaran

   Sasaran ditetapakan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah :

”**Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan**”

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlihat lampiran 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	83,14
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	54

Klaten, Juli 2022
CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kecamatan Ngawen Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program/kegiatan, indukator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Rencana Kerja (Renja) program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi/sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana pada lampiran.

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya:

1. Kurangnya jumlah pegawai/SDM di Kecamatan Ngawen;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Ngawen tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana Kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Rencana Kerja Kecamatan Ngawen tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/ acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Ngawen merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;

2. Agar kepada semua pegawai selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Ngawen;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.

Pembina Tk I

NIP. 19690417 199303 2 008

LAMPIRAN

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngawen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**Urusan Unsur Pemerintahan**									
7.01	**Bidang Urusan Kecamatan**									
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	100%		100%	100%	100%	100%	61%	61%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun*	100%		-	-	-	100%	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun*	20		-	-	-	4 dokumen	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah dokumen LKjIP tersusun*	5		-	-	-	1 dokumen	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	*Presentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya*	16		12 bulan	12 bulan	100%	16 orang	16	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu*	100%		100%	100%	100%	100%	47%	47%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia*	50		10	10		10 unit	6	12%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia*	100		38	38		20 unit	12	12%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia*	250		1	1		50 eksemplar	21	8%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah kunjungan Tamu Terfasilitasi*	125		3000	3000		25 kali	18	14%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	400					80 kali	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*	100		-	-	-	100%	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang diadakan*	10		-	-	-	4 unit	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100		100%	100%	100%		59	59%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkiri	1250		2000	2000		250 eksemplar	69	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	60		3	3		12 bulan	6	10%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5		4	4		5 orang	5	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100		100%	100%	100%	100%	38	38%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8		8	8		8 unit	2	25%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi / terpelihara	50		20	20		10 unit	5	10%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100		100%	100%	100%	100%	100%	1%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.02 .2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10		13 desa	13 desa	100%	2 jenis	2	20%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase lembaga masyarakat aktif	90%					85%	65%	72%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.03 .2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	13		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	13 desa	13	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.03 .2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	13		13	13	100%	13 desa	13	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%		100%	100%	100%	100%	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.04 .2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5		-	-	-	1 kegiatan	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.7-1.0-0.0-0.22.04.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100%		-	-	-	100%	60%	60%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.04 .2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5		-	-	-	1 Kegiatan	1	20%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	*Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu*	100		-	-	-	94%	58	58%
		Persentase desa tertib administrasi	90		-	-	-	85%	64	71%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	*Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan*	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 .2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	13		13	13	100%	13 desa	13	100%
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 .2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa*	13		-	-	-	13 desa	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 .2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	13		13	13	100%	13 desa	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 .2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	*Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa*	13		-	-	-	13 desa	-	-
7.01.7-1.0-0.0-0.22.7.01.06 .2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya*	13		13	13	100%	13 desa	13	100%

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngawen
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngawen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.159.053.839**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.159.053.839**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1.957.453.839**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1.957.453.839**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp 1.957.453.839	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Rp 1.957.453.839	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 75.100.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 75.100.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 5.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 8.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp 10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Rp 10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 37.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 37.100.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	Rp 15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	Rp 15.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 94.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 94.000.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp 2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp 2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	Rp 20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 72.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp 32.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp 32.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Rp 20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	Rp 20.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Rp 12.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	Rp 12.500.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 9.916.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 9.916.000**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 9.916.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 9.916.000**	
7.01.02.2, 02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	Rp 9.916.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	Rp 9.916.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 41.639.161**	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 56.639.161**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 41.639.161**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 56.639.161**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	39 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 10.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	Rp 31.639.161	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	Rp 46.639.161	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 134.497.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 163.497.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 99.497.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 99.497.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 94.497.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 94.497.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp 5.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	Rp 5.000.000	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp 35.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp 64.000.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 35.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 64.000.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp 2.975.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp 2.975.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**	**Rp 2.975.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**	**Rp 2.975.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	Rp 2.975.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	Rp 2.975.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 48.373.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 54.373.000**	
		Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**86%**			Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**86%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 48.373.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 54.373.000**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 dokumen	Rp 10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	52 dokumen	Rp 10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	Rp 9.373.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 dokumen	Rp 9.373.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Rp 9.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Rp 15.000.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 dokumen	Rp 20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 dokumen	Rp 20.000.000	
JUMLAH					Rp 2.396.454.000					Rp 2.446.454.000	

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.

Pembina Tk I

NIP. 19690417 199303 2 008

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil musrenbang Tahun 2023				
1	Pengerasan Bok Maron sampai dengan Dk. Kalitelu	Desa Ngawen		12 m2 x 10 = 120 m2	
2	Pembangunan Gorong-gorong	Kadus 1,2,3		54 m2	
3	Penataan penerangan jalan umum	Desa Ngawen		28 unit	
4	Pembangunan Talud dan Pengerasan Jalan Usaha Tani Timur Dukuh Soprayan RT 11 RW 05	Timur Dk.Soprayan RT.11 RW.05		1000	
5	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kahuman		98	
6	Pengaspalan Jalan Dk Gojayan RW.03 sampai DK Kahuman RW.01	Dk Gojayan-Dk Kahuman		1	
7	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	pasar mayungan, ngawen, klaten, Kab. Klaten		200m x 0,75m x 0,75m	
8	Perbaikan Talud DAM Sungai Besar perbatasan Tempursari dan Mayungan	Gelang, Mayungan, Ngawen, Klaten, Kab. Klaten		30m x 0,4m x 4m	
9	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	perempatan SMP 1 Ngawen		8m x 1m x 1,5m	
10	TALUD SELATAN DK. KOKAP - PEREMPATAN TEGAL GELANGAN (DIMORO)	DK. KOKAP - TEGALGELANGAN (RT. 19 - 20)		600 X 1,2 X 0,4 M	
11	PENYERTAAN MODAL BUMDES	DESA SENDEN		1 PAKET	
12	TALUD SLADANGAN (PERBATASAN DS SENDEN - DS GATAK)	DK SENDEN - DS GATAK		275 X 2,5 X 0,4 M	
13	PEMBANGUNAN TALUD SELATAN DUKUH DUWETAN RT 02	SELATAN DUKUH DUWETAN RT 02		120 X 1,5 X 0,35 = 63M3	
14	PEMBANGUNAN TALUD IRIGASI SELATAN DK KARASAN S/D GADING SAWAHAN	SELATAN DK KARASAN RT. 06/RW.03		300 X 1,5 X 0,4 = 180M3	
15	PEMBANGUNAN TALUD JALAN TEPUS GENTUNGAN	TIMUR DK. TEPUS-GENTUNGAN		300 X 1 X 0,4 = 120M3	
16	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI TARU MEKAR 2	Jl Usaha Tani Taru Mekar 2, Kwaren, Ngawen, Klaten		3 x 280 x 0,1	
17	PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN DI BARAT DK KRANDON	Barat Dk Krandon RW 07, Kwaren, Ngawen, Klaten		1 X 500 X 0,35	
18	PEMBANGUNAN IRIGASI PERTANIAN TARU MEKAR 1	Utara Dk Kwaren RW 01, Kwaren, Ngawen, Klaten		1 X 500 X 0,35	
19	rehabilitasi pasar tradisional	Dk. Drono Rw.4		1 titik	
20	Pembangunan jalan usaha tani	Timur SD Drono 1		p 1060 m	
21	Pemeliharaan jaringan irigasi	desa DRono		1 tahun	
22	Optimalisasi pemanfaatan	Desa Drono		1 kegiatan	
23	Pembangunan Gorong-gorong & Drainase di jl. Kabupaten	Dk. Mlandang RT. 19, 20 / RW. 09		15 m x 1 m x 0.5 m	
24	Pembangunan jembatan antar Desa Tempursari - Kwaren	Dk. Tempursari RT. 13 / RW. 06		20 m x 4 m x 7 m	
25	Pembangunan jalan tembus Kadipiro - Jembatan Bantengan	Dk. Kadipiro RT. 01 RW. 01		400m x 4 m x 0,1 m	
26	Pembangunan jalan perbatasan Manjung-Duwet	Tuban Kulon Rt 01/10, Manjung		800 m2	
27	Jalan usaha tani Timur Ngriman	Timur Ngriman		800 m2	
28	Pembangunan/ Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (Kwarter)	Desa Manjung			
29	Pengaspalan Jalan	Dk. Krandon RT 01 RW 01		4 x 350	
30	Pengaspalan Jalan	Dk . Pepe RT 05 RW 02		4 X 500	
31	Pembanguan Talud Saluran Irigasi	Dk Tempel RT 12 RW 05		80 cm X 600 M	
32	Rehabilitasi Jalan Citakan Timur Dk. Soran	TIMUR DK SORAN		600x3 m	
33	Rehabilitasi Selatan Dk. Mangsuran, Kab. Klaten	SELATAN DK MANGSURAN		400x3 m	
34	Rehabilitasi Talud Irigasi Barat Dk Duwet	BARAT DK DUWET		350 x 0,4 x 1,2m	
35	Dk Rehabilitasi Gedung Mlandang, Desa Manjungan, Kec. Ngawen	RT 26/RW 10		1 paket	
36	Rehabilitasi Jembatan Penghubung Dk Turasan, Desa Manjungan, Kec. Ngawen	Turasan		1 paket	
37	Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian	Desa Manjungan		1 paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	Pembangunan Talud	Desa Gatak, Jln Usaha Tani, Jembatan Kedung-Gumuk Tengah – P Jadin		1200x1.5x0.4: 720 m3	
39	Pembangunan Talud	Desa Gatak, Selatan Jembatan Kedung - Selatan Jembatan Kokap		800x1x0.4: 320 m3	
40	Penyertaan Modal BUMDes	Desa Gatak		1 Ls	

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	83,14
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	54

Klaten, Juli 2022

CAMAT NGAWEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN NGAWEN

Ir. ANNA FAJRIA HIDAYATI,M Si.
Pembina Tk I
NIP. 19690417 199303 2 008

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,446,454,000**					**2,937,127,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,159,053,839**					**2,456,294,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,957,453,839**					**2,186,528,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	16 orang	100 %	1,957,453,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,186,528,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**75,100,000**					**105,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	1 paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	1 paket	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	2 paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	10,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	1 laporan	100 %	37,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	40,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	2 laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	40,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,000,000**					**100,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	2 laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	36 laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	26,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	12 laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	72,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**32,500,000**					**64,766,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	3 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	49,766,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	10 unit	100 %	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**9,916,000**					**9,881,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**9,916,000**					**9,881,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	2 laporan	100 %	9,916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100.00 %	9,881,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**56,639,161**					**138,334,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**56,639,161**					**138,334,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86 %	39 Lembaga Kemasyarakat	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	86 %	20,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86 %	13 laporan	100 %	46,639,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	86 %	118,334,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**163,497,000**					**271,712,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**99,497,000**					**135,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	12 laporan	100 %	94,497,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100.00 %	125,000,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	12 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100.00 %	10,000,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**64,000,000**					**136,712,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terkoordinasinya Penegakan Perundang-Undangan yang dilakukan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	100.00 %	1 laporan	100 %	64,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100.00 %	136,712,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**2,975,000**					**6,858,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**2,975,000**					**6,858,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	95.00 %	50 orang	100 %	2,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	95.00 %	6,858,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**54,373,000**					**54,048,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**54,373,000**					**54,048,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86.00 % 95.00 %	52 dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	86.00 % 95.00 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN NGAWEN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86.00 % 95.00 %	13 dokumen	100 %	9,373,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	86.00 % 95.00 %	10,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86.00 % 95.00 %	1 dokumen	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	86.00 % 95.00 %	0
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Ngawen, Semua Kelurahan	86.00 % 95.00 %	13 dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	86.00 % 95.00 %	34,048,000
												TOTAL	**2,446,454,000**					**2,937,127,000**

RENCANA KERJA

KECAMATAN KLATEN SELATAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 31 tanggal 12 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Surat Edaran dari Bappedalitbang Klaten Nomor : B/050/192/31, Penyampaian Dokumen RKPD Kab. Klaten Tahun 2023 tertanggal 05 Agustus 2022.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan.

Klaten, Juli 2022.

CAMAT KLATEN SELATAN

SUPARDIYONO, S.IP., M.Si.

Pembina Tk. 1

NIP. 19690919 198903 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 9

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **12**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Akhir Kecamatan Klaten Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Klaten Selatan 29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klaten Selatan 30

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **54**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 54

3.2. Tujuan dan Sasaran Akhir Kecamatan Klaten Selatan 55

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **56**

BAB V. PENUTUP **68**

5.1. Catatan Penting 68

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 68

5.3. Rencana Tindak Lanjut 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Proses dan tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 265 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ditempuh dengan memperhatikan 5 aspek pendekatan perencanaan, yaitu: teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politis dengan berorientasi secara holistik, tematik, integratif dan spasial. Aspek pendekatan perencanaan dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 bersifat strategis, karena dalam proses penyusunan perencanaan didasarkan pada penjaringan aspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Klaten Tahun 2023 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi mulai tahun 2020 adalah munculnya wabah pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan daerah di tahun 2023 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus *corona* di tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023, disusun melalui 4 tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung,

dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja bagi OPD yang di tahun 2021 mengajukan perubahan SOTK;
52. Peraturan terkait standar teknis Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu SPM dengan tata urutan naskah penyusunan dasar hukum menyesuikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Klaten.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Klaten Tahun 2023 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Klaten, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan rencana pembangunan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan evaluasi pelaksanaan Akhir Tahun 2021 serta proyeksi realisasi 2022.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 yaitu:

a. Menyelaraskan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya;
b. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023;
c. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan serta target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan;
d. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023;
e. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Klaten Selatan yang dibagi menjadi 4 sub bab sebagai berikut.

1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Akhir Kecamatan Klaten Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra, pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Akhir SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Akhir SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Akhir SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Klaten Selatan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Klaten Selatan. Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Akhir Kecamatan Klaten Selatan, berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan engan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi pemaparan perumusan program dan kegiatan disertai dengan target kinerja dan pendanaannya.

BAB V Penutup

5.1. Catatan Penting, berisi hal-hal yang penting pada panyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

5.2. Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut, berisi rencana yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klaten Selatan setelah pemyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN AKHIR KECAMATAN KLATEN SELATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Kecamatan Klaten Selatan telah mengadakan evaluasi dari Pelaksanaan kinerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja Tahun berjalan (2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 sebagai berikut.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :
   Program/Kegiatan di Tahun 2021 hampir semua dapat dilaksankan sesuai target. Untuk program dan kegiatan yang belum mencapai target adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target :
   Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Apabila ada yang belum memenuhi target dikarena menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di Tingkat Kabupaten, dan adanya efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Realisasi capaian program/kegiatan sebagai berikut.

Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kecamatan Klaten Selatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Kewilayahan									
Kecamatan									
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**0**	**0**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	70		0	0	0	14	0	0%
7.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	10		0	0	0	2	0	0%
7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	70		12	12	100%	19	19	27%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	60		80	0	0%	0	0	0%
7.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	60		0	0	0	12	0	0%
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	60		0	0	0	12	0	0%
7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	50		10	10	100%	10	20	40%
7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	60		5	5	100%	12	17	28%
7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	5		12	12	100%	1	13	260%
7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	15		0	0	0	3	3	20%
7.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	1125		300	300	100%	225	525	47%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150		0	0	0	30	30	20%
7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang terbeli	2		0	0	0		0	0%
7.01.01.2.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	9		2	2	100%	3	5	56%
7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**	**76%**	**76%**	**100%**	**88%**	**88%**
7.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	2840		660	0	0%	660	660	23%
7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	15		4	4	100%	3	7	47%
7.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	25		3	3	100%	5	8	32%
7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	45		1	1	100%	9	10	22%
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	30		0	0	0	6	6	20%
7.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	15		0	0	0	3	3	20%
7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	8		3	3	100%	2	5	63%
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	25		1	1	100%	5	6	24%
7.01.01.2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	25		2	2	100%	5	7	28%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	**100%**		**0**	**0**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**		**0**	**0**	**0**	**100%**	**0**	**0%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10		0	0	0	2	2	20%
PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	60		1	1	100%	12	13	22%
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	60		12	12	100%	12	24	40%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal**	**10**		**2**	**2**	**100%**	**2**	**4**	**40%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	60		24	24	100%	12	36	60%
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10		0	0	0	2	2	20%
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**25**		**12**	**12**	**100%**	**5**	**17**	**68%**
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25		12	12	100%	5	17	68%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara**	**12**		**12**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	15		24	24	100%	3	27	180%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	**88,50%**		**100%**	**100%**	**100%**	**86%**	**86%**	**97%**
	Persentase desa tertib administrasi	**66,50%**		**100%**	**100%**	**100%**	**65,50%**	**65,50%**	**98%**
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60		13	13	100%	12	25	42%
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	60		0	0	0	12	12	20%
7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60		12	12	100%	12	24	40%
7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	59		12	12	100%	11	23	39%
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11		0	0	0	0	0	0%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	55		0	0	0	11	11	20%
7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23		0	0	0	11	11	48%
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	60		0	0	0	12	11	18%
7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	5		0	0	0	1	1	20%
7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15		0	0	0	3	3	20%

Kelurahan Gayamprit

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Kewilayahan									
Kecamatan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kelurahan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	25		12	0	**0%**	0	0	**0%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	25		4	0	**0%**	0	0	**0%**
7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	28		5	5	**100%**	10	15	**54%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	120		15	15	**100%**	24	39	**33%**
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	23		2	2	**100%**	6	8	**35%**
7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	65		25	25	**100%**	13	38	**58%**
7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	10		2	2	**100%**	2	4	**40%**
7.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	850		40	40	**100%**	170	210	**25%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3		3	3	**100%**	3	6	**200%**
7.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	6		2	2	**100%**	6	8	**133%**
7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1		1	1	**100%**	1	2	**200%**
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	26		2	0	**0%**	5	5	**19%**
7.01.01.2.09.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	11		5	5	**100%**	11	16	**145%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7.01.03.2.02.01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	10		1	1	**100%**	0	1	**10%**
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10		1	1	**100%**	0	1	**10%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga masyarakat di Kelurahan yang diberdayakan	4		2	2	**100%**	4	6	**150%**

Klaten, Juli 2022.
CAMAT KLATEN SELATAN

SUPARDIYONO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19690919 198903 1 003

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja :

Program/kegiatan hampir dapat memenuhi target yang direncanakan dan tidak ada program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan karena beberapa program dan kegiatan terlaksana 100% .

d. Faktor penyebab tidak tercapainya target :

Program/kegiatan di Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan program/kegiatan semakin meningkat, antara lain :

- Lebih fokus dalam efisiensi penggunaan anggaran untuk membantu warga sekitar Kecamatan Klaten Selatan yang terdampak pandemi *Covid-19.*
- Adanya Regulasi dan Pergeseran Kebijakan, karena masih ada kegiatan yang jadwal maupun pelaksanaanya menyesuaikan dengan kegiatan dan jadwal waktu dari tingkat Kabupaten.
- Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, misalnya kendaraan dinas bagi pejabat struktural. dll.

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Target Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dikarenakan adanya program/kegiatan baru yang bersifat *Top Down* dari Tingkat Kabupaten yang belum masuk dalam Renstra Perangkat Daerah., ataupun adanya pergeseran kebijakan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut :

1) Program/kegiatan difokuskan pada Indikator Utama (IKU).
2) Program/kegiatan diutamakan pada kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klaten Selatan.
3) Mempertahankan keberadaan THL untuk demi lancarnya pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan Klaten Selatan sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja.
4) Untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana kita adakan kerja lembur, penambahan tugas atau merangkap beban tugas orang lain serta meningkatkan kerjasama dari unsur pejabat, staf maupun THL. Selain itu mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 masih perlu diadakan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KLATEN SELATAN

Analisis kinerja yang ada di OPD Kecamatan Klaten Selatan dapat dilihat pada sasaran kinerja 0PD yang ada pada Visi dan Misi Kabupaten Klaten, diantaranya yaitu :

a. Peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

   Pelayanan yang dapat secara langsung diberikan kepada masyarakat, antara lain Rekam Data KTP, Pembuatan KK, Pelayanan pindah/mutasi Penduduk dan legalisasi surat – surat yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.
b. Untuk pelaksanaan PATEN di Kecamatan Klaten Selatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih terbatas pemberian rekomendasi/pengantar kepada masyarakat untuk ditindakanjuti ke Kantor Pelayanan Terpadu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Klaten Selatan.
c. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun desa.
d. Melaksanakan *event – event* kebudayaan, kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga maupun kegiatan kesenian di Tingkat Kecamatan
e. Mengikuti kegiatan sosial keagamaan, olah raga, kesenian/kebudayaan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

Pencapaian kinerja Kecamatan Klaten Selatan berdasarkan pencapaian SPM dan IKK adalah sebagi berikut.

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	NIHIL											

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KLATEN SELATAN

a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Klaten Selatan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Klaten Selatan adalah Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Klaten Selatan sehingga :

   1) Menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Klaten Selatan.
   2) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
   3) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.

c. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Klaten Selatan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya demi keamanan perlu diadakan tempat parkir dan tralis pada jendela Kantor Kecamatan Klaten Selatan, peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti MDGs (Millenium Development Goals). Yaitu :

   1) Kinerja menurun tidak bisa maksimal;
   2) Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal;
   3) Usulan- usulan belum semua terpenuhi;
   4) Lokasi tertentu lokasi tertentu sering tergenangi air sehingga usia teknis menjadi pendek.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan:

a) Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebih ditingkatkan dengan cara Pemberian Diklat dan Pelatihan ASN ,walaupun masih terdapat permasalahan;

b) Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

2) Peluang:

a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;

b) Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;

c) Melaksanakan pelatihan , workshoop, study banding secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

d) Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Klaten Selatan terlaksana dengan baik,tertib dan lancar.

e. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1) Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Klaten Selatan mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan Pemuda dan olahraga.

3) Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Klaten Selatan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan.
4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Klaten Selatan melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
5) Urusan Sosial telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

a. Proses pengajukan program dan kegiatan diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran.
b. Untuk meningkatkan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2023 perlu diadakan Review terhadap Rancangan Akhir SKPD yang telah diajukan terlebih dahulu dalam Renja 2022 Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Manju 2023.
c. Alasan Proses Review tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat Tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan Riel Masyarakat (Bottom Up).

Tabel perbandingan antara Rancangan Awal Renja 2023 dan Renja 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan Klaten Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**2.244.069.844**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**2.589.571.475**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**8.200.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**2.050.000**	
7.01.01.2.01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah tersusun	14 Dokumen	6.000.000	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah tersusun	14 Dokumen	1.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	2 Dokumen	1.050.000	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**1.940.652.835**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**2.382.970.475**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	14 Orang	1.931.402.835	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	14 Orang	2.382.970.475	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	2.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	0	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	12 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	12 Dokumen	0	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	12 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	12 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**43.700.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**33.350.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Unit	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 Unit	4.000.000	
7 01 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	12 Unit	11.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	12 Unit	11.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	1 Unit	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	1 Unit	4.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3 Eksamplar	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	3 Eksamplar	2.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	225 Kali	11.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	225 Kali	12.350.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**25.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu**	**100%**	**12.000.000**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Mebel yang diadakan	-	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Mebel yang diadakan	-	0	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	3 Unit	12.000.000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**90.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**87.000.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Surat Terkirim	660 Eksamplar	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Surat Terkirim	660 Eksamplar	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Klaten Selatan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Jenis	20.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Klaten Selatan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Jenis	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	67.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Klaten Selatan	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	5 Orang	67.000.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**136.517.009**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**72.201.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit	58.430.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	9 Unit	15.000.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Mebel terpelihara	6 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Mebel terpelihara	6 Unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	3 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	3 Unit	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	46.587.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit	35.251.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	4.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	5 Unit	2.950.000	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**	**10.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**	**5.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)**	**100%**	**5.000.000**	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	5.000.000	
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95%**	**160.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**95%**	**43.200.000**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95%**	**160.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**95%**	**43.200.000**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	12 Desa	8.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang	12 Desa	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Desa	152.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Desa	35.200.000	
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**96%**	**120.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PROSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**96%**	**94.400.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**96%**	**110.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**96%**	**89.400.000**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	104.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	12 Kegiatan	86.400.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	2 Kegiatan	6.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	2 Kegiatan	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**5 Kegiatan**	**10.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**5 Kegiatan**	**5.000.000**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kegiatan	10.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Kegiatan	5.000.000	
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**100%**	**18.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**100%**	**6.899.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara**	**3 Kegiatan**	**18.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara**	**3 Kegiatan**	**6.899.000**	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	3 Kegiatan	18.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	3 Kegiatan	6.899.000	
07:01:06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase desa tertib administrasi Prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu**	**95% 97%**	**173.760.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase desa tertib administrasi Prosentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan tepat waktu**	**95% 97%**	**107.900.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**95% 97%**	**173.760.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Klaten Selatan**	**Prosentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**95% 97%**	**107.900.000**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Desa	12.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Desa	12.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa terfasilitasi lomba administrasi pemerintahan desa	12 Desa	62.260.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa terfasilitasi lomba administrasi pemerintahan desa	12 Desa	12.000.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	12 Desa	6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	12 Desa	6.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Desa	6.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Desa	6.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desanya	2 Desa	10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihan kepala desanya	2 Desa	22.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Desa	6.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	11 Desa	6.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Desa	4.500.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Desa	7.900.000	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	12 Desa	57.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	12 Desa	26.000.000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 Desa	5.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 Desa	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Desa	5.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Klaten Selatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Desa	5.000.000	
					2.726.829.844					2.846.970.475	

Kelurahan Gayamprit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Gayamprit**	**PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**945.004.328**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kelurahan Gayamprit**	**PROSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**164.200.000**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**793.640.328**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**0**	**0**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Gayamprit	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	5 Orang	788.705.328	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Gayamprit	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	0	0	0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Gayamprit	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	5 Bulan	4.935.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan Gayamprit	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	0	0	0

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**1**	**22.503.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**34.500.000**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	5 Unit	1.100.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	4.000.000	
7 01 01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	24 Unit	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	8.500.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Unit	1.050.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	13 Unit	2.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	3.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	2 Eksamplar	1.953.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	Kelurahan Gayamprit	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	170 Kali	10.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	16.000.000	
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**0**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**8.500.000**	
7 01 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.500.000	
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**1**	**96.915.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**107.800.000**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	1.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gayamprit	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Jenis	15.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	14.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	8.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gayamprit	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	6 Orang	80.955.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	84.350.000	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**1**	**31.946.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**13.400.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	1 Unit	2.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Mebel terpelihara	5 Unit	1.050.000	Pemeliharaan Mebel	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	5.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	11 Unit	28.796.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	8.400.000	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Gayamprit**	**PROSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1**	**475.480.950**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase lembaga masyarakat aktif**	**95%**	**135.800.000**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**1**	**475.480.950**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kelurahan Gayamprit**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**95%**	**135.800.000**	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	2 Kegiatan	5.576.550	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	2 Unit	344.820.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	0	0	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Lembaga masyarakat di Kelurahan yang diberdayakan	4 Lembaga	125.084.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gayamprit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	135.800.000	
					1.420.485.278					300.000.000	

Klaten, Juli 2022.
CAMAT KLATEN SELATAN

SUPARDIYONO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19690919 198903 1 003

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing–masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan di Kecamatan Klaten Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jl Empu Sedah Dk Gatak Sumberejo Klaten Selatan	Rehabilitasi Jalan	1700 m	
2	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jln Tidar Dukuh Karangasem, Kab. Klaten	Rehabilitasi Jalan	900 x 2 m	
3	Rehabilitasi jalan kabupaten	Desa Trunuh	Rehabilitasi Jalan	1700 x 4,5 m	
4	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan primer dan sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir) sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)	Metuk Lor Desa Tegalyoso	Rehabilitasi Jalan	20 x 300 m	
5	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	RT 02 RW 07 DUKUH KAJORAN, DESA KAJORAN, KEC.KLATEN SELATAN, Kab. Klaten	Rehabilitasi Jalan	300 M X 3 M	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	Dk Senden - Danguran Kidul - Puri Hutama Desa Danguran	Rehabilitasi Jalan	600 X 3.5 meter	
7	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan primer dan sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir) sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)	RW 03 Desa Merbung	Rehabilitasi Jalan	1 titik	
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan primer dan sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)	Desa jetis, Kab. Klaten, Klaten Selatan, Jetis	Rehabilitasi Jalan	330 m3	
9	Pembangunan IPAL Komunal (Limbah Domestik) Skala Permukiman	Dukuh Pokoh, Nglinggi, Kab. Klaten	Rehabilitasi Jalan	1 Paket	
10	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Talud sabuk Damaran RW.II dan RW III	Rehabilitasi Jalan	P = 1200 m L= 1 m T = 1 m	
11	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Sungai Kuning sebelah RSUD Bagas Waras, Kab. Klaten	Rehabilitasi Jalan	P : 1.110 m ; L : 1 m ; t : 5 m	
12	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Sawah Tanah Kas Desa, Kab. Klaten	Rehabilitasi Jalan	325x1x0,4 m	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten ***"Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".*** Peranan Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Klaten Selatan adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa

   Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan E-KTP.

b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Prioritas pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nasional	Provinsi	Kabupaten
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas Wilaya, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Klaten Selatan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-2 (dua), yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan sebagai yaitu: *"Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan"*

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Kecamatan Klaten Selatan tahun 2021-2026 yakni :

"Meningkatnya kualitas layanan kecamatan"

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada penuntasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan potensi lokal.

Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023.

Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2022 juga mempertimbangkan prioritas nasional dalam RPJMN 2019 – 2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan di Kecamatan Klaten Selatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9) Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
10) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sedangkan untuk Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan adalah sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

   Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 4.1.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,846,970,475**					**2,791,291,239**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,589,571,475**					**2,261,507,239**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,050,000**					**14,800,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen 0 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,400,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,400,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,382,970,475**					**2,002,402,835**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang	100 %	2,382,970,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,002,402,835
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,350,000**					**37,700,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	100 %	12,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12,700,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,000,000**					**0**
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**87,000,000**					**87,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	67,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	67,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,201,000**					**119,604,404**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	9 unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	58,430,000
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	35,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	29,174,404
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5,000,000**					**12,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5,000,000**					**12,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publiknya (PATEN)	100 %	12,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**43,200,000**					**168,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**43,200,000**					**168,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 %	12 Lembaga Kemasyarakat	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	8,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 %	12 Laporan	100 %	35,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	160,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**94,400,000**					**122,500,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**89,400,000**					**110,500,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesi di Wilayah Kecamatan	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	96 Persen	12 Laporan	100 persen	86,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 Persen	104,500,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonaisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarkat	Prosentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	96 Persen	12 Laporan	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 Persen	6,000,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**5,000,000**					**12,000,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	96 %	5 Laporan	5 Kegiatan	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	12,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6,899,000**					**24,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6,899,000**					**24,000,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	100 %	6,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Potensi Konflik Sosial di Kecamatan yang Tertangani	100 %	24,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**107,900,000**					**203,284,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**107,900,000**					**203,284,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	12,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	63,784,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	6,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	20,000,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	6,000,000
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	100 %	7,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	4,500,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	75,000,000
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kecamatan Klaten Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	12 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	5,000,000
TOTAL													**2,846,970,475**					**2,791,291,239**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kelurahan Gayamprit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**300,000,000**					**303,206,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**164,200,000**					**167,406,000**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**34,500,000**					**34,600,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	10 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,200,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	34 Paket	100 %	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,600,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	6 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	3,100,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	13 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,200,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	50 Laporan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	16,500,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,500,000**					**8,800,000**
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	1 Unit	1 Unit	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,800,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**107,800,000**					**110,106,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100 %	500 Laporan	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,100,000

8/7/22

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

Kelurahan Gayamprit

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100 %	3 Laporan	100 %	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100 %	11 Laporan	100 %	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	8,800,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100 %	6 Laporan	100 %	84,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	85,206,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**13,400,000**					**13,900,000**
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	6 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,100,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	100.00 %	11 Unit	100 %	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,800,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**135,800,000**					**135,800,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**135,800,000**					**135,800,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Gayamprit	95.00 %	4 Pokmas/ Ormas	100 %	135,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	135,800,000
												TOTAL	**300,000,000**					**303,206,000**

Klaten, Juli 2022.
CAMAT KLATEN SELATAN

SUPARDIYONO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19690919 198903 1 003

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program di Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya SDM / pegawai yang ada di Kecamatan Klaten Selatan.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klaten Selatan Tahun 2023 sesuai sasaran dan dilaksanakan tepat waktu, maka perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 memuat program dan kegiatan di Kecamatan Klaten Selatan beserta rencana anggaran pelaksanaannya.
2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Kecamatan Klaten Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023 sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka seluruh pejabat dan masyarakat dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi seluruh pihak yang luas dalam perumusan kebijakan publik

akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah - langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terwujudnya partisipasi aktif semua pihak Kecamatan Klaten Selatan dalam kegiatan pembangunan.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Klaten, Juli 2022.
CAMAT KLATEN SELATAN

SUPARDIYONO, S.IP., M.Si.
Pembina Tk. 1
NIP. 19690919 198903 1 003

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN DELANGGU
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
KLATTEN TAHUN 2022

JL. Raya Delanggu Utara No. 60 Telp. 551004 Delanggu
KLATEN - 57471

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Delanggu Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Delanggu yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Delanggu tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Delanggu Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022-2026 Kecamatan Delanggu.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dapat tersusun. Perlu disadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Delanggu, Juli 2022

CAMAT DELANGGU

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA

Pembina

NIP. 196805101993031017

DAFTAR ISI

		Halaman
Cover		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Landasan Hukum	I-2
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-9
1.4.	Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1.	Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1).....	II-1
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-5
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	II-6
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-8
2.5.	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	II-9
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-1
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1 Hal – Hal Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian		V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan		V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut		V-1
LAMPIRAN		

BAB I

PEDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan,
b. penyusunan rancangan awal,
c. penyusunan rancangan,
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
e. perumusan rancangan akhir, dan
f. penetapan.

Rancangan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Delanggu Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Delanggu Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Delanggu.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4 SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Delanggu adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Delanggu telah mereviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 - 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Delanggu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana

1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. Hampir semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), dan ada beberapa kegiatan yang target dan realisasinya 53% (Lima puluh tiga) dikarenakan ada pemangaksan anggaran atau refocusing untuk penggulangan covid19.

b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana table di bawah ini.

Tabel. Realisasi Capaian Kinerja Program/kegiatan Kecamatan Delanggu Tahun 2021

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Satuan	Target	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan**	**100%**	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	100

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan di Kecamatan**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelaksana tugas ASN terpenuhi administrasinya	12 Bulan	12 Bulan	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	15 jenis .	15 jenis .	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	6 jenis	6 jenis	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu terfasilitasi	200 Paket	200 Paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi koordinasi dan konsultasi SKPD / Perjalanan Luar Daerah	15 kali	15 kali	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	**100%**	**100%**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayar	Jenis	Jenis	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	**100%**	**100%**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Terpelihara	8 Kali	8 Kali	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara/terehabilitasi	1 Paket	1 Paket	100

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Gedung Kantor terpelihara/terehabilitasi	5 Unit	5 Unit	100
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERBERDAYAKAN**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	16 Desa	16 Desa	100
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbang**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa / Kelurahan	Jumlah desa yang dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	1 Kali	1 Kali	100
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah jenis koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**100%**	**100%**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan Delanggu	16 Desa	16 Desa	100
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Jenis Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Desa	16 Desa	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah jenis koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**100%**	**100%**	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Jenis Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Desa	16 Desa	100
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**100%**	**100%**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Delanggu yang Terkoordinasi dan Terselenggara**	**100%**	**100%**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	16 Desa	16 Desa	100
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pemerintahan Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**100%**	**100%**	
	Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Pemerintahan Desa yang dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**100%**	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	16 Desa	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa terfasilitasi lomba administrasi pemerintahan desa	16 Desa	16 Desa	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	16 Desa	16 Desa	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	16 Desa	100
	Fasilitasi Pernetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan Penataan PKL	7 Desa	7 Desa	100

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada program dan kegiatan terlaksana 100%.

d) Faktor - faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, factor - faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan serta adanya bencana

pandemic Covid-19 dimana setiap pelayanan harus dilakukan secara online, regulasi dan pergeseran kebijakan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom*, diberlakukan system *Work From Home* yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam komunikasi internal, kurangnya sarana perangkat komputer untuk *Zoom* pada masing – masing Pejabat Struktural di Kecamatan Delanggu

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor - faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Delanggu sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Delanggu telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih masih dilayani di Kecamatan Delanggu adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu dan PM Kabupaten Klaten, sambil menunggu

Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Delanggu.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Delanggu telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kirab budaya, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Delanggu dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Delanggu.
    a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Delanggu sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Delanggu.
    b) Sarana dan prasarana yang belum memadai di Kecamatan Delanggu.
    c) Belum semuanya terpenuhi usulan - usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Delanggu hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.
3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
    Tantangan:
    - ✓ Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat komputer, laptop, printer dll sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
    - ✓ Jaringan yang kadang tidak stabil sehingga menghambat proses pelayanan ;
    - ✓ Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

- ✓ Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;

Peluang:

- ✓ Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- ✓ Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya ;
- ✓ Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
- ✓ Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Delanggu terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5) Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- ✓ Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.
- ✓ Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Delanggu melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan

koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.

- ✓ Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Delanggu melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
- ✓ Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja PD tahun 2023.
2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosesdur Bottom Up).
3) Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

   Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana terlihat lampiran 2.4

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing–masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Hasil usulan musrenbangcam Kebonarum Tahun 2023 (Terlampir).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Berdaya Sejahtera".** Peranan Kecamatan Delanggu sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Delanggu sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptkan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah : ”**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**”.

2. Sasaran

Sasaran ditetapakan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah : ”**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan**”.

3. Program

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di Wilayah Kecamatan
2) Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
   2) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
   4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
   5) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   6) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Secara rinci rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana pendanaan tercantum pada ***Lampiran***.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Renja Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun pertama dari Renstra Kecamatan Delanggu Tahun 2021-2026.

Rancangan Renja Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Rancangan Renja program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Rancangan akhir renja dan pendanaan Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Kurangnya jumlah pegawai/SDM di Kecamatan Delanggu ;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Delanggu tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Kecamatan Delanggu tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman / acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Delanggu merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;

2. Agar kepada semua pegawai selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Delanggu;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Delanggu, Juli 2022

CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,734,304,000**					**3,074,857,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,482,684,500**					**2,567,343,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,000,000**					**8,250,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	8 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,250,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,179,304,213**					**2,270,270,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji , Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	14 Orang/bulan	100 %	2,170,304,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,240,591,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji , Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Dokiumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	22,679,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji , Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terbayarnya Gaji , Tunjangan ASN serta tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**45,741,230**					**71,720,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Paket	100 %	3,988,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,200,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	10 Paket	100 %	7,453,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	6 Paket	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	10,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Dokumen	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,520,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	200 Laporan	100 %	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	20,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Administrasi Umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Laporan	100 %	12,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**14,932,500**					**20,000,000**
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Unit	100 %	14,932,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127,523,000**					**123,785,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	800 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	6,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	25,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	7 Laporan	100 %	98,523,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	92,785,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**111,183,557**					**73,318,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	8 Unit	100 %	49,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,750,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Unit	100 %	53,763,557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	31,898,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Unit	100 %	3,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	20,000,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Unit	100 %	4,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,670,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**3,017,000**					**3,953,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**3,017,000**					**3,953,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Laporan	100 %	3,017,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100.00 %	3,953,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**81,377,000**					**230,055,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**81,377,000**					**230,055,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95.00 %	5 Lembaga Kemasyarakat	100 %	11,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	25,743,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95.00 %	16 Laporan	100 %	70,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	204,312,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**108,646,000**					**192,976,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**100,646,000**					**171,976,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinirnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	96.00 %	16 Laporan	100 %	83,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	84,076,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinirnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	96.00 %	16 Laporan	100 %	17,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	87,900,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**8,000,000**					**21,000,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	96.00 %	16 Laporan	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	21,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**7,584,500**					**28,201,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**7,584,500**					**28,201,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terealisasinya Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	96.00 %	160 Orang	100 %	7,584,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	28,201,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**50,995,000**					**52,329,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**50,995,000**					**52,329,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95 % 97 %	16 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	6,000,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95 % 97 %	16 Dokumen	100 %	14,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	24,189,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 97 %	16 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	5,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95 % 97 %	16 Dokumen	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	7,000,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95 % 97 %	16 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN DELANGGU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanakan Desa yang dilakukan Fasilitasi danKoordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	Kab. Klaten, Delanggu, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	5,140,000
												TOTAL	**2,734,304,000**					**3,074,857,000**

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kcamatan Delanggu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**Urusan Unsur Pemerintahan**									
7.01	**Bidang Urusan Kecamatan**									
70101	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	100%					100%		
2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%					100%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	40		8	8	100	8	8,08	20,2
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJiP tersusun	10					2	0,02	0,2
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu**	100%					100%		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16		12	12	100	16	12,16	76
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA,PPTKA,PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	60		12	12	100	12	12,12	20,2
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	25					5	0,05	0,2
2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	100%					100%		

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	75		15	15	100	15	15,15	20,2
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	50					10	0,10	0,2
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	30		6	6	100	6	6,06	20,2
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	1000		200	105	52,5	200	107,00	10,7
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75		15	12	80	15	12,15	16,2
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	100%					100%		
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/Tersedia	20		5	5	100	4	5,04	25,2
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	100%					100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	4000					800	8,00	0,2
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	60		3	3	100	12	3,12	5,2
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	36		7	7	100	7	7,07	19,6
2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara**	100%					100%		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8		8	8	100	8	8,08	101
9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4		1	1	100	1	1,01	25,25
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	15		5	5	100	3	5,03	33,53
70102	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	100%					100%		

202	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%					100%		
2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	10					2	0,02	0,2
70103	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	95%					93%		
2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	100%					100%		
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawaraH Perencanaan Pembangunan Desa	5		1	1	100	1	1,01	20,2
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16		16	16	100	16	16,16	101,0
70104	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAB UMUM**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	97%					96%		
2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	2					2		
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	80		16	16	100	16	16,16	20,2
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16		16	16	100	16	16,16	101,0
2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	1					1		

1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	80		16	16	100	16		
70105	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUN**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	97%					96%		
2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	2					2		
2	Fasilitasi , Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	80		16	16	100	16	16,16	20,2
70106	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu**	98					95		
2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	100					100		
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16		16	16	100	16	16,16	101,0
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16		16	16	100	16	16,16	101,0
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16		16	16	100	16	16,16	101,0
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16		16	16	100	16	16,16	101,0
8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	48					16	0,16	0,3

18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5		7	7	100	1	7,01	140,2

Klaten, Juli 2022
CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				NIHIL								

Klaten, Juli 2022
CAMAT DELANGGU

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 19680510199303101?

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Delanggu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**2.530.217.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**2.482.684.500,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**100%**	**7.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun**	**100%**	**4.000.000,00**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Delanggu	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	8 Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Delanggu	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	8 Dokumen	2.000.000,00	Refokusing
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah dokumen LKJiP tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah dokumen LKJiP tersusun	2 Dokumen	2.000.000,00	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu**	**100%**	**2.267.691.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Pembayaran Gaji, tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu**	**100%**	**2.179.304.213,00**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Delanggu	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	2.240.592.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Delanggu	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	2.170.304.213,00	Refokusing
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Delanggu	Jumlah pembayaran Honor KPA,PPTKA,PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	21.599.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Delanggu	Jumlah pembayaran Honor KPA,PPTKA,PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 Bulan	5.000.000,00	Refokusing
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	5 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	5 Dokumen	1.500.000,00	Refokusing
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Delanggu	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 Dokumen	2.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Delanggu	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1 Dokumen	2.500.000,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**50.200.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**	**45.741.230,00**	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15 unit	4.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	15 unit	3.988.230,00	Refokusing
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Delanggu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10 unit	11.500.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Delanggu	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	10 unit	7.453.000,00	Refokusing
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	6 eksemplar	7.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	6 eksemplar	4.800.000,00	Pergeseran
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	2 eksemplar	2.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	2 eksemplar	2.400.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Delanggu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	200 kali	10.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Delanggu	Jumlah Tamu Terfasilitasi	200 kali	14.400.000,00	Pergeseran
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	14.800.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Delanggu	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	12.700.000,00	Pergeseran
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	**100%**	**16.800.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia**	**100%**	**14.932.500,00**	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Delanggu	Jumlah mebel yang terbeli			Pengadaan Mebel	Kecamatan Delanggu	Jumlah mebel yang terbeli			
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/Tersedia	4 unit	16.800.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan/Tersedia	4 unit	14.932.500,00	Refokusing

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**100%**	**121.784.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tepat waktu**	**100%**	**127.523.000,00**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Delanggu	Jumlah Surat Terkirim	800 eksemplar	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Delanggu	Jumlah Surat Terkirim	800 eksemplar	5.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	24.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	12 bulan	24.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Delanggu	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	7 orang	92.784.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Delanggu	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	7 orang	98.523.000,00	Pergeseran
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara**	**100%**	**66.742.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	**Persentase Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepelihara**	**100%**	**111.183.557,00**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8 unit	49.880.000,00	Pergeseran
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	38.342.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 unit	53.763.557,00	Pergeseran
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	8.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	3.510.000,00	Refokusing
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	5.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	3 unit	4.030.000,00	Pergeseran
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	**100%**	**2.975.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	**100%**	**3.017.000,00**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Delanggu**	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	**100%**	**2.975.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Delanggu**	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	**100%**	**3.017.000,00**	
7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	2.975.000,00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 Jenis	3.017.000,00	Pergeseran
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95**	**223.031.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95**	**81.377.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	**100%**	**223.031.000,00**	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Pemberdayaan	**100%**	**81.377.000,00**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawaraH Perencanaan Pembangunan Desa	1 Desa	22.443.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawaraH Perencanaan Pembangunan Desa	1 Desa	11.245.000,00	Refokusing
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kecamatan Delanggu**	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16 Desa	200.588.000,00	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	16 Desa	70.132.000,00	Refokusing
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**96**	**169.900.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Delanggu**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**96**	**108.646.000,00**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Delanggu**	JPersentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	**2**	**151.900.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Delanggu**	JPersentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	**2**	**100.646.000,00**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sinergitas di Kecamatan	16 Kegiatan	84.946.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah Sinergitas di Kecamatan	16 Kegiatan	83.000.000,00	Pergeseran

7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Delanggu	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Kegiatan	66.954.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Delanggu	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 Kegiatan	17.646.000,00	Refokusing
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	1	**18.000.000,00**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan	1	**8.000.000,00**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Delanggu	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	18.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Delanggu	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	8.000.000,00	Refokusing
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Delanggu	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**96**	**28.358.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Delanggu	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**96**	**7.584.500,00**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Delanggu	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	**2**	**28.358.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Delanggu	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	**2**	**7.584.500,00**	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Delanggu	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	16 Kegiatan	28.358.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Delanggu	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	16 Kegiatan	7.584.500,00	Refokusing
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	**97%**	**42.041.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	**97%**	**50.995.000,00**	
		Kecamatan Delanggu	Persentase desa tertib administrasi	**95%**			Kecamatan Delanggu	Persentase desa tertib administrasi	**95%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**100%**	**42.041.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Delanggu**	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	**100%**	**50.995.000,00**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	5.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Desa	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16 Desa	21.041.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	16 Desa	14.995.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	3.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Desa	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	5.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	16 Desa	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	16 Desa	3.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Delanggu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	16 Desa	3.000.000,00	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan	5.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Delanggu	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Kegiatan	5.000.000,00	
					2.996.522.000,00					**2.734.304.000,00**	

Klaten, Juli 2022
CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

Tabel 2.5

DAFTAR RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA/KECAMATAN DELANGGU KAB KLATEN TAHUN 2023

NO	ASAL USULAN	URUSAN/BIDANG	JENIS USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT
I	**Infrstruktur**				
1	Kepala Ds. Bowan,Kepala Ds. Banaran,Kepala Ds. Sribit,Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan Kepoh, Sribit, dan Krecek	Jalan Rusak	Ds. Bowan, Ds. Banaran, Ds. Sribit, Ds. Krecek
2	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Pengaspalan jalan Kepoh - Juwiring	Jalan Rusak	Ds. Dukuh
3	Kepala Ds. Karang, Kepala Ds. Sribit, Kepala Ds. Delanggu, Kepala Ds. Kepanjen	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan Lingkar Delanggu	Jalan Rusak	Ds. Karang, Ds. Sribit, Ds. Delanggu, Ds. Kepanjen
4	Kepala Ds. Banaran, Kepala Desa Karang	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan YAMP - Sribit	Jalan Rusak	Ds. Banaran, Ds. Karang
5	Kepala Ds. Gatak	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan Simpang Empat BRI Stasiun Delanggu	Jalan Rusak	Ds. Gatak
6	Kepala Ds. Delanggu, Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan Delanggu - Ngentak	Jalan Rusak	Ds. Delanggu, Ds. Krecek
7	Kepala Ds. Kepanjen, Kepala Ds. Gatak, Kepala Ds. Tlobong	Infrstruktur	Pengaspalan Ruas Jalan Kepanjen - Bulan (Perempatan Dutayasa - Segayor)	Jalan Rusak	Ds. Kepanjen, Ds. Gatak, Ds. Tlobong
8	Kepala Ds. Delanggu, Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Pembangunan Lapangan Merdeka (Lapangan, Trotoar & Taman)	Lapangan Tidak Layak	Ds. Delanggu, Ds. Krecek
9	Kepala Ds. Delanggu, Kepala Ds Gatak	Infrstruktur	Rehabilitasi Trotoar Perempatan BRI - Dutayasa	Trotoar Rusak dan Sebagian Belum Ada Trotoar	Ds. Delanggu, Ds. Gatak
10	Kepala Ds. Gatak	Infrstruktur	Pembangunan Trotoar Depan Luwes - Dutayasa	Belum Ada Trotoar	Ds. Gatak
11	Kepala Ds. Sabrang, Kepala Ds. Krecek, Kepala Ds. Mendak	Infrstruktur	Pengaspalan Jalan Delanggu - Polanharjo	Jalan Rusak	Ds. Sabrang, Ds. Krecek, Ds. Mendak
12	Kepala Ds. Bowan, Kepala Ds. Sribit, Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Penerangan Jalan Ruas Jalan Kepoh, Sibit, Krecek	Jalan Gelap Belum Ada Penerangan	Ds. Bowan, Ds. Sribit, Ds. Krecek
13	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Penerangan Ruas Jalan Kepoh - Juwiring	Jalan Gelap Belum Ada Penerangan	Ds. Dukuh
14	Kepala Ds. Karang, Kepala Ds. Sribit, Kepala Ds. Delanggu, Kepala Ds. Kepanjen	Infrstruktur	Penerangan Ruas Jalan Lingkar Barat Delanggu	Jalan Gelap Belum Ada Penerangan	Ds. Karang, Ds. Sribit, Ds. Delanggu, Ds. Kepanjen

15	Kepala Ds. Kepanjen, Kepala Ds. Gatak, Kepala Ds. Tlobong	Infrstruktur	Penerangan Ruas Jalan Dutayasa - Sigayor	Jalan Gelap Belum Ada Penerangan	Ds. Kepanjen, Ds. Gatak, Ds. Tlobong
16	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Penyedian Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Ada Rambu-rambu Jalan	Jl. Kepoh - Juwiring, Ds. Dukuh
17	Kepala Ds. Bowan, Kepala Ds. Banaran, Kepala Ds. Sribit, Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Talud Jalan Kepoh - Sribit - Krecek	Jalan Terkikis Karna Belum Ada Talud	Ds. Bowan, Ds. Banaran, Ds. Sribit, Ds. Krecek
18	Kepala Ds. Sabrang, Kepala Ds. Krecek, Kepala Ds. Mendak	Infrstruktur	Talud Jalan Nglajur - Mendak	Jalan Terkikis Karna Belum Ada Talud	Ds. Sabrang, Ds. Krecek, Ds. Mendak
19	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Talud Jalan Kepoh - Juwiring	Jalan Terkikis Karna Belum Ada Talud	Ds. Dukuh
20	Kepala Ds. Gatak	Infrstruktur	Pembuatan Saluran Air Simpang Empat BRI - Jalan Stasiun Delanggu (Tikungan Pasar Ngeseng)	Sering Terjadi Banjir Karna Belum Ada Saluran Air	Ds. Gatak
21	Kepala Ds. Sribit	Infrstruktur	Talud Irigasi Sungan Siguyangan	Irigasi Kurang Lancar	Ds. Sribit
22	Kepala Ds. Kepanjen, Kepala Ds. Gatak,	Infrstruktur	Talud Irigasi Sungai Ipik	Irigasi Kurang Lancar	Ds. Kepanjen, Ds. Gatak
23	Kepala Ds. Sribit, Kepala Ds. Bowan, Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Penyedian Sarpras TPS 3R	belum ada TPS	Ds. Sribit, Ds. Bowan, Ds. Krecek
24	Kepala Ds. Sribit	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Masjid YAMP - Sribit
25	Kepala Ds. Delanggu	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Jalur Lingkar Barat Delanggu, Kab. Klaten
26	Kepala Ds. Krecek	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Ruas Jalan Nglajur - Gayam, Kab. Klaten
27	Kepala Ds. Sribit	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Ruas Jalan Delanggu - Ngentak, Kab. Klaten

28	Kepala Ds. Karang	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Ds. Karang
29	Kepala Ds. Bowan	Infrstruktur	Pembangunan TPS/ TPS-3R	belum ada TPS	RW. 02 Dk. Ngranyu, Ds. Bowan, Kab. Klaten
30	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (PJU, Marka, Guadril, Cermin dst.)	Belum Tersedia Rambu-rambu Lalu Lintas	Ds. Dukuh
31	Kepala Ds. Dukuh	Infrstruktur	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Rusak	Ds. Dukuh
32	Kepala Ds. Karang	Infrstruktur	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Rusak	Ngangkruk Sampai Kantor Desa Dk. Nojiwan RT 04/ RW 02, Kab. Klaten
33	Kepala Ds. Kepanjen	Infrstruktur	Pembangunan TPS/ TPS-3R		Tanon RT 01/ RW 05 Kab. Klaten
34	Kepala Ds. Kepanjen	Infrstruktur	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Primer dan Sekunder (Dari Bangunan Utama Sampai Dengan Bangunan akhir) Sekunder (Bangunan	Irigasi macet	Dk. Kepanjen RT 01/ RW 03, Kab. Klaten
35	Kepala Desa Kepanjen	Infrstruktur	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan rusak	Desa Kepanjen
36	Kepala Ds.Krecek	Infrstruktur	Pembangunan TPS/ TPS-3R	Belum TPS	Barat Makam Mranggen , Kab. Klaten
37	Kepala Desa Mendak	Infrstruktur	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengolahan Persampah	Belum Ada Pengolahan sampah warga Buang Sampah Sembarangan	Ds. Mendak
38	Kepala Ds. Tlobong	Infrstruktur	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengolahan Persampah	Belum Ada Pengolahan sampah warga Buang Sampah Sembarangan	Ds. Tlobong
39	Kepala Ds. Kepanjen	Infrstruktur	Penyediaan sarana dan Prasarana Pengolahan Persampah	Sarana dan Prasarana Kurang Memadai	Ds. Tlobong
II	**Sosial Budaya**				

40	Kepala Ds. Karang	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Belum Ada Turus Jalan	Ds. Karang
41	Kepala Ds. Gatak	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Mendukung Kegiatan PKK Mengenai HATINYA PKK	Ds. Gatak
42	Kepala Ds. Kepanjen	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Taman di Beberapa RT Sudah Terbangun Tetapi Untuk Bibit Tanamannya Belum Terpenuhi	Ds. Kepanjen
43	Kepala Ds. Sabrang	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Penghijauan Jalan Persawahan Ds. Sabrang	Karangmojo RW 09 Ds. Sabrang
44	Kepala Ds. Sribit	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Kuranganya Pemanfaatan Pekarangan	Ds. Sribit RW 01 s/d 07
45	Kepala Ds. Sribit	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Kuranganya Pemanfaatan Pekarangan	Ds. Sribit RT 01 & 2, RW 04
46	Kepala Ds. Tlobong	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Belum Banyak Pohon Yang Ditanam	Ds. Tlobong
47	Kepala Ds. Tlobong	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Dk. Pacaran Yang Belum Memiliki Fasilitas RTH Untuk Bermain Anak-anak	Dk. Pacaran RW 07 Desa Tlobong
48	Kepala Ds. Tlobong	Sosial Budaya	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	Belum Adanya RTH Bagi Warga Dk. Kalitengah Yang Sebelumnya Sebagai Tempat Sampah	Dk. Kalitengah RW 08 Ds. Tlobong

49	Kepala Ds. Krecek	Sosial Budaya	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Saat ini Desa sudah ada team tanggap bencana, tetapi belum pernah dilatih untuk menghadapi situasi berbagai macam bencana. Kami mohon untuk dilaksanakan pelatihan	Ds. Krecek
50	Kepala Ds. Karang	Sosial Budaya	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	kurang siapnya warga dalam pencegahan bencana	Ds. Karang
51	Kepala Ds. Krecek	Sosial Budaya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Desa Krecek mulai merintis menjadi desa wisata dengan membangun beberapa sarana dan prasarana menuju desa wisata. Masih dibutuhkan pelatihan untuk Pokdarwis sehingga pengelolaannya bisa maksimal	Ds. Krecek
52	Kec. Delanggu	Sosial Budaya	Festival Budaya & Kesenian		Kec. Delanggu
53	Kec. Delanggu	Sosial Budaya	Sekolah Inklusi (Difabel)		Kec. Delanggu
III	**Ekonomi**				
54	Kepala Ds. Gatak	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Kurangnya Kesadaran Warga mengenai Pengelolaan Sampah di Desa	Ds. Gatak
55	Kepala Ds. Sribit	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Kurangnya Kesadaran Warga mengenai Pengelolaan Sampah di Desa	Desa Sribit Rw 04
56	Kepala Ds, Butuhan	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Kurangnya Kesadaran Warga mengenai Pengelolaan Sampah di Desa	Dk. Sakung Ds. Butuhan
57	Kepala Ds. Tlobong	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Kurangnya Kesadaran Warga mengenai Pengelolaan Sampah di Desa	Dk. Pacaran (TPA) Ds. Tlobong
58	Kepala Ds. Krecek	Ekonomi	Pelatihan e-commerce dan digital marketing	Banyak usaha kecil yang belum memahami digital marketing	dk. Nghablak

59	Kepala Ds. Krecek	Ekonomi	Pelatihan e-commerce dan digital marketing	Banyak usaha kecil yang belum memahami digital marketing	Ds. Krecek
60	Kepala Ds. Jetis	Ekonomi	Pelatihan dan pendampingan industri kecil menengah, makanan olahan	kelompok industri kecil belum mendapatkan pelatihan	Ds. Jetis
61	Kepala Ds. Mendak	Ekonomi	Pelatihan pendampingan calon wirausaha (handycraft)	terselenggara sarana prasarana usaha micro, keci, dan menengah	Ds. Mendak
62	Kepala Ds. Banaran	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Perlunya pendampingan pengolahan sampah	Ds. Banaran
63	Kepala Ds. Bowan	Ekonomi	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Perlunya pendampingan pengolahan sampah	Ds. Bowan
64	Kepala Desa Butuhan	Ekonomi	Pelatiahan Teknologi Bagi aparat pemerintah desa	peningkatan kapasitas penggunaan komputer TI	Ds.Butuhan
	Kepala Ds. Sabrang	Ekonomi	Pemberian bantuan Bibit Tanaman (cengkeh, kopi,lada, alpukat, kelengkeng jahe	pendampingan dan pengolahan	Ds. Sabrang

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Propinsi Kabupaten
Dengan Usulan Renja Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN KLATEN
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reforasi Birokrasi

Klaten, Juli 2022
CAMAT DELANGGU

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	81,00
2		Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	51,38

Klaten, Juli 2022
CAMAT DELANGGU

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN DELANGGU KLATEN

Drs. JOKO SUPARJA
Pembina
NIP. 196805101993031017

RENCANA KERJA 2023

KECAMATAN JUWIRING

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Juwiring yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Juwiring Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring Tahun 2023 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Kecamatan Juwiring.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga Renja Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring tahun 2023 dapat tersusun. Perlu disadari masih banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Juwiring, 17 Mei 2022

CAMAT JUWIRING

HERLAMBANG JAKA SANTOSA,SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650806 199302 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 14

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1) 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perngkat Daerah.16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 19

3.1 Telah terhadap Kebijakan Nasional 19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 19

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 21

BAB V PENUTUP 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun untuk periode satu tahun, yang memuat program dan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintahan terendah. Kualitas penyusunan Renja PD sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data informasi. Menganalisis gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Perumusan kegiatan prioritas juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat pada musrenbang.

Prinsip-prinsip penyusunan Renja PD, mempedomani beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
2. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026
3. Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan.

Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Renja Kecamatan Juwiring Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.

50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamnatan Juwiring adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja,pagu pendanaan,lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keterkaitan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring dengan mengacu Rencana Strategis Perangkat Daerah (konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan).
2. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.
3. Terciptanya efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektivitasnya anggaran pendapatan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Juwiring disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB.I Pendahuluan

Pada bagian ini mengemukakan mengenai gambaran penyusunan Renja Perangkat Daerah agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunsn perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah bagi pemangku kepentingan tingkat kecamatan maupun desa.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Renja.

BAB.II Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1) mengacu pada DPA/APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-fator penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, SOP dan SP, maupun terhadap indikator kinerja kunci.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan mengenai :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah..
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program.
4. Tantangan dan peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan direncanakan.

2.4..Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD

Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD antara lain :

1. Review terahadap Usulan Rancangan Awal RKPD lihat tabel 2.4
2. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat lihat tabel 2.5
3. Evluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah Tahun 2022 lihat tabel 2.1

BAB. III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang juga mempertimbangkan analisa rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (n-1)

Kecamatan Juwiring telah melakukan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian Renja tahun berjalan (n-1), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2022–2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Juwiring yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Lampiran III. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahuan 2021 Kabupaten Klaten.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dikarenakan terkendalanya waktu sehingga kegiatan tersebut tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

b) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Tabel. Realisasi Program/kegiatan Kecamatan Juwiring Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TINGKAT REALISASI
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**2.540.322.184**	**2.209.121.140**	87
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.288.607.727	2.012.129.272	88
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.948.000	51.558.850	70
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.843.217	74.213.538	85
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.923.240	71.219.480	78
02	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**69.424.000**	**49.915.000**	**72**

1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.424.000	49.915.000	72
03	**Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**140.058.000**	**105.060.000**	**75**
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	140.058.000	105.060.000	75
04	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**9.650.000**	**375.000**	4
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.650.000	375.000	4
05	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**475.443.072**	**200.716.500**	42
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.200.000	200.716.500	42
	Jumlah	**3.236.742.256**	**2.571.572.640**	**79**

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

Realisasi program/kegiatan yang ada di Renja tahun 2021 Kecamatan Juwiring tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,

Program/kegiatan pada tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja program/kegiatan, namun masih ditemukan adanya beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2021. Faktor – faktor tersebut antara lain : kurangnya kemampuan SDM di Kecamatan Juwiring di bidang IT, sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama laptop dan printer kurangnya koordinasi antar bagian serta terjadinya perubahan kebijakan.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Adanya perubahan kebijakan menyebabkan target capaian program antara Renstra PD tahun 2021 - 2026 dengan Renja PD belum tentu sama.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut diatas

antara lain : telah dilakukan penambahan tenaga baru yang memahami di bidang IT, pengajuan sarana dan prasarana, dan meningkatkan koordinasi antar bagian.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi penilaian dan sorotan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Juwiring sesuai dengan implementasi pelayanan yang telah disusun berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan Juwiring, diantaranya adalah sebagai berikut: pelayanan surat keterangan ahli waris, legalisasi umum, rekomendasi ijin keramaian, surat keterangan usaha, rekomendasi dispensasi nikah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Pelayanan KTP, KK, surat pindah penduduk, SKCK, rekomendasi ijin usaha, rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB).

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Juwiring adalah mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan profesionalisme petugas yang bersangkutan dan sistem pelayanan di kecamatan, dengan tujuan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :
    a. Belum optimalnya kinerja pegawai di Kecamatan Juwiring dikarenakan kurangnya kemampuan di bidang IT.
    b. Minimnya SDM di Kecamatan Juwiring yang sesuai dengan kompetensinya.
    c. Sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Juwiring yang kurang memenuhi (seperti : Printer, dan Laptop).

3) Dampak yang ditimbulkan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).
   a. Terbatasnya personil di bidang pelayanan publik
   b. Keterbatasan kemampuan SDM di bidang IT yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan publik
   c. Terbatasnya sarana prasarana sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan publik
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah meliputi :
   a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan;
   b. Mengoptimalkan sarana prasarana dengan cara melakukan pengajuan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan
   c. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan di Kecamatan Juwiring dengan jalan memberikan kesempatan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

   Adanya beberapa tantangan tersebut diatas diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat, sehingga pelayanan di Kecamatan Juwiring dapat berjalan dengan lancar.
5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   a. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyrakat desa/kelurahan di kecamatan terutama pada kegiatan Musrenbang banyak diusulkan kegiatan namun realisasinya masih jauh dari rencana yang diusulkan. Hal tersebut dikarenakan usulan yang ada belum sesuai dengan RPJMD, sehingga kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi.
   b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terutama pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.

      Adanya kekurangan sarana dan prasarana gedung kantor di Kecamatan Juwiring dapat menghambat kinerja pelayanan masyarakat. Adanya masalah tersebut maka perlu diadakan pengadaan sarana dan prasarana seperti : Laptop / komputer

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1) Proses awal Musrenbang dilakukan melalui tingkat desa, kecamatan kemudian kabupaten. Hal tersebut dapat memunculkan skala prioritas pembangunan di bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya setiap tahun anggaran.
2) Alasan proses tersebut dilakukan yaitu menggunakan prosedur Bottom Up. Prosedur bottom up yaitu mengumpulkan usulan masyarakat tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat dari tingkat bawah.
3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilakukan adalah untuk menganalisis usulan dari masyarakat sehingga dapat menentukan skala prioritas kebutuhan. Memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang mendesak (urgent) dan bermanfaat untuk masyarakat umum, sedangkan usulan yang tidak urgent dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Proses penggalian usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang dimulai dari tingkat desa yang melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat yang ada di setiap dusun. Usulan yang didapatkan dibawa ke forum musrenbangdes.
2) Usulan dari masyarakat yang di dapat dibawa ke forum musrenbangdes sehingga dapat menghasilkan skala prioritas usulan.Kemudian dilakukan penunjukan perwakilan dari desa untuk mengurus usulan tersebut di forum musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dari musrenbang tingkat kecamatan menjadi skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat di tingkat kecamatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menentukan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya danhambatan yang ada dalam kurung waktu tertentu sehingga pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif. Kebijakan yang ada sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".**Dalam hal ini, peranan Kecamatan Juwiring sangat diperlukan yaitu dengan menerapkan kebijakan tersebut dalam upaya mengoptimalkan kinerja Kecamatan Juwiring sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum dalam rangka mengoptimalkan koordinasi di bidang pelayanan administrasi perkantoran, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum, dan tata pemerintahan kecamatan. Sebagai contoh : Pelayanan e-KTP, Penyaluran Bantuan Non Tunai, Pengadaan bahan logistik, dll
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada kecamatan untuk menangani sebagian urusan meliputi perijinan, legalisasi, rekomendasi, dan kewenangan lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Renja Perangkat Daerah adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu-isu strategis daerah yang sedang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**.** Tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Juwiring adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan kinerja SDM di Kecamatan Juwiring dalam hal pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
b. Mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat desa, tata pemerintahan dan ketentraman dan ketertiban umum
c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai di Kecamatan Juwiring

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, triwulanan dan bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut yaitu :

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
d. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Juwiring Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari periode Renstra Kecamatan Juwiring Tahun 2021-2026. Sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Kecamatan Juwiring merencanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 6 program,7 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Rumusan rancangan awal rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kabupaten Klaten, dapat dilihat di Lampiran V.

BAB V

PENUTUP

5.1. Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan / kendala diantaranya :

1. Masih adanya SDM yang kurang memahami di bidang IT dan ketidaksesuaian dengan kemampuan yang dimiliki sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Juwiring Tahun 2023 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Renja SKPD Tahun 2023 yang memuat program/kegiatan dan pagu anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kecamatan
2. SKPD melaksanakan program/kegiatan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya
3. Renja sebagai acuan kerja dan penganggaran dalam melaksanakan tugas.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Juwiring Tahun 2023 dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu adanya rencana tindak lanjut yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Kecamatan Juwiring
2. Mengoptimalkan kinerja SDM di Kecamatan Juwiring sehingga dapat mengikuti perkembangan jaman terutama di bidang IT.
3. Meningkatkan/mempertahankan kinerja yang sudah dilaksanakan
4. Meningkatkan koordinasi antar bagian sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Juwiring, 17 Mei 2022

CAMAT JUWIRING

HERLAMBANG JAKA SANTOSA,SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650806 199302 1 002

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Juwiring

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec.Juwiring**			**2.486.961.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec.Juwiring**			**2.506.961.000**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**2.144.618.639**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**2.144.618.639**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.144.618.639	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.144.618.639	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**123.144.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**123.144.000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.144.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	123.144.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**74.080.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Juwiring**			**94.080.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.080.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.080.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	58.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	

4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Juwiring**			**104.579.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Juwiring**			**104.579.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.579.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	60.579.000	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Juwiring**			**40.539.361**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Juwiring**			**40.539.361**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.539.361	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Kec.Juwiring**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.539.361	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kec.Juwiring**	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	2.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**Kec.Juwiring**	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	2.000.000	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Juwiring**			**117.487.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Juwiring**			**132.487.000**	
1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec.Juwiring**			**117.487.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec.Juwiring**			**132.487.000**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	40.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec.Juwiring**	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	77.487.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec.Juwiring**	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	92.487.000	
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Juwiring**			**104.171.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec.Juwiring**			**104.171.000**	
1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Juwiring**			**104.171.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Juwiring**			**104.171.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	**Kec.Juwiring**	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	104.171.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	**Kec.Juwiring**	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	104.171.000	
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	
1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Juwiring**			**2.000.000**	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kec.Juwiring**	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100%	2.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kec.Juwiring**	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100%	2.000.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Juwiring**			**21.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Juwiring**			**36.000.000**	
1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Juwiring**			**21.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Juwiring**			**36.000.000**	

	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	2.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	12.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	12.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	2.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	2.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	**Kec.Juwiring**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat	100%	20.000.000	

Klaten, Mei 2022

Camat Juwiring

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN JUWIRING

HERLAMBANG JAKA SANTOSA,SE,M.Si

Pembina Tingkat. I

NIP. 19650806 199302 1 002

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Propi
Dengan Usulan Renja Tahu

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

ɪnsi Kabupaten
n 2023

PRIORITAS KABUPATEN KLATEN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reforasi Birokrasi

Klaten, Mei 2022

Camat Juwiring

HERLAMBANG JAKA SANTOSA,SE,M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19650806 199302 1 002

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai

Klaten, Mei

Camat Juw

HERLAMBANG JAKA S

Pembina Tin

NIP. 19650806 19

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
81
60

2022

viring

SANTOSA,SE,M.Si
ngkat. I
99302 1 002

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,733,619,000**					**3,014,536,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,486,961,000**					**2,775,299,000**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,144,618,639**					**2,400,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	19 Orang/bulan	12 bulan	2,144,618,639	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,400,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**123,144,000**					**117,007,000**
7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	1170 Orang	2 kegiatan	123,144,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	117,007,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**74,080,000**					**98,391,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	30 unit	12 bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	7,566,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	36 eksemplar	12 bulan	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	4,080,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	58 laporan	12 bulan	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	38,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	60 laporan	12 bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	48,745,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**104,579,000**					**110,151,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	12 bulan	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,582,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan llistrik yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	24 laporan	12 bulan	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	39,220,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	12 laporan	12 bulan	60,579,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	60,349,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,539,361**					**49,750,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara serta dibayarkan pajak dan perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	11 unit	12 bulan	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,750,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100.00 %	8 Unit	12 bulan	15,539,361	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	29,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**2,000,000**					**10,289,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**2,000,000**					**10,289,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	10,289,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**117,487,000**					**90,139,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**117,487,000**					**90,139,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	95.00 %	5 lembaga	12 bulan	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	30,800,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN JUWIRING

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	95.00 %	5 laporan	12 bulan	77,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	59,339,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**104,171,000**					**93,135,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**104,171,000**					**93,135,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	96.00 %	12 Laporan	12 bulan	104,171,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	93,135,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**2,000,000**					**12,053,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**2,000,000**					**12,053,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terealisasinya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	96 %	50 Orang	12 kegiatan	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	12,053,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**21,000,000**					**33,621,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**21,000,000**					**33,621,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	97 %	38 Dokumen	95 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 %	5,733,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	97 %	1 Dokumen	95 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 %	16,884,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	97 %	19 Dokumen	95 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 %	8,279,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kab. Klaten, Juwiring, Semua Kelurahan	97 %	2 Dokumen	95 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	97 %	2,725,000
												TOTAL	**2,733,619,000**					**3,014,536,000**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KEBONARUM
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat serta bimbingan sehingga kami dapat menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan untuk perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten di Tahun 2023.

Kami berharap Rencana Kerja ini dibuat sebagai salah satu bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD dan semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan kearah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Kebonarum

Klaten, Juli 2022

CAMAT KEBONARUM

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN KEBONARUM

H.MUDZAKIR,SE.MM

Pembina

NIP 19609101986031032

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1). 10

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 19

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 22

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 24

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 24

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 27

BAB V PENUTUP 29

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 29

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 29

5.1. Rencana Tindak Lanjut 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum dsempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat

Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kebonarum Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);

49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonarum Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kebonarum.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonarum adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Kebonarum telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi renstra Kecamatan Kebonarum yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Lampiran 1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. Hampir semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%).
b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*

Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonarum

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3/2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		
7.01.01.2.01	**7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%		0	0	0	100%		
7.01.01.2.01.01	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4		0	0	0	4		
7.01.01.2.01.06	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	2		0	0	0	2		

7.01.01.2.02	**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.02.01	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji	15		15	15	100%	15		
7.01.01.2.02.02	7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas	15		15	15	100%	15		
7.01.01.2.02.07	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	2		0	0	0	2		
7.01.01.2.06	**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Persentase Administrasi Perkantoran terlayani** **2. Persentase Sarana Prasarana Kantor terjaga baik**	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.06.01	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	15		15	15	100%	15		
7.01.01.2.06.02	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	2		35	35	100%	2		
7.01.01.2.06.05	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	3		3	3	100%	3		
7.01.01.2.06.06	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2		2	2	100%	2		
7.01.01.2.06.08	7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tersedia	350		300	300	100%	350		

7.01.01.2.06.09	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekwensi perjalanan	120		9	9	100%	120		
7.01.01.2.07	**7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.07.11	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana Pendukung gedung kantor terbeli	4		3	3	100%	4		
7.01.01.2.08	**7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.08.01	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	1200		1200	1200	100%	1200		
7.01.01.2.08.02	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening terbayar	12		4	4	100%	12		
7.01.01.2.08.04	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL perkantoran	7		3	3	100%	7		
7.01.01.2.09	**7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah terpelihara**	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.09.02	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	11		11	11	100%	11		
7.01.01.2.09.06	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	4		0	0	0	4		
7.01.01.2.09.09	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	4		2	2	100%	4		

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	100%		0	0	0%	100%		
7.01.02.2.02	**7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%		0	0	0	100%		
7.01.02.2.02.02	7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2		0	0	0	2		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		
7.01.03.2.01	**7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.03.2.01.01	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	7		1	1	100%	7		
7.01.03.2.01.03	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	7		7	7	100%	7		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	100%		**100%**	**100%**	100%	100%		
7.01.04.2.01	**7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14		14	14	100%	14		

7.01.04.2.01.01	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	7		7	7	100%	7		
7.01.04.2.01.02	7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7		7	7	100%	7		
7.01.04.2.02	**7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7		0	0	0	7		
7.01.04.2.02.01	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7		0	0	0	7		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	95%		**100%**	**95%**	95%	95%		
7.01.05.2.01	**7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan yang Terkoordinasi dan Terselenggara	14		7	7	100%	14		
7.01.05.2.01.02	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	7		7	7	100%	7		

7.01.05.2.01.05	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7		0	0	0	7		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95%		**100%**	**95%**	95%	95%		
		Persentase desa tertib administrasi	84%		100%	84%	84%	84%		
7.01.06.2.01	**7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%		100%	100%	100%	100%		
7.01.06.2.01.01	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7	7	7	7	100%	7		
7.01.06.2.01.02	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	7	7	7	7	100%	7		
7.01.06.2.01.03	7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	7	7	7	100%	7		
7.01.06.2.01.05	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	0	0	0	0	7		
7.01.06.2.01.06	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7	0	0	0	0	0		
7.01.06.2.01.07	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	0	0	0	0	7		
7.01.06.2.01.08	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7	0	0	0	0	7		

7.01.06.2.01.11	7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	7	0	7	7	100%	7		
7.01.06.2.01.13	7.01.06.2.01.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	7	0	0	0	0	7		

c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, ada program dan kegiatan terlaksana 100%.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait bencana pandemic Covid-19 dimana setiap pelayanan harus dilakukan secara online, regulasi dan pergeseran kebijakan, kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *Zoom*, diberlakukan system *Work From Home* yang mengakibatkan kurang maksimalnya dalam komunikasi internal, kurangnya sarana perangkat komputer untuk *Zoom* pada masing – masing Pejabat Struktural di Kecamatan Kebonarum.

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya komunikasi langsung antar lembaga, terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Kebonarum sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Namun demikian terkait dengan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Kebonarum telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan

bidang perijinan saat ini Kecamatan Kebonarum hanya bersifat membantu memberikan arahan dalam pengisian aplikasi SOS berbasis website terkait perijinan usaha oleh DPMPTSP Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonarum.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Kebonarum telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, pelayanan Raskin, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan penanggulangan percepatan covid-19 di Desa-Desa melalui penyemprotan disinfektan secara bersama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Kebonarum dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Kebonarum.
    a) Terbatasnya ruang gerak personil Kecamatan Kebonarum karena bencana pandemic Covid-19 yang terkonfirmasi positif covid-19 tinggi, dimana diharuskan untuk tidak bertatap muka dan mengurangi kontak agar tidak terjadi kerumunan antar lembaga demi meminimalisir penyebaran virus covid-19. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya komunikasi yang terjalin.
    b) Pelayanan ke masyarakat kurang maksimal karena kurangnya personil Kecamatan Kebonarum, sehingga masyarakat harus menunggu karena banyaknya personil Kecamatan Kebonarum yang merangkap tugas pelayanan.

c) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebonarum hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten karena *refocusing* untuk penanganan covid-19.

d) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kebonarum sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum terkendala dengan dana desa untuk penanggulangan bencana covid-19;

3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

a. Masih ada masyarakat yang kurang paham dengan berbagai aplikasi pelayanan yang tersedia;
b. Terbatasnya personil kecamatan sehingga penumpukan tugas pada masing-masing personil;
c. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software-Hardware) yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
d. Jaringan Internet sering trobel di desa sehingga menghambat proses pelayanan ;
e. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Kebonarum cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat komputer hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.

Peluang:

a. Mengoptimalkan aplikasi yang ada;
b. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
c. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;

d. Memberikan arahan ke masyarakat untuk menggunakan aplikasi secara online demi pelayanan yang cepat tanpa harus datang ke kantor kecamatan maupun ke kantor Kabupaten ;
e. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Kebonarum terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
    a. Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.
    b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Kebonarum mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan Pemuda dan olahraga.
    c. Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonarum melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.

e. Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap Rencana Kerja PD tahun 2023.
2) Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom-Up).
3) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya. Tabel 2.4 Revie Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Klaten (Terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk

mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Hasil usulan musrenbangcam Kebonarum Tahun 2023 (Terlampir).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".** Peranan Kecamatan Kebonarum sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kebonarum sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Perijinan, Pelayanan perekaman dan pencetkan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tabel. 3.1
Persandingan antara Prioritas Propinsi Kabupaten
Dengan Usulan Renja Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN KLATEN
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reforasi Birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah :

   a. Meningkatkan pelayanan berbasis Online guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal;
   b. Meningkatkan kualitas SDM dan kinerja aparatur kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
   c. Meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dan desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
   d. Meningkatkan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik yang memadai;
   e. Meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum wilayah;
   f. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang tertib administrasi.

2. Sasaran

   Sasaran ditetapakan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut yaitu :

   a. Meningkatnya efektifitas dan efisien birokrasi;
   b. Meningkatnya sarana dan prasarana kantor;
   c. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan sarana prasarana wilayah;
   d. Meningkatnya peran serta masyarakat dan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
   e. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	80,00
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	60,50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kecamatan Kebonarum Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Rencana Kerja program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.
Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program, Kegiatan Dan Pendanaan Yang Akan Dilakukan

01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
03	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan

		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan / kendala, diantaranya :

1. Masih adanya pegawai yang kurang memahami tugas, fungsi dan kewajiban;
2. Masih adanya pegawai yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya;
3. Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonarum tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Kecamatan Kebonarum tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/ acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Kebonarum merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;
2. Agar kepada semua karyawan/karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai

seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;

3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Kebonarum;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Juli 2022
CAMAT KEBONARUM

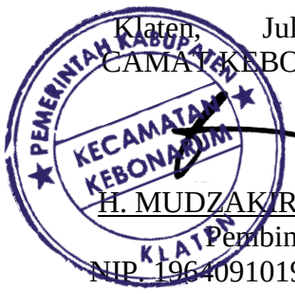

H. MUDZAKIR, SE. MM
Pembina
NIP. 196409101986031032

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,329,284,000**					**2,643,716,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,056,734,000**					**2,402,333,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2,000,000**					**2,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dengan ikhtisar realisasi kinerja skpd tersusun	Terpenuhinya Penyusunan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	2 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,916,283,752**					**2,195,512,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	15 Orang	100 %	1,915,283,752	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,193,512,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	2 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**41,450,248**					**45,216,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	15 Paket	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tersedia	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	35 Paket	100 %	9,350,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	13,216,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	3 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	2 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	1,000,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	350 Laporan	100 %	26,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	15,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,000,000**					**121,105,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	5 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	2 Laporan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	20,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	5 Laporan	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	98,105,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,000,000**					**38,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	11 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	29,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	4 Unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	5,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100.00 %	4 Unit	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	4,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,000,000**					**4,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**1,000,000**					**4,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	100 %	2 Laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100 %	4,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**88,050,000**					**55,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**88,050,000**					**55,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	95.00 %	6 Lembaga Kemasyarakat	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	26,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	95.00 %	7 Laporan	100 %	82,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	29,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**89,400,000**					**93,400,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**89,400,000**					**93,400,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Laporan	100 %	86,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	86,400,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	7,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**37,050,000**					**50,483,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**37,050,000**					**50,483,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN KEBONARUM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	210 Orang	100 %	37,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	50,483,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**57,050,000**					**38,500,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**57,050,000**					**38,500,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Dokumen	96 %	37,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %	10,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Dokumen	96 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %	7,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Dokumen	96 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %	7,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	4 Dokumen	96 %	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %	7,000,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terkoordinasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Kebonarum, Pluneng	96.00 %	7 Dokumen	96 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	96.00 %	7,000,000
												TOTAL	**2,329,284,000**					**2,643,716,000**

RENCANA KERJA TAHUN 2023 KECAMATAN WONOSARI TAHUN 2023

KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosari Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Wonosari Tahun 2023 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Wonosari dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Klaten. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kantor Camat Wonosari masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan dating seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Klaten, Juli 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.

Pembina Tk. I

NIP. 19701128 199003 1 002

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

DAFTAR ISI

Hamalan Judul..... **1**
Daftar isi..... **2**

BAB I Pendahuluan .....
1.1 Latar Belakang..... **3**
1.2 Landasan Hukum..... **5**
1.3 Maksud Dan Tujuan..... **12**
1.4 Sistematika Penulisan..... **13**

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu..... 14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)..... **14**
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... **16**
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... **16**
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD..... **19**
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... **19**

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah..... 21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... **21**
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... **22**

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 23
Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan..... **23**

BAB V Penutup .....
5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian..... **27**
5.2. Kaidah Pelaksanaan..... **27**
5.3. Rencana Tindak lanjut..... **27**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiapPerangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan,
b. penyusunan Rancangan ,
c. penyusunan rancangan,
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
e. perumusan , dan
f. Rancangan .

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat penyusunan

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan , dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun (n+1).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
50. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
51. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Wonosari Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Wonosari.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.
d. Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SITEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Wonosari adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)
2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.9 Review terhadap Rancangan RKPD
2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB V Penutup

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2. Kaidah Pelaksanaan
5.3. Rencana Tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1)

Kecamatan Wonosari telah mereviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021, dan realisasi Renstra Kecamatan Wonosari yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan tahun berjalan.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2021 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%), dan untuk Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan, karena kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi secara online.
b) Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada table **Lampiran Tabel 2.1"Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022".**
c) Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pada tahun 2021 tidak ada program dan kegiatan yang melebihi targer 100%. Semua program kegiatan terlaksana sebesar 100 %.

d) Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya /terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan, Program/Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2021, faktor – faktor penyebabnya antara lain terkait regulasi dan pergeseran kebijakan, kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural, kurangnya SDM (Personil) Kecamatan Wonosari dan adanya pandemi covid-19 yang juga berimbas pada rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19

e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD. Target capaian program Renstra PD tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja) PD. Hal ini dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi saat pembuatan Renstra PD dan pada saat penyusunan Renja.

f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah : Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Wonosari sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) adalah dibagi menjadi dua yaitu pelayanan bidang perijinan dan pelayanan bidang non perijinan.

Terkait dengan pelaksanaan PATEN, di Kecamatan Wonosari telah melaksanakan pada tahun 2021. Terkait dengan pelayanan bidang perijinan yang masih dilayani di Kecamatan Wonosari adalah ijin keramaian utamanya ijin hajatan dan untuk perijinan yang lain hanya bersifat rekomendasi atau memberikan pengantar untuk ditindaklanjuti ke SKPD terkait yaitu ke DPMPTSP Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Wonosari.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan Kecamatan Wonosari telah memberikan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Antara lain pelayanan pembuatan KTP, KK, mutasi penduduk, pelayanan legalisasi masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam kegiatan even-even kebudayaan, gelar seni, dakwah keagamaan, pekan olah raga daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. **Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Wonosari sebagaimana terlihat lampiran 2.2**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1) Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Wonosari dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di KecamatanWonosari yang paling dominan dihadapi di tahun 2021 adalah Pandemi Covid-19. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan ruang gerak dan

ritme penyelenggaraan program kerja Kecamatan Wonosari menjadi terganggu sebagai imbas dari penerapan Protokol Kesehatan, guna menekan penyebaran virus Covid-19. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada rasionalisasi anggaran yang peruntukannya harus dialihkan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa anggaran untuk beberapa subkegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami pengurangan atau bahkan penghilangan anggaran.

3) Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Suitable Development Goals).
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan:

- Jaringan server layanan KTP yang kadang mengalami gangguan sehingga menghambat prosespelayanan ;
- Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sehingga sedikit banyak mempengaruhi kualitas pelayanan PATEN yang diberikan kepada masyarakat;

Peluang:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait atau dalam hal ini DISPENDUKCAPIL Kabupaten Klaten guna mencari solusi yang tercepat dan efisien sehingga masalah jaringan server KTP yang sering mengalami gangguan bisa segera teratasi.
- Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada dan membangun soliditas semua pegawai Kecamatan sehingga semua pegawai bersemangat untuk saling bahu membahu dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan pelayanan terhadap masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut kami berhasil mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik

sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Wonosari terlaksana denganbaik,tertib dan lancar.

5) Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan rencana yang diusulkan.
- Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di Kecamatan.
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Wonosari melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten. Selain itu Kecamatan Wonosari juga berperan aktif dalam membantu Desa mengoptimalkan Undang-undang Desa yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan Desa untuk bisa lebih mandiri dalam hal merencanakan program pembangunan mereka

masing-masing. Hal ini muaranya tentu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

- Urusan Sosial. Telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya. Serta dengan adanya program bantuan logistic kepada masyarakat yang tidak mampu atau terdampak bencana di lingkungan Kecamatan Wonosari.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap Rancangan rencana kerja PD tahun 2023.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya**. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana terlihat lampiran 2.4**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.

2) Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat sebagaimana terlihat lampiran 2.5

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program kerja dalam Renja Tahun 2023 apabila disandingkan dengan Kebijakan Pusat, Kebijakan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023.

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten **"Mewujudkan Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".** Peranan Kecamatan Wonosari sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wonosari sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketetiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau belum dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan e-KTP, Penyaluran Bansos Rastra serta Bantuan Tunai Non Pangan (BNPT)

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebgaian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, Rancangan , penyelanggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 adalah ”**Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan**”

2. Sasaran

   Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien. Adapun sasaran tersebut adalah :”**Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan**”.

   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana terlihat lampiran 3.2

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahun kedua dari Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program / kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/ pagu indikatif tahun 2023. Dibuat sebagai acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran tepat waktu dan tepat manfaat, efiseien dan efektif.

Renja program dan kegiatan dimaksudkan sebagai acuan perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan, lokasi / sasaran, indikator kinerja serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memeperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undagan
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2) Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
9) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Renja dan pendanaan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 4.1 Matriks Pendanaan Ranker Renja 2023**

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Dalam pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

1. Kurangnya SDM di Kecamatan Wonosari
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Pandemi Covid-19yang mungkin saja masih terjadi.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Wonosari tahun 2023 tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD memuat program dan kegiatan SKPD serta pagu pendanaannya;
2. Rencana Kerja Kecamatan Wonosari tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Klaten tahun 2023 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten;
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Wonosari merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam pencapaian kinerja untuk selalu dipertahankan dan ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten merupakan organisasi publik tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan masyarakat;

2. Semua aparatur agar selalu meningkatkan kwalitas diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih;
3. Meningkatnya sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanan tugas di Kecamatan Wonosari;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Klaten, Juli 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.

Pembina Tk. I

NIP. 19701128 199003 1 002

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,092,070,000**					**3,637,979,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,770,069,560**					**3,121,676,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,000,000**					**14,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	6 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	8,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,487,069,560**					**2,753,176,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100.00 %	21 orang	100 %	2,478,069,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	2,724,176,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100.00 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	23,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100.00 %	4 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100.00 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00 %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,000,000**					**66,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	15 unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	1 paket	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	10 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	10 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**24,000,000**					**35,000,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	10,000,000
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**124,000,000**					**131,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	1 laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	13,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	12 laporan	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	28,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintahan daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	87,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	90,000,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**100,000,000**					**122,000,000**
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	8 unit	100 %	51,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	51,000,000
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	6 unit	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	4 unit	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	2 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	25,000,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5,000,000**					**5,950,000**
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5,000,000**					**5,950,000**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhkan pelayanan	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100 %	5,950,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**171,000,440**					**242,084,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**171,000,440**					**242,084,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 %	6 Lembaga	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95 %	35,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 %	1 laporan	100 %	159,000,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95 %	207,084,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**83,000,000**					**118,572,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**77,000,000**					**98,572,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	96 %	1 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	78,572,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	96 %	1 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96 %	20,000,000
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**6,000,000**					**20,000,000**
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Terlaksanannya desa yang dilakukan fasilitasi. rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	96 %	1 Laporan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	96 %	20,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia		Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									Kecamatan		
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10,000,000**					**70,649,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10,000,000**					**70,649,000**
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	96 %	25 orang	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	65,649,000
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	96 %	1 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96 %	5,000,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**53,000,000**					**79,048,000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**53,000,000**					**79,048,000**
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	9,048,000
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	0
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000
7 01 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN WONOSARI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Wonosari, Semua Kelurahan	95 % 97 %	1 laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 % 97 %	10,000,000
								TOTAL	**3,092,070,000**					**3,637,979,000**

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wonosari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wonosari yang ditunjang	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100	0	0	0	0	100	100	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	30	0	0	0	0	6	6	20%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	5	0	0	0	0	1	1	20%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	21	0	21	21	1	21	21	100%

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12	0	12	12	1	12	12	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	20	0	0	0	0	4	4	20%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	5	0	0	0	0	1	1	20%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100	0	100	100	1	100	200	200%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	75	0	20	20	1	15	35	47%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	175	0	35	35	1	35	70	40%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	125	0	35	35	1	5	40	32%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	8	0	0	0	0	0	0	0%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	930	0	30	30	1	130	160	17%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1027	0	6	6	1	10	16	2%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	13	0	0	0	0	1	1	8%
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	15	0	6	6	1	0	6	40%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	4250	0	834	834	1	850	1684	40%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3	0	3	3	1	3	3	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	6	0	6	6	1	6	6	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	8	0	6	6	1	8	8	100%

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	14	0	3	3	1	0	3	21%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	30	0	0	0	0	4	4	13%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4	0	4	4	1	4	4	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	14	0	0	0	0	3	3	21%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	10	0	6	6	1	0	6	60%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100	0	0	0	0	100	100	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100	0	0	0	0	100	100	100%
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	60	0	0	0	0	12	12	20%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	0	100	100	1	100	100	100%

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	90	0	0	0	0	18	18	20%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	90	0	18	18	1	18	36	40%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	5	0	0	0	0	1	1	20%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15	0	3	3	1	3	6	40%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100	0	0	0	0	100	100	100%

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	0	0	0	0	12	12	20%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100	0	0	0	0	100	100	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100	0	0	0	0	100	100	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	0	0	0	0	1	1	20%
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90	0	0	0	0	18	18	20%

07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100	0	100	100	1	100	100	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	90	0	0	0	0	18	18	20%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	90	0	18	18	1	18	36	40%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	90	0	0	0	0	18	18	20%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	90	0	0	0	0	18	18	20%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18	0	0	0	0	0	0	0%

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	90	0	0	0	0	18	18	20%
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	80	0	0	0	0	8	8	10%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	72	0	0	0	0	0	0	0%
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4	0	0	0	0	0	0	0%

Klaten, Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.
Pembina Tk. I
NIP. 19701128 199003 1 002

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wonosari
Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

Klaten, Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.
Pembina Tk. I
NIP. 19701128 199003 1 002

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah :

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Wonosari	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.044.458.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Wonosari	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.770.069.560	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	10.000.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.752.458.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.487.069.560	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	2.723.458.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Wonosari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	2.478.069.560	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	23.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	3.000.000	
07.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 dokumen	3.000.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	34.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100%	25.000.000	

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 unit	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 unit	3.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.000.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 eksemplar	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	
07.01.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.000.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	5.000.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	24.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	24.000.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	4.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Wonosari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	4.000.000	

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	20.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	124.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100%	124.000.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	27.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	87.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	51.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	51.000.000	

7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Wonosari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	2.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	11.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	11.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Wonosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wonosari	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	5.950.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wonosari	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	5.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%	5.950.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	100%	5.000.000	

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 jenis	5.950.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 dokumen	5.000.000	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wonosari	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	228.049.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wonosari	Persentase lembaga masyarakat aktif	95%	171.000.440	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonosari	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	228.049.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wonosari	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	171.000.440	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 dokumen	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	12.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	193.049.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	159.000.440	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wonosari	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	118.982.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wonosari	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96%	83.000.000	

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonosari	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	98.982.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonosari	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	77.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	78.982.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	72.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	20.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	5.000.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100%	20.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	100%	6.000.000	

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	20.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	6.000.000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wonosari	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	100%	29.746.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wonosari	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96%	10.000.000	
7 01 05 2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100%	29.746.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wonosari	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	100%	10.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 orang	24.746.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wonosari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 orang	5.000.000	

7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	5.000.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	5.000.000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonosari	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 %97 %	79.322.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wonosari	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95 %97 %	53.000.000	
7 01 06 2.0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonosari	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	79.322.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonosari	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100%	53.000.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	5.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	5.000.000	

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	5.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	9.322.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	4.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	19.000.000	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	3.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	10.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dokumen	5.000.000	

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wonosari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	2.000.000	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1 laporan	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wonosari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	1 laporan	5.000.000	
TOTAL					3.506.507.000					3.092.070.000	

Klaten, Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.

Pembina Tk. I

NIP. 19701128 199003 1 002

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Pasar Desa beserta kelengkapannya	dk. Babadan desa Teloyo, Kab. Klaten	Jumlah kios yang di bangun	50 Unit Kios	2.000.000.000
2	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	dusun 3, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
3	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	dusun 2, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
4	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	Dk Gungrejo rt024, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	120 M^3	166.200.000
5	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	Pojok RT 02 RW 05, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	Volume : 250X3X0,3	200.000.000
6	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	Desa Bulan, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
7	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	RT 01-02, RW 01 dk. Pakis, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	p400m x l;1,5m x t;0,1m	40.000.000
8	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	RW 05, dk. Boto, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	p;800m x l;3,5m	200.000.000
9	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	sebelah barat dukuh candi rw 07 tepatnya di sebelah selatan rumah bp Giyanto, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
10	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Poros Desa	Dk. Bendungan Rt 013, Kab. Klaten	Volume Jalan Poros Desa yang dibangun/direhab	500 x 2,5 m x 0,03 m	150.000.000
11	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	dusun 1, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
12	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	dusun 2, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
13	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	dusun 3, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000

14	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Bener Rt 03, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	350 x 3 m	100.000.000
15	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Kalikingkang RT 11 RW 02, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200 x 2,5 x 0,05 m	70.000.000
16	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	SAMBEN/JETIS RT 03 RW 01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	500 x 2,5 m x 0,03 m	150.000.000
17	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	PERBATASAN DK. TEGALAN RT 02-BLADON RT 04 DAN SAMBEN RT 01-SAMBEN RT 04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	380 x 3,5 x 0,10 m	150.000.000
18	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Tegalan RT 02 RW 01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	140 x 3 x 0,03 m	60.000.000
19	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk, Bendungan RT 09, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	670 x 3 x 0,03 m	150.000.000
20	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan TK Pertiwi Rt 02 Rw 04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	300mx3m	100.000.000
21	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Perbatasan Rw 05 Pare dengan rw 06 Pare, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	300mx3m	100.000.000
22	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Barat masjid al-fajar Rw.07, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p:300M L:50cm T:50cm	50.000.000
23	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Tegalpare Rt 03 rw 09, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	P:250m lb:40cm la:30cm T:1m	70.000.000
24	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Tegalpare Rt 01 Rw 08, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	P:150m L:3m	100.000.000
25	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Wonorejo rw.12, utara masjid, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	P:100m La:40cm Lb:30cm T:1m	50.000.000

26	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Timur SD Negeri Kingkang 03, Tegalpare Rw 07, Kab. Klaten, Wonosari, Kingkang, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p:300m L:2,5m T:08m	100.000.000
27	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk Jelobo Rt02 Rw01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200 M^3	174.000.000
28	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Ngrodon Rt019, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	120 M^3	104.400.000
29	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Kadus 1 Dukuh Ngrodon, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	2250 M^2	258.750.000
30	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Kadus 3 (dukuh Wantilan Rw03), Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	2250 M^2	258.750.000
31	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Wantilan Rt010, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1275 M^2	146.625.000
32	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Wantilan RW004, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1425 M^2	163.875.000
33	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk Ngrodon (RW6,7,8), Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200mx3m	75.000.000
34	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Ngreden, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Bangunan	100.000.000
35	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Ngreden, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Bangunan	100.000.000
36	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Bulan, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
37	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	RT 02 RW 01 dk. Pakis, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p;300m x l;2,5m	200.000.000

38	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	RT 02 RW 02 dk. Jetis, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p;200m x l;3m x t;0,1m	50.000.000
39	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	RT 01 RW 05 Dk. Boto, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p;250m x l;2,5m x t;0,1m	75.000.000
40	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	RT 01 RW 02 dk. Jetis, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p;200m x l;3m x t;0,1m	50.000.000
41	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	RT 02 RW 05 dk. Boto, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p;1.000m x l;0,4m x t;1m	150.000.000
42	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Pengkol RT.19/RW.05, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	500mX1m X0.8m	20.000.000
43	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Tengklik dan Dk. Kadipiro, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200mX2,5mX0,1m	100.000.000
44	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Wadunggetas RT.16/RW.04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	100mX2,5mX0,1m	50.000.000
45	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Wadunggetas dan Perum Pakis Pertiwi, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	500mX1m X0.8m	20.000.000
46	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Tegalduwur, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	250mX0,3mX0,2m	50.000.000
47	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan penghubung antara RT 01 dan 02 dengan RT 03 di Dukuh Candi RW 07, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
48	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Jalan lingkar selatan dukuh Kebak RW 06, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
49	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Utara Dukuh Kebak RW 06, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000

50	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Selatan Dukuh Kebak RW 06, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
51	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk Sutran RW 05, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	30 unit	360.000.000
52	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Pajangan RW 04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	30 unit	360.000.000
53	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Pajangan RW 04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	30 unit	360.000.000
54	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Gang Nilla Sampai ke makam Dukuh Bolali RW 03, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200mx3m	75.000.000
55	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Nglempong RT 02 RW 01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	400 x 1,25 x 0,35 m	150.000.000
56	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Nglempong RT 01 RW 01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Unit	800.000.000
57	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Jurug RT 01 RW 02, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	10 Unit	150.000.000
58	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Sukorejo RT 02 RW 04, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1.700 x 2,5 m	500.000.000
59	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Prayan RW 05, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	225 x 3 x 0,03 m	90.000.000
60	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	klancingan 01/01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	670 x 3 x 0,03 m	150.000.000
61	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	klancingan rt 01/01, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200mx3m	50.000.000

62	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200mx3m	50.000.000
63	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Paket	500.000.000
64	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	jerukan rt 01/03, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	p:300M L:50cm T:50cm	50.000.000
65	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Krangganan, Sekaran, Wonosari, Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	P:250m lb:40cm la:30cm T:1m	70.000.000
66	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dadagan, Sekaran, Wonosari, Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	P:100m La:40cm Lb:30cm T:1m	50.000.000
67	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Gonayan Rt 002 Rw 001, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Paket	100.000.000
68	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Bentangan Rt 011 Rw 006, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	400 x 1,25 x 0,35 m	150.000.000
69	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Suruh Lor Rt 004 Rw 003, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1 Unit	800.000.000
70	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Suruh Kidul Rt 005 Rw 002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	10 Unit	150.000.000
71	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Bentangan Rt 010 Rw 006, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	350 x 3 m	100.000.000
72	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Kajen Rt 007 Rw 003, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
73	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Suruh Kidul Rt 014 Rw 002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000

74	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Sambirejo Rt 003, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
75	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Karang Rt 006 Rw 003, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
76	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Bendungan Rt 008 Rw 004, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	3 x 590 x 0,15 m	100.000.000
77	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Bendungan Rt 013, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1.700 x 2,5 m	500.000.000
78	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk.Bentangan Rt 009 Rw 005, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	200 x 2,5 x 0,05 m	70.000.000
79	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Selatan Biru RT.004 RW.002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	90 m3	100.000.000
80	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Biru RT.004 RW.002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	100 m3	100.000.000
81	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Timur Galan RW.004, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	50 m3	50.000.000
82	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Galan RW.004, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	40 m3	40.000.000
83	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	tengah Galan RW.004, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	300 m3	200.000.000
84	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Selatan Dukuh Pandanan RT.011, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	50 m3	50.000.000
85	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Pandanan RT.011 RW.005, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	75 m3	75.000.000

86	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Wonosari RT.015 RW.006, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	65 m3	65.000.000
87	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Ngepringan RW.008, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	300 m3	200.000.000
88	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Pandanan RT.012 RW.005, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	30 m3	30.000.000
89	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dukuh Bendo RT.016 RW.007, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	300 m3	200.000.000
90	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Biru RT.005 RW.002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	100 m3	100.000.000
91	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Biru RT.006 RW.002, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	40 m3	40.000.000
92	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Jaten, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1275 M^2	146.625.000
93	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Teloyo Kulon, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	1425 M^2	163.875.000
94	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Dk. Jetis, Kab. Klaten	Volume rehab Jalan lingkungan yang dibangun/direhab Pemukiman yang dibangun/direhab	Volume : 250X3X0,3	200.000.000
95	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	dusun 1, Kab. Klaten	Jumah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	2 unit	100.000.000
96	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	dusun 2, Kab. Klaten	Jumah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	3 unit	150.000.000
97	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	dusun 3, Kab. Klaten	Jumah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	4 unit	200.000.000
98	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Desa Bener, Kab. Klaten	Jumah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
99	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Persawahan Timur Dk. Bendungan RT 09, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	3 x 590 x 0,15 m	100.000.000

100	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	UTARA DK. KARANGTAL RT 05, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	300mx1m	100.000.000
101	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Rt 01 Rw 06 Pare, Kingkang, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	p:300m l"2,5m T:10cm	100.000.000
102	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Timur Dukuh Candirejo, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	120 M^3	104.400.000
103	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Irigasi Desa Jelobo, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	1 Paket	100.000.000
104	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Desa Ngreden, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	1 Bangunan	100.000.000
105	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
106	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	RT 02 RW 05 dk. Boto, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	p;1.000m x l;0,4m x t;1m	150.000.000
107	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Desa Wadunggetas, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	300 m x 1 m	50.000.000
108	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Jalan menuju Apur di selatan dukuh Kebak, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
109	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Blok Apur 4-5 Dukuh Bolali RT 01, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	8 unit	160.000.000
110	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	jerukan rt 01/03, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	p:300m l"2,5m T:10cm	100.000.000
111	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Dk. Suruh Kidul Rt 014, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	380 x 3,5 x 0,10 m	150.000.000
112	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Dk.Bendungan rt 013, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	140 x 3 x 0,03 m	60.000.000
113	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Dk.Suruh Kidul Rt 005, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	3 unit	300.000.000
114	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Dk.Suruh Lor Rt 004, Kab. Klaten	Jumlah Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	1 Paket	500.000.000
115	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Poko RW.004 - Temuireng RW.001, Duwet, Wonosari, Klaten, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	300mx3m	100.000.000
116	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Poko RT.001/RW.004, Duwet Wonosari, Klaten, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	300mx1m	100.000.000
117	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Timur Dukuh Galan RT.010 RW.004, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	50 m3	50.000.000

118	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Barat Dk. Jetis, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	2250 M^2	258.750.000
119	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Barat Dk.Jetis, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	200mx1m	50.000.000
120	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa	Timur Dk.Jaten Rt01, Kab. Klaten	Volume Jalan Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa yang dibangun/direhab	500 M	500.000.000
121	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Kalikingkang RT 11 RW 03, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	225 x 3 x 0,03 m	90.000.000
122	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Rt 01 dan Rt 02 di Rw 03, Dukuh Kingkang, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	1 paket	15.000.000
123	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Pare Rt 03 Rw 05, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	300mx1m	100.000.000
124	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Jalan barat Gergunung Rw 15, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	P:350m L:3m T:1m	150.000.000
125	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
126	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Tegalduwur RT.04/RW.02, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	1 unit	10.000.000
127	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Tegalduwur RT.05/RW.02, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	75m X 3m X0,1m	30.000.000

128	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Timur Dukuh Kebak RW 06, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
129	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Timur Dukuh Pajangan RW 04 dan Dukuh Kebak RW 06, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	50 orang	250.000.000
130	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukiuh Pajangan RW 04, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	30 unit	360.000.000
131	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukuh Jurug RT 02 RW 02, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
132	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukuh Sukorejo RW 04, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	3 x 590 x 0,15 m	100.000.000
133	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukuh Prayan RW 05, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	200 x 2,5 x 0,05 m	70.000.000
134	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukuh Jurug RW 02, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	500 x 2,5 m x 0,03 m	150.000.000
135	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Dukuh Delanggon Rw 06, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	380 x 3,5 x 0,10 m	150.000.000
136	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	1 Paket	500.000.000

137	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	1 paket	50.000.000
138	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Padasan - Galan RW.003, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	50 m3	50.000.000
139	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Galan RW.004, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	16 m3	20.000.000
140	Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert)	Biru RT.002, Biru RT.001, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	10 m3	10.000.000
141	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan Air Bersih beserta kelengkapannya	Dukuh Kauman RW 03, Kab. Klaten	Jumlah Jaringan Air Bersih beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
142	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan Air Bersih beserta kelengkapannya	sekaran rt 01/02, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	1 paket	50.000.000
143	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya	RT 01-03 RW 04 dk. Tanggul, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	p;1.000m x l;0,4m x t;1m	150.000.000
144	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya	RW 05 Dk. Tegalweden, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	1 Paket	300.000.000
145	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya	sekaran rt 01/02, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	200mx1m	50.000.000

146	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan air limbah domestik terpadu beserta kelengkapannya	dk. Banjaran, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	200mx1m	50.000.000
147	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jaringan Air Minum dan Sanitasi beserta kelengkapannya	Dukuh Tirip RW 01, Kab. Klaten	Jumlah Prasarana Jalan Poros Lingkungan Permukiman yang dibangun/direhab	30 unit	360.000.000
148	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	dusun 1,3, Kab. Klaten	Jumlah Jembatan Desa yang dibangun/direhab	1 paket	150.000.000
149	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	Dk. Gunting RT 08 RW 02, Kab. Klaten	Jumlah Jembatan Desa yang dibangun/direhab	1 paket	150.000.000
150	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	RT 02 RW 02, dk. Jetis, Kab. Klaten	Jumlah Jembatan Desa yang dibangun/direhab	1 paket	100.000.000
151	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	Dukuh Tegalduwur RT.01/RW.01, Kab. Klaten	Volume Jembatan Desa yang dibangun/direhab	9 m X 2m	100.000.000
152	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	Dukuh Nglempong RT 02 RW 01, Kab. Klaten	Volume Jembatan Desa yang dibangun/direhab	350 x 3 m	100.000.000
153	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Jembatan Desa	Dk. babadan, Kab. Klaten	Jumlah Jembatan Desa yang dibangun/direhab	1 paket	250.000.000
154	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Pasar Desa beserta kelengkapannya	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah Pasar Desa beserta kelengkapannya Desa yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
155	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Pasar Desa beserta kelengkapannya	Dukuh Kauman RW 03, Kab. Klaten	Jumlah Pasar Desa beserta kelengkapannya Desa yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
156	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	dusun 1,2, dan 3, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	400x3 m	150.000.000
157	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Dk. Bener Rw 01, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	200 x 1 x 0,35 m	75.000.000
158	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Dk. Bener Rw 01, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	200 x 1 x 0,35 m	75.000.000

159	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Dk. Bogor Rt 13, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	400 x 1,25 x 0,35 m	150.000.000
160	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Dk. Gunting RT 08, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	300mx1m	100.000.000
161	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	RT 01 RW 04 dk, Tanggul (utara gubug tani boto), Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	p;800m x l;0,4m x t;1m	100.000.000
162	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	klancingan rt 02/01, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	200mx1m	50.000.000
163	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar)	Utara Dk. Dukuh Desa Teloyo, Kab. Klaten	Volume Prasarana Jalan Poros Desa (Gorong-gorong, selokan/drainase, box/slab culvert, talud, trotoar) yang dibangun/direhab	120 M^3	104.400.000
164	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya	masjid Al Hidayah RW 05 dk. Boto, Kab. Klaten	Volume Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya yang dibangun/direhab	p;20m x t;1m	20.000.000
165	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya	Dk.Suruh Lor Rt 004 Rw 003, Kab. Klaten	Volume Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya yang dibangun/direhab	200 x 1 x 0,35 m	75.000.000
166	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya	Biru RT.003 RW.001, Kab. Klaten	Volume Tempat Ibadah Keagamaan beserta sarana pendukungnya yang dibangun/direhab	40 m3	40.000.000
167	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/revitalisasi Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa	dusun 1,2,3, Kab. Klaten	Volume Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa yang dibangun/direhab	400x3 m	150.000.000
168	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/revitalisasi Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa	Jetis RT 03 RW 01, Kab. Klaten	Jumlah Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa yang dibangun/direhab	1 unit	100.000.000

169	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/revitalisasi Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa	Dk Wantilan Rt005, Kab. Klaten	Volume Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa yang dibangun/direhab	280 M^2	280.000.000
170	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/revitalisasi Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa	Tegalgondo RT 02 RW 02, Kec. Wonosari, Kab. Klaten, Kab. Klaten	Volume Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa yang dibangun/direhab	25 x 40 m	200.000.000
171	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/revitalisasi Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Jumlah Tempat/Gedung Olah Raga Milik Desa yang dibangun/direhab	1 paket	50.000.000
172	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Dk. Tegalmulyo Rt 11 Rw 05, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor Desa yang dibangun/direhab	1 Unit	800.000.000
173	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Ngreden, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor Desa yang dibangun/direhab	1 Bangunan	100.000.000
174	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor Desa yang dibangun/direhab	1 Unit	300.000.000
175	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	Kantor Desa Sukorejo, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Kantor Desa yang dibangun/direhab	15 Unit	150.000.000
176	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	dusun 1, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	50 orang	250.000.000
177	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	Dk. Sobrah RT 06, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	1 paket	150.000.000
178	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	Desa Ngreden, Kab. Klaten	Jumlah Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	1 Bangunan	100.000.000
179	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	RT 01 RW 05 dk. Boto (timur tlobong), Kab. Klaten	Volume Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	p;8m x l;6m x t;4m	50.000.000
180	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	Tengklik RT.07/RW.03, Kab. Klaten	Volume Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	15mX25m	100.000.000
181	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	RT 02 RW 02 Desa Tegalgondo, Kab. Klaten	Volume Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	8 x 12 m	120.000.000
182	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Pertemuan Desa	Gedung PKK Desa Sukorejo, Kab. Klaten	Volume Gedung Pertemuan Desa yang dibangun/direhab	200 x 1 x 0,35 m	75.000.000
183	Pembangunan/rehabilitasi PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	TK Pertiwi Gunting 1, 2 dan 3, Kab. Klaten	Jumlah PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa yang dibangun/direhab	3 unit	300.000.000
184	Pembangunan/rehabilitasi PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	TK Pertiwi Desa Sukorejo, Kab. Klaten	Jumlah PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa yang dibangun/direhab	3 unit	300.000.000

185	Pembangunan/rehabilitasi Pos Keamanan Desa beserta kelengkapannya	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Jumlah Pos Keamanan Desa beserta kelengkapannya yang dibangun/direhab	1 paket	5.000.000
186	Pembangunan/rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) /Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	DESA GUNTING, Kab. Klaten	Jumlah Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) /Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dibangun/direhab	1 Paket	500.000.000
187	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah Tingkat Desa	Lumbungkerep RT 03 RW 03, Kab. Klaten	Jumlah sarana prasarana Pengelolaan Sampah Tingkat Desa yang dibangun/direhab	500 M	500.000.000
188	Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi Embung Milik Desa	dusun 1, Kab. Klaten	Jumlah Embung Milik Desa yang dibangun/direhab	1 paket	100.000.000
189	Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi Embung Milik Desa	Dukuh Sutran RW 05, Kab. Klaten	Volume Embung Milik Desa yang dibangun/direhab	600x3 m	200.000.000
190	Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi Embung Milik Desa	klancingan rt 01/01, Kab. Klaten	Jumlah Embung Milik Desa yang dibangun/direhab	1 paket	100.000.000
191	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	dusun 1,2,3, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	8 unit	160.000.000
192	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	Dk. Tegalmulyo Rt 11 Rw 05 (Kantor Desa ke Selatan), Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	10 Unit	150.000.000
193	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	Desa Jelobo, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	3 Paket	30.000.000
194	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	Lumbungkerep RT 02 RW 03, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	2250 M^2	258.750.000
195	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	1 Unit	300.000.000
196	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	dk. Tanggul-dk. Boto, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	15 unit	15.000.000

197	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	RW 05 dk. Boto, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	15 unit	15.000.000
198	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	Desa Wadunggetas, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	20 unit	25.000.000
199	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	RW 04 - RW 07 Desa Tegalgondo, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	40 Titik	240.000.000
200	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	dukuh kebak RW 06, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	600x3 m	200.000.000
201	Pengadaan Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	10 unit	5.000.000
202	Pengadaan sarana prasarana Pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan hasil) Milik Desa	Desa Bener, Kab. Klaten	Jumlah Penerangan Jalan Poros Desa dan Jalan Permukiman yang diadakan	15 Unit	150.000.000
203	Pengadaan sarana prasarana Olahraga Milik Desa	DESA GUNTING, Kab. Klaten	Jumlah sarana prasarana Olahraga Milik Desa yang diadakan	1 Paket	500.000.000
204	Pengadaan sarana prasarana Kesenian/kebudayaan Milik Desa	Desa Bulan, Kab. Klaten	Jumlah sarana prasarana Kesenian/kebudayaan Milik Desa yang diadakan	1 Unit	300.000.000
205	Pengadaan sarana prasarana Olahraga Milik Desa	RT 02 RW 03 Dk. Bakalan, Kab. Klaten	Jumlah sarana prasarana Olahraga Milik Desa yang diadakan	pagar lapangan p;100m x t;4m, pengadaan lampu 24 unit	25.000.000

206	Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa Wadunggetas, Kab. Klaten	Jumlah sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang diadakan	Dopler 1 pcs, Tensi Digital 3 pcs, Timbangan Bayi 2 pcs, Pengukur Tinggi Badan 2 pcs, Regulator Tabung Oxygen 1 pcs, Cashe Touch 1 pcs, Cek HB 3 pcs, Timbangan Injak (Stunting) 5 pcs, Infantometer 1 pcs, Microtoys 1 pcs, Pengukur Lila 1 pcs	25.000.000
207	Pengadaan sarana prasarana Pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan hasil) Milik Desa	Desa Wadunggetas, Kab. Klaten	Jumlah sarana prasarana Pertanian (Alat Produksi dan Pengolahan hasil) Milik Desa yang diadakan	1 unit	100.000.000
208	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Pembangunan Lumbung Desa)	Desa Wadunggetas, Kab. Klaten	Jumlah Pembangunan Lumbung Desa yang dibangun	Dopler 1 pcs, Tensi Digital 3 pcs, Timbangan Bayi 2 pcs, Pengukur Tinggi Badan 2 pcs, Regulator Tabung Oxygen 1 pcs, Cashe Touch 1 pcs, Cek HB 3 pcs, Timbangan Injak (Stunting) 5 pcs, Infantometer 1 pcs, Microtoys 1 pcs, Pengukur Lila 1 pcs	25.000.000

209	Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Posyandu Desa Sukorejo, Kab. Klaten	Volume sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang di adakan	200 x 1 x 0,35 m	75.000.000
210	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (APE, peralatan dan perlengkapan, mebeleur)	TK Pertiwi Desa Sukorejo, Kab. Klaten	Volume Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (APE, peralatan dan perlengkapan, mebeleur) yang diadakan	140 x 3 x 0,03 m	60.000.000
211	Pengadaan sarana prasarana Olahraga Milik Desa	sekaran rt 02/02, Kab. Klaten	Volume sarana prasarana Olahraga Milik Desa yang diadakan	1 paket	50.000.000
212	Pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa Teloyo, Kab. Klaten	Volume sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes/Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang diadakan	1 Bangunan	100.000.000
Total Pagu Anggaran					34.974.400.219

Klaten, Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.
Pembina Tk. I
NIP. 19701128 199003 1 002

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	82
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	60,50

Klaten, Mei 2022

CAMAT WONOSARI

MOCHAMAD NURROSYID, SIP.
Pembina Tk. I
NIP. 19701128 199003 1 002

PENETAPAN

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN TULUNG

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2023

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
z. Kecamatan Klaten Utara;
aa. Kecamatan Klaten Tengah;
bb. Kecamatan Klaten Selatan;
cc. Kecamatan Kalikotes;
dd. Kecamatan Ngawen;
ee. Kecamatan Kebonarum;
ff. Kecamatan Wedi;
gg. Kecamatan Jogonalan;
hh. Kecamatan Gantiwarno;
ii. Kecamatan Prambanan;
jj. Kecamatan Manisrenggo;
kk. Kecamatan Kemalang;
ll. Kecamatan Karangnongko;
mm. Kecamatan Jatinom;
nn. Kecamatan Karanganom;
oo. Kecamatan Tulung;
pp. Kecamatan Polanharjo;
qq. Kecamatan Delanggu;
rr. Kecamatan Juwiring;
ss. Kecamatan Wonosari;
tt. Kecamatan Ceper;
uu. Kecamatan Pedan;
vv. Kecamatan Karangdowo;
ww. Kecamatan Cawas;
xx. Kecamatan Trucuk; dan
yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/051/31 tanggal 20 Januari 2020 dan Surat Edaran dari BAPPEDA Klaten Nomor; 050/765/31, tentang: Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, tertanggal 24 Desember 2021.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif untuk ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tulung demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tulung. Juga sebagai bahan penyempurnaan RKPD untuk menentukan Program dan Kegiatan serta Pengalokasian Anggaran Tahun 2023.

Klaten,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
Pembina
NIP. 19770618 199603 1 001

DAFTAR ISI

		Halaman
Cover		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I-11
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	II-8
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-12
	2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V	PENUTUP.....	V-1
	5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian	V-1
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-2
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan rancangan awal, c. penyusunan rancangan, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum dsempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terhadap eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.Rancangan Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Tulung Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) Kecamatan Ngawen Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksaanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Ngawen.
c. Untuk menjabarkan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan.

Untuk menggali potensi dan permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, sehingga dapat menentukan kebijakan maupun strategi untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamnatan Ngawen adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

5.2. Kaidah Pelaksanaan

5.3. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Kecamatan Tulung telah mengadakan evaluasi dari Pelaksanaan kinerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja Tahun berjalan (2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :
   Program/Kegiatan di Tahun 2021 hampir semua dapat dilaksankan sesuai target, kecuali untuk program Penyediaan gaji dan tunjangan ASN hanya terealisasi sebesar 85,5% karena banyak staff yang purna tugas. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi keuangan sebesar 72,1% yang telah mengalami Silva, namun untuk kegiatannya dapat terealisasi 100% karena pelaksanaan kegiatan telah dapat membantu kelancaran kegiatan pelayanan warga masyarakat dan kegiatan operasional kantor. Untuk kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terelisasi sebesar 65,2% , Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang Undangan sebesar 64,5%, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 37% karena kehadiran DPRD sebagai Narasumber berkurang dimana pokok bahasan sosialisasi sudah ada keterwakilan beberapa anggota DPRD yang hadir dan di Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum kurang serapannya karena anggaran perubahan kurang maksimal

penyerapannya dikarenakan waktunya singkat di Bulan Oktober Tahun 2021.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target :

Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Apabila ada yang belum memenuhi target dikarena menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di Tingkat Kabupaten, dan adanya efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. Realisasi capaian program/kegiatan sebagai berikut :

Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
7.01 . 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	**2.455.920.679**	**2.038.776.454**	83,0
7.01 . 01 . 2.01	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12.002.500	6.9910.000	57,6
7.01.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12.002.500	6.991.000	57.6
7.01 . 01 . 2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	2.592.239.506	1.869.143.220	62,0
7.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	2.179.986.179	1.864.463.220	85,5
7.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi terlaksana	12.350.000	4.680.000	37,9

7.01 . 01 . 2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	12.407.173	12.492.180	100
7.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	12.407.173	12.402.180	100
7.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	0	0
7.01 . 01 . 2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	39.300.000	24.620.000	62,6
7.01 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	39.300.000	24.620.000	62,6
7.01 . 01 . 2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan yang Tersedia	132.969.827	93.579.254	80,0
7.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	5.576.077	5.572.250	99,9
7.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	16.000.000	11.530.000	72,1
7.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	111.393.750	76.477.004	68,7
7.01 . 01 . 2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase Barang Milik Daerah yang Tepelihara	66.905.000	32.121.800	48,0
7.01 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	20.275.000	2.206.500	10,9

7.01 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	42.470.000	28.115.300	66,2
7.01 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	4.160.000	1.800.000	43,3
7.01 . 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**170.479.100**	**111.206.300**	65,2
7.01 . 03 . 2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	**170.479.100**	**111.206.300**	65,2
7.01 . 03 . 2.01 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kagitan terlaksana	170479.100	111.206.300	65,2
7.01 . 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**90.991.500**	**75.581.950**	57,9
7.01 . 04 . 2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	90.991.500	75.581.950	57,9
7.01 . 04 . 2.01 . 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koortdinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	84.212.000	73.661.450	87,5
7.01 . 04 . 2.01 . 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembiaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.779.500	1.920.500	28,3

7.01 . 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**12.520.000**	**5.798.400**	46,3
7.01 . 05 . 2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	12.520.000	5.798.400	46,3
7.01 . 05 . 2.01 . 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	12.520.000	5.798.400	46,3
7.01 . 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**384.155.900**	**160.300.800**	37,5
		PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI			
7.01 . 06 . 2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	384.155.900	160.300.800	37,5
7.01 . 06 . 2.01 . 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	72.624.000	46.867.800	64,5
7.01 . 06 . 2.01 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	9.076.500	659.500	7,3
7.01 . 06 . 2.01 . 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000	2.8879.100	41,1

7.01 . 06 . 2.01 . 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	295.455.400	109.894.400	37,5
			3.114.067.170	**2.931.663.904**	

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja :

Program/kegiatan hampir dapat memenuhi target yang direncanakan dan tidak ada program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan karena beberapa program dan kegiatan terlaksana 100% .

d. Faktor penyebab tidak tercapainya target :

Program/kegiatan di Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan program/kegiatan semakin meningkat, antara lain :

- Kita perlu bersyukur kejadian bencana di wilayah Kecamatan tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, sehingga bisa efisiensi anggaran untuk membantu warga masyarakat berdampak bencana yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Adanya Regulasi dan Pergeseran Kebijakan, karena masih ada kegiatan yang jadwal maupun pelaksanaanya menyesuaikan dengan kegiatan dan jadwal waktu dari tingkat Kabupaten.
- Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, misalnya Telephon Kantor, Laptop, kendaraan dinas bagi pejabat struktural. dll.

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Target Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja)

Perangkat Daerah, dikarenakan adanya program/kegiatan baru yang bersifat Top Down dari Tingkat Kabupaten yang belum masuk dalam Renstra Perangkat Daerah., ataupun adanya pergeseran kebijakan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut :
   1) Program/kegiatan difokuskan pada Indikator Utama (IKU).
   2) Program/kegiatan diutamakan pada kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tulung.
   3) Diadakan pengangkatan/penambahan THL untuk menambah tenaga demi lancarnya pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan Tulung sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja.
   4) Untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana kita adakan kerja lembur, penambahan tugas atau merangkap beban tugas orang lain serta meningkatkan kerjasama dari unsur pejabat, staf maupun THL. Juga mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 dan Tahun 2022 masih perlu diadakan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja yang ada di OPD Kecamatan Tulung dapat dilihat pada sasaran kinerja 0PD yang ada pada Visi dan Misi Kabupaten Klaten, diantaranya yaitu :

a. Peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan otonomi daerah,pemerintahan umun, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Pelayanan yang dapat secara langsung diberikan kepada masyarakat, antara lain Rekam Data KTP, Pembuatan KK, Pelayanan pindah/mutasi Penduduk dan legalisasi surat – surat yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

b. Untuk pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tulung belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih terbatas pemberian rekomendasi/pengantar kepada masyarakat untuk ditindakanjuti ke Kantor Pelayanan Terpadu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, sambil menunggu Peraturan Bupati Klaten yang mengatur penyerahan urusan perijinan yang dilaksanakan di Kecamatan Tulung.
c. Peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam membangun desa.
d. Melaksanakan event – event kebudayaan, kegiatan keagamaan, kegiatan olah raga maupun kegiatan kesenian di Tingkat Kecamatan
e. Mengikuti kegiatan sosial keagamaan, olah raga, kesenian/kebudayaan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tulung dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tulung adalah Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Tulung sehingga :

1) Menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Tulung.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
3) Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Tulung hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Klaten.

c. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tulung sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya demi keamanan perlu diadakan tempat parkir dan tralis pada jendela Kantor Kecamatan Tulung,peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tulung terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Organisasi Perangkat Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Suistanable Development Goals). Yaitu :
   1) Kinerja menurun tidak bisa maksimal;
   2) Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal;
   3) Usulan- usulan belum semua terpenuhi;
   4) Lokasi tertentu lokasi tertentu sering tergenangi air sehingga usia teknis menjadi pendek.

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1) Tantangan:
   a) Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lebih ditingkatkan dengan cara Pemberian Diklat dan Pelatihan ASN ,walaupun masih terdapat permasalahan;
   b) Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
2) Peluang:
   a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
   b) Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secaraswadaya ;
   c) Melaksanakan pelatihan , workshoop, study banding secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
   d) Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan;

   Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Tulung terlaksana dengan baik,tertib dan lancar.

e. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
   1) Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021, telah dilaksanakan melalui Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, Program peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana

yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

2) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Tulung mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi yang telah dilaksanakan lewat Program Pembinaan Pemuda dan olahraga Program Pembinaan Pemuda dan olahraga.
3) Urusan Administrasi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Tulung melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan, Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi trantibum di kecamatan, dan Program peningkatan koordinasi pembinaan dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan di kecamatan.
4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun anggaran 2021, telah berhasil dilaksanakan oleh Kecamatan Tulung melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program pengembangan industri kecil dan menengah, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.
5) Urusan Sosial telah dilaksanakan melalui program peningkatan keagamaan, dan program pengelolaan kekayaan budaya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

a. Proses pengajukan program dan kegiatan diawali dengan Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran.
b. Untuk meningkatkan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2023 perlu diadakan Review terhadap Rancangan Akhir SKPD yang telah diajukan terlebih dahulu dalam Renja 2022 Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju 2023.
c. Alasan Proses Review tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat Tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan Riel Masyarakat (Bottom Up).

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tulung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.899.055.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2.252.364.815**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**Rp 7.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**Rp 3.331.450**	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	Rp 1.681.250	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 1.650.200	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 2.584.690.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1.979.040.100**	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Rp 2.565.190.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Rp 1.976.686.100	

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp	14.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp -
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20 Laporan	Rp	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20 Laporan	Rp 1.354.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp 1.000.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**61.700.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 35.800.000**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp 10.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp	8.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp 17.900.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp	33.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 7.900.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp**	**22.185.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 51.500.000**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp	7.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp 26.500.000

7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 15.185.000	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 25.000.000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 162.980.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp 120.223.265**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp 6.980.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp 5.576.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 16.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 16.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	Rp 140.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	Rp 98.647.265	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp 60.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp 62.470.000**	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Rp 18.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Rp 59.630.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp 10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp 2.840.000	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp 20.000.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp -	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-Unit	Rp 12.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp -	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 2.975.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 1.837.400**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 2.975.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp 1.837.400**	
7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 2.975.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 1.837.400	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 203.261.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 83.662.570**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**95%**	**Rp 203.261.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 83.662.570**	

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 6.581.070	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	Rp 188.261.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	Rp 77.081.500	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 111.050.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 88.175.500**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**96%**	**Rp 100.050.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 80.393.750**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 94.050.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 78.702.250	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	Rp 6.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	Rp 1.691.500	

7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**96%**	**Rp 11.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp 7.781.750**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 11.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 7.781.750	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp 24.788.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp 107.605.700**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**96%**	**Rp 24.788.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**	**Rp 107.605.700**	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	695 Orang	Rp 14.788.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	Rp 97.605.700	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	Rp 10.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	Rp 10.000.000	

7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 94.988.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp 72.041.015**	
			PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	**97%**				**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**97%**		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 94.988.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp 72.041.015**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp 4.090.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp 11.800.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp 5.180.000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 2.000.000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 1.747.950	

7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 10.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp 21.000.000	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp 1.416.215	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp 43.188.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp 35.418.000	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp 2.000.000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp 1.188.850	
JUMLAH					Rp 3.336.117.000					Rp 2.605.687.000	

Tulung,

CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M

NIP. 19770618 199603 1 001

2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARKAT

Hal ini dimaksudkan untuk menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat / stakeholder terkait; Telaah menguraikan hasil kajian usulan program dan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan/ masyarakat yang ditujukan kepada Perangkat Desa maupun dari hail Musrembang Kecamatan dan Forum Perangkat Desa. Adapun Hasil dari Telaah Usulan Musrembang Kecamatan Tulung sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (industry kecil/ Ternak/ Rumah Tangga)	Dk. Jatirejo RT. 09 RW. 03, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (industry kecil/ Ternak/ Rumah Tangga)	1 unit	Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) pada rumah pemotongan ayam (RPA) Dukuh Jatirejo, Desa Beji yang dimaksud adalah merupakan salah satu sarana untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun warga sekitar, sehingga sangat perlu untuk direalisasikan.
2	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Mengingat area persawahan di Desa Beji merupakan sawah tadah hujan dan memiliki kesulitan dalam pengairan sawah saat musim kemarau dan sudah tersedianya beberapa sumber daya air baik alami maupun buatan, petani membutuhkan pompa diesel untuk mendukung pengairan sawah
3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Utara Desa Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	Jalan poros Utara Desa Beji Kecamatan Tulung sudah dalam keadaan rusak, maka perlu diadakan perbaikan
4	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Timur Dukuh Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	jalan desa yang terletak Di Timur Dk. Beji Desa Beji Kecamatan Tulung dakam keadaan rusak, maka perlu diadakan perbaikan
5	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SD N 1 Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	4 unit	Toilet SD N Beji dalam keadaan rusak

6	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	Paten, Cokro, Tulung, Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	2 unit	Pembuatan sumur dalam untuk irigasi pertanian
7	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	30 org	Masih banyak usaha kecil menengah yang belum terorganisir
8	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	5 unit	belum ada penerangan di jalan akses ke wisata OMAC,
9	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Bencana	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Bencana	1 unit	pengadaan geraji mesin untuk tim relawan tanggap bencana
10	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Belum ada Talud sungai di Dukuh Cokro yang terletak disebelah Utara OMAC sehingga mudah menyebabkan longsor
11	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Gebang, Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Belum ada Talud sungai penahan banjir yang terletak di Dukuh Gebang sehingga mudah menyebabkan longsor
12	Rehabilitasi Ruang Guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	Dukuh Kajen Rt 03 Rw 01, Kab. Klaten, Tulung, Dalangan	Rehabilitasi Ruang Guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	1 ruang	Rehabilitasi Ruang Guru dan Pagar SD Negeri 1 Dalangan
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	dk daleman dan dk ngaliyan, Kab. Klaten, Tulung, Daleman	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 paket	warga kurang mampu berlangganan air bersih pdam, sehingga perlu adanya pembangunan pamsimas di dk. daleman dan dk ngaliyan agar warga dapat membayar langganan air bersih dengan harga yang terangkau
14	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	dk. mranggen, dk. manggung, dk cokrokembang, Kab. Klaten, Tulung, Daleman	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	5 unit	kurangnya lampu jalan di desa daleman, mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan
15	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Desa gedongjetis, Kab. Klaten, Tulung, Gedongjetis	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	Rawan longsor dan debit air kurang
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Sumur Dalam Utara Dukuh Menggung Desa Gedongjetis, Kab. Klaten, Tulung, Gedongjetis	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 unit	Warga Masih ada yang Belum Teraliri air bersih PAMSIMAS sedangkkan PAM yang ada belum mencukupi semuanya
17	Pengadaan Rambu-rambu, cermin tikung Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	Jalan desa kemiri - pomah, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Pengadaan Rambu-rambu, cermin tikung Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	6 unit	pengadaan cermin tikung 6 titik di jalan kabupaten yang berpotensi kecelakaan atau posisi jalan yang sulit..

18	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SD N 2 KEMIRI, DK. SELAP, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	2 unit	Kamarmandi sudah tidak layak dan terlihat kumuh
19	Pembangunan rumah dinas guru SD	SD N 2 KEMIRI, DK.SELAP, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Pembangunan rumah dinas guru SD	1 unit	Rumah dinas untuk guru negri baru, di karenakan ybs asli yogyakarta dan mengajar di SD N 2 KEMIRI agar bisa lebih efektif
20	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Saluran bendung Kali Ungu Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	saluran irigasi yang cukup panjang seihingga banyak saluran irigasi yang belum terbangun dengan baik, salah satunya adalah saluran irigasi bendung kaliwungu di Desa Majegan, konsdisi saat ini sudah bayak kerusakan.
21	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Saluran bendung Tejo Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	saluran irigasi yang cukup panjang seihingga banyak saluran irigasi yang belum terbangun dengan baik, salah satunya adalah saluran irigasi bendung Tejo di Desa Majegan, konsdisi saat ini sudah bayak kerusakan.
22	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	gapoktan manunggal tani Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Minimnya pekerja di bidang pertanian, sehingga petai kesulitan saat menanam padi, mohon bantuan mesin untuk tanam padi
23	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	RBM/SHG Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	1 paket	terbatasnya SDM dan peralatan usaha, mohon bantuan pelatiahan dan peralatan.
24	Peningkatan Jalan kabupaten	Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Peningkatan Jalan kabupaten	2 km	Di Desa Malangan terdapat 2 jalan poros Desa yang cukup panjang. Jalan poros Desa Ringin- Kuwon panjang 2 km dan Desa Pulon - Asri panjang 3 km Dengan adanya 2 jalan poros desa tersebut, desa Malangan sangat kesulitan dan terbebani jika akan melakukan pengaspalan dikarenakan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disamping itu kondisi jalan juga sudah rusak, banyak terdapat jalan yang berlubang yang mengakibatkan terganggunya dan ketidaknyamanan pengguna jalan
25	Pembinaan Bank Sampah	Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Pembinaan Bank Sampah	50 peserta	Masih banyak di wilayah kami yang melakukan pembungan sampah di sungai dan tempat-tempat umum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan bau yang mengganggu.
26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Saluran irigasi Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	30 ha	Beberapa Jaringan Irigasi di Desa Malangan terdapat kerusakan sehingga menyebabkan kurang lancarnya proses irigasi bagi petani. Ditambah lagi jika musim kemarau tiba menyebabkan beberapa daerah pertanian di Desa Malangan tidak bisa melakukan Irigasi sehingga menyebabkan gagal panen.

27	Peningkatan Jalan kabupaten	Jalan Kayumas-Kebonpakel, Kab. Klaten, Tulung, Mundu	Peningkatan Jalan kabupaten	1 km	Sepanjang jalan Kabupaten di Desa Mundu telah rusak dikarenakan banyaknya truk galian C yang melewati jalan tersebut
28	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Dk. Tanjung RT 13 RW 06, Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	Pembangunan Betonisasi Jalan Si Bayi Tanah Kas Desa di perbatasan dengan desa Socokangsi keadaan jalan masih berwujud tanah dan sangat licin saat hujan dan sulit di akses oleh warga.
29	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dk. Tanjung RT 13 RW 06, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	300 m	Pembangunan Talud Selatan Dk. Tanjung di jalan perbatasan antara Dk. tanjung dengan desa Socokangsi yang masih tanah dan tidak memiliki bahu jalan yang kokoh sehingga membutuhkan pembangunan talud jalan supaya bahu jalan tidak terkikis oleh air
30	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dk. Randusari RT 08/ RW 04, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Pembangunan Talud Jalan Timur Dk. Randusari karena kanan dan kiri jalan belum terdapat bahu jalan yang dapat menahan air hujan yg masuk ke jalan sehingga menyebabkan jalan menjadi mudah rusak karena air yang masuk kejalan
31	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	BUMDES wahana cipta desa pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	10 ekor	untuk mengembangkan usaha BUMDES dibidang peternakan
32	Bantuan Benih Ikan Lele, Nila untuk Pokdakan	BUMDES WAHANA CIPTA Desa Pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan Benih Ikan Lele, Nila untuk Pokdakan	2 kelompok	untuk meningkatkan kemajuan BUMDES dibidang pertanian
33	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	Dk. Kwanggan, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	1 kelompok	untuk menambah modal BUMDES Desa pucangmiliran dibidang peternakan kambing
34	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	Bendungan DAM Pepen Pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	2000m	Kurang lancarnya pengairan untuk pertanian karena bendungan tersumbat perlu perbaikan
35	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	jl.jatinom -mundu km04, dk.sidorejo, desa sedayu, Kab. Klaten, Tulung, Sedayu	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	saluran air tidak ada sehingga sampah kejalan raya
36	Pembangunan ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SDN 02 SEDAYU , KEC.TULUNG, KAB.KLATEN, Kab. Klaten, Tulung, Sedayu	Pembangunan ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	1 ruang	ruang kelas rusak karena bocor dan dinding keropos

37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	selatan Dk Wajong(Sudimoro)sampai Utara Dk Ketitang Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	40 m	Saluran Irigasi dari utara dukuh Wajong Kulon (Sudimoro) sampai Utara Dukuh Ketitang (Sorogaten) banyak yang bocor
38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Utara wajong Wetan sampai Utara Dk Randusari , Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	25 ha	Saluran Irigasi Utara Dk WajongWetan (Sudimoro) samapai UtaraDk Randusari (Sorogaten) Banyak yg rusak dan bocor (debit air berkurang banyak
39	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	timur Dk Keden (Sorogaten) sampai Barat Dk Kopat (Gedongjetis), Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	400 m	jalan usaha tani yg masih berupa tanah pada musim penghujan sering longsor maka perlu di bangun talud jalan usaha tani
40	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sistem Informasi	Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sistem Informasi	1 paket	Masih minimnya jaringan internet di desa , padahal sekarang banyak sekali kebutuhan masyarakat dengan mengunakan Jaringan intternet khusus nya anak sekolah di perlukan Adanya Fasilitas Internet Desa
41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	dari dam Utara Dk Kemiri Desa Sorogaten sampai Saluran irigasi di Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	50 ha	Banyak nya Saluran Irigasi untuk Daerah Pengairan Di desa Sorogaten yg berasal dari bendung utara Desa Kemiri yg rusak mohon perbaikan karena merupakan saluran irigasi yg mengair beberapa daerah pertanian di tiga desa selain di Daerah Sorogaten
42	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	wilayah Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	20 btg	banyaknya tanah kas desa yng masih berupa pereng dan rawan longsor maka di butuhkan penghijauan untuk mencegah longsor dan meningkatkan penghijauan di Desa Sorogaten
43	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Mayoritas warga desa Sorogaten adalah Petani sangat membutuhkan tersedianya alat Pertanian yang Efektif sehingga Dapat meningkatkan penghasilan Petani
44	Pembekalan Bimbingan Teknis dan Workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan	Perangkat Desa Sorgaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembekalan Bimbingan Teknis dan Workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan	1 kades	Masih belum sepenuhnya semua Perangkat Desa Sorogaten bisa menjalankan IT maka sangat perlu diadakan Pelatihan
45	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Timur Dk Keden (Srorogaten) sampai Barat Dk Kopat (Gedong Jetis), Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	akses jalan Tani Penghubung Desa Sorogaten ke Desa Gedongjetis Berupa tanah sehingga di musim penghujan menjadi sulit di lewati
46					

47	Pembangunan Jembatan di Jalan Kabupaten	Selatan Kantor Balai Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembangunan Jembatan di Jalan Kabupaten	1 buah	Jembatan sudah tidak layak dan desa tidak sanggup membiayai pembangunan jembatan tersebut
48	Pengolahan Sampah 3R	Lapangan Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pengolahan Sampah 3R	1 unit	Tidak adanya pengelolaan sampah di Desa Sudimoro
49	Pembinaan Bank Sampah	Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembinaan Bank Sampah	50 peserta	Kurang pembinaan tentang pengelolaan sampah yang ada di Rumah tangga dan Lingkungan sekitar
50	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Dam Sudimoro I, Selatan Dk. Malangsari s/d Barat Dk. Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	Rusaknya Saluran Irigasi, dan terhambatnya pengairan ke Lokasi Pertanian
51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dam Sudimoro II, Barat Dk. Malangsari s/d Barat Dk. Maduan, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	40 ha	Rusaknya Saluran Irigasi dan Terhambatnya Pengairan Sampai Ke Lokasi Pertanian
52	Pembinaan Kelompok Tani	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pembinaan Kelompok Tani	30 org	kelompok tani perlu pembinaan guna meningkatkan peran aktif petani dalam berbagai kegiatan yang mendukung usaha tani bersam
53	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Belum ada alsintan yang memadai guna mendukung pertanian
54	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	1 paket	Keluarga miskin dan penyandang disabilitas belum terampil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam waktu kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten ***"Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera".*** Peranan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tulung adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa
   Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan E-KTP.
b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Tulung berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-2 (dua), yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan sebagai yaitu:

"meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan"

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran Kecamatan Tulung tahun 2021-2026 yakni :

"Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan"

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada penuntasan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan potensi lokal.

Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023.

Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2022 juga mempertimbangkan prioritas nasional dalam RPJMN 2019 – 2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada ***Tabel 4.1 (terlampir)***

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,336,117,000**					**3,362,182,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,899,055,000**					**2,928,471,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,000,000**					**7,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen LKjiP tersusun	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,584,690,000**					**2,586,390,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	19 Orang	100 %	2,565,190,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,565,190,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Bulan	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	16,200,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	Tepat waktunya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**61,700,000**					**66,700,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia kantor tersedia	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Kali	100 %	8,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,700,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tepat waktunya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	100 Kali	100 %	33,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	33,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**22,185,000**					**40,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang diadakan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Terpelihara/ Terehabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Unit	100 %	15,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	32,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162,980,000**					**166,692,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Surat Terkirim	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1145 Eksemplar	100 %	6,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	9,692,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan istrik yang terbayar	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Bulan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	16,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	Tepat waktunya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	6 Orang	100 %	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	141,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,500,000**					**61,689,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpelihara serta Pajak dan Perijinannya terbayar	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Unit	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	22,600,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi /Terpelihara	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	14,089,000
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Terpelihara/ Terehabilitasi	Tepat waktunya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Unit	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	10,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**2,975,000**					**2,965,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								**2,975,000**					**2,965,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Terfasilitasinya Pelayanan Publik (PATEN) kepada masyarakat	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	3 Jenis	100 %	2,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100.00 %	2,965,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**203,261,000**					**217,876,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**203,261,000**					**217,876,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terkoordinasinya desa dalam Kegiatan pemberdayaan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 %	18 Desa	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	15,500,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Terkoordinasinya desa dalam Kegiatan pemberdayaan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 %	18 Desa	100 %	188,261,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	202,376,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**111,050,000**					**110,667,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**100,050,000**					**99,667,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Dilakukannya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	12 Kegiatan	100 %	94,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	93,667,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dilakukannya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	3 Kegiatan	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	6,000,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**11,000,000**					**11,000,000**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	4 Kegiatan	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	11,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**24,788,000**					**14,822,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**24,788,000**					**14,822,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	1 Kegiatan	100 %	14,788,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	14,822,000
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Desa yang tertangani komflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan	Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	18 Desa	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**94,988,000**					**87,381,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**94,988,000**					**87,381,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Desa	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	umlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Des	100 %	11,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	12,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Desa	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	8,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangka Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Desa	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	10,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Desa	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	0
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Rekomendasi	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	5,000,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Desa	100 %	43,188,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	42,381,000
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Dilakukannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	18 Kegiatan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	2,000,000
												TOTAL	**3,336,117,000**					**3,362,182,000**

BAB V

PENUTUP

5. 1 Catatan Penting yang perlu mendapat perthatian

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode tahun 2023 sebagai upaya meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2023 ini disusun untuk menjamin sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang selanjutnya dipedomani pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang lebih baik.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Tahun 2023 menjadi dasar/landasan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 yang dalam hal pentahapan penyusunannya bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Sebagai upaya menjamin keselarasan antar dokumen, perlu ditempuh langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Pemerintah Daerah bersama seluruh Perangkat Daerah dan semua masyarakat/stakeholder/pemangku kepentingan berkewajiban mendukung dan turut berpartisipasi dalam penentuan arah pembangunan yang ingin dicapai.
2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah, dengan memperhatikan :
   a. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 harus dijadikan acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 serta wajib melakukan harmonisasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Tahun 2021-2026 dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

b. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun dengan melakukan pendekatan pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja pembangunan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbasis pada indikator kinerja pencapaian tujuan pada masing-masing urusan bidang

   penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian kinerja periode sebelumnya dan isu strategis serta permasalahan pembangunan yang ada.

c. Dalam hubungan dengan kerangka keuangan daerah, kedudukan RKPD Kabupaten Klaten merupakan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dalam hal ini Renja Perangkat Daerah menjadi dasar perumusan dan penentuan pagu indikatif/pendanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah wajib merumuskan prioritas pada masing-masing perangkat daerah dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 dalam upaya pencapaian target sasaran dirumuskan ke dalam tema RKPD Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal” sehingga penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah diarahkan pada pencapaian tersebut. Keberhasilan pembangunan daerah melalui pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam program pembangunan akan dapat dicapai secara optimal diperlukan dukungan penuh dari semua pihak bersama masyarakat. Selain itu,

keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap, mental dan semangat serta tekad keinginan untuk ***Maju, Mandiri dan Sejahtera***.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,605,687,000**					**3,362,182,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,252,364,815**					**2,928,471,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,331,450**					**7,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	5 Dokumen	100 %	1,681,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	5,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	100 %	1,650,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,979,040,100**					**2,586,390,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	19 Orang/bulan	100 %	1,976,686,100	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	2,565,190,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	20 Laporan	100 %	1,354,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	4,000,000
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**35,800,000**					**66,700,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	25,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	12 Laporan	100 %	17,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,700,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Laporan	100 %	7,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	33,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**51,500,000**					**40,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Unit	100 %	26,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	8,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	8 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	32,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,223,265**					**166,692,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	2 Laporan	100 %	5,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	9,692,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Laporan	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	16,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan urusan pemerintah daerah tepat waktu	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	15 Laporan	100 %	98,647,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	141,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,470,000**					**61,689,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	6 Unit	100 %	59,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	22,600,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	4 Unit	100 %	2,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100.00 %	15,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,837,400**					**2,965,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**1,837,400**					**2,965,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya masyarakat yang membutuhan pelayanan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	100.00 %	1 Laporan	100 %	1,837,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100.00 %	2,965,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**83,662,570**					**217,876,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**83,662,570**					**217,876,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 %	6 Lembaga	100 %	6,581,070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	15,500,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 %	5 Laporan	100 %	77,081,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	202,376,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**88,175,500**					**110,667,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**80,393,750**					**99,667,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terkoordinasinya kententraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	12 Laporan	100 %	78,702,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	93,667,000
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terkoordinasinya kententraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	3 Laporan	100 %	1,691,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	6,000,000
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**								**7,781,750**					**11,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terkoodinasinya Penegakan Perundang-Undangan yang dilakukan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	1 Laporan 0 Laporan	100 %	7,781,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	96.00 %	11,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**107,605,700**					**14,822,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**107,605,700**					**14,822,000**
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	695 Orang	100 %	97,605,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	14,822,000
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	96.00 %	1 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	96.00 %	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**72,041,015**					**87,381,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**72,041,015**					**87,381,000**
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	4,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	8,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	5,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	12,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	8,000,000
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	1,747,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	10,000,000
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	0
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	1,416,215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	5,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN TULUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	3 Dokumen	100 %	35,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	42,381,000
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya desa yang dilakukan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kab. Klaten, Tulung, Semua Kelurahan	95.00 % 97.00 %	1 Dokumen	100 %	1,188,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	95.00 % 97.00 %	2,000,000
												TOTAL	**2,605,687,000**					**3,362,182,000**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tulung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan			Target program, kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	**Urusan Unsur Pemerintahan**									
7.01	**Bidang Urusan Kecamatan**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	25		12	12	100%	5	90%	99%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		-	-	-	2	80%	99%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19		12	12	100%	19	100%	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	12							
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20					4	50%	35%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5					1		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10		20	20	100%	2	100%	45%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25					5	20%	17%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500		12			100	0%	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10		-	-	-	2		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25		7	6	86%	5		
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5725		4000	3997	100%	1145	61%	63%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		1	1	100%	12	8%	16%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6		12	12	100%	6	100%	35%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12		6	5	83%	12	8%	1%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25		1	1	100%	5		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2		6	6	100%	0	50%	20%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1							
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15					3	100%	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	95%					93%		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	100%					100%		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18					18	100%	69%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		18	18	100%	18	100%	18%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	97%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60		18	18	100%	12	50%	22%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15		18	18	100%	3		
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5					1		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	97%		100%	100%	100%	100%		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	95%		100%	100%	100%	100%		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5					10	60%	44%

7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18					18		
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	98%		-	-	-	95%	95%	95%
		PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI						94%	94%	94%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18		18	18	100%	18	100%	36%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18		18	18	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18		18	18	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18					18	100%	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18						100%	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18					18	100%	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90		18	18	100%	18	100%	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54					18	100%	

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tulung
Provinsi/Kabupaten/Kota Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					NIHIL							

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Klaten

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tulung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2,899,055,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp 2,252,364,815**	
7.01.01. 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**Rp 7,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**	**100 %**	**Rp 3,331,450**	
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	Rp 5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 Dokumen	Rp 1,681,250	
7.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Rp 1,650,200	
7.01.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 2,584,690,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**Rp 1,979,040,100**	

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Rp	2,565,190,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	Rp	1,976,686,100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp	14,500,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20 Laporan	Rp	4,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	20 Laporan	Rp	1,354,000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp	1,000,000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**61,700,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**35,800,000**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Rp	10,000,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp	8,700,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp	17,900,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Rp	33,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp	7,900,000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Rp**	**22,185,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**51,500,000**

7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp	7,000,000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Rp	26,500,000	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp	15,185,000	Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp	25,000,000	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**162,980,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**120,223,265**	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp	6,980,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	Rp	5,576,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp	16,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp	16,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	Rp	140,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	Rp	98,647,265	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp**	**60,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara**	**100%**	**Rp**	**62,470,000**	

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Rp	18,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	Rp	59,630,000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp	2,840,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp	20,000,000	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp	-	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-Unit	Rp	12,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp	-	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**2,975,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**1,837,400**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**2,975,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Presentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100%**	**Rp**	**1,837,400**	

7.01.02.2,02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 2,975,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Rp 1,837,400	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 203,261,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**86%**	**Rp 83,662,570**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**95%**	**Rp 203,261,000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100%**	**Rp 83,662,570**	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 15,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	Rp 6,581,070	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	Rp 188,261,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	Rp 77,081,500	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 111,050,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**100%**	**Rp 88,175,500**	

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**96%**	**Rp 100,050,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan**	**100%**	**Rp 80,393,750**	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 94,050,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Rp 78,702,250	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	Rp 6,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 laporan	Rp 1,691,500	
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**96%**	**Rp 11,000,000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koodinasi penegakan perundang-undangan yang dilakukan**	**100%**	**Rp 7,781,750**	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 11,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	Rp 7,781,750	

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp**	**24,788,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**95%**	**Rp** **107,605,700**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**96%**	**Rp**	**24,788,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	**Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan**	**100%**	**Rp** **107,605,700**	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	695 Orang	Rp	14,788,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Laporan	Rp 97,605,700	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	Rp	10,000,000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	Rp 10,000,000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp**	**94,988,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**PRESENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**95%**	**Rp** **72,041,015**	
			PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	**97%**					**PRESENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**97%**		

7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp**	**94,988,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten**	**Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan**	**100%**	**Rp**	**72,041,015**	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	8,000,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	4,090,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	11,800,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Rp	5,180,000	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	2,000,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	10,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	1,747,950	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	10,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp	21,000,000	

7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp	5,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp	1,416,215	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp	43,188,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp	35,418,000	
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp	2,000,000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	Rp	1,188,850	
JUMLAH					Rp	3,336,117,000					Rp	2,605,687,000	

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (industry kecil/ Ternak/ Rumah Tangga)	Dk. Jatirejo RT. 09 RW. 03, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (industry kecil/ Ternak/ Rumah Tangga)	1 unit	Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) pada rumah pemotongan ayam (RPA) Dukuh Jatirejo, Desa Beji yang dimaksud adalah merupakan salah satu sarana untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan maupun warga sekitar, sehingga sangat perlu untuk direalisasikan.
2	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Mengingat area persawahan di Desa Beji merupakan sawah tadah hujan dan memiliki kesulitan dalam pengairan sawah saat musim kemarau dan sudah tersedianya beberapa sumber daya air baik alami maupun buatan, petani membutuhkan pompa diesel untuk mendukung pengairan sawah
3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Utara Desa Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	Jalan poros Utara Desa Beji Kecamatan Tulung sudah dalam keadaan rusak, maka perlu diadakan perbaikan
4	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Timur Dukuh Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	jalan desa yang terletak Di Timur Dk. Beji Desa Beji Kecamatan Tulung dakam keadaan rusak, maka perlu diadakan perbaikan
5	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SD N 1 Beji, Kab. Klaten, Tulung, Beji	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	4 unit	Toilet SD N Beji dalam keadaan rusak
6	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	Paten, Cokro, Tulung, Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	2 unit	Pembuatan sumur dalam untuk irigasi pertanian
7	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan UKM	30 org	Masih banyak usaha kecil menengah yang belum terorganisir
8	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	5 unit	belum ada penerangan di jalan akses ke wisata OMAC,

9	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Bencana	Desa Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pengadaan Sarana Prasarana Penanganan Bencana	1 unit	pengadaan geraji mesin untuk tim relawan tanggap bencana
10	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Belum ada Talud sungai di Dukuh Cokro yang terletak disebelah Utara OMAC sehingga mudah menyebabkan longsor
11	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Gebang, Cokro, Kab. Klaten, Tulung, Cokro	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Belum ada Talud sungai penahan banjir yang terletak di Dukuh Gebang sehingga mudah menyebabkan longsor
12	Rehabilitasi Ruang Guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	Dukuh Kajen Rt 03 Rw 01, Kab. Klaten, Tulung, Dalangan	Rehabilitasi Ruang Guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	1 ruang	Rehabilitasi Ruang Guru dan Pagar SD Negeri 1 Dalangan
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	dk daleman dan dk ngaliyan, Kab. Klaten, Tulung, Daleman	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 paket	warga kurang mampu berlangganan air bersih pdam, sehingga perlu adanya pembangunan pamsimas di dk. daleman dan dk ngaliyan agar warga dapat membayar langganan air bersih dengan harga yang terangkau
14	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	dk. mranggen, dk. manggung, dk cokrokembang, Kab. Klaten, Tulung, Daleman	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kabupaten	5 unit	kurangnya lampu jalan di desa daleman, mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan
15	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Desa gedongjetis, Kab. Klaten, Tulung, Gedongjetis	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	Rawan longsor dan debit air kurang
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Sumur Dalam Utara Dukuh Menggung Desa Gedongjetis, Kab. Klaten, Tulung, Gedongjetis	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1 unit	Warga Masih ada yang Belum Teraliri air bersih PAMSIMAS sedangkkan PAM yang ada belum mencukupi semuanya
17	Pengadaan Rambu-rambu, cermin tikung Lalu Lintas di Jalan Kabupaten	Jalan desa kemiri - pomah, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Pengadaan Rambu-rambu, cermin tikung Lalu Lintas di Jalan	6 unit	pengadaan cermin tikung 6 titik di jalan kabupaten yang berpotensi kecelakaan atau posisi jalan yang sulit..
18	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SD N 2 KEMIRI, DK. SELAP, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat	2 unit	Kamarmandi sudah tidak layak dan terlihat kumuh

19	Pembangunan rumah dinas guru SD	SD N 2 KEMIRI, DK.SELAP, Kab. Klaten, Tulung, Kemiri	Pembangunan rumah dinas guru SD	1 unit	Rumah dinas untuk guru negri baru, di karenakan ybs asli yogyakarta dan mengajar di SD N 2 KEMIRI agar bisa lebih efektif
20	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Saluran bendung Kali Ungu Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	saluran irigasi yang cukup panjang seihingga banyak saluran irigasi yang belum terbangun dengan baik, salah satunya adalah saluran irigasi bendung kaliwungu di Desa Majegan, konsdisi saat ini sudah bayak kerusakan.
21	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Saluran bendung Tejo Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	saluran irigasi yang cukup panjang seihingga banyak saluran irigasi yang belum terbangun dengan baik, salah satunya adalah saluran irigasi bendung Tejo di Desa Majegan, konsdisi saat ini sudah bayak kerusakan.
22	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	gapoktan manunggal tani Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Minimnya pekerja di bidang pertanian, sehingga petai kesulitan saat menanam padi, mohon bantuan mesin untuk tanam padi
23	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	RBM/SHG Desa Majegan, Kab. Klaten, Tulung, Majegan	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	1 paket	terbatasnya SDM dan peralatan usaha, mohon bantuan pelatiahan dan peralatan.
24	Peningkatan Jalan kabupaten	Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Peningkatan Jalan kabupaten	2 km	Di Desa Malangan terdapat 2 jalan poros Desa yang cukup panjang. Jalan poros Desa Ringin- Kuwon panjang 2 km dan Desa Pulon - Asri panjang 3 km Dengan adanya 2 jalan poros desa tersebut, desa Malangan sangat kesulitan dan terbebani jika akan melakukan pengaspalan dikarenakan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disamping itu kondisi jalan juga sudah rusak, banyak terdapat jalan yang berlubang yang mengakibatkan terganggunya dan ketidaknyamanan pengguna jalan
25	Pembinaan Bank Sampah	Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Pembinaan Bank Sampah	50 peserta	Masih banyak di wilayah kami yang melakukan pembungan sampah di sungai dan tempat-tempat umum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan bau yang mengganggu.
26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Saluran irigasi Desa Malangan, Kab. Klaten, Tulung, Malangan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	30 ha	Beberapa Jaringan Irigasi di Desa Malangan terdapat kerusakan sehingga menyebabkan kurang lancarnya proses irigasi bagi petani. Ditambah lagi jika musim kemarau tiba menyebabkan beberapa daerah pertanian di Desa Malangan tidak bisa melakukan Irigasi sehingga menyebabkan gagal panen.
27	Peningkatan Jalan kabupaten	Jalan Kayumas-Kebonpakel, Kab. Klaten, Tulung, Mundu	Peningkatan Jalan kabupaten	1 km	Sepanjang jalan Kabupaten di Desa Mundu telah rusak dikarenakan banyaknya truk galian C yang melewati jalan tersebut

28	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Dk. Tanjung RT 13 RW 06, Desa Pomah, Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	Pembangunan Betonisasi Jalan Si Bayi Tanah Kas Desa di perbatasan dengan desa Socokangsi keadaan jalan masih berwujud tanah dan sangat licin saat hujan dan sulit di akses oleh warga.
29	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dk. Tanjung RT 13 RW 06, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	300 m	Pembangunan Talud Selatan Dk. Tanjung di jalan perbatasan antara Dk. tanjung dengan desa Socokangsi yang masih tanah dan tidak memiliki bahu jalan yang kokoh sehingga membutuhkan pembangunan talud jalan supaya bahu jalan tidak terkikis oleh air
30	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Dk. Randusari RT 08/ RW 04, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Kab. Klaten, Tulung, Pomah	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	Pembangunan Talud Jalan Timur Dk. Randusari karena kanan dan kiri jalan belum terdapat bahu jalan yang dapat menahan air hujan yg masuk ke jalan sehingga menyebabkan jalan menjadi mudah rusak karena air yang masuk kejalan
31	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	BUMDES wahana cipta desa pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	10 ekor	untuk mengembangkan usaha BUMDES dibidang peternakan
32	Bantuan Benih Ikan Lele, Nila untuk Pokdakan	BUMDES WAHANA CIPTA Desa Pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan Benih Ikan Lele, Nila untuk Pokdakan	2 kelompok	untuk meningkatkan kemajuan BUMDES dibidang pertanian
33	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	Dk. Kwanggan, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Bantuan bibit ternak kepada kelompok ternak (domba)	1 kelompok	untuk menambah modal BUMDES Desa pucangmiliran dibidang peternakan kambing
34	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	Bendungan DAM Pepen Pucangmiliran, Kab. Klaten, Tulung, Pucangmiliran	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, Waduk dan Bendung	2000m	Kurang lancarnya pengairan untuk pertanian karena bendungan tersumbat perlu perbaikan
35	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	jl.jatinom -mundu km04, dk.sidorejo, desa sedayu, Kab. Klaten, Tulung, Sedayu	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	200 m	saluran air tidak ada sehingga sampah kejalan raya
36	Pembangunan ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	SDN 02 SEDAYU , KEC.TULUNG, KAB.KLATEN, Kab. Klaten, Tulung, Sedayu	Pembangunan ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat	1 ruang	ruang kelas rusak karena bocor dan dinding keropos
37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	selatan Dk Wajong(Sudimoro)sampai Utara Dk Ketitang Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	40 m	Saluran Irigasi dari utara dukuh Wajong Kulon (Sudimoro) sampai Utara Dukuh Ketitang (Sorogaten) banyak yang bocor

38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Utara wajong Wetan sampai Utara Dk Randusari , Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	25 ha	Saluran Irigasi Utara Dk WajongWetan (Sudimoro) samapai UtaraDk Randusari (Sorogaten) Banyak yg rusak dan bocor (debit air berkurang banyak
39	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	timur Dk Keden (Sorogaten) sampai Barat Dk Kopat (Gedongjetis), Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	400 m	jalan usaha tani yg masih berupa tanah pada musim penghujan sering longsor maka perlu di bangun talud jalan usaha tani
40	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sistem Informasi	Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sistem Informasi	1 paket	Masih minimnya jaringan internet di desa , padahal sekarang banyak sekali kebutuhan masyarakat dengan mengunakan Jaringan intternet khusus nya anak sekolah di perlukan Adanya Fasilitas Internet Desa
41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	dari dam Utara Dk Kemiri Desa Sorogaten sampai Saluran irigasi di Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	50 ha	Banyak nya Saluran Irigasi untuk Daerah Pengairan Di desa Sorogaten yg berasal dari bendung utara Desa Kemiri yg rusak mohon perbaikan karena merupakan saluran irigasi yg mengair beberapa daerah pertanian di tiga desa selain di Daerah Sorogaten
42	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	wilayah Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	20 btg	banyaknya tanah kas desa yng masih berupa pereng dan rawan longsor maka di butuhkan penghijauan untuk mencegah longsor dan meningkatkan penghijauan di Desa Sorogaten
43	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Sorogaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Mayoritas warga desa Sorogaten adalah Petani sangat membutuhkan tersedianya alat Pertanian yang Efektif sehingga Dapat meningkatkan penghasilan Petani
44	Pembekalan Bimbingan Teknis dan Workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan	Perangkat Desa Sorgaten, Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembekalan Bimbingan Teknis dan Workshop bagi Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan	1 kades	Masih belum sepenuhnya semua Perangkat Desa Sorogaten bisa menjalankan IT maka sangat perlu diadakan Pelatihan
45	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Timur Dk Keden (Srorogaten) sampai Barat Dk Kopat (Gedong Jetis), Kab. Klaten, Tulung, Sorogaten	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	100 m	akses jalan Tani Penghubung Desa Sorogaten ke Desa Gedongjetis Berupa tanah sehingga di musim penghujan menjadi sulit di lewati
46					
47	Pembangunan Jembatan di Jalan Kabupaten	Selatan Kantor Balai Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembangunan Jembatan di Jalan Kabupaten	1 buah	Jembatan sudah tidak layak dan desa tidak sanggup membiayai pembangunan jembatan tersebut
48	Pengolahan Sampah 3R	Lapangan Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pengolahan Sampah 3R	1 unit	Tidak adanya pengelolaan sampah di Desa Sudimoro

49	Pembinaan Bank Sampah	Desa Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembinaan Bank Sampah	50 peserta	Kurang pembinaan tentang pengelolaan sampah yang ada di Rumah tangga dan Lingkungan sekitar
50	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	Dam Sudimoro I, Selatan Dk. Malangsari s/d Barat Dk. Sudimoro, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Kwarter)	1 unit	Rusaknya Saluran Irigasi, dan terhambatnya pengairan ke Lokasi Pertanian
51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dam Sudimoro II, Barat Dk. Malangsari s/d Barat Dk. Maduan, Kab. Klaten, Tulung, Sudimoro	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	40 ha	Rusaknya Saluran Irigasi dan Terhambatnya Pengairan Sampai Ke Lokasi Pertanian
52	Pembinaan Kelompok Tani	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pembinaan Kelompok Tani	30 org	kelompok tani perlu pembinaan guna meningkatkan peran aktif petani dalam berbagai kegiatan yang mendukung usaha tani bersam
53	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1 unit	Belum ada alsintan yang memadai guna mendukung pertanian
54	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	Desa Wunut, Kab. Klaten, Tulung, Wunut	Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin dan penyandang disabilitas	1 paket	Keluarga miskin dan penyandang disabilitas belum terampil

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dikali Nilai Penimbang dibagi Total Unsur yang Terisi	nilai	80.05
2		Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	nilai	64.00

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Propinsi Kabupaten
Dengan Usulan Renja Tahun 2023

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS KABUPATEN KLATEN
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Tulung,
CAMAT TULUNG

HENDRI PAMUKAS, S. Sos, M. M
NIP. 19770618 199603 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WEDI

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0272) 321406 Wedi

(57461)

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat serta bimbingan sehingga kami dapat menyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai tindak lanjut (penyempurnaan) hasil koreksi Bappeda Kabupaten Klaten terhadap Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi sebelumnya. Merupakan pedoman dan acuan untuk Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan Program Kegiatan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten di Tahun 2023 yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/075/31 tanggal 24 Desember 2021 yang selanjutnya untuk deadakan koreksi kembali sebelum ditetapkan sebgai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini dibuat semoga dapat menjadi pegangan bagi semua pihak untuk memberikan koreksi maupun saran masukan ke arah yang positif demi kemajuan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Wedi. Dan bisa kami susun Rancangan Akhir ini menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja Kecamatan Wedi Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Klaten, Juli 2022.

CAMAT WEDI

RIZQAN IRYAWAN, AP, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741117 199412 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
Cover……			
Kata Pengantar ……			i
Daftar Isi ……			ii
Daftar Tabel ……			iii
Daftar Lampiran……			iv
BAB I	PENDAHULUAN ……		I-1
	1.1	Latar Belakang ……	I-1
	1.2	Landasan Hukum ……	I-2
	1.3	Maksud dan Tujuan ……	I-5
	1.4	Sistematika Penulisan……	I-6
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN (2022)……		II-1
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……	II-15
	2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ……	II-17
	2.4	Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD….	II-20
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……	II-34
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……		III-1
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……	III-1
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……	III-3
BAB IV	RENCANA AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……		IV-1
BAB V	PENUTUP……		V-1
	5.1	Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian….	V-1
	5.2	Kaidah – kaidah Pelaksanaan……	V-1
	5.3	Rencana Tindak Lanjut ……	V-1

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Uraian	Halaman
1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Dengan Tahun 2021 Kabupaten Klaten	II-7
2.	Tabel 2.2	Realisasi Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Kecamatan Wedi Tahun 2021	II-16
3.	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	II-22
4.	Tabel 2.5	Review Rancangan SKPD Tahun 2023 Kecamatan Wedi	II-35
5.	Tabel 3.1	Persandingan Antara Prioritas Nasional, Propinsi, Kabupaten dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2023	III-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud wajib memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: a. persiapan penyusunan, b. penyusunan Rancangan awal, c. penyusunan rancangan akhir, d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, e. perumusan rancangan akhir, dan f. penetapan.

Memedomani Pasal 126 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Rencana Kerja (Renja) (Renja) Perangkat Daerah yang dibuat berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan.

Rencana Kerja (Rencana Kerja (Renja)) Perangkat Daerah Tahun 2023 memasuki tahun ke-tiga dari Renstra Kecamatan Wedi Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu dan Renstra Kecamatan Wedi Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan dampak Pandemi Covid – 19 di Kabupaten Klaten, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan akhir RKPD.

Rancangan akhir RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan akhir RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Mempedomani Pasal 84 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah wajib disempurnakan melalui mekanisme konsultasi publik dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan. Selanjutnya hasil pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dalam hal memastikan kesesuaian Rencana Kerja (Renja) (Renja) Perangkat Daerah dengan Rancangan akhir RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2023 berdasarkan ketentuan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
49. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Klaten.
50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1) Memberi acuan/bahan bagi TAPD untuk mengadakan pembahasan /penyempurnaan dalam penyelarasan penyusunan RKPD Tahun 2023;
2) Memberi bahan/acuan TAPD penyusunan penganggaran Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2023;
3) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi Kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
5) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
6) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
7) Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berpedoman Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2022, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2021)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
5.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Wedi Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Kecamatan Wedi telah mengadakan evaluasi dari Pelaksanaan kinerja Tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja Tahun berjalan (2022), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2026 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021, sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Dengan adanya pandemi Covid – 19 di wilayah Kabupaten Klaten, menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena refokusing anggaran yaitu :

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (0).
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (30 %).

b. Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target :
Hampir semua program/kegiatan dapat memenuhi target yang telah direncanakan meliputi 5 (lima) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) sub kegiatan, antara lain :

Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Wedi Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Prosentase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wedi yang ditunjang**	**100**	**100**	**100%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	100	100	100%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	12	12	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	100	100	67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1. Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran** **2. Persentase Sarana dan Prasarana kondisi baik**	100	100	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12	12	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta jenis ATK tersedia	39	39	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan	1	1	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	3	3	100%
	Fasilitasi Kunjunan Tamu	Makanan dan minuman Tersedia	345	346	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	5	3	60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	100	100	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terbeli	26	26	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275	275	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar	3	3	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL Tenaga Administrasi dan Kebersihan	3	3	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah terpelihara**	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara	10	9	90%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Gedung Kantor Terpelihara	1	1	99%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah THL Pengaman Kantor	2	2	98%
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	**100**	**100**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	100	100	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	6	100%
III	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	**100**	**100**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Desa yang upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumnya terkoordinasi**	**100**	**100**	**100%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan	Kegiatan Koordinasi Trantibum	**14**	**14**	**100%**

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Trantibum	**4**	**4**	**100%**
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi dan terselenggara**	**100**	**100**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Desa yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	100	100	100%
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan Koordinasi Tapem	14	14	100%
V	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	**100**	**100**	**100%**
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase pemerintah Desa yang terbina dan terkoordinasi**	100	100	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan Fasilitasi Tapem	10	10	100%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa Terfasilitasi Lomba	19	0	0%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Desa Lunas PBB	2	2	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa	12	0	0%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertirtiban Umum]	Kegiatan Fasilitasi Trantibum	4	4	100%

c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja :
Program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan tidak ada. Hampir semua memenuhi target.

d. Faktor penyebab tidak tercapainya target :
Program/kegiatan di Tahun 2021 telah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian agar pelaksanaan program/kegiatan semakin meningkat, antara lain :
1) Masih adanya Pandemi Covid – 19 di Wilayah Kabupaten Klaten, menyebabkan kebutuhan penanggulangan pandemi masih dibutuhkan di Tahun 2023.
2) Adanya Regulasi dan Pergeseran Kebijakan, karena masih ada kegiatan yang jadwal maupun pelaksanaanya menyesuaikan dengan kegiatan dan jadwal waktu dari tingkat Kabupaten. (Misalnya Pengisian Perangkat Desa).
3) Masih kurangnya sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, misalnya Laptop, peralatan Zoom untuk meeting, kendaraan dinas bagi pejabat struktural. dll.

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah :
Target Capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dikarenakan adanya penyesuaian dengan Regulasi yang berlaku, sehingga menyebabkan adanya program/kegiatan yang berubah di Tahun 2023. Atau adanya pergeseran kebijakan yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi, lebih – lebih adanya Pandemi Covid – 19 yang terjadi.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan/penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor tersebut :
1) Program/kegiatan difokuskan pada Indikator Utama (IKU).
2) Program/kegiatan diutamakan pada kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wedi.
3) Diadakan pengangkatan/penambahan THL untuk menambah tenaga demi lancarnya pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan Wedi sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja.
4) Untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana kita adakan kerja lembur, penambahan tugas atau merangkap beban tugas orang lain serta meningkatkan kerjasama dari unsur pejabat, staf maupun THL.
5) Mengalokasikan anggaran guna pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan di Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 dan Tahun 2022 masih perlu diadakan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2020 dan Realisasi Renstra Kecamatan Wedi sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana dalam ***Tabel 2.1*** sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021
Kabupaten Klaten

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD tahun 2026 (akhir periode Renstra)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renja SKPD 2022	
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalanan (n-1)/2022	tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase Urusan Pemerintah di Wilayah Kecamatan Wedi yang ditunjang**	**100**	-	100	100	**100**	100	53	**53**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun***	***100***	-	-	-	0	***100***	100	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	21	-	-	-	0	4	0	**0**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	5	-	-	-	0	1	1	**100**

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan**	***100***	-	**100**	**100**	***100***	**100**	**100**	***100***
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri	21	-	12	12	100	21	18	86
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	48	-	150	100	67	-	-	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	20	-	-	-	-	4	4	100
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	1	-	-	-	-	0	0	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran** **2. Persentase Sarana dan Prasarana kondisi baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	*46*	15	12	12	*100*	12	12	*100*
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta jenis ATK tersedia	2	6	39	39	100	2	2	100

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetak dan Penggandaan	89.000	1	1	1	100	15000	8550	57
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	3	3	3	3	100	3	3	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjunan Tamu	Makanan dan minuman Tersedia	41	-	346	346	100	7	3	43
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah	905	-	3	3	60	180	3	60
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	***100***	-	**100**	**100**	***100***	**100**	**100**	***100***
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Merbel yang diadakan	60	-	-	-	0	1	**0**	***0***
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terbeli	20	-	**26**	**26**	100	**5**	**0**	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah di Kecamatan yang tersedia**	**100**	-	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim	**1375**	**330**	**275**	**275**	100	**275**	**220**	80

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12	3	**3**	**3**	100	**12**	**6**	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5	-	**3**	**3**	100	**5**	**5**	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah terpelihara**	**100**	**-**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	Kendaraan Dinas / Operasional Terpelihara	10	-	**10**	**9**	90	**10**	**4**	40
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	33		-	-	0	17	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesen Terpelihara	25		-	-		5	0	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/Terpelihara	***1***	-	**1**	**1**	***100***	**1**	**0**	***100***
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	1	-	-	-	0	0	0	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	50	-	**2**	**2**	100	**15**	**0**	0

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBLIK (PATEN)**	**100 %**	-	-	-	**0**	**100**	**100**	**100**
7.01.02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***Perentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)***	***100 %***	-	-	-	***0***	***100***	***100***	***100***
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	-	-	-	0	2	2	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100**	**-**	100	100	**100**	100	74	**74**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***100***	-	**100**	**100**	***100***	**100**	**74**	***74***
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	19	-	-	-	0	19	19	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95	-	6	6	100	19	9	47
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Wedi yang**	**97**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**96**	**96**

		terkoordinasi								
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Desa yang upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umumnya terkoordinasi**	***100***	-	***100***	***100***	***100***	***100***	***96***	***100***
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Trantibum	60	-	14	14	100	12	8	67
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Trantibum	2	-	4	4	100	2	2	100
7.01.04.2.02	***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	***Persentase Koodinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan***	***100 %***			**-**		***100***	***0***	***0***
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25	-	-	-	0	5	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	**97 %**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**95**	**95**

		dan terselenggara								
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Desa yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah**	***100***	-	***100***	***100***	***100***	***100***	***96***	***96***
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan Koordinasi Tapem	10	-	14	14	100	2	1	50
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19	-	-	-	0	19	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Wedi yang terkoordinasi**	**98 %**	**-**	**100**	**100**	**100**	**100**	**95**	**95**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase pemerintah Desa yang terbina dan terkoordinasi**	***100***	-	***100***	***75***	***75***	***100***	***95***	***95***
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan Fasilitasi Tapem	19	-	10	10	100	19	19	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi	Desa Terfasilitasi								

	Tata Pemerintahan Desa	Lomba	19	-	19	0	100	19	0	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Desa Lunas PBB	19	-	2	2	100	19	19	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa	19	-	-	-	0	19	0	0
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19	-	-	-	0	0	0	0
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19	-	-	-	0	0	0	0
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25	-	-	-	0	0	0	0
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertirtiban Umum]	Kegiatan Fasilitasi Trantibum	19	-	4	4	100	19	19	100
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	4	-	-	-	*0*	0	0	0
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4	-	-	-	0	0	0	0

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja yang ada di OPD Kecamatan Wedi dapat dilihat pada sasaran kinerja 0PD yang ada pada Visi dan Misi Kabupaten Klaten, diantaranya yaitu :

a. Peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan otonomi daerah, pemerintahan umun, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

   Pelayanan yang dapat secara langsung diberikan kepada masyarakat, antara lain Perekaman KTP, Pembuatan KK, Pelayanan pindah/mutasi Penduduk dan legalisasi surat – surat yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.
b. Untuk pelaksanaan PATEN di Kecamatan Wedi belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih terbatas pemberian rekomendasi/pengantar kepada masyarakat untuk ditindakanjuti ke Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten.
c. Peningkatan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam membangun desa.
d. Melaksanakan event – event kebudayaan, kegiatan keagamaan, kegiatan Peringatan Hari-hari besar Kenegaraan di Tingkat Kecamatan
e. Mengikuti kegiatan sosial keagamaan, yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten.
f. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok pelayanan dapat diketahui pada ***Tabel 2.2*** sebagai berikut :

Tabel 2.2 :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WEDI

KABUPATEN KLATEN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah							Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13
1								**NIHIL**							
2															

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH :

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wedi dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan system pelayanan untuk dapat menyajikan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan sesuai dengan SOP yang ada;

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Wedi :

- Masih adanya Pandemi Covid – 19 di Wilayah Kabupaten Klaten;
- Belum semua ajuan/usulan dari Kecamatan Wedi yang dapat teralisasi dalam program kegiatan Tahun 2022, Karena keterbatasan anggaaran;
- Masih adanya Regulasi/Ketentuan yang berubah-ubah;
- Terbatasnya SDM baik jumlah maupun penguasaan IT di Kecamatan Wedi, apalagi belum semua struktural difasilitasi kendaraan dinas/operasional. Disisi lain adanya sarana prsarana yang sudah tidak/kurang berfungsi di Kecamatan Wedi (Kendaraan, Meja, Kursi);
- Keterbatasan SDM karena beberapa ASN memasuki purna tugas dan perlatan dalam pelayanan KTP;
- Perlunya peningkatan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan Wedi, khususnya jalan Kabupaten meskipun sering dibenahi, namun masih perlu ditingkatkan untuk perawatannya mengingat struktur tanah di Wilayah Kecamatan Wedi ada yang merupakan tanah mudah bergerak dan juga tergenang air. Maka perlu normalisasi saluran air yang berada disekitar jalan Kabupaten;
- Perlu Pemasangan lampu Lalu Lintas di pertigaan pasar Tugu Wedi, karena merupakan jalur alternatife dari Wonogiri ke Yogyakarta juga merupakan jalur antar Kabupaten, antar Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY;
- Perlunya peningkatan pemahaman Kepala Desa terhadap tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa, sehingga tidak terjadi penumpukan peekerjaan pada Perangkat Desa tertentu saja, yabg akan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan di Desa.

2.3.3. Dampak dari Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

Adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi akan mempengaruhi terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Pencapaian Target kurang maksimal.

Berdampak juga terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGS).

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.

a. Tantangan :

- Terbatasnya jumlah personil ASN yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- Terbatasnya sarana prasarana, seperti Laptop, camera zoom maupun kendaraan dinas dan almari arsip;
- Peralatan sering error, seperti jaringan internet/Fiwi/Server, sehingga menghambat kelancaran tugas pelayanan;
- Pelayanan perekaman maupun cetak KTP kurang maksimal, dengan peralatan yang sering trobel dan juga blanko/kepingan KTP yang diterima dari Tingkat Kabupaten sering terlambat dan sangat terbatas;
- Keterbatasan SDM yang menguasai IT, terutama petugas pelaporan dan perencanaan sehingga mempengaruhi kelancaran dan ketepatan pelaporan maupun perencanaan;
- Masih rendahnya pemahaman dan SDM Perangkat Desa dalam memahami tugas pokok dan fungsi, sehingga pelaporan maupun permintaan data – data yang diperlukan sering terlambat.

b. Peluang :

- Menambah Tenaga THL untuk membantu pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Wedi disamping juga mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada, ditunjang dengan sarana prasarana milik pribadi dari ASN Kecamatan Wedi;
- Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana di Anggaran Tahun 2023.
- Meningkatkan SDM Kecamatan Wedi untuk dapat menguasai IT dengan baik dengn mengikuti pelatihan, ditunjang dengan pemeliharaan peralatan;
- Meningkatkan Konsultasi dan Koordinasi kepada Instansi vertikal untuk memperlancar pelayanan E-KTP dan Kependudukan;

- Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tugas fungsinya;

2.3.5 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegitan prioritas Tahun yang akan direncankan, adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan.

Dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 telah dilaksanakan dalam Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan dengan adanya kegiatan MURENBANG Tingkat Kecamatan. Tetapi apa yang menjadi harapan dengan adanya Musrenbang ini belum maksimal. Karena realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan/diajukan yang dikrenakan adanya beberapa program usulan masyarakat tidak sesuai dengan program di RPJMD. Keterbatasan anggaran ditambah masih adanya Pandemi Covid – 19 sehingga program kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan. Mengingat banyaknya usulan dari masyarakat dibanding dengan anggaran yang ada, kurang memadai.

Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 di wilayah Kecamatan Wedi hasil Musrenbang Tahun 2021 ini diusulkan/diajukan dalam Daftar Usulan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Wedi Tahun 2022, dengan harapan dapat direalisasikan/dipihaki oleh SKPD teknis dan juga dapat sesuai dalam RPJMD Tahun 2022

b. Urusan Administrasi Pemerintahan.

Pada Tahun 2021 Urusan Administrasi Pemerintahan telah dapat dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinthan Desa. Namun dengan masih adanya Pandemi Covid – 19, pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan dan fasilitasi kepada Perangkat Desa kurang maksimal.

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Tahun 2021 Kecamatan Wedi dapat dilaksanakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan telah berhasil melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui

Pengembangan Industri Kecil (UMKM), Juga meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan seperti PKK.

Mendorong masyarakat untuk secara aktip dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan melalui partisipasi dalam Musrenbang Tingkat RT, Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Dengan prioritas usuln sesuai dengan hasil musyawarah dalam Musrenbang dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat umum di Wilayah Kecamatan RT, Desa maupun Kecamatan.

Masih ada beberapa catatan dikarenakan danya perubahan regulasi dan juga masih adanya Pandemi Covid – 19, sehingga dalam Penyusunan APBDES masih ada beberapa program, kegiatan yang belum sinkron dengan RPJMD Kabupaten Klaten dan harus diadakan penyesuaian dalam Perubahan APBDES yang menyebabkan pelaksanaan program kegiatan di Desa harus dilaksanakan di Triwulan terakhir, tidak sesuai dengan perencanaan awal yang akan mempengaruhi penyelesaian SPJ agak terlambat.

Tidak adanya sangsi dalam keterlambatan SPJ ADD maupun Dana Desa ini menyebabkan Desa tidak merasa beban untuk mencairan ADD maupun Dana Desa Tahun berikutnya.

d. Urusan Sosial/Ketertiban dan Ketentraman Wilayah.

Urusan Sosial dan Ketertiban serta Ketentraman Wilayah telah dapat dilaksanakan dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Wedi, namun dengan dengan masih adanya Pandemi Covid – 19, belum dapat dilksanakan secara maksimal. Karena adanya Reasionalisasi/Refokusing Anggaran dan Pengalihan/Pergeseran Anggaran untuk mendukung kegitan penanggulangan Bencna Non Alam Covid – 19 di Wilayah Kabupaten Klaten.

2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL SKPD TERHADAP KEBUTUHAN TAHUN 2023

a) Proses awal yang dilakukan untuk menentukan ajuan anggaran di Tahun 2023, diawali dengan adanya Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten, sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap Tahun Anggaran, maka untuk

meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023 perlu diadakan Review terhadap Rancangan Awal SKPD yang telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

b) Alasan Proses Review tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah dengan kebutuhan riel masyarakat (botton up) dan berdasarkan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 serta melihat kebutuhan yang akan datang dengan adanya perubahan situasi dan kondisi.z

   Review terhadap Rancangan SKPD disesuaikan dengan analisis kebutuhan dapat dilihat dalam ***Tabel 2.4 : Review Rancangan Awal SKPD Terhadap Analisis Kebutuhan***

Tabel 2.4

RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN 2023

KECAMATAN WEDI

NO	RANCANGAN AWAL SKPD						ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**		**3.140.753.000**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN**	***100***	**2.321.607.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun***	***100***	***9.000.000***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun***	***100***	***8.000.000***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Wedi	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	4 dokumen	7.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Wedi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wedi	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1 dokumen	2.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Wedi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu***	***100***	***2.768.023.000***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu***	***100***	***2.036.606.639***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wedi	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	16 Orang	2 745 023 000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Wedi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 Orang	2.034.606.639	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Wedi	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	20.000.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Wedi	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantuv	0	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	4 dokumen	3.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu***	***100***	***59.900.000***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu***	***100***	***41.610.361***	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Wedi	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	12 unit	3,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Wedi	Jumlah Paket Komponen Instalasilistrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	3,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wedi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	2 unit	15.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Wedi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.310.361	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Wedi	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	17.000 eksemplar	5.100.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Wedi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	4.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Wedi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedia	3 eksemplar	3.100.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Wedi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.100.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Wedi	Jumlah Tamu Terfasilitasi	7 kali	8.700.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 laporan	8.700.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Wedi dan Luar Kab Klaten	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 kali	25.00.0000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Wedi dan Luar Kab Klaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 laporan	12.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu***	***100***	***92.000.000***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu***	***100***	***56.000.000***	
	Pengadaan Mebel	Kec. Wedi	Jumlah Merbel yang diadakan	22 unit	57.000.000		Pengadaan Mebel	Kec. Wedi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	10.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 unit	35.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	46.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu***	***100***	***99.100.000***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu***	***100***	***106.100.000***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Wedi	Jumlah Surat terkirim	275 eksemplar	1.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Wedi	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	12 bulan	23.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	21.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Wedi	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	5 orang	75.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	83.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara***	***100***	***112.730.000***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara***	***100***	***73.290.000***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wedi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perijinannya terbayar	10 unit	70.430.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wedi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	50.690.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Wedi	Jumlah mebel terpelihara	3 unit	1.500.000		Pemeliharaan Mebel	Kec. Wedi	Jumlah mebel yang dipelihara	3 unit	1.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Peralatan Mesen Terpelihara	5 unit	3.600.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	3.600.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terehabilitasi/Terpelihara	1 unit	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	8 unit	7.200.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Wedi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	7.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBIK (PATEN)**	**100**	**9.916.000**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERFASILITASI PELAYANAN PUBIK (PATEN)**	**100**	**3.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Kec. Wedi**	**Perentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100**	**9.916.000**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Kec. Wedi**	**Perentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)**	**100**	**3.000.000**	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	2 jenis	9.916.000		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	3.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**100**	**161.122.000**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE LEMBAGA MASYARAKAT AKTIF**	**95 %**	**63.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Kec. Wedi***	***Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan***	***100***	***161.122.000***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Kec. Wedi***	***Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan***	***100***	***63.500.000***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	19 desa	19.622.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wedi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga kemasyarakatan	7.500.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 desa	141.500.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	56.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**96 %**	**156.461.000**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**	**96 %**	**117.500.000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***Kec. Wedi***	***Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diakukan***	***100***	***127.161.000***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Kec. Wedi***	***Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diakukan***	***100***	***110.500.000***	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	19 desa	19.622.000		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan Desa	19 desa	19.622.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 desa	141.500.000		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	19 desa	141.500.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase Koodinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan***	***5 kali***	***29.300.000***		***Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase Koodinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan***	***100***	***7.000.000***	

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 kegiatan	29.300.000		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian republik Indonesia	1 laporan	7.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**96 %**	**25.284.000**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE POTENSI KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN YANG TERTANGANI**	**96 %**	**20.500.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Kec. Wedi***	***Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan***	***100***	***25.284.000***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Kec. Wedi***	***Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan***	***100***	***20.500.000***	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	2 kegiatan	19.784.000		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	350 0rang	15.000.000	

			Nasional Terselenggara						Ketahanan Nasional			
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19 desa	5.500.000		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 laporan	5.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**97 %**	**119.081.000**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Wedi**	**PERSENTASE DESA YANG MENYELESAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN TEPAT WAKTU**	**97 %**	**97.500.000**	
			PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI	**95 %**	**119.081.000**				**PERSENTASE DESA TERTIB ADMINISTRASI**	**95 %**	**97.500.000**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Kec. Wedi***	***Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan***	***100***	***119.081.000***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Kec. Wedi***	***Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan***	***100***	***97.500.000***	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19 desa	6.500.000		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Wedi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 dokumen	7.000.000	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	19 desa	16.500.000		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	1 dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	19 desa	10.500.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendatagunaan Aset Desa	19 desa	10.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 desa	10.500.000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	6.500.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 desa	11.081.000		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Wedi	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 dokumen	8.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 desa	4.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	6.000.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	19 desa	4.500.000		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	3.000.000	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 rekomendasi	2.000.000		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	-	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	19 desa	55.000.000		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	7 dokumen	55.000.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga		Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 kegiatan	4.500.000		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga		Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 kegiatan	4.500.000		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 laporan	3.000.000	
					3.612.617.000						**2,623,607,000**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan kegiatan di Kecamatan Wedi tahun 2023 guna menunjang pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi dan menampung usulan dari bawah (botton up) telah dibahas dan disepakati dalam Musrenbang.

Musrenbang diawali dari Tingkat Desa untuk menampung usulan dari Tingkat RT/RW dibahas di dalam Musrenbang untuk menentukan kegiatan yang bisa didanai dari tingkat desa, baik ADD, DD maupun PAD. Sedangkan usulan kegiatan yang tidak bisa didanai di Tingkat Desa, diusulkan ke Tingkat Kecamatan untuk di bahas dalam forum Musrenbang Tingkat Kecamatan disesuaikan dengan prioritas di desa.

Usulan dari semua desa se Kecamatan Wedi ditampung didalam Musrenbang Tingkat Kecamatan untuk pembahasan. Hasil pembahasan disesuaikan dengan prioritas dan sumber dana kemudian di rekap menjadi satu usulan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Wedi.

Usulan program kegiatan tersebut merupakan prioritas kebutuhan di wilayah Kecamatan Wedi untuk dipihaki/ direalisasikan di Tahun 2023 dapat dilihat dalam ***Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Yang Merupakan Prioritas Kabupaten Klaten Tahun 2023.***

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Yang Prioritas

Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Dengkeng Rw 04	Rumah tidak layak huni, belum di pelster	1 LS	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan primer dan sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)sekunder (dari bangunan utama sampai dengan bangunan akhir)	Saluran irigasi sawah dari bendung Slegrengan	Saluran irigasi banyak sedimen sehingga banjir	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Rogogalan RT: 01/ RW: 03 Gadungan	Relawan di Desa Gadungan cukup solid selama pandemi covid-19, Relawan di Desa Gadungan ikut berpartisipasi dalam kebencanaan yang cukup banyak, seperti banjir, memberantas tawon, dan ikut serta dalam pemakaman masyarakat yang dinyatakan positif covid-19, karena alasan ini lah kami merasa perlu untuk lebih memfasilitasi para Relawan di Desa Gadungan	1 LS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

4	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kadibolo	Masih banyaknya rumah tidak layak huni di wilayah desa Kadibolo membutuhkan perhatian khusus untuk rehab RTLH	1 LS	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Pelatihan, pendampingan calon wirausaha (limbah rumah tangga)	Dk.Mijilrejo RW 05	kesadaran masyarakat pada pengelolan Limbah rumah tangga yang sangat lemah memerlukan pelatihan dan pendampingan budidaya magot dari limbahrumah tangga	1 LS	Tenaga Kerja
6	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Dukuh Ngabetan, Kab. Klaten	Perlunya Pelebaran Jembatan Jalan Kabupaten Klaten-Bayat di Dukuh Ngabetan karena sudahtidak memeadai untuk dilewati transportasi bis besar pendukung wisata menuju Makam Sunan Bayat	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Dukuh Tegal Sari RT 06 RW 03, Kab. Klaten	Jalan Kabupaten Poros Klaten - Bayat yang melintasi Dukuh Tegal Sari Desa Kadibolo mengalami rusak berat	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak	Desa Kadilanggon, Kab. Klaten	Kelompok ternak kambing didesa kadilanggon mengalami penurunan produksi pasca covid 19 dan dampak ppkm yang ternak kambingnya terpaksa dijual untuk menyambung hidup	1 LS	Sosial

9	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jl. Bayat - Gantiwarno Desa Kaligayam	Jalan Kabupaten Antar Kecamatan Bayat - Gantiwarno yang melointasi desa kami dalam kondisi rusak parah, baru sebagian saja yang telah dibangun betonisasi bertulang besi pada tahun 2019 lalu, dan belum dilanjutkan lagi. sepanjang tidak kurang 2km.	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	DK Bendan RW 13, Kab. Klaten	Rumah warga dalam kondisi tidak layak huni	1 LS	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	DK Kalitengah RT 53 RW 24	Lahan belum di talud untuk persiapan pembuatan TPS Desa agar tanah tidak longsor	1 LS	Lingkungan Hidup
12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengadaan bibit tanaman penghijauan	DK Ngirosaran RT 49 RW 22	Kurangnya lahan terbuka hijau	1 LS	Lingkungan Hidup
13	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Desa Pandes	Desa pandes selama diguyur hujan rawan mengalami bencana banjir dan tanggul longsor untuk itu diperlukan pelatihan mencegah dan mengatasi bencana berikut dengan pengadaan alat kebencanaan	1 LS	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Mayarakat miskin desa Pasung	RTLH, masih ada masyrakat miskin yang belum memiliki rumah yang layak untuk di huni	1 LS	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

15	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Antara Makam Gajahan sampai Selokan Birit	Memerlukan Saluran Drainase Karena Setiap musim Penghujan Banyak air yang menggenang	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Rehabilitasi Jalan Kabupaten	Jalan Wedi Bayat antara Kadisimo Sampai Bayat	Jalan sudah banyak yang berlobang sehingga transformasi terganggu bahkan bisa menyebabkan kecelakaan	1 LS	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	Dukuh, Rt.02, Rw.04	Desa Sudah mengelola sampah tetapi belum mempunyai tempat pengelolaan dan sarananya, Sehingga sampah haru di Tumpuk di tempat sampah	1 LS	Lingkungan Hidup
18	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Warga Desa Tanjungan	Masih banyak rumah yang tidak layak huni	1 LS	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Pelatihan budidaya ikan nila dan ikan lele, pembuatan pakan ikan alternative	Desa Trotok	Belum adanya pelatihan tenatng Pembudidayaan di Bidang Perikanan di wilayah Desa. Dengan adanya pelatihan ini sehingga dapat eningkatkan kualitas SDM tentang perikanan sehingga warga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan penghaislan tambahan.	1 LS	Kelautan dan Perikanan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurung waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Klaten ***"Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".*** Peranan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten sangat diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wedi adalah sebagai berikut :

3.1.1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat, Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan umum, Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa

Sebagai contoh : Pelayanan perekaman dan pencetakan E-KTP, Administrasi Pindah datang penduduk.

3.1.2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023 ditetapkan untuk melaksanakan prioritas dan fokus pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Untuk melihat ketersambungan/keterkaitan antara prioritas dari Pusat, Prioritas Propinsi Kabupaten dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 : Persandingan Antara Prioritas Nasional, Propinsi dan Kabupaten dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan Antara Prioritas Nasional, Propinsi, Kabupaten dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tahun 2023

PRIORITAS PUSAT	PRIORITAS PROPINSI	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM KECAMATAN
1	2	3	4
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. Tujuan

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten, tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Wedi Tahun 2021-2026 adalah : *"Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan"* dengan target capaian sebesar 83,97%.

3.2.2. Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.
Adapun Sasaran tersebut sesuai dengan Renstra Kecamatan Wedi Tahun 2021 – 2026 yaitu : "*Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan*" dengan target capaian sebesar 83,97%..

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran Tahun Kedua dari Renstra Kecamatan Wedi 2021 – 2026.

Rencana kerja (Renja) Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2023 memuat program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2023, disusun sebagai pedoman dan acuan oleh Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diadakan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan/disempurnakan dalam Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Juga sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Rancangan Program dan Kegiatan dimaksudkan sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Program dan kegiatan, Lokasi/Sasaran, Indikator Kinerja serta Pagu Indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

Rencana kerja (Renja) Dan Pendanaan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten tahun 2023 dengan perincian sebagaimana dalam ***lampiran I : Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.***

BAB V
PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pencapaian target program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala, diantaranya :

a. Masih kurangnya jumlah pegawai.
b. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya
c. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,
d. Masih adanya SDM Pegawai yang kurang menguasai IT.
e. Masih adanya pegawai yang kurang memahami tugas pokok dan fungsinya.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Agar pelaksanaan Renja Kecamatan Wedi Tahun 2023 tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya yang kami sajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Wedi sebagai berikut :

a. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi memuat program dan kegiatan Kecamatan Wedi serta pagu pendanaannya
b. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wedi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Klaten.
c. Kecamatan Wedi berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan yang dijabarkan Renja tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
d. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Wedi Tahun 2023.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT :

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Wedi merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

a. Agar segala program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan

Pelayanan kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.

b. Agar kepada semua karyawan / karyawati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi / IT yang lebih maju dan canggih.

c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Wedi, misalnya dengan penambahan Laptop, peralatan Zoom dan kendaraan dinas untuk pejabat struktural di Kecamatan Wedi.

d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna menciptakan kondusifitas, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Wedi.

e. Menambah Tenaga Harian Lepas (THL) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan Wedi.

Klaten, Juli 2022

CAMAT WEDI

RIZQAN IRYAWAN, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741117 199412 1 001

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**01**				**KECAMATAN**						**2,623,607,000**							**3,702,546,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100.00 %	**2,321,607,000**						100.00 %	**3,147,980,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	%		%	100 %	**8,000,000**						100 %	**9,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	4 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	1 Laporan	2,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	%		%	100 %	**2,036,606,639**						100 %	**2,767,450,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				21 Orang/Bulan	2,034,606,639	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	21 Orang/Bulan	2,764,450,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	2,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	4 Laporan	3,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	**41,610,361**						100 %	**54,900,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 paket	3,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	1 paket	3,000,000	KECAMATAN WEDI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,310,361	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	1 Paket	10,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	4,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	6 Paket	5,100,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3,100,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	3 Dokumen	3,100,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				7 Laporan	8,700,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	7 Laporan	8,700,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan SKPD Terkait	20 Laporan	25,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	**56,000,000**						100 %	**42,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi	2 Unit	26,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	46,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi	5 Unit	16,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu	%		%	100 %	**106,100,000**						100 %	**99,100,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Kantor Kecamatan Wedi, SKPD Terkait, ASN dan THL Kantor Kecamatan Wedi	2 Laporan	1,000,000	KECAMATAN WEDI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21,600,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Kantor Kecamatan Wedi, SKPD Terkait, ASN dan THL Kantor Kecamatan Wedi	12 Laporan	23,100,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	83,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Kantor Kecamatan Wedi, SKPD Terkait, ASN dan THL Kantor Kecamatan Wedi	18 Laporan	75,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	%		%	100 %	**73,290,000**							100 %	**175,530,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				10 Unit	50,690,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan Gedung Kantor	10 Unit	70,430,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 3 Unit	1,800,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan Gedung Kantor	0 Unit 3 Unit	1,500,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 5 Unit	3,600,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan Gedung Kantor	0 Unit 5 Unit	3,600,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan Gedung Kantor	1 Unit	95,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	7,200,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN Kecamatan Wedi dan Gedung Kantor	8 Unit	5,000,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%		%	100.00 %	**3,000,000**							100.00 %	**9,881,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%		%	100 %	**3,000,000**						100 %	**9,881,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	3,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Masyarakat	2 Laporan	9,881,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase lembaga masyarakat aktif	%		%	95.00 %	**63,500,000**						95.00 %	**196,137,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase desa yang terkoordinasi dalam kegiatan pemberdayaan	%		%	100 %	**63,500,000**						100 %	**196,137,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasy	7,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Masyarakat dan Desa Sewilayah Kecamatan Wedi	6 Lembaga Kemasy	19,637,000	KECAMATAN WEDI
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	56,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Masyarakat dan Desa Sewilayah Kecamatan Wedi	6 Laporan	176,500,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%		%	96.00 %	**117,500,000**						96.00 %	**194,458,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	%		%	100 %	**110,500,000**						100 %	**126,158,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesi di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	93,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	101,000,000	KECAMATAN WEDI

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan harmonaisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarkat				7 Laporan	17,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	25,158,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan	%		%	100 %	**7,000,000**						100 %	**68,300,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	7,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Masyarakat di wilayah Kecamatan Wedi	1 Laporan	68,300,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%		%	96.00 %	**20,500,000**						96.00 %	**25,197,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang Diselenggarakan	%		%	100 %	**20,500,000**						100 %	**25,197,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	15,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa	100 Orang	19,697,000	KECAMATAN WEDI
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	5,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa	1 Laporan	5,500,000	KECAMATAN WEDI
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa tertib administrasi Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	% %		% %	95.00 % 97.00 %	**97,500,000**						95.00 % 97.00 %	**128,893,000**	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Klaten
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%		%	100 %	**97,500,000**						100 %	**128,893,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	16,500,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	6,500,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	3 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	10,893,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	6,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	15,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	55,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	4,500,000	KECAMATAN WEDI
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,000,000	Kab. Klaten, Wedi, Kalitengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Laporan	4,500,000	KECAMATAN WEDI
										TOTAL	**2,623,607,000**							**3,702,546,000**	